

LKPJ 2022



KABUPATEN SLEMAN

**Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati
Tahun Anggaran 2022**



**BUKU I
LAPORAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**



**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ)
BUPATI SLEMAN**

**BUKU I
LAPORAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2022

SLEMAN



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sleman Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan dan disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman tepat pada waktunya. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) disusun dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sleman Tahun Anggaran 2022 disusun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. LKPJ Bupati Sleman Tahun Anggaran 2022 memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sleman Tahun Anggaran 2022 ini disusun dengan sistematika, sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab I menguraikan tentang dasar hukum, visi dan misi dan gambaran umum daerah, yaitu data geografis, jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, jumlah Aparatur Sipil Negara, realisasi pendapatan, dan realisasi belanja, serta realisasi pembiayaan.

Bab II : Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Bab II menguraikan tentang perubahan kegiatan dan alokasi pendapatan, serta pengelolaan belanja dan pembiayaan dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan.





Bab III : Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Bab III menguraikan tentang capaian perjanjian kinerja, capaian indikator kinerja program dan keluaran (*output*) kegiatan, permasalahan yang dihadapi, kebijakan strategis yang ditetapkan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2021.

Bab IV : Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Bab IV menguraikan tentang pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Sleman, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Bab V : Penutup

Bab V menyajikan ringkasan capaian indikator kinerja daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sleman Tahun Anggaran 2022 tentunya jauh dari kata sempurna baik dalam hal substansi maupun penyajian. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Sleman untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyempurnaan laporan pada tahun anggaran selanjutnya.

Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada semua pihak dan seluruh masyarakat yang telah bersama-sama dengan pemerintah daerah berpartisipasi dan mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Sleman.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sleman, 15 Maret 2023

BUPATI SLEMAN,

KUSTINI SRI PURNOMO





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GRAFIK	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
A. Dasar Hukum	I-1
B. Visi dan Misi	I-2
C. Data Umum Daerah	I-9
1. Data Geografis.....	I-9
2. Jumlah Penduduk	I-13
3. Pertumbuhan penduduk	I-16
4. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN).....	I-16
5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan.....	I-23
6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	I-26
7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan.....	I-30
8. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman	I-31
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	II-1
A. Perubahan Terhadap Kegiatan.....	II-2
B. Perubahan Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	II-5
C. Pengelolaan Belanja Daerah	II-6
D. Pembiayaan Daerah	II-8
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN.....	III-1
A. Capaian Pelaksanaan Program Dan Kegiatan.....	III-1
1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	III-1
a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.....	III-1
b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	III-16





c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	III-60
d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	III-74
e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	III-81
f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	III-89
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	III-96
a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	III-96
b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	III-104
c. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	III-112
d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	III-117
e. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	III-122
f. Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	III-130
g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	III-137
h. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	III-141
i. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	III-147
j. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	III-151
k. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	III-157
l. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	III-163
m. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	III-168
n. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	III-174
o. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	III-177
p. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	III-180
q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	III-184
r. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	III-189





3. Urusan Pemerintahan Pilihan	III-193
a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	III-193
b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	III-196
c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	III-204
d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	III-211
e. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	III-216
f. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	III-221
4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	III-224
a. Urusan Sekretariat Daerah	III-224
b. Urusan Sekretariat DPRD	III-230
5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	III-233
a. Urusan Perencanaan	III-233
b. Urusan Keuangan	III-236
c. Urusan Kepegawaian	III-243
d. Urusan Pendidikan dan Pelatihan	III-246
e. Urusan Penelitian dan Pengembangan	III-248
6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	III-252
a. Urusan Inspektorat Daerah	III-252
7. Unsur Kewilayahan	III-260
a. Kecamatan	III-260
8. Unsur Pemerintahan Umum	III-262
a. Kesatuan Bangsa dan Politik	III-262
B. Strategi dan Arah Kebijakan	III-266
C. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	III-277
BAB IV TUGAS PEMBANTUAN	IV-1
A. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Kabupaten Sleman	IV-1
B. Tugas Pembantuan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang Dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sleman	IV-1
1. Tugas Pembantuan	IV-1
a. Satuan Kerja Tanaman Pangan	IV-1
b. Satuan Kerja Hortikultura	IV-2
c. Satuan Kerja Sarana dan Prasarana Pertanian	IV-2





2.	Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan DIY.....	IV-2
a.	Dasar Hukum	IV-2
b.	Gambaran Umum.....	IV-3
c.	Capaian Kinerja BKK Dana Keistimewaan Tahun 2022.....	IV-4
d.	Permasalahan	IV-14
e.	Solusi	IV-14
3.	Bantuan Khusus Keuangan (BKK) Pemerintah DIY	IV-16
a.	Dasar Hukum	IV-16
b.	Gambaran Umum.....	IV-17
c.	Capaian Kinerja BKK Propinsi DIY	IV-17
C.	Dana Alokasi Khusus	IV-22
1.	Dinas Pendidikan.....	IV-25
2.	Dinas Kesehatan	IV-27
3.	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prambanan	IV-28
4.	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sleman.....	IV-29
5.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	IV-31
6.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	IV-34
7.	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	IV-35
8.	Dinas Lingkungan Hidup.....	IV-37
9.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu	IV-39
10.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	IV-40
11.	Dinas Pariwisata.....	IV-43
12.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	IV-45
BAB V	PENUTUP	V-1
A.	Capaian Kinerja Makro	V-1
1.	Indeks Pembangunan Manusia	V-1
2.	Angka Kemiskinan.....	V-4
3.	Angka Pengangguran.....	V-7
4.	Pertumbuhan Ekonomi	V-10
5.	Pendapatan per Kapita.....	V-13
6.	Ketimpangan Pendapatan	V-15





B. Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ..	V-16
1. Indikator Kinerja Daerah.....	V-16
2. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	V-19





DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keselarasan Misi pada RPJP Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 dengan Misi pada RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026	I-5
Tabel 1.2	Keselarasan Misi Pembangunan Nasional 2020-2024, Misi Pembangunan DIY 2017-2022 dan Misi Pembangunan Kabupaten Sleman 2016-2021	I-5
Tabel 1.3	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021	I-7
Tabel 1.4	Batas Wilayah Kabupaten Sleman	I-10
Tabel 1.5	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman	I-11
Tabel 1-6	Keluasan dan Ketinggian Wilayah Kabupaten Sleman (Hektare)	I-13
Tabel 1.7	Jumlah Penduduk Kabupaten Sleman per-Kapanewon Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022	I-14
Tabel 1.8	Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Sleman per-Kapanewon Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022	I-15
Tabel 1.9	Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	I-16
Tabel 1.10	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	I-17
Tabel 1.11	Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Perangkat Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2022	I-17
Tabel 1.12	Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Perangkat Daerah dan Usia Tahun 2022	I-19
Tabel 1.13	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Perangkat Daerah dan Tingkat Golongan Tahun 2022	I-20
Tabel 1.14	Jumlah Non-Aparatur Sipil Negara Tahun 2022	I-22
Tabel 1.15	Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Sleman Tahun 2022	I-25
Tabel 1.16	Anggaran dan Realisasi Belanja Kabupaten Sleman Tahun 2022	I-27





Tabel 1.17	Target dan Realisasi Pembiayaan Netto Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2022	I-31
Tabel 1.18	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2022.....	I-31
Tabel 2.1	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2022.....	II-4
Tabel 3.1	Perkembangan dan Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan di Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022	III-1
Tabel 3.2	Perkembangan dan Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan di Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022	III-11
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2022	III-17
Tabel 3.4	Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022	III-17
Tabel 3.5	Cakupan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2018-2022	III-20
Tabel 3.6	Distribusi Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Sleman Tahun 2022	III-22
Tabel 3.7	Angka Kematian Balita Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022 ...	III-23
Tabel 3.8	Angka Kematian Neonatal Per 1.000 Kelahiran Hidup Tahun 2018-2022	III-24
Tabel 3.9	Jumlah dan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022	III-25
Tabel 3.10	Sebaran Kasus DBD Per Kapanewon Tahun 2022	III-34
Tabel 3.11	Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2022	III-42
Tabel 3.12	Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2022	III-55
Tabel 3.13	Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022	III-61





Tabel 3.14	Perkembangan Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tahun 2018 -2022	III-64
Tabel 3.15	Penggunaan Lahan di Kabupaten Sleman Tahun 2018-2021	III-65
Tabel 3.16	Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022	III-67
Tabel 3.17	Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Tahun 2022 Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	III-72
Tabel 3.18	Capaian Indikator Kinerja Renstra Perangkat Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022	III-74
Tabel 3.19	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018-2022	III-75
Tabel 3.20	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018-2022	III-77
Tabel 3.21	Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022	III-82
Tabel 3.22	Capaian Indikator Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2017-2022	III-82
Tabel 3.23	Kegiatan Penguatan Kapasitas Risiko Kebencanaan di Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022	III-83
Tabel 3.24	Perkembangan Data Kebencanaan di Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022	III-83
Tabel 3.25	Program dan Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022	III-84
Tabel 3.26	Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2022	III-89
Tabel 3.27	Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022	III-90
Tabel 3.28	Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2022	III-92





Tabel 3.29	Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2022	III-95
Tabel 3.30	Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2022	III-97
Tabel 3.31	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2018-2022	III-98
Tabel 3.32	Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022	III-99
Tabel 3.33	Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2022	III-101
Tabel 3.34	Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022	III-105
Tabel 3.35	Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022	III-107
Tabel 3.36	Program dan Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022	III-108
Tabel 3.37	Capaian Indikator Kinerja Renstra Perangkat Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun 2022	III-113
Tabel 3.38	Capaian Indikator Ketahanan Pangan Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022	III-113
Tabel 3.39	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun 2018-2022	III-114
Tabel 3.40	Program dan Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun 2022	III-114
Tabel 3.41	Capaian Indikator Kinerja Renstra Perangkat Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun 2022	III-117
Tabel 3.42	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun 2018-2022	III-117





Tabel 3.43	Capaian Indikator Kinerja Renstra Perangkat Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Tahun 2022.....	III-118
Tabel 3.44	Capaian Indikator Kinerja Renstra Perangkat Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Tahun 2022.....	III-122
Tabel 3.45	Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022	III-123
Tabel 3.46	Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2022.....	III-125
Tabel 3.47	Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022	III-131
Tabel 3.48	Capaian Indikator Pelayanan Kependudukan Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022	III-132
Tabel 3.49	Jumlah Layanan Kependudukan Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022	III-132
Tabel 3.50	Program dan Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022	III-133
Tabel 3.51	Permasalahan dan solusi yang dihadapi	III-136
Tabel 3.52	Capaian Indikator Renstra Perangkat Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022	III-138
Tabel 3.53	Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022.....	III-138
Tabel 3.54	Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022	III-142
Tabel 3.55	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018-2022	III-142
Tabel 3.56	Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022	III-144





Tabel 3.57	Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022	III-147
Tabel 3.58	Capaian Indikator Urusan Perhubungan di Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022	III-147
Tabel 3.59	Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun 2022	III-148
Tabel 3.60	Permasalahan dan Solusi Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun 2022	III-150
Tabel 3.61	Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2022.....	III-152
Tabel 3.62	Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2022.....	III-152
Tabel 3.63	Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2022.....	III-153
Tabel 3.64	Permasalahan dan Soslusi Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2022	III-155
Tabel 3.65	Capaian Kinerja Indikator Renstra Perangkat Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2022	III-157
Tabel 3.66	Data Perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten SlemanTahun 2018-2022	III-157
Tabel 3.67	Jumlah Koperasi di Kabupaten Sleman	III-158
Tabel 3.68	Program dan Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2022	III-159
Tabel 3.69	Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2022	III-164
Tabel 3.70	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2018-2022	III-164
Tabel 3.71	Program dan Indikator Kinerja Program pada Urusan Penanaman Modal Tahun 2022	III-165





Tabel 3.72	Permasalahan dan Solusi Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2022	III-167
Tabel 3.73	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga Tahun 2018-2022.....	III-169
Tabel 3.74	Program dan Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022..	III-171
Tabel 3.75	Permasalahan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022.....	III-169
Tabel 3.76	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2018 – 2022	III-175
Tabel 3.77	Program dan Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2022	III-175
Tabel 3.78	Permasalahan dan Solusi Urusan Pemerintahan Bidang Statistik.....	III-176
Tabel 3.79	Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Tahun 2022	III-178
Tabel 3.80	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Kabupaten Sleman Tahun 2018 – 2022	III-178
Tabel 3.81	Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Tahun 2022	III-179
Tabel 3.82	Permasalahan dan Solusi Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	III-179
Tabel 3.83	Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Urusan Kebudayaan Tahun 2022	III-181
Tabel 3.84	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun 2018-2022	III-181
Tabel 3.85	Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun 2022	III-181
Tabel 3.86	Capaian Indikator Kinerja Renstra Perangkat Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2022	III-185
Tabel 3.87	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2018-2022	III-185





Tabel 3.88	Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2022	III-186
Tabel 3.89	Permasalahan dan Solusi Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2022	III-188
Tabel 3.90	Capaian Indikator Kinerja Renstra Perangkat Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun 2022	III-189
Tabel 3.91	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun 2022	III-190
Tabel 3.92	Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun 2022	III-190
Tabel 3.93	Permasalahan dan Solusi Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun 2022	III-192
Tabel 3.94	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022	III-193
Tabel 3.95	Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2022	III-190
Tabel 3.96	Permasalahan dan Solusi Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2022	III-196
Tabel 3.97	Potensi Obyek Wisata Di Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022	III-197
Tabel 3.98	Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun 2022	III-198
Tabel 3.99	Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Tahun 2018-2022	III-199
Tabel 3.100	Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun 2022	III-199
Tabel 3.101	Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun 2022	III-204
Tabel 3.102	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun 2018-2022	III-205
Tabel 3.103	Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun 2022	III-206





Tabel 3.104	Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Tahun 2022	III-211
Tabel 3.105	Jumlah Sarana Perdagangan di Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022	III-212
Tabel 3.106	Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Tahun 2022	III-212
Tabel 3.107	Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Tahun 2022	III-215
Tabel 3.108	Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun 2022	III-216
Tabel 3.109	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun 2018-2022	III-217
Tabel 3.110	Jumlah Industri Kecil (IK) dan Industri Besar-Menengah (IBM) per Kapanewon Tahun 2020-2022.....	III-217
Tabel 3.111	Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun 2022	III-218
Tabel 3.112	Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun 2022	III-220
Tabel 3.113	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari Satu Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022	III-222
Tabel 3.114	Pengiriman transmigran dan Tujuan Transmigrasi Tahun 2022	III-223
Tabel 3.115	Permasalahan dan Solusi Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Tahun 2022.....	III-223
Tabel 3.116	Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2022	III-224
Tabel 3.117	Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2022	III-226
Tabel 3.118	Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Sekretariat DPRD Tahun 2022	III-230





Tabel 3.119	Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Perencanaan Tahun 2022	III-233
Tabel 3.120	Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Urusan Perencanaan Tahun 2022	III-235
Tabel 3.121	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022	III-237
Tabel 3.122	Capaian Indikator Urusan Keuangan Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022	III-237
Tabel 3.123	Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Keuangan Tahun 2022	III-238
Tabel 3.124	Capaian Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2017-2022	III-243
Tabel 3.125	Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Kepegawaian Tahun 2022	III-243
Tabel 3.126	Data Perkembangan Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022	III-246
Tabel 3.127	Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022	III-247
Tabel 3.128	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan	III-248
Tabel 3.129	Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022	III-249
Tabel 3.130	Capaian Kinerja Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022	III-249
Tabel 3.131	Capaian Kinerja Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Tahun 2022.....	III-250
Tabel 3.132	Capaian Kinerja Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Tahun 2022	III-250
Tabel 3.133	Capaian Kinerja kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Tahun 2022	III-251
Tabel 3.134	Capaian Indikator Urusan Pengawasan Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022	III-253





Tabel 3.135	Capaian Indikator Kinerja Program pada Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2022.....	III-254
Tabel 3.136	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK s.d. Tahun 2022.....	III-256
Tabel 3.137	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP s.d. Tahun 2022.....	III-256
Tabel 3.138	Capaian Indikator Kinerja Program pada Unsur Kewilayahan Tahun 2022	III-260
Tabel 3.139	Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2022.....	III-262
Tabel 3.140	Capaian Indikator Kinerja Program pada Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2022.....	III-263
Tabel 3.141	Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sleman Tahun Anggaran 2021	III-277
Tabel 4.1	Capaian Kinerja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan DIY Kabupaten Sleman Tahun 2022	IV-5
Tabel 4.2	Lokasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Pemda DIY (Padat Karya) Tahun 2022	IV-19
Tabel 5.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sleman Tahun 2016 – 2022	V-1
Tabel 5.2	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kota se-DIY Tahun 2016 – 2022	V-3
Tabel 5.3	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sleman Tahun 2015 –2022	V-5
Tabel 5.4	Status Keadaan Ketenagakerjaan di Kabupaten Sleman Tahun 2016-2022	V-8
Tabel 5.5	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022 (Milyar Rupiah)	V-11
Tabel 5.6	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sleman Tahun 2018-2021 (juta rupiah)	V-12





Tabel 5.7	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021 (Milyar Rupiah)	V-14
Tabel 5.8	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) per Kapita di Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021 (Ribu Rupiah)	V-14
Tabel 5.9	Rasio Gini di Kabupaten Sleman Tahun 2017-2022	V-15
Tabel 5.10	Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Sleman	V-17
Tabel 5.11	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sleman Tahun 2022	V-19





DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Persentase Luas Kapanewon terhadap Luas Kabupaten Sleman	I-12
Grafik 1.2	Persentase Penduduk Kabupaten Sleman Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022	I-13
Grafik 1.3	Jumlah KK Tahun 2016-2022 di Kabupaten Sleman (jiwa)	I-15
Grafik 1.4	Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Sleman Tahun 2016- 2022	I-16
Grafik 1.5	Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sleman Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022	I-17
Grafik 1-6	Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sleman Berdasarkan Usia Tahun 2022	I-20
Grafik 1.7	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 .	I-26
Grafik 3.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD dan SMP di Kabupaten Sleman Tahun 2017-2022	III-5
Grafik 3.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, SD, dan SMP di Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022	III-6
Grafik 3.3	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD, SD dan SMP di Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022	III-7
Grafik 3.4	Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022	III-9
Grafik 3.5	Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022	III-10
Grafik 3.6	Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022	III-17
Grafik 3.7	Perbandingan Usia Harapan Hidup Nasional, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022	III-18
Grafik 3.8	Jumlah dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022	III-22





Grafik 3.9	AFP Rate Kabupaten Sleman tahun 2018-2022	III-30
Grafik 3.10	Siklus 3 tahunan kasus DBD di Kabupaten Sleman Tahun 2010 s.d 2022.....	III-34
Grafik 3.11	Distribusi Kasus KLB Kabupaten Sleman Tahun 2022	III-40
Grafik 3.12	Perkembangan Angkatan Kerja Kabupaten Sleman Tahun 2018 -2022	III-100
Grafik 3.13	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022	III-106
Grafik 3.14	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022	III-113
Grafik 3.15	Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2022	III-124
Grafik 3.16	Pelayanan KK, KTP-el, dan KIA Tahun 2018-2022	III-133
Grafik 3.17	Jumlah Koperasi di Kabupaten Sleman	III-158
Grafik 3.18	Capaian IPO Kabupaten Sleman, DIY dan Nasional Tahun 2022	III-170
Grafik 3.19	Jumlah tenaga kerja Sektor Industri Kecil dan Industri Besar-Menengah Tahun 2017-2022	III-218
Grafik 3.20	Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017-2022.....	III-225
Grafik 3.21	Persentase Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan Tahun 2022	III-238
Grafik 3.21	Persentase Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan Tahun 2022	III-238
Grafik 5.1	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten / Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016-2022	V-3
Grafik 5.2	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se DI. Yogyakarta Tahun 2018-2022 (ribu jiwa).....	V-5
Grafik 5.3	Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota se-DI. Yogyakarta Tahun 2018-2022	V-6
Grafik 5.4	Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota se-DI. Yogyakarta Tahun 2018-2022	V-6





Grafik 5.5	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022	V-6
Grafik 5.6	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2017-2022	V-9
Grafik 5.7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Sleman Tahun 2017-2022	V-10
Grafik 5.8	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman Tahun 2017-2022 ...	V-12
Grafik 5.9	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2018-2022	V-13
Grafik 5.10	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) per Kapita Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 (Ribu Rupiah).....	V-15
Grafik 5.11	Perbandingan Rasio Gini Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022	V-16
Grafik 5.12	Perbandingan Rasio Gini Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022	V-16





BAB I PENDAHULUAN

Buku I

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Bupati Sleman**

Tahun Anggaran 2022

SLEMAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. Dasar penyusunan LKPJ Bupati Sleman tahun anggaran 2022, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;





6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022; dan
9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022.

B. Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan di bawah kepemimpinan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah serta mengacu pada kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025. RPJMD menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan RKPD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) bagi satuan kerja di dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 menyebutkan bahwa arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 merupakan strategi dan teknik pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sleman.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sleman Tahun 2021–2026 adalah ***“Terwujudnya Sleman Sebagai Rumah Bersama yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan, dan Memiliki Jiwa Gotong Royong”***.





Penjelasan dari visi tersebut adalah:

- Rumah Bersama** : Rumah Bersama memiliki makna filosofis penting dimana Sleman menjadi rumah bagi semua elemen masyarakat dengan berbagai latar belakang agama, etnik dan budaya.
- Cerdas** : Pemerintah dan masyarakatnya dapat memecahkan setiap masalah yang timbul dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki dan mampu dalam pengembangan dan pengelolaan berbagai sumber daya untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat memaksimalkan pelayanan publik serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan, yang meliputi 6 elemen yaitu: *Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Society, Smart Living, dan Smart Environment.*
- Sejahtera** : Terciptanya masyarakat yang adil makmur ditandai dengan derajat pendidikan dan kesehatan serta kondisi ekonomi masyarakat yang lebih baik.
- Berdaya Saing** : Masyarakat yang memiliki keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan di masa datang.
- Menghargai Perbedaan** : Masyarakat memiliki sikap saling menghargai, saling menghormati perbedaan dan keberagaman tanpa ada diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda.
- Memiliki Jiwa Gotong Royong** : Masyarakat yang memiliki rasa kekeluargaan, tolong-menolong, dan bekerja sama dengan sukarela untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sleman Tahun 2021–2026 akan dicapai dengan menetapkan misi. Adapun misi yang telah digariskan untuk pembangunan Kabupaten Sleman selama 5 tahun ke depan yaitu:





- Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dilakukan dengan mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi yang dilakukan bertahap dan berkelanjutan sehingga kualitas pelayanan masyarakat meningkat.
- Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau.
- Misi 3 : Membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan. Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang mengedepankan kreativitas, pengetahuan, dan ide sebagai faktor utama dalam produksi.
- Misi 4 : Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan bencana. Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi dan beradaptasi dengan tekanan seperti perubahan lingkungan, sosial, politik, atau ekonomi.
- Misi 5 : Membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terwujudnya kabupaten cerdas. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas prasarana dan sarana wilayah yang terintegrasi dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- Misi 6 : Memperkuat budaya masyarakat yang saling menghargai dan jiwa gotong royong. Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat budaya masyarakat Sleman berupa prinsip hidup yang dilandasi sikap saling menghormati perbedaan dan keberagaman serta jiwa gotong royong.



Misi dalam RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 telah mengacu dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 dan oleh karenanya terdapat hubungan yang kuat antara Misi dalam RPJPD dengan Misi dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1
Keselarasan Misi pada RPJP Kabupaten Sleman 2006-2025 dengan Misi pada RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026

Misi RPJPD 2006–2025		Misi RPJMD 2021–2026	
Misi 1	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik	Misi 1	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Misi 4	Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis		
Misi 2	Meningkatkan kesejahteraan rakyat	Misi 2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.
Misi 3	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat		
Misi 2	Meningkatkan kesejahteraan rakyat	Misi 3	Membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan
Misi 3	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat		
Misi 2	Meningkatkan kesejahteraan rakyat	Misi 4	Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan bencana
Misi 3	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat		
Misi 2	Meningkatkan kesejahteraan rakyat	Misi 5	Membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terwujudnya kabupaten cerdas
Misi 3	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat		
Misi 3	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Misi 6	Menguatkan budaya masyarakat yang saling menghargai dan jiwa gotong royong
Misi 4	Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis		

Sumber: RPJMD Kabupaten Sleman 2021–2026

Misi dalam RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 telah mengacu dan berpedoman pada Misi Pembangunan DIY 2020-2024 dan Misi Pembangunan Nasional 2020-2024 atau Nawacita Kedua. Misi pada RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 selaras dengan Misi Pembangunan DIY 2020-2024 dan Misi Pembangunan Nasional 2020-2024 (Nawacita Kedua). Keselarasan Misi Pembangunan Nasional 2020-2024, Misi Pembangunan DIY 2017-2022 dan Misi Pembangunan Kabupaten Sleman 2021-2026 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1. 2
Keselarasan Misi Pembangunan Nasional 2020-2024, Misi Pembangunan DIY 2017-2022 dan Misi Pembangunan Kabupaten Sleman 2021-2026

No.	Misi Pembangunan Nasional 2020-2024 (Nawacita Kedua)	Misi Pembangunan DIY 2017-2022	Misi Pembangunan Sleman 2021-2026
1	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Misi 1: Meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan yang berkeadilan dan berkeadaban	Misi 2: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau



No.	Misi Pembangunan Nasional 2020-2024 (Nawacita Kedua)	Misi Pembangunan DIY 2017-2022	Misi Pembangunan Sleman 2021-2026
2	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	Misi 1: Meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan yang berkeadilan dan berkeadaban	Misi 3: Membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan
3	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	Misi 1: Meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan yang berkeadilan dan berkeadaban	Misi 5: Membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terwujudnya kabupaten cerdas
4	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Misi 1: Meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan yang berkeadilan dan berkeadaban	Misi 4: Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan bencana
5	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	Misi 1: Meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan yang berkeadilan dan berkeadaban	Misi 6: Menguatkan budaya masyarakat yang saling menghargai dan jiwa gotong royong
6	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya	Misi 2: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis	Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
7	Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga	Misi 2: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis	Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
8	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya	Misi 2: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis	Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
9	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	Misi 2: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis	Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Sumber: RPJMD Kabupaten Sleman 2021–2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 juga telah menetapkan tujuan, sasaran, dan indikator sasaran yang akan dicapai sesuai dengan misi yang telah ditetapkan pada kurun 5 (lima) tahun. Tujuan, sasaran, dan indikator sasaran RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 diuraikan pada Tabel 1.3 sebagai berikut:



Tabel 1.3
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi 1		
Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Dukungan Teknologi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat		
Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
	Meningkatnya kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik	Persentase ketersediaan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang mandiri dan berkelanjutan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang mandiri dan berkelanjutan	Indeks desa membangun kategori desa mandiri
Misi 2		
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Terjangkau		
Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)
	Meningkatnya kualitas olahraga masyarakat	Indeks Pembangunan Olahraga
	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persentase organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang aktif
Misi 3		
Membangun Perekonomian yang Kreatif dan Inovatif untuk Meningkatkan Kesejahteraan		
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani
	Meningkatnya produksi sektor industri dan perdagangan	Persentase pertumbuhan nilai produksi industri
		Nilai ekspor
		Persentase sarana dan prasarana perdagangan tradisional dikelola dengan baik
	Terjaganya stabilitas harga	Persentase koefisien variasi harga antar waktu
	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata	Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara
Meningkatnya nilai investasi	Pembelanjaan Wisatawan Nusantara	
Menurunnya ketimpangan pendapatan	Menurunnya kemiskinan	Nilai investasi
		Persentase penduduk miskin
	Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	Persentase keluarga miskin
Rasio pelaku usaha mikro		
Menurunnya angka pengangguran	Meningkatnya kesempatan kerja	Rasio keanggotaan koperasi
		Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif berbasis sub sektor	Meningkatnya kapasitas SDM dan ruang ekonomi kreatif	Cakupan peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif
		Persentase cakupan ruang publik dan destinasi wisata yang dimanfaatkan sebagai ruang kreatif
Meningkatnya pengembangan inovasi daerah	Meningkatnya perlindungan terhadap inovasi daerah	Persentase inovasi daerah yang telah ditetapkan dengan keputusan dan atau peraturan lainnya
Misi 4		
Meningkatkan Ketahanan Masyarakat dalam Menghadapi Berbagai Macam Ancaman dan Bencana		
Terwujudnya ketahanan daerah	Terwujudnya ketahanan keluarga	Indeks ketahanan keluarga
	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Cakupan pengendalian gangguan ketenteraman, ketertiban, penegakan perda, dan peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat
Terwujudnya masyarakat tangguh bencana	Terwujudnya masyarakat tangguh bencana	Indeks risiko bencana
Misi 5		
Membangun Sarana dan Prasarana yang Memadai untuk Mendukung Terwujudnya Kabupaten Cerdas		
Terwujudnya peningkatan kualitas prasarana dan sarana wilayah yang terintegrasi dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai	Persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar
	Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dalam kondisi baik	Cakupan pembangunan prasarana dan sarana wilayah kondisi mantab yang mendukung pengembangan ekonomi
	Meningkatnya kualitas Air, Udara, dan Lahan	Indeks Kualitas Air
		Indeks Kualitas Udara
Meningkatnya kualitas kinerja lalu lintas dan angkutan jalan	Indeks kinerja lalu lintas dan angkutan jalan	
Meningkatnya kemampuan literasi masyarakat	Meningkatnya minat baca masyarakat	Tingkat kegemaran membaca masyarakat
Terwujudnya keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pembangunan berkelanjutan	Terwujudnya keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pembangunan berkelanjutan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
Misi 6		
Menguatkan Budaya Masyarakat yang Saling Menghargai dan Jiwa Gotong Royong		
Meningkatnya pelestarian warisan budaya	Meningkatnya pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	Jumlah Pelestarian Rincian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya
Menguatkan sikap saling menghargai di lingkungan masyarakat dan keluarga yang sadar gender	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tertangani
		Persentase anak korban kekerasan yang tertangani
Meniadakan konflik sosial	Meniadakan konflik sosial	Angka kejadian konflik sosial

Sumber: RPJMD Kabupaten Sleman 2021-2026





C. Data Umum Daerah

1. Data Geografis

Wilayah Kabupaten Sleman secara geografis terbentang mulai 110°13'00" sampai dengan 110°33'00" Bujur Timur dan 7°34'51" sampai dengan 7°47'30" Lintang Selatan. Kabupaten Sleman secara umum terbagi menjadi dua wilayah dataran, dataran rendah landai dengan dominasi persawahan di bagian selatan, dan dataran tinggi tanah kering dengan dominasi perkebunan serta memiliki permukaan miring ke selatan dengan titik tertinggi di puncak Gunung Merapi di bagian utara. Wilayah ini dialiri oleh beberapa sungai besar berhulu di Gunung Merapi dan bermuara ke Pantai Selatan seperti Sungai Progo, Krasak, Sempor, Kuning, Boyong, Winongo, Gendol, dan Opak. Selain itu, wilayah Kabupaten Sleman dapat dibedakan menurut karakteristik sumber daya, jalur lintas jalan raya, serta pusat pertumbuhan. Berdasarkan karakteristik sumber daya, Kabupaten Sleman terbagi menjadi empat wilayah yaitu:

- a. Wilayah Utara/lereng Gunung Merapi, dimulai dari jalan yang menghubungkan Kapanewon Tempel, Kapanewon Pakem, dan Kapanewon Cangkringan (*ringbelt*) sampai dengan puncak Gunung Merapi. Wilayah ini merupakan sumber daya air dan ekowisata yang berorientasi pada aktivitas Gunung Merapi dan ekosistemnya.
- b. Wilayah Timur, meliputi Kapanewon Prambanan, sebagian Kapanewon Kalasan, dan Kapanewon Berbah. Wilayah ini merupakan tempat peninggalan purbakala (*candi*) yang merupakan pusat wisata budaya, daerah lahan kering, serta sumber bahan batu putih.
- c. Wilayah Tengah, yaitu Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang meliputi Kapanewon Mlati, Kapanewon Sleman, Kapanewon Ngaglik, Kapanewon Ngemplak, Kapanewon Depok, dan Kapanewon Gamping, yang merupakan pusat pendidikan, perdagangan dan jasa.
- d. Wilayah Barat, meliputi Kapanewon Godean, Kapanewon Minggir, Kapanewon Seyegan, dan Kapanewon Moyudan, merupakan daerah pertanian lahan basah yang tersedia cukup air dan sumber bahan baku kegiatan industri kerajinan mendong, bambu, gerabah dan genteng.





Berdasarkan karakteristik jalur lintas antardaerah, kondisi wilayah Kabupaten Sleman dilewati jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi yang menghubungkan Sleman dengan kota-kota pelabuhan utama (Semarang, Surabaya, Jakarta). Jalur ini melewati wilayah Kapanewon Prambanan, Kapanewon Kalasan, Kapanewon Depok, Kapanewon Mlati, Kapanewon Tempel, dan Kapanewon Gamping. Selain itu, wilayah Kapanewon Depok, Kapanewon Mlati, dan Kapanewon Gamping juga dilalui jalan lingkar yang merupakan jalan arteri primer. Kapanewon tersebut menjadi wilayah yang cepat berkembang dari pertanian menjadi industri, perdagangan, dan jasa.

Letak geografis dan batas wilayah Kabupaten Sleman dengan kabupaten/kota lain adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
Batas Wilayah Kabupaten Sleman

Sebelah	Letak Geografis	Batas Wilayah
Utara	7°34'51" LS	Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali (Jawa Tengah)
Timur	110°13'00" BT	Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
Selatan	7°47'03" LS	Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul (Daerah Istimewa Yogyakarta)
Barat	110°33'00" BT	Kabupaten Kulonprogo (DIY) dan Kabupaten Magelang (Jawa Tengah)

Sumber: Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Sleman, 2023

Pusat pertumbuhan di wilayah Kabupaten Sleman merupakan wilayah hulu Kota Yogyakarta. Berdasar letak kota dan mobilitas kegiatan masyarakat, dapat dibedakan fungsi kota sebagai berikut:

- a. Wilayah aglomerasi perkotaan (perkembangan kota dalam kawasan tertentu) yang merupakan perkembangan Kota Yogyakarta. Wilayah perkotaan yang berbatasan dengan Kota Yogyakarta yaitu Kapanewon Depok, Kapanewon Gamping, sebagian wilayah Kapanewon Ngaglik, dan Kapanewon Mlati yang merupakan Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY).
- b. Wilayah peri-urban/sub-urban (wilayah perbatasan antara desa dan kota) yang merupakan kota kecamatan di Kapanewon Godean, Kapanewon Sleman, dan Kapanewon Ngaglik terletak agak jauh dari Kota Yogyakarta dan berkembang menjadi tujuan kegiatan masyarakat di wilayah Kapanewon sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan.



c. Wilayah fungsi khusus atau wilayah penyangga (*buffer zone*) meliputi Kapanewon Tempel, Kapanewon Pakem, dan Kapanewon Prambanan yang merupakan pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya.

Kabupaten Sleman terdiri atas 17 kapanewon, 86 kalurahan, dan 1.212 padukuhan. Kapanewon dengan wilayah paling luas adalah Kapanewon Cangkringan (47,99 km²). Kapanewon dengan luas paling kecil adalah Kapanewon Berbah (22,99 km²). Kapanewon dengan padukuhan terbanyak adalah Kapanewon Tempel (98 padukuhan), sedangkan Kapanewon dengan padukuhan paling sedikit adalah Kapanewon Turi (54 padukuhan). Kapanewon dengan jumlah desa terbanyak adalah Kapanewon Tempel (8 kalurahan), sedangkan Kapanewon dengan jumlah desa paling sedikit adalah Kapanewon Depok (3 kalurahan).

Tabel 1.5
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman

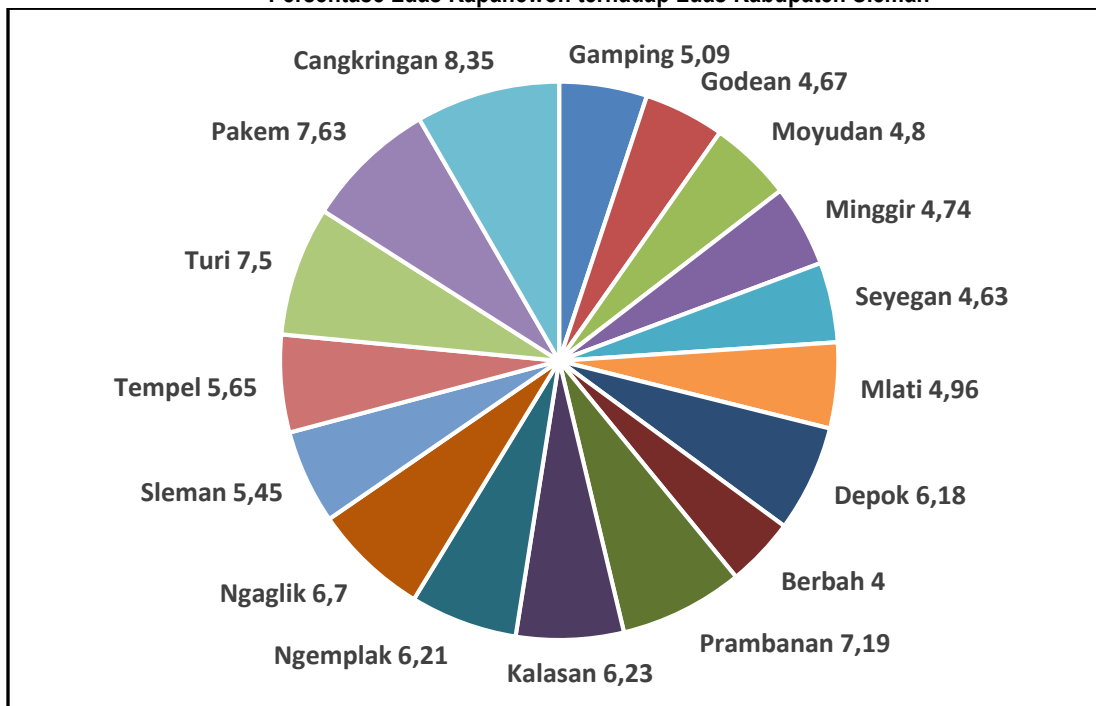
No	Kapanewon	Jumlah		Luas (Km ²)	Persentase	Jumlah Penduduk
		Kalurahan	Padukuhan			
1.	Kapanewon Gamping	5	59	29,50	5,09%	95.103
2.	Kapanewon Godean	7	77	26,68	4,67%	70.898
3.	Kapanewon Moyudan	4	65	27,62	4,80%	33.684
4.	Kapanewon Minggir	5	68	27,27	4,74%	32.449
5.	Kapanewon Seyegan	5	67	26,63	4,63%	51.984
6.	Kapanewon Mlati	5	74	28,52	4,96%	93.721
7.	Kapanewon Depok	3	58	35,56	6,18%	124.565
8.	Kapanewon Berbah	4	58	22,99	4,00%	56.449
9.	Kapanewon Prambanan	6	68	41,35	7,19%	54.624
10.	Kapanewon Kalasan	4	80	35,84	6,23%	85.210
11.	Kapanewon Ngemplak	5	82	35,71	6,21%	64.331
12.	Kapanewon Ngaglik	5	87	38,33	6,70%	100.780
13.	Kapanewon Sleman	6	83	31,19	5,45%	70.976
14.	Kapanewon Tempel	8	98	32,49	5,65%	54.739
15.	Kapanewon Turi	4	54	43,09	7,50%	37.914
16.	Kapanewon Pakem	5	61	43,84	7,63%	38.563
17.	Kapanewon Cangkringan	5	73	47,99	8,35%	31.965
	Jumlah	86	1.212	574,60	100,00%	1.097.955

Sumber: Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Sleman, 2023

Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.460 ha atau 574,60 km² atau sekitar 18,05% dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang seluas 3.185,80 km². Wilayah ini terbentang dari utara-selatan sepanjang 32 km, sedangkan dari timur-barat terbentang sepanjang 35 km. Dalam perspektif burung, wilayah Kabupaten Sleman berbentuk segitiga dengan alas di sisi selatan dan puncak di sisi utara.



Grafik 1.1
Persentase Luas Kapanewon terhadap Luas Kabupaten Sleman



Sumber: Kabupaten Sleman dalam Angka, 2023

Kondisi tanah Kabupaten Sleman di bagian selatan cenderung datar kecuali daerah perbukitan di bagian tenggara Kapanewon Prambanan dan sebagian Kapanewon Gamping. Semakin ke utara cenderung miring dan di bagian utara sekitar lereng Gunung Merapi semakin terjal. Wilayah Kabupaten Sleman berada pada ketinggian berkisar antara 100 meter sampai dengan 2.900 meter di atas permukaan air laut (dpl). Ketinggian tanah dapat dibagi menjadi 5 kelas yaitu ketinggian <250 mdpl, 250-500 mdpl, 500-1500 mdpl, 1500-2500 mdpl, dan 2.500-2.900 mdpl. Ketinggian <250 mdpl seluas 35.065,09 ha (61,00%) terdapat di Kapanewon Gamping, Godean, Moyudan, Minggir, Seyegan, Mlati, Depok, Berbah, Prambanan, Kalasan, Ngemplak, Ngaglik, Sleman, dan Tempel. Ketinggian 250-500 mdpl seluas 13.877,65 ha (24,14%) terdapat di Kapanewon Prambanan, Kalasan, Ngemplak, Ngaglik, Sleman, Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan. Ketinggian 500-1500 mdpl seluas 8.045,71 ha (14%) meliputi Kapanewon Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan. Ketinggian 1500-2500 mdpl seluas 467,389 ha (0,81%) dan ketinggian 2500-2900 mdpl seluas 26,17 ha (0,05%) meliputi Kapanewon Pakem dan Cangkringan.



Tabel 1.6
Keluasan dan Ketinggian Wilayah Kabupaten Sleman (Hektare)

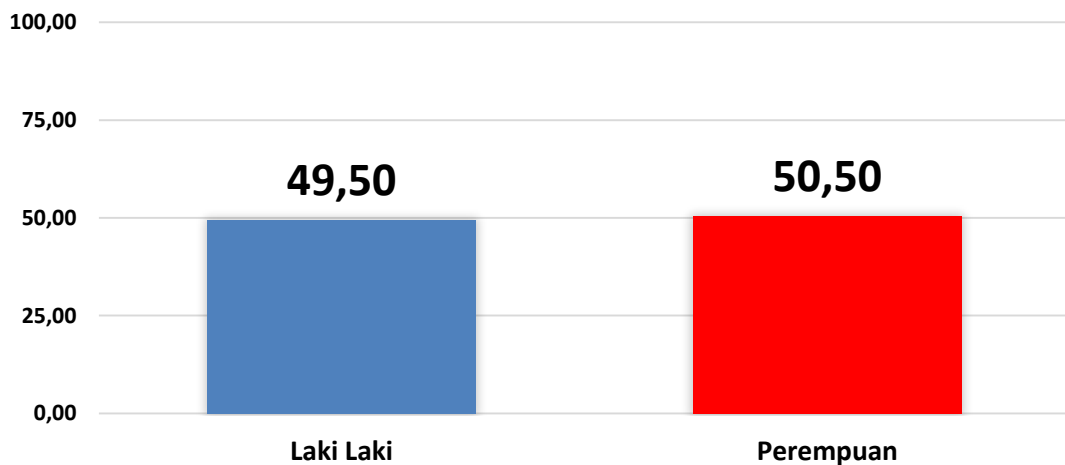
No	Kapanewon	Luas Per Jenis Ketinggian (Ha)					Total Luas (Ha)
		<250 mdpl	250m - 500 mdpl	500m - 1500 mdpl	1500 - 2500 mdpl	2500 - 2900 mdpl	
1	Gamping	2912,52	-	-	-	-	2.912,52
2	Godean	2677,35	-	-	-	-	2.677,35
3	Moyudan	2751,06	-	-	-	-	2.751,06
4	Minggir	2689,52	-	-	-	-	2.689,52
5	Seyegan	2656,42	-	-	-	-	2.656,42
6	Mlati	2843,1	-	-	-	-	2.843,10
7	Depok	3215,95	-	-	-	-	3.215,95
8	Berbah	2506,49	-	-	-	-	2.506,49
9	Prambanan	3146,12	998,88	-	-	-	4.145,00
10	Kalasan	3596,77	1,09	-	-	-	3.597,86
11	Ngemplak	1507,82	2156,26	-	-	-	3.664,08
12	Ngaglik	1773,29	2062,54	-	-	-	3.835,83
13	Sleman	1562,89	1559,8	-	-	-	3.122,69
14	Tempel	1225,79	1962,28	91,41	-	-	3.279,48
15	Turi	-	1806,34	2238,64	-	-	4.044,98
16	Pakem	-	1841,48	2542,66	247,22	13,51	4.644,87
17	Cangkringan	-	1488,98	3173	220,16	12,66	4.894,80
Total Luas (Ha)		35.065,09	13.877,65	8.045,71	467,38	26,17	57.460,00

Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, 2023

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk pada tahun 2022 berdasarkan registrasi data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) hasil konsolidasi Kementerian Dalam Negeri sampai semester 2 Tahun 2022 sebanyak 1.097.955 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 543.466 jiwa (49,50%) dan perempuan berjumlah 554.489 jiwa (50,50%).

Grafik 1.2
Persentase Penduduk Kabupaten Sleman Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023
(berdasarkan data SIAK konsolidasi dan pembersihan Kementerian Dalam Negeri Semester II Tahun 2022)



Tabel 1.7
Jumlah Penduduk Kabupaten Sleman per-Kapanewon Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022

No.	Kapanewon	Laki-laki (jiwa)	%	Perempuan (jiwa)	%	Jumlah (jiwa)	%
1	Gamping	47.245	49,68	47.858	50,32	95.103	8,66
2	Godean	35.291	49,78	35.607	50,22	70.898	6,46
3	Moyudan	16.750	49,73	16.934	50,27	33.684	3,07
4	Minggir	15.793	48,67	16.656	51,33	32.449	2,96
5	Seyegan	25.774	49,58	26.210	50,42	51.984	4,73
6	Mlati	46.619	49,74	47.102	50,26	93.721	8,54
7	Depok	61.421	49,31	63.144	50,69	124.565	11,35
8	Berbah	27.913	49,45	28.536	50,55	56.449	5,14
9	Prambanan	26.973	49,38	27.651	50,62	54.624	4,98
10	Kalasan	42.161	49,48	43.049	50,52	85.210	7,76
11	Ngemplak	31.919	49,62	32.412	50,38	64.331	5,86
12	Ngaglik	49.687	49,30	51.093	50,70	100.780	9,18
13	Sleman	35.130	49,50	35.846	50,50	70.976	6,46
14	Tempel	27.094	49,50	27.645	50,50	54.739	4,99
15	Turi	18.894	49,83	19.020	50,17	37.914	3,45
16	Pakem	18.987	49,24	19.576	50,76	38.563	3,51
17	Cangkringan	15.815	49,48	16.150	50,52	31.965	2,91
	Jumlah Total	543.466	49,50	554.489	50,50	1.097.955	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

(berdasarkan data SIAK konsolidasi dan pembersihan Kementerian Dalam Negeri Semester II Tahun 2022)

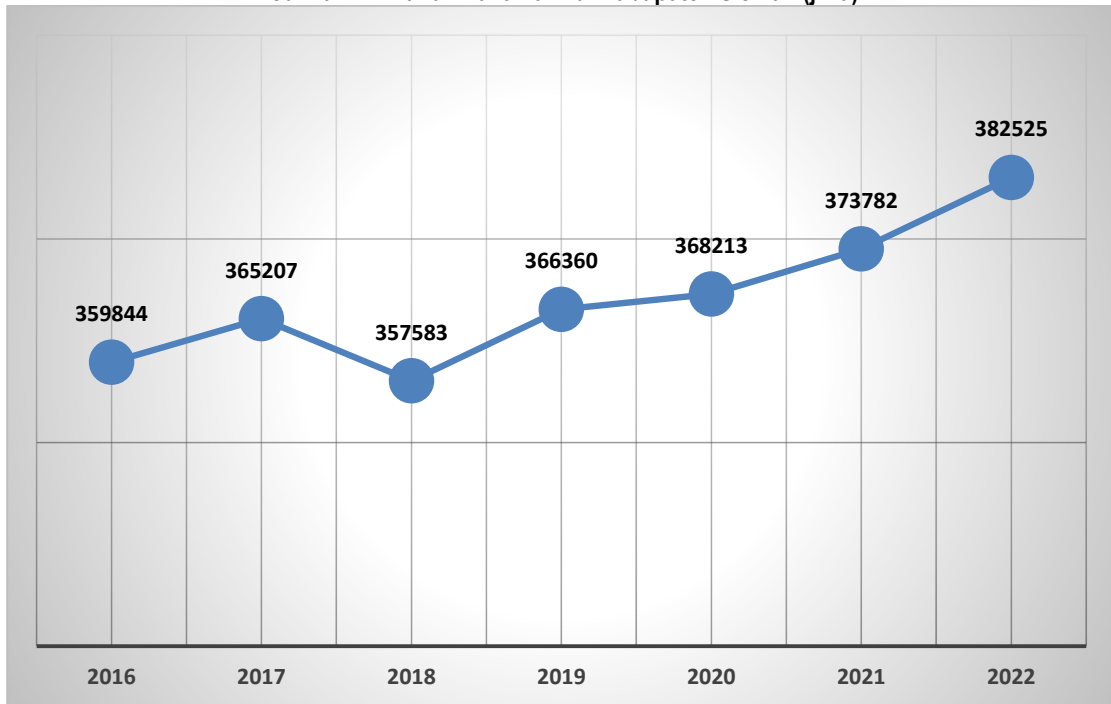
Kapanewon dengan penduduk terbanyak berada di Kapanewon Depok sejumlah 124.565 jiwa atau 11,35% dari total penduduk Kabupaten Sleman dan jumlah penduduk terendah berada di Kapanewon Cangkringan sejumlah 31.965 jiwa atau 2,91% dari total penduduk Kabupaten Sleman. Namun perlu menjadi perhatian bahwa Kabupaten Sleman sebagai kabupaten tempat berdomisilinya perguruan tinggi negeri dan swasta, berdampak banyaknya pendatang/mahasiswa di wilayah Kabupaten Sleman yang secara administratif tidak tercatat sebagai penduduk.

Jumlah kepala keluarga di Kabupaten Sleman pada tahun 2022 mengalami kenaikan 8.743 KK atau 2,34% dari sejumlah 373.782 KK pada tahun 2021 menjadi sejumlah 382.525 KK pada tahun 2022. Sedangkan rata-rata jumlah anggota keluarga dalam setiap keluarga sebanyak 2,84 jiwa per KK pada tahun 2022. Rata-rata jumlah anggota keluarga di Kabupaten Sleman mengalami penurunan sebesar 2,41% dibandingkan tahun 2021 yaitu 2,91 jiwa per KK.

Pada Grafik 1.3 berikut ditunjukkan perkembangan jumlah kepala keluarga di Kabupaten Sleman dari tahun 2016 hingga tahun 2022.



Grafik 1.3
Jumlah KK Tahun 2016-2022 di Kabupaten Sleman (jiwa)



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023
(berdasarkan data SIAK konsolidasi dan pembersihan Kementerian Dalam Negeri Semester II Tahun 2022)

Pada Tabel 1.8 berikut ditunjukkan jumlah kepala keluarga di Kabupaten Sleman tahun 2022 per kapanewon menurut jenis kelamin.

Tabel 1.8
Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Sleman per-Kapanewon Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022

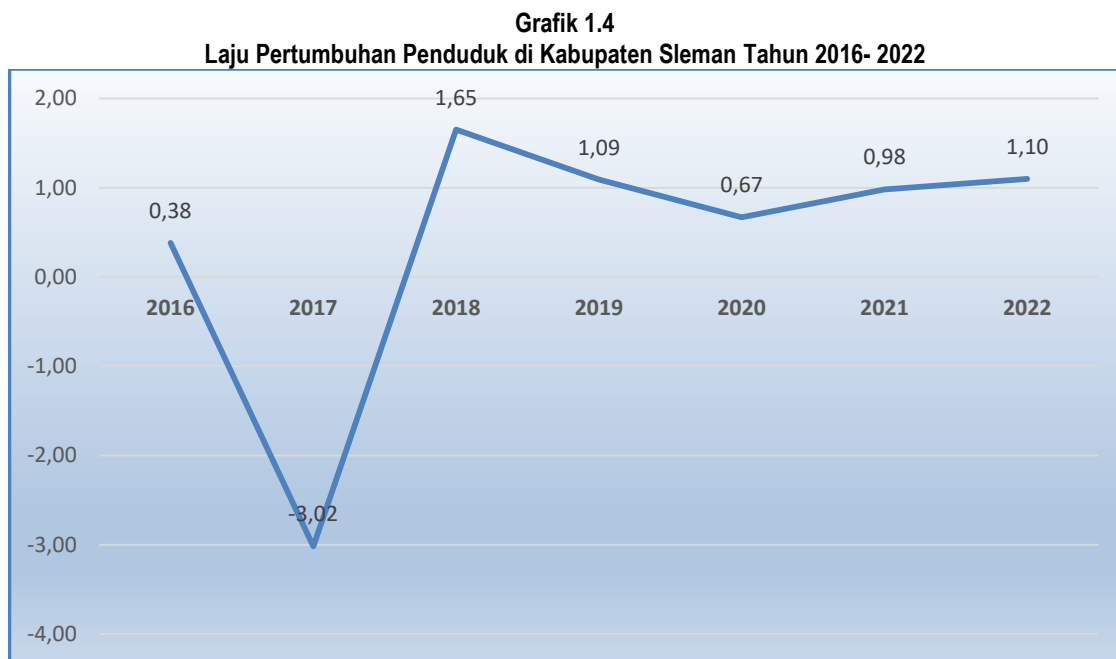
No.	Kapanewon	Laki-laki (KK)	%	Perempuan (KK)	%	Jumlah (KK)	%
1	Gamping	25.792	78,83	6.928	21,17	32.720	8,55
2	Godean	19.599	79,12	5.173	20,88	24.772	6,48
3	Moyudan	9.601	77,73	2.750	22,27	12.351	3,23
4	Minggir	9.128	76,67	2.777	23,33	11.905	3,11
5	Seyegan	14.584	79,53	3.753	20,47	18.337	4,79
6	Mlati	25.476	78,39	7.023	21,61	32.499	8,50
7	Depok	33.073	76,84	9.971	23,16	43.044	11,25
8	Berbah	15.517	78,77	4.181	21,23	19.698	5,15
9	Prambanan	15.364	79,40	3.986	20,60	19.350	5,06
10	Kalasan	23.089	78,80	6.211	21,20	29.300	7,66
11	Ngemplak	17.430	79,01	4.631	20,99	22.061	5,77
12	Ngaglik	26.934	78,49	7.383	21,51	34.317	8,97
13	Sleman	19.425	78,36	5.363	21,64	24.788	6,48
14	Tempel	15.291	79,24	4.006	20,76	19.297	5,04
15	Turi	10.543	80,35	2.579	19,65	13.122	3,43
16	Pakem	10.514	77,38	3.074	22,62	13.588	3,55
17	Cangkringan	9.148	80,41	2.228	19,59	11.376	2,97
	Jumlah Total	300.508	78,56	82.017	21,44	382.525	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023
(berdasarkan data SIAK konsolidasi dan pembersihan Kementerian Dalam Negeri Semester II Tahun 2022)



3. Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sleman pada tahun 2022 sebesar 1,10%. Hal ini mengalami kenaikan sebesar 0,12 poin atau 12,24% dibandingkan laju pertumbuhan penduduk tahun 2021 sebesar 0,98%.



Sumber: Kabupaten Sleman dalam Angka, 2023

4. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pemerintah Kabupaten Sleman didukung oleh 8.923 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari 8.013 atau 89,80% adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 910 atau 10,20% adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). ASN laki-laki berjumlah 3.022 atau 33,87%, dan ASN perempuan berjumlah 5.901 atau 66,13%.

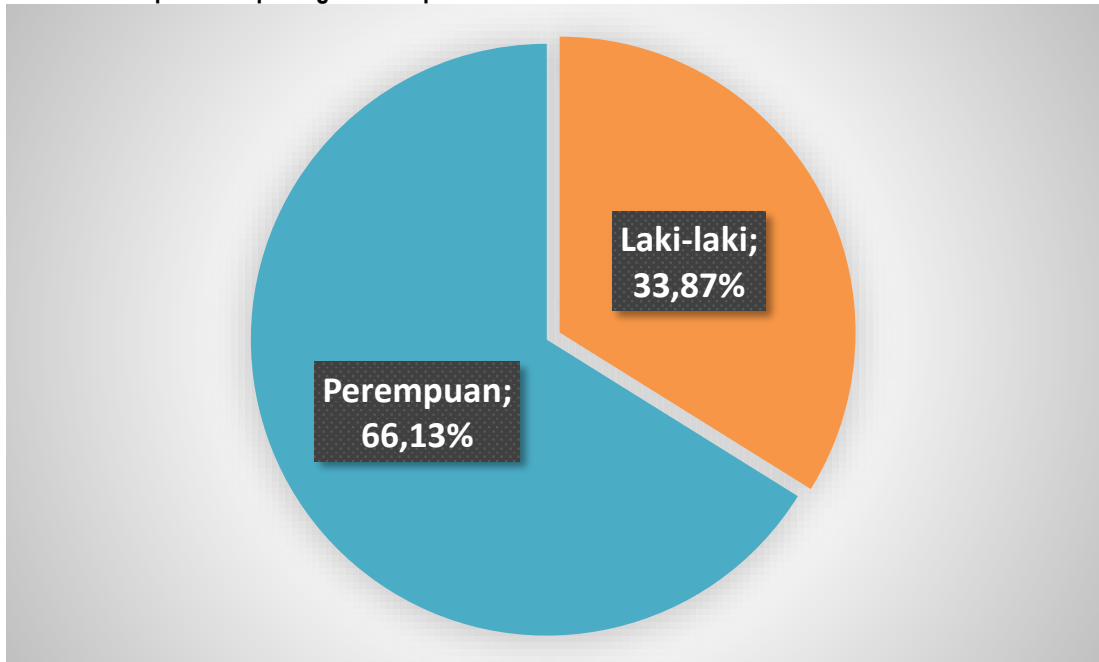
Tabel 1.9
Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Golongan ASN	Jumlah		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
PNS			
I	30	4	34
II	612	498	1.110
III	1.499	3.427	4.926
IV	607	1.336	1.943
PPPK			
V	11	-	11
VII	6	15	21
IX	257	621	878
Jumlah Total	3.022	5.901	8.923

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan, 2023



Grafik 1.5
Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sleman Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022



Sumber: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, 2023

Tabel 1.10
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

No.	Tingkat Pendidikan ASN	Jumlah		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	SD/Sederajat	25	3	28
2	SMP/Sederajat	96	12	108
3	SMA/Sederajat	714	348	1.062
4	D I – D III/Sarmud	337	1.086	1.423
5	D IV/Sarjana Strata 1	1.536	4.087	5.623
6	Sarjana Strata 2	314	365	679
	Jumlah Total	3.022	5.901	8.923

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan, 2023

Tabel 1.11
Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Perangkat Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2022

No.	Nama Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Sekretariat Daerah	158	98	60
2	Sekretariat DPRD	36	24	12
3	Inspektorat	51	21	30
4	Dinas Pendidikan	4.967	1.309	3.658
5	Dinas Kesehatan	1.175	219	956
6	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	145	122	23
7	Satuan Polisi Pamong Praja	85	75	10
8	Dinas Sosial	31	16	15
9	Dinas Tenaga Kerja	67	43	24
10	Dinas Pemuda dan Olahraga	30	18	12



No.	Nama Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	32	5	27
12	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	269	156	113
13	Dinas Lingkungan Hidup	89	62	27
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	38	18	20
15	Dinas Perhubungan	59	48	11
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	36	22	14
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	32	12	20
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	42	19	23
19	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	37	22	15
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	49	14	35
21	Dinas Pariwisata	46	30	16
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	144	109	35
23	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	67	33	34
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	54	24	30
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	86	43	43
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	29	22	7
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	34	27	7
28	Rumah Sakit Umum Daerah Sleman	457	119	338
29	Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan	157	38	119
30	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	31	16	15
31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	28	11	17
32	Kapanewon Gamping	23	12	11
33	Kapanewon Godean	21	13	8
34	Kapanewon Moyudan	22	15	7
35	Kapanewon Minggir	23	17	6
36	Kapanewon Seyegan	22	14	8
37	Kapanewon Mlati	23	16	7
38	Kapanewon Depok	24	18	6
39	Kapanewon Berbah	22	14	8
40	Kapanewon Prambanan	20	13	7
41	Kapanewon Kalasan	19	9	10
42	Kapanewon Ngemplak	18	10	8
43	Kapanewon Ngaglik	20	14	6
44	Kapanewon Sleman	21	11	10
45	Kapanewon Tempel	20	13	7
46	Kapanewon Turi	22	13	9
47	Kapanewon Pakem	22	13	9
48	Kapanewon Cangkringan	20	12	8
Total		8.923	3.022	5.901

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan, 2023





Tabel 1.12
Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Perangkat Daerah dan Usia Tahun 2022

No.	Perangkat Daerah	Umur					Jumlah
		20-30	31-40	41-50	51-55	>55	
1	Sekretariat Daerah	13	31	57	32	25	158
2	Sekretariat DPRD	2	5	12	15	2	36
3	Inspektorat	7	13	14	11	6	51
4	Dinas Pendidikan	650	1.161	760	1.175	1.221	4.967
5	Dinas Kesehatan	189	356	285	227	118	1.175
6	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	13	20	60	36	16	145
7	Satuan Polisi Pamong Praja	2	15	51	12	5	85
8	Dinas Sosial	5	5	8	7	6	31
9	Dinas Tenaga Kerja	12	13	21	9	12	67
10	Dinas Pemuda dan Olahraga	4	4	11	6	5	30
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5	3	5	15	4	32
12	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	14	38	111	66	40	269
13	Dinas Lingkungan Hidup	5	10	33	32	9	89
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	9	7	13	4	38
15	Dinas Perhubungan	3	9	21	15	11	59
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	14	9	6	2	36
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3	4	11	7	7	32
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	11	15	11	8	49
19	Dinas Pariwisata	2	2	17	18	7	46
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7	13	66	40	18	144
21	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	9	15	30	9	4	67
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9	7	21	10	7	54
23	Badan Keuangan dan Aset Daerah	10	13	30	23	10	86
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3	4	12	8	2	29
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	1	15	9	4	34
26	Rumah Sakit Umum Daerah Sleman	63	143	144	69	38	457
27	Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan	48	57	31	16	5	157
28	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	4	5	10	9	3	31
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	3	6	10	6	3	28
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	8	19	5	7	42
31	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	2	4	17	6	8	37
32	Kapanewon Gamping	1	1	11	9	1	23
33	Kapanewon Godean	0	2	7	10	2	21
34	Kapanewon Moyudan	0	2	6	5	9	22
35	Kapanewon Minggir	2	4	5	9	3	23
36	Kapanewon Seyegan	0	0	14	3	5	22
37	Kapanewon Mlati	1	3	7	9	3	23
38	Kapanewon Depok	0	5	8	7	4	24
39	Kapanewon Berbah	0	2	10	6	4	22
40	Kapanewon Prambanan	0	1	10	4	5	20
41	Kapanewon Kalasan	1	1	11	4	2	19

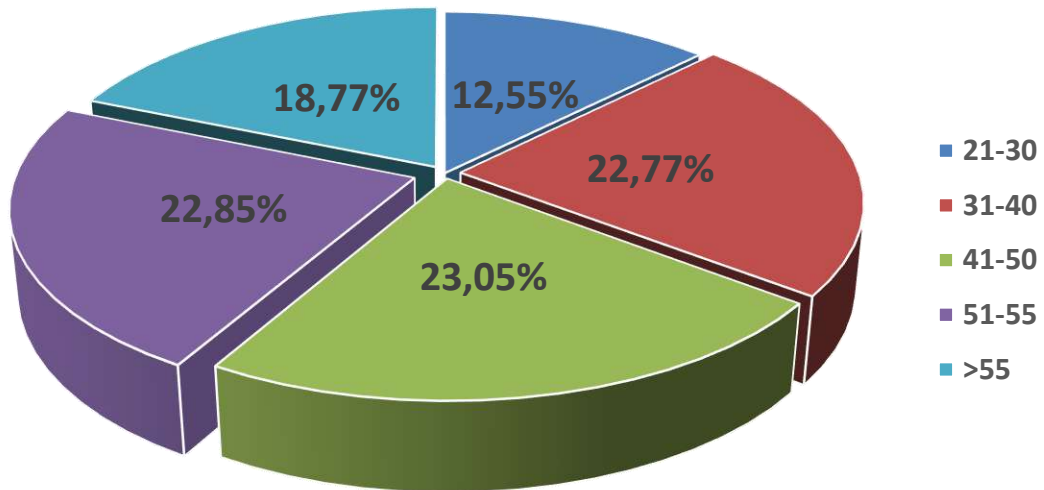




No.	Perangkat Daerah	Umur					Jumlah
		20-30	31-40	41-50	51-55	>55	
42	Kapanewon Ngemplak	1	4	4	7	2	18
43	Kapanewon Ngaglik	1	1	4	10	4	20
44	Kapanewon Sleman	1	1	9	6	4	21
45	Kapanewon Tempel	1	1	9	9	0	20
46	Kapanewon Turi	1	2	11	4	4	22
47	Kapanewon Pakem	1	2	10	6	3	22
48	Kapanewon Cangkringan	0	1	8	8	3	20
	Jumlah	1.120	2.032	2.057	2.039	1.675	8.923
	Persentase	12,55	22,77	23,05	22,85	18,77	100,00

Sumber: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, 2023

Grafik 1.6
Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sleman Berdasarkan Usia Tahun 2022



Sumber: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, 2023

Sebaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Sleman menurut perangkat daerah dan tingkat pendidikan ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1.13
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Perangkat Daerah dan Tingkat Golongan Tahun 2022

No.	Perangkat Daerah	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat Daerah	3	35	94	26	158
2	Sekretariat DPRD	0	9	20	7	36
3	Inspektorat	0	12	22	17	51
4	Dinas Pendidikan	3	124	2.582	1.414	4.123
5	Dinas Kesehatan	2	319	739	115	1.175
6	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	61	67	17	145
7	Satuan Polisi Pamong Praja	0	19	58	8	85





No.	Perangkat Daerah	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
8	Dinas Sosial	0	7	17	7	31
9	Dinas Tenaga Kerja	0	12	41	14	67
10	Dinas Pemuda dan Olahraga	0	7	18	5	30
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	6	18	8	32
12	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	3	31	139	43	216
13	Dinas Lingkungan Hidup	10	44	26	9	89
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	4	28	6	38
15	Dinas Perhubungan	1	18	31	9	59
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	7	24	5	36
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	6	19	7	32
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	11	31	7	49
19	Dinas Pariwisata	0	18	20	8	46
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7	67	54	16	144
21	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	0	6	54	7	67
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	1	33	19	54
23	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	17	52	17	86
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	5	16	8	29
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	9	17	8	34
26	Rumah Sakit Umum Daerah Sleman	1	110	286	47	444
27	Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan	0	62	77	18	157
28	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	0	4	22	5	31
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	0	4	20	4	28
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	4	30	8	42
31	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	1	11	17	8	37
32	Kapanewon Gamping	0	3	18	2	23
33	Kapanewon Godean	0	2	14	5	21
34	Kapanewon Moyudan	0	4	15	3	22
35	Kapanewon Minggir	0	6	14	3	23
36	Kapanewon Seyegan	0	5	15	2	22
37	Kapanewon Mlati	1	2	16	4	23
38	Kapanewon Depok	0	6	16	2	24
39	Kapanewon Berbah	1	3	16	2	22
40	Kapanewon Prambanan	0	3	14	3	20
41	Kapanewon Kalasan	0	4	13	2	19
42	Kapanewon Ngemplak	0	3	12	3	18
43	Kapanewon Ngaglik	0	5	12	3	20
44	Kapanewon Sleman	0	1	18	2	21
45	Kapanewon Tempel	0	3	16	1	20
46	Kapanewon Turi	0	3	16	3	22
47	Kapanewon Pakem	0	3	16	3	22
48	Kapanewon Cangkringan	0	4	13	3	20
	Jumlah	34	1.110	4.926	1.943	8.013
	Persentase	0,42	13,85	61,48	24,25	100,00

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan, 2023





Selain ASN, penyelenggaraan pemerintahan daerah juga didukung oleh keberadaan SDM dari Pekerja Harian Lepas (PHL) yang mendapatkan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) yang ditugaskan diberbagai perangkat daerah sebagaimana terlihat pada Tabel 1.14.

Tabel 1.14
Jumlah Non-Aparatur Sipil Negara Tahun 2022

No	Instansi	PHL	PJLP	BLUD	OC	Jumlah
1	Sekretariat Daerah	36	74	-	-	110
2	Sekretariat DPRD	29	71	-	-	100
3	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	2	10	-	-	12
4	Badan Perencanaan dan Pembangunan	4	30	-	-	34
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	145	82	-	-	227
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	69	-	-	69
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7	7	-	-	14
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	24	17	-	-	41
9	Dinas Kebudayaan (Kudha Kabudayan)	16	49	-	-	65
10	Dinas Kesehatan	18	16	258	124	416
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	28	23	-	-	51
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2	18	-	-	20
13	Dinas Lingkungan Hidup	224	15	-	-	239
14	Dinas Pariwisata	4	38	-	-	42
15	Dinas Pemuda dan Olahraga	4	5	-	-	9
16	Dinas Pendidikan	170	29	-	-	199
17	Dinas Perhubungan	33	28	-	-	61
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15	214	-	-	229
19	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kudha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	12	22	-	-	34
20	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	5	55	-	-	60
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	9	13	-	-	22
22	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	397	132	-	-	529
23	Dinas Sosial	13	10	-	-	23
24	Dinas Tenaga Kerja	3	19	-	-	22
25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19	7	-	-	26
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10	18	-	-	28
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	32	56	-	-	88
28	Inspektorat Kabupaten	1	9	-	-	10
29	Satuan Polisi Pamong Praja	36	50	-	3	89
30	Rumah Sakit Umum Daerah Sleman	-	-	160	-	160
31	Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan	-	-	152	-	152
32	Kapanewon Berbah	1	9	-	-	10
33	Kapanewon Cangkringan	2	4	-	-	6
34	Kapanewon Depok	1	7	-	-	8
35	Kapanewon Godean	1	10	-	-	11
36	Kapanewon Kalasan	1	8	-	-	9
37	Kapanewon Mlati	1	7	-	-	8
38	Kapanewon Ngaglik	3	9	-	-	12
39	Kapanewon Ngemplak	1	5	-	-	6
40	Kapanewon Prambanan	1	10	-	-	11
41	Kapanewon Seyegan	1	6	-	-	7





No	Instansi	PHL	PJLP	BLUD	OC	Jumlah
42	Kapanewon Tempel	2	8	-	-	10
43	Kapanewon Gamping	-	11	-	-	11
44	Kapanewon Moyudan	-	9	-	-	9
45	Kapanewon Pakem	-	7	-	-	7
46	Kapanewon Sleman	-	5	-	-	5
47	Kapanewon Turi	-	7	-	-	7
48	Kapanewon Minggir	-	9	-	-	9
	JUMLAH	1.313	1.317	570	127	3.327

Sumber: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, 2023

5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2022 merencanakan pendapatan daerah sebesar Rp2.973.745.538.756,00. Dari pendapatan daerah yang direncanakan tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp3.005.980.155.062,84 atau tercapai 101,08% dari pendapatan daerah yang direncanakan, yang artinya realisasi pendapatan daerah melebihi target sebesar Rp32.234.616.306,84. Adapun rincian pendapatan daerah tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 yang direncanakan sebesar Rp1.031.150.840.396,00 terealisasi sebesar Rp1.061.064.803.656,40 atau tercapai 102,90% dari target/rencana, dengan rincian:
 - 1) Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp752.820.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp763.128.648.846,40 atau 101,37%.
 - 2) Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp31.281.454.085,00 dengan realisasi sebesar Rp40.435.638.852,00 atau 129,26%.
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan direncanakan sebesar Rp38.657.466.216,00 dengan realisasi sebesar Rp38.866.059.319,80 atau 100,54%.
 - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah direncanakan sebesar Rp208.391.920.095,00 dengan realisasi sebesar Rp218.634.456.638,20 atau 104,92%.
- b. Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp1.935.940.596.061,00 dengan realisasi sebesar Rp1.938.607.492.467,44 atau 100,14% terdiri dari:





- 1) Dana Perimbangan direncanakan Rp1.430.601.786.089,00 dengan realisasi sebesar Rp1.411.087.776.251,00 atau 98,64% terdiri dari:
 - a) Dana Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak direncanakan sebesar Rp52.115.759.000,00 terealisasi sebesar Rp58.936.142.582,00 atau 113,09%.
 - b) Dana Alokasi Umum direncanakan sebesar Rp921.526.948.280,00 dengan realisasi sebesar Rp921.381.948.280,00 atau 99,98%.
 - c) Dana Alokasi Khusus-Fisik direncanakan sebesar Rp117.775.795.430,00 terealisasi sebesar Rp109.181.637.689,00 atau 92,70%.
 - d) Dana Alokasi Khusus-Non Fisik direncanakan sebesar Rp339.183.283.379,00 terealisasi sebesar Rp321.588.047.700,00 atau 94,81%.
- 2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya direncanakan sebesar Rp139.140.652.000,00 dengan realisasi sebesar Rp139.140.652.000,00 atau 100,00% terdiri dari:
 - a) Dana Insentif Daerah direncanakan Rp33.641.577.000,00 dengan realisasi sebesar Rp33.641.577.000,00 atau 100,00%.
 - b) Dana Desa direncanakan sebesar Rp105.499.075.000,00 dengan realisasi sebesar Rp105.499.075.000,00 atau 100,00%.
- 3) Pendapatan Transfer Antar Daerah direncanakan sebesar Rp366.198.157.972,00 terealisasi sebesar Rp388.379.064.216,44 atau 106,06% terdiri dari:
 - a) Pendapatan Bagi Hasil direncanakan Rp246.410.139.877,00 dengan realisasi sebesar Rp273.790.596.558,00 atau 111,11%
 - b) Bantuan Keuangan direncanakan Rp119.788.018.095,00 dengan realisasi sebesar Rp114.588.467.658,44 atau 95,66%
- c. Lain-lain Pencapatan Daerah yang sah sebesar Rp6.654.102.299,00 dengan realisasi sebesar Rp6.307.858.939,00 atau 94,80% terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Hibah sebesar Rp6.654.102.299,00 dengan realisasi sebesar Rp6.307.858.939,00 atau 94,80%.



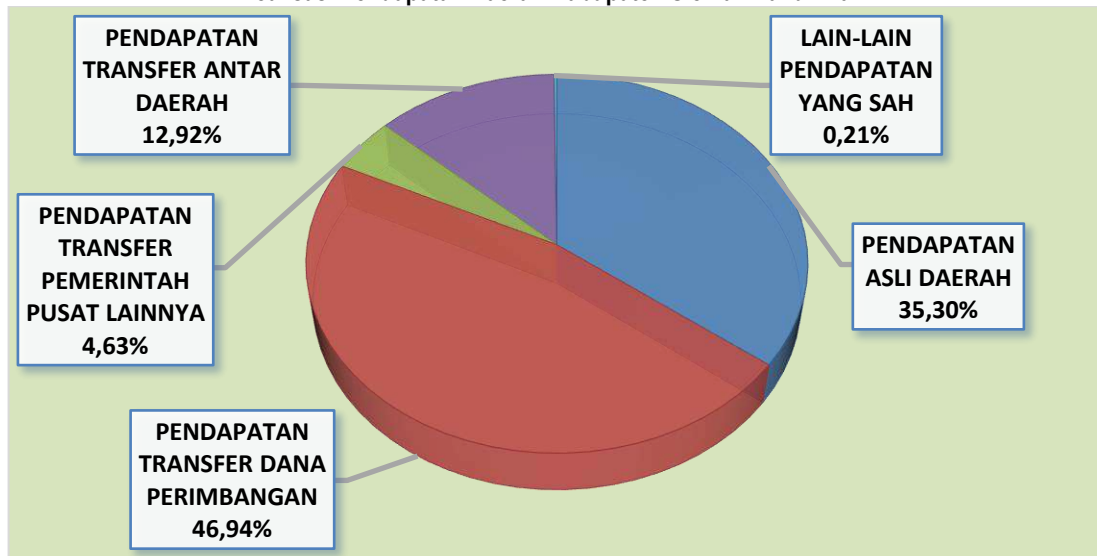
Tabel 1.15
Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Sleman Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2	3	4	5
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pendapatan Pajak Daerah	752.820.000.000,00	761.128.648.846,40	101,37
Pendapatan Retribusi Daerah	31.281.454.085,00	40.435.638.852,00	129,26
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	38.657.466.216,00	38.866.059.319,8/0	100,54
Lain-lain PAD yang Sah	208.391.920.095,00	218.634.456.638,20	104,92
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	1.031.150.840.396,00	1.061.064.803.656,40	102,90
PENDAPATAN TRANSFER			
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN			
Dana Bagi Hasil	52.115.759.000,00	58.936.142.582,00	113,09
Dana Alokasi Umum	921.526.948.280,00	921.381.948.280,00	99,98
Dana Alokasi Khusus - Fisik	117.775.795.430,00	109.181.637.689,00	92,70
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	339.183.283.379,00	321.588.047.700,00	94,81
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1.430.601.786.089,00	1.411.087.776.251,00	98,64
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA			
Dana Insentif Daerah	33.641.577.000,00	33.641.577.000,00	100,00
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00
Dana Desa	105.499.075.000,00	105.499.075.000,00	100,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	139.140.652.000,00	139.140.652.000,00	100,00
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH			
Pendapatan Bagi Hasil	246.410.139.877,00	273.790.596.557,00	111,11
Bantuan Keuangan	119.788.018.095,00	114.588.467.658,44	95,66
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	366.198.157.972,00	388.379.064.216,44	106,06
Total Pendapatan Transfer	1.935.940.596.061,00	1.938.607.492.467,44	100,14
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			
Pendapatan Hibah	6.654.102.299,00	6.307.858.939,00	94,80
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.654.102.299,00	6.307.858.939,00	94,80
JUMLAH PENDAPATAN	2.973.745.538.756,00	3.005.980.155.062,84	101,08

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun 2022 masih didominasi oleh Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat khususnya Dana Perimbangan yaitu sebesar 46,94% dari total penerimaan pendapatan, sedangkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan total realisasi pendapatan daerah yaitu sebesar 35,30%. Perbandingan persentase realisasi pendapatan dijelaskan pada Grafik 1.7 berikut:

Grafik 1.7
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022



Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Anggaran Belanja Daerah pada tahun 2022 direncanakan sebesar Rp3.294.274.837.020,55 dan terealisasi sebesar Rp3.040.474.126.755,75 atau 92,30%. Anggaran belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Penganggaran belanja ini dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 dan RKPD 2022. Anggaran tersebut digunakan untuk:

- Belanja operasi direncanakan sebesar Rp2.382.903.738.291,54 terealisasi Rp2.195.791.565.394,29 atau 92,15%.
- Belanja modal direncanakan sebesar Rp502.677.523.017,00 realisasi Rp466.443.909.650,46 atau 92,79%.
- Belanja tak terduga direncanakan sebesar Rp430.75.302.001,01 dengan realisasi Rp18.234.059.538,00 atau 42,33%.
- Belanja transfer direncanakan Rp365.618.273.711,00 dengan realisasi Rp360.004.592.173,00 atau 98,46%.

Anggaran dan realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun anggaran 2022 dijelaskan pada Tabel 1.16 berikut:

Tabel 1.16
Anggaran dan Realisasi Belanja Kabupaten Sleman Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
BELANJA			
BELANJA OPERASI			
Belanja Pegawai	1.175.154.147.373,00	1.088.278.763.328,05	92,61
Belanja Barang dan Jasa	985.774.908.899,54	892.765.612.003,69	90,56
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	187.767.022.019,00	185.010.639.932,55	98,53
Belanja Bantuan Sosial	34.207.660.000,00	29.736.550.130,00	86,93
Jumlah Belanja Operasi	2.382.903.738.291,54	2.195.791.565.394,29	92,15
BELANJA MODAL			
Belanja Modal Tanah	123.100.320.356	111.481.139.540,00	90,56
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.700.178.350,00	97.864.713.402,54	86,48
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	118.608.047.320,00	113.373.486.914,89	95,59
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	138.784.445.782,00	134.596.794.635,03	96,98
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.484.531.209,00	9.127.775.158,00	96,24
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal	502.677.523.017,00	466.443.909.650,46	92,79
BELANJA TAK TERDUGA			
Belanja Tak Terduga	43.075.302.001,01	18.234.059.538,00	42,33
Jumlah Belanja Tak Terduga	43.075.302.001,01	18.234.059.538,00	42,33
BELANJA TRANSFER			
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten / Kota dan Desa	82.240.290.458,00	78.328.209.068,00	95,24
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	916.696.000,00	913.031.000,00	99,60
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten / Kota ke Daerah Provinsi	135.000.000,00	133.034.510,00	98,54
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	282.326.287.253,00	280.630.317.595,00	99,40
Jumlah Belanja Transfer	365.618.273.711,00	360.004.592.173,00	98,46
JUMLAH BELANJA	3.294.274.837.020,55	3.040.474.126.755,75	92,30

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Belanja daerah pada tahun 2022 digunakan untuk beberapa belanja, sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai

Penganggaran belanja pegawai yang meliputi gaji dan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perencanaan belanja pegawai memperhitungkan *accres* gaji 1% yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, THR, gaji ke tiga belas, dan penambahan jumlah



pegawai. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Belanja pegawai direncanakan Rp1.175.154.147.373,00 dengan realisasi Rp1.088.278.763.328,05 atau 92,61%.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa pada tahun 2022 direncanakan sebesar Rp985.774.908.899,54 terealisasi sebesar Rp892.765.612.003,69 atau 90,59%.

3) Hibah

Penganggaran pemberian hibah dalam bentuk uang, barang/atau jasa kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, secara spesifik dan selektif dengan mempertimbangkan kemampuan daerah. Belanja hibah tahun 2022 sebesar Rp187.767.022.019,00 dengan realisasi Rp185.010.639.932,55 atau 98,53%.

4) Bantuan Sosial

Penganggaran pemberian bantuan sosial diperuntukkan kepada kelompok/anggota masyarakat secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat, serta memiliki kejelasan penggunaannya. Bantuan sosial direncanakan Rp34.207.660.000,00 terealisasi Rp29.736.550.130,00 atau 86,93%.

b. Belanja Modal

Anggaran belanja modal tahun 2022 direncanakan Rp502.667523.017,00 terealisasi Rp466.443.909.650,46 atau 92,79%, dengan rincian berikut:

1) Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah dianggarkan sebesar Rp123.100.320.356,00 dan terealisasi Rp111.481.139.540,00 atau 90,56%.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp112.700.178.350,00 dan terealisasi sebesar Rp97.864.713.402,54 atau 86,84%.





3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan dianggarkan sebesar Rp118.608.047.320,00 dan terealisasi sebesar Rp113.373.486.914,89 atau 95,59%.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan dianggarkan Rp138.784.445.782,00 dan terealisasi sebesar Rp134.596.794.635,03 atau 96,98%.

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya dianggarkan sebesar Rp9.484.531.209,00 terealisasi sebesar Rp9.127.775.158,00 atau 96,24%.

6) Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja modal aset lainnya pada tahun 2022 tidak dilakukan penganggaran.

c. Belanja Tak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang (penanggulangan bencana alam, bencana sosial). Belanja tidak terduga direncanakan Rp43.075.302.001,01 dengan realisasi Rp18.324.059.538,00 atau 42,33%.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer direncanakan Rp365.618.273.711,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp360.004.592.173,00 atau 98,46%, dengan rincian:

1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa.

Penganggaran belanja bagi hasil digunakan untuk dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada pemerintah kabupaten atau pendapatan kabupaten kepada pemerintah desa. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten Sleman dan desa direncanakan Rp82.240.290.458,00 terealisasi Rp78.328.209.068,00 atau 95,24%.





2) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota.

Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota direncanakan sebesar Rp916.696.000,00 dengan realisasi sebesar Rp913.031.000,00 atau 99,60%.

3) Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi.

Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi direncanakan Rp135.000.000,00 dengan realisasi Rp133.034.510,00 atau 98,54%.

4) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi desa penerima bantuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program/kegiatan prioritas yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan atau dalam rangka akselerasi pembangunan desa. Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa direncanakan Rp282.326.287.253,00 terealisasi Rp280.630.317.595,00 atau 99,40%.

7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan pada tahun 2022 direncanakan Rp445.465.298.264,55 dengan realisasi Rp445.465.298.263,96 atau tercapai 100,00%. Penerimaan pembiayaan tersebut merupakan penggunaan SiLPA. Sedangkan pengeluaran pembiayaan tahun 2022 direncanakan Rp124.936.000.000,00 terealisasi Rp124.936.000.000,00 atau tercapai 100,00% yang merupakan penyertaan modal pemerintah daerah. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan serta pembiayaan netto Pemerintah Kabupaten Sleman tahun anggaran 2022, sebagai berikut:



Tabel 1.17
Target dan Realisasi Pembiayaan Netto Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
Penggunaan SiLPA	445.465.298.264,55	445.465.298.264,55	100,00
Pencairan Dana Cadangan			
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	100,00
Penerimaan Pinjaman Daerah – Pemerintah Pusat	0,00	0,00	100,00
Penerimaan Pinjaman Daerah – Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	100,00
Penerimaan Pinjaman Daerah – Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	100,00
Penerimaan Pinjaman Daerah – Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	100,00
Penerimaan Pinjaman Daerah – Masyarakat (Obligasi Daerah)	0,00	0,00	100,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	100,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	100,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	445.465.298.264,55	445.465.298.264,55	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	100,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	124.936.000.000	124.936.000.000	100,00
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	100,00
Pembayaran Pinjaman Daerah Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	100,00
Pembayaran Pinjaman dari Lemaga Keuangan Bank	0,00	0,00	100,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	100,00
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)	0,00	0,00	100,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	100,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	100,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	124.936.000.000	124.936.000.000	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	320.529.298.264,55	320.529.298.264,55	100,00

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

8. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman tahun anggaran 2022, dijelaskan pada Tabel 1.18 berikut:

Tabel 1.18
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2	3	4	5
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pendapatan Pajak Daerah	752.820.000.000,00	761.128.648.846,40	101,37
Pendapatan Retribusi Daerah	31.281.454.085,00	40.435.638.852,00	129,26
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	38.657.466.216,00	38.866.059.319,8/0	100,54



Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Lain-lain PAD yang Sah	208.391.920.095,00	218.634.456.638,20	104,92
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	1.031.150.840.396,00	1.061.064.803.656,40	102,90
PENDAPATAN TRANSFER			
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN			
Dana Bagi Hasil	52.115.759.000,00	58.936.142.582,00	113,09
Dana Alokasi Umum	921.526.948.280,00	921.381.948.280,00	99,98
Dana Alokasi Khusus - Fisik	117.775.795.430,00	109.181.637.689,00	92,70
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	339.183.283.379,00	321.588.047.700,00	94,81
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1.430.601.786.089,00	1.411.087.776.251,00	98,64
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA			
Dana Insentif Daerah	33.641.577.000,00	33.641.577.000,00	100,00
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00
Dana Desa	105.499.075.000,00	105.499.075.000,00	100,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	139.140.652.000,00	139.140.652.000,00	100,00
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH			
Pendapatan Bagi Hasil	246.410.139.877,00	273.790.596.557,00	111,11
Bantuan Keuangan	119.788.018.095,00	114.588.467.658,44	95,66
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	366.198.157.972,00	388.379.064.216,44	106,06
Total Pendapatan Transfer	1.935.940.596.061,00	1.938.607.492.467,44	100,14
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			
Pendapatan Hibah	6.654.102.299,00	6.307.858.939,00	94,80
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.654.102.299,00	6.307.858.939,00	94,80
JUMLAH PENDAPATAN	2.973.745.538.756,00	3.005.980.155.062,84	101,08
BELANJA			
BELANJA OPERASI			
Belanja Pegawai	1.175.154.147.373,00	1.088.278.763.328,05	92,61
Belanja Barang dan Jasa	985.774.908.899,54	892.765.612.003,69	90,56
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	187.767.022.019,00	185.010.639.932,55	98,53
Belanja Bantuan Sosial	34.207.660.000,00	29.736.550.130,00	86,93
Jumlah Belanja Operasi	2.382.903.738.291,54	2.195.791.565.394,29	92,15
BELANJA MODAL			
Belanja Modal Tanah	123.100.320.356	111.481.139.540,00	90,56
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.700.178.350,00	97.864.713.402,54	86,48
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	118.608.047.320,00	113.373.486.914,89	95,59
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	138.784.445.782,00	134.596.794.635,03	96,98
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.484.531.209,00	9.127.775.158,00	96,24
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal	502.677.523.017,00	466.443.909.650,46	92,79
BELANJA TAK TERDUGA			
Belanja Tak Terduga	43.075.302.001,01	18.234.059.538,00	42,33
Jumlah Belanja Tak Terduga	43.075.302.001,01	18.234.059.538,00	42,33
BELANJA TRANSFER			





Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten / Kota dan Desa	82.240.290.458,00	78.328.209.068,00	95,24
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	916.696.000,00	913.031.000,00	99,60
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten / Kota ke Daerah Provinsi	135.000.000,00	133.034.510,00	98,54
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	282.326.287.253,00	280.630.317.595,00	99,40
Jumlah Belanja Transfer	365.618.273.711,00	360.004.592.173,00	98,46
JUMLAH BELANJA	3.294.274.837.020,55	3.040.474.126.755,75	92,30
SURPLUS / DEFISIT	(320.529.298.264,55)	(34.493.971.692,91)	10,76
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
Penggunaan SiLPA	445.465.298.264,55	445.465.298.264,55	100,00
Pencairan Dana Cadangan			
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	100,00
Penerimaan Pinjaman Daerah – Pemerintah Pusat	0,00	0,00	100,00
Penerimaan Pinjaman Daerah – Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	100,00
Penerimaan Pinjaman Daerah – Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	100,00
Penerimaan Pinjaman Daerah – Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	100,00
Penerimaan Pinjaman Daerah – Masyarakat (Obligasi Daerah)	0,00	0,00	100,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	100,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	100,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	445.465.298.264,55	445.465.298.264,55	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	100,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	124.936.000.000	124.936.000.000	100,00
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	100,00
Pembayaran Pinjaman Daerah Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	100,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	100,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	100,00
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)	0,00	0,00	100,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	100,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	100,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	124.936.000.000	124.936.000.000	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	320.529.298.264,55	320.529.298.264,55	100,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	286.035.326.571,05	100,00

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2023





BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Buku I

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Bupati Sleman**

Tahun Anggaran 2022

SLEMAN



BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Implementasi APBD disesuaikan dengan Kebijakan Umum Pemerintah Kabupaten Sleman. Perubahan Kebijakan Umum APBD 2022 (KUA 2022), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD 2022 (PPAS APBD 2022) Kabupaten Sleman Tahun 2022 merupakan dokumen kebijakan daerah yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum sebagai pedoman penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan PAPBD) Tahun Anggaran 2022. Perubahan KUA PPAS disusun mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Perubahan RKPD).

Pandemi Covid-19 yang melanda sejak Maret 2020 menyebabkan rentetan dampak terhadap perekonomian Kabupaten Sleman. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -4,05%, sedangkan pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu naik sebesar 5,56%. Hal ini disebabkan karena Pandemi Covid-19 yang sudah berangsur-angsur mereda. Pada tahun 2022 diproyeksikan target pertumbuhan ekonomi sebesar 3,71% sampai 5,90% dan tercapai 5,15%. Perlu upaya ekstra untuk mendongkrak pertumbuhan sektor potensial dan menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Sleman dengan tetap memperhatikan dampak dari Pandemi Covid-19. Program dan kegiatan diarahkan pada percepatan pemulihan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Sleman sebagai dampak adanya Pandemi Covid-19.

Perubahan anggaran disesuaikan dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2022 yang meliputi perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat, dan permasalahan aktual yang berkembang.





Perubahan APBD dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam perubahan terhadap kegiatan, pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2022, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodasi dalam APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2022.

A. Perubahan Terhadap Kegiatan

Kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2022 sebagai pelaksanaan agenda di Tahun Keenambelas RPJPD Tahun 2006-2025 dan Tahun Kedua RPJMD Tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam pelaksanaan program-program pembangunan, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, hibah, dan kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).

Dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran tertuang dalam APBD, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Keuangan daerah dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan menganut asas tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan pada *money follow program*, dimana pendekatan perencanaan dan penganggaran lebih fokus pada program dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan prioritas pembangunan Kabupaten Sleman Tahun 2022. Dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Sleman, RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2021, Rancangan RKP, Rancangan RKPD DIY, permasalahan di Kabupaten Sleman, kerangka ekonomi daerah dan pendanaan,





serta menyesuaikan terhadap perubahan Tema Pembangunan Nasional dan Tema Pembangunan Daerah DIY, maka tema Pembangunan Kabupaten Sleman Tahun 2022 ditetapkan “**Mempercepat Kebangkitan Ekonomi dan Pemulihan Kondisi Sosial Masyarakat Sleman**”. Hal ini merupakan bentuk respon dari Pemerintah Kabupaten Sleman untuk percepatan pemulihan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Sleman sebagai dampak adanya Pandemi Covid-19.

Optimalisasi potensi daerah merupakan upaya menstabilkan potensi-potensi ekonomi lokal yang menjadi unggulan di daerah dengan mempertahankan daya saing ekonomi lokal unggulan dan didukung oleh infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi sehingga sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Arah kebijakan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi, kualitas dan nilai tambah produk-produk pada sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dengan mengembangkan pariwisata berbasis potensi lokal; peningkatan iklim berinvestasi; dan penguatan peran lembaga perekonomian Desa.
2. Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk IKM dan UKM; peningkatan perlindungan terhadap IKM dan UKM; dan pembinaan terhadap pelaku usaha IKM dan UKM.
3. Peningkatan peluang kerja; peningkatan kualitas tenaga kerja; dan penguatan pengawasan dalam hubungan industrial.
4. Penguatan sub sektor ekonomi kreatif yang mampu memperkuat pondasi perekonomian daerah.
5. Penguatan kualitas inovasi untuk peningkatan daya saing daerah.
6. Pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin; peningkatan kapasitas dan akses usaha bagi masyarakat miskin; pemberdayaan masyarakat miskin; serta
7. Meningkatkan sinergi antara akademisi, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan swasta dalam penciptaan program pengentasan kemiskinan.



Prioritas pembangunan pada tahun 2022, mengacu pada keberhasilan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi, yaitu ekonomi, kemiskinan, kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, infrastruktur, kebudayaan, dan lingkungan hidup. Delapan prioritas pembangunan tersebut merupakan upaya untuk mengarahkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 serta RKPD Tahun 2022.

Tahap berikutnya dituangkan ke dalam kebijakan umum APBD. Kebijakan umum APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2022 merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, disusun dengan mengacu pada Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 26 tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022; kebijakan nasional dan regional; serta penjangkaran aspirasi masyarakat baik yang dilakukan oleh eksekutif maupun legislatif; yang selanjutnya diformulasikan ke dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 tetap menganut sistem kehati-hatian dalam mengalokasikan dana agar program-program yang telah direncanakan tetap terpadu dan terukur. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pendapatan Daerah	Rp2.973.745.538.756,00
2.	Belanja Daerah	Rp3.294.274.837.020,55
Defisit		Rp(320.529.298.264,55)
3.	Pembiayaan :	
	a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp445.465.298.264,55
	b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp124.936.000.000,00
Pembiayaan Netto		Rp320.529.298.264,55

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2022



B. Perubahan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pada Tahun 2022, direncanakan pendapatan daerah dapat bersumber dari beberapa hal, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (bagian laba BUMD), dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
2. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Desa, Dana Transfer Umum) dan Transfer Antar-Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (bantuan keuangan dari daerah provinsi (BKK Danais dan BKK lainnya) dan bantuan keuangan dari Daerah Kabupaten/Kota);
3. Kelompok lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat dan/atau lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah. Arah kebijakan pendapatan daerah tahun 2022, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini;
2. Meningkatkan pendapatan daerah melalui perluasan objek dan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah secara optimal;
3. Pendayagunaan aset daerah;
4. Optimalisasi hasil usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat ini telah ada agar memberikan kontribusi yang optimal kepada PAD pada khususnya dan penerimaan daerah pada umumnya;
5. Mengadakan peninjauan kembali (*annual-review*) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan mempermudah birokrasi guna mempermudah investasi.





Pendapatan daerah tahun 2022 sebesar Rp2.973.745.538.756,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp3.005.980.155.062,84 atau mencapai 101,08% atau melebihi target sebesar Rp32.234.616.306,84.

C. Pengelolaan Belanja Daerah

Berkaitan dengan kondisi pendapatan dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka ditetapkan arah kebijakan belanja daerah:

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
2. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan (DAU dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya.
5. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam, non alam maupun sosial.
6. Belanja daerah berupa belanja operasi setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan.
7. Belanja daerah untuk urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.





8. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.

Pengelolaan belanja daerah dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman Tahun 2022. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap PD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran Belanja Daerah pada tahun 2022 direncanakan sebesar Rp3.294.274.837.020,55 terealisasi sebesar Rp3.040.474.126.755,75 atau 92,30% Jumlah ini mengalami kenaikan 3,70 poin atau 4,18% dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 88,60%. Anggaran tersebut digunakan untuk Belanja operasi Rp2.382.903.738.291,54 terealisasi Rp2.195.791.565.394,29 (92,15%); Belanja modal direncanakan Rp502.677.523.017,00 dengan realisasi Rp466.443.909.650,46 (92,79%); Belanja tak terduga direncanakan sebesar Rp43.075.302.001,01 dengan realisasi Rp18.234.059.538,00 atau 42,33%; Belanja transfer direncanakan Rp365.618.273.711,00 dengan realisasi Rp360.004.592.173,00 (98,46%).





D. Pembiayaan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan bahwa pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun berikutnya. Pembiayaan daerah dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah.

Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran adalah penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan piutang daerah. Adapun pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal/Investasi Pemerintah Daerah yang berorientasi pada keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pembiayaan daerah tahun 2022 direncanakan Rp320.529.298.264,55 terealisasi Rp320.529.298.263,96 (100,00%). Penerimaan pembiayaan direncanakan Rp445.465.298.264,55 terealisasi Rp445.465.298.263,96 (100%), sedangkan pengeluaran pembiayaan APBD 2022 untuk penyertaan modal/investasi dari rencana Rp124.936.000.000,00 terealisasi Rp124.936.000.000,00 (100,00%).





BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN

Buku I

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Bupati Sleman

Tahun Anggaran 2022

SLEMAN

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

A. Capaian Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Urusan pemerintahan bidang pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan secara lebih detail diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.4 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan. Urusan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten adalah pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar (SD dan SMP), dan pendidikan kesetaraan. Pendidikan menengah (SMA/SMK/MA) dan pendidikan khusus (SLB) menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pendidikan tinggi menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemenuhan pelayanan bidang pendidikan di Kabupaten Sleman, tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah daerah namun juga didukung dan dikuatkan oleh masyarakat dan swasta.

Tabel 3.1
Perkembangan dan Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan di Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
A	Pendidikan Sekolah					
1	Taman Kanak-Kanak					
	a. Jumlah Sekolah	564	571	574	577	583
	- Negeri	5	5	5	5	5
	- Swasta	559	566	569	572	578
	b. Jumlah Guru	2203	2721	2215	2.106	1.221
	- Negeri	44	48	41	40	35
	- Swasta	2159	2673	2174	2.066	1.186
	c. Jumlah Tenaga Non Guru	445	450	472	1.124	1.164
	- Negeri	17	20	19	22	22
	- Swasta	428	430	453	1.102	1.142
	d. Jumlah Siswa	30.879	31.078	28.849	25.459	28.980
	- Negeri	613	612	572	544	597
	- Swasta	30.266	30.466	28.277	24.915	28.383

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
2	SD / MI					
	a. Jumlah Sekolah	545	548	547	550	552
	- Negeri	376	376	376	376	376
	- Swasta	169	172	171	174	176
	b. Jumlah Guru	6.259	6.240	5.624	6.043	5.753
	- Negeri	3.748	3.969	3.553	3.715	3.518
	- Swasta	2.511	2.451	2.071	2.328	2.235
	c. Jumlah Tenaga Non Guru	1.453	1.360	1.300	1.938	1.840
	- Negeri	909	865	864	1.265	1.199
	- Swasta	544	495	436	673	641
	d. Jumlah Siswa	98.128	97.558	97.852	96.025	94.981
	- Negeri	62.731	61.156	59.892	58.300	57.205
	- Swasta	35.397	36.402	37.960	37.725	37.776
3	SMP / MTs					
	a. Jumlah Sekolah	145	150	153	160	165
	- Negeri	64	64	64	64	64
	- Swasta	81	86	89	96	101
	b. Jumlah Guru	3.492	3.725	3.316	3.493	3.350
	- Negeri	1.777	1.945	1.728	1.812	1.855
	- Swasta	1.715	1.780	1.558	1.681	1.495
	c. Jumlah Tenaga Non Guru	999	1.013	835	1.121	985
	- Negeri	596	574	466	609	485
	- Swasta	403	439	369	512	500
	d. Jumlah Siswa	46.767	49.228	47.698	50.947	51.538
	- Negeri	28.433	28.765	28.838	28.935	28.730
	- Swasta	18.334	20.463	18.860	22.012	22.808
4	Kondisi Bangunan Sekolah (SD dan SMP)					
	a. Jumlah Ruang SD*	3.998	4.112	4.192	4.234	3.895
	- Baik	3.525	3.577	2.216	1.883	3.736
	- Rusak Ringan	394	441	1.949	2.240	-
	- Rusak Sedang				108	152
	- Rusak Berat	79	94	27	12	7
	b. Jumlah Ruang SMP*	1.580	2.092	1.569	1.705	1.335
	- Baik	1.453	1.970	930	1131	1.283
	- Rusak Ringan	99	108	629	546	-
	- Rusak Sedang	-	-	-	17	45
	- Rusak Berat	28	14	10	11	7
B	Pendidikan Luar Sekolah					
1	Lembaga Pendidikan Kursus (unit)					
	a. Jumlah Lembaga	60	62	56	63	40
	b. Jumlah Tutor	234	183	112	122	602
	c. Jumlah Warga Belajar	2.802	2.281	1.171	1.177	707
2	Kelompok Belajar Pendidikan Kesetaraan					
	a. Jumlah tutor	238	109	225	217	54
	b. Jumlah kelompok	70	81	70	71	42
	c. Jumlah warga belajar	1.817	2.003	2.469	3.011	4.296
3	Play Group (Kelompok Bermain)					
	- Jumlah Tutor	2.163	353	711	742	727
	- Jumlah Kelompok	243	82	220	223	227
	- Jumlah Warga Belajar	9.763	2.718	4.925	4.890	6.468



No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
4	TPA (unit)					
	- Jumlah Tutor	313	353	320	321	326
	- Jumlah Kelompok	78	82	83	82	84
	- Jumlah Warga Belajar	2.842	2.718	2.160	2.012	2311
5	Satuan PAUD Sejenis (unit)					
	- Jumlah Tutor	1.165	794	640	708	715
	- Jumlah Kelompok	278	211	209	236	235
	- Jumlah Warga Belajar	20.523	6.295	4.032	4.615	5331
C	Hasil Pelayanan Publik					
1	Angka Partisipasi Kasar (%)					
	a. APK PAUD / Sederajat	78,29	99,83	96,88	98,35	99,02
	b. APK SD / Sederajat	116,98	100,04	100,41	98,12	98,86
	c. APK SMP / Sederajat	112,71	107,92	101,69	106,67	104,94
2	Angka Partisipasi Murni (%)					
	a. APM PAUD / Sederajat	-	88,45	83,08	76,56	67,65
	b. APM SD/ Sederajat	105,67	94,17	95,85	92,96	95,59
	c. APM SMP / Sederajat	85,91	86,90	84,51	86,42	77,07
3	Rasio Siswa Sekolah					
	a. PAUD / Sederajat	53,41	54,43	49,65	44,12	49,71
	b. SD / Sederajat	180,05	178,03	178,89	174,59	172,07
	c. SMP / Sederajat	332,53	328,19	311,75	318,42	312,35
4	Anak Tidak Sekolah					
	a. Usia 7-12 tahun	n/a	n/a	64	54	22
	b. Usia 13-15 tahun	n/a	n/a	199	192	129
	c. Usia 16-18 tahun	n/a	n/a	627	513	337
5	Rasio Siswa Guru					
	a. PAUD / Sederajat	14,00	11,00	13,00	12,09	17,00
	b. SD / Sederajat	16,00	15,00	18,00	15,89	17,00
	c. SMP / Sederajat	14,00	13,00	15,00	14,59	16,00
6	Rasio Siswa Kelas					
	a. PAUD / Sederajat	53,41	54,43	49,65	44,12	49,71
	b. SD / Sederajat	22,73	23,73	23,34	22,66	22,39
	c. SMP / Sederajat	29,73	23,53	30,40	30,49	30,23
7	Rata-rata kemampuan literasi					
	a. SD / Sederajat	-	-	-	59,92	63,78
	b. SMP / Sederajat	-	-	-	75,39	78,25
8	Rata-rata kemampuan Numerasi					
	a. SD / Sederajat	-	-	-	39,50	46,14
	b. SMP / Sederajat	-	-	-	59,17	62,63
9	Rata-Rata Nilai Hasil Belajar					
	a. UAN SD / Sederajat	70,35 (210,50)	70,14 (210,41)	n/a	n/a	n/a
	b. UAN SMP / Sederajat	64,13 (256,50)	66,44 (256,76)	n/a	n/a	n/a
10	Rata-Rata Nilai Hasil Belajar Program Kesetaraan					
	a. UAN Paket A setara SD	35,14	50,37	n/a	n/a	n/a
	b. UAN Paket B setara SMP	51,89	47,86	n/a	n/a	n/a
	c. UAN Paket C setara SMA	50,54	-	-	-	n/a
11	Rata-Rata Kelulusan (%)					
	a. SD	97,23	100,00	100,00	100,00	100,00
	b. SMP	99,08	100,00	100,00	100,00	100,00



No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
12	Persentase Guru yang Layak Mengajar					
	a. PAUD / Sederajat	74,53	84,38	83,57	95,01	92,31
	b. SD / Sederajat	89,94	93,16	92,78	99,11	97,91
	c. SMP / Sederajat	91,30	94,39	92,60	99,15	97,10
13	Angka Partisipasi Sekolah					
	a. SD / MI	117,11	100,90	99,94	99,95	99,98
	b. SMP / MTs	114,65	106,21	99,58	99,61	99,75
14	HLS dan RLS					
	a. Rata-Rata Lama Sekolah	10,66	10,67	10,91	10,92	10,94
	b. Harapan Lama Sekolah	16,71	16,72	16,73	16,74	16,76

Sumber: Dinas Pendidikan, 2023

1) Fasilitas Pendidikan

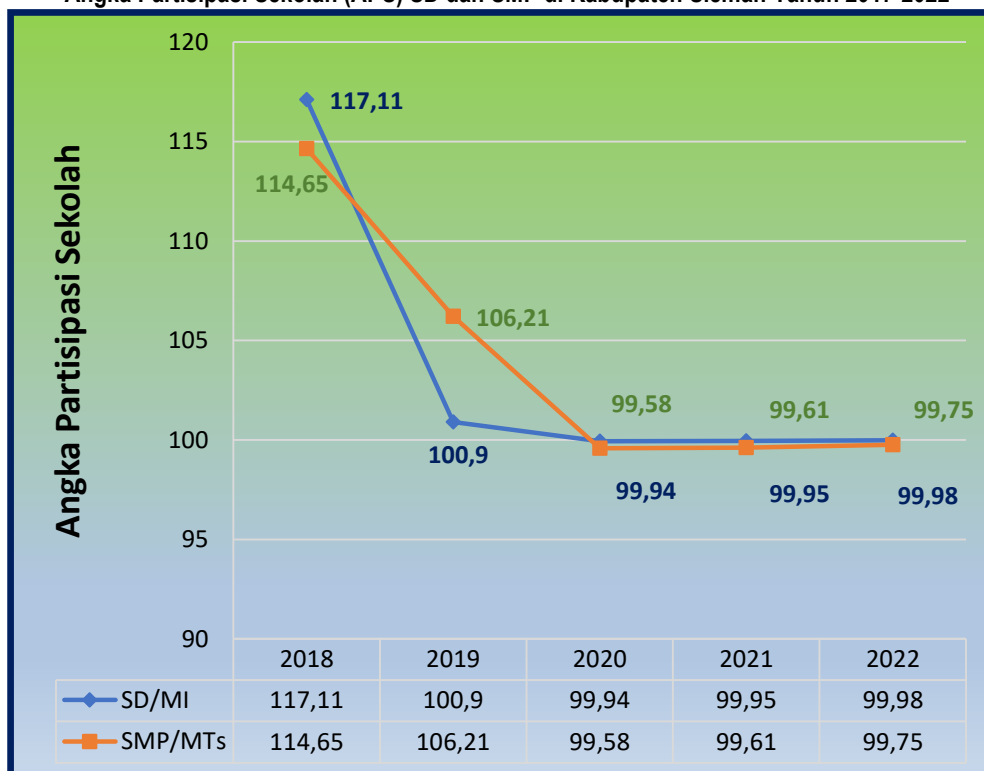
Pada kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, jumlah sekolah di Kabupaten Sleman mengalami kenaikan dengan jumlah yang tidak begitu signifikan. Sekolah negeri di Kabupaten Sleman selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung tetap. Kenaikan jumlah sekolah terjadi pada sekolah swasta, di mana terdapat tren yang selalu meningkat walaupun hanya kecil. Tingkat pemenuhan atas kebutuhan sekolah di suatu wilayah dapat dilihat melalui rasio ketersediaan sekolah. Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah jenjang tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah pada jenjang tersebut. Rasio ketersediaan sekolah ini mengindikasikan kemampuan menampung penduduk usia sekolah.

Standar Nasional Pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah mengamanatkan bahwa sebanyak 1 (satu) orang guru SD/MI mengajar 28 siswa dan 1 (satu) guru SMP mengajar 32 siswa. Pada tahun 2022 rasio guru siswa untuk tingkat SD adalah 17,00 dan untuk tingkat SMP adalah 16,00. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan bahwa rasio siswa guru SD dan SMP di Kabupaten Sleman relatif jauh di atas standar nasional.

2) Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk usia sekolah pada fasilitas pendidikan. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan, namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. APS yang berada di bawah angka 100 menunjukkan bahwa ada penduduk usia sekolah yang belum tertampung di sekolah yang tersedia atau ada penduduk usia sekolah bersekolah di luar wilayah Kabupaten Sleman. Salah satu hal yang berpengaruh terhadap APS adalah adanya ketentuan zonasi pada penerimaan siswa baru. Pada tahun 2022 APS SD sebesar 99,98% dan APS SMP sebesar 99,75%. Capaian APS SD dan SMP selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada grafik berikut.

Grafik 3.1
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD dan SMP di Kabupaten Sleman Tahun 2017-2022



Sumber: Dinas Pendidikan, 2023

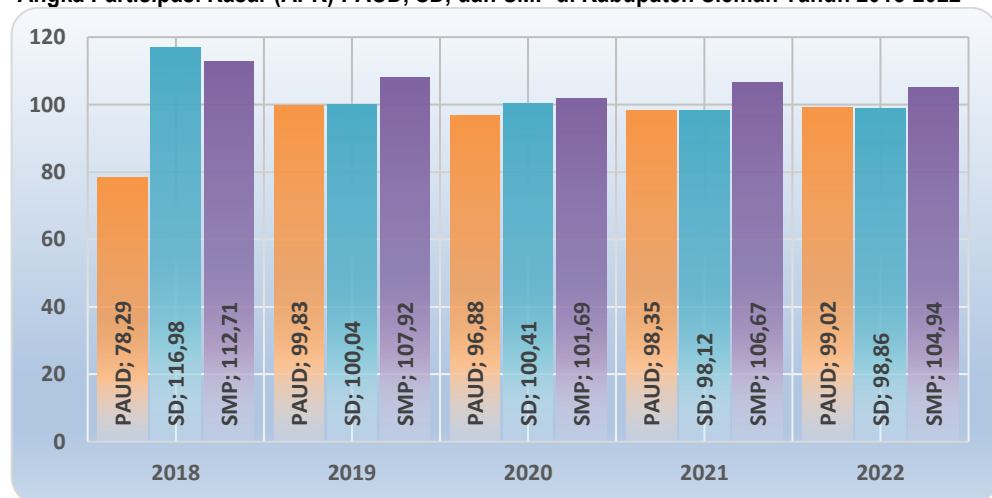


3) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah angka perbandingan antara banyaknya murid dari jenjang pendidikan tertentu dengan banyaknya penduduk usia sekolah pada jenjang yang sama dinyatakan dalam persen. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Pada tahun 2022, APK TK/PAUD sebesar 99,02%, APK SD/MI 98,86%, dan APK SMP/MTs 104,94%. APK bisa mencapai lebih dari 100,00% menunjukkan bahwa jumlah murid pada jenjang SMP/MTs lebih banyak daripada jumlah penduduk usia SMP/MTs. Hal tersebut terjadi karena adanya murid bukan penduduk Kabupaten Sleman yang bersekolah di wilayah Kabupaten Sleman.

Grafik 3.2
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, SD, dan SMP di Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Pendidikan, 2023

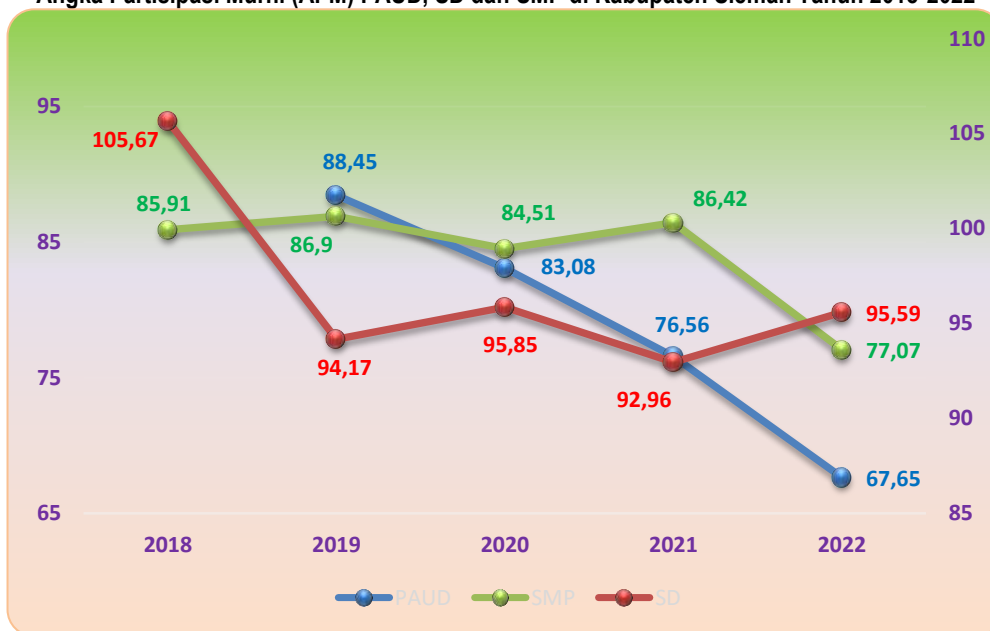
4) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah angka perbandingan penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut, dinyatakan dalam persen. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan.



Pada tahun 2022, APM PAUD/ sederajat 67,65%, APM SD/ sederajat 95,59%, dan APM SMP/ sederajat 77,07%. APM di atas angka 100% menunjukkan bahwa kapasitas atau daya tampung sekolah telah dapat mencukupi kebutuhan. Angka tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk bersekolah lebih banyak daripada jumlah penduduk pada usia sekolah. APM dibawah 100% menunjukkan bahwa terdapat anak usia sekolah yang tidak bersekolah atau bersekolah di luar daerah. Pada saat ini hal tersebut masih membutuhkan pembuktian lebih dalam mengingat anak yang tidak bersekolah tersebut bisa jadi karena difabel, tidak dapat bersekolah di sekolah formal, mengikuti *home schooling*, ataupun anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang berbeda (tidak naik kelas atau akselerasi).

Grafik 3.3
Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD, SD dan SMP di Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Pendidikan, 2023

5) Angka Tidak Sekolah

Anak Tidak Sekolah (ATS) dikategorikan sebagai anak usia 9 tahun sampai dengan 21 tahun yang tidak bersekolah karena alasan ekonomi, sosial, dan kesehatan. Selain itu, ATS termasuk mereka yang pernah sekolah dan berhenti di tengah proses belajarnya (putus sekolah) karena berbagai alasan seperti kesulitan ekonomi dan sosial.

Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya menurunkan jumlah anak tidak sekolah dan anak putus sekolah dengan membentuk Tim Satuan Tugas Pendataan dan Penanganan Anak Sekolah yang Putus Sekolah dan Tidak Sekolah. Hal tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sleman Nomor 39.2/Kep.KDH/A/2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sleman Nomor 62.6/Kep.KDH/A/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sleman Nomor 39.2/Kep.KDH/A/2020 tentang Satuan Tugas Pendataan dan Penanganan Anak Usia Sekolah yang Putus Sekolah dan Tidak Sekolah.

Tim sebagaimana dimaksud bertugas mengurai dan mencari penyebab permasalahan anak tidak sekolah dan anak putus sekolah, serta mencari alternatif solusi atas penyebab dan keinginan anak tersebut, yang kemudian alternatif solusi tersebut dilaksanakan oleh perangkat daerah lintas sektoral sesuai dengan kewenangan masing-masing.

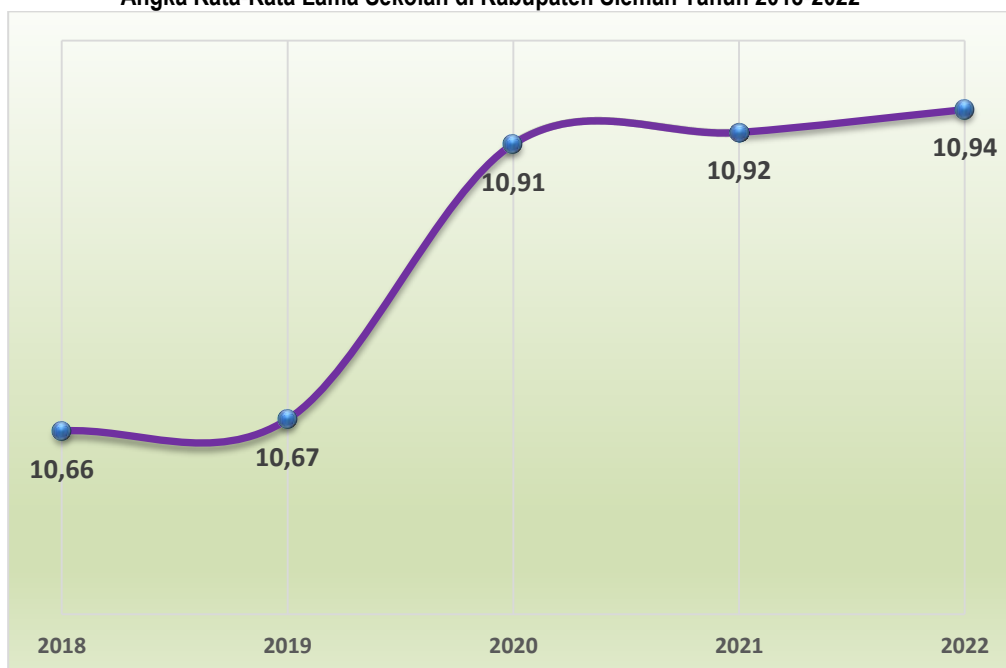
Jumlah keseluruhan ATS usia 7-18 tahun berdasarkan pendataan yang dilakukan terdapat sejumlah 488 anak, 374 diantaranya laki-laki dan 114 perempuan. Solusi yang sudah dilaksanakan antara lain:

- a) Menyediakan beasiswa *retrieval* untuk mencegah anak putus sekolah karena faktor ketidakmampuan menyediakan biaya pendidikan. Beasiswa bersumber dari Jaring Pengaman Sosial (JPS) Kabupaten Sleman;
- b) Mendaftarkan pada program pendidikan kesetaraan dan non formal bagi anak yang tidak mau melanjutkan di sekolah jalur formal;
- c) Mengikutsertakan dalam program pelatihan keterampilan yang dilaksanakan di BLK maupun yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.
- d) Optimalisasi program dan kegiatan terkait ketahanan keluarga.

6) Angka Rata-Rata Lama Sekolah

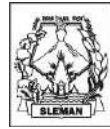
Rata-rata Lama Sekolah atau *years of schooling* (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama sekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. RLS di Kabupaten Sleman pada tahun 2022 tercapai sebesar 10,94 tahun dari target yang ditetapkan 10,93 tahun (100,09%). RLS mengalami peningkatan sebesar 0,02 tahun atau 0,18% dibandingkan tahun 2021 sebesar 10,92 tahun

Grafik 3.4
Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Pendidikan, 2023

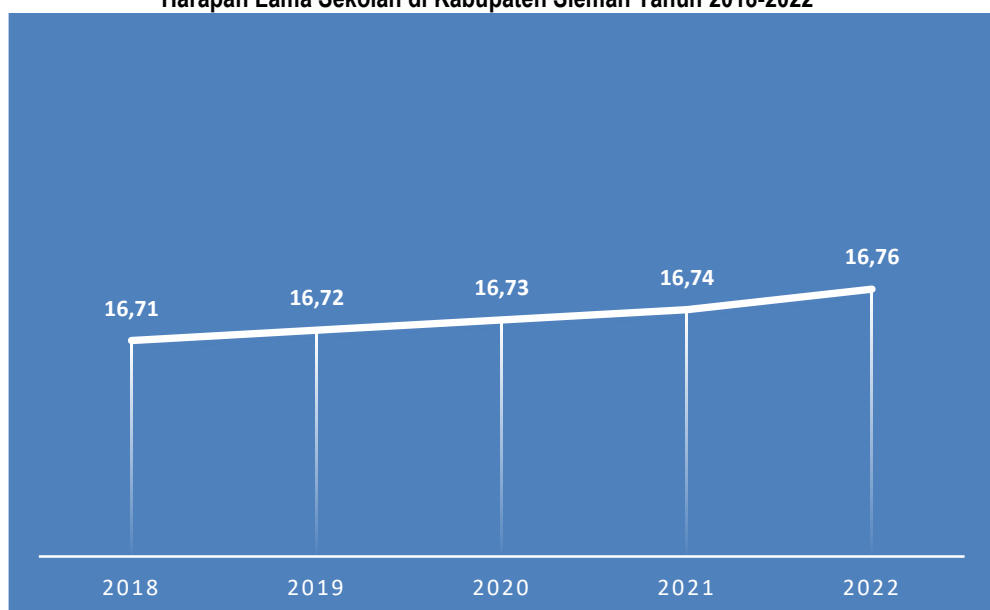
RLS Kabupaten Sleman tahun 2022 mencapai 10,94 tahun menggambarkan bahwa penduduk Sleman umur 25 tahun ke atas memiliki tingkat pendidikan rata-rata setara kelas 11 SMA. Apabila dibandingkan dengan RLS di tingkat Provinsi DIY dan Nasional, RLS Kabupaten Sleman relatif lebih tinggi. Pada tahun 2022 RLS Nasional sebesar 8,69 tahun dan RLS DIY sebesar 9,75 tahun.



7) Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk dalam bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas. Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. HLS penduduk Kabupaten Sleman meningkat dari 16,74 di tahun 2021 menjadi 16,76 di tahun 2022. Harapan lama sekolah sebesar 16,76 tahun menggambarkan anak usia 7 tahun di Kabupaten Sleman memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 16,76 tahun atau setara dengan lamanya waktu menamatkan pendidikan hingga setingkat Sarjana. Secara level, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Sleman lebih tinggi dari rata-rata nasional yaitu 13,10 maupun rata-rata Provinsi D.I. Yogyakarta yaitu 15,65.

Grafik 3.5
Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Pendidikan, 2023



Tingginya capaian maupun peningkatan Harapan Lama Sekolah penduduk Kabupaten Sleman didorong oleh meningkatnya angka partisipasi sekolah terutama pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Hal ini sangat terkait dengan ketersediaan infrastruktur pendidikan tingkat menengah dan tinggi yang cukup representatif, berkualitas, dan mudah diakses. Peningkatan partisipasi sekolah pada tingkat menengah dan tinggi juga dipengaruhi level kesejahteraan penduduk Kabupaten Sleman yang semakin meningkat.

Pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu urusan pemerintahan bidang pendidikan didukung dengan beberapa program. Tingkat capaian indikator kinerja program dan kinerja keuangan program dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun 2022

No.	Program / Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota				
	a. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%
	b. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100,00	100,00	100,00%
2	Program pengelolaan pendidikan				
	a. Persentase satuan pendidikan PAUD terakreditasi A	%	32,77	32,07	97,86%
	b. Persentase satuan pendidikan SD terakreditasi A	%	69,53	68,10	97,94%
	c. Persentase satuan pendidikan SMP terakreditasi A	%	82,08	79,34	96,66%
	d. Persentase satuan pendidikan non formal dan kesetaraan yang penyelenggaraannya sudah berizin	%	94,06	100,00	106,32%
	e. Persentase sarpras PAUD, SD, SMP, dan pendidikan kesetaraan dalam kondisi baik	%	69,36	96,64	139,34%
3	Program pendidik dan tenaga kependidikan				
	a. Persentase guru yang memperoleh hasil penilaian kinerja guru dengan nilai minimal baik.	%	98,90	99,60	100,71%
	b. Persentase guru ASN yang memenuhi kualifikasi pendidikan terakhir S1/D4 yang bersertifikat pendidik.	%	85,00	75,00	88,24%

Sumber: Dinas Pendidikan, 2023

Urusan pemerintahan bidang pendidikan didukung dengan 3 (tiga) program. Alokasi anggaran urusan pemerintahan bidang pendidikan sebesar Rp894.220.548.151,99 dengan realisasi keuangan sebesar Rp833.096.510.394,97 sehingga capaian kinerja keuangan 93,16%.

1) Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota

Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota pada tahun 2022 dianggarkan Rp555.809.883.214,00 dan terealisasi 91,84% yaitu Rp510.475.018.912,00. Program ini terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan memiliki 2 (dua) indikator kinerja program, yaitu:

- a) Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran, dari target yang ditetapkan sebesar 100,00% tercapai 100,00% atau tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%; dan
- b) Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja dari target yang telah ditetapkan 100,00% tercapai 100,00% sehingga tingkat capaian indikator kinerja program sebesar 100,00%.

2) Program pengelolaan pendidikan

Program pengelolaan pendidikan didukung dengan 4 (empat) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp338.207.161.187,99 dan terealisasi Rp322.477.222.232,97 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan program sebesar 95,35%. Program pengelolaan pendidikan didukung dengan 5 (lima) indikator kinerja program, sebagai berikut:

- a) Persentase satuan pendidikan PAUD terakreditasi A, dari target sebesar 32,77% terealisasi 32,07% sehingga tingkat capaian kinerja persentase satuan pendidikan PAUD terakreditasi A sebesar 97,86%;
- b) Persentase satuan pendidikan SD terakreditasi A, dari target 69,53% terealisasi 68,10% sehingga tingkat capaian kinerja persentase satuan pendidikan PAUD terakreditasi A 97,94%;
- c) Persentase satuan pendidikan SMP terakreditasi A, dari target sebesar 82,08% terealisasi sebesar 79,34% sehingga tingkat capaian kinerja persentase satuan pendidikan PAUD terakreditasi A sebesar 96,66%;



- d) Persentase satuan pendidikan non formal dan kesetaraan yang penyelenggaraannya sudah berizin dari target sebesar 94,06% tercapai 100% sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 106,32%;
 - e) Persentase sarpras PAUD, SD, SMP, dan pendidikan kesetaraan dalam kondisi baik dari target yang telah ditetapkan sebesar 69,36% terealisasi sebesar 96,64% sehingga tingkat capaian kinerja indikator program sebesar 139,34%.
- 3) Program pendidik dan tenaga kependidikan

Program pendidik dan tenaga kependidikan didukung dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Program ini dibiayai dengan anggaran sebesar Rp203.503.750,00 dan terealisasi sebesar Rp144.269.250,00 sehingga capaian indikator kinerja keuangan program 70,89%.

Tingkat keberhasilan pelaksanaan program pendidik dan tenaga kependidikan dapat dilihat dari tingkat capaian kinerja indikator program, sebagai berikut:

- a) Persentase guru yang memperoleh hasil penilaian kinerja guru dengan nilai minimal baik dari target sebesar 98,90% tercapai 99,60% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,71%; dan
- b) Persentase guru ASN yang memenuhi kualifikasi pendidikan terakhir S1/D4 yang bersertifikat pendidik dari target yang ditetapkan sebesar 85% tercapai 75% dengan tingkat capaian kinerja indikator program sebesar 88,24%.

Capaian kinerja keluaran kegiatan dan sub kegiatan pada urusan pemerintahan bidang pendidikan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran secara terinci tertuang pada Buku 2 Laporan Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan di Kabupaten Sleman pada tahun 2022 masih memiliki permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu:



- 1) Masih ditemui Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Sleman yang disebabkan oleh permasalahan sosial budaya di lingkungan sekitar anak. ATS yang dimaksud yaitu:
 - a) Anak putus sekolah
 - b) Anak lulus SD/SMP sederajat tapi tidak melanjutkan SMP/SMA sederajat
 - c) Anak yang sama sekali belum pernah sekolah.

Jumlah keseluruhan ATS usia 7-18 tahun berdasarkan kegiatan pendataan di bawah koordinasi Satgas Anak Putus Sekolah terdapat sejumlah 488 anak, 374 diantaranya laki-laki dan 114 perempuan. Kapanewon Prambanan merupakan kapanewon dengan persentase ATS usia 7-18 tahun tertinggi yaitu sebesar 0,49% dari total jumlah anak usia sekolah atau sebanyak 48 anak dari total 9.697 anak. Peringkat kedua Kapanewon Godean dengan persentase ATS sebesar 0,43% atau sebanyak 52 anak dari total 12.092 anak usia 7-18 tahun. Kapanewon Godean ini merupakan kapanewon dengan jumlah ATS paling banyak. Sebaliknya, Kapanewon Depok merupakan Kapanewon dengan persentase ATS usia 7-18 tahun terendah yaitu sebesar 0,13% atau sebanyak 29 anak dari total 21.610 anak usia 7-18 tahun di wilayah tersebut. Jumlah ATS paling sedikit berada pada Kapanewon Kalasan dan Pakem dengan jumlah ATS sejumlah masing-masing 4 anak.

- 2) Kekurangan guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di SD dan SMP negeri sehingga masih diperlukan pengangkatan guru bukan ASN untuk menggantikan guru ASN yang memasuki masa purna tugas.
- 3) Beban tugas tambahan bagi beberapa guru ASN selain tugas pokok mengajar seperti diantaranya tugas menjadi operator Dapodik, tugas menjadi bendahara/pengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS), atau tugas menjadi pengelola barang/aset sekolah. Hal ini menjadi beban bagi guru yang pada situasi saat ini membutuhkan lebih banyak waktu untuk meningkatkan kompetensi di luar jam mengajarnya justru digunakan untuk kegiatan pendukung tugas tambahan.



- 4) Adanya stagnansi kemampuan literasi dan numerasi peserta didik SD, serta penurunan kemampuan literasi dan stagnansi numerasi peserta didik SMP pada tahun 2022 dibandingkan pencapaian tahun 2021. Hal ini menjadi permasalahan dikarenakan capaian Kabupaten/Kota serupa di tingkat nasional mengalami rata-rata kenaikan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik SD dan SMP. Hal ini mengindikasikan masih perlunya penguatan kompetensi mengajar literasi dan numerasi bagi guru SD dan SMP agar kompetensi guru meningkat dan mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik SD dan SMP.

Solusi yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman atas permasalahan di atas yaitu:

- 1) Membentuk Satuan Tugas Penanganan Anak Putus/Tidak Sekolah yang merupakan salah satu bentuk kerjasama lintas sektoral. Mulai dari pendataan, penanganan, dan monitoring penanganan anak tidak sekolah. Upaya dalam penanganan anak tidak sekolah ini berhasil menurunkan jumlah dan persentase Anak Tidak Sekolah tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Dengan kembalinya anak tidak sekolah ke dalam proses belajar mengajar baik di jalur pendidikan formal maupun nonformal atau pendidikan kesetaraan dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak di masa dewasa nya, serta meningkatkan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.
- 2) Adanya kebijakan mengizinkan Kepala Sekolah Negeri mengangkat guru bukan ASN untuk menggantikan guru ASN yang telah pensiun dengan syarat minimal berpendidikan terakhir Sarjana. Bagi guru honorer tersebut akan mendapatkan bantuan fasilitasi penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebesar Rp700.000,00 di setiap bulannya. Pengangkatan guru honorer merupakan salah satu upaya agar pelaksanaan proses belajar mengajar tetap berlangsung.
- 3) Dinas Pendidikan berupaya untuk menggerakkan Kelompok Kerja Guru (KKG) SD dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP sebagai salah satu wadah bagi guru untuk meningkatkan kompetensi sebagai pendidik dan saling bertukar ide dan ketrampilan mengajar.



Perkembangan teknologi informasi saat ini pun menjadi salah satu wadah bagi guru untuk secara mandiri mengembangkan kompetensi melalui Platform Merdeka Mengajar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

- 4) Peningkatan dan penguatan kompetensi guru dalam mengajarkan literasi dan numerasi melalui kegiatan bimbingan teknis bekerja sama dengan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) merupakan salah satu upaya untuk mendorong pembiasaan penggunaan literasi dan numerasi dalam proses belajar mengajar sehari-hari. Hal ini merupakan tantangan berat bagi bapak/ibu guru dikarenakan harus keluar dari zona nyaman mereka yang sudah beberapa tahun mengajar dengan metode yang didapatkan dari bangku kuliah pada waktu lampau. Dimana metode tersebut sudah tidak cocok lagi diterapkan kepada peserta didik di masa sekarang.

Pengukuran kinerja pembangunan dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis. Pelaksanaan kegiatan pada urusan pemerintahan bidang pendidikan tahun 2022 menunjukkan konsistensi/kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Target kinerja/keluaran dari setiap kegiatan telah mendukung pencapaian target indikator kinerja program yang telah ditetapkan sebagai perjanjian kinerja Perangkat Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, Renstra, RKPD, maupun APBD.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Urusan pemerintahan bidang kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan secara lebih detail diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.5 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Capaian Indikator Kinerja Daerah pada urusan pemerintahan bidang kesehatan, dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2022

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Umur Harapan Hidup	Tahun	74,85	75,00	100,20%
2	Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit dengan Status Paripurna	Puskesmas	3	3	100,00%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Umur Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakat. Pada tahun 2022 target UHH sebesar 74,85 tahun dan terealisasi 75,00 tahun sehingga capaian kinerja sebesar 100,20%. UHH di Kabupaten Sleman selalu meningkat dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022

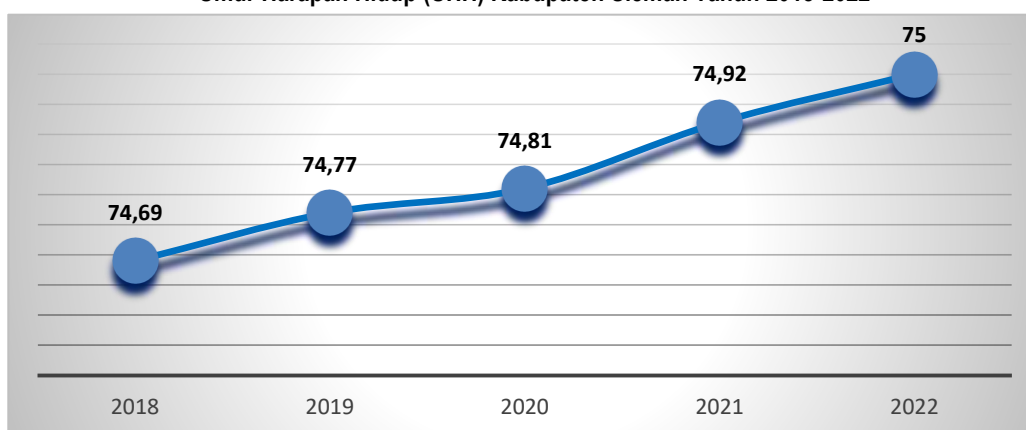
No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	74,69	74,77	74,81	74,92	75,00

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Indikator UHH tahun 2022 di Kabupaten Sleman dari target sebesar 74,85 tahun terealisasi sebesar 75,00 tahun sehingga tingkat capaian kinerja indikator UHH adalah sebesar 100,20%. UHH tahun 2022 meningkat sebesar 0,08 tahun atau 0,11% dibandingkan tahun 2021 sebesar 74,92 tahun.

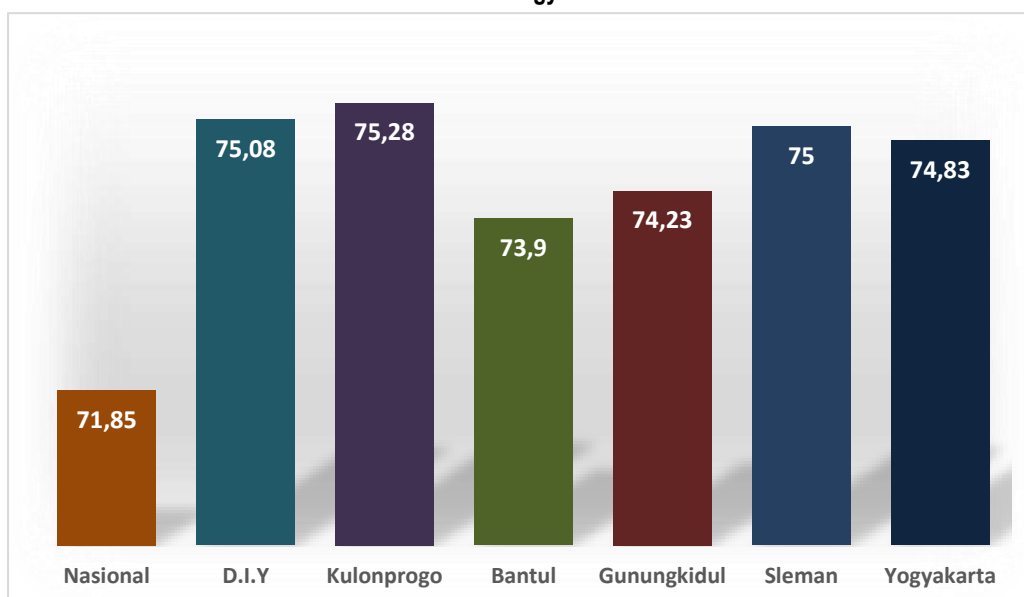
Peningkatan UHH selama 5 (lima) tahun di dari tahun 2018-2022 di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.6
Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Grafik 3.7
Perbandingan Usia Harapan Hidup Nasional, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota
se-Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Sleman juga terus digalakkan. Sejumlah Puskesmas dan RSUD telah dievaluasi oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2022 dengan hasil sebagai berikut:

- 1) RSUD Sleman memperoleh akreditasi kategori “Paripurna”
- 2) RSUD Prambanan memperoleh akreditasi kategori “Paripurna”
- 3) Akreditasi terhadap 25 (dua puluh lima) Puskesmas dengan hasil, sebagai berikut:
 - a) Puskesmas Kategori Paripurna 1 puskesmas (Puskesmas Mlati 2);
 - b) Puskesmas Kategori Utama 14 puskesmas; dan
 - c) Puskemas Kategori Madya 10 puskesmas.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2022 di antaranya :

- 1) Adanya beberapa regulasi bidang kesehatan yang mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian indikator kinerja;
- 2) Tersedianya anggaran, sarana kesehatan yang memadai dan sumber daya yang berkualitas;



- 3) Adanya kolaborasi dengan lintas Perangkat Daerah dalam Sleman Smart City;
- 4) Pengembangan sistem informasi kesehatan melalui Smart Health antara lain Sleman Emergency Services;
- 5) Adanya beberapa inovasi dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan;
- 6) Meningkatnya perubahan perilaku masyarakat untuk penerapan lima pilar STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- 7) Adanya sepuluh Puskesmas Rawat inap yang mampu memberikan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED). Puskesmas PONED berada di Puskesmas Kalasan, Puskesmas Berbah, Puskesmas Ngemplak I, Puskesmas Turi, Puskesmas Tempel I, Puskesmas Mlati II, Puskesmas Seyegan, Puskesmas Godean I, Puskesmas Minggir dan Puskesmas Sleman. Layanan PONED merupakan layanan kesehatan yang disediakan oleh Puskesmas rawat inap terkait penanganan kasus emergensi obstetri dan neonatus bagi ibu hamil tingkat dasar selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu; dan
- 8) Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang memberikan fleksibilitas dan dapat digunakan langsung untuk mendanai operasional pelayanan rumah sakit guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Kabupaten Sleman antara lain bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya penyediaan pelayanan kesehatan yang merata, mudah dan murah. Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Sleman menerima penghargaan dari BPJS Kesehatan karena telah meraih cakupan *Universal Health Coverage* (UHC) diatas 96,00%. Pemerintah Kabupaten Sleman juga menerima penghargaan sebagai kabupaten/kota terbaik STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) Berkelanjutan Kategori *Demand Creation* dari Kementerian Kesehatan.



Beberapa indikator yang digunakan dalam analisis guna melihat perkembangan kondisi kesehatan di Kabupaten Sleman disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5
Cakupan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	4,06	4,09	4,43	3,71	4,91
2	Angka kelangsungan hidup bayi	995,89	995,91	995,57	996,29	995,09
3	Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup	4,32	4,61	4,89	4,28	5,75
4	Angka kematian neo natal per 1.000 kelahiran hidup	2,59	3,27	3,42	3,15	4,25
5	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	50,44	59,43	62,17	363,40	91,61
6	Rasio posyandu per satuan balita	22,07	22,78	27,61	30,83	25,78
7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,16	0,18	0,20	0,21	0,24
8	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
9	Rasio dokter per satuan penduduk	1,47	1,28	1,49	2,20	1,94
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1,82	1,55	1,79	3,18	3,08
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	99,99	99,99	99,99	99,99	91,96
13	Cakupan desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	95,38	89,83	79,35	97,99	97,69
16	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	1,28	3,94	0,00	2,17	3,90
17	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	39,18	47,81	33,73	11,72	31,80
18	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	30,88	26,21	37,91	35,94	61,01
19	Tingkat prevalensi <i>Tuberculosis</i> (per 100.000 penduduk)	96,00	104,21	71,86	84,15	161,29
20	Tingkat kematian karena <i>Tuberculosis</i> (per 100.000 penduduk)	3,024	1,961	3,611	1,288	0,734
21	Proporsi jumlah kasus <i>Tuberculosis</i> yang terdeteksi dalam program DOTS	30,88	26,21	37,91	35,94	61,01
22	Proporsi kasus <i>Tuberculosis</i> yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	86,59	87,88	87,21	56,40	58,70
23	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
24	Penderita diare yang ditangani	59,19	82,34	69,13	11,92	24,15
25	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
26	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100	100	100
27	Cakupan kunjungan bayi	91,33	90,77	74,76	71,77	86,18
28	Cakupan puskesmas	147,06	147,06	147,06	147,06	147,06
29	Cakupan pembantu puskesmas	81,40	81,40	81,40	80,23	80,23
30	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	100,00	92,64	97,91	99,06	83,65
31	Cakupan pelayanan nifas	96,22	96,53	95,55	96,47	97,49



No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
32	Cakupan neon atus dengan komplikasi yang ditangani	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
33	Cakupan pelayanan anak balita	90,69	99,99	72,20	71,54	83,41
34	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	97,09	98,46	98,85	99,44	99,40
35	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100,00	99,93	42,20	55,69	90,02
36	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
37	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
39	Angka Harapan Hidup	74,69	74,77	74,81	78,84	75
40	Persentase balita gizi buruk	0,52	0,51	0,54	0,65	0,95
41	Persentase balita gizi kurang	7,32	7,66	5,98	6,37	7,78
42	Cakupan desa siaga aktif	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Angka Kematian Bayi

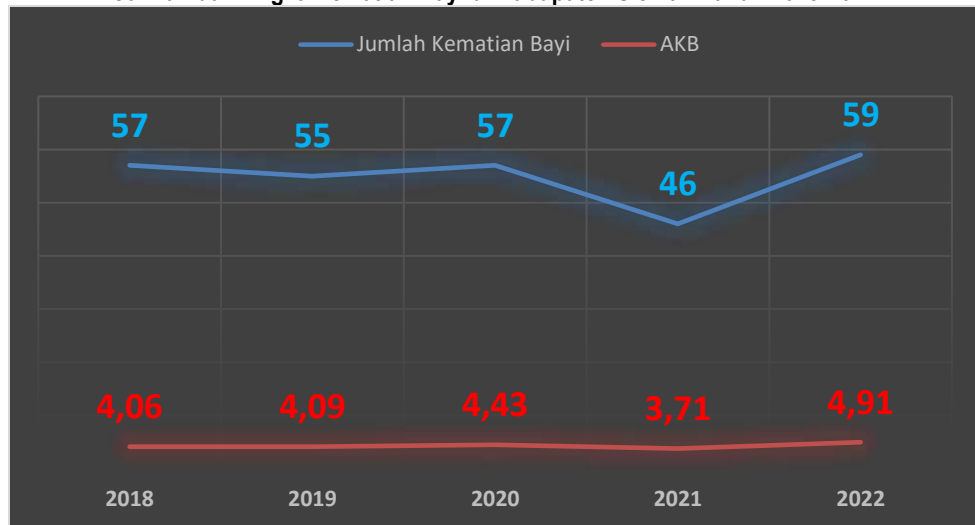
Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1.000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. AKB merupakan indikator penting yang mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat. Bayi baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi.

Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. AKB merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Angka Kematian Bayi pada tahun 2022 sebesar 4,91 per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini mengalami kenaikan sebesar 13 kasus dibandingkan Angka Kematian Bayi pada tahun 2021.





Grafik 3.8
Jumlah dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Pada tahun 2022 di Kabupaten Sleman terdapat 59 kasus kematian bayi. Angka Kematian Bayi tersebut berhubungan erat dengan kenaikan Ibu Hamil dengan usia lebih dari 40 tahun, kehamilan lebih dari 5 kali, dan Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD).

Distribusi penyebab kematian bayi pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.6
Distribusi Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Sleman Tahun 2022

No.	Penyebab Kematian Bayi	Jumlah Kasus	Porsentase
1	Kelainan Konginetal	22	37,29%
2	Premature dan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)	13	22,03%
3	Asfiksia	11	18,64%
4	Infeksi	4	6,78%
5	Aspirasi	3	5,08%
6	<i>Pneumonia</i>	1	1,69%
7	<i>Mekonium</i>	1	1,69%
8	Demam	1	1,69%
9	Penyakit lainnya	3	5,08%
	Jumlah	59	100,00%

Sumber: Dinas Kesehatan 2023

2) Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka Kelangsungan Hidup Bayi merupakan peluang hidup bayi sampai dengan usia 1 tahun. Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah satu tahun dalam kurun waktu satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka ini merupakan peluang bayi hidup sampai dengan usia satu tahun.



Pada tahun 2022, Angka Kematian Bayi sebesar 4,91 sehingga Angka Kelangsungan Hidup Bayi adalah seribu dikurangi angka kematian bayi yaitu 995,09 hari.

3) Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup

Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal, termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka Kematian Balita kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk. Jumlah kematian balita pada tahun 2022 sebanyak 69 balita dari 12.008 kelahiran hidup, sehingga Angka Kematian Balita sebesar 5,75 per 1.000 kelahiran hidup. Data Angka Kematian Balita di Kabupaten Sleman tahun 2018 sampai dengan 2022 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Angka Kematian Balita Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022

No.	Tahun	Jumlah Kematian Balita	Angka Kematian Balita
1	2018	60	4,32
2	2019	62	4,61
3	2020	63	4,89
4	2021	53	4,28
5	2022	69	5,75

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Naiknya angka kematian balita tersebut merupakan dampak dari kenaikan angka kematian bayi yang juga mengalami kenaikan pada tahun 2022.

4) Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup.

Kematian neonatal adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Pada tahun 2022 di Kabupaten Sleman jumlah kematian neonatal adalah 51 dan Angka Kematian Neonatal adalah 4,25 per seribu kelahiran hidup.

Perkembangan Angka Kematian Neonatal di Kabupaten Sleman selama 5 (tahun) terakhir tersaji pada tabel berikut:



Tabel 3.8
Angka Kematian Neonatal Per 1.000 Kelahiran Hidup Tahun 2018-2022

No.	Tahun	Jumlah Kematian Neonatal	Angka Kematian Neonatal
1	2018	36	2,59
2	2019	44	3,27
3	2020	44	3,42
4	2021	39	3,15
5	2022	51	4,25

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Pada tahun 2022 jumlah kematian neonatal mengalami kenaikan yaitu sebanyak 12 kasus dibandingkan tahun 2021 sebanyak 39 kasus. Naiknya angka kematian neonatal tersebut merupakan dampak dari kenaikan ibu hamil dengan usia lebih dari 40 tahun dan kehamilan lebih dari 5 kali.

5) Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup

Kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll (Budi, Utomo. 1985). Informasi mengenai tingginya MMR akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (making pregnancy safer), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyambut kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi.

Pada tahun 2022 terdapat sejumlah 11 kasus kematian ibu, dengan Angka Kematian Ibu sebesar 91,61 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2022 terdapat penurunan Angka Kematian Ibu jika dibandingkan dengan Angka Kematian Ibu pada tahun 2021 sebesar 271,79.



Kasus kematian ibu pada tahun 2022 disebabkan diantaranya karena kasus pendarahan sebanyak 4 kasus, 2 kasus pre-eklamsia, 1 ADRS derajat berat karena masalah paru, 1 kasus Syok Septik, 1 kasus Sepsis, 1 kasus Jantung dan 1 kasus ileus. Adapun jumlah dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Sleman selama 5 (lima) tahun terakhir tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Jumlah dan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Sleman tahun 2018-2022

No.	Tahun	Jumlah Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu
1	2018	7	50.44
2	2019	8	59.43
3	2020	8	62.17
4	2021	45	363.40
5	2022	11	91.61

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Hasil Audit Maternal Perinatal di Kabupaten Sleman pada tahun 2022, dari sejumlah 11 kematian tersebut 7 kematian diantaranya tidak mengalami keterlambatan dan 4 kasus lainnya mengalami keterlambatan, yaitu keterlambatan mengambil keputusan untuk merujuk, baik dari keputusan keluarga maupun keputusan dari tenaga kesehatan yang menangani tindakan.

6) Rasio posyandu per satuan balita

Jumlah balita di Kabupaten Sleman pada tahun 2022 mencapai 59.543 balita yang dihitung dari jumlah sasaran balita yang mendapat pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal. Jumlah posyandu di Kabupaten Sleman pada tahun 2022 sejumlah 1.535 posyandu. Rasio posyandu per satuan balita pada tahun 2022 per 1.000 balita adalah 25,78. Adanya peningkatan rasio posyandu per satuan balita dari tahun ke tahun menjadi tantangan tersendiri, sehingga dibutuhkan upaya dari berbagai lintas program. Peraturan Bupati Nomor 44.2 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dimana posyandu menjadi salah satu bagian, semakin menguatkan kembali kelembagaan posyandu ditingkat kalurahan bahkan sampai di tingkah padukuhan.

7) Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

Puskesmas di Kabupaten Sleman berjumlah 25 (dua puluh lima) unit, yang terdiri dari 10 unit puskesmas dengan tempat perawatan dan 15 unit puskesmas non perawatan. Jumlah penduduk di Kabupaten Sleman tahun 2022 berdasarkan data SIAK adalah 1.097.955 jiwa. Rasio jumlah penduduk dengan jumlah puskesmas berdasarkan Profil Kesehatan dari Kementerian Kesehatan adalah 1:30.000. Apabila dihitung rasio antara jumlah penduduk dengan jumlah puskesmas seharusnya maka diperoleh hasil $1.097.955 : 30.000 = 36,60$. Artinya dengan jumlah penduduk sebanyak 1.097.955 jiwa, dibutuhkan sedikitnya 37 puskesmas. Rasio jumlah penduduk dengan jumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Sleman pada tahun 2022 adalah $1.097.955 : 25 = 43.919$ jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan jumlah puskesmas apabila dirasioikan dengan jumlah penduduk, berdasarkan referensi dari Profil Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama (FKTP) di Kabupaten Sleman yang memberikan pelayanan kepada masyarakat selain puskesmas adalah klinik pratama. Pada tahun 2022 di Kabupaten Sleman tercatat ada 34 klinik pratama yang telah bekerjasama dengan BPJS. Sehingga meskipun jumlah puskesmas belum memenuhi rasio dengan jumlah penduduk, masyarakat dapat mengakses pelayanan dari klinik pratama.

8) Rasio rumah sakit per satuan penduduk

Persebaran rumah sakit di setiap kecamatan dan ketersediaan tempat tidur di 11 kapanewon yang tersedia rumah sakit telah memenuhi rasio tempat tidur dengan jumlah penduduk. Kapanewon Ngaglik belum terpenuhi rasio jumlah tempat tidur yang tersedia di rumah sakit dengan jumlah penduduk sehingga memungkinkan untuk penambahan fasilitas rumah sakit. Sedangkan di Kapanewon Turi, Kapanewon Tempel, Kapanewon Cangkringan, Kapanewon Moyudan dan Kapanewon Godean belum tersedia rumah sakit.



Pedoman Penyusunan Rencana Induk (masterplan) Rumah Sakit Kementerian Kesehatan tahun 2012 menyebutkan bahwa rasio kebutuhan TT untuk 1.000 penduduk yaitu minimal 1 TT : 1.000 penduduk. Sehingga dari data di atas, rasio perbandingan mengenai tingkat ketersediaan tempat tidur terhadap penduduk Kabupaten Sleman di dengan jumlah penduduk Kabupaten Sleman adalah 1.097.955 jiwa dan jumlah tempat tidur rumah sakit pada tahun 2022 sebesar 3.189 TT diperoleh rasio 1 : 344. Ketersediaan tempat tidur total rumah sakit di Kabupaten Sleman terhadap jumlah penduduk adalah 1 TT tersedia untuk 344 penduduk. Nilai perbandingan tersebut masih lebih besar dari rasio ketersediaan tempat tidur sesuai Pedoman Penyusunan Rencana Induk (masterplan) Rumah Sakit Kementerian Kesehatan tahun 2012. Sementara rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Sleman pada tahun 2022 dengan jumlah rumah sakit 28 (dua puluh delapan) dan jumlah penduduk sebesar 1.097.955 jiwa diperoleh angka 0,03 per 1.000 penduduk.

9) Rasio dokter per satuan penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk merupakan perbandingan ideal antara jumlah ketersediaan dokter dibanding jumlah penduduk. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia mengatur bahwa target dokter per satuan penduduk adalah 1 : 2.200. Data profil SDMK tahun 2022 di Kabupaten Sleman terdapat jumlah dokter umum sebanyak 2.111 orang dengan jumlah penduduk sebanyak 1.097.955, sehingga hasil perhitungan rasio dokter per 1000 penduduk diperoleh 1,92.

10) Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Tenaga medis terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, tidak terdapat target untuk tenaga medis.



Target yang ada adalah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, bidan, dan perawat. Berdasarkan profil SDM Kabupaten Sleman tahun 2022, jumlah tenaga medis sebanyak 3.358 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Dokter umum : 2.111
- b) Dokter Gigi : 433
- c) Dokter Spesialis : 814 (termasuk sub spesialis)

Jumlah penduduk Kabupaten Sleman tahun 2022 adalah 1.097.955 dan total tenaga medis 3.358 tenaga medis, sehingga didapatkan rasio tenaga medis per 1.000 penduduk sebesar 3,06.

11) Penanganan obstetri dengan komplikasi

Penanganan obstetri dengan komplikasi yang ditangani pada tahun 2021 sebesar 100%, demikian juga pada tahun 2022 sebesar 100%. Hal tersebut didukung dengan pemantauan deteksi faktor risiko pada kehamilan cukup baik, serta adanya penerapan pedoman rujukan maternal neonatal yang sudah berjalan cukup baik.

12) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

Sasaran Ibu bersalin yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2022 adalah 13.017. Sejumlah 11.970 Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan sesuai standard dan 2 ibu bersalin yang tidak mendapatkan persalinan sesuai standar. Hal tersebut dikarenakan 1 ibu hamil dengan ODGJ dan 1 ibu hamil dengan kehamilan ke-7 yang tidak merasakan adanya tanda-tanda persalinan sehingga bersalin di rumah. Pada tahun 2022 tercatat 1.045 ibu hamil yang belum terlayani karena secara riil ibu bersalin tersebut tidak ditemukan di lapangan atau dengan kata lain, sasaran ibu bersalin yang ditetapkan lebih besar dari ibu hamil riil yang ada.

13) Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan imunisasi suatu desa dalam upaya menilai kualitas imunisasi.



Penilaian yang dilakukan pada tingkat desa diharapkan mendapat hasil imunisasi lengkap mencapai hasil yang tinggi dan merata. Suatu desa dikatakan UCI jika hasil Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) mencapai 80,00% untuk target nasional dan 95,00% untuk target DIY. Secara Nasional capaian UCI di Sleman sudah mencapai 100,00%, dari 86 kalurahan secara keseluruhan sudah mencapai IDL di atas 80,00%. Pada tahun 2022 terdapat 85 kalurahan dari 86 kalurahan yang mencapai IDL diatas 95,00%. Satu kalurahan yang tidak IDL adalah Kalurahan Sukoharjo karena di kalurahan tersebut terdapat banyak kantong penolakan Imunisasi.

14) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Pada tahun 2022 di Kabupaten Sleman ditemukan kasus balita gizi buruk baru (indeks BB menurut TB) sebanyak 39 balita. Semua kasus gizi buruk yang ditemukan dilakukan perawatan baik secara rawat jalan maupun rawat inap sesuai dengan kondisi balita, sehingga tercapai 100% balita gizi buruk mendapat perawatan. Seluruh puskesmas dapat melakukan perawatan balita gizi buruk sesuai dengan tatalaksana yang ada karena semua tim asuhan gizi puskesmas sudah terlatih, yang terdiri dari dokter, bidan atau perawat, psikolog, dan nutrisisionis. Namun, jika masih ditemukan kendala maka balita gizi buruk dapat dirujuk melalui *Therapeutic Feeding Center* yang dipusatkan di Puskesmas Minggir, Puskesmas Mlati 2, Puskesmas Kalasan, dan Puskesmas Ngemplak 1.

15) Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak

Imunisasi terakhir pada masa bayi adalah pemberian imunisasi campak. Imunisasi ini diberikan pada usia 9 bulan. Jika anak sudah mendapatkan imunisasi campak secara tidak langsung sudah mendapatkan imunisasi lengkap yang diperoleh anak baru lahir sampai usia 9 bulan. Imunisasi yang diperoleh bayi baru lahir sampai 9 bulan meliputi HB0, BCG, DPT, IPV, dan MR atau Campak Rubela. Hasil Imunisasi Campak di Kabupaten Sleman sejak tahun 2018 yaitu 97,69% diatas target nasional sebesar 95,00%.

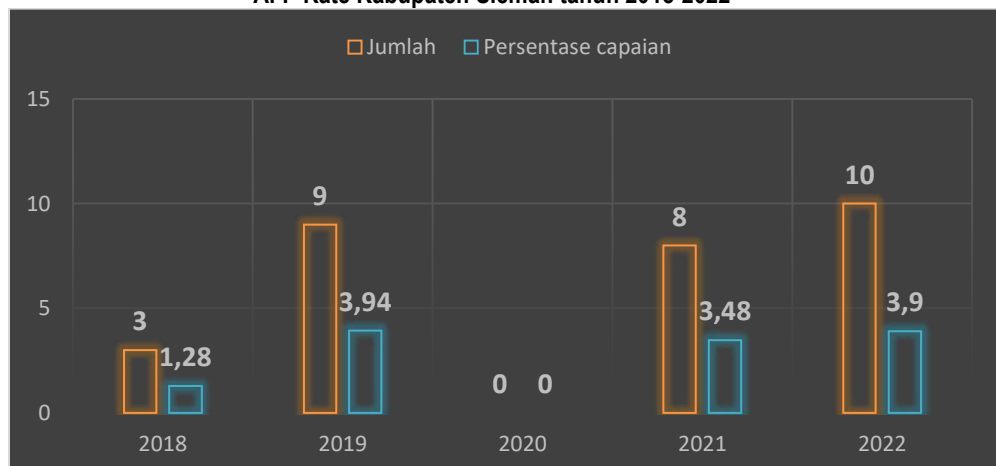




16) Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk

Acute Flaccid Paralysis (AFP) atau biasa dikenal dengan Lumpuh Layuh merupakan merupakan kelumpuhan yang sifatnya lemas, terjadi mendadak dalam 1-14 hari dan bukan disebabkan trauma yang dialami oleh anak usia < 15 tahun. Penemuan kasus AFP merupakan indikator keberhasilan surveilans AFP. Indikator kinerja surveilans AFP nasional adalah 2 per 100.000 penduduk usia <15 tahun. Target di DIY adalah 3 per 100.000 penduduk usia <15 tahun. Tujuan pelaksanaan surveilans AFP adalah penemuan kasus AFP dalam rangka Eradikasi Global Polio 2024. Perkembangan AFP Rate Kabupaten Sleman selama 5 (lima) tahun terakhir tersaji pada grafik berikut :

Grafik 3.9
AFP Rate Kabupaten Sleman tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Surveilans AFP merupakan pengamatan yang dilakukan terhadap semua kasus lumpuh layu akut atau AFP pada anak usia <15 tahun yang merupakan kelompok rentan atau suspek terhadap penyakit polio. Hasil kinerja Surveilans AFP Tahun 2022 menunjukkan AFP rate 3,90 yang artinya sudah diatas target nasional maupun target DIY. Masih terdapat Puskesmas yang belum menemukan kasus dan ada Puskesmas yang menemukan kasus AFP lebih dari 1. Penemuan kasus AFP 60 % masih ditemukan di RS. Penemuan kasus AFP merupakan salah satu indikator keberhasilan surveilans Polio.





17) Cakupan balita pneumonia yang ditangani

Tatalaksana pneumonia balita merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap balita sakit. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan cakupan program penanganan ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Atas) dan menurunkan angka kematian karena pneumonia. Capaian Program Pemberantasan dan Penanggulangan ISPA tahun 2022 sebesar 1.495 kasus dari target 4.701 kasus (31,80%). Hal ini mengalami kenaikan dari capaian tahun 2021 yaitu 11,72%. Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab rendahnya cakupan Program Pemberantasan dan Penanggulangan ISPA adalah rendahnya kapasitas petugas dalam deteksi dini kasus, sistem pelaporan yang belum optimal, keterbatasan dana, serta tingginya rotasi petugas.

18) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Tuberkulosis (TB) masih merupakan masalah utama kesehatan Indonesia sebagai urutan nomer 2 dunia setelah India. Capaian temuan semua kasus (*Case Detection Rate* dalam %) tahun 2022 sebesar 1.757 kasus dari target sebesar 2.880 kasus (61.01%). Faktor pendorong capaian adalah perhitungan CDR tahun 2022 berdasarkan program, yaitu semua kasus TB (bukan hanya kasus BTA Positif) dibagi target estimasi kasus pada tahun 2022 sebesar 2.880. BTA Positif artinya dari hasil pemeriksaan mikroskopis ditemukan bakteri tahan asam pada sampel dahak orang yang diduga TBC. Walaupun demikian angka ini masih jauh dari angka sesuai target estimasi nasional untuk Kabupaten Sleman. Upaya terus dilakukan dengan pendekatan screening secara virtual menggunakan ceklis “AKSI PERJAKA 2M” tetap ditingkatkan sebagai upaya screening batuk di tempat-tempat berisiko untuk menjangkit suspek TB seperti perusahaan, perguruan tinggi, sekolah, ponpes, lapas, dan masyarakat. Kerjasama dengan Zero TB banyak meningkatkan penemuan terduga maupun kasus TB di Kabupaten Sleman.



19) Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Tingkat prevalensi Tuberkulosis adalah jumlah kasus TBC (baru dan lama) dibagi jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama dikali 100.000 penduduk. Pada tahun 2022 prevalensi kasus TB di Kabupaten Sleman sebesar 160,02%. Prevalensi kasus TB tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 sebesar 84,15%. Hal ini disebabkan karena penemuan kasus secara aktif masif dan pasif intensif di fasyankes.

20) Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Tingkat kematian tuberkulosis yaitu jumlah pasien TBC yang meninggal dibagi jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama dikali 100.0000. Tahun 2022 jumlah pasien TBC yang meninggal sebanyak 8 pasien (0,729%), lebih rendah dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 1,288%.

21) Proporsi jumlah kasus TBC yang terdeteksi dalam program DOTS

DOTS (*Directly Observed Treatment, Short-course*) adalah pengawasan langsung pengobatan jangka pendek pasien TB. Proporsi jumlah kasus TBC yang terdeteksi dalam program DOTS yaitu jumlah pasien TB yang mendapatkan pengobatan DOTS dibagi jumlah pasien TBC yang diperkirakan ada di wilayah tertentu dalam kurun waktu yang sama. Tahun 2022 ini proporsi jumlah kasus TBC yang terdeteksi sebanyak 61,01%, lebih banyak dari pada kasus tahun 2021 sebanyak 35,95%. Peningkatan ini dikarenakan penemuan kasus secara aktif, masif, dan pasif intensi di fasyankes.

22) Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS

Hasil capaian kesembuhan (*cure rate*) tahun 2022 adalah 58,70%. Capaian ini dibawah target nasional 90,00%. Hal ini dikarenakan beberapa pasien TB bakteriologis tidak melakukan pemeriksaan tindak lanjut di bulan ke-2, satu bulan sebelum akhir pengobatan, dan akhir pengobatan.



Keberhasilan pengobatan tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang ikut menjadi petugas PMO (Pengawas Menelan Obat) seperti Kader Sinergi dan kader puskesmas yang diberikan bimbingan teknis oleh puskesmas, yang selalu menyosialisasikan Penyakit Tuberkulosis dan penanganannya.

Pemerintah Kabupaten Sleman juga menganggarkan dalam APBD *reward* bagi pasien yang sembuh sebanyak 120 pasien sebesar Rp36.000.000,00 dengan masing-masing pasien sembuh BTA (+) akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00.

23) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)

Keberhasilan Pengendalian dan penanggulangan DBD dilihat dari keberhasilan tercapainya indikator DBD yaitu :

- a) *Inciden Rate* (IR) yaitu 10 per 100.000 penduduk
- b) *Case Fatality Rate* (CFR) yaitu $\leq 1,00\%$
- c) Penangan kasus 100%

Cakupan Kasus DBD yang ditemukan tahun 2022 sejumlah 330 kasus dengan 3 kematian dengan *Case Fatality Rate* 0,90%. *Incident rate* (IR) sebesar 30 per 100.000 penduduk masih diatas angka target. Tahun 2022 terjadi peningkatan kasus DBD sebesar 187%), yaitu dari 282 kasus pada tahun 2021 menjadi 330 kasus pada tahun 2022. Dilihat dari kasus per kapanewon tahun 2022, kapanewon dengan kasus DBD tertinggi adalah Kapanewon Prambanan (56 kasus dengan 1 kematian). Kapanewon Prambanan secara geografis berbatasan dengan kabupaten lain yaitu Kabupaten Bantul dan Kabupaten Klaten, dengan mobilitas penduduk yang tinggi. Kapanewon Prambanan juga baru memiliki 1 kalurahan yang menjadi Program Si Wolly Nyaman (*Wolbachia* Nyamuk Aman Cegah Demam Berdarah di Sleman). Kasus DBD di Kapanewon Mlati juga cukup tinggi, yaitu sejumlah 51 kasus dengan 1 kasus kematian. Jumlah kasus DBD di Kapanewon Moyudan dan Depok (33 dan 31) kasus DBD tanpa kasus kematian.





Jumlah kasus DBD per Kapanewon tahun 2022 tersaji pada tabel berikut:

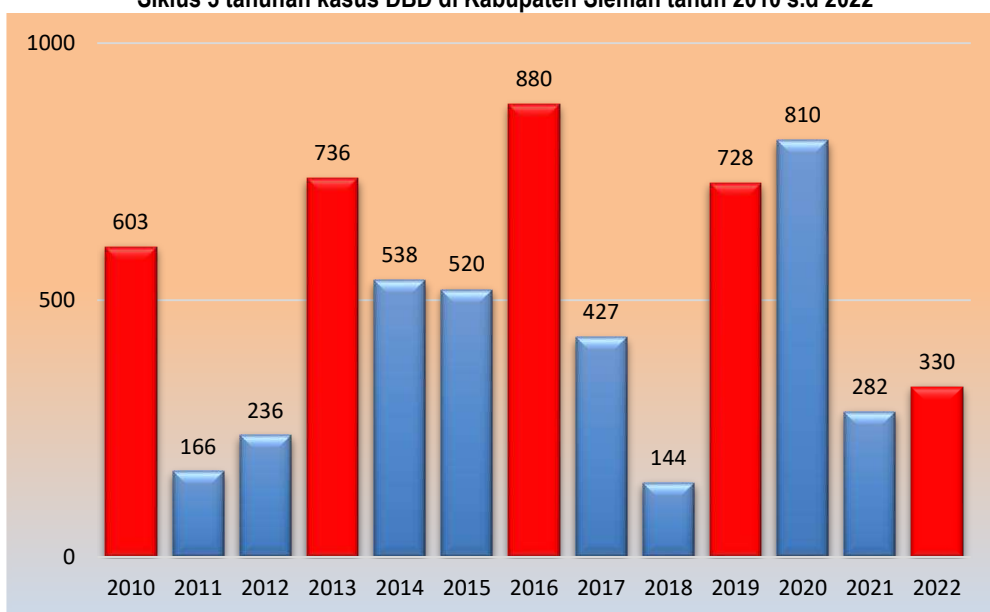
Tabel 3.10
Sebaran Kasus DBD Per Kapanewon Tahun 2022

No.	Kapanewon	Jumlah Kasus DBD	Jumlah Kasus Kematian
1	Prambanan	56	1
2	Mlati	51	1
3	Moyudan	33	-
4	Depok	31	-
5	Seyegan	27	-
6	Ngemplak	26	-
7	Tempel	23	-
8	Gamping	16	-
9	Ngaglik	14	-
10	Minggir	13	1
11	Sleman	11	-
12	Berbah	10	-
13	Kalasan	9	-
14	Godean	7	-
15	Turi	1	-
16	Pakem	1	-
17	Cangkringan	1	-
Jumlah Total		330	3

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Tahun 2022 merupakan siklus tiga tahunan kasus DBD di Kabupaten Sleman dengan jumlah kasus seperti pada grafik di bawah .

Grafik 3.10
Siklus 3 tahunan kasus DBD di Kabupaten Sleman tahun 2010 s.d 2022



Sumber: Dinas Kesehatan, 2023





Kasus DBD pada tahun 2022 merupakan kasus terendah dibandingkan dengan siklus tiga tahunan sebelumnya yaitu pada tahun 2019, 2016, 2013, dan 2010. Keberhasilan pengendalian kasus pada siklus tiga tahunan DBD pada tahun 2022 dipengaruhi oleh adanya program penanggulangan DBD di Kabupaten Sleman, di antaranya :

- a. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), Gerakan satu rumah satu Jumantik (GIRIJ).
- b. Fogging dan inovasi teknologi nyamuk *Aedes Aegypti* ber-*Wolbachia* (Si Wolly Nyaman) yang mendukung efisiensi pengendalian DBD di Kabupaten Sleman. Dalam teknologi ini, Kabupaten Sleman bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada bersama dengan *World Mosquito Program* (WMP) yang didukung oleh Yayasan Tahija dengan program bernama Si Wolly Nyaman (*Wolbachia* Nyamuk Aman Cegah Demam berdarah di Sleman).
- c. Program pengendalian DBD tersebut diperkuat dengan adanya Surat Edaran Kewaspadaan Dini terhadap DBD dan Fogging.
- d. Optimalisasi Pokjnal DBD Kabupaten dengan mendorong Pokjnal DBD Kapanewon untuk lebih giat melaksanakan Pemantuan Kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk di Kalurahan.

24) Penderita diare yang ditangani

Jumlah penderita diare yang ditangani sesuai standar di Kabupaten Sleman pada tahun 2022 sebanyak 24,15%. Cakupan ini terbilang rendah meskipun sudah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 sebesar 12,23%. Faktor utama penyebab rendahnya cakupan program diare adalah belum optimalnya pencatatan pelaporan (*underreporting*) yang dipengaruhi oleh sistem pelaporan yang belum optimal. Belum ada mekanisme laporan dari RS dan fasilitas kesehatan jejaring untuk melaporkan kasus diare yang ditemukan.



25) Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi

Prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Sleman tahun 2022 masih 0,01%, dengan jumlah kasus ditemukan sebanyak 156 kasus HIV baru (meningkat 30 kasus dibandingkan tahun 2021). Upaya *fast track* pada program HIV dengan segera memberikan akses pengobatan setelah ditemukan dalam upaya mendukung 3 zero (*zero new Infection, zero AIDS- related deaths, zero Stigma*). Upaya ini didukung dengan 16 layanan yang mampu melakukan perawatan dukungan dan pengobatan HIV di 12 Puskesmas dan 4 Rumah Sakit, yaitu Puskesmas Berbah, Puskesmas Depok 3, Puskesmas Ngemplak 1, Puskesmas Cangkringan, Puskesmas Pakem, Puskesmas Ngaglik 2, Puskesmas Mlati 1, Puskesmas Mlati 2, Puskesmas Sleman, Puskesmas Tempel 1, Puskesmas Gamping 2, Puskesmas Godean 1, RSUD Sleman, RSUD Prambanan, RSA UGM, dan RSUP dr. Sardjito.

26) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin mencapai 100,00% dengan jumlah pelayanan rujukan masyarakat miskin sebanyak 43.006 kunjungan. Hal ini meningkat dibandingkan tahun 2021 sebanyak 39.984 kunjungan. Upaya yang sudah dilakukan selain dengan meningkatkan cakupan jaminan kesehatan masyarakat dan melaksanakan sosialisasi jaminan kesehatan kepada masyarakat, juga melalui koordinasi lintas program dan lintas sektor.

27) Cakupan kunjungan bayi

Cakupan Kunjungan Bayi (KB-4) pada tahun 2021 sebesar 71,77% dan mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 86,18%. Kunjungan bayi sejumlah 9.264 bayi dari sasaran 10.749 bayi. Peningkatan capaian disebabkan meningkatnya koordinasi antara petugas puskesmas dengan pelayanan kesehatan swasta dan kesamaan definisi operasional dalam perhitungan kunjungan bayi, serta pilot projek Program PKAT (Pelayanan Kesehatan Anak Terintegrasi) dari JICA dan Kementerian Kesehatan.



28) Cakupan puskesmas

Cakupan puskesmas adalah jumlah puskesmas dibandingkan dengan jumlah kapanewon yang ada. Kabupaten Sleman memiliki 25 puskesmas dengan jumlah 17 kapanewon. Beberapa kapanewon memiliki lebih dari satu puskesmas, seperti Kapanewon Depok (3 Puskesmas), Kapanewon Gamping, Godean, Tempel, Ngaglik, Ngemplak, dan Mlati masing masing memiliki 2 puskesmas, sehingga capaian cakupan puskesmas lebih dari 147,06%. Capaian tersebut diharapkan pelayanan kesehatan khususnya puskesmas bisa dirasakan secara merata.

29) Cakupan pembantu puskesmas

Kabupaten Sleman memiliki 25 puskesmas di 17 kecamatan dan 69 pembantu puskesmas yang tersebar di 86 kalurahan. Cakupan pembantu puskesmas adalah jumlah pembantu puskesmas dibagi dengan jumlah kalurahan yang ada di Kabupaten Sleman, yaitu sebesar 80,23%. Sejumlah 17 kalurahan tidak memiliki pembantu puskesmas, tetapi terdapat puskesmas, sehingga disetiap kalurahan sudah terdapat puskesmas pembantu atau puskesmas.

30) Cakupan kunjungan Ibu hamil K4

Cakupan Kunjungan pertama (K1) pada Ibu Hamil tahun 2021 dan 2022 tercapai 100,00%. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 pada tahun 2021 adalah sebesar 99,06%. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 83,65%. Penyebab belum tercapainya K4 antara lain karena:

- a) Adanya perubahan penetapan sasaran ibu hamil, sasaran yang ditetapkan lebih besar dari ibu hamil yang ditemukan.
- b) Terdapat 1.121 ibu hamil tidak melakukan pemeriksaan kehamilannya pada usia kehamilan Trimester I. Hal ini disebabkan Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) (228 ibu hamil, 93 KTD dengan status menikah dan 135 KTD remaja dengan status belum menikah) dan 893 ibu hamil tidak terakses oleh tenaga kesehatan karena mobilitas tinggi dan sengaja menyembunyikan kehamilan.



31) Cakupan pelayanan nifas

Capaian kunjungan pertama nifas (KF1) pada tahun 2021 tercapai 100,00% dan 2022 masih bertahan tercapai 100,00%. Kunjungan nifas lengkap (KF3) mengalami peningkatan dari 96,47% pada tahun 2021 menjadi 97,49% pada tahun 2022 (11.671 ibu nifas dari 11.972 ibu nifas). Peningkatan capaian nifas dipengaruhi adanya pemantauan yang cukup baik dari tenaga kesehatan melalui SIM KIA Sembada dan pemanfaatan buku KIA yang sudah berjalan dengan baik.

32) Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

Penanganan neonatal dengan komplikasi (PNK) yang ditangani pada tahun 2021 sebesar 100,00%. Pada tahun 2022 PNK juga sebesar 100% (2.019 neonatus). Tercapainya PNK tersebut karena pemantauan deteksi faktor risiko pada kehamilan cukup baik serta adanya penerapan pedoman rujukan maternal neonatal yang sudah berjalan cukup baik.

33) Cakupan pelayanan anak balita

Cakupan balita mendapat pelayanan sesuai standar (SPM Balita) di kabupaten Sleman pada tahun 2022 mencapai 83.41% yaitu sejumlah 49.664 balita mendapat pelayanan sesuai standar dari 59.543 sasaran. Capaian tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 71,54%. Faktor yang mendukung peningkatan cakupan antara lain adanya kebijakan tertulis berupa surat edaran tentang kegiatan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita serta meningkatnya peran lintas sektor dalam program inovasi Gerakan Ajak Menimbang Cegah dan Atasi Stunting (Gambang Stunting).

34) Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin

Saat ini belum tersedia data khusus untuk cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada sasaran 6-24 bulan keluarga miskin, sehingga data yang digunakan adalah cakupan balita gizi kurang (indeks BB-TB) mendapat makanan tambahan pemulihan selama 90 hari.



Makanan tambahan yang diberikan kepada sasaran berupa biscuit dropping dari Kementerian Kesehatan, PMT tinggi protein hewani dari program Pecah Ranting Hiburane Rakyat, maupun PMT local dari anggaran puskesmas dan kalurahan. Pada tahun 2022 cakupan balita gizi kurang mendapat makanan tambahan sebesar 99,40% atau dari 2.811 sasaran sebanyak 2.794 balita mendapat makanan tambahan. Ada 2 puskesmas yang tidak mencapai target 100,00% yaitu Puskesmas Moyudan (97,73%) karena sasaran menolak untuk diberikan makanan tambahan yang disediakan oleh puskesmas dan Puskesmas Ngemplak 1 (76,56%) karena stok makanan tambahan di puskesmas habis. Penetapan definisi operasional yang lebih jelas, memastikan ketersediaan stock makanan tambahan, dan variasi makanan tambahan yang disediakan untuk meningkatkan daya terima sasaran dibutuhkan agar tersedia data yang akurat.

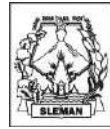
35) Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat

Sejumlah 126.087 anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan sesuai standar dari sejumlah 140.062 anak usia pendidikan dasar yang ada (90,02%). Capaian target belum 100,00% karena pada tahun 2022 pelaksanaan penjangkaran juga disertai pencatatan dan pelaporan berbasis elektronik yaitu melalui laman web dan pemanfaatan teknologi android dengan menggunakan aplikasi yang bernama *moobscreen* yang sudah dimanfaatkan secara efektif sejak adanya pandemi Covid-19.

36) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin mencapai 100,00% dengan jumlah kunjungan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin sebanyak 345.631 kunjungan. Hal ini meningkat dibandingkan tahun 2021 yaitu sebanyak 254.368 kunjungan pelayanan masyarakat miskin. Peningkatan tersebut dapat diartikan bahwa kesadaran masyarakat miskin untuk menjaga kesehatan juga meningkat. Upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, diantaranya:



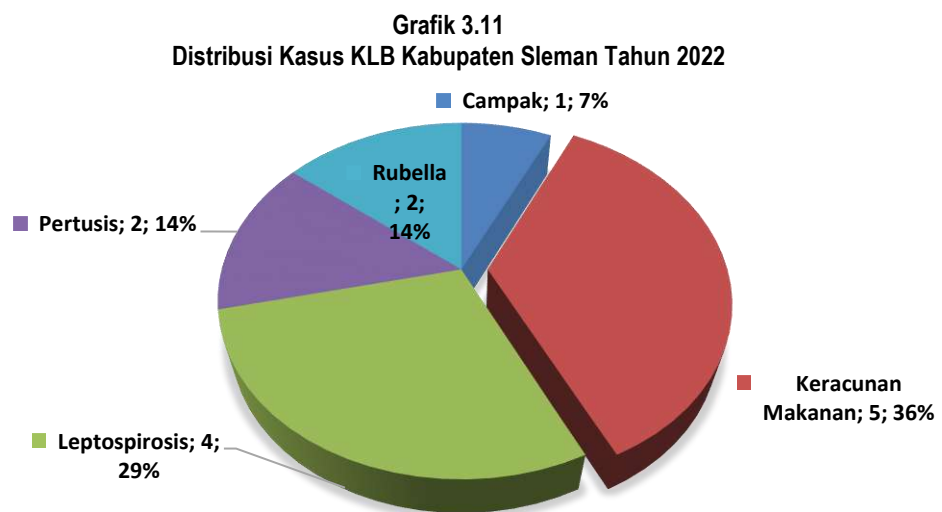


- a) Meningkatkan cakupan jaminan kesehatan masyarakat
 - b) Sosialisasi jaminan kesehatan ke masyarakat
 - c) Koordinasi lintas program dan lintas sektor
- 37) Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan.

Rumah Sakit (RS) sebagai fasilitas kesehatan harus memiliki pelayanan gawat darurat dan memberikan penanganan segera untuk kasus kegawatdaruratan. Seluruh RS di wilayah Kabupaten Sleman (28 RS) sudah memberikan pelayanan gawat darurat level I.

- 38) Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam.

Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kabupaten Sleman selama tahun 2018 sampai 2022 dapat tertangani dalam 24 jam. Pada tahun 2022 terdapat 14 (empat belas) kasus KLB dengan sebaran sebagai berikut:



Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

- 39) Umur Harapan hidup

Umur Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Indikator AHH di Kabupaten Sleman dari target sebesar 74,85 tahun terealisasi sebesar 75,00 tahun sehingga tingkat capaian kinerja indikator AHH adalah sebesar 100,20%.



40) Presentase balita gizi buruk

Persentase balita gizi buruk pada 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan dari 0,54% di tahun 2020 menjadi 0,65% di tahun 2021 dan 0,95% di tahun 2022. Peningkatan presentase balita gizi buruk salah satunya disebabkan meningkatnya prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Kurang dari 2.500 gr atau Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dari 4,41% pada tahun 2021 menjadi 6,30% pada tahun 2022. Faktor penyebab munculnya masalah gizi buruk antara lain penyakit yang diderita balita, kemiskinan, akses air bersih dan sanitasi lingkungan yang buruk, pendidikan dan pengetahuan tentang gizi yang kurang, dan pola asuh balita yang buruk. Upaya yang telah dilakukan sektor kesehatan dimulai sejak balita terdeteksi status gizi kurang, dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor terkait agar permasalahan status gizi kurang dan status gizi buruk pada balita dapat diturunkan secara optimal.

41) Presentase balita gizi kurang

Persentase balita gizi kurang selama 3 (tiga) tahun terakhir juga mengalami peningkatan dari 5,98% di tahun 2020 menjadi 6,37% di tahun 2021 dan menjadi 7,78% di tahun 2022. Rendahnya partisipasi masyarakat untuk melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan di posyandu secara rutin setiap bulan selama pandemi Covid-19 diduga menjadi salah satu faktor rendahnya deteksi dini permasalahan gizi yang terjadi. Tingkat partisipasi masyarakat untuk datang ke posyandu pada tahun 2020 adalah 63,29% pada tahun 2021 sebesar 63,14% dan pada tahun 2022 sebesar 75,50%. Peningkatan partisipasi masyarakat juga diikuti dengan meningkatnya prevalensi balita dengan risiko gagal tumbuh atau dengan status pertumbuhan tidak naik (T) yaitu sebesar 33,81% pada tahun 2020 menjadi 34,74% pada tahun 2021 dan 37,00% pada tahun 2022.

Upaya yang telah dilakukan antara lain dengan menyosialisasikan Surat Edaran Nomor HK.02.02-I-1371-2021 tentang Kegiatan Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Balita yang

mengamanatkan bahwa seluruh balita 0-59 bulan harus dilakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan secara rutin setiap bulan di posyandu sebagai deteksi dini gangguan tumbuh kembang. Regulasi tersebut juga mengamanatkan bahwa balita dengan status pertumbuhan tidak naik (T) di posyandu harus segera dirujuk ke pelayanan kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Intervensi lokal berupa Pemberian Makanan Tambahan dari Program Inovasi Pecah Ranting Hiburane Rakyat juga diberikan kepada sasaran balita *underweight* atau status pertumbuhan Tidak Naik (T) yang merupakan balita rawan stunting.

42) Cakupan desa siaga aktif

Cakupan Desa Siaga aktif Kabupaten Sleman mencapai 100,00% sejak tahun 2016. Desa Siaga aktif ini mencakup 8 kriteria yakni adanya forum desa/kalurahan, adanya KPM/kader kesehatan, kemudahan akses pelayanan kesehatan dasar, adanya posyandu, dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Adanya dukungan dana untuk kegiatan kesehatan di Desa/ Kalurahan, Adanya Peran serta masyarakat dan ormas, Adanya peraturan desa/ kalurahan serta Pembinaan PHBS Rumah Tangga. Desa Siaga Aktif di Kabupaten Sleman sebagai wadah dalam seluruh UKBM yang ada di wilayah desa/ kalurahan.

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan didukung dengan beberapa program dengan capaian indikator kinerja program, sebagai berikut:

Tabel 3.11
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2022

No	Program / Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota				
	a. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%
	b. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100,00	100,00	100,00%
	c. Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit bagian Tata Usaha (RSUD Sleman)	%	94,00	100,00	106,38%



No	Program / Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	d. Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian keuangan dan aset (RSUD Sleman)	%	81,00	87,50	108,02%
	e. Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian perencanaan dan pengembangan (RSUD Sleman)	%	65,00	100,00	153,85%
	f. Persentase capaian Indikator SPM-RS Bagian Tata Usaha (RSUD Prambanan)	%	88,56	94,68	106,91%
2	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat				
	a. Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) sesuai standart pusat >60%	%	82,75	81,95	99,03%
	b. Persentase cakupan pelayanan Sleman <i>Emergency Services</i> (SES)	%	100,00	100,00	100,00%
	c. Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	90,00	96,71	107,46%
	d. Angka penemuan penderita TB Case <i>Detection Rate</i> (CDR)	%	42,50	61,01	143,55%
	e. Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Kesehatan Masyarakat	%	100,00	89,90	89,90%
	f. Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	%	100,00	115,51	115,51%
	g. Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	rasio	2,70	2,93	108,52%
	h. Rerata Indeks Kepuasan Layanan Medis dan Indikator Mutu RS yang tercapai	indeks	77,00	78,16	101,51%
	i. Rerata Pencapaian mutu asuhan keperawatan baik dan Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	%	84,00	81,25	96,73%
	j. Rerata pemenuhan sarana pelayanan kesehatan dan pemenuhan jenis SIM RS	%	55,50	78,95	142,25%
	k. Indeks Kepuasan Pelayanan Medis dan Keperawatan	indeks	86,06	84,71	98,43%
	l. Indeks Kepuasan Pelayanan Penunjang dan Pemenuhan Sarana Rumah Sakit berdasarkan data ASPAK	indeks	80,50	79,22	98,41%
	m. Persentase pemenuhan indikator mutu rumah sakit dan pelaksanaan SIM-RS terintegrasi di unit pelayanan	%	90,00	100,45	111,61%
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan				
	a. Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar	%	85,00	85,46	100,54%
	b. Persentase praktik tenaga kesehatan yang telah berizin	%	85,00	97,54	114,75%
4	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman				
	a. Pengelolaan sediaan obat yang memenuhi syarat	%	60,00	79,49	132,48%



No	Program / Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	b. Pengelolaan sediaan makanan yang memenuhi syarat	%	90,00	88,52	98,36%
	c. Persentase toko, sarana prasarana kesehatan yang berizin	%	83,00	94,89	114,33%
5	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan				
	a. Persentase rumah tangga (RT) yang tidak merokok di dalam rumah	%	66,40	69,62	104,85%
	b. Persentase bayi ASI Eksklusif	%	84,60	87,34	103,24%
	c. Persentase edukasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) pada rumah tangga (RT)	%	85,40	86,73	101,56%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Urusan pemerintahan bidang kesehatan didukung dengan 5 (lima) program. Anggaran pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan sebesar Rp559.498.469.424,55 dengan realisasi Rp498.544.887.417,31 atau sebesar 89,11%. Capaian kinerja indikator kinerja program pada urusan pemerintahan bidang kesehatan diuraikan sebagai berikut:

1) Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota.

Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp418.406.776.861,55 dan terealisasi sebesar Rp375.086.130.232,92, sehingga tingkat kinerja keuangan tahun 2022 sebesar 89,65%. Program ini didukung dengan 8 kegiatan yaitu :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h) Peningkatan Pelayanan BLUD



Keberhasilan pelaksanaan program ini dapat dilihat pada capaian kinerja indikator kinerja program, sebagai berikut:

- a) Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dari target yang telah ditetapkan sebesar 100,00% tercapai 100,00% sehingga capaian indikator kinerja program sebesar 100,00%.
 - b) Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja terealisasi sebesar 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar 100,00% sehingga capaian indikator kinerja program sebesar 100,00%.
 - c) Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit bagian Tata Usaha (RSUD Sleman) dari target yang ditetapkan sebesar 94,00% tercapai 100,00% sehingga tingkat capaian indikator kinerja program sebesar 106,38%.
 - d) Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian keuangan dan aset (RSUD Sleman), dari target sebesar 81,00% tercapai 87,50% sehingga tingkat capaian indikator kinerja program sebesar 108,02%.
 - e) Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian perencanaan dan pengembangan (RSUD Sleman) tercapai 153,85% dimana target yang ditetapkan sebesar 65,00% terealisasi sebesar 100,00%.
 - f) Persentase capaian Indikator SPM-RS Bagian Tata Usaha (RSUD Prambanan) tercapai 106,91%, dimana dari target yang ditetapkan sebesar 88,56% tercapai 94,68%.
- 2) Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat pada tahun 2022 dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp132.268.637.215,00 dengan realisasi keuangan Rp115.272.080.386,79 sehingga tingkat kinerja keuangan sebesar (89,65%). Program ini didukung dengan 4 (empat) kegiatan, yaitu :





- a) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- b) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
- d) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Keberhasilan pelaksanaan program ini dapat dilihat pada capaian indikator kinerja program, sebagai berikut:

- a) Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) sesuai standart pusat >60%

Dari target yang ditetapkan sebesar 82,75 %, terealisasi sebesar 81,95 %, sehingga capaian indikator kinerja program sebesar 99,03 % . Hal ini disebabkan karena usulan pengadaan sarana prasarana dan alat kesehatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) belum semuanya berdasarkan pada data dalam Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK), sehingga jenis dan jumlah barang, banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu perubahan data sarana prasarana dan alat kesehatan sangat dinamis. Salah satunya disebabkan oleh setiap tahunnya selalu dilakukan penghapusan barang-barang/alat kesehatan yang sudah rusak/tidak berfungsi dan tidak layak pakai, sehingga mengurangi jumlah kelengkapan sarana prasarana dan alat kesehatan yang tersedia.

- b) Persentase cakupan pelayanan Sleman Emergency Services (SES)

SES merupakan program pemerintah daerah sebagai wujud implementasi sistem penanggulangan gawat darurat medis terpadu di wilayah Kabupaten Sleman, yang pada tahun 2022 tercapai sesuai target sebesar 100,00%.





- c) Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Dari target sebesar 90,00% tercapai 96,71% sehingga capaian indikator kerja kinerja program sebesar 107,46%. Kepesertaan JKN adalah prosentase jumlah penduduk yang menjadi peserta JKN. Pada tahun 2022 Jumlah penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 1.053.488 jiwa dari total jumlah penduduk 1.089.365 jiwa.
- d) Cakupan penemuan semua kasus TB (case detection rate/CDR)
Pada tahun 2022 , jumlah semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan sebesar 1.757 dari 2.880 perkiraan jumlah semua kasus TB, sehingga capaian indikator kinerja program sebesar 61,01% dari target 42,5% dengan capaian kinerja sebesar 143,55%.
- e) Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Kesehatan Masyarakat
Cakupan Standar Pelayanan Minimal urusan kesehatan bidang kesehatan masyarakat ditargetkan 100,00% tercapai 89,90% sehingga capaian indikator kinerja program sebesar 89,90%. Capaian ini meningkat dari tahun 2021 yakni sebesar 83,28 %. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) meliputi 6 (enam) SPM bidang kesehatan yang meliputi Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita, Usia Pendidikan Dasar dan Usia Lanjut sesuai Standar.
- f) Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Target cakupan Standar Pelayanan Minimal urusan kesehatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit ditetapkan sebesar 100,00% tercapai 115,51% sehingga capaian indikator kinerja program sebesar 115,51%. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) meliputi 6 (enam) SPM bidang kesehatan yang meliputi:



- (1) Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
 - (2) Penderita Hipertensi;
 - (3) Penderita Diabetes Militus;
 - (4) Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat;
 - (5) Orang Dengan Tuberculosis (TB); dan
 - (6) Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV sesuai Standar.
- g) Rasio daya tampung Rumah Sakit (RS) terhadap jumlah penduduk
Capaian indikator kinerja program sebesar 108,52% dari target 2,70 tercapai 2,93. Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk adalah jumlah daya tampung RS rujukan terhadap jumlah penduduk. Pada tahun 2022 jumlah daya tampung RS rujukan sebesar 3.177 tempat tidur dengan jumlah penduduk sebesar 1.097.955 jiwa.
- h) Rerata Indeks Kepuasan layanan medis dan Indikator Mutu RS
Capaian indikator kinerja program sebesar 101,51% yaitu dari target sebesar 77,00 terealisasi 78,16. Capaian indeks kepuasan layanan medis dan persentase pemenuhan pengembangan mutu RS sesuai standar merupakan jumlah hasil survei dan indikator pengembangan mutu yang terpenuhi pada tahun 2022 sebesar 156.315 dibagi jumlah indikator pengembangan mutu yang seharusnya ada 2 (dua) dikalikan seratus.
- i) Rerata Pencapaian mutu asuhan keperawatan baik dan Indeks kepuasan Layanan Penunjang
Indikator ditargetkan sebesar 84,00% dan terealisasi 81,25% sehingga capaian indikator kinerja program sebesar 96,73%. Capaian ini turun sebesar 3,27 poin dari capaian 84,52% pada tahun 2021. Hal ini dipengaruhi oleh pemenuhan sumber daya manusia yang kurang karena regulasi yang tidak memperbolehkan untuk rekrutmen tenaga keperawatan, peningkatan kapasitas pegawai yang belum merata dan banyaknya Rumah Sakit di Kabupaten Sleman yang kemudian meningkatkan kualitas daya saing.



- j) Rerata Pemenuhan sarana pelayanan kesehatan dan Pemenuhan jenis SIM RS.

Target indicator kinerja program sebesar 55,50% tercapai 78,95%, sehingga capaian indikator kinerja program sebesar 142,25%. Persentase pemenuhan sarana pelayanan kesehatan sesuai ASPAK dan persentase pemenuhan jenis SIM RS yang sudah ditetapkan (SIM RS, pendaftaran online, homecare SIM dukungan layanan citra pada pasien/ PACS).

- k) Indeks Kepuasan Pelayanan Medis dan Keperawatan

Indeks kepuasan pelayanan medis dan keperawatan ditargetkan sebesar 86,06 tercapai 84,71 sehingga capaian indikator kinerja program sebesar 98,43%. Indeks kepuasan pelayanan medis dan keperawatan meliputi rawat jalan, IGD, rawat inap, perawatan intensif, kamar bedah, kamar bersalin dan perinatologi, unit *hemodialisa*, dan *homecare*. Capaian pada tahun 2022 sebesar 84,71% turun sebesar 1,76 poin dibandingkan capaian tahun 2021. Hal ini dipengaruhi oleh:

- (1) Masih terdapat Ruang tunggu poliklinik rawat jalan Rumah Sakit yang tidak nyaman;
- (2) Waktu tunggu rawat jalan belum sesuai harapan;
- (3) Beberapa Ruang Rawat Inap kelas 2 dan kelas 3 yang sempit dan kurang nyaman;
- (4) Ruang Triase IGD terbuka dan tidak nyaman; dan
- (5) Terdapat Kekosongan jabatan administrator (Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan)

- l) Indeks Kepuasan Pelayanan Penunjang dan pemenuhan sarana rumah sakit berdasarkan data ASPAK

Capaian pada tahun 2022 sebesar 79,22% dari target 80,50% sehingga capaian indikator kinerja program 98,41% turun sebesar 1,55 poin dari tahun 2021 sebesar 99,96%. Indeks kepuasan pelayanan penunjang meliputi pelayanan laboratorium, radiologi, farmasi, rekam medik dan pendaftaran, gizi, rehabilitasi medik, dan



psikologi. Persentase pemenuhan sarana rumah sakit berdasarkan data ASPAK. Turunnya capaian indikator kinerja program dipengaruhi oleh:

- (1) Lokasi RSUD Prambanan yang digunakan saat ini kurang memenuhi syarat dan standar yang berlaku sehingga berdampak pada keterbatasan ruang untuk menerapkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), tidak adanya lahan parkir dan gudang yang cukup;
- (2) Pemenuhan dan pemeliharaan alat kesehatan yang membutuhkan biaya sangat besar;
- (3) Adanya kebijakan penggunaan produk dalam negeri sehingga menambah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan alat kesehatan dengan spesifikasi yang diminta;
- (4) Proses *bridging vclaim* yang belum maksimal (parsial) sehingga petugas memerlukan waktu lebih lama dalam proses pendaftaran pasien; dan
- (5) Penggunaan sim RS yang belum sepenuhnya optimal untuk layanan gizi dan rehabilitasi medik.

m) Persentase pemenuhan indikator mutu rumah sakit dan pelaksanaan SIM-RS terintegrasi di unit pelayanan Realisasi pada tahun 2022 sebesar 100,45% dari target 90,00% sehingga capaian indikator kinerja program sebesar 111,61%, naik sebesar 4,53 poin dari capaian tahun 2021 sebesar 107,08%

- 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan pada tahun 2022 dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp6.226.748.203,00 dan terealisasi Rp5.795.683.898,00 sehingga tingkat kinerja keuangan sebesar 93,08%. Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu:
 - a) Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota;



- b) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota; dan
- c) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Keberhasilan pelaksanaan program ini dapat dilihat pada capaian kinerja indikator kinerja program, sebagai berikut:

- a) Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar
Tenaga kesehatan meliputi medis, keperawatan, kebidanan, kefarmasian, psikologi klinis, kesehatan lingkungan, teknik biomedika, kesehatan masyarakat, gizi, keteknisian medis, keterampilan fisik yang memenuhi standar (pendidikan D3, memiliki STR/SIP, memiliki sertifikat diklat kompetensi) yang ada di puskesmas dan RS Pemerintah. Pada tahun 2022 capaian indikator persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar sebesar 85,46% dari target 85,00% sehingga capaian indikator kinerja program sebesar 100,54%.
 - b) Persentase praktik tenaga kesehatan yang telah berizin
Praktek tenaga kesehatan adalah jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ada di puskesmas dan RS Pemerintah yang memiliki izin. Jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berizin pada tahun 2022 sejumlah 1.306 dari 1.339 tenaga medis dan kesehatan yang ada, sehingga capaian indikator kinerja program sebesar 97,54%. Keberhasilan pencapaian indikator sebesar 97,54% dari target 85,00% sehingga capaian indikator kinerja program 114,75%
- 4) Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman didukung dengan anggaran tahun 2022 sebesar Rp847.630.915,00 dan terealisasi sebesar Rp718.542.316,20 sehingga tingkat kinerja keuangan sebesar 84,77%. Program ini didukung dengan 5 (lima) kegiatan, yaitu:



- a) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
- b) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga;
- c) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM);
- d) Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan;
- e) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.

Keberhasilan pelaksanaan program ini dapat dilihat pada capaian kinerja indikator kinerja program, sebagai berikut:

- a) Pengelolaan sediaan obat yang memenuhi syarat.

Pengelolaan sediaan obat yang memenuhi syarat adalah sarana distribusi sediaan obat dan alat kesehatan yang meliputi apotek dan toko obat, yang telah melakukan pengelolaan pelayanan kefarmasian sesuai standar. Hasil pengawasan selama tahun 2022 jumlah apotek yang melakukan pengelolaan sediaan obat sesuai standar sebanyak 62 apotek dari 78 apotek berizin yang dilakukan pengawasan atau sebesar 79,49%. Dari target sebesar 60,00% terealisasi 79,49% sehingga tingkat capaian indikator kinerja program sebesar 132,5%.

- b) Pengelolaan sediaan makanan yang memenuhi syarat.

Pengelolaan sediaan makanan yang memenuhi syarat adalah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang melaksanakan produksi dan atau distribusi/penyajian makanan sesuai standar persyaratan yang dibuktikan dengan telah memenuhi nilai minimal inspeksi kesehatan lingkungan (higiene sanitasi) oleh petugas

yang kompeten. Pada tahun 2022, jumlah TPM yang dilakukan inspeksi sebanyak 1.089 sarana dan yang memenuhi hygiene sanitasi sebesar 964 atau 88,52%, sehingga dari target yang ditetapkan sebesar 90,00% capaian kinerja indikator kinerja program ini sebesar 98,36%.

c) Persentase toko, sarana prasarana kesehatan yang berizin

Toko sarana prasarana kesehatan meliputi apotik, toko obat, toko alat kesehatan, optikal dan UMOT (usaha mikro obat tradisional). Jumlah toko sarana prasarana kesehatan yang berizin pada tahun 2022 sejumlah 427 dari 450 klinik, apotek, toko sarana prasarana kesehatan yang ada. Dari target 83,00% tercapai 94,89% sehingga tingkat capaian kinerja indikator kinerja program sebesar 114,33%.

5) Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan didukung, anggaran sebesar Rp1.748.676.230,00 dan terealisasi sebesar Rp1.672.450.583,40 sehingga tingkat kinerja keuangan sebesar 95,64%. Program ini didukung dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu :

- a) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- b) Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Keberhasilan pelaksanaan program ini dapat dilihat pada capaian kinerja indikator kinerja program, sebagai berikut:

- a) Persentase rumah tangga (RT) yang tidak merokok di dalam rumah.

Persentase RT yang Tidak Merokok di dalam rumah tahun 2022 mencapai 69,62% yakni 94.169 Rumah tangga dari 135.268 rumah tangga yang dipantau. Dibandingkan tahun sebelumnya, ada penurunan sebesar 0,3%, namun masih diatas target yakni 66,4% dengan capaian kinerja indikator sebesar 104,84%. Data tersebut

diambil dari data Pemantauan PHBS RT setiap tahun dengan sampel 29,3% dari total Rumah Tangga di wilayah Kabupaten Sleman.

b) Persentase bayi ASI Eksklusif

Presentase Bayi ASI Eksklusif diambil dari data pemantauan 6.590 bayi usia 0-6 bulan dengan hasil 5.756 update terbaru berapa? bayi yang hanya diberikan ASI Eksklusif saja sehingga capaiakn indikator sebesar 87,34%. Hasil tersebut melebihi target pada tahun ini yakni 84,6% sehingga capaian indikator kinerja program 103,24%.

c) Presentase edukasi gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) pada rumah tangga (RT)

Data Edukasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) pada Rumah Tangga (RT) didapatkan dari Pemantauan PHBS RT pada indikator aktifitas fisik setiap hari, makan buah dan sayur setiap hari atau tidak merokok di dalam rumah. Adapun hasilnya, sejumlah 117.334 RT dari 135.285 RT atau capaian sebesar 86,73% yang melebihi target tahun 2022 yakni 85,4% sehingga capaian indikator kinerja program sebesar 101,56%.

Capaian kinerja keluaran kegiatan pada urusan pemerintahan bidang kesehatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran secara terinci tertuang pada laporan capaian indikator kinerja program dan keluaran (output) kegiatan/sub kegiatan (terlampir).

Analisis kesesuaian antara kegiatan yang telah dilaksanakan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Kegiatan yang dilaksanakan dengan target kinerja program pada tahun 2022 sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja eselon 3 (tiga) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan tahun 2021-2026. Capaian keluaran (output) kegiatan mendukung capaian indikator kinerja program sebagaimana telah di tetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis perangkat daerah.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan pada tahun 2022 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2022

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
1.	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat belum membudaya di masyarakat maupun berbagai tatanan	<ol style="list-style-type: none"> Penguatan implementasi 6 ruang lingkup GERMAS, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan aktivitas fisik seluruh masyarakat Peningkatan perilaku hidup sehat dan bersih Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit Peningkatan kualitas lingkungan dan Peningkatan edukasi hidup sehat. Advokasi kebijakan KTR (Kawasan Tanpa Rokok) untuk masuk prolegda 2023. Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat pada berbagai tatanan dan masyarakat secara langsung maupun berbasis saluran media.
2.	Pelaksanaan Pemberdayaan kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) melemah ditengah tuntutan kader yang kompeten dan melek teknologi	<ol style="list-style-type: none"> Penguatan kembali UKBM melalui peningkatan kapasitas kader. Monitoring dan evaluasi terhadap UKBM (Posyandu, desa siaga, Posbindu PTM, poskestren, SBH, dll). Penguatan kebijakan dan kelembagaan UKBM. Advokasi stakeholder dan tokoh masyarakat dalam rangka operasionalisasi UKBM di masa pandemi Covid-19.
3	Pelayanan terhadap usia produktif usia 15-59 tahun belum optimal karena belum semua penduduk usia sekolah diatas 15 tahun mendapatkan deteksi dini yang dijangir melalui sekolah, waktu pelayanan deteksi dini pada usia produktif bersamaan dengan jam sekolah atau jam kerja sehingga keterbatasan akses, tidak semua penduduk ber NIK sleman berdomisili di Kabupaten Sleman	<ol style="list-style-type: none"> Menyediakan strip gula darah sesuai jumlah penduduk usia produktif di tahun 2023. Mengajak seluruh stake holder untuk mendukung pelayanan kesehatan pada usia produktif seperti dinas pendidikan, dinas tenaga kerja, lembaga swadaya masyarakat dan lain sebagainya.
4	Pencapaian standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi & DM masih terjadi underreporting data dari faskes jejaring, dan sistem dukungan pengobatan penyakit kronis yang ada belum optimal dalam meningkatkan kepatuhan penderita untuk menjalani pengobatan teratur di fasilitas kesehatan.	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan program pengobatan hipertensi dan DM dengan program prolanis di Puskesmas. Peningkatan Program Penyakit Tidak Menular (PTM) dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi dengan mengoptimalkan system pelaporan dan pendataan pasien hipertensi Advokasi dengan lintas sector terkait dalam mendukung pengelolaan pelayanan kesehatan Peningkatan jumlah fasilitas pelayanan COVID untuk treatment/perawatan.

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
5	Pelayanan kesehatan sesuai standar pada ODGJ berat belum dapat tercapai 100% hal ini disebabkan oleh belum optimalnya dukungan keluarga untuk mendapatkan akses pelayanan, dan adanya ODGJ berat yang meninggal tetapi belum terlayani, adanya stigma terhadap ODGJ berat.	Pelayanan kesehatan sesuai standar pada ODGJ berat belum dapat tercapai 100% hal ini disebabkan oleh belum optimalnya dukungan keluarga untuk mendapatkan akses pelayanan, dan adanya ODGJ berat yang meninggal tetapi belum terlayani, adanya stigma terhadap ODGJ berat.
6	Status akreditasi Puskesmas belum semua mendapatkan status terakreditasi paripurna, sehingga perlu memaksimalkan pemenuhan indikator akreditasi, kualitas layanan Puskesmas dan peningkatan pelayanan berbasis teknologi informasi.	Status akreditasi Puskesmas belum semua mendapatkan status terakreditasi paripurna, sehingga perlu memaksimalkan pemenuhan indikator akreditasi, kualitas layanan Puskesmas dan peningkatan pelayanan berbasis teknologi informasi
7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim penguji UKOM Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman belum ada yang dilatih UKOM. 2. Aturan yang terbaru bahwa untuk semua pejabat fungsional (18 jabatan fungsional) untuk dapat naik jabatan diwajibkan mengikuti UKOM. 3. Yang dapat melaksanakan UKOM adalah daerah yang sudah terakreditasi UKOM oleh pemerintah pusat, sedangkan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman belum terakreditasi dalam pelaksanaan UKOM. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan pelatihan tim penguji UKOM ke BKPP. 2. Pejabat fungsional yang akan naik jabatan, diikutkan UKOM ke Dinas Kesehatan DIY dan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. 3. Menunggu penunjukan verifikasi untuk akreditasi UKOM dari Kementerian Kesehatan.
8	Belum tercapainya target pemenuhan sarana prasarana alat kesehatan (SPA) sesuai standar >60 % sebesar 82,75 %	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan perencanaan kebutuhan pengadaan sarana prasarana alat kesehatan berdasarkan data ASPAK agar sesuai kebutuhan dan tepat sasaran 2. Meningkatkan koordinasi dan evaluasi pengelolaan ASPAK dan BMD puskesmas, UPTD dan RSUD 3. Meningkatkan pelaksanaan money dan supervisi langsung ke puskesmas, UPTD dan RSUD terkait kelengkapan SPA dan validasi data ASPAK 4. Melaksanakan apdet informasi dan pengetahuan kepada petugas terkait pengelolaan ASPAK dan BMD
9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam pelaksanaannya Sleman Emergency Services belum optimal 2. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia petugas SES yang melaksanakan ketugasan dengan 2 shift 3. Anggaran kegiatan PSC SES telah memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan ketugasan PSC SES 4. Kurang representatifnya Rsko PSC SES 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan Sumber Daya Manusia petugas SES sebanyak 2 orang perawat dan 1 orang pengemudi ambulans, sehingga dapat melaksanakan ketugas dengan 3 shift (8 jam kerja) 2. Meningkatkan partisipasi jejaring dalam penanganan kegawatdaruratan dengan rapat koordinasi terkait Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dengan Rumah Sakit tentang Pelayanan SPGDT dalam Kegiatan Sleman Emergency Services dan komunikasi antar fasilitas kesehatan



No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
	<ol style="list-style-type: none">5. Belum efektifnya koordinasi dan komunikasi antar fasilitas kesehatan6. Rendahnya partisipasi jejaring dalam penanganan kegawatdaruratan7. Belum terbangunnya komitmen petugas pelaksana puskesmas8. Petugas belum memahami tupoksi serta SOP secara menyeluruh9. Kurangnya sosialisasi tentang PSC SES kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none">3. Peningkatan kapasitas petugas melalui Bimtek SPGDT
10	Masih ada persepsi yang salah tentang AFP (bahwa AFP identik dengan polio) pada pemberi layanan karena penyebar luasan informasi pada pemberi layanan belum maksimal	Melakukan peningkatan pengetahuan pada jajaran tenaga kesehatan di faskes agar pengetahuan terhadap AFP lebih lengkap lagi melalui Bimtek, sosialisasi, pelatihan dan rapat.
11	Adanya kelompok anti vaksin yang menolak melakukan vaksin	Melakukan koordinasi dan peningkatan pengetahuan tentang vaksin pada masyarakat dengan mengikutsertakan para ahli dan pihak-pihak kompeten
12	Masih terdapat faskes yang belum melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan dalam 24 jam ketika ada kasus KLB, terutama beberapa RS Swasta dan klinik	Memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan semua faskes mulai dari Puskesmas, Rumah Sakit dan Klinik.
13	Pengawasan terhadap sarana pengelolaan obat/alkes baru dapat dilakukan terhadap salah satu sasaran yaitu apotek, sedangkan terhadap sarana pengelolaan obat/alkes yang lain seperti rumah sakit, klinik, toko obat, toko/distributor alkes, belum dapat terjangkau karena keterbatasan SDM.	Mengembangkan teknik pengawasan secara mandiri atau self assesment, didukung sistem aplikasi yang memadai.
14	Pengawasan terhadap pengelolaan makanan, masih belum dapat mencakup keseluruhan pelaku usaha pangan, tetapi masih bersifat sampling per puskesmas / kapanewon	Proaktif melakukan pemantauan berkala berbasis resiko, yang didukung sistem komunikasi yang baik untuk menjangkau informasi dari masyarakat terhadap kemungkinan adanya ketidakamanan makanan.
15	<ol style="list-style-type: none">1. Bangunan IGD RSUD Sleman yang terletak di lantai 2 Gedung Pelayanan Terpadu dengan akses jalan menuju IGD menanjak sehingga beresiko Kejadian Tidak Diinginkan (KTD).2. Sistem rujukan berjenjang BPJS menyebabkan pasien tidak bisa mengakses langsung pelayanan RSUD Sleman.3. Keterbatasan jumlah Sumber	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan usulan dana kepada Pemda Sleman untuk pembangunan/ rehabilitasi gedung IGD sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan rumah sakit.2. Bersama dengan Dinkes Sleman berkoordinasi dengan BPJS untuk meninjau ulang tentang aturan rujukan berjenjang.3. Pemenuhan jumlah sumber daya, baik sarana prasarana alat kesehatan, pembangunan gedung baru maupun penambahan sumber daya manusia pemberi pelayanan dalam mengembangkan layanan prioritas yang sudah dilakukan pemetaan



No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
	<p>Daya (Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia) dalam menunjang pengembangan pelayanan di RSUD Sleman dan layanan prioritas unggulan sesuai program transformasi kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI.</p> <p>4. Keterbatasan ruang haemodialisa yang tidak sebanding dengan jumlah pasien HD yang harus dilayani.</p>	<p>4. Penambahan ruang dan sarana prasarana pelayanan Haemodialisa agar bisa memenuhi dan mengurangi antrean pasien HD di wilayah Kabupaten Sleman</p>
16	<p>Nilai IKM (Indeks Kepuasan Pelayanan Medis dan Keperawatan) tahun 2022 RSUD Prambanan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 (86,47)</p>	<p>Solusi yang telah dilakukan antara lain dengan peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan dan seminar; Pengaturan antrian untuk memperpendek waktu tunggu pasien; Pengembangan rawat inap sesuai aturan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS)</p>
17	<p>Nilai IKM (Indeks Kepuasan Pelayanan Penunjang dan pemenuhan sarana rumah sakit) tahun 2022 RSUD Prambanan belum tercapai ; Data ASPAK hanya mengalami kenaikan sebesar 0,06</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi RSUD Prambanan yang digunakan saat ini kurang memenuhi syarat dan standar yang berlaku sehingga berdampak pada keterbatasan ruang untuk menerapkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), tidak adanya lahan parkir gudang yang cukup; Pemenuhan dan pemeliharaan alat kesehatan yang membutuhkan biaya sangat besar; Adanya kebijakan penggunaan produk dalam negeri sehingga menambah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan alat kesehatan dengan spesifikasi yang diminta; Proses bridging vclaim yang belum maksimal (parsial) sehingga petugas memerlukan waktu lebih lama dalam proses pendaftaran pasien; dan Penggunaan sim RS yang belum sepenuhnya optimal untuk layanan gizi dan rehabilitasi medik. 2. Solusi yang telah dilakukan adalah dengan peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan dan seminar; Memaksimalkan alat kesehatan yang ada untuk mendukung pelayanan; dan Pengadaan alat kesehatan secara selektif untuk penggantian alat kesehatan yang mendesak
18	<p>Masih adanya penyakit menular, sehingga perlu internalisasi masif PHBS yang melibatkan kader lintas sektor.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan inovasi penanggulangan penyakit DBD melalui SI Wolly Nyaman dan intensifikasi Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). 2. Pembudayaan cuci tangan pakai sabun sejak dini untuk pencegahan kecacingan, diare dan penyakit menular lainnya termasuk Covid-19.
19	<p>Masih terbatasnya Puskesmas PONEK dan RS PONEK</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan membangun puskesmas mampu persalinan. 2. Perlunya review Puskesmas PONEK yang ada pelatihan, penetapan, dan penambahan SDM serta mengoptimalkan 10 Puskesmas Rawat inap dan 6 Puskesmas Rawat jalan yang sudah dibangun mampu persalinan



No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
20	Meningkatnya angka kematian ibu melahirkan dan bayi lahir, sehingga diperlukan upaya promotive, preventif dan represif serta lintas sektor.	<ol style="list-style-type: none">1. Mengoptimalkan Penerapan Pedoman Manual rujukan di seluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten Sleman.2. Melakukan advokasi kepada fasilitas kesehatan dalam pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan pasien.3. Mengoptimalkan pemberdayaan Masyarakat.4. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam mendeteksi komplikasi kehamilan dan persalinan melalui bimtek, pelatihan, workshop dan seminar sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam pengambilan keputusan tindakan.
21	Meningkatnya masalah berat badan kurang dan sangat kurang pada balita	<ol style="list-style-type: none">1. Advokasi dan audiensi kepada pemerintah Kecamatan maupun desa tentang permasalahan berat badan kurang dan sangat kurang pada balita2. Membuat perencanaan program sesuai faktor risiko dalam mengatasi balita berat badan kurang dan sangat kurang pada balita serta disinkronisasi dengan program desa dan kecamatan3. Monitoring dan evaluasi dalam pemberian makanan tambahan agar sesuai dan tepat sasaran4. Mengoptimalkan Tim Penanggulangan gizi buruk di masing-masing puskesmas5. Menyusun SOP Tatalaksana Gizi Buruk di puskesmas6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan posyandu di masa Pandemi Covid-19 sesuai dengan surat edaran pelaksanaan posyandu di masa pandemi covid-197. Meningkatkan kapasitas petugas dan kader dalam pemantauan pertumbuhan8. Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektoral
22	Status akreditasi Puskesmas belum semua mendapatkan status terakreditasi paripurna, sehingga perlu memaksimalkan pemenuhan indikator akreditasi, kualitas layanan Puskesmas dan peningkatan pelayanan berbasis teknologi informasi	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pendampingan untuk reakreditasi di tahun 20222. Pemenuhan SDM untuk puskesmas sesuai standar akreditasi puskesmas
23	<ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya jumlah pegawai dibandingkan dengan Analisis Beban Kerja (ABK)2. Ketimpangan distribusi tenaga antar Puskesmas .3. Belum semua PNS mengisi data kepegawaiannya di aplikasi SIMPEG secara lengkap.4. Masih adanya data domisili PNS yang belum sesuai data terbaru, sehingga mempengaruhi penataan pegawai.	<ol style="list-style-type: none">1. Redistribusi pegawai2. Monitoring dan evaluasi secara berkala3. Himbauan kepada pegawai untuk melengkapi data kepegawain



No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
	5. Adanya larangan pengangkatan tenaga kesehatan Non-ASN.	

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Pengukuran kinerja pembangunan dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis. Pelaksanaan kegiatan pada urusan pemerintahan bidang kesehatan tahun 2022 menunjukkan kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Target kinerja keluaran (output) dari setiap kegiatan telah mendukung pencapaian target indikator kinerja program yang telah ditetapkan sebagai perjanjian kinerja Perangkat Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, Renstra, RKPD, maupun APBD.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang di Kabupaten Sleman adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman, Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Nita Mandala Sarta Tata Sasana), dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tabel 3.13
Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung pengembangan ekonomi	%	52,95	73,68	139,15%
a	Persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar	%	50,31	66,21	131,59%
b	Cakupan pembangunan prasarana dan sarana wilayah kondisi mantab yang mendukung pengembangan ekonomi(persentase jalan kondisi mantab, jembatan kondisi baik, drainase kondisi baik, dan jumlah desa di KSCT yang ditingkatkan infrastrukturnya)	%	55,59	81,15	145,98 %
2	Persentase bangunan gedung pemerintahan yang tertib administrasi dan layak	%	40,00	86,44	216,10 %

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2023

Persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung pengembangan ekonomi ditargetkan sebesar 52,95% tercapai 73,68 % sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 139,15%. Persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar ditargetkan sebesar 50,31 % tercapai 66,21 % dengan capaian kinerja sebesar 131,59 %. Hitungan tersebut terdiri dari rata-rata kondisi irigasi baik 76,99 % , persentase rumah tangga /KK terakses air minum 100% (termasuk yang masih sharing) persentase perbaikan RTLH 21,63%. Cakupan pembangunan prasarana wilayah kondisi mantab yang mendukung pengembangan ekonomi (persentase jalan dalam kondisi mantab, jembatan dan drainase kewenangan kabupaten dengan kondisi baik) target kinerja 55,59 % tercapai 81,15 % dengan capaian kinerja sebesar 145,98 %. Berdasarkan hasil survei tahun 2022, kondisi jalan dalam keadaan mantap mencapai 86,03% (39,17% kondisi baik, 46,86 % kondisi sedang), jembatan kondisi baik 65,82% (yang berarti terdiri dari kondisi baik tanpa rusak dan baru 1,98 %, rusak ringan 14,41 % dan rusak sedang 49,44 %) jembatan kondisi rusak 34,18% (yang berarti terdiri dari jembatan rusak berat 30,51 % dan jembatan kritis 3,67 %) persentase drainase kondisi baik 72,75%. Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh (KSCT) yang ditingkatkan infrastrukturnya tercapai 100 % dari DED yang direncanakan.

Persentase bangunan gedung pemerintahan yang tertib administrasi dan layak tercapai 86,44% dari target sebesar 40% sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 216,10%. Hasil capaian tersebut berasal dari hitungan jumlah bangunan gedung baru dan jumlah bangunan gedung yang sudah dilakukan pemeliharaan yang tertib administrasi dan layak, dibagi dengan total gedung pemerintahan dikali 100%. Pada tahun 2022 jumlah bangunan gedung baru di Kabupaten Sleman yang tertib administrasi dan layak sejumlah 66 unit. Jumlah bangunan gedung yang sudah dilakukan pemeliharaan yang tertib pada tahun 2022 sejumlah 36 unit. Angka tersebut kemudian dijumlahkan menjadi angka total bangunan gedung yang tertib administrasi dan layak dengan nilai sebanyak 102 unit. Jumlah total gedung pemerintahan di Kabupaten Sleman pada tahun 2022 yang tertib administrasi sejumlah 118 unit dari target sejumlah 118 unit, sehingga kinerja menjadi 100 %, jadi total prosentase hasil capaian gedung pemerintah yang tertib administrasi dan layak adalah 86,44 %, dari target 40 %, sehingga tingkat capaian kinerja adalah 216,10 %. Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 5 (tahun) terakhir tersaji pada table berikut:

Tabel 3.14
Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Panjang Jalan (Km)					
	a. Jalan Nasional	61,66	61,66	61,66	61,66	61,66
	b. Jalan Provinsi	138,43	138,43	138,43	138,43	138,43
	c. Jalan Kabupaten	699,50	699,50	699,50	699,50	699,50
	d. Jalan Lingkungan/Poros Desa	2.046,50	2.046,50	2.046,50	2.046,50	2.046,50
2	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,5356	0,6678	0,6580	0,6453	0,3917
	a. Kondisi Jalan (Km)					
	- Baik	374,65	467,10	460,30	436,05	274
	- Sedang	241,05	148,95	155,85	195,80	327,80
	- Rusak Ringan	59,70	38,35	38,20	49,70	92,45
	- Rusak Berat	24,1	45,1	45,15	17,95	5,25
	b. Proporsi Panjang jalan Kabupaten kondisi baik	0,5356	0,6678	0,6580	0,6453	0,3917
	c. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,000660	0,000650	0,000647	0,000643	0,000643

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	d. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)	88,02	88,07	88,08	90,33	86,03
3	Persentase jalan kabupaten dengan trotoar atau saluran drainase (%)	27,54	28,42	29,98	30,44	30,68
	a. Panjang drainase (Km)	198,813	209,697	212,916	214,616	222.235
	- Baik	127,800	135,295	137,402	145,884	161.675
	- Sedang	53,938	21,575	58,712	51,046	51.046
	- Rusak	17,075	52,827	16,802	17,682	17.682
	b. Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	65,05	64,28	64,52	64,53	72,74
4	Rasio Jaringan Irigasi (Km)	0,0006145	0,0001256	0,0001251	0,0001242	n/a
	a. Panjang Saluran Irigasi	650,411	655,590	655,590	655,590	655.590
	b. Kondisi Saluran Irigasi					
	- Baik	387,890	466,147	432,480	467,816	504.708
	- Sedang	125,265	156,278	169,945	130,656	106.359
	- Rusak	137,256	53,164	53,164	57,117	44.522
	c. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	59,64	68,05	65,97	71,36	76,99
	d. Rasio Jaringan Irigasi (hektar)	0,0206	0,0202	0,0202	0,0200	0,0202
5	Persentase penduduk berakses air minum (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (%)	28,22	21,18	21,53	20,60	21,41
7	Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk	24,857	24,548	23,157	21,860	21,844
8	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan (%)	10,55	10,55	6,48	6,47	6,47
9	Jumlah bangunan ber-IMB/PBG	128.175	133.617	140.557	141.621	141.621
10	Rasio bangunan ber-IMB /PBG per satuan bangunan (%)	41,85	43,73	45,78	46,02	46,02
11	Sertifikat Laik Fungsi (buah)	36	280	404	199	755

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, 2023
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2023

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan sebesar minimal 30,00% sebagaimana dalam pasal 6 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sleman. RTH 30,00% tersebut berupa RTH Publik maupun RTH privat. Namun data tentang RTH privat belum tersedia.

Penyediaan RTH tersebut untuk mendukung sistem pusat permukiman, berupa Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan pusat-pusat lainnya. Kawasan permukiman kurang lebih seluas 32.555 Ha terdiri dari permukiman perkotaan (PK) seluas 10.763 Ha dan permukiman perdesaan seluas 21.792 Ha. Keberadaan RTH di kawasan permukiman terutama pada kawasan permukiman perkotaan merupakan penyeimbang lingkungan sebagai salah satu langkah antisipasi dampak pemanasan global, dalam rangka mendukung tujuan ke 11 kota dan permukiman berkelanjutan dalam pembangunan berkelanjutan, *Sustainable Development Goals* (SDGs). Perkembangan capaian luasan ruang terbuka hijau di Kabupaten Sleman selama 5 (tahun) terakhir tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.14
Perkembangan Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tahun 2018 -2022

No.	RTH	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Luasan RTH Publik yang dikelola (ha)	883,60	885,01	885,70	885,70	1.138,53
2	Persentase Luasan RTH Publik yang dikelola	30,05	30,10	30,12	35,17	10,58

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Luasan RTH di Kabupaten Sleman pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari 886,70 Ha menjadi 1,138,53 Ha namun secara persentase, turun karena pada tahun 2022 perhitungannya dalah RTH Publik yang dikelola dinas dengan luas total permukiman perkotaan seluas 10.763 Ha sehingga persentase menjadi 10.58 %. Namun apabila ditambahkan juga vegetasi lain yang relevan seluas 4.455.36 Ha, persentase menjadi 51,97 %. Keberadaan RTH ini juga mendukung Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Udara yang merupakan bagian dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada Urusan Lingkungan Hidup. Ruang Terbuka Hijau selain digunakan sebagai tempat beraktivitas, keberadaan RTH juga berfungsi sebagai penyeimbang lingkungan terutama dalam pengurangan suhu pemanasan global, mendukung kota dan permukiman berkelanjutan, ramah air.

Ruang Terbuka Hijau selain digunakan sebagai tempat beraktivitas, keberadaan RTH juga berfungsi sebagai penyeimbang lingkungan terutama dalam pengurangan suhu pemanasan global, mendukung kota dan permukiman berkelanjutan, ramah air. Oleh karenanya, diperlukan penambahan jumlah areal Ruang Terbuka Hijau sehingga kualitas lingkungan dapat meningkat baik secara lokal, regional, maupun global.

Tabel 3.15
Penggunaan Lahan di Kabupaten Sleman Tahun 2018-2021

No	Penggunaan Lahan	2018		2019		2020		2021	
		Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
1	Hutan	1.742,23	3,03	1.742,23	3,03	1.742,23	3,03	1.742,23	3,03
2	Pekarangan	23.628,43	41,11	24.335,42	42,34	24.472,13	42,57	24.527,27	42,67
3	Sawah	18.764,78	32,64	18.645,98	32,44	18.595,75	32,35	18.569,97	32,31
4	Tanah Tandus	9.192,65	15,99	8.652,01	15,05	7.387,03	12,85	8.742,97	15,21
5	Lainnya	4.153,91	7,23	4.106,36	7,14	5.284,86	9,19	3.899,56	6,78
	Total	57.482,00	100	57.482,00	100	57.482,00	100	57.482,00	100

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, 2022

Penggunaan lahan di Kabupaten Sleman secara garis besar dapat dibagi menjadi hutan, pekarangan, sawah, tanah tandus dan penggunaan lainnya. Jenis penggunaan lahan pada peta penggunaan lahan berbeda dengan jenis penggunaan lahan pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal ini karena Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan peta dengan skala kawasan dan digunakan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang, yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Penggunaan lahan merupakan hasil akhir dari setiap bentuk campur tangan manusia terhadap lahan. Luas lahan untuk pekarangan dari tahun ke tahun selalu meningkat. Hal ini tentunya mengurangi keluasan penggunaan lahan untuk, sawah, tanah tandus dan penggunaan lainnya. Tahun 2018 tercatat luas pekarangan adalah 41,11%, pada tahun 2021 menjadi 42,67%. Keluasan hutan selama tahun 2018 sampai dengan 2021 relatif stabil, yaitu 1.742,23 ha (3,03%). Sedangkan luasan sawah dan tanah tandus cenderung menurun. Luasan sawah tahun 2018 sebesar 18.764,78 Ha (32,64%) pada tahun 2021 menjadi 18.569,97 ha (32,31%).

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang didukung dengan beberapa program. Masing-masing program memiliki indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan. Capaian indikator kinerja program dan indikator keuangan program tahun 2022 dijelaskan pada tabel dan uraian berikut:

Tabel 3.16
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022

No	Program / Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota				
	a. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%
	b. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100,00	100,00	100,00%
2	Program pengelolaan Sumber Daya Air				
	Persentase irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	%	71,20	76,99	108,13%
3	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum				
	Persentase jumlah rumah tangga yg mendapatkan akses terhadap air minum melalui jaringan perpipaan terhadap jumlah rumah tangga di seluruh kabupaten	%	20,95	21,41	102,20%
4	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah				
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	98,73	99,21	100,49%
5	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase				
	Berkurangnya genangan pada kawasan permukiman	%	66,50	72,75	109,40%
6	Program pengembangan permukiman				
	Persentase infrastruktur di kawasan strategis cepat tumbuh	%	60,00	100,00	166,67%
7	Program penataan bangunan gedung				
	Persentase kondisi gedung pemerintah baik	%	88,00	88,98	101,12%
8	Program penataan bangunan dan lingkungan				
	Persentase jumlah desa yang diawasi atas persetujuan bangunan gedung dan bangunan atau prasarana bangunan	%	62,00	100,00	161,29%
9	Program penyelenggaraan jalan				
	Persentase jalan mantap dan jembatan dalam kondisi baik (>80%)	%	83,01	75,93	91,46 %
10	Program pengembangan jasa konstruksi				
	Terselenggaranya sistem informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten	%	100,00	100,00	100,00%
11	Program penyelenggaraan penataan ruang				
	a. Persentase rekomendasi kesesuaian tata ruang yang diterbitkan	%	82,00	95,27	116,18%



No	Program / Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	b. Persentase ketersediaan dokumen rencana tata ruang yang telah ditetapkan	%	40,00	50,00	125,00%
12	Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang				
	a. Persentase fasilitasi ruang keistimewaan pada Satuan Ruang Strategis (SRS)	%	30	33,33	111,11 %

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2023
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 2023

Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada tahun 2022 didukung dengan 12 (dua belas) program. Anggaran pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebesar Rp423.996.806.152 realisasi Rp406.519.872.232,29 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebesar 95,88%.

1) Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota

Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota didukung dengan 6 (enam) kegiatan. Anggaran program ini pada tahun 2022 Rp25.935.027.922,00 dengan realisasi Rp24.113.284.969,90 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 92,98%. Keberhasilan pelaksanaan program dapat dilihat salah satunya dari capaian indikator kinerja program. Capaian indikator kinerja pada program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota, sebagai berikut:

- a) Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran tercapai 100,00%; dan
- b) Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja tercapai 100,00%.

2) Program pengelolaan sumber daya air

Program pengelolaan sumber daya air pada tahun 2022 didukung dengan 2 (dua) kegiatan. Pelaksanaan program ini menggunakan anggaran sebesar Rp64.851.780.685,00 dan terealisasi sebesar Rp60.149.019.987,20 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan program sebesar 92,75%. Indikator kinerja pada program pengelolaan



sumber daya air adalah persentase irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik. Pada indikator tersebut, dari target yang telah ditetapkan sebesar 71,20% terealisasi sebesar 76,99% sehingga tingkat capaian indikator kinerja program pengelolaan sumber daya air 108,13%.

3) Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum

Pelaksanaan program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum didukung dengan kegiatan pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota. Pada tahun 2022 program ini menggunakan anggaran sebesar Rp25.404.595.824,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp24.962.653.128,00 sehingga capaian kinerja keuangan program sebesar 98,26%. Indikator kinerja program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum yaitu persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui jaringan perpipaan terhadap jumlah rumah tangga di seluruh kabupaten dari target sebesar 20,95% tercapai 21,41% sehingga tingkat capaian kinerja indikator program sebesar 102,20%.

4) Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah

Indikator kinerja pada program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah yaitu persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik tercapai 100,49%, artinya dari target yang ditetapkan 98,73% terealisasi sebesar 99,21%. Program ini didukung dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran pelaksanaan program ini pada tahun 2022 sebesar Rp17.792.308.267,00 dan terealisasi sebesar Rp17.555.895.387,92 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan program sebesar 98,67%.



5) Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase

Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase didukung dengan kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota. Pada tahun 2022 anggaran pelaksanaan program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase sebesar Rp21.007.518.839,00 dan terealisasi Rp20.120.751.928,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan program sebesar 95,78%.

Keberhasilan pelaksanaan program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dapat dilihat dari tingkat capaian kinerja indikator program yaitu berkurangnya genangan pada kawasan permukiman dari target sebesar 66,50% telah tercapai 72,75% sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 109,40%.

6) Program pengembangan permukiman

Program pengembangan permukiman pada tahun 2022 didukung dengan kegiatan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah kabupaten/kota. Anggaran pelaksanaan program sebesar Rp29.950.944.552,00 terealisasi sebesar Rp29.548.901.815,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan program pengembangan permukiman sebesar 98,66%. Capaian indikator kinerja program yaitu persentase infrastruktur di kawasan strategis cepat tumbuh sebesar 100,00%, dari DED yang direncanakan, dari target sebesar 60,00% tercapai 100,00% sehingga kinerja tercapai 166,57%.

7) Program penataan bangunan gedung

Capaian indikator kinerja program penataan bangunan gedung yaitu persentase kondisi gedung pemerintah baik dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 88,00% telah terealisasi sebesar 88,98% sehingga capaian kinerja sebesar 101,12%.

Program ini didukung dengan kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung.



Namun sejak adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, tidak ada lagi Izin Mendirikan Bangunan, berubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung. Anggaran pelaksanaan program penataan bangunan gedung Rp63.621.376.236,00 dan terealisasi Rp61.568.252.145,45 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 96,77%.

8) Program penataan bangunan dan lingkungannya

Program penataan bangunan dan lingkungannya didukung dengan kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota. Pada tahun 2022 anggaran pelaksanaan program sebesar Rp1.342.973.393,00 terealisasi sebesar Rp1.327.227.196,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan program sebesar 98,83%. Indikator capaian kinerja program yaitu persentase jumlah desa yang diawasi atas perizinan bangunan gedung dan bangunan atau prasarana bangunan dari target sebesar 62,00% tercapai 62,79% sehingga tingkat capaian kinerja 101,27%.

9) Program penyelenggaraan jalan

Program penyelenggaraan jalan didukung dengan kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten/kota dengan anggaran Rp87.633.147.881 terealisasi Rp85.523.321.017,62 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan program 97,59%. Indikator kinerja program penyelenggaraan jalan yaitu persentase jalan mantap dan jembatan dalam kondisi baik (>80%) dari target 83,01% terealisasi 75,93% sehingga tingkat capaian kinerja program 91,47%. Menurunnya kinerja program penyelenggaraan jalan apabila dibandingkan tahun lalu karena pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan yang dilakukan, tidak seimbang dengan penambahan kepadatan dan beban tonase lalu lintas kendaraan yang berakibat pada kerusakan struktur jalan.



10) Program pengembangan jasa konstruksi

Program pengembangan jasa konstruksi didukung dengan kegiatan Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi dengan anggaran Rp758.082.000,00 terealisasi sebesar Rp655.479.502,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan program 86,47%.

11) Program penyelenggaraan penataan ruang

Pada tahun 2022 anggaran pelaksanaa program penyelenggaraan penataan ruang sebesar Rp1.268.924.923,00 dengan realisasi sebesar Rp1.246.377.525,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan program sebesar 98,22%. Adapun capaian kinerja indikator kinerja program penyelenggaraan penataan ruang persentase rekomendasi kesesuaian tata ruang yang diterbitkan tercapai 116,18% serta persentase ketersediaan dokumen rencana tata ruang yang telah ditetapkan tercapai 125,00%.

12) Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang

Program ini didukung dengan kegiatan pemanfaatan ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten dengan anggaran tahun 2022 sebesar Rp84.430.125.630,00 terealisasi Rp79.748.707.630,00 sehingga tingkat capaian kinerja indikator keuangan program sebesar 94,46%. Capaian indikator kinerja program yaitu persentase fasilitasi ruang keistimewaan pada Satuan Ruang Strategis (SRS) sebesar 111,10%.

Capaian kinerja keluaran kegiatan pada urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran secara terinci tertuang pada Buku 2 Laporan Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada tahun 2022 tersaji pada tabel berikut:



Tabel 3.17
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Tahun 2022
Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No	Permasalahan	Data Eksisting Tahun 2022	Upaya Mengatasi Masalah
1	Belum optimalnya fungsi embung, adanya sedimentasi dan kebocoran embung dan juga sebagian akses ke lokasi embung kurang memadai.	Terdapat 29 embung dengan 8 embung merupakan embung Kabupaten, 11 embung DIY, 1 buah dibangun CSR, 7 embung BBWS, 2 embung dikelola Kalurahan	Mulai digunakan fungsi lain dari embung sebagai tempat wisata, seperti pada embung Kaliaji Turi, embung Jetis Suruh Ngaglik, embung Tegaltirto Berbah dan Embung Gayamharjo Prambanan. Adanya sedimentasi dan kebocoran embung, dilakukan operasional dan pemeliharaan melalui UPTD SDA pada Dinas PUPKP, namun apabila kondisi kebocorannya lebih parah dengan rehabilitasi. Adanya keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam pelaksanaan rehab ini.
2	Masih adanya jaringan irigasi yang rusak akibat umur konstruksi, kurangnya kesadaran dalam pengelolaan SDA, maupun akibat bencana. Masih adanya saluran irigasi yang berupa saluran tanah dan menghambat aliran air ke lahan pertanian	Tahun 2022 panjang saluran irigasi primer dan sekunder kewenangan kabupaten sepanjang 655.590 m terdiri dari panjang saluran irigasi kondisi baik dan sedang 504.708 m (76,99%), kondisi rusak 150.881,95 (23,21 %)	Melakukan kegiatan operasional pemeliharaan untuk saluran dengan kerusakan kecil, melakukan rehabilitasi untuk kerusakan sedang sampai berat, dan melakukan peingkatan pada saluran yang masih tanah. Dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) ikut berperan dalam mengatasi masalah ini.
3	Belum optimalnya cakupan akses air minum jaringan perpipaan, akses air minum belum memenuhi kriteria 4K (kuantitas, kontinuitas, kualitas, dan keterjangkauan)	Akses air minum perpipaan pada tahun 2022 sebesar 21,41 %, sedikit melampaui target, 20,95 %, namun masih cukup jauh dari target capaian akhir RPJMN dan RPJMD sebesar 30 % akses perpipaan Pada pemenuhan air minum bukan jaringan perpipaan (BJP) lebih banyak dilaksanakan masyarakat secara mandiri, namun untuk BJP ini belum semua masyarakat secara rutin melakukan uji kualitas air minumnya	Pemerintah Kabupaten Sleman terus berupaya dan berkomitmen dalam penyediaan air minum sesuai dengan kewenangan , karena air minum merupakan salah satu SPM layanan dasar sebagaimana PP No 2 Tahun 2018, Permendagri No 59 Tahun 2021 , Permen PUPR No 29 Tahun 2018, dengan alokasi anggaran melalui Dinas PUPKP maupun penyertaan modal pada PUDAM dan BKK ke Kalurahan. Sleman juga sudah menyusun JAKSTRADA SPAM dengan Perbup No.36.1 Tahun 2018. Mengupayakan alternatif pendanaan melalui DAK, APBN atau LOAN untuk terus meningkatkan akses air minum layak, aman. Akses JP diupayakan melalui PUDAM dan SPAMDes (termasuk PAMSIMAS). Uji kualitas air minum yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas sebagai salah satu langkah mengupayakan pemenuhan standar kualitas air minum.



No	Permasalahan	Data Eksisting Tahun 2022	Upaya Mengatasi Masalah
4	Kondisi sistem jaringan drainase belum memadai untuk menampung limpasan air hujan, serta masihterdapat drainase dalam kondisi rusak. Selain kondisi fisik dan ketersediaan saluran, kendala dalam pengelolaan drainase adalah permasalahan kewenangan,	Berdasarkan hasil survey di lapangan kondisi intensitas genangan di Kabupaten Sleman didominasi intensitas kecil sampai sedang. Genangan terjadi terutama pada permukiman padat dan jalan dengan <i>devider</i> baru. Berdasarkan hasil kajian DPUPESDM DIY terdapat 128 titik genangan di wilayah KPY di Kabupaten Sleman. Dari data Dinas PUPKP Kabupaten Sleman panjang saluran drainase 222.240 m. kondisi baik 72,75 %, namun pada sebagian lokasi tercampur dengan limbah dan sampah rumah tangga	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan data potensi genangan dan <i>masterplan</i> drainase sebagai satu kesatuan sistem untuk penanganan limpasan air pada Daerah Tangkapan Air (DTA).2. Konsep drainase dengan sumur resapan setiap jarak tertentu (20 m) untuk mengoptimalkan kapasitas tampung drainase, meskipun adanya sumur resapan ini juga berpotensi terjadinya sedimentasi.3. Peningkatan intensitas koordinasi untuk penanganan permasalahan pada lintas kewenangan, baik lintas wilayah administrasi maupun sektoral.4. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk pemeliharaan saluran drainase, menjaga kebersihan dengan tidak membuang limbah dan sampah.
5	Masih adanya kerusakan jalan dan jembatan akibat beban berat yang melebihi tonase serta akibat bencana alam. Dimensi geometrik jalan belum sesuai standar minimal badan jalan beraspal 5,5 m untuk jalan lokal	Dari total panjang jalan Kabupaten 699,5 km, dalam kondisi baik 274 km (39,17%) sedang 327,8 km (46,86%), rusak ringan 92,45 km (13,22%) dan rusak berat 5,25 km (0,75 %). Jembatan sebanyak 354 buah, kondisi baik 7 buah (1,98%), rusak ringan 51 buah (14,41%) rusak sedang 175 buah (49,44%) rusak berat 108 buah (30,51%), kritis 13 buah (3,96 %) dan runtuh tidak ada. Dimensi jalan yang memenuhi standar masih kurang dari 15 %	<ol style="list-style-type: none">1. Penanganan jalan kondisi baik dan sedang dengan pemeliharaan rutin, kondisi rusak ringan dengan pemeliharaan berkala dan kondisi rusak berat dengan rekonstruksi atau peningkatan struktur.2. Penanganan jembatan kondisi baik dan rusak ringan dengan pemeliharaan rutin, kondisi rusak sedang dengan rehabilitasi, kondisi rusak berat, kritis dan runtuh dengan penggantian atau pembangunan kembali jembatan, sesuai kemampuan keuangan daerah.3. Pemenuhan dimensi jalan sesuai standar dilakukan dengan peningkatan kapasitas dan struktur jalan, disertai bangunan pelengkap jalan, seperti talud dan drainase sepanjang lahannya masih tersedia, serta sesuai kemampuan keuangan daerah
6	Perlunya sinkronisasi terkait pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun pengembangan infrastruktur lainnya, memperhatikan arahan/ pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar area pengembangan.	Rencana Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo, Yogyakarta-Bawen, dan Yogyakarta-Bandara YIA	Perencanaan tata ruang dengan memperhatikan kebijakan kebijakan nasional baik itu PSN maupun LSD.

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2023
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, 2023



Pengukuran kinerja pembangunan dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis. Pelaksanaan kegiatan pada urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2022 menunjukkan konsistensi/kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Target kinerjakeluaran (output) dari setiap kegiatan telah mendukung pencapaian target indikator kinerja program yang telah ditetapkan sebagai perjanjian kinerja Perangkat Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, Renstra, RKPD, maupun APBD.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Sleman di laksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman. Indikator kinerja pada Renstra Perangkat Daerah adalah rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi.

Tabel 3.18
Capaian Indikator Kinerja Renstra Perangkat Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Rasio	0,025	0,027	108,00%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2022

Pada tahun 2021 rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi dari target 0,020 terealisasi 0,019 sehingga capaian kinerja sebesar 95,55%. Pada tahun 2022 capaian rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,027 dari target sebesar 0,025 sehingga capaian indikator kinerja program sebesar 108,00%.

Capaian indikator urusan pemerintahan bidang perumahan dan Kawasan permukiman tahun 2018-2022 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.19
Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	98,20	99,68	99,86	8,61	21,82
2	Persentase kawasan kumuh yang tertangani (%)	70,03	82,52	82,52	8,85	8,85
3	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	0,39	0,23	0,23	0,70	0,80
4	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (%)	99,70	99,92	99,93	99,61	99,2

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2023

Cakupan ketersediaan rumah layak huni dan layanan rumah layak huni yang terjangkau meningkat dari tahun 2018 sampai dengan 2020, namun pada tahun 2021 dilakukan pendataan kembali bersama Pemerintah DIY, hasil verifikasi pada tahun 2021 sebanyak 10.656 unit dan telah dilakukan penuntasan sebanyak 918 unit sehingga sisa RTLH menjadi 9.647 unit. Pada tahun 2022 ditangani sebanyak 1.387 unit sehingga sisa 7.342 unit. Dengan demikian persentase capaian kinerja sebesar 21,82%.

Persentase kawasan kumuh sesuai SK penetapan kawasan kumuh yang baru dengan Nomor 93.3/Kep.KDH/A/2020 sehingga ditetapkan bahwa kawasan kumuh sesuai SK baru tersebut seluas 96,61 yang mana pada tahun 2021 telah dilakukan penuntasan kawasan kumuh seluas 8,85 Hektar, dengan demikian hasil capaian pada tahun 2021 menunjukkan hasil sebesar 8,85%.

Pada tahun 2022 tidak dilakukan penanganan kawasan kumuh sesuai SK baru tahun 2020, hanya dilakukan penuntasan penanganan kawasan yang pernah ditangani namun masih menyisakan score kekumuhan. Pada tahun 2022 juga dilakukan perencanaan teruma untuk mendukung *readiness criteria (RC)* persyaratan usulan APBN maupun DAK Tahun 2023, dan rencana tahun 2023 penanganan kawasan kumuh dengan APBN sebesar kurang lebih Rp43 Milyar di Kawasan Mrican Caturtunggal dan Pringwulung Condongcatur Depok seluas 21,16 Ha. Dalam proses persiapan penanganan kawasan kumuh di Kawasan Mrican dan pringwulung tersebut dilakukan identifikasi kembali kawasan kumuh, dan diterbitkan revisi SK Bupati Sleman Nomor 83.2/Kep.KDH/A/2022 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sleman, luasan kawasan kumuh menjadi 86,20 Ha.

Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan didapatkan dari hasil perhitungan luas permukiman kawasan kumuh dikurangi dengan pencapaian penuntasan luas wilayah kumuh yang tertangani hingga tahun berjalan, dengan demikian mendapatkan hasil sisa luasan permukiman kawasan kumuh hingga tahun berjalan sebesar 86,20 Ha. Kemudian luas kawasan perkotaan di Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah adalah seluas 10.763 hektar. Tahun 2022 persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan sebesar 0,80%, sedikit meningkat dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 0,70% karena tahun 2022 belum ada penanganan permukiman kumuh, dan berdasarkan hasil identifikasi perubahan luasan tidak *signifikan* sehingga luasnya tetap, dan luasan permukiman berdasarkan Perda RT RW terbaru terjadi perubahan.

Capaian indikator kinerja program pada urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Sleman pada tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 3.20
Program dan Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022

No	Program / Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Program pengembangan perumahan				
	a. Persentase perbaikan rumah akibat bencana	%	100,00	100,00	100,00%
	b. Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program kabupaten	%	100,00	100,00	100,00%
2	Program kawasan permukiman				
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani terhadap total luas permukiman kumuh seluruh kabupaten	%	33,33	8,85	26,55%
3	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh				
	Persentase penanganan RTLH diluar kawasan kumuh	%	15,59	21,45	137,67%
4	Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (psu)				
	Persentase kondisi PSU Rusunawa dan Taman Pemakaman umum baik	%	77,50	86,82	112,02%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2023

Anggaran pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman Rp30.365.617.960,00 dengan realisasi Rp29.546.455.818,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 97,30%. Capaian indikator kinerja program pada urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sebagai berikut:

1) Program pengembangan perumahan

Anggaran pelaksanaan program pengembangan perumahan sebesar Rp4.134.386.240,00 dengan realisasi Rp3.904.042.494,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan pada program pengembangan perumahan sebesar 94,43%. Persentase perbaikan rumah akibat bencana dan persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program kabupaten tercapai 100,00%. Pada tahun 2022 tidak ada keputusan Bupati terkait bencana, sehingga capaian 100,00%.

2) Program kawasan permukiman

Anggaran pelaksanaan program sebesar Rp18.882.971.084,00 dengan realisasi keuangan Rp18.666.536.900,00 sehingga capaian kinerja keuangan program 98,85%.

Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani terhadap total luas permukiman kumuh seluruh kabupaten dari target 33,33% tercapai 8,85% sehingga capaian kinerja 26,55%. Tahun 2022 tidak ada penanganan kawasan kumuh, namun hanya penyusunan data pendukung kesiapan penanganan kawasan untuk tahun 2023, serta penanganan RTLH di kawasan kumuh, target kinerja 15,59% tercapai 21,45%.

3) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Pada pogram ini tidak tersedia alokasai anggaran, namun capaian target indikator penanganan RTLH di kawasan kumuh dilaksanakan dengan Program Kawasan Permukiman. Persentase penanganan RTLH diluar kawasan kumuh ditargetkan sebesar 15,59% dan terealisasi 21,45% sehingga capaian indicator kinerja program 137,67%

4) Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Indikator kinerja program peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum adalah persentase kondisi PSU Rusunawa dan Taman Pemakaman Umum baik. Target yang telah ditetapkan 77,50% terealisasi 86,82% sehingga tingkat capaian kinerja indikator program 112,42%. Anggaran pelaksanaan program peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum Rp.7.348.260.636,00 dan dapat direalisasikan Rp6.975.876.424,00 sehingga tingkat capaian kinerja indikator keuangan program 94,93%.

Capaian kinerja keluaran kegiatan (*output*) pada urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tertuang pada Buku 2 Laporan Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Pengukuran kinerja pembangunan dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis. Pelaksanaan kegiatan pada urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman tahun 2022 menunjukan konsistensi/kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Target kinerja keluaran (*output*) dari setiap kegiatan telah mendukung pencapaian



target indikator kinerja program yang telah ditetapkan sebagai perjanjian kinerja Perangkat Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, Renstra, RKPD, maupun APBD.

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

- 1) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) masih banyak yang belum tertangani. Sampai dengan tahun 2022 RTLH yang sudah tertangani baru 2.305 rumah, dilaksanakan pada tahun 2021 sebanyak 918 rumah dan tahun 2022 sebanyak 1.387 rumah. Jumlah RTLH yang belum tertangani sebanyak 7.342 rumah dari jumlah keseluruhan RTLH sebanyak 10.656 rumah. Angka tersebut berdasarkan dari hasil verifikasi bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penanganan RTLH hanya dapat menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun masyarakat miskin yang masih mampu berswadaya, sedangkan masyarakat miskin yang rumahnya tidak layak huni tetapi tidak mempunyai kemampuan swadaya justru tidak tertangani. Strategi yang perlu dilakukan adalah peningkatan kualitas RTLH menjadi layak huni dan bedah rumah dengan sepenuhnya menggunakan anggaran Negara (khusus masyarakat miskin yang tidak mampu berswadaya). RTLH berdiri di tanah milik orang lain dan tidak ada kerelaan dari pemilik tanah untuk direhabilitasi/diperbaiki, sehingga tidak mungkin memperoleh bantuan.
- 2) Penanganan kawasan kumuh belum tuntas, Persentase kawasan kumuh tertangani menurun namun masih belum tuntas. Masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertangani. Kawasan kumuh umumnya berlokasi di pinggir sungai dan beberapa telah direlokasi ke rumah susun. Guna menekan luasan dan mencegah kawasan yang berpotensi kumuh, dilakukan pencegahan terhadap kawasan rawan kumuh meliputi padukuhan padukuhan yang termasuk dalam Surat Keputusan Padukuhan Rawan Kumuh, setelah target penanganan kawasan kumuh tuntas.



Luas kawasan kumuh mengalami perubahan dengan melihat Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 83.2//Kep.KDH/A/2022 tentang Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sleman. Pada tahun 2022 luas permukiman kumuh adalah 86,20 ha.

- 3) Serah terima PSU perumahan dari pengembang belum tuntas PSU pada hunian/perumahan yang dibangun oleh pengembang, seharusnya diserahkan. Sesuai arahan KPK target serah terima PSU adalah sejumlah 254 lokasi, yang dilaksanakan secara bertahap tahun 2021 sebanyak 50 lokasi, tahun 2022 sebanyak 35 lokasi perumahan dan rencana target tahun 2023 sebanyak 44 lokasi perumahan. Permasalahan pada proses serah terima PSU terkendala adanya beberapa perumahan yang terlantar atau ditinggalkan pengembang sebelum selesai proses serah terima dan banyak PSU yang sudah mengalami kerusakan.
- 4) Terbatasnya lahan untuk penyediaan permukiman MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).
Pemerintah daerah telah berupaya mengatasi masalah tersebut yaitu menyediakan rumah susun sewa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Keterbatasan jumlah hunian pada rumah susun sewa mengakibatkan panjangnya daftar antrian hunian bagi masyarakat yang membutuhkan, sehingga diperlukan penambahan rumah susun sewa agar daftar antrian hunian bagi masyarakat yang membutuhkan dapat berkurang. Penambahan rusun sewa menimbulkan permasalahan baru, yaitu penambahan biaya operasional penyelenggaraan rusun.
- 5) Kondisi prasarana dan sarana dasar permukiman belum optimal
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) di Kabupaten Sleman tahun 2021 sebesar 99,61%, tahun 2022 sebesar 99,20 % Strategi yang dilakukan adalah pembangunan Prasarana Sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana Umum (PSU) permukiman dengan meningkatkan peran masyarakat dan swasta, baik dalam pemenuhan prasarana sarannya maupun pengelolaannya.

6) Masih terbatasnya area pemakaman

Luas makam yang dibutuhkan untuk satu jenazah adalah 3,84 m². Saat ini kebutuhan areal makam juga dilayani oleh pemakaman umum di wilayah padukuhan. Namun demikian penduduk di wilayah perkotaan saat ini lebih mengandalkan TPU seluas 13 hektar. Hal yang harus dipertimbangkan adalah laju pertumbuhan penduduk selama lima tahun terakhir mencapai 1,43%, sehingga masih dibutuhkan penambahan TPU baru.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.8 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja serta Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Stabilitas sosial dan politik merupakan prasyarat tumbuh kembang investasi, infrastruktur, teknologi maupun tenaga kerja. Tantangan utama stabilitas sosial dan politik adalah memelihara kebhinekaan agar tetap menjadi faktor yang menginspirasi, memperkaya dan memperkuat dalam mencapai visi pembangunan. Masyarakat di Kabupaten Sleman merupakan masyarakat multikultur, terlebih dengan banyaknya perguruan tinggi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Sleman. Konflik berbau SARA, aksi terorisme dan separatisme berpotensi menjadi komoditas politik, sehingga deteksi dini atas potensi kerawanan harus dilakukan.

Capaian indikator kinerja daerah pada urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.21
Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang
Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Indeks Risiko Bencana	Indeks	78,77	80,01	98,43 %

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2023

Capaian indikator kinerja program pada urusan pemerintahan bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada tahun 2022 dengan indikator Indeks Risiko Bencana dari target sebesar 78,77 terealisasi sebesar 80,01 sehingga tingkat capaian kinerja pada indikator tersebut sebesar 98,43%. Indeks Resiko Bencana di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 sebesar 78,96.

Tabel 3.22
Capaian Indikator Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Tahun 2017-2022

No.	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	0,86	0,93	1,12	1,12	1,12	0,96
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten %	36,08	36,08	36,08	36,08	36,08	36,08
4	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	97,14	78,79	100,00	95,00	89,66	91,80
5	Persentase penegakan perda	100,00	100,00	100,00	100,00	70,00	37,00

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2022

Capaian kinerja indikator cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 menjadi 0,96. Penurunan ini terjadi dimungkinkan salah satunya karena penurunan jumlah Linmas. Pada tahun 2022 jumlah Linmas adalah 7.117 personil, turun jika dibandingkan tahun 2021 sejumlah 8.317 personil.

Capaian indikator tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan tahun 2022 sebesar 100,00% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tingkat waktu tanggap (*Response Time Rate*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) sebesar 91,80. Pada saat kejadian kebakaran, apabila lokasi berada di wilayah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), *response time* masih bisa terpenuhi.



Sedangkan apabila lokasi kejadian kebakaran di luar WMK (minimal radius 7,5 km dari Posko Induk dan Posko Godean) tidak akan bisa memenuhi waktu tanggap kurang dari 15 menit.

Capaian kinerja indikator persentase penegakan Peraturan Daerah pada tahun 2022 tercapai 37,00%, Capaian ini lebih rendah dibandingkan tahun 2021 sebesar 70,00%. Hal ini disebabkan karena pada saat ini proses perizinan dilakukan melalui OSS sehingga Peraturan Daerah yang ditegakkan menjadi berkurang.

Tabel 3.23
Kegiatan Penguatan Kapasitas Risiko Kebencanaan di Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah gladi lapang penanggulangan bencana	137	161	174	182	198
2	Desa tangguh bencana (desa)	45	55	62	69	71
3	Satuan Pendidikan aman bencana (unit)	55	68	72	73	87
4	Barak Pengungsian	12	12	12	12	12
5	Jumlah Komunitas Relawan	53	58	58	62	70
6	Jumlah Relawan Teregistrasi	2.198	2.215	2.362	2.512	2.889
7	EWS Tanah Longsor	3	3	3	3	3
8	EWS Lahar Hujan	15	15	15	15	15
9	EWS Erupsi Merapi	19	19	19	19	19

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2023

Pada tahun 2022 jumlah gladi lapang penanggulangan bencana 198 kali, jumlah desa tangguh bencana 71 kalurahan, satuan pendidikan aman bencana 87 unit, dan jumlah barak pengungsian 12 buah. Jumlah komunitas relawan 70 komunitas dengan relawan teregistrasi 2.889 relawan.

Tabel 3.24
Perkembangan Data Kebencanaan di Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah desa rawan bencana	86	86	86	86	86
2	Jumlah penanggulangan bencana (kejadian)	125	120	149	133	208
	a. Erupsi	-	-	-	-	-
	b. Gempa bumi	-	-	1	-	-
	c. Banjir	11	6	18	11	22
	d. Banjir lahan hujan	-	-	2	4	8
	e. Tanah longsor	38	22	56	38	94
	f. Angin kencang	64	78	70	78	73
	g. Petir	11	13	2	2	10
	h. Kekeringan	1	1	-	-	1
3	Jumlah korban jiwa akibat bencana	4	3	12	-	-

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	a. Erupsi	-	-	-	-	-
	b. Gempa bumi	-	-	-	-	-
	c. Banjir	-	-	10	-	-
	d. Banjir lahan hujan	-	-	-	-	-
	e. Tanah longsor	3	-	-	-	5
	f. Angin kencang	1	2	2	-	6
	g. Petir	-	1	-	1	1
	h. Kekeringan	-	-	-	-	-
4	Jumlah kerugian material akibat bencana (ribu rupiah)	1.584.825	4.325.279	1.512.350	16.911.402	6.176.030
	a. Erupsi	-	-	-	-	-
	b. Gempa bumi	-	-	500	-	-
	c. Banjir	57.000	553.500	97.500	15.035	138.200
	d. Banjir lahan hujan	-	-	-	884.612	164.500
	e. Tanah longsor	970.125	2.611.179	919.800	443.900	4.015.180
	f. Angin kencang	540.700	1.150.200	478.200	437.890	1.791.150
	g. Petir	17.000	10.400	16.350	110.000	87.000
	h. Kekeringan	-	-	-	-	-
5	Dana penanggulangan bencana	181.300	317.280	369.810	351.520	459.910

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2023

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat didukung dengan beberapa program dengan capaian kinerja indikator program, sebagai berikut:

Tabel 3.25
Program dan Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022

No	Program / Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum				
	a. Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	%	100,00	100,00	100,00%
	b. Persentase anggota linmas yang telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	%	26,00	42,00	161,50%
	c. Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	%	34,00	37,00	108,80%
2	Program penanggulangan bencana				
	a. Persentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100,00	100,00	100,00%
	b. Persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100,00	100,00	100,00%
	c. Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100,00	100,00	100,00%
	d. Persentase warga yang memperoleh layanan penyediaan, rehabilitasi dan rekonstruksi melalui penataan sistem dasar pelaksanaan pasca bencana	%	80,00	80,00	100,00%



No	Program / Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
3	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran				
	Persentase kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani	%	95,00	91,80	96,60 %

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2023
Satuan Polisi Pamong Praja, 2022

Anggaran pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat pada tahun 2022 sebesar Rp31.854.793.804,00 dengan realisasi Rp29.945.535.190,40 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 94,01%. Urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat terdiri dari 4 (empat) program dengan capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten /Kota
Anggaran pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp21.017.602.784,00 dengan realisasi sebesar Rp19.931.021.576,64 sehingga tingkat capaian indikator keuangan program sebesar 94,83%. Capaian indikator kinerja pada program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota, sebagai berikut:
 - c) Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran tercapai 100,00%; dan
 - d) Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja tercapai 100,00%.
- 2) Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
Anggaran pelaksanaan program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum sebesar Rp2.890.188.329,00 dengan realisasi sebesar Rp2.606.88.400,00 sehingga tingkat capaian indikator keuangan program sebesar 90,20%. Indikator kinerja pada program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi:
 - a) Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan tercapai 100,00%;



- b) Persentase anggota Linmas yang telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas target yang ditetapkan 26,00% terealisasi 42,00% sehingga tingkat capaian indikator kinerja tercapai 161,50%; dan
 - c) Persentase perda dan perkada yang ditegakkan dari target yang ditetapkan 34,00% terealisasi 37,00% sehingga tingkat capaian indikator kinerja program sebesar 108,80%.
- 3) Program penanggulangan bencana
- Anggaran pelaksanaan program penanggulangan bencana sebesar Rp7.283.424.991,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp6.894.392.638,76 sehingga tingkat capaian kinerja indikator keuangan sebesar 94,66%. Program penanggulangan bencana memiliki beberapa indikator kinerja program, sebagai berikut:
- a) Persentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dari target sebesar 100,00% telah tercapai 100,00% sehingga tingkat capaian indikator kinerja sebesar 100,00%;
 - b) Persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dari target sebesar 100,00% terealisasi sebesar 100,00% sehingga tingkat capaian indikator kinerja program sebesar 100,00%;
 - c) Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dari target sebesar 100,00% terealisasi 100,00% sehingga capaian indikator kinerja program 100,00%;
 - d) Persentase warga yang memperoleh layanan penyediaan, rehabilitasi dan rekonstruksi melalui penataan sistem dasar pelaksanaan pasca bencana dari target sebesar 80,00% terealisasi 80,00% sehingga tingkat capaian kinerja 100,00%.
- 4) Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
- Anggaran pelaksanaan program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran sebesar Rp663.577.700,00,00 dengan realisasi sebesar Rp513.236.575,00



sehingga tingkat capaian kinerja keuangan 77,34%. Capaian indikator kinerja program yaitu persentase kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani dari target 95,00% terealisasi 91,08% sehingga tingkat capaian indikator kinerja 96,60%.

Capaian kinerja keluaran kegiatan pada urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran secara terinci tertuang pada Buku 2 Laporan Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, yaitu:

- 1) Belum terpenuhinya daerah layanan pemadaman kebakaran dalam setiap WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)
Kejadian kebakaran di Wilayah WMK, *Respons Time* masih bisa terpenuhi, tetapi di luar WMK radius 7,5 km dari Posko Induk dan Posko Godean tidak bisa terpenuhi waktu tanggap kurang dari 15 menit. Pada tahun 2022 jumlah kejadian kebakaran di wilayah WMK sebanyak 49 kejadian yang mencapai angka *Response Time* 45 kejadian (91,80%). Kejadian kebakaran diluar wilayah WMK sejumlah 92 kejadian dan yang memenuhi *Response Time* 40 kejadian (43,50%). Terkait dengan permasalahan dimaksud maka diperlukan pembentukan posko WMK baru dan penambahan jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi.
- 2) Perangkat Daerah pengampu Perda belum memberdayakan PPNS yang dimiliki secara optimal. PPNS di Kabupaten Sleman sampai saat ini berjumlah 20 orang dengan rincian masih aktif 10 orang, dan 10 orang non aktif karena kesibukan sebagai pejabat struktural.
- 3) Jumlah anggota Polisi Pamong Praja belum ideal
Sesuai dengan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja maka idealnya jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sleman adalah 251 orang, sedangkan jumlah Polisi Pamong Praja yang ada sekarang 177 orang (90 ASN dan 87 Non ASN) masih kurang 74 orang.



4) Rasio jumlah anggota linmas belum ideal

Sesuai dengan Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 disebutkan dalam lampiran bahwa 1 RT sejumlah 1 linmas, sehingga untuk Kabupaten Sleman dibutuhkan linmas 7.414 personil, sedangkan jumlah linmas yang ada saat ini, adalah 7.117 orang. Rasio anggota Linmas per RT sebesar 0,98 yaitu jumlah linmas dibagi jumlah RT sebanyak 7.414 maka masih kurang 297 orang agar setiap RT memiliki anggota linmas.

5) Sarana dan prasarana penanggulangan bencana belum optimal. Jumlah sarpras walaupun sudah bertambah, namun dari sisi keamanan dan keselamatan masih perlu diperhatikan. Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Sleman pada tahun 2022 sebesar 77,31 (sedang). Untuk mengurangi IRB, perlu ditingkatkan kapasitasnya, baik sarana prasarana maupun masyarakatnya. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana perlu direview menyesuaikan kondisi saat ini. Sampai dengan tahun 2022, Kabupaten Sleman telah memasang early warning system (EWS) sebanyak 37 buah, terdiri dari EWS erupsi merapi 19 buah, EWS lahar hujan 15 buah, dan EWS tanah longsor 3 buah. EWS ini berfungsi sebagai peringatan dini bencana Gunungapi Merapi, lahar hujan dan tanah longsor. Untuk rawan bencana tanah longsor masih diperlukan sejumlah titik yang potensi terjadi bencana longsor;

6) Belum optimalnya kualitas kelembagaan tangguh bencana Sampai dengan tahun 2022, telah terbentuk desa tangguh bencana sebanyak 71 desa dan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) sebanyak 87 satuan pendidikan aman bencana. Namun secara makro, kemampuan masyarakat terhadap upaya pengurangan risiko bencana masih kurang, terutama kelompok masyarakat rentan.

Pengukuran kinerja pembangunan dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis. Pelaksanaan kegiatan pada urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat tahun 2022 menunjukkan kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Target

kinerja keluaran (*output*) dari setiap kegiatan telah mendukung pencapaian target indikator kinerja program yang telah ditetapkan sebagai perjanjian kinerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah ditetapkan baik dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, maupun APBD.

f. **Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**

Urusan pemerintahan bidang sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial.

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS), perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, Karang Taruna, lansia, dan anak sekolah. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan, dan lansia rawan sosial. Menurut Kementerian Sosial RI, PMKS tercatat ada 26 jenis. Jenis PMKS komunitas adat terpencil tidak ada di Kabupaten Sleman, namun menambahkan jenis PMKS anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan (KTK) atau diperlakukan salah dan keluarga bermasalah sosial psikologis.

Tabel 3.26
Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Urusan Pemerintahan
Bidang Sosial Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Cakupan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat) yang mendapatkan perlindungan sosial dan jaminan sosial	%	83,00	85,40	102,89
2	Persentase Penduduk Miskin	%	6,85 - 7,58	7,74	97,90%
3	Persentase Keluarga Miskin	%	8,25	8,15	101,20%

Sumber: Dinas Sosial, 2023

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat (PPKS) yang mendapatkan jaminan perlindungan sosial pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 83,00% dan terealisasi 85,40% sehingga tingkat capaian indikator kinerja sebesar 102,89%. PPKS meliputi lanjut usia terlantar, anak terlantar, gelandangan, pengemis, penyandang disabilitas, dan korban bencana. Tertangani dimaksudkan telah mendapatkan penanganan dan atau bantuan sosial.

Tabel 3.27
Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Anak dengan bantuan hukum	41	26	-	64	n/a
2	Anak balita terlantar	142	144	141	116	279
3	Anak terlantar	2.784	2.756	2.377	2.294	1.984
4	Anak jalanan	20	20	12	11	112
5	Anak dengan kedisabilitas	427	526	592	583	695
6	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan /diperlakukan salah	9	207	4	0	48
7	Anak memerlukan perlindungan khusus	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
8	Lanjut usia terlantar	6.600	6.813	7.466	6.969	6.691
9	Penyandang disabilitas	6.079	6.446	6.891	6.579	6.855
10	Tuna Susila	85	76	66	130	50
11	Gelandangan	60	64	26	19	22
12	Pengemis	33	33	23	18	17
13	Pemulung	104	105	90	86	97
14	Kelompok minoritas	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	20	16	12	8	36
16	Korban penyalahgunaan napza/KPN	191	n/a	171	131	103
17	Korban tindak kekerasan	223	207	169	153	108
18	Pekerja migran bermasalah sosial	94	125	103	95	76
19	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	1.046	1.175	n/a	1.446	n/a
20	Korban bencana alam	21	n/a	210	n/a	n/a
21	Korban bencana sosial	n/a	n/a	3.301	n/a	n/a
22	Keluarga bermasalah sosial psikologis	1.379	1.475	1.387	1.282	1.095
23	Fakir miskin	146.906	142.779	134.815	176.026	n/a
24	Korban <i>Trafficking</i>	1	n/a	n/a	n/a	
25	PRSE	2.435	2.435	2.652	2.647	2.920

Sumber: Dinas Sosial, 2023



Dalam upaya mengurangi angka PPKS dan angka kemiskinan tersebut, Dinas Sosial telah melakukan intervensi yang terarah melalui program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja tahun 2022. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial di antaranya:

- 1) Mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan arah kebijakan pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin .
- 2) Mengoptimalkan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Kabupaten Sleman. Adanya Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 15.12/Kep.KDH/A/2021 tanggal 8 Maret 2021 menjadi payung hukum untuk TKPK berperan aktif membantu Dinas Sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman. TKPK Kabupaten Sleman telah menyelesaikan penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2021-2026 sebagai dasar dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Sleman dan Rencana Aksi Tahunan untuk Tahun 2023.
- 2) Peningkatan kapasitas dan akses usaha bagi masyarakat miskin.
- 3) Pemberdayaan masyarakat miskin
- 4) Membangun sinergi antara akademisi, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan swasta (CSR/TJSP) dalam program pengentasan kemiskinan.

Upaya intervensi yang dilakukan oleh Dinas Sosial perlahan menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan angka persentase penduduk miskin dan persentase keluarga miskin di Kabupaten Sleman pada tahun 2022. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Sleman pada Tahun 2022 sebesar 7,74%, turun 0,90% dari tahun 2021 sebesar 8,64% (Data BPS). Persentase KK Miskin Tahun 2022 sebesar 8,15%, turun 0,95% dari tahun sebelumnya sebesar 9,10% .

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial didukung dengan beberapa program dengan tingkat capaian indikator kinerja program sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.





Tabel 3.28
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2022

No	Program/ Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota				
	a. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	100,00
	b. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100,00	100,00	100,00
2	Program pemberdayaan sosial				
	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif	%	69,00	88,25	127,90
3	Program rehabilitasi sosial				
	a. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00
	b. Persentase pelayanan rujukan terpadu penanggulangan kemiskinan	%	100,00	100,00	100,00
	c. Persentase keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan sosial	%	80,00	98,10	122,63
4	Program perlindungan dan jaminan sosial				
	Persentase pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	%	100,00	100,00	100,00
5	Program penanganan bencana				
	Jumlah kampung siaga yang terbentuk	kampung	18	20	111,11
6	Program pengelolaan taman makam pahlawan				
	Cakupan pengelolaan <i>Tetenger</i> / Monumen/ Tempat Sejarah	%	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Sosial, 2023

Anggaran pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial pada tahun 2022 sebesar Rp33.240.452.409,00 dapat terealisasi sebesar Rp28.028.874.302,00 sehingga tingkat capaian kinerja indikator keuangan sebesar 84,32%. Urusan pemerintahan bidang sosial terdiri dari 6 (enam) program dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

1) Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota

Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota dilaksanakan melalui 6 kegiatan yaitu:

- a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan.





Program penunjang urusan pemerintahan daerah didukung dengan anggaran sebesar Rp7.845.450.074,00 dengan realisasi sebesar Rp7.407.546.320,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan program sebesar 94,42%, naik 4,11% dari capaian kinerja keuangan tahun 2021 sebesar 90,83%. Indikator kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota yaitu persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dan persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja, dimana capaian kinerja masing-masing sebesar 100,00%.

2) Program pemberdayaan sosial

Program pemberdayaan sosial dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/ kota yang pada tahun 2022 dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp1.881.022.291,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp1.841.588.139,80 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan program sebesar 97,90%. Indikator kinerja program pemberdayaan sosial adalah persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif. Target indikator kinerja program sebesar 69,00% dan terealisasi sebesar 88,25% sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 127,90%.

3) Program rehabilitasi sosial

Program rehabilitasi sosial dilaksanakan melalui kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial. Pada tahun 2022 alokasi anggaran sebesar Rp13.897.747.580,00 dan terealisasi sebesar Rp9.482.207.204,60 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan program sebesar 68,23%. dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,00% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai target kinerja program tersebut. Hasil pengukuran capaian kinerja program rehabilitasi sosial dengan 3 (tiga) indikator kinerja sebagai berikut:



- a) Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani. Target indikator kinerja 100,00% dengan realisasi 100,00% sehingga tingkat capaian kinerja indikator sebesar 100,00%;
- b) Persentase pelayanan rujukan terpadu penanggulangan kemiskinan, dari target yang ditetapkan sebesar 100,00% tercapai 100,00% sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%; dan
- c) Persentase keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan sosial dari target yang ditetapkan sebesar 80,00% tercapai 98,10% sehingga tingkat capaian kinerja indikator 122,63% , naik 5,25 dari capaian kinerja 2021 sebesar 117,38%.

4) Program perlindungan dan jaminan sosial

Program perlindungan dan jaminan sosial dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota. Realisasi anggaran sebesar Rp8.426.264.077,60 dari target alokasi anggaran sebesar Rp8.701.607.189,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 96,84%. Indikator kinerja persentase pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan tercapai 100,00% dari target 100,00%. Salah satu bagian penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan/data terpadu kesejahteraan sosial yang valid. Pemutakhiran data DTKS di Kabupaten Sleman dilaksanakan secara bersama-sama melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan partisipasi masyarakat. Musyawarah DTKS diawali dengan pelaksanaan musyawarah padukuhan dan kemudian dilanjutkan musyawarah di tingkat Kalurahan. Hasil pemutakhiran data melalui musyawarah padukuhan dan musyawarah Kalurahan yang merupakan usulan baru dan perbaikan indikator selanjutnya dilakukan proses verifikasi dan validasi di lapangan melalui petugas di tingkat padukuhan. Hasil verifikasi validasi di lapangan akan dientri dan diolah di Simnangkis Kabupaten Sleman, selanjutnya diusulkan ke Kemensos melalui SIKSNG sebagai upaya pemutakhiran DTKS.

5) Program penanganan bencana

Program penanganan bencana didukung dengan 2 kegiatan yaitu Perlindungan sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dan juga Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota. Realisasi anggaran pada program tersebut sebesar Rp834.673.685,00 dari anggaran sebesar Rp875.320.310,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 95,36%. Realisasi keuangan sebesar 95,36% yang dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,00% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai target kinerja program tersebut. Indikator kinerja program berupa jumlah Kampung Siaga Bencana yang terbentuk dilaksanakan, dari 18 target yang ditetapkan terealisasi 22 Kampung Siaga Bencana pada tahun 2022 sehingga capaian kinerja indikatornya sebesar 111,11 %.

6) Program pengelolaan taman makam pahlawan

Program pengelolaan taman makam pahlawan dilaksanakan dengan kegiatan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target kinerja program tersebut adalah sebesar Rp36.594.875,00 dari anggaran sebesar Rp39.304.965,00 atau 93,10%. Realisasi keuangan sebesar 93,10% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai target kinerja program tersebut.

Capaian kinerja keluaran kegiatan pada urusan pemerintahan bidang sosial sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran secara terperinci tertuang pada Buku 2 Laporan Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Tabel 3.29
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2022

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
1.	Masih ada masyarakat yang mengaku miskin agar dapat mengakses dana Jaring Pengaman Sosial (JPS);	Memperketat proses wawancara dan verifikasi permohonan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS);

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
2.	Masih ada orang miskin yang tercecer atau belum masuk dalam Surat Keputusan Bupati Sleman tentang KK Miskin dan/ Rentan Miskin;	Pemutakhiran data KK miskin melalui Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM);
3.	Tingkat kesadaran keluarga untuk melaporkan kasus yang dihadapi anaknya (ABH) masih rendah;	Melakukan sosialisasi melalui lembaga PSKS dan FORKAPA;
4.	Ada sebagian petugas fasilitas kesehatan yang belum memahami prosedur penanganan anak/bayi terlantar;	Melakukan rapat koordinasi penanganan permasalahan anak/bayi terlantar dengan pihak-pihak yang terkait;
5.	Keluarga atau wali dari penerima bantuan penyandang disabilitas berat tidak segera melaporkan kejadian kematian atau berpindah tempat tinggal dari penyandang disabilitas berat tersebut;	Melakukan verifikasi atau kunjungan lapangan kepada penerima bantuan sosial penyandang disabilitas berat; Melakukan kunjungan lapangan bersama Lembaga Koordinator Kesejahteraan Sosial (LKKS); Mengirimkan nota dinas ke Bupati Sleman, terkait permohonan fasilitas pendukung kegiatan Family Development Session (FDS);
7.	Masyarakat wilayah Kawasan Rawan Bencana sebagian besar belum memahami tentang partisipasi dan keikutsertaan dalam antisipasi penanggulangan bencana; dan	Melakukan sosialisasi antisipasi penanggulangan bencana dan peningkatan kapasitas pelatihan ketrampilan satgassos penanggulangan bencana; dan

Sumber: Dinas Sosial, 2023

Pengukuran kinerja pembangunan dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis. Pelaksanaan kegiatan pada urusan pemerintahan bidang sosial tahun 2022 menunjukkan konsistensi/kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Target kinerja keluaran (*output*) dari setiap kegiatan telah mendukung pencapaian target indikator kinerja program yang telah ditetapkan sebagai perjanjian kinerja Perangkat Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, Renstra, RKPD, maupun APBD.

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja.

Pelaksanaan urusan ketenagakerjaan diarahkan sebagai upaya pengurangan pengangguran dan penyediaan kesempatan kerja yang luas bagi pencari kerja. Pemerintah daerah menyediakan fasilitas pendidikan dan pelatihan kerja secara gratis siap kerja serta membuka akses terhadap dunia kerja secara lebih luas. Selain itu, penyediaan sarana prasarana pendukung berkembangnya usaha-usaha baru kreatif untuk mendorong semakin terbukanya lapangan kerja baru.

Capaian Indikator Kinerja Daerah urusan pemerintahan bidang tenaga kerja diukur melalui indikator tujuan menurunnya angka pengangguran dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan indikator sasaran meningkatnya kesempatan kerja dengan indikator Tingkat Kesempatan Kerja (TKK).

Tabel 3.30

Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,95	5,44	109,37%
2	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	%	94,05	94,56	100,54%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2023

Target TPT pada tahun 2022 sebesar 5,95% terealisasi 5,44%, sehingga capaian kinerja sebesar 109,37%, sedangkan TKK ditargetkan sebesar 94,05% terealisasi 94,56% sehingga capaian kinerja sebesar 100,54%. Pencapaian kinerja ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk memperbesar peluang terciptanya lapangan kerja dan kesempatan kerja sehingga menurunkan tingkat pengangguran terbuka cukup berhasil.

Pelaksanaan urusan ketenagakerjaan juga diarahkan untuk melindungi tenaga kerja maupun perusahaan sehingga tercipta suasana kondusif di lingkungan kerja. Pencapaian pelaksanaan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja di Kabupaten Sleman selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 digambarkan melalui capaian indikator ketenagakerjaan yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.31
Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (kasus)	30	25	39	28	18
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama/PB (%)	100,00	84,00	53,85	12,00	44,44
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	80,27	57,03	67,94	63,31	71,61
4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	54,45	54,45	54,94	80,13	86,60
5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	52,31	75,03	66,13	29,63	66,13

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2023

Pada tahun 2022 angka sengketa pengusaha dan pekerja menurun dari 28 kasus pada tahun 2021 menjadi 18 kasus pada tahun 2022. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama pada tahun 2021 sebesar 12,00% meningkat menjadi 44,44% pada tahun 2022. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan juga mengalami kenaikan dari 63,31% pada tahun 2021 menjadi 71,61% pada tahun 2022. Kepesertaan pekerja/buruh pada program Jamsostek juga semakin meningkat, pada tahun 2021 pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek sebesar 80,13%, meningkat menjadi 86,60% pada tahun 2022. Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi juga meningkat dari 29,63% pada tahun 2021 menjadi 66,13% pada tahun 2022.

Hubungan yang baik antara pengusaha dan pekerja di internal perusahaan akan menimbulkan ketenangan yang akan berimbas pada peningkatan produktivitas perusahaan. Hubungan baik tersebut dapat ditingkatkan dengan cara:

- 1) meningkatkan kuantitas dan kualitas pembinaan pelaksanaan peraturan perundangan ketenagakerjaan terhadap perusahaan
- 2) melakukan pembinaan secara berkesinambungan kepada perusahaan-perusahaan dengan melibatkan seluruh pegawai fungsional di Bidang Tenaga Kerja, yaitu pengawas ketenagakerjaan dan mediator hubungan industrial dan berkolaborasi dengan semua unsur *stakeholder* hubungan industrial guna mewujudkan hubungan industrial harmonis dan berkeadilan.

Gambaran kondisi ketenagakerjaan selama kurun waktu 2018-2022 disajikan pada tabel berikut.

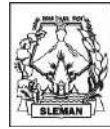
Tabel 3.32
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penduduk (jiwa)	1.058.368	1.070.913	1.079.916	1.088.109	1.089.365
2	Penduduk usia kerja ≥ 15 tahun (jiwa)	830.851	842.358	871.640	903.345	860.512
	a. Angkatan Kerja (jiwa)	601.570	629.056	630.583	630.847	626.348
	- Bekerja (jiwa)	566.891	605.822	589.028	587.935	592.259
	- Penganggur (jiwa)	34.780	23.234	41.555	42.912	34.089
	b. Bukan Angkatan Kerja (jiwa)	229.283	213.302	241.057	272.498	234.164
	- Sekolah (jiwa)	129.316	116.194	138.431	150.531	131.908
	- Mengurus Rumah Tangga (jiwa)	53.322	50.382	50.589	73.143	57.623
	- Menerima Pendapatan lainnya (jiwa)	46.645	46.726	52.037	48.824	44.633
	- Anak (jiwa)	227.515	228.555	208.276	183.994	228.853
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72,40	74,67	72,34	69,83	72,79
4	Rasio Penduduk yang Bekerja	94,23	96,31	93,41	93,20	94,56
5	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia ≥ 15 tahun	0,26	0,58	0,10	0,10	1,01

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2023

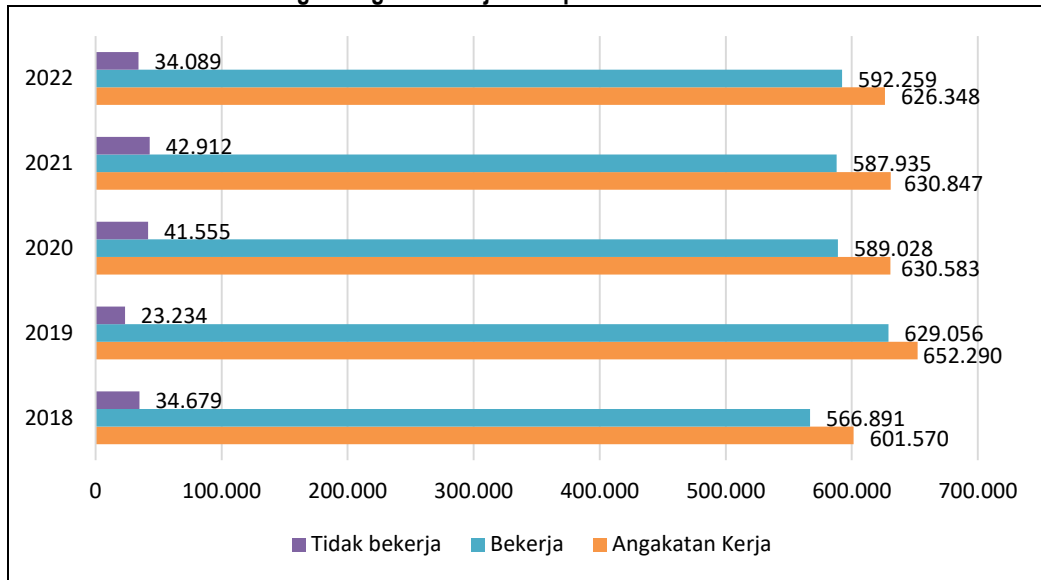
Pada tahun 2022 angkatan kerja mengalami penurunan 0,71%, yaitu dari 630.847 jiwa pada tahun 2021 menjadi 626.348 jiwa pada tahun 2022. Penduduk bekerja mengalami kenaikan sebesar 0,74%, yaitu dari 587.935 jiwa pada tahun 2021 menjadi 592.259 jiwa pada tahun 2022, sedangkan penganggur sebesar 42.912 jiwa pada tahun 2022, turun menjadi 34.089 jiwa atau sebesar 20.56% pada tahun 2022. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik dari 69,83% pada tahun 2021 menjadi 72,79% pada tahun 2022. Rasio penduduk yang bekerja meningkat dari 93,20% pada tahun 2021 menjadi 94,56% pada tahun 2022.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2022 turun sebesar 19,99%, yaitu dari 6,80% pada tahun 2021 menjadi 5,44% pada tahun 2022. Sedangkan berdasarkan data BPS (Sakernas, Agustus 2022) TPT Kabupaten Sleman tahun 2022 sebesar 4,78%. Perubahan TPT Kabupaten Sleman dari Agustus 2021 ke Agustus 2022 tidak cukup signifikan, TPT Sleman mengalami perubahan sebesar 0,39, turun menjadi 4,78% pada tahun 2022, dari 5,17% pada tahun 2021.



Perkembangan jumlah angkatan kerja di Kabupaten Sleman dari tahun 2018 sampai dengan 2022 ditunjukkan pada grafik dibawah ini :

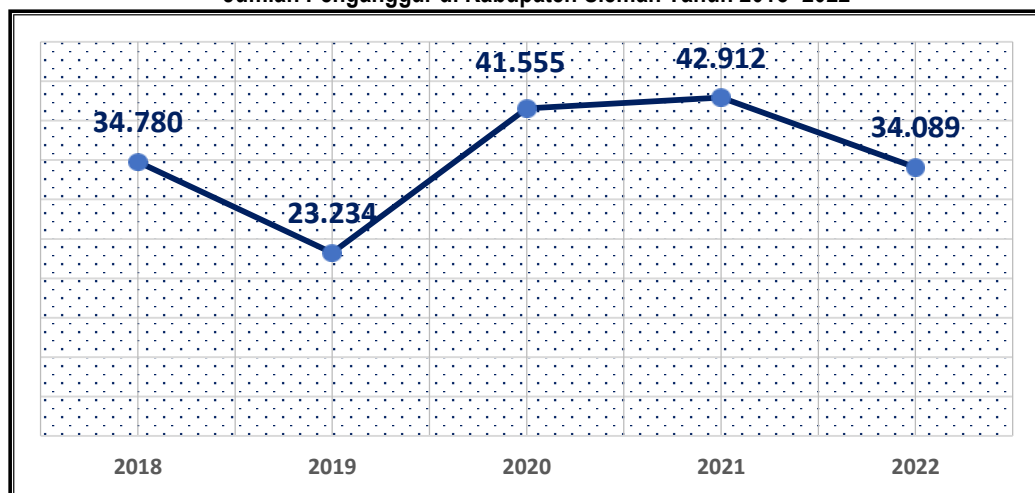
Grafik 3.12
Perkembangan Angkatan Kerja Kabupaten Sleman Tahun 2018 -2022



Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2023

Pada tahun 2022 jumlah angkatan kerja 626.348 orang dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja 592.259, dan jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja 34.089 orang.

Grafik 3.10
Jumlah Penganggur di Kabupaten Sleman Tahun 2018 -2022



Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2023

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja didukung dengan beberapa program dengan tingkat capaian indikator kinerja program tahun 2022 sebagai berikut:



Tabel 3.33
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2022

No	Program / Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				
	a. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%
	b. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100,00	100,00	100,00%
2	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja				
	Persentase peserta yang mendapatkan pekerjaan pasca pelatihan	%	26,00	61,94	236,12%
3	Program penempatan tenaga kerja				
	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (di dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	%	60,00	71,00	117,67%
4	Program hubungan industrial				
	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	11,50	21,11	183,57%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja 2023

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja didanai dengan anggaran sebesar Rp31.789.308.191,00 dan terealisasi Rp30.377.251.852,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 95,56%. Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja didukung dengan 5 (lima) program dengan tingkat capaian indikator kinerja program, sebagai berikut:

- 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
Anggaran pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebesar Rp11.848.843.990,00 dan terealisasi Rp10.744.748.606,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan program 90,68%. Capaian indikator kinerja program persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dan persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja tercapai 100,00%.
- 2) Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
Tingkat capaian kinerja keuangan program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja sebesar 96,38%, dari anggaran yang ditetapkan Rp5.094.779.472,00 telah terealisasi Rp4.910.414.732,00. Indikator kinerja program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, yaitu persentase peserta yang mendapatkan pekerjaan pasca pelatihan

tercapai 236,12%, artinya dari target yang ditetapkan sebesar 26,00% terealisasi 61,00%.

3) Program penempatan tenaga kerja

Pelaksanaan program penempatan tenaga kerja didukung dengan anggaran Rp14.325.834.541,00 terealisasi Rp14.247.632.525,00, sehingga tingkat capaian kinerja keuangan program sebesar 99,45%. Indikator kinerja program penempatan tenaga kerja adalah persentase tenaga kerja yang ditempatkan (di dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten terealisasi 71,00% dari target 60,00%, dengan tingkat capaian indikator kinerja program 117,67%.

4) Program hubungan industrial

Capaian kinerja keuangan program hubungan industrial 91,27%, dari anggaran Rp519.850.188,00 terealisasi Rp474.455.989,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan program sebesar 91,27%. Indikator kinerja program hubungan industrial, yaitu persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak tercapai 183,57% dari target yang telah ditetapkan sebesar 11,50% terealisasi 21,11%.

Capaian kinerja keluaran kegiatan pada urusan pemerintahan bidang tenaga kerja sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran secara terinci tertuang pada Buku 2 Laporan Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Pengukuran kinerja pembangunan dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis. Pelaksanaan kegiatan pada urusan pemerintahan bidang tenaga kerja tahun 2022 menunjukkan konsistensi/kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Target kinerja keluaran (output) dari setiap kegiatan telah mendukung pencapaian target indikator kinerja program yang telah ditetapkan sebagai perjanjian kinerja Perangkat Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, Renstra, RKPD, maupun APBD.

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja pada tahun 2022 antara lain:



1) Tingkat pengangguran terbuka (TPT) masih cukup tinggi.

Tingkat pengangguran terbuka tahun 2022 berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja sebesar 5,44%. TPT Kabupaten Sleman tahun 2022 berdasarkan data BPS (Sakernas Agustus 2022) lebih tinggi dibanding di banding TPT DIY. Data Sakernas Agustus 2022, TPT DIY 4,06%, sementara TPT Kabupaten Sleman 4,78%

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan adalah:

- a) memberikan sosialisasi lowongan kerja yang lebih luas dan penambahan volume melalui kegiatan Sarkeling;
- b) melakukan *job canvassing*; dan
- c) menyelenggarakan Pameran Bursa Kerja (*job fair*) sebagai salah satu cara pemerintah dalam mempertemukan pengguna tenaga kerja dan pencari kerja.
- d) perluasan lapangan kerja melalui padat karya infrastruktur dan padat karya ekonomi produktif.

2) Angka pengangguran terdidik dan penganggur usia muda masih cukup tinggi. Di Kabupaten Sleman, angka pengangguran tertinggi menurut pendidikan tahun 2022 adalah lulusan SLTA sebesar 10.401 dari total angka pengangguran sebesar 34.089 atau sebesar 30,51%.

Solusi yang dilakukan adalah peningkatan kompetensi pencari kerja melalui pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, optimalisasi sarana/media bagi pencari kerja agar dengan mudah mengakses lowongan pekerjaan.

3) Kurangnya motivasi maupun daya juang pencari kerja untuk bekerja di luar daerah dan karakter pekerja yang masih pilih-pilih pekerjaan. Pada tahun 2022 jumlah lowongan kerja tersedia 1.585 lowongan, sementara penempatan tenaga kerja sebesar 1.135 orang.

Solusi yang dilakukan adalah:

- a) pemberian materi *character building* (membangkitkan motivasi) pada peserta pelatihan tenaga kerja dan calon tenaga kerja yang akan ditempatkan;



- b) peningkatan kualitas pencari kerja dan mendorong tumbuhnya *entrepreneurship* berbasis teknologi informasi sebagai langkah untuk pemberdayaan angkatan kerja, menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri dan orang lain.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.12 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.

Pemerintah Kabupaten Sleman terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak melalui pembangunan yang menjadikan kesetaraan *gender* menjadi arus utama. Namun demikian, kesenjangan *gender* masih terjadi di berbagai sektor pembangunan. Salah satu penyebabnya adalah aspek psikososio-kultural di masyarakat yang masih menganggap derajat laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, saat ini Pemerintah Kabupaten Sleman terus mengoptimalkan kinerja UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam menangani kasus-kasus KDRT dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Capaian Indikator Kinerja Daerah pada urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Sleman tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.34
Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Tahun 2022

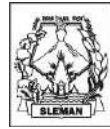
No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,20	96,25	100,05 %
2	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	%	100,00	100,00	100,00%
3	Persentase anak korban kekerasan tertangani	%	100,00	100,00	100,00%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2023

IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung *Gender Development Index* (GDI) dan *Human Development Indeks* (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia. Data IPG dihitung dan dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna. IPG yang digunakan saat ini merupakan IPG Tahun 2021 yang dirilis Maret 2022. Capaian IPG 2022 dirilis oleh BPS sekitar bulan Maret sampai pertengahan 2023. IPG Kabupaten Sleman berada diatas IPG DDIY sebesar 94,88 dan IPG Nasional sebesar 91,27. Jika dibandingkan dengan capaian 2020, IPG Kabupaten Sleman mengalami peningkatan sebesar 0,05 poin dari Indeks sebesar 96,20 menjadi 96,25. Kenaikan ini menjadi salah satu aspek yang menunjukkan semakin baiknya kesetaraan gender di Kabupaten Sleman.

Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tertangani dari target 100% terealisasi 100%, yaitu diperoleh dari 287 kasus perempuan

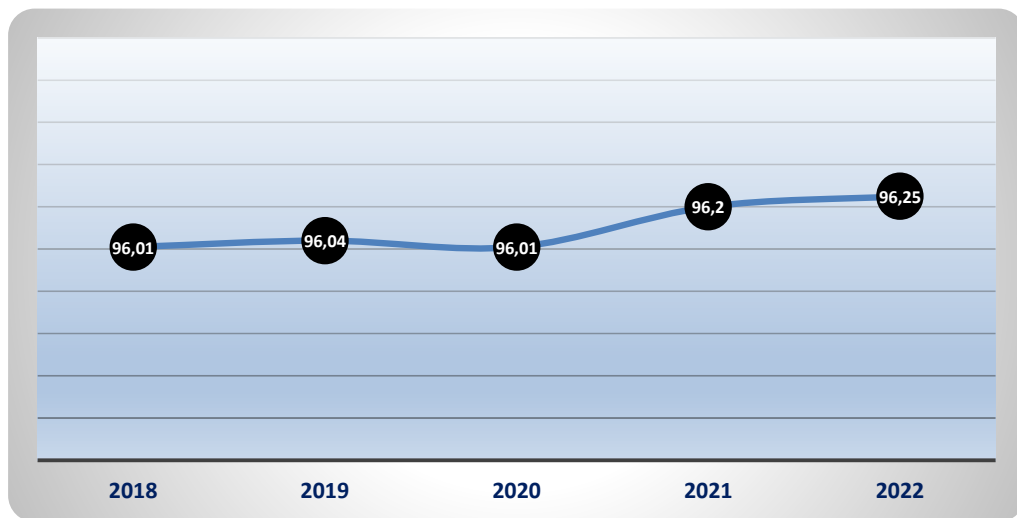




korban kekerasan yang melapor, dapat tertangani seluruhnya, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait dari target 100,00% terealisasi 100,00%, yaitu diperoleh dari jumlah total anak korban kekerasan yang dtangani sejumlah 66 anak berbanding dengan total kasus anak korban kekerasan sejumlah 66 anak, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

Grafik 3.13
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2023

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan (rasio) capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki dan merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian pembangunan manusia. IPG Kabupaten Sleman sejak 3 (tiga) tahun terakhir selalu mengalami kenaikan, yaitu dari 96,01 pada tahun 2020 menjadi 96,20 pada tahun 2021 dan 96,25 pada tahun 2022.

Capaian indikator pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Sleman tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.35
Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kursi diduduki perempuan di DPR (orang)	13	13	13	14	14
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	26	26	26	28	28
3	Rasio KDRT (%)	0,08	0,04	0,07	0,05	0,06
4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2023

Capaian Indikator urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Sleman tahun 2018-2022 menunjukkan bahwa 7 indikator tercapai sesuai target 100%, 3 indikator lainnya yaitu indikator jumlah kursi diduduki perempuan di DPRD tercapai 14 kursi dari 50 jumlah kursi DPRD sehingga target 15 kursi tidak tercapai, indikator proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD tercapai 28% diperoleh dari jumlah 14 DPRD perempuan dibagi 50 jumlah DPRD baik laki-laki maupun perempuan, sehingga target 30% tidak tercapai, dan indikator rasio KDRT pada tahun 2022 sebesar 0,06% meningkat 0,01 dibandingkan tahun 2021 sebesar 0,05%.

Keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak didukung oleh 7 (tujuh) program dengan tingkat capaian kinerja indikator program sebagai berikut:

Tabel 3.36
Program dan Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022

No	Program / Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Program pengembangan perumahan				
	a) Persentase perbaikan rumah akibat bencana	%	100,00	100,00	100,00%
	b) Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program kabupaten	%	100,00	100,00	100,00%
2	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan				
	Persentase lembaga PUG yang aktif	%	100,00	100,00	100,00%
3	Program perlindungan perempuan				
	Cakupan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan/pendampingan perlindungan perempuan	lembaga	51	51	100,00%
4	Program peningkatan kualitas keluarga				
	a. Persentase pemenuhan atas layanan UPTD PPA terhadap Korban Kekerasan	%	100,00	100,00	100,00%
	b. Jumlah kelompok desa prima dan industri rumahan	desa prima dan industri rumahan	26 dan 28	26 dan 28	100,00%
5	Program pengelolaan sistem data gender dan anak				
	Cakupan ketersediaan data gender dan anak	%	42,00	42,00	100,00%
6	Program pemenuhan hak anak (pha)				
	Persentase pemenuhan hak anak	%	100,00	100,00	100,00%
7	Program perlindungan khusus anak				
	Persentase pemenuhan perlindungan khusus anak	%	53,33	53,33	100,00%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2023; Badan Pusat Statistik, 2023

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2022 menggunakan anggaran sebesar Rp11.771.850.964,00 dan terealisasi sebesar Rp10.980.097.831,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebesar 93,27%. Realisasi keuangan dapat diuraikan sebagai berikut:



- 1) Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota
Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota menggunakan anggaran sebesar Rp8.012.789.639,00 dan terealisasi sebesar Rp7.560.795.360,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan program sebesar 94,36%. Indikator kinerja program penunjang urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dan persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja dengan capaian indikator kinerja keduanya mencapai 100,00%.
- 2) Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan menggunakan anggaran Rp837.471.300,00 dengan realisasi Rp800.043.625,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan program 95,53%. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan memiliki indikator kinerja program persentase lembaga PUG yang aktif dengan tingkat capaian indikator kinerja 100,00%. Program pengarusutamaan *gender* dan pemberdayaan perempuan memiliki indikator kinerja program persentase lembaga PUG yang aktif dengan tingkat capaian indikator kinerja 100,00%.
- 3) Program perlindungan perempuan
Anggaran program perlindungan perempuan pada tahun 2022 sebesar Rp387.885.525,00 dengan realisasi sebesar Rp304.186.566,00 sehingga tingkat capaian indikator kinerja keuangan program sebesar 78,42%. Cakupan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan/pendampingan perlindungan perempuan tercapai sebesar 100,00%.
- 4) Program peningkatan kualitas keluarga
Pelaksanaan program peningkatan kualitas keluarga didukung dengan anggaran Rp706.452.425,00 dengan realisasi Rp691.324.190,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan



program 97,86%. Persentase pemenuhan atas layanan UPTD PPA terhadap Korban Kekerasan pada tahun 2022 tercapai 100,00% dari target 100,00% sehingga tingkat capaian kinerja 100,00%.

5) Program pengelolaan sistem data *gender* dan anak

Capaian kinerja indikator kinerja program pengelolaan sistem data *gender* dan anak yaitu cakupan ketersediaan data *gender* dan anak terealisasi sebesar 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar 42,00% sehingga tingkat capaian indikator kinerja program sebesar 238%. Program ini didukung dengan anggaran Rp60.814.800,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp57.899.650,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan program sebesar 95,21%.

6) Program pemenuhan hak anak

Program pemenuhan hak anak pada tahun 2022 dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp809.355.275,00 dan terealisasi sebesar Rp806.501.822,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan program sebesar 99,65%. Program ini menghasilkan tingkat capaian kinerja indikator program yaitu persentase pemenuhan hak anak sebesar 100,00%.

7) Program perlindungan khusus anak

Pelaksanaan program perlindungan khusus anak didukung dengan anggaran sebesar Rp478.541.000,00 dan terealisasi sebesar Rp379.673.309,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 79,34%. Persentase pemenuhan perlindungan khusus anak sebagai indikator kinerja program dari target 53,33% tercapai 53,33% sehingga tingkat capaian kinerja indikator program 100,00%.

Capaian kinerja keluaran kegiatan pada urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran secara terinci tertuang pada Buku 2 Laporan Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2022 yaitu:



- 1) Belum optimalnya pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di Perangkat Daerah dimana penyusunan Gender Analysis Pathways atau Gender Budget Statements (GAP/GBS) belum masuk dalam sistem penganggaran secara optimal, karena seharusnya disusun sebelum penyusunan RKA OPD. Tetapi pada prakteknya, GAP/GBS disusun setelah RKA selesai disusun, yang mana seharusnya GAP/GBS digunakan sebagai dasar penyusunan RKA Perangkat Daerah.
- 2) Sistem data terpilah gender dan anak sudah tersedia namun update belum berkesinambungan. Sistem data terpilah yang saat ini ada di SIMDAGENAK (Sistem Informasi Data Gender dan Anak) yang anggotanya dari 31 instansi berasal dari Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal. Setiap tahun dilakukan update data gender dan anak, sehingga masih diperlukan komitmen antar Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal dalam rangka update data. Selain itu, kendala juga dikarenakan terjadi mutasi dan promosi admin data.
- 3) Belum optimalnya lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (ABH). Untuk indikator perlindungan khusus anak Kabupaten Sleman saat ini baru tercapai 53,33%. Masih diperlukan intervensi kegiatan yang mengarah kepada 15 indikator anak memerlukan perlindungan khusus. Lembaga penyedia layanan bagi anak ABH untuk rehabilitasi sampai saat ini baru dimiliki oleh Dinas Sosial DIY yang berada di BPRSR Sleman dan Lapas anak di Wonosari Gunung Kidul, sementara untuk anak yang berproses dengan hukum di tingkat penyidikan, penuntutan, dan penetapan masih membutuhkan tempat untuk tempat penitipan sementara apabila kuota di BPRSR Sleman penuh sambil menunggu proses hukum.
- 4) Lembaga penyedia layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (dalam hal ini UPTD PPA) masih membutuhkan peningkatan kelayakan bangunan UPTD PPA beserta sarprasnya. Sebelum pandemi, sudah dilakukan langkah perencanaan



pembangunan gedung UPTD PPA bersama dengan Dinas PUPKP. Namun, saat ini, kegiatan tersebut terhenti. Pembangunan gedung ini juga bertujuan untuk memberikansarana peningkatan kapasitas (pelatihan) bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Saat ini, penanganan kasus baru sampai pada tahap terminasi kasus, belum sampai tahap menyiapkan korban kekerasan agar mampu kembali eksis di masyarakat. Selain itu, UPTD PPA masih kekurangan SDM krusial, seperti SDM fungsional Arsiparis khusus pengelolaan file kasus kekerasan, tenaga ahli hukum anak, dan psikolog anak.

Pengukuran kinerja pembangunan dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi indikator kinerja sasaran. Pelaksanaan kegiatan pada urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menunjukkan kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Target kinerja keluaran dari setiap kegiatan telah mendukung pencapaian target indikator kinerja program.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Urusan pemerintahan bidang pangan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan.

Upaya yang dilakukan dalam urusan pemerintahan bidang pangan difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi pangan yang aman beragam, bergizi danimbang, serta meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan. Persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 2,195% terealisasi 2,745% sehingga tingkat capaian indikator kinerja 125,06%

Tabel 3.37
Capaian Indikator Kinerja Renstra Perangkat Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan	%	2,195	2,745	125,06%

Sumber: Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan, 2023

Indikator ketahanan pangan di Kabupaten Sleman yang meliputi skor pola pangan harapan dan penguatan cadangan pangan mengalami kenaikan dari tahun 2018 sampai dengan 2022.

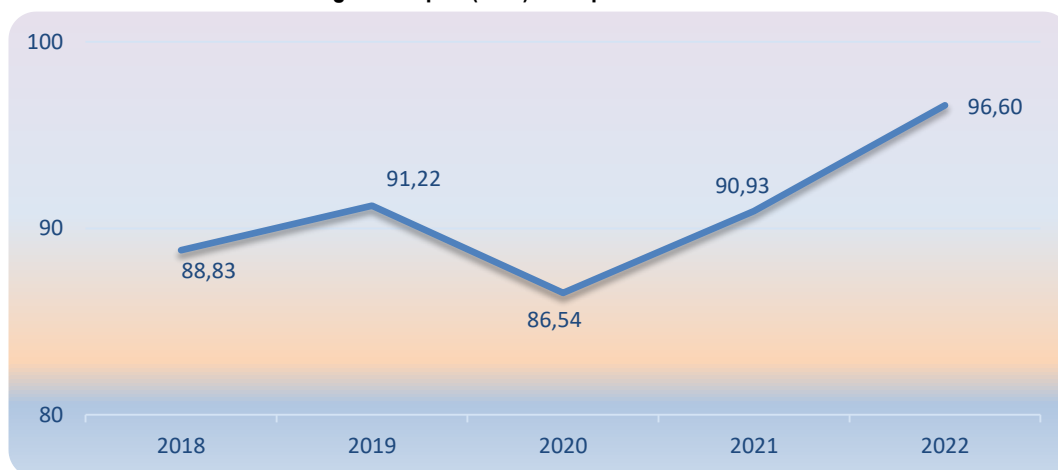
Tabel 3.38
Capaian Indikator Ketahanan Pangan Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Skor pola pangan harapan / PPH	88,83	91,22	86,54	90,93	96,60

Sumber: Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan, 2023

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. Skor pola pangan harapan Kabupaten Sleman pada tahun 2022 sebesar 96,60 dari target 91,43 dengan capaian 105,45%. Angka ini meningkat dibandingkan dengan capaian PPH 2021 sebesar 90,93, atau meningkat 6,23%. Skor PPH tinggi menunjukkan bahwa konsumsi pangan di Kabupaten Sleman sudah bervariasi dan seimbang, mencakup konsumsi karbohidrat, protein, mineral, lemak dan lain-lain.

Grafik 3.14
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan, 2023

Tabel 3.39
Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Ketersediaan pangan utama (ton)	149.214,20	142.031,84	144.879,15	152.963,54	162.239,46
2	Ketersediaan cadangan pangan (kg)	62.832,00	72.832,00	82.832,00	97.832,00	112.832
3	Ketersediaan energi per kapita (kg)	3.080	3.080	2.800	2.828	2.608
4	Ketersediaan protein per kapita (%)	88,83	98,28	63,00	65,10	76,36

Sumber: Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan, 2023

Pada tahun 2022 ketersediaan pangan utama 162.239,46 ton meningkat 867,96 ton (0,53%) dibandingkan tahun 2021 sebesar 152.963,54 ton. Ketersediaan cadangan pangan juga mengalami kenaikan 15,33% dari 97.832,00 ton pada tahun 2021 menjadi 112,832,00 ton pada tahun 2022. Ketersediaan energi per kapita pada tahun 2021 sebesar 2.828 kalori/hari turun sebesar 7,78% menjadi 2.608 kalori/hari pada tahun 2022. Ketersediaan protein per kapita juga mengalami peningkatan 17,29% dari 65,10% pada tahun 2021 menjadi 76,36% pada tahun 2022.

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan didukung beberapa program, dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.40
Program dan Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun 2022

No	Program /Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan				
	Jumlah lumbung pangan masyarakat yang aktif	unit	32,00	32,00	100,00%
2	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat				
	a. Peningkatan jumlah KWT pengelola pemanfaatan pekarangan	kelompok	2	4	200,00%
	b. Peningkatan Jumlah Toko Mitra Tani	unit	1	1	100,00%
	c. Penambahan cadangan pangan pemerintah daerah	ton	15	15	100,00%
3	Program penanganan kerawanan pangan				
	Penanganan daerah rawan/waspada pangan	kalurahan	3	3	100,00%
4	Program pengawasan keamanan pangan				
	Peningkatan jumlah sertifikasi mutu dan keamanan pangan	kelompok	3	3	100,00%

Sumber: Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan, 2023



Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan didukung dengan anggaran sebesar Rp4.878.139.435,00 dengan realisasi keuangan Rp4.802.575.834,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 98,45%.

- 1) Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan

Pelaksanaan program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan menggunakan anggaran Rp49.883.510,00 dan terealisasi Rp49.719.245,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan program 99,67%. Pelaksanaan program ini menghasilkan sejumlah 32 lumbung pangan masyarakat yang aktif dari target 32 lumbung, melalui pembinaan kelembagaan lumbung pangan desa/masyarakat dan pelatihan pengelolaan lumbung pangan.

- 2) Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
Alokasi anggaran program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat Rp4.738.287.755,00 dan terealisasi Rp4.663.066.872,00 (98,41%). Indikator kinerja program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat meliputi:

- a) Peningkatan jumlah KWT pengelola pemanfaatan pekarangan dari target 3 kelompok terealisasi 3 kelompok (100,00%);
- b) Peningkatan Jumlah Toko Mitra Tani 2 unit terealisasi 5 unit, tercapai 250,00%; dan
- c) Penambahan cadangan pangan pemerintah daerah tercapai 100,00%, dari target yang ditetapkan 15 ton telah dapat direalisasikan 15 ton, sehingga total cadangan pangan pemerintah sampai dengan tahun 2022 sebesar 112,832 ton.

- 3) Program penanganan kerawanan pangan

Penanganan daerah rawan pangan/waspada pangan di targetkan pada 3 kalurahan dan sudah terealisasi di 3 kalurahan sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%. Program penanganan kerawanan pangan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp66.298.750,00 dan terealisasi sebesar Rp66.126.675,00 sehingga capaian kinerja keuangan program penanganan kerawanan pangan sebesar 99,74%.



4) Program pengawasan keamanan pangan

Indikator kinerja program yaitu peningkatan jumlah sertifikasi mutu dan keamanan pangan tercapai 333,33%, yaitu dari target sejumlah 3 kelompok terealisasi sejumlah 10 kelompok. Program pengawasan keamanan pangan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp23.669.420,00 dan terealisasi sebesar Rp23.663.042,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 99,97%.

Capaian kinerja keluaran kegiatan pada urusan pemerintahan bidang pangan sesuai target yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) secara terperinci tertuang pada Buku 2 Laporan Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan pada tahun 2022 antara lain:

1) Belum terpenuhinya cadangan pangan pemerintah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 dan Instruksi Gubernur DIY Nomor 2/INSTR/2018, cadangan pangan pemerintah Kabupaten Sleman sebesar 339 ton. Cadangan pangan pemerintah sampai dengan tahun 2022 sebesar 112,832 ton sehingga masih kekurangan 226,168 ton.

2) Masih terdapat desa yang berpotensi waspada pangan dari aspek ketersediaan pangan. Berdasarkan penghitungan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) tahun 2022 terdapat 24 kalurahan yang perlu diwaspadai dari aspek ketersediaan pangan.

Pengukuran kinerja pembangunan dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi indikator kinerja sasaran. Pelaksanaan kegiatan pada urusan pemerintahan bidang pangan menunjukkan kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Target kinerja keluaran dari setiap kegiatan telah mendukung pencapaian target indikator kinerja program.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Urusan pemerintahan bidang pertanahan di Kabupaten Sleman dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 51.2 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*).

Tabel 3.41
Capaian Indikator Kinerja Renstra Perangkat Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang
Pertanahan Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Persentase tertib penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah	%	65,00	74,29	114,29%

Sumber: *Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*, 2023

Capaian Indikator Kinerja Daerah pada urusan pemerintahan bidang pertanahan di Kabupaten Sleman tahun 2022 sebagai salah satu perjanjian kinerja perangkat daerah menunjukkan bahwa persentase tertib penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah mencapai 114,29% atau terealisasi 74,29% dari target 65%.

Tabel 3.42
Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Luas lahan bersertifikat	419.293.558	438.537.021	444.615.088	452.197.303	452.612.381
2	Jumlah sertifikat tanah (buah)	615.184	653.770	670.331	683.476	687.263
3	Jumlah kasus terdaftar	85	140	86	58	24
4	Jumlah kasus yang terfasilitasi	85	140	86	58	24
	Persentase kasus yang terfasilitasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Penyelesaian izin prinsip/izin lokasi (buah)	21	16	11	142	n/a
6	Jumlah bangunan ber-IMB	3.380	5.442	6.940	5782	n/a

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*), 2023;
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertanahan didukung dengan beberapa program, dengan capaian indikator kinerja program, sebagai berikut:

Tabel 3.43
Capaian Indikator Kinerja Renstra Perangkat Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Tahun 2022

No	Program / Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				
	a. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	100,00
	b. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100,00	100,00	100,00
2	Program penyelesaian sengketa tanah garapan				
	Persentase permasalahan sengketa tanah garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang tertangani melalui mediasi	%	88,00	100,00	113,64
3	Program redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i>				
	Persentase tertib penguasaan kepemilikan tanah	%	11,10	16,70	150,45
4	Program pengelolaan izin membuka tanah				
	Persentase fasilitasi pemanfaatan tanah desa	%	91,00	100,00	109,89
5	Program penatagunaan tanah				
	a. Persentase penggunaan tanah kasultanan yang digunakan dan dimanfaatkan oleh Pemkab Sleman	%	95,00	100,00	105,26
	b. Persentase ketersediaan data informasi geospasial tematik tentang pertanahan dan tata ruang sesuai peraturan perundang-undangan	%	100,00	100,00	100,00
6	Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan pertanahan****)				
	a. Persentase terfasilitasinya penggunaan tanah kasultanan	%	91,00	100,00	109,89
	b. Persentase jumlah desa yang memiliki kepastian batas administrasi wilayah	%	22,10	47,67	215,70

Sumber: *Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana, 2023*

Pengukuran kinerja pembangunan dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis. Pelaksanaan kegiatan pada urusan pemerintahan bidang pertanahan tahun 2022 menunjukkan konsistensi/kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Target kinerja/keluaran dari setiap kegiatan telah mendukung pencapaian target indikator kinerja program yang telah ditetapkan sebagai perjanjian kinerja Perangkat Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, Renstra, RKPD, maupun APBD.



Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertanahan didukung anggaran sebesar Rp10.972.577.622,00 dengan realisasi sebesar Rp10.329.332.338 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 94,14 %. Urusan pemerintahan bidang pertanahan didukung dengan beberapa program dengan tingkat capaian indikator kinerja program, sebagai berikut:

- 1) Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran serta persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja tercapai masing-masing sebesar 100,00% pada tahun 2022. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota menggunakan anggaran sebesar Rp6.766.185.291,00 dengan realisasi sebesar Rp6.271.519.725,00 sehingga capaian kinerja keuangan program sebesar 92,69%.
- 2) Program penyelesaian sengketa tanah garapan
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan indikator persentase permasalahan sengketa tanah garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang tertangani melalui mediasi tercapai sebesar 113,64% pada tahun 2022. Program ini dijabarkan ke dalam kegiatan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota. Capaian indikator kinerja program yaitu persentase permasalahan sengketa tanah garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang tertangani melalui mediasi adalah 113,64% karena dari target yang ditetapkan sebesar 88,00% telah terealisasi 100,00%. Program ini menggunakan anggaran Rp53.214.678,00 realisasi Rp52.755.500,00 sehingga capaian kinerja keuangan program sebesar 99,14%.
- 3) Program redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*
Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dijabarkan pada kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi dengan indikator persentase



tertib penguasaan dan kepemilikan tanah tercapai sebesar 150,45% pada tahun 2022. Capaian indikator kinerja program redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* yaitu persentase tertib penguasaan dan kepemilikan tanah telah terealisasi 16,70% dari target 11,10% sehingga tingkat capaian indikator kinerja program 150,45%. Program ini menggunakan anggaran sebesar Rp103.656.250,00 dan terealisasi sebesar Rp103.013.600,00 sehingga capaian kinerja keuangan program sebesar 99,38%.

4) Program pengelolaan izin membuka tanah

Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah didukung dengan kegiatan penerbitan izin membuka tanah dengan indikator kinerja program yaitu persentase terfasilitasinya pemanfaatan tanah desa sebesar 109,89% pada tahun 2022. Program pengelolaan izin membuka tanah menggunakan anggaran Rp153.446.650,00 dengan realisasi Rp153.096.400,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan program sebesar 99,77%.

5) Program penatagunaan tanah

Program penatagunaan tanah dijabarkan pada kegiatan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota dengan indikator persentase penggunaan tanah Kasultanan yang digunakan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman serta persentase ketersediaan data informasi geospasial tematik tentang pertanahan dan tata ruang sesuai peraturan perundang-undangan tercapai masing-masing sebesar 105,26 % dan 100% secara berturut-turut pada tahun 2022. Alokasi anggaran pelaksanaan program penatagunaan tanah Rp1.082.278.697,00 dengan realisasi Rp1.067.362.860,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan program 98,62%.



6) Program penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan pertanahan

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan yang dijabarkan pada kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dengan indikator kinerja yaitu persentase terfasilitasinya penggunaan tanah serta persentase jumlah desa yang memiliki kepastian batas administrasi wilayah tercapai sebesar 109,89% dan 215,70% secara berturut-turut pada tahun 2022. Pelaksanaan program penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan pertanahan menggunakan anggaran Rp2.813.796,00 dan terealisasi Rp2.681.584.302,00 (95,30%).

Capaian kinerja keluaran kegiatan pada urusan pemerintahan bidang pertanahan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran secara terperinci tertuang pada Buku 2 Laporan Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Isu utama permasalahan pertanahan yaitu belum tuntasnya proses penyelesaian administrasi tanah kalurahan dan tanah kasultanan baik dalam hal penatausahaan, pemanfaatan dan tukar menukar yang telah terjadi di masa lampau. Penatausahaan pertanahan mempunyai tujuan akhir yaitu tersertifikasinya seluruh bidang tanah kalurahan dan tanah kasultanan. Hasil inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi tanah kas desa tahun 2022 sejumlah 17.336 bidang, dengan data yang sudah sertifikasi sejumlah 7.037 bidang, sehingga masih terdapat 10.299 tanah kas desa yang belum sertifikasi. Dengan adanya Program Nasional tentang pendaftaran tanah maka semua tanah yang ada di Indonesia perlu adanya jaminan kepastian hukum sehingga setiap bidang tanah harus didaftarkan.

Pendaftaran tanah kasultanan ini adalah tugas bersama Pemerintah Kalurahan, Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kasultanan Yogyakarta dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang memfasilitasi dan mendampingi pemberkasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan.



Pemanfaatan tanah kalurahan untuk fungsi selain pertanian harus mendapatkan Izin Gubernur sedangkan pemanfaatan Tanah Kasultanan harus mendapatkan *serat kekancingan* dari kasultanan. Dalam rangka proses administrasi izin gubernur dan *serat kekancingan*, pemerintah Kabupaten Sleman menerbitkan rekomendasi pemanfaatan. Penerbitan rekomendasi pemanfaatan ini merupakan salah satu layanan publik yang diberikan pemerintah kabupaten melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sehingga merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan terus menerus.

Penyelesaian administrasi tukar menukar tanah kalurahan dengan tanah warga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman yaitu memberikan fasilitasi dan pendampingan dalam pemberkasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dan menerbitkan rekomendasi penyelesaian. Administrasi tukar menukar tanah yang belum terselesaikan tersebar di seluruh Kalurahan di Kabupaten Sleman. Penyelesaian administrasi ini melibatkan banyak pihak yaitu Pemerintah Kalurahan, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kasultanan, Kantor Pertanahan dan juga warga sebagai pemilik atau ahli waris tanah yang menjadi obyek tukar menukar yang terjadi pada masa lalu.

e. **Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**

Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Tabel 3.44
Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	57,20	57,33	100,23%
2	Indeks Kualitas Air	indeks	41,00	43,54	106,20%
3	Indeks Kualitas Udara	indeks	86,66	83,99	96,99%
4	Indeks Kualitas Lahan	indeks	30,52	31,73	103,96%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berdasarkan Kemen LHK, dapat dibagi menjadi 6 (enam) kategori IKLH yaitu kategori sangat baik (>80), kategori baik ($70 < \text{IKLH} \leq 80$), kategori cukup ($60 < \text{IKLH} \leq 70$), kategori kurang baik ($50 < \text{IKLH} \leq 60$) dan kategori sangat kurang baik ($40 \leq \text{IKLH} < 60$) serta kategori waspada (<40). Indikator indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Sleman pada tahun 2022 dengan target 57,20 terealisasi 57,33 sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,23%. Dengan nilai sebesar 57,33 maka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman masih termasuk kategori kurang baik.

Capaian kinerja indeks kualitas udara sebesar 96,99%, dari target yang ditetapkan sebesar 86,66 terealisasi 83,99. Capaian kinerja indeks kualitas air dan indeks kualitas lahan masing-masing tercapai 106,20% dan 103,96%.

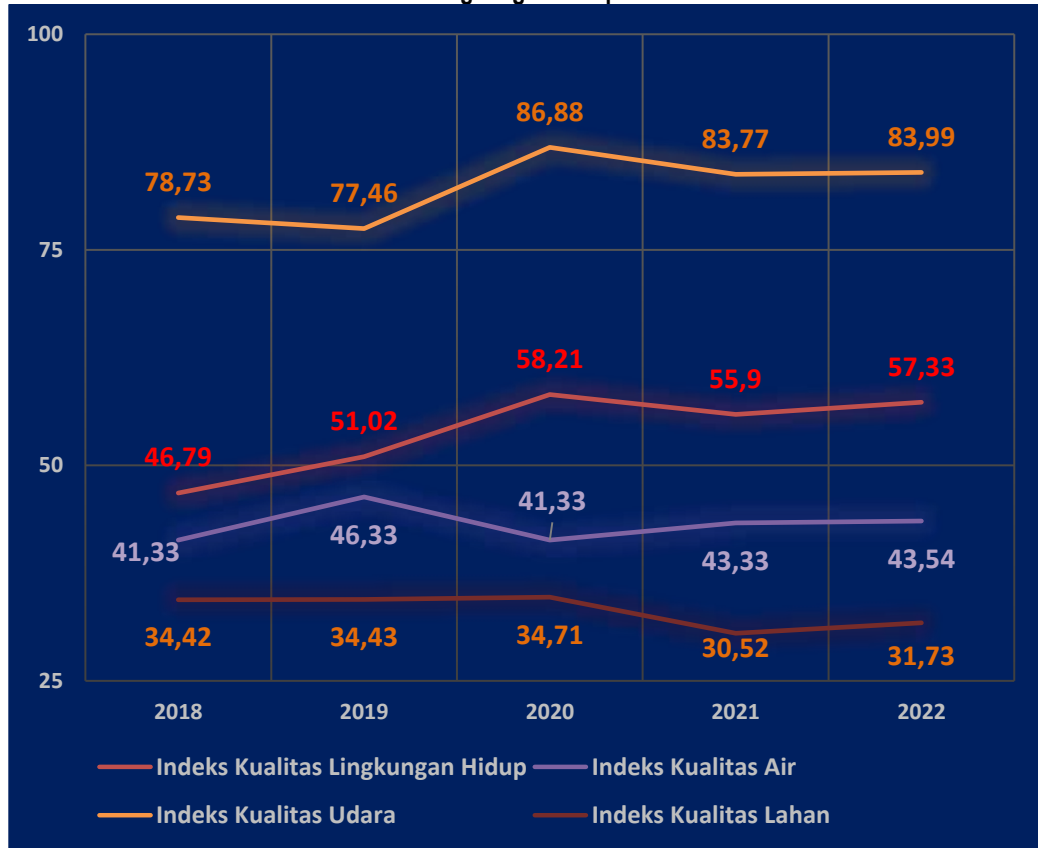
Tabel 3.45
Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Kualitas Air	41,33	46,33	41,33	43,33	43,54
2	Indeks Kualitas Udara	78,73	77,46	86,66	83,77	83,99
3	Indeks Kualitas Lahan	34,42	34,43	34,71	30,52	31,73
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	49,79	51,02	58,21	56,90	57,33
5	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah (%)	85,94	84,06	100,00	100,00	104,35
7	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten (%)	100,00	92,31	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Kualitas lingkungan sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan manusia. Kualitas lingkungan yang baik akan berdampak pada tingginya kualitas kehidupan manusia, demikian pula sebaliknya. Untuk menjamin kualitas lingkungan, diperlukan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang baik dan bijaksana. Pengelolaan tersebut dapat berupa pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran, serta pemulihan kualitas lingkungan. Hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah.

Grafik 3.15
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Indeks Kualitas Air merupakan survei kualitas air secara umum dengan menggunakan sekelompok parameter di beberapa titik. Pengujian dilakukan pada 33 titik lokasi di 11 sungai. Indeks Kualitas Air (IKA) di Kabupaten Sleman pada tahun 2021 adalah 43,33 dengan kategori kurang baik dan sedikit meningkat pada tahun 2022 menjadi 43,54. Kualitas air sungai dipengaruhi oleh kadar BOD, COD, *coliform* total, deterjen dan minyak/lemak. IKA rendah, salah satunya disebabkan oleh perilaku masyarakat dan industri dalam membuang limbah ke sungai tanpa pengolahan lebih dahulu. Oleh karena itu, pengelolaan daerah aliran sungai, termasuk kualitas air didalamnya, harus dilakukan secara terpadu, meliputi bagian hulu, tengah dan hilir sungai tanpa terhambat oleh batas-batas administrasi.

Penghitungan indeks kualitas udara saat ini menggunakan dua parameter yaitu NO₂ dan SO₂. Parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. Indeks Kualitas udara tahun 2022 di Kabupaten Sleman menunjukkan peningkatan, dari nilai 83,77 pada tahun 2021, menjadi 83,99 dengan kategori baik. Nilai tersebut belum memenuhi target dalam RPJMD yaitu sebesar 86,66. Hal tersebut dimungkinkan karena target sebesar 86,66 tersebut merupakan nilai capaian IKU pada tahun 2020 dimana pada saat pengukuran sedang diberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akibat pandemi Covid-19 sehingga mobilitas penduduk mengalami penurunan yang signifikan dan mulai kembali normal pada tahun 2022 sehingga membuat capaian IKU menurun.

Penghitungan indeks tutupan lahan mengacu pada Klasifikasi Penutup Lahan (SNI 7645-2010). Berdasarkan SNI 7645-2010, penutup lahan didefinisikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutupan tersebut. Indeks Kualitas Lahan (IKL) di Kabupaten Sleman tahun 2022 dengan nilai sebesar 31,73, lebih baik dari tahun 2021 yang sebesar 30,52.

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup pada tahun 2022 didukung dengan beberapa program, dengan capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 3.46
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2022

No	Program / Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				
	a. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%
	b. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100,00	100,00	100,00%

No	Program / Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2	Program perencanaan lingkungan hidup				
	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	%	100,00	100,00	100,00%
3	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup				
	Ketersediaan data kualitas lingkungan dan konservasi lingkungan	%	100,00	100,00	100,00%
4	Program pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)				
	Persentase luas RTH yang tersedia	%	7,034	6,700	95,25%
5	Program pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)				
	Prosentase layanan izin dan/atau layanan pemeriksaan rincian teknis Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3 dan persetujuan teknis dan/atau Sertifikat Layak Operasional (SLO) pengumpulan limbah B3 skala kabupaten	%	53,50	71,00	132,71%
6	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)				
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten	%	20,01	20,88	104,35%
7	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat				
	Persentase pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat yang dilaksanakan	%	100,00	100,00	100,00%
8	Program penghargaan lingkungan untuk masyarakat				
	Prosentase perolehan penghargaan bidang lingkungan hidup	%	75,00	75,00	100,00%
9	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup				
	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00%
10	Program pengelolaan persampahan				
	a. Persentase pengurangan sampah	%	22,54	22,57	100,1%
	b. Persentase penanganan sampah	%	33,86	34,11	100,7%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup menggunakan anggaran sebesar Rp. 62.649.890.842,00 dengan realisasi Rp.60.923.913.454,72 atau 97,25%. Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup didukung dengan beberapa program dengan capaian indikator kinerja dan keuangan program, sebagai berikut:



- 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
Anggaran pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebesar Rp14.347.540.820,00 terealisasi Rp13.613.666.659,00 atau 94,89% Capaian indikator kinerja program yaitu persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dan persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja masing-masing tercapai 100,00%.
- 2) Program perencanaan lingkungan hidup
Program perencanaan lingkungan hidup di dukung dengan anggaran sebesar Rp284.811.952,00 dan terealisasi Rp283.007.206,00 atau tercapai 99,37%. Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun dari target 100,00% tercapai 100,00%.
- 3) Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup menggunakan anggaran Rp1.343.798.490,00 dengan realisasi Rp1.325.166.510,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 98,61%. Ketersediaan data kualitas lingkungan dan konservasi lingkungan tercapai 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar 100,00% tercapai 100,00%.
- 4) Program pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
Persentase luas Ruang Terbuka Hijau yang tersedia pada tahun 2022 ditargetkan 7,034% dan terealisasi 6,70% sehingga tingkat capaian kinerja indikator kinerja program 95,25%. Program pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) menggunakan anggaran sebesar Rp11.008.239.475,00 dan terealisasi Rp10.701.890.032,16 sehingga tingkat capaian kinerja 97,22%.
- 5) Program pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).
Persentase layanan izin dan/atau layanan pemeriksaan rincian teknis Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 dan persetujuan teknis dan/atau Sertifikat Layak Operasional (SLO) pengumpulan



Limbah B3 skala kabupaten dari target 53,50% terealisasi sebesar 71,00% sehingga tingkat capaian indikator kinerja program 132,71%. Anggaran pelaksanaan program pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) sebesar Rp7.500.000,00 dan terealisasi Rp7.492.350,00 (99,90%)

- 6) Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menggunakan anggaran Rp402.281.000,00 dengan realisasi Rp399.663.850,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan program 99,35%. Indikator kinerja program yaitu ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten tercapai 103,88% dari target yang ditetapkan 20,10% terealisasi 20,88%.

- 7) Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat.

Persentase pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat yang dilaksanakan ditargetkan sebesar 100,00% dan terealisasi 100,00% sehingga tingkat capaian kinerja indikator kinerja program 100,00%. Program peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat didukung dengan anggaran sebesar Rp871.142.090,00 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 98,44% atau terealisasi sebesar Rp857.595.220,00.

- 8) Program penghargaan lingkungan untuk masyarakat.

Program penghargaan lingkungan untuk masyarakat didukung dengan anggaran sebesar Rp325.838.500,00 dan tercapai 99,68% sebesar Rp324.804.030,00. Target indikator kinerja program yaitu persentase perolehan penghargaan bidang lingkungan hidup tercapai 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar 75,00%.

9) Program penanganan pengaduan lingkungan hidup

Program penanganan pengaduan lingkungan hidup menggunakan alokasi anggaran sebesar Rp38.530.000,00 dan terealisasi sebesar Rp37.764.050,00 sehingga kinerja keuangan program 98,01%. Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani 100,00%.

10) Program pengelolaan persampahan.

Pelaksanaan program pengelolaan persampahan didukung dengan anggaran Rp16.227.900.248,00 dan terealisasi Rp15.809.754.159,49 (97,42%). Indikator kinerja program pengelolaan persampahan meliputi 2 (dua) hal, yaitu:

- a) Persentase pengurangan sampah dari target 22,54% terealisasi 22,57% sehingga tingkat capaian indikator kinerja program 100,13%;
- b) Persentase penanganan sampah dari target sebesar 33,86% terealisasi 34,11% sehingga tingkat capaian indikator kinerja sebesar 100,74%.

Capaian kinerja keluaran kegiatan pada urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran secara terperinci tertuang pada Buku 2 Laporan Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup pada tahun 2022 antara lain:

1) Belum optimalnya pengelolaan sampah

Permasalahan persampahan di Kabupaten Sleman, antara lain adalah peningkatan timbunan sampah, kelangkaan lahan yang dapat digunakan sebagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan tempat pengolahan akhir, serta penggunaan teknologi pengelolaan sampah. Tingginya volume timbunan sampah dan pengelolaan secara umum belum memadai menimbulkan berbagai macam persoalan lingkungan seperti pencemaran tanah, air tanah, air permukaan, dan udara. Pelayanan persampahan di Kabupaten Sleman masih belum optimal. Keadaan tersebut disebabkan perkembangan penduduk, permukiman,

perkantoran dan kawasan perkotaan yang sangat pesat tanpa diimbangi tersedianya sarana dan prasarana persampahan yang memadai. Sebagai eksesnya masih sering ditemukan adanya pembuangan sampah secara ilegal.

2) Belum optimalnya pengelolaan Limbah B3

Limbah B3 bersumber dari berbagai sektor baik dari industri, pertanian, pelayanan kesehatan, pariwisata bahkan sampai kegiatan rumah tangga. Perkembangan kegiatan industri, pelayanan kesehatan, pertanian, rumah tangga, dan pariwisata tersebut tentu akan dibarengi dengan peningkatan volume Limbah B3. Limbah B3 sangat berisiko terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan masyarakat. Pengelolaan Limbah B3 rumit dan mahal, sehingga bila disertai dengan rendahnya pemahaman masyarakat menjadikan isu pengelolaan Limbah B3 bertambah serius setiap tahunnya.

3) Adanya degradasi lingkungan

Indeks Kualitas Air di Kabupaten Sleman tahun 2022 masih masuk kategori kurang baik, walaupun terjadi kenaikan indeks dari tahun 2021 menjadi 43,54. Kualitas air sungai dipengaruhi oleh kadar BOD, COD, coliform total, deterjen dan minyak/lemak. IKA rendah salah satunya disebabkan oleh perilaku masyarakat dan industri dalam membuang limbah ke sungai tanpa pengolahan lebih dahulu. Sementara kualitas udara juga menunjukkan kenaikan indeks, menjadi 83,99.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.15 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu tugas negara (dalam hal ini pemerintah kabupaten) dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk. Pelayanan administrasi kependudukan, meskipun bukan menjadi pelayanan dasar, namun hasil dari pelayanan administrasi kependudukan seringkali menjadi salah satu syarat bagi penduduk untuk dapat mengakses layanan dasar maupun pelayanan publik yang lain. Hasil dari pelayanan administrasi kependudukan berupa dokumen kependudukan dan data kependudukan. Dokumen kependudukan antara lain berupa Kartu Keluarga (KK), biodata penduduk, Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), surat keterangan pindah, surat keterangan tempat tinggal (SKTT) bagi orang asing, akta kelahiran, akta pengakuan anak, akta pengesahan anak, akta perkawinan, akta perceraian, serta akta kematian.

Cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan mengalami kenaikan, antara lain disebabkan adanya upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemilikan semua dokumen kependudukan yang dipergunakan dalam pelayanan publik. Selain itu, upaya Pemerintah Kabupaten Sleman telah memberikan pelayanan aktif langsung kepada masyarakat, seperti pelayanan keliling administrasi kependudukan dengan jemput bola langsung ke penduduk, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang semakin memudahkan masyarakat mengakses pelayanan dokumen kependudukan.

Tabel 3.47
Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Indeks	96,05	96,48	100,45%

Sumber: Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022



Capaian Indikator Kinerja Daerah pada urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2022 menunjukkan indeks pengelolaan administrasi kependudukan pada urusan kependudukan dan pencatatan sipil dari target yang ditetapkan sebesar 96,05 tercapai 96,48 dengan tingkat realisasi sebesar 100,45%.

Pelaksanaan urusan administrasi kependudukan telah berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya capaian indeks pengelolaan administrasi kependudukan yang pada tahun 2021 sebesar 100,26% menjadi 100,45% pada tahun 2022.

Tabel 3.48
Capaian Indikator Pelayanan Kependudukan Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan penerbitan KK (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Cakupan penerbitan KTP-el (%)	98,63	99,68	99,98	99,50	99,12
3	Cakupan penerbitan KIA (%)	17,04	43,33	56,93	70,69	71,69
4	Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	96,01	98,77	97,62	100,00	100,00
5	Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	90,56	99,16	100,00	100,00	100,00
6	Cakupan penerbitan kutipan akta perkawinan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

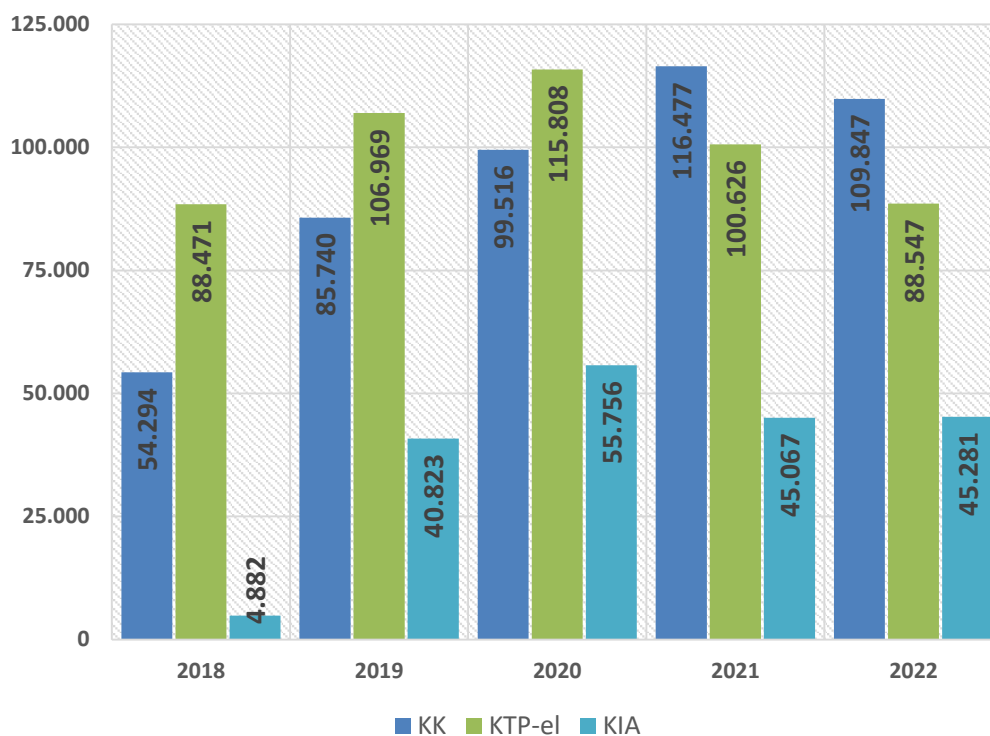
Capaian indikator pelayanan kependudukan di Kabupaten Sleman tahun 2022 menunjukkan hampir seluruhnya mencapai 100,00%. Capaian indikator dibawah 100,00% terjadi pada cakupan penerbitan KTP-el (99,12%) dan cakupan penerbitan KIA (71,69%). Cakupan penerbitan KTP-el selama 2022 turun dibandingkan tahun 2021 sebesar 99,50% sedangkan untuk cakupan penerbitan KIA mengalami kenaikan selama 4 (empat) tahun terakhir.

Tabel 3.49
Jumlah Layanan Kependudukan Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022

No.	Jenis Layanan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kartu Keluarga	54.294	85.740	99.516	116.477	109.847
2	KTP el	88.471	106.969	115.808	100.626	88.547
3	KIA	4.882	40.823	55.756	45.067	45.281
4	Akta Kelahiran	11.725	12.973	11.795	11.511	20.689
5	Akta Kematian	6.744	8.467	12.280	12.656	13.613
6	Layanan Pindah Datang	19.754	19.920	16.888	19.008	14.291
7	Layanan Pindah Keluar	11.967	11.416	9.995	11.485	11.027

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Grafik 3.16
Pelayanan KK, KTP-el, dan KIA Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Data mutasi kependudukan di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang lahir lebih sedikit dibandingkan penduduk meninggal dunia. Jumlah penduduk yang datang lebih besar daripada jumlah penduduk yang pergi. Selisih antara jumlah penduduk yang datang dan pergi lebih besar dibandingkan selisih antara jumlah penduduk yang lahir dan mati.

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil didukung dengan beberapa program dengan capaian kinerja program, sebagai berikut:

Tabel 3.50
Program dan Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

No	Program / Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				
	a. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%
	b. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100,00	100,00	100,00%

No	Program / Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2	Program pendaftaran penduduk				
	a. Cakupan dokumen KK	%	100,00	100,00	100,00%
	b. Cakupan dokumen KTP-el	%	99,83	99,12	99,29%
	c. Cakupan dokumen KIA	%	65,00	71,69	110,29%
3	Program pencatatan sipil				
	a. Cakupan dokumen akta kelahiran	%	100,00	100,00	100,00%
	b. Cakupan dokumen akta kematian	%	100,00	100,00	100,00%
	c. Cakupan dokumen akta perkawinan	%	100,00	100,00	100,00%
	d. Cakupan dokumen akta perceraian	%	100,00	100,00	100,00%
	e. Cakupan pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak	%	100,00	100,00	100,00%
	f. Cakupan dokumen akta pengakuan anak	%	100,00	100,00	100,00%
	g. Cakupan dokumen akta pengesahan anak	%	100,00	100,00	100,00%
	h. Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan nama	%	100,00	100,00	100,00%
	i. Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan	%	100,00	100,00	100,00%
4	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan				
	Cakupan ketersediaan data SIAK	%	89,00	90,45	101,63%
5	Program pengelolaan profil kependudukan				
	Cakupan ketersediaan profil kependudukan	%	100,00	100,00	100,00%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2022 menggunakan anggaran sebesar Rp13.058.288.950,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp12.399.229.338,57 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil sebesar 94,95%.

Urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil didukung dengan 5 (lima) program dengan indikator kinerja program, sebagai berikut:

1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Program penunjang urusan didukung dengan anggaran sebesar Rp11.583.352.250,00 dan terealisasi sebesar Rp10.982.273.615,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 94,81%. Indikator kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yaitu persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dan persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja, yang keduanya tercapai sebesar 100,00%.



2) Program pendaftaran penduduk

Program pendaftaran penduduk didukung dengan anggaran sebesar Rp368.798.440,00 dengan realisasi Rp363.605.403,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 98,59%. Indikator kinerja program pendaftaran penduduk meliputi cakupan dokumen KK, cakupan dokumen KTP-el, dan cakupan dokumen KIA. Indikator cakupan dokumen KK tercapai 100,00%, cakupan dokumen KTP-el tercapai 99,29%, sedangkan cakupan dokumen KIA tercapai 110,29% dari target yang telah ditetapkan.

3) Program pencatatan sipil

Program pencatatan sipil didukung dengan anggaran sebesar Rp404.491.710,00 dan terealisasi sebesar Rp391.664.179,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan program sebesar 96,83%.

Realisasi indikator kinerja program pencatatan sipil sebagai berikut:

- a) Cakupan dokumen akta kelahiran tercapai 100,00%;
- b) Cakupan dokumen akta kematian tercapai 100,00%;
- c) Cakupan dokumen akta perkawinan tercapai 100,00%;
- d) Cakupan dokumen akta perceraian tercapai 100,00%;
- e) Cakupan pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak 100,00%;
- f) Cakupan dokumen akta pengakuan anak tercapai 100,00%;
- g) Cakupan dokumen akta pengesahan anak tercapai 100,00%;
- h) Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan nama 100,00%;
- i) Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan tercapai 100,00%.

4) Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan

Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan menggunakan anggaran Rp594.592.075,00 dengan realisasi Rp555.016.107,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan 93,34%. Indikator kinerja program pengelolaan informasi administrasi kependudukan yaitu cakupan ketersediaan data SIAK dari target yang ditetapkan 89,00% dapat direalisasikan 90,45% sehingga tingkat capaian kinerja 101,63%.



5) Program pengelolaan profil kependudukan

Program pengelolaan profil kependudukan didukung dengan anggaran sebesar Rp107.054.475,00 dan terealisasi sebesar Rp106.670.035,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan program sebesar 99,64%. Indikator kinerja program pengelolaan profil kependudukan yaitu cakupan ketersediaan profil kependudukan yang tercapai 100,00%.

Capaian kinerja keluaran kegiatan pada urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran secara terperinci tertuang pada Buku 2 Laporan Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2022 serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan antara lain terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 3. 51
Permasalahan dan solusi yang dihadapi

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
1.	Adanya peralihan SIAK Terdistribusi menjadi SIAK Terpusat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten tidak dapat mengolah data sesuai kebutuhan, seperti jumlah kepemilikan akta kelahiran penduduk semua umur dan jumlah penduduk status cerai hidup tercatat. Data yang semula dapat kita olah melalui database yang kita miliki, namun saat ini data terpusat di server Ditjen Dukcapil Kemendagri Republik Indonesia.	Mengoptimalkan data agregat yang diperoleh dari Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk menyediakan data yang informatif bagi lembaga dan masyarakat.
2.	Ketersediaan blangko KTP-el belum sesuai kebutuhan layanan.	Melakukan <i>stock opname</i> berkala dan koordinasi serta mengajukan permohonan kebutuhan blangko ke Ditjen Dukcapil Kemendagri.
3.	Penyampaian Laporan Evaluasi GISA Kapanewon/ Kalurahan/Padukuhan yang terlambat.	Dibuatkan <i>google drive</i> sehingga Kapanewon/Kalurahan/Padukuhan dapat segera mengunggah bahan evaluasi GISA
4.	Proses administrasi perjanjian kerja sama yang lambat karena petugas kalurahan/ fasilitas kesehatan masih kurang responsif /proaktif.	Meningkatkan koordinasi dengan petugas kalurahan/fasilitas kesehatan untuk mengakselerasi proses administrasi.
5.	Sarana prasarana pendukung layanan adminduk yang memerlukan dukungan pembiayaan untuk peremajaan dan pemeliharaan.	Optimalisasi pembiayaan dan penggunaan sarana prasarana layanan adminduk.

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023



Pengukuran kinerja pembangunan dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis. Pelaksanaan kegiatan pada urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2022 menunjukkan konsistensi/kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Target kinerja/keluaran dari setiap kegiatan telah mendukung pencapaian target indikator kinerja program yang telah ditetapkan sebagai perjanjian kinerja Perangkat Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, Renstra, RKPD, maupun APBD.

g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan.

Kewenangan kabupaten dalam urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi penyelenggaraan penataan desa, fasilitasi kerja sama, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan administrasi desa, dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengatur bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat desa adalah memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah desa untuk memberdayakan diri dan masyarakat dengan memberikan dana yang tidak sedikit. Pemerintah kabupaten perlu mengarahkan dan mendampingi agar dana yang diterima kalurahan dimanfaatkan secara optimal.



Capaian indikator kinerja Renstra Perangkat Daerah pada urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, sebagai berikut:

Tabel 3.52
Capaian Indikator Renstra Perangkat Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Indeks Desa Membangun Kategori Desa Mandiri	Desa mandiri	32	44	137,5%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, 2023

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa tahun 2022 didukung dengan beberapa program, dengan tingkat capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 3.53
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

No	Program / Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				
	a) Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%
	b) Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100,00	100,00	100,00%
2	Program administrasi pemerintahan desa				
	a) Jumlah BUMDes dengan kategori maju	BUMDes	3	3	100,00%
	b) Persentase kalurahan berkinerja baik	%	62,00	62,00	100,00%
	c) Cakupan pemerintahan kalurahan dan Badan Permasyarakatan Kalurahan yang tertib administrasi	%	54,00	54,00	100,00%
3	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat				
	a) Persentase pasar desa dengan kualitas pengelolaan baik	%	54,00	54,00	100,00%
	b) Persentase pengembalian pinjaman PNPM mandiri perdesaan pasca program lancar	%	63,00	63,00	100,00%
	c) Persentase lembaga kemasyarakatan kalurahan yang aktif	%	54,00	54,00	100,00%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, 2023

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa didukung anggaran Rp18.227.987.496,00 dan terealisasi Rp16.278.075.696,00 sehingga capaian kinerja keuangan 89,30%. Indikator kinerja program pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, sebagai berikut:



- 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota didukung dengan anggaran sebesar Rp7.454.063.344,00 dan terealisasi sebesar Rp6.134.614.236,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 82,30%. Capaian indikator kinerja program yaitu persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dan persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja masing-masing tercapai 100,00%.
- 2) Program administrasi pemerintahan desa
Program administrasi pemerintahan desa didukung dengan anggaran sebesar Rp7.284.984.696,00 dan terealisasi Rp6.777.885.435,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 93,04%. Indikator kinerja program administrasi pemerintahan desa, sebagai berikut:
 - a) Jumlah BUMDes dengan kategori maju dengan target 3 BUMDes terealisasi 100,00%;
 - b) Persentase kalurahan berkinerja baik tercapai 100,00%; dan
 - c) Cakupan pemerintahan kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang tertib administrasi tercapai 100,00%.
- 3) Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat didukung dengan anggaran sebesar Rp3.488.939.456,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp3.365.576.025,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 96,46%. Capaian indikator kinerja program pemberdayaan lembaga adat dan masyarakat hukum adat, yaitu:
 - a) Persentase pasar desa dengan kualitas pengelolaan baik tercapai 100,00%;
 - b) Persentase pengembalian pinjaman PNPM mandiri perdesaan pasca program lancar tercapai 100,00%; dan
 - c) Persentase lembaga kemasyarakatan kalurahan yang aktif tercapai 100,00%.



Capaian kinerja keluaran kegiatan pada urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran secara terperinci tertuang pada Buku 2 Laporan Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan tahun 2022 antara lain:

1. Masih rendahnya jumlah kalurahan dengan kategori Desa Mandiri Berdasarkan indikator Indeks Desa Membangun (IDM) baru 48,83% desa dari 86 desa berstatus Desa Mandiri. Desa mandiri atau bisa disebut sebagai desa semesta adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Desa Mandiri pada tahun anggaran 2022 terdapat sebanyak 44 kalurahan yaitu Balecatur, Ambarketawang, Banyuraden, Nogotirto, Trihanggo, Sidorejo, Sidoluhur, Sidoagung, Sidokarto, Sidoarum, Sinduadi, Sendangadi, Caturtunggal, Maguwoharjo, Condongcatur, Sendangtirto, Purwomartani, Tirtomartani, Tamanmartani, Selomartani, Widodomartani, Sariharjo, Sinduharjo, Sukoharjo, Sardonoarjo, Caturharjo, Triharjo, Tridadi, Pandowoharjo, Bangunkerto, Girikerto, Wonokerto, Purwobinangun, Pakembinangun, Argomulyo, Wukirsari, Kepuharjo dan Umbulharjo.
2. Belum optimalnya peran BUMDes dalam menggerakkan ekonomi Desa karena terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), sulitnya pemetaan potensi desa/kalurahan, kurangnya komunikasi antara Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) dan pemerintah desa dalam pembentukan BUMDes/BUMKal, dan kurangnya permodalan. Pengukuran kinerja pembangunan dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis.



Pengukuran kinerja pembangunan dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis. Pelaksanaan kegiatan pada urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan tahun 2022 menunjukkan konsistensi/kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Target kinerja/keluaran dari setiap kegiatan telah mendukung pencapaian target indikator kinerja program yang telah ditetapkan sebagai perjanjian kinerja Perangkat Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, Renstra, RKPD, maupun APBD.

h. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.12 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.

Penduduk adalah subjek dan objek pembangunan. Jumlah penduduk yang tidak terkendali dapat menghambat proses-proses pembangunan menuju tujuan yang ingin dicapai karena sumber daya pembangunan terserap untuk pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan manusia yang selalu bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan adanya pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan program keluarga berencana. Indikator kinerja daerah pada urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah Indeks Ketahanan Keluarga. Ketahanan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan; dan kemampuan fisik, materiil, dan psikis untuk hidup mandiri dan harmonis.



Indeks Ketahanan Keluarga terdiri dari indikator ketahanan fisik ekonomi dan indikator sosial psikologis. Di Kabupaten Sleman, indeks ketahanan keluarga dihitung dari rerata lima indikator penyusun, yaitu indikator keluarga dengan kepemilikan rumah sendiri (data Dinas PUPKP), Indikator keluarga miskin dan rentan miskin (data Dinas Sosial), indikator perceraian (data Dinas Dukcapil dan Pengadilan Agama), indikator Anak terlantar (Data Dinas Sosial), dan indikator lansia terlantar (data Dinas Sosial).

Capaian Indikator Kinerja Daerah pada urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Sleman tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.54
Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Indeks Ketahanan Keluarga	Indeks	2,90	2,90	100,00%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, 2023

Kategori Indeks Ketahanan Keluarga adalah sebagai berikut:

1. Angka 1 = kurang
2. Angka 2 = sedang
3. Angka 3 = baik
4. Angka 4 = sangat baik

Jika melihat kategori indeks ketahanan keluarga di atas, maka indeks ketahanan keluarga Kabupaten Sleman tahun 2022 mencapai target 100% dan berada dalam kategori sedang menuju ke kategori baik.

Capaian kinerja urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.55
Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Laju pertumbuhan penduduk *format lkpj 21	1,61	1,01	0,67	0,98	1,10
2	Total fertility rate (TFR)	1,90	2,00	1,90	1,90	1,90



No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
3	Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB (%)	60,42	60,42	83,33	84,00	84,00
4	Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (%)	56,25	56,25	56,25	56,25	56,25
5	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	56,25	56,25	56,25	56,25	56,25
6	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,76	2,97	2,97	2,94	2,88
7	Rasio Akseptor KB	76,51	76,59	77,94	77,67	76,81
8	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun (%)	0,35	0,01	0,1	0,21	n/a
9	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) (%)	9,50	9,04	7,95	7,57	7,92
10	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) (%)	38,41	38,50	39,08	39,28	23,1
11	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	76,51	76,59	77,34	77,67	76,81
12	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	89,70	87,98	88,55	87,33	87,33
13	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)	88,30	86,00	86,79	86,15	86,15
14	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	86,70	8,73	84,40	87,06	87,06
15	Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa (%)	159,30	162,79	163,95	165,12	0,00065
16	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri (%)	88,26	87,18	85,35	85,28	n/a
18	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan (%)	32,82	32,82	93,20	93,20	79,81
20	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber:

- Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, 2022
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022





Keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Sleman didukung dengan 3 (tiga) program, dengan capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 3.56
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022

No	Program / Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Program pengendalian penduduk				
	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita pada usia 15 - 49 tahun	tahun	23,00	23,31	101,35 %
2	Program pembinaan keluarga berencana (KB)				
	a. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR</i>)	%	76,8	76,81	100,01%
	b. Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	39,12	40,04	102,34 %
	c. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	7,92	7,92	100,00 %
3	Program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)				
	Persentase jumlah poktan (kelompok kegiatan) yang mendukung program Bangga Kencana	%	80,00	100,00	125,00 %

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, 2023

Tingkat capaian kinerja keuangan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah 73,58%, dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp13.650.458.368,00 telah dapat direalisasikan sebesar Rp10.044.631.210,00. Realisasi keuangan dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Program pengendalian penduduk

Program pengendalian penduduk didukung dengan anggaran sebesar Rp2.308.942.538,00 dan terealisasi sebesar Rp2.280.940.435,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan 98,79%. Indikator Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita pada usia 15-49 tahun yang ditargetkan pada usia 23,00 tahun tercapai 23,31 tahun sehingga capaian indikator kinerja program pengendalian penduduk yaitu Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita pada usia 15-49 tahun adalah 101,35%.





2) Program pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Anggaran pelaksanaan program pembinaan Keluarga Berencana (KB) pada tahun 2022 adalah Rp5.979.191.075,00 dengan realisasi keuangan Rp4.815.936.932,00 sehingga capaian kinerja keuangan adalah 80,54%. Program pembinaan Keluarga Berencana didukung dengan beberapa indikator kinerja, dengan tingkat capaian sebagai berikut:

- a. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate / MCPR) target 76,80% terealisasi 76,81% sehingga capaian kinerja 100,01%.
- b. Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) target sebesar 39.12% terealisasi 40.04% tingkat capaian indikator kinerja 102,35%.
- c. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) target 7,92% realisasi 7,92% tingkat capaian indikator kinerja 100%.

3) Program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera didukung dengan anggaran Rp5.362.324.755,00 dan terealisasi Rp2.947.753.843,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan adalah 54,97%. Indikator kinerja program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera yaitu persentase jumlah poktan (kelompok kegiatan) yang mendukung program Bangga Kencana, dari target 89,00% tercapai 89,00% sehingga tingkat capaian kinerja 100%.

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sleman meraih penghargaan atas komitmen dan dukungan terhadap pelaksanaan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Kabupaten Sleman. Program Bangga Kencana berfokus untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Salah satu fokus dari program Bangga Kencana, yaitu penurunan stunting yang juga menjadi program strategis nasional yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia



Capaian kinerja keluaran kegiatan pada urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran secara terperinci tertuang pada Buku 2 Laporan Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada tahun 2022 yaitu:

- 1) Angka *Unmet Need* KB masih tinggi terlihat dari data Pasangan Usia Subur (PUS) semua tahapan di Kabupaten Sleman sebanyak 148.841 pasangan, sedangkan data Ingin Anak Tunda (IAT) dan Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) sebanyak 11.788 (7,92%), lebih tinggi dari DIY melalui BKKBN DIY yang berada di angka 5,74%.
- 2) Belum optimalnya pembinaan kelompok kegiatan yang terdiri dari BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS. Idealnya kelompok kegiatan tersebut ada di setiap padukuhan (1.212 padukuhan) di Kabupaten Sleman. Kondisi yang ada saat ini adalah Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) berjumlah 212 kelompok, Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) berjumlah 151 kelompok, Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) berjumlah 171 kelompok, Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) berjumlah 152 kelompok, dan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera/Akseptor (UPPKS/A) berjumlah 485 kelompok

Pengukuran kinerja pembangunan dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis. Pelaksanaan kegiatan pada urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2022 menunjukkan konsistensi/kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Target kinerja keluaran (output) dari setiap kegiatan telah mendukung pencapaian target indikator kinerja program yang telah ditetapkan sebagai perjanjian kinerja Perangkat Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, Renstra, RKPD, maupun APBD.

i. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Urusan pemerintahan bidang perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

Capaian Indikator Kinerja Daerah pada urusan pemerintahan bidang perhubungan yaitu Indeks Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2022 adalah 113,04 % dengan realisasi indeks sebesar 0,52 dari target indeks sebesar 0,46 .

Tabel 3.57

Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Indeks Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Indeks	0,46	0,52	113,04%

Sumber: Dinas Perhubungan, 2023

Capaian indikator urusan perhubungan di Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.58

Capaian Indikator Urusan Perhubungan di Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum tanpa angkutan perkotaan	495.000	406.394	62.563	80.793	28.174
	Jumlah arus penumpang angkutan umum dengan angkutan perkotaan	n/a	n/a	814.643	1.386.717	1.967.985
2	Rasio izin trayek	0,00011	0,000093	0,00028	0,00027	0,00026
3	Jumlah uji KIR angkutan umum	2.914	3.222	2.021	1.904	2.248
4	Jumlah bandara	1	1	1	1	1
5	Jumlah terminal bus	4	4	4	4	4
6	Persentase layanan angkutan darat tanpa angkutan perkotaan (%)	14,8	6,00	27,58	12,86	24,61
	Persentase layanan angkutan darat dengan angkutan perkotaan (%)	n/a	n/a	4,80	3,39	1,56
7	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	90	91	n/a	n/a	n/a
8	Pemasangan rambu-rambu	200	n/a.	43	1	64



No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
9	Jumlah orang melalui bandara/terminal per tahun tanpa angkutan perkotaan	495.000	406.394	62.563	80.793	28.174
	Jumlah orang melalui bandara/terminal per tahun dengan angkutan perkotaan	n/a	n/a	814.643	1.386.717	1.967.985

Sumber: Dinas Perhubungan, 2023

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja daerah pada urusan pemerintahan bidang perhubungan didukung dengan beberapa program dengan capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 3.59
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun 2022

No	Program / Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				
	a. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	100,00%
	b. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	100	100,00%
2	Program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)				
	a. Persentase ketersediaan sarpras perhubungan	%	35	38,46	103,00%
	b. Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio	50,00	50,00	100,00%
	c. Accident Rate	kejadian per kilometer	2.293	3.321	55,17%
	d. Tingkat pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan	%	21	22,44	106,86%
	e. Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	Rasio	<0,6	0,49	100,00%
	f. Persentase lokasi parkir yang berizin	%	78,25	93,33	119,27%
	g. Persentase terlaksananya pelayanan uji kendaraan berkala	%	53,5	54,42	101,72%

Sumber: Dinas Perhubungan, 2023

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan menggunakan anggaran sebesar Rp28.646.548.615,00 dan terealisasi sebesar Rp26.705.325.937,17 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan urusan pemerintahan bidang perhubungan adalah 93,22%.

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan didukung dengan 2 (dua) program dengan tingkat capaian indikator kinerja program, sebagai berikut:





- 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota didukung dengan anggaran sebesar Rp11.024.572.947,00 dan terealisasi Rp10.223.831.072,00 sehingga capaian kinerja keuangan program sebesar 92,74%. Indikator kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yaitu persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dan persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja tercapai 100,00%.
- 2) Program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Pelaksanaan program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menggunakan anggaran sebesar Rp17.621.975.668,00 dengan realisasi Rp16.481.494.865,17 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 93.53%. Indikator kinerja program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut:
 - a) Persentase ketersediaan sarpras perhubungan dengan target 31,00% terealisasi 38,46,75% sehingga capaian kinerja indikator program 124,06%;
 - b) Rasio konektivitas kabupaten/kota tercapai 100,00%;
 - c) *Accident Rate* dari target 2,293 kejadian per kilometer terealisasi 3,321 kejadian per kilometer sehingga tingkat capaian 55,17%;
 - d) Tingkat pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan dari target 21 % terealisasi 22,44% sehingga capaian kinerja 106,86%;
 - e) Kinerja lalu lintas kabupaten/kota dari target <0,6 tercapai 0,49 sehingga capaian indikator kinerja sebesar 100,00%;
 - f) Persentase lokasi parkir yang berizin dari target 78,25% terealisasi 93,33 % dengan tingkat capaian indikator kinerja 119,27%
 - g) Persentase terlaksananya pelayanan uji kendaraan berkala telah ditargetkan sebesar 53,50% dan tercapai 54,42% sehingga capaian indikator kinerja 101,72%



Capaian kinerja keluaran kegiatan pada urusan pemerintahan bidang perhubungan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran secara terinci tertuang pada Buku 2 Laporan Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan pada tahun 2022 antara lain:

Tabel 3.60
Permasalahan dan Solusi Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun 2022

No.	Permasalahan	Solusi
1	Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan terhadap pertumbuhan kapasitas jalan.	menerapkan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRL) secara ketat di titik/ruas jalan yang membutuhkan.
2	Belum tercukupinya fasilitas pengaman dan pengatur lalu lintas serta prasarana perhubungan lainnya.	pengadaan dan pemasangan fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
3	Tingginya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas adalah indikasi awal terjadinya kecelakaan lalu lintas, maka tingginya angka pelanggaran lalu lintas mencerminkan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas.	Solusi yang dilakukan adalah memberikan pendidikan atau sosialisasi peraturan di bidang LLAJ dan melakukan penegakan hukum di bidang LLAJ seperti perparkiran, penegakan penertiban di obyek wisata Kaliurang dan Breksi terkait kelayakan kendaraan jeep wisata, serta penegakan hukum bagi pengendara kendaraan bermotor.
4	Tingginya waktu tempuh kendaraan, terutama di wilayah perkotaan. Waktu tempuh kendaraan pada wilayah perkotaan rata-rata pada jam sibuk sebesar 25 km/jam, sedang pada ruas-ruas tertentu kecepatan bisa sangat tinggi yaitu diatas 60 km/jam. Perbedaan laju kecepatan ini mendorong pengendara untuk kurang berhati-hati dan rawan timbul kecelakaan dan kemacetan lalu lintas.	Solusi yang dilakukan adalah menerapkan MRL secara ketat di titik/ruas jalan yang membutuhkan.

Sumber: Dinas Perhubungan, 2023

Pengukuran kinerja pembangunan dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis. Pelaksanaan kegiatan pada urusan pemerintahan bidang perhubungan tahun 2022 menunjukkan konsistensi/kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Target kinerja keluaran (*output*) dari setiap kegiatan telah mendukung pencapaian target indikator kinerja program yang telah ditetapkan sebagai perjanjian kinerja Perangkat Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, Renstra, RKPD, maupun APBD.



j. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman 55.18 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Kabupaten Sleman sebagai kota tujuan pendidikan serta daerah pengembangan pemukiman/perumahan memiliki konsekuensi adanya penambahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Kabupaten Sleman tumbuh menjadi perkotaan dan turut mengalami banyak tantangan dalam pembangunan. *Smart city* bagi Pemerintah Kabupaten Sleman sudah menjadi suatu keharusan. *Sleman smart regency* merupakan perwujudan dari *smart city* di Kabupaten Sleman.

Kabupaten Sleman sebagai tujuan pendidikan dan daerah pengembangan pemukiman/perumahan tumbuh menjadi perkotaan dengan berbagai tantangan pembangunan. *Sleman Smart Regency* merupakan perwujudan dari *smart city* di wilayah Kabupaten Sleman. Pembangunan *smart regency* tersebut meliputi 6 (enam) elemen, yaitu:

- 1) *Smart governance*, memiliki sasaran untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu;
- 2) *Smart branding*, memiliki sasaran untuk peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional;
- 3) *Smart economy*, memiliki sasaran untuk mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan pada era





- informasi saat ini, serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less-cash society*;
- 4) *Smart living*, memiliki sasaran untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman dan efisien;
 - 5) *Smart society*, memiliki sasaran untuk mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *literacy digital* yang tinggi; serta
 - 6) *Smart environment*, memiliki sasaran untuk mewujudkan tata Kelola lingkungan hidup Kabupaten Sleman yang baik, bertanggungjawab dan berkelanjutan.

Tabel 3.61
Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Persentase ketersediaan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	%	80,00	80,00	100,00%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023

Persentase ketersediaan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2022 dari target yang ditetapkan 80,00% terealisasi 80,00% sehingga capaian kinerja indikator sebesar 100,00%. Capaian indikator urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika tahun 2022 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.62
Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan pengembangan & pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kapanewon (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Cakupan layanan telekomunikasi (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Menara telekomunikasi	518	518	518	547	557
4	Website domain	1	1	1	1	1
5	Sub-domain	117	150	160	231	235
6	Sistem informasi manajemen (SIM)	72	74	85	91	101
7	SIM terintegrasi	24	38	39	51	55
8	Infrastruktur jaringan WAN	274	277	297	359	460
9	Infrastruktur jaringan LAN	2000	2129	4563	4661	5500
10	Jumlah server	72	72	72	72	73



No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
11	Radio komunikasi (<i>repeater / link</i>)	7	7	7	7	7
12	Radio komunikasi (<i>base stasiun/ RIG</i>)	22	22	22	22	22
13	Booklet dan leaflet	2500	7000	5500	13750	1085
14	Pembuatan baliho/advertorial (buah)	29	62	105	11	17
15	Sosialisasi melalui TV (kali)	46	41	35	1	4
16	Sosialisasi melalui Radio (kali)	474	182	410	15	10
17	Pengkajian Opini Masyarakat (kali)	1	1	1	1	1
18	Sarana Telekomunikasi (buah)	856	856	856	856	856

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah menara telekomunikasi meningkat dari 518 pada tahun 2018, 2019, dan 2020 menjadi 547 dan 557 buah pada tahun 2021 dan 2022. Jumlah sub-domain selalu meningkat dari 117 sub domain pada tahun 2018, naik menjadi 150 pada tahun 2019 dan 160 pada tahun 2020. Pada tahun 2021 jumlah sub-domain 231 dan pada tahun 2022 jumlah sub-domain 235. Jumlah Sistem Informasi Manajemen (SIM) pada tahun 2022 adalah 101 SIM dengan 55 SIM sudah terintegrasi. Jumlah SIM dan SIM yang terintegrasi selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 3.63

Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2022

No	Program / Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				
	a. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%
	b. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100,00	100,00	100,00%
2	Program informasi dan komunikasi publik				
	a. Persentase aduan masyarakat terlayani	%	100,00	100,00	100,00%
	b. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	%	75,00	100,00	125,00%
3	Program aplikasi informatika				
	a. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara <i>online</i> dan terintegrasi	%	50,00	50,00	100,00%
	b. Persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100,00	100,00	100,00%
	c. Persentase padukuhan yang telah terhubung dengan jaringan internet	%	92.33	86.13	93.47%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023

Pengukuran kinerja pembangunan dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis. Pelaksanaan kegiatan pada urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika tahun 2022 menunjukkan konsistensi/kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Target kinerja/keluaran dari setiap kegiatan telah mendukung pencapaian target indikator kinerja program yang telah ditetapkan sebagai perjanjian kinerja Perangkat Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, Renstra, RKPD, maupun APBD.

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika menggunakan anggaran sebesar Rp30.125.349.063,00 dengan realisasi Rp29.315.783.117,60 sehingga capaian kinerja keuangan urusan sebesar 97,31%. Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika didukung dengan 3 (tiga) program, dengan tingkat capaian indikator kinerja dan keuangan program, sebagai berikut:

- 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
Anggaran pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebesar Rp15.214.298.988,00 dengan realisasi Rp14.755.201.764,00 sehingga capaian kinerja keuangan program 96,98%. Indikator kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota, yaitu persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dan persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja tercapai 100,00%.
- 2) Program informasi dan komunikasi publik
Program informasi dan komunikasi publik dilaksanakan dengan Rp3.715.435.800,00 dan terealisasi Rp3.558.549.080,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan program sebesar 95,78%. Indikator kinerja program terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu:
 - a) Persentase aduan masyarakat terlayani tercapai 100,00%;
 - b) Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten tercapai 125,00%.

3) Program aplikasi informatika

Program aplikasi informatika dilaksanakan dengan anggaran Rp11.195.614.275,00 dan terealisasi Rp11.002.032.273,60 tingkat capaian kinerja keuangan 98,27%.

- a) Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi tercapai 100,00%.
- b) Persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo tercapai 100,00%.
- c) Persentase padukuhan yang telah terhubung dengan jaringan internet dari target yang ditetapkan 92.33% terealisasi 86.13% tingkat capaian kinerja 93.47%.

Capaian kinerja keluaran kegiatan pada urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran secara terperinci tertuang pada Buku 2 Laporan Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika pada tahun 2022 antara lain:

Tabel 3.64
Permasalahan dan Solusi Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2022

No.	Permasalahan	Solusi
1	Kualitas produk foto/video untuk materi <i>branding</i> /publikasi pmda kurang maksimal karena peralatan untuk pembuatan foto/video yang harus diganti karena faktor usia teknis	Perlu <i>upgrade</i> peralatan audio visual untuk pengelolaan konten (kamera, cam) guna mendukung optimalisasi <i>branding</i> /publikasi pmda
2	<i>Response time</i> dan kualitas pelayanan informasi publik yang dilaksanakan perangkat daerah masih belum optimal	Perlu penguatan komitmen dari PPID pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik
3	PPID Kalurahan yang terbentuk hingga tahun 2022 hanya 44 PPID (51,2%) dari total 86 Kalurahan	Perlu pembentukan PPID kalurahan di wilayah – wilayah yang belum optimal untuk mendukung optimalisasi keterbukaan informasi
4	Perangkat daerah dalam melakukan <i>branding</i> /publikasi kebijakan-kebijakan pmda belum terprogram	Perlu rencana program publikasi Kabupaten Sleman setiap tahunnya dan perlu sebuah kesepakatan/produk hukum yang mengatur tentang <i>branding</i> Kabupaten Sleman
5	Kanal aduan lapor sleman dan SP4N – Lapor belum terintegrasi	Perlu adanya integrasi kanal aduan Lapor Sleman dan Sp4N-Lapor
6	Sebaran mitra/komunitas informasi pemerintah tidak merata di seluruh wilayah	Perlu sosialisasi dan penjangkaran mitra/komunitas untuk diseminasi informasi pemerintah di wilayah-wilayah yang belum optimal
7	Admin pejabat penghubung pelayanan aduan di perangkat daerah sering berganti personil	Perlu adanya SDM dengan tupoksi spesialisasi komunikasi publik di seluruh OPD

No.	Permasalahan	Solusi
8	Penolakan warga pada beberapa lokasi yang akan dipasang infrastruktur teknologi informatika (menara, <i>microcell</i> , tiang FO)	Perlu adanya sosialisasi secara bertahap terkait program Pemda Sleman
9	Kendaraan operasional secara umur teknis sudah saatnya diganti	Perlu pengadaan kendaraan operasional untuk optimalisasi pengelolaan jaringan di wilayah Kabupaten Sleman
10	Pemahaman pegawai pada setiap perangkat daerah mengenai implementasi TIK belum merata	Mengoptimalkan koordinasi dan kolaborasi antar OPD serta meningkatkan cakupan sosialisasi agar dapat diterima oleh semua OPD pada setiap tingkatan/sektor
11	Pemanfaatan <i>Disaster Recovery System</i> (DRC) yang dilaksanakan sekarang masih kurang maksimal karena lebih berfungsi untuk <i>backup</i> data saja, belum bisa dimanfaatkan untuk <i>live system</i> karena kapasitasnya tidak mencukupi	Perlu penambahan infrastruktur untuk server, seting dan uji skenario DRC
12	Keterbatasan anggaran pemeliharaan jaringan FO	Diperlukan penyediaan anggaran untuk pemeliharaan peralatan jaringan yang memadai di Dinas Komunikasi dan Informatika sejak DPA murni disahkan
13	Upaya penertiban tiang-tiang FO yang tidak rapi dan mengganggu estetika belum optimal	Metode <i>ducting</i> kabel-kabel <i>fiber optic</i> untuk tempat strategis dan jalan-jalan protokol
14	Belum ada standar pembuatan aplikasi mengenai hal-hal detail seperti standar enkripsi password, <i>field-field</i> registrasi user, dan hal teknis lainnya yang menyebabkan kesulitan menerapkan <i>single sign on</i>	Diperlukan produk hukum atau standar pembuatan aplikasi yang akan memudahkan dalam penerapan <i>single sign on</i> yang dapat diterapkan oleh vendor atau pihak ketiga
	Beberapa perangkat daerah belum melakukan koordinasi teknis berkaitan dengan pembuatan sistem aplikasi sehingga menyulitkan pusat integrasi data	Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.1 Tahun 2022 tentang Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE terutama Pasal 8 ayat 2

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023

Pengukuran kinerja pembangunan dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis. Pelaksanaan kegiatan pada urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika tahun 2022 menunjukkan konsistensi/kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Target kinerja keluaran (*output*) dari setiap kegiatan telah mendukung pencapaian target indikator kinerja program yang telah ditetapkan sebagai perjanjian kinerja Perangkat Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, Renstra, RKPD, maupun APBD.

k. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah tahun 2021 dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.19 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Capaian kinerja indikator Renstra Perangkat Daerah pada urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 3.65

Capaian Kinerja Indikator Renstra Perangkat Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Rasio Pelaku Usaha Mikro	%	11,00	11,95	108,64%
2	Rasio Keanggotaan Koperasi	%	1,10	1,10	100,00%

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, 2023

Capaian indikator kinerja rasio pelaku usaha mikro dari target 11,00% terealisasi 11,95% sehingga capaian kinerja 108,64%. Rasio keanggotaan koperasi dari target yang ditetapkan sebesar 1,10% dapat direalisasikan 1,10% sehingga capaian kinerja rasio keanggotaan koperasi 100,00%.

Data perkembangan koperasi, usaha mikro dan usaha kecil di Kabupaten Sleman dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.66

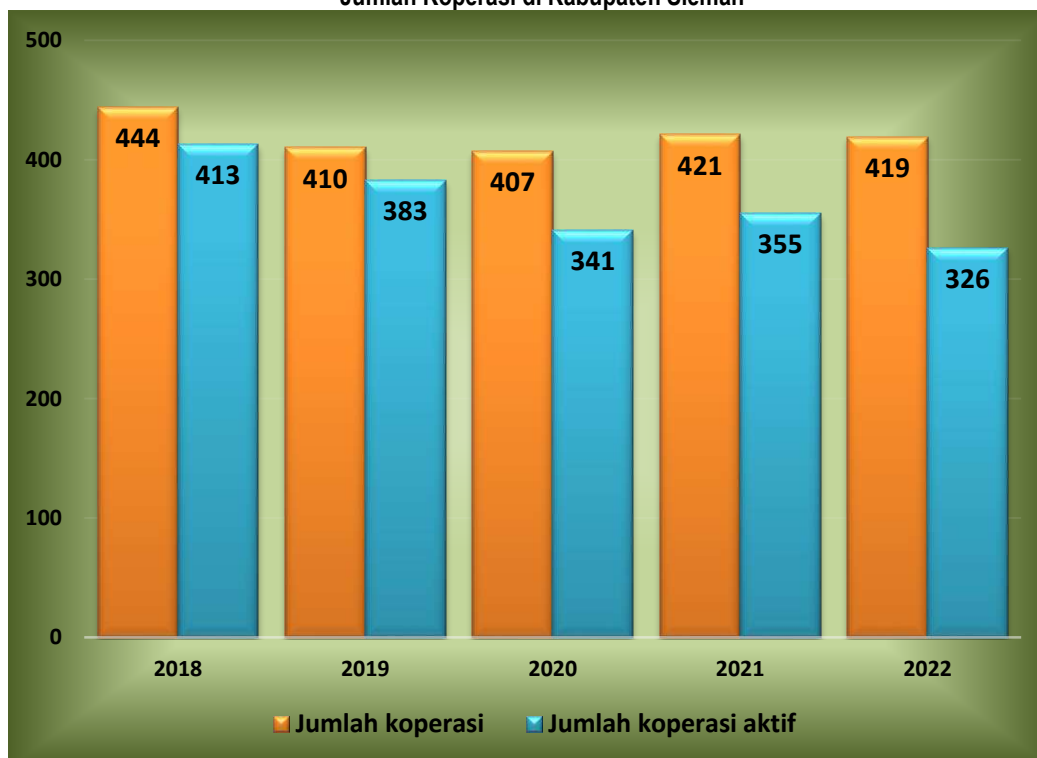
Data Perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah koperasi aktif	413	383	341	355	326
Jumlah koperasi	444	410	407	421	419
Persentase koperasi aktif (%)	93,01	93,41	83,78	84,38	77,8
Usaha mikro (unit)	35.682	40.887	67.414	89.197	90.535
Jumlah UMKM (unit)	36.653	41.852	68.382	89.871	90.557
Persentase usaha mikro dan kecil	97,35	97,69	99,95	99,25	99,99

Sumber: Dinas Koperas Usaha Kecil dan Menengah, 2023



Grafik 3.17
Jumlah Koperasi di Kabupaten Sleman



Sumber: Dinas Koperas Usaha Kecil dan Menengah, 2023

Tabel 3.67
Jumlah Koperasi di Kabupaten Sleman

No	Jenis Koperasi	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Koperasi Serba Usaha	83	92	90	87	81
2	Koperasi Simpan Pinjam	86	67	67	66	67
3	Koperasi Pegawai Negeri Ri	72	71	69	70	68
4	Koperasi Karyawan	33	28	28	25	25
5	Koperasi Unit Desa (Kud)	17	17	17	17	16
6	Koperasi Pebabri	14	13	12	13	13
7	Koperasi Pertanian	11	13	13	13	15
8	Koperasi Wanita	9	9	9	10	10
9	Koperasi Mahasiswa	8	8	8	7	6
10	Koperasi Angkatan Darat	5	7	7	5	6
11	Koperasi Wredatama	4	5	5	5	5
12	Koperasi Pondok Pesantren	4	4	4	4	4
13	Koperasi Angkatan Udara	5	4	4	4	3
14	Koperasi Peternakan	4	4	4	4	4
15	Koperasi Pasar	4	4	4	4	3
16	Koperasi Angkutan Darat	2	2	2	4	3
17	Koperasi Lainnya	83	62	64	81	90

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, 2023



Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah didukung dengan beberapa program dengan capaian indikator kinerja program, sebagai berikut:

Tabel 3.68
Program dan Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2022

No	Program / Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				
	a. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%
	b. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100,00	100,00	100,00%
2	Program pelayanan izin usaha simpan pinjam				
	Persentase KSP/USP koperasi yang memiliki izin	%	19,61	25,87	131,94%
3	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi				
	Persentase koperasi yang aktif	%	76,50	77,80	101,70%
4	Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi				
	Persentase KSP/USP koperasi sehat	%	14,75	16,00	108,47%
5	Program pendidikan dan latihan perkoperasian				
	Persentase pengelola koperasi yang bersertifikat	%	22,31	22,68	101,68%
6	Program perberdayaan dan perlindungan koperasi				
	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	%	1,70	-18,04	-1.061,06%
7	Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)				
	Jumlah pelaku usaha mikro baru yang berizin	Pelaku usaha mikro	500	1.003	200,60%
8	Program pengembangan umkm				
	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	Usaha mikro	10	10	100,00%

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, 2023

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah didukung dengan anggaran sebesar Rp12.754.980.347,00 dengan realisasi keuangan Rp11.751.159.042,40 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 92,13%. Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah didukung dengan 8 (delapan) program dengan capaian indikator kinerja program, sebagai berikut:

- 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan dengan anggaran Rp6.065.144.164,00 dengan realisasi keuangan Rp5.798.817.347,20 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 95,61%. Indikator kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota tercapai 100,00%.
- 2) Program pelayanan izin usaha simpan pinjam
Program pelayanan izin usaha simpan pinjam dilaksanakan dengan anggaran Rp29.400.000,00 terealisasi Rp20.514.135,00 tingkat kinerja keuangan program 69,78%. Indikator kinerja program yaitu persentase KSP/USP koperasi yang memiliki izin dengan target 19,61 terealisasi 25,87 capain indikator kinerja 131,94%.
- 3) Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi
Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp20.949.564,00 dan terealisasi sebesar Rp20.272.050,00 capaian kinerja keuangan program 96,77%. Indikator kinerja persentase koperasi yang aktif ditargetkan sebesar 76,50% terealisasi 77,80% capaian indikator kinerja 101,70%.Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi
- 4) Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp157.371.756,00 terealisasi Rp131.833.955,00 sehingga capaian kinerja keuangan program 83,77%. Capaian indikator kinerja program, yaitu persentase KSP/USP koperasi sehat target 14,75% terealisasi 16,00% capaian indikator kinerja 108,47%.
- 5) Program pendidikan dan latihan perkoperasian
Program pendidikan dan latihan perkoperasian dilaksanakan dengan anggaran Rp855.323.890,00 terealisasi Rp762.205.046,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 89,11%. Capaian indikator kinerja persentase pengelola koperasi yang bersertifikat dari target 22,31 % terealisasi 22,68% capaian indikator kinerja 101,68%.

6) Program perberdayaan dan perlindungan koperasi

Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi dilaksanakan dengan Rp393.668.212,00 dan terealisasi Rp365.453.110,00 capaian kinerja keuangan program 92,83%. Capaian indikator kinerja program, yaitu persentase peningkatan volume usaha koperasi target 1,70% terealisasi -18,04% capaian indikator kinerja -1.061,06%. Penurunan capaian indikator kinerja ini merupakan dampak long-covid bagi usaha koperasi dimana banyak koperasi yang usahanya tersendat dikarenakan penurunan kemampuan ekonomi khususnya daya beli, tingkat pengembalian pinjaman dan konsumsi masyarakat dan anggota koperasi atas produk dan jasa yang ada dikoperasi.

7) Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp4.073.057.464,00 dan realisasi Rp3.542.802.051,20 sehingga kinerja keuangan 86,98%. Jumlah pelaku usaha mikro baru yang berizin target 500 terealisasi 1.003 sehingga capaian kinerja 200,60%. Hal ini didukung oleh reformasi perijinan baik ditingkat pusat maupun daerah yang menyebabkan semakin banyaknya perijinan yang berbasis online

8) Program pengembangan UMKM

Program pengembangan UMKM target anggaran Rp1.160.065.297,00 terealisasi Rp1.109.261.348,00 capaian kinerja keuangan 95,62%. Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha target 10 terealisasi 10 capaian kinerja 100,00%.

Capaian kinerja keluaran kegiatan pada urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran secara terperinci tertuang pada Buku 2 Laporan Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah pada tahun 2022 antara lain:

- 1) Masih banyaknya koperasi yang tidak aktif dan kurang produktif. Jumlah koperasi aktif pada tahun 2022 sejumlah 326 unit turun dari tahun 2021 yang berjumlah 327 unit dan turun dari 341 unit pada tahun 2020. Dari total koperasi yang ada di Sleman, pada tahun 2022 hanya 196 unit yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, turun dari 206 koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan pada tahun 2021.
- 2) Pengelola koperasi banyak yang belum memiliki kompetensi yang tersertifikasi. Jumlah pengelola koperasi yang telah tersertifikasi baru sekitar 30%. Sertifikasi bagi pengelola koperasi sangat penting seiring dengan semakin ketatnya persaingan di bidang jasa keuangan.
- 3) Masih rendahnya inovasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan dan jaringan koperasi. Sebanyak 146 koperasi memiliki jumlah anggota kurang dari 5 ribu orang dan modal usaha dibawah 250 juta rupiah. Mayoritas koperasi yang ada merupakan koperasi dengan modal usaha dibawah 1 miliar sehingga berat bagi koperasi tersebut untuk menggunakan teknologi dan sistem informasi yang memerlukan investasi baik dari sisi pembuatan maupun *maintenance* dan pengelolaan.
- 4) Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) belum berfungsi optimal dikarenakan keterbatasan SDM maupun sarana dan prasarana pendukung.
- 5) UKM minim informasi pasar. UKM sangat termotivasi untuk mengembangkan produknya, tetapi inovasi dan pengembangan kreasi produk yang dikembangkan tidak didasarkan dengan informasi dan permintaan pasar dengan harga pokok produksi yang relatif mahal. Hal ini menyebabkan produk yang dikembangkan kurang berdaya saing dan tidak bisa diserap pasar dengan baik. Informasi dari market intelligence yang dilakukan seharusnya menjadi acuan dalam pengembangan dan kreasi produk UKM, agar produk yang dihasilkan langsung bisa diserap pasar.



6) Masih rendahnya kemampuan UMKM dalam mengakses dan mengelola keuangan untuk mengembangkan usaha. Banyak UKM memiliki keterbatasan dalam mengakses pembiayaan terutama perbankan. Beberapa penyebabnya adalah karena tidak ada agunan, skala dan prospek usaha yang kurang menjanjikan, serta laporan keuangan yang tidak terekam dengan baik. Lebih dari 90% UKM tidak memiliki catatan pembukuan dan laporan keuangan yang baik, disamping itu tidak ada pemisahan antara keuangan usaha dengan keuangan pribadi atau rumah tangga.

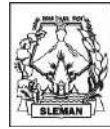
Pengukuran kinerja pembangunan dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis. Pelaksanaan kegiatan pada urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah tahun 2022 menunjukkan konsistensi/kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Target kinerja keluaran (*output*) dari setiap kegiatan telah mendukung pencapaian target indikator kinerja program yang telah ditetapkan sebagai perjanjian kinerja Perangkat Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, Renstra, RKPD, maupun APBD.

I. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Urusan pemerintahan bidang penanaman modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Penyelenggaraan urusan wajib penanaman modal didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Kegiatan penanaman modal merupakan salah satu instrumen dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Perkembangan penanaman modal sangat dipengaruhi





oleh iklim penanaman modal yang ditentukan oleh kebijakan di bidang penanaman modal, baik peraturan di bidang penanaman modal, maupun peraturan pelaksanaannya dan akan berdampak pada sistem serta prosedur pelayanan kepada *investor*. Selain kebijakan, iklim pananaman modal juga dipengaruhi oleh sarana prasarana pendukung, kualitas aparat pelayanan dan adanya kesamaan persepsi antara instansi yang terkait dengan pelayanan penanaman modal dalam memandang keberadaan *investor*. Hal tersebut tentu akan meningkatkan daya saing daerah dalam menarik *investor* terutama penanaman modal asing.

Tabel 3.69
Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Nilai Investasi	Rp. Milyar	591,00	1.346,00	227,75 %

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu, 2023

Capaian indikator kinerja daerah pada urusan pemerintahan bidang penanaman modal yaitu nilai investasi yang ditargetkan sejumlah Rp591,00 Milyar terealisasi sejumlah Rp1.346,00 Milyar sehingga capaian kinerja indikator kinerja daerah yaitu nilai investasi tahun 2022 tercapai sebesar 227,75%.

Tabel 3.70
Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah investor berskala nasional					
	PMDN (unit)	88	119	268	404	541
	PMA (unit)	80	100	109	111	121
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional					
	PMDN (Rp dalam Juta)	5.584.260	6.475.060	7.034.606	8.802.775	9.895.541
	PMA (US\$)	193.830.919	209.380.604	214.463.803	224.937.204	242.632.203
3	Rasio daya serap tenaga kerja	68,23	71,92	67,58	72,01	64,94
4	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (%)	43,43	15,95	8,64	25,14	12,41
5	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMA (%)	(-17,64)	8,02	3,28	6,63	7,87

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu, 2023



Tabel 3.71
Program dan Indikator Kinerja Program pada Urusan Penanaman Modal Tahun 2022

No	Program / Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				
	a. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%
	b. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100,00	100,00	100,00%
2	Program pengembangan iklim penanaman modal				
	Persentase izin prinsip, izin lokasi, dan izin usaha yang ditindaklanjuti	%	85,00	99,71	117,31%
3	Program promosi penanaman modal				
	a. Jumlah investor baru	izin	925	1.004	108,54%
	b. Jumlah investor yang bermitra dengan UMKM	UMKM	160	100	62,50%
4	Program pelayanan penanaman modal				
	a. Persentase jumlah permohonan izin yang dilayani	%	100,00	100,00	100,00%
	b. Persentase peningkatan jumlah bangunan ber IMB di Kabupaten Sleman	%	1,00	1,03	103,00%
	c. Persentase ketersediaan bahan pengambilan kebijakan evaluasi perizinan dan non-perizinan	%	100,00	100,00	100,00%
5	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal				
	a. Persentase izin pemanfaatan ruang yang terselesaikan	%	90,00	81,40	90,00%
	b. Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	%	6,03	5,33	88%
6	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal				
	Persentase izin yang terselesaikan	%	94,00	92,24	98,13%

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

Urusan pemerintahan bidang penanaman modal dilaksanakan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp13.697.837.714,00 dan terealisasi Rp12.724.959.632,19 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 92,90%. Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal didukung dengan 6 (enam) program, dengan tingkat capaian kinerja program sebagai berikut:

- 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan dengan anggaran Rp10.713.984.236,00 terealisasi sebesar Rp9.787.275.168,19 sehingga capaian kinerja 91,35%.

- a) Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran tercapai 100,00%
- b) Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja tercapai 100,00%
- 2) Program pengembangan iklim penanaman modal
Program dilaksanakan dengan Rp258.050.214,00 terealisasi sebesar Rp257.842.159,00 sehingga capaian kinerja keuangan 99,92%. Persentase izin prinsip, izin lokasi, dan izin usaha yang ditindaklanjuti target 85,00% terealisasi 99,71% sehingga capaian kinerja 117,31%.
- 3) Program promosi penanaman modal
Program promosi penanaman modal dilaksanakan dengan anggaran Rp540.405.207,00 terealisasi Rp535.562.544,00 sehingga capaian kinerja keuangan program 99,10%.
 - a) Jumlah investor baru target 925 izin terealisasi 1.004 izin sehingga capaian indikator kinerja program 108,54%.
 - b) Jumlah investor yang bermitra dengan UMKM target 160 UMKM terealisasi 100 UMKM sehingga capaian indikator kinerja 62,50%
- 4) Program pelayanan penanaman modal
Program pelayanan penanaman modal dilaksanakan dengan anggaran Rp1.223.754.357,00 terealisasi Rp1.190.100.091,00 sehingga capaian kinerja keuangan program sebesar 97,25%.
 - a) Persentase jumlah permohonan izin yang dilayani tercapai 100,00%
 - b) Persentase peningkatan jumlah bangunan ber IMB di Kabupaten Sleman target 1,00% terealisasi 1,03% sehingga capaian indikator kinerja 103%.
 - c) Persentase ketersediaan bahan pengambilan kebijakan evaluasi perizinan dan non-perizinan tercapai 100,00%.
- 5) Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan dengan anggaran Rp714.038.100,00 dan realisasi Rp709.991.814,00 sehingga capaian kinerja keuangan program 99,43%.

- a) Persentase izin pemanfaatan ruang yang terselesaikan ditargetkan 90,00% terealisasi 81,40% capaian indikator kinerja 90,00%.
 - b) Persentase peningkatan investasi di Kabupaten dari dari target 6,03% terealisasi 5,33% sehingga capaian indikator kinerja program 88%.
- 6) Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal dilaksanakan dengan anggaran Rp247.605.600,00 terealisasi sebesar Rp244.187.856,00 sehingga tingkat capaian indikator kinerja program 98,62%. Persentase izin yang terselesaikan target 93,53% terealisasi 92,24% sehingga capaian indikator kinerja program 98,62%.

Capaian kinerja keluaran kegiatan pada urusan pemerintahan bidang penanaman modal sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran secara terinci tertuang pada Buku 2 Laporan Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal pada tahun 2022 antara lain:

Tabel 3.72
Permasalahan dan Solusi Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2022

No	Permasalahan	Solusi
1	Pelayanan perizinan masih belum dapat berjalan secara optimal khususnya masalah ketepatan waktu proses. Masih terjadi keterlambatan penyelesaian izin karena ada beberapa standar pelayanan yang belum diterapkan secara maksimal terutama dikarenakan menunggu hasil rekomendasi dari Forum Penataan Ruang.	Melakukan penyempurnaan aplikasi perizinan sehingga bisa membantu mempercepat proses perizinan serta melakukan koordinasi dengan Forum Penataan Ruang agar permohonan izin yang masuk dapat segera ditindaklanjuti.
2	Cepatnya dinamika perubahan peraturan, kebijakan perizinan dan non perizinan dari pemerintah pusat yang membutuhkan waktu penyesuaian.	<ol style="list-style-type: none">a Sosialisasi peraturan/kebijakan perizinan dan non perizinan yang diagendakan secara terjadwal serta melibatkan stakeholderb Masih adanya anggapan bahwa layanan perizinan dan non perizinan sulit dan rumit.c Memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan kemudahan pelayanan perizinan melalui media cetak (leaflet, booklet, koran, dan majalah), media elektronik (televisi, radio, website, twitter, facebook, youtube, dan videotron), menyediakan helpdesk/hotline perizinan dan non perizinan, serta melalui kegiatan sosialisasi perizinan dan non perizinan

No	Permasalahan	Solusi
		d Segera melakukan penyesuaian regulasi daerah yang mengacu pada peraturan di atasnya, melakukan komunikasi dan koordinasi dengan K/L/D/I, serta menginventarisasi peraturan daerah yang terkait dengan perizinan dan mengusulkan ke bagian hukum untuk dilakukan harmonisasi.
3	Sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) masih dalam proses pengembangan, sehingga proses permohonan perizinan, verifikasi dari perangkat daerah teknis terkait dan persetujuan oleh DPMPSTSP belum sesuai harapan	<p>a Menyediakan helpdesk OSS dan melakukan komunikasi dengan DPPM DIY dan BKPM RI (Kementerian Investasi) secara intensif.</p> <p>b Belum tersedianya perangkat pelayanan lainnya sebagai bahan pengambilan keputusan</p> <p>c Mengusulkan penyusunan regulasi daerah/peraturan pelaksana terkait pelaksanaan perizinan di daerah</p>
4	Belum semua wilayah ada RDTR, sehingga menyulitkan dalam implementasi pengendalian pertanahan, khususnya dalam perizinan dan informasi pertanahan	Melakukan koordinasi dengan DPTR untuk segera menyusun RDTR untuk mempercepat pelayanan perizinan
5	Pelaku usaha lebih memilih berinvestasi di kawasan aglomerasi perkotaan sehingga realisasi investor masih timpang antara kawasan APY dan Non APY	<p>a Pemberian insentif dan kemudahan investasi di rencana investasi Non APY.</p> <p>b Penyusunan/pengkajian proyek investasi di Non APY.</p>

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

Pengukuran kinerja pembangunan dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis. Pelaksanaan kegiatan pada urusan pemerintahan bidang penanaman modal tahun 2022 menunjukkan konsistensi/kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Target kinerja keluaran dari setiap kegiatan telah mendukung pencapaian target indikator kinerja program yang telah ditetapkan sebagai perjanjian kinerja Perangkat Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, Renstra, RKPD, dan APBD.

m. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman serta Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.11 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga

Tabel 3.73

Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase organisasi pemuda dan sosial kemasyarakatan yang aktif (%)	87,50	92,86	93,48	95,65	99,71
2	Persentase wirausaha muda (%)	15,63	16,5	16,96	17,27	0,34
3	Cakupan pembinaan olahraga (%)	64,00	69,23	71,79	71,79	19,33
4	Cakupan pelatih yang bersertifikasi (%)	89,05	80,87	90,87	90,87	97,78
5	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	91,00	69,98	29,32	56,80	97,10
6	Jumlah atlet berprestasi*	7	8	1	20	65,30
7	Jumlah prestasi olahraga	53	75	30	3	7

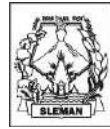
Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2023

Persentase organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan yang aktif memiliki capaian 99,71% dari target 93,5% sehingga melebihi target tahun 2022. Adapun jumlah organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang aktif sebanyak 345 sedangkan jumlah organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang ada sebanyak 346.

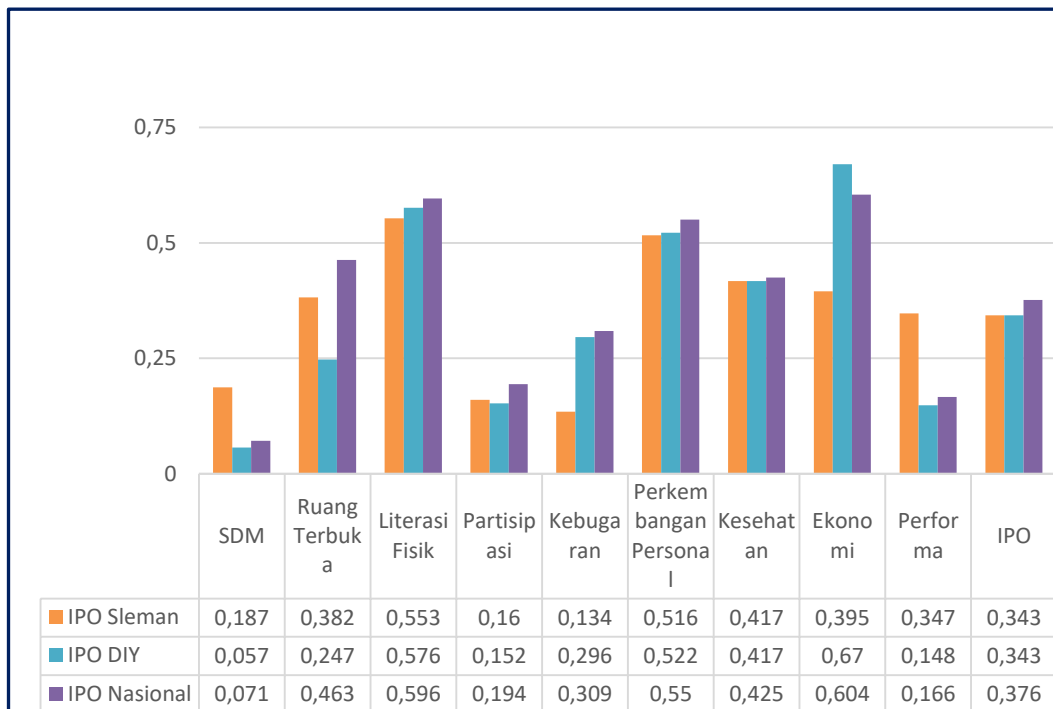
Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) atau Sport Development Index (SDI) tahun 2022 sebesar 0,34 atau naik 0,01 point dari tahun 2021 sebesar 0,33. IPO belum dapat mencapai target yaitu 0,36. Namun demikian apabila capaian IPO dibandingkan dengan IPO Provinsi DIY capaiannya adalah sama 0,34, dan apabila dibandingkan dengan capaian IPO secara nasional yaitu 0,376 atau capaian Kabupaten Sleman lebih rendah 0,033 poin dibandingkan dengan capaian nasional.

IPO/SDI adalah indeks gabungan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan keolahragaan. Adapun pengukuran IPO/SDI dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga, yang meliputi 9 (sembilan) dimensi dasar yaitu: 1) sumber daya olahraga, 2) ruang terbuka, 3) literasi fisik, 4) partisipasi, 5) kebugaran, 6) perkembangan personal, 7) Kesehatan, 8) ekonomi, dan 9) performa.

Perbandingan capaian IPO Sleman, DIY, dan Nasional sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut:



Grafik 3.18
Capaian IPO Kabupaten Sleman, DIY dan Nasional Tahun 2022



Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2023

Capaian IPO Kabupaten Sleman masih dalam kategori rendah, yaitu 0,343 dari skala 0-1. Dari kesembilan dimensi pengukuran IPO, indeks kebugaran jasmani, partisipasi dan sumber daya manusia capaiannya paling rendah. Sehingga kedepan perlu ada upaya yang strategis, sistematis, terukur, dan berkelanjutan untuk meningkatkan ketiga hal tersebut.

Pada tahun 2022 jumlah prestasi olahraga ada 31, meningkat dibandingkan tahun 2021 sejumlah 3 prestasi. Dalam Pekan Olahraga Daerah (PORDA) XVI dan Pekan Paralimpik Daerah (PEPARDA) III DIY Tahun 2022 Kabupaten Sleman berhasil sebagai Juara Umum secara berturut turut untuk ketiga kalinya (*Hattrick*), dengan perolehan medali yaitu 164 emas, 159 perak, dan 155 perunggu dalam PORDA DIY, serta 31 emas, 48 perak, dan 28 perunggu di event PEPARDA DIY. Dalam event Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) DIY memperoleh 53 emas, 71 perak, dan 89 perunggu, serta dalam Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Daerah (Peparpeda) DIY memperoleh 4 emas, 1 perak, dan 2 perunggu.



Persentase organisasi pemuda yang aktif 3,06% dari 95,65% pada tahun 2021 menjadi 99,71% pada tahun 2022. Sedangkan persentase wirausaha muda juga mengalami kenaikan 2,06% dari 17,27% pada tahun 2021 menjadi 19,33% pada 2022.

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga didukung dengan beberapa program dengan capaian indikator kinerja program, sebagai berikut:

Tabel 3.74
Program dan Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022

No	Program / Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				
	a. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%
	b. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100,00	100,00	100,00%
2	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan				
	a. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	93,50	99,71	105,01%
	b. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	18,00	19,33	107,39%
3	Program pengembangan daya saing keolahragaan				
	a. Persentase prestasi olahraga di tingkat provinsi	%	28,00	44,00	157,14%
	b. Persentase kegiatan olahraga masyarakat yang difasilitasi	%	75,00	75,00	100,00%
4	Program pengembangan kapasitas kepramukaan				
	Persentase pembina pramuka dengan sertifikasi Kursus Mahir Dasar (KMD)	%	3,00	5,62	187,33%

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2023

Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dilaksanakan dengan anggaran Rp38.736.549.967,00 terealisasi Rp37.272.215.257,00 sehingga capaian kinerja keuangan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga sebesar 96,22%. Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga didukung dengan 4 (empat) program, dengan tingkat capaian indikator kinerja dan keuangan program, sebagai berikut:

- 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan dengan anggaran Rp5.972.437.990,00 terealisasi sebesar Rp5.241.627.747,00 sehingga capaian kinerja keuangan program 87,76%.
 - a) Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran tercapai 100,00%
 - b) Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja tercapai 100,00%
- 2) Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dilaksanakan dengan anggaran Rp2.388.196.895,00 terealisasi Rp2.107.399.590,00 sehingga capaian kinerja keuangan 88,24%.
 - a) Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan target 93,50% terealisasi 99,71% capaian indikator kinerja 105,01%.
 - b) Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri target 18,00% terealisasi 19,33% capaian indikator kinerja 107,39%.
- 3) Program pengembangan daya saing keolahragaan
Program pengembangan daya saing keolahragaan dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp29.429.055.210,00 terealisasi Rp28.978.678.395,00 sehingga capaian kinerja keuangan 98,47%.
 - a) Persentase prestasi olahraga di tingkat provinsi target 28,00% terealisasi 44,00% capaian indikator kinerja 157,14%.
 - b) Persentase kegiatan olahraga masyarakat yang difasilitasi target 75,00% terealisasi 75,00% capaian indikator kinerja 100,00%.
- 4) Program pengembangan kapasitas kepramukaan
Program pengembangan kapasitas kepramukaan dilaksanakan dengan anggaran Rp946.859.872,00 terealisasi Rp944.509.525,00 sehingga capaian kinerja keuangan program 99,75%. Persentase pembina pramuka dengan sertifikasi Kursus Mahir Dasar (KMD) target indikator kinerja 3,00% terealisasi 5,62% capaian kinerja 187,33%.

Tabel 3.75
Permasalahan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Kegiatan organisasi kepemudaan banyak yang belum aktif lagi (mati suri)	<ol style="list-style-type: none">1. Pendataan Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang aktif/ tidak aktif.2. Perintisan Pemuda Motivator Kalurahan.3. Mendorong Pemerintah kalurahan untuk memfasilitasi kegiatan kepemudaan.4. Mendorong OPD melibatkan pemuda dalam berbagai program dan kegiatan khususnya di wilayah-wilayah kapanewon dan kalurahan.
2.	Perlu ruang yang memadai untuk mengakomodir dan memfasilitasi kebutuhan dan semangat pemuda	<ol style="list-style-type: none">1. Telah melaksanakan pembinaan dan penyuluhan untuk generasi muda, penyalahgunaan napza, pembinaan karakter, pembinaan kewirausahaan, dan kemandirian pemuda.2. Mengakomodasi bakat melalui berbagai kegiatan.3. Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk membangun Graha Pemuda sebagai prasarana kegiatan kepemudaan yang representatif.
3.	Dikalangan sebagian pemuda banyak perilaku yang kurang sesuai dengan norma sosial yang baik dan berlaku	Pembinaan karakter dan penanganan dan pencegahan perilaku negatif bagi remaja dan pemuda. Selain itu pemuda juga didorong untuk memakmurkan tempat ibadahnya masing-masing melalui kegiatan pemuda religia.
4.	Capaian Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) yang belum memenuhi target	<ol style="list-style-type: none">1. Mendorong aktivitas olahraga menjadi gaya hidup masyarakat dengan pelaksanaan olahraga minimal 3 kali dalam seminggu melalui kegiatan kampanye olahraga secara kontinyu minimal 5 tahun berturut-turut.2. Fasilitasi kelompok olahraga masyarakat dan memperbanyak pelaksanaan event bersama.3. Inventarisasi dan <i>updating</i> data sarana dan prasarana olahraga yang ada di Kabupaten Sleman melalui kegiatan inventarisasi sarpras tahun 2023.4. <i>Updating</i> jumlah pelatih/instruktur/guru pendidikan jasmani termasuk relawan olahraga yang ada di masyarakat, melalui inventarisasi sarpras tahun 2023.5. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga yang ada ditengah masyarakat yang belum memenuhi standar.6. Mendorong pembangunan sport center merata di 17 Kapanewon se-Kabupaten Sleman.

Sumber: Dinas Pemuda dan olahraga, 2023

Pengukuran kinerja pembangunan dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis. Pelaksanaan kegiatan pada urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga tahun 2022 menunjukkan konsistensi/kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Target kinerja/keluaran dari setiap kegiatan telah mendukung pencapaian target indikator kinerja program yang telah ditetapkan sebagai perjanjian kinerja Perangkat Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, Renstra, RKPD, maupun APBD.

n. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Urusan pemerintahan bidang statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.18 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pemerintah wajib menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas, akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, data dan informasi juga dibutuhkan oleh seluruh pemangku kepentingan antara lain untuk pengembangan usaha, penelitian dan kebutuhan lainnya.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Statistik, bahwa statistik terbagi menjadi statistik dasar, sektoral, dan khusus, pada lingkup pemerintahan daerah hanya mencakup statistik sektoral. Statistik sektoral, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan, menjadi jantung urusan statistik di pemerintah daerah. Oleh karena itu, perbaikan kualitas data statistik sektoral menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan statistik sektoral di Kabupaten Sleman. Lingkup kegiatan statistik sektoral meliputi perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, pengolahan dan analisis data, dan penyebarluasan data.

Dalam perencanaan data, diperlukan rancangan kegiatan statistik yang akan dilakukan. Untuk menjamin bahwa kegiatan statistik yang akan dilakukan sudah sesuai dengan metodologi yang tepat, maka diperlukan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS, baik survei maupun kompilasi

produk administrasi. Data yang akan dikumpulkan, sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, perlu disesuaikan dengan standar data, agar data tersebut dapat dibandingkan antar waktu maupun antar wilayah. Kemudian dalam pengumpulan data, pemeriksaan data, pengolahan dan analisis data, dan penyebaran data diperlukan data yang menjadi satu kesatuan dalam suatu sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi di pusat maupun provinsi. Namun, hal ini masih perlu diwujudkan.

Data yang dihasilkan, sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, perlu disertai dengan metadata. Hal ini juga menjadi perhatian bagi SDM statistik maupun pengelola data, agar data yang dihasilkan dapat dianalisis dan diinterpretasikan secara tepat oleh pengguna data. Penyebaran data dilakukan dengan media buku, leaflet, infografis, e-book, dan portal data. Portal data yang seyogyanya merupakan sumber dari seluruh data terbuka saat ini masih perlu dikembangkan, dan perlu terintegrasi dengan aplikasi pengumpulan data.

Capaian indikator urusan pemerintahan bidang statistik tahun 2018-2022 dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.76
Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2018 – 2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Tersedianya buku profil daerah (Kabupaten Sleman Dalam Angka)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Buku PDRB	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 20223

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang statistik didukung dengan beberapa program dengan capaian indikator kinerja program, berikut:

Tabel 3.77
Program dan Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2022

No	Program / Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Program penyelenggaraan statistik sektoral				
	a. Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00%
	b. Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023

Urusan pemerintahan bidang statistik dilaksanakan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp203.626.325,00 terealisasi Rp203.469.260,00 sehingga capaian kinerja keuangan urusan pemerintahan bidang statistik 99,92%. Urusan pemerintahan bidang statistik didukung dengan program penyelenggaraan statistik sektoral dilaksanakan dengan anggaran Rp203.626.325,00 terealisasi Rp203.469.260,00 sehingga capaian kinerja keuangan urusan pemerintahan bidang statistik 99,92%. Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah terealisasi 100,00%. Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah terealisasi 100,00%. Persentase pelaksanaan dan pengelolaan satu data sleman tepat waktu terealisasi 100,00%.

Tabel 3.78
Permasalahan dan Solusi Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

No.	Permasalahan	Solusi
1	<p>a. Dalam hal perencanaan data dan kegiatan statistik, telah dilakukan beberapa upaya dalam perbaikan perencanaan tersebut berupa bimtek dan monev, namun demikian perencanaan data dan kegiatan statistik belum sesuai dengan harapan, sehingga perlu digalakkan perencanaan data dan kegiatan statistik yang lebih baik melalui pemahaman tentang standar data dan adanya rekomendasi kegiatan statistik</p> <p>b. Dalam pelaporan dan evaluasi data dan kegiatan statistik, seharusnya dilanjutkan dengan penyusunan metadata kegiatan statistik, metadata variabel, dan metadata indikator, namun demikian hal tersebut belum disadari sepenuhnya oleh pengelola data di perangkat daerah, sehingga perlu ditingkatkan kemampuan pelaporan dan evaluasi data dan kegiatan statistik</p>	<p>Perlunya bimtek/pelatihan dan monev yang berkesinambungan terutama dalam peningkatan SDM pengelola data untuk perencanaan, pelaporan, dan evaluasi data dan kegiatan statistik sehingga rangkaian kegiatan statistik dapat dilakukan dengan baik dan paripurna. Hal ini tentunya akan mendukung terlaksananya pengelolaan satu data sesuai dengan aturan yang berlaku.</p>
2	<p>Pengumpulan data, pemeriksaan data, pengolahan data dan analisis data, serta penyebarluasan data khususnya dalam data statistik sektoral belum saling terintegrasi dalam satu sistem, sehingga perlu pengembangan sistem informasi mengenai hal tersebut.</p>	<p>Perlunya pengembangan sistem informasi yang dapat memuat terkait pengumpulan data, pemeriksaan data, pengolahan data dan analisis data, serta penyebarluasan data sehingga terdapat satu kesatuan yang utuh dalam pengelolaan data statistik sektoral yang juga perlu diintegrasikan dengan sistem informasi/ aplikasi satu data dari pusat maupun provinsi.</p>

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023



Pengukuran kinerja pembangunan dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis. Pelaksanaan kegiatan pada urusan pemerintahan bidang statistik tahun 2022 menunjukkan konsistensi/kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Target kinerja / keluaran dari setiap kegiatan telah mendukung pencapaian target indikator kinerja program yang telah ditetapkan sebagai perjanjian kinerja Perangkat Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, Renstra, RKPD, dan APBD.

o. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Urusan persandian merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan ini merupakan urusan baru yang berdiri sendiri sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Urusan pemerintahan bidang persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.18 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Era keterbukaan dan terkoneksi sistem jaringan di Kabupaten Sleman, menjadikan informasi rentan terhadap potensi serangan siber. Sehingga pengamanan informasi pada era digital seperti saat ini perlu mendapat perhatian lebih. Insiden siber merupakan kejadian yang mengganggu berjalannya sistem elektronik, misalnya serangan virus, pencurian data, informasi pribadi, hak kekayaan intelektual perusahaan, *web defacement* dan gangguan akses terhadap layanan elektronik. Persiapan terhadap kejadian insiden siber akan memperkecil kerugian akibat pencurian informasi atau gangguan pada layanan dan insiden siber berkembang menjadi lebih luas. Pemulihan sistem dan data elektronik yang terdampak insiden perlu dilakukan sesegera mungkin sehingga organisasi dapat melanjutkan proses bisnis dan kegiatannya.



Capaian kinerja indikator Renstra perangkat daerah pada urusan pemerintahan bidang persandian tahun 2022 adalah cakupan keamanan data dan informasi dengan target 80,00% tercapai 80,00% sehingga tingkat capaian kinerja indikator cakupan keamanan data dan informasi pada tahun 2022 adalah 100,00% sebagai berikut:

Tabel 3.79
Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	70,00	70,00	100,00%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023

Capaian perkembangan penyelenggaraan urusan persandian Kabupaten Sleman untuk tahun 2022 terlihat melalui:

- 1) Indikator persentase pengguna layanan informasi melalui peralatan dan jaringan telekomunikasi terlayani dan terlindungi keamanannya tercapai 100,00%
- 2) Penanganan insiden dan permohonan layanan dengan waktu kerja layanan selama 24 jam dan akan direspon maksimal 30 menit setelah pelaporan tercapai 100,00%.
- 3) Pelaksanaan vulnerability assessment dan penetration test terhadap subdomain yang di-hosting di server milik pemerintah Kabupaten Sleman tercapai 75,00%.

Perkembangan capaian kinerja urusan pemerintahan bidang persandian pada tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.80
Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Kabupaten Sleman Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase pengguna layanan informasi melalui peralatan dan jaringan telekomunikasi terlayani dan terlindungi keamanannya	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Penanganan insiden dan permohonan layanan dengan waktu kerja layanan selama 24 jam dan akan direspon maksimal 30 menit setelah pelaporan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
3.	Pelaksanaan <i>vulnerability assessment</i> (penilaian kerentanan) dan <i>penetration test</i> terhadap subdomain yang di-hosting di server milik Pemerintah Kabupaten Sleman	65,00	65,00	70,00	75,00	75,00

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang persandian didukung dengan beberapa program dengan capaian indikator kinerja program, sebagai berikut:

Tabel 3.81
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Tahun 2022

No	Program / Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi				
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	80,00	80,00	100,00%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023

Urusan pemerintahan bidang persandian dilaksanakan dengan anggaran Rp183.637.575,00 dan terealisasi Rp179.993.400,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan urusan 98,02%. Urusan pemerintahan bidang persandian dilaksanakan dengan dukungan 1 (satu) program yaitu program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. Tingkat keamanan informasi pemerintah dengan target 80,00% terealisasi 80,00% sehingga tingkat capaian indikator kinerja 100,00%.

Capaian kinerja keluaran kegiatan pada urusan pemerintahan bidang persandian sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran secara terinci tertuang pada Buku 2 Laporan Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang persandian pada tahun 2022 antara lain:

Tabel 3.82
Permasalahan dan Solusi Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

No.	Permasalahan	Solusi
1	Belum ada prosedur pemeriksaan keamanan untuk pengembangan sistem aplikasi baru yang akan menggunakan domain slemankab	Layanan penetration test (dengan mensimulasikan serangan untuk menemukan kelemahan yang ada pada sistem jaringan tersebut) sistem dan aplikasi baru sebagai langkah pencegahan untuk mengatasi peretasan pada suatu sistem.



No.	Permasalahan	Solusi
2	Tidak ada SDM PNS (jabatan fungsional sandiman dan manggala informatika) yang melakukan tugas teknis penetration test	Perlu diadakan penerimaan SDM pegawai negeri sipil (jabatan fungsional sandiman dan manggala informatika)

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023

Pengukuran kinerja pembangunan dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis. Pelaksanaan kegiatan pada urusan pemerintahan bidang persandian tahun 2022 menunjukkan konsistensi/kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Target kinerja / keluaran dari setiap kegiatan telah mendukung pencapaian target indikator kinerja program yang telah ditetapkan sebagai perjanjian kinerja Perangkat Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, Renstra, RKPD, maupun APBD.

p. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Kebijakan yang diambil pada pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kebudayaan adalah peningkatan pelestarian terhadap cagar budaya melalui pengelolaan warisan budaya dan peningkatan pelestarian nilai tradisi, kekayaan budaya dan keragaman budaya melalui pengelolaan nilai tradisi, kekayaan budaya dan keragaman budaya. Urusan pemerintahan bidang kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.21 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*).

Capaian Indikator Kinerja Daerah pada urusan pemerintahan bidang kebudayaan yaitu jumlah pelestarian obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya pada tahun 2022 dari target sejumlah 53 obyek dapat direalisasikan sejumlah 71 obyek, sehingga tingkat capaian kinerja 133,96%, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3.77 sebagai berikut:



Tabel 3.83
Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Urusan Kebudayaan Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Jumlah Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	Obyek	53	71	133,96%

Sumber: Dinas Kebudayaan, 2023

Capaian kinerja indikator urusan pemerintahan bidang kebudayaan tahun 2018-2022, sebagai berikut:

Tabel 3.84
Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kegiatan)	28	288	393	399	436
2	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya	800	800	800	800	800
3	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	245	270	290	153	178
4	Persentase benda, situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%)	30,62	33,75	36,25	19,13	22,3
5	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (unit)	2	1	1	1	2

Sumber: Kundha Kabudayan, 2023

Penyelenggaraan festival seni dan budaya pada tahun 2022 sejumlah 436 kegiatan, meningkat 37 kegiatan dibandingkan tahun 2021 sejumlah 399 kegiatan. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan meningkat dari 153 pada tahun 2021 menjadi 178 pada tahun 2022. Hal ini meningkatkan capaian persentase benda, situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan dari 19,125 pada tahun 2021 menjadi 22,3 pada tahun 2022. Jumlah karya budaya tahun 2022 yang direvitalisasi dan diinventarisasi sejumlah 2 unit.

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kebudayaan didukung beberapa program dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.85
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun 2022

No	Program / Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				
	a) Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%

No	Program / Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	b) Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100,00	100,00	100,00%
2	Program pengelolaan permuseuman				
	Tingkat kepuasan pengunjung Museum Gunung Merapi	%	77,00	86,85	112,79%
3	Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan				
	a) Jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi	sumber sejarah	3	3	100,00%
	b) Jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan	karya	3	3	100,00%
	c) Rasio kunjungan museum dibanding ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) lain	Rasio	0,02	0,17	850,00%
	d) Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan	%	34,42	22,30	64,64%
	e) Pengelolaan taman budaya	taman budaya	0	0	0,00%
	f) Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi	event	2	2	100,00%

Sumber: Dinas Kebudayaan, 2023

Urusan pemerintahan bidang kebudayaan dilaksanakan dengan anggaran Rp28.703.020.103,00 dengan realisasi Rp27.661.082.414,24 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan urusan 96,37%. Urusan pemerintahan bidang kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan. Pelaksanaan urusan didukung dengan beberapa program dengan tingkat capaian indikator kinerja program, sebagai berikut:

1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota menggunakan anggaran sebesar Rp8.308.343.434,00 dan terealisasi Rp7.595.472.456,80 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan program sebesar 91,42%. Indikator kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yaitu persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dan persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja tercapai 100,00%.

2) Program pengelolaan permuseuman

Program pengelolaan permuseuman dilaksanakan dengan anggaran Rp1.789.776.000,00 dan terealisasi Rp1.767.318.318,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan program sebesar 98,75%. Indikator kinerja program pengelolaan permuseuman yaitu tingkat kepuasan pengunjung Museum Gunung Merapi dari target sebesar 77,00% terealisasi sebesar 86,85% dengan tingkat capaian indikator kinerja sebesar 112,79%.

3) Program penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan

Pelaksanaan program penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan menggunakan anggaran Rp18.604.900.669,00 dengan realisasi sebesar Rp18.298.291.639,44 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan program sebesar 98,35%.

- a) Jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi tercapai 100,00%;
- b) Jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan tercapai 100,00%;
- c) Rasio kunjungan museum dibanding ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) lain tercapai 850,00%;
- d) Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan tercapai 64,64%; dan
- e) Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi tercapai 100,00%.

Capaian kinerja keluaran kegiatan pada urusan pemerintahan bidang kebudayaan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran secara terinci tertuang pada Buku 2 Laporan Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kebudayaan pada tahun 2022 antara lain:

- 1) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya.

- 2) Belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan warisan budaya dan cagar budaya untuk meningkatkan potensi masyarakat dan kalurahan.
- 3) Belum optimalnya peran lembaga adat, seni, dan budaya di masyarakat sebagai agen pelestari budaya daerah.
- 4) Belum meratanya fasilitas dan sarana prasarana dalam pendukung pengembangan seni budaya.

Pengukuran kinerja pembangunan dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis. Pelaksanaan kegiatan pada urusan pemerintahan bidang kebudayaan tahun 2022 menunjukkan konsistensi/kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Target kinerja / keluaran dari setiap kegiatan telah mendukung pencapaian target indikator kinerja program yang telah ditetapkan sebagai perjanjian kinerja Perangkat Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, Renstra, RKPD, maupun APBD.

q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.22 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Salah satu tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan adalah meningkatnya kemampuan literasi masyarakat. Literasi adalah bentuk *cognitive skill* memampukan manusia untuk mengidentifikasi, mengerti, memahami, dan mencipta yang diperoleh dari kegiatan membaca yang kemudian ditransformasikan dalam kegiatan-kegiatan yang produktif yang memberikan manfaat sosial, ekonomi dan kesejahteraan. Tingkat literasi masyarakat dihitung dengan

indikator persentase perpustakaan berstandar nasional, persentase pemanfaatan perpustakaan, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan, rasio ketercukupan tenaga perpustakaan, dan rasio ketercukupan koleksi perpustakaan.

Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan di Kabupaten Sleman pada tahun 2022 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.86
Capaian Indikator Kinerja Renstra Perangkat Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Tingkat Literasi Masyarakat	%	48,38	51,38	107,23%
2	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Indeks	46,00	58,35	126,85%

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2023

Tingkat Literasi Masyarakat dihitung dengan menggunakan beberapa indikator, yaitu persentase perpustakaan berstandar nasional, persentase pemanfaatan perpustakaan, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan, rasio ketercukupan tenaga perpustakaan; dan rasio ketercukupan koleksi perpustakaan.

Tingkat kegemaran membaca masyarakat adalah tingkat perilaku atas kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 46,00 dan terealisasi 58,35 sehingga capaian kinerja 126,85%.

Capaian kinerja indikator Urusan Perpustakaan di Kabupaten Sleman dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.87
Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	0,5767	0,57787	0,13380	0,1579	0,1300
2	Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (%)	0,7115	0,7172	0,6408	0,6745	0,6638
3	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	0,6556	0,7017	0,6936	0,6297	0,6885



No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan / tahun	1.797	1.808	640	597	500
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan (judul)	33.791	35.773	32.568	38.989	40.206
6	Persentase jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (%)	75,00	77,78	50,00	58,33	23,08

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2023

Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun mulai tahun 2020 dan tahun 2021 turun dibandingkan tahun 2019. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Tahun 2022 masih mengalami penurunan, akibat pasca Covid-19 yang belum sepenuhnya pulih. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan pada tahun 2019 sejumlah 1.808 turun menjadi 640 pada tahun 2020 dan turun lagi menjadi 597 pada tahun 2021, turun lagi pada tahun 2022 menjadi 500. Namun koleksi buku perpustakaan mengalami kenaikan menjadi 40.206 judul buku.

Tabel 3.88

Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2022

No	Program / Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				
	a) Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%
	b) Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100,00	100,00	100,00%
2	Program pembinaan perpustakaan				
	a) Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	5,91	6,05	102,32
	b) Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan	%	23,25	26,74	115,03
	c) Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Rasio	1,95	2,14	109,53
	d) Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan jumlah penduduk	Rasio	0,000416	0,000464	111,66
	e) Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	%	17,71	13	73,41
	f) Jumlah masyarakat gemar membaca di masyarakat	kali	6	5	83,33%
3	Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno				
	Rapat Koordinasi upaya akuisisi naskah kuno dialih media (digitalisasi)/terdaftar dalam wilayahnya	Kali	2	2	100,00%

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2023





Urusan pemerintahan bidang perpustakaan dilaksanakan dengan anggaran Rp9.278.070.861,00 dan terealisasi Rp8.809.065.931,00 sehingga capaian kinerja keuangan urusan pemerintahan bidang perpustakaan 94,95%. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan didukung dengan beberapa program dengan tingkat capaian indikator kinerja program, sebagai berikut:

- 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan dengan anggaran Rp8.594.114.306,00 dan terealisasi Rp8.128.675.281,00 sehingga capaian kinerja keuangan program 94,58%. Kinerja pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, sebagai berikut:
 - a) persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran tercapai 100,00%; dan
 - b) persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja tercapai 100,00%.
- 2) Program pembinaan perpustakaan
Program pembinaan perpustakaan dilaksanakan dengan anggaran Rp680.516.555,00 dan terealisasi Rp676.955.600,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan 99,48%. Capaian indikator kinerja program pembinaan perpustakaan, sebagai berikut:
 - a) persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan dengan target 5,91% terealisasi 6,05% sehingga capaian indikator kinerja 102,32%;
 - b) persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan dengan target 23,25% terealisasi 26,74% sehingga capaian indikator kinerja program 115,00%;
 - c) rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk dengan target 1,95 terealisasi 2,15 sehingga tercapai 109,53%;
 - d) rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan jumlah penduduk dengan target 0,000416 terealisasi 0,000464 sehingga capaian indikator kinerja 111,66%;



- e) Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat dengan target 17, 71% terealisasi 13% sehingga capaian sebesar 73,61%;
 - f) Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat 5 kali dari target 6 sehingga capaian kinerja 83,33 %.
- 3) Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno
Anggaran program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno sebesar Rp3.440.000,00 terealisasi Rp3.435.050,00 (99,86%).

Capaian kinerja keluaran kegiatan pada urusan pemerintahan bidang perpustakaan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran secara terperinci tertuang pada Buku 2 Laporan Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Tabel 3.89
Permasalahan dan Solusi Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2022

No.	Permasalahan	Solusi
1	Belum optimalnya sosialisasi tentang pemanfaatan layanan perpustakaan.	Perlunya perluasan keanggotaan perpustakaan
2	Koleksi ebook masih terbatas.	Penambahan koleksi e book Koordinasi dan kerjasama dengan penerbit untuk penambahan koleksi perpustakaan
3	Masih terbatasnya aplikasi untuk membuka ebook.	Koordinasi dengan Dinas Kominfo untuk penyiapan aplikasi.
4	Keterbatasan jangkauan layanan perpustakaan.	Penyiapan pojok literasi digital untuk memperluas jangkauan layanan.
5	Prasarana dan sarana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan belum memadai khususnya di bidang pelayanan perpustakaan.	Mengoptimalkan prasarana dan sarana yang ada untuk melayani masyarakat di bidang pelayanan perpustakaan
6	Pengembangan budaya baca, sosialisasi & promosi perpustakaan belum optimal.	Pengembangan perpustakaan dengan menumbuhkan pojok baca, perpustakaan komunitas di Kabupaten Sleman

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2023

Pengukuran kinerja pembangunan dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis. Pelaksanaan kegiatan pada urusan pemerintahan bidang perpustakaan tahun 2022 menunjukkan konsistensi/kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Target kinerja keluaran (output) dari setiap kegiatan telah mendukung pencapaian target indikator kinerja program yang telah ditetapkan sebagai perjanjian kinerja Perangkat Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, Renstra, RKPD, maupun APBD.

r. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Penyelenggaraan Urusan Kearsipan mempunyai fungsi strategis bagi perkembangan daerah karena ketersediaan arsip secara utuh, autentik dan terpercaya pada setiap Pemerintah Daerah akan memberikan dukungan nyata bagi pelaksanaan reformasi birokrasi utamanya untuk kemanfaatan penilaian kinerja, pertanggungjawaban kinerja, pelayanan publik serta penyediaan alat bukti bagi kepentingan lainnya. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan diantaranya melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan, pendampingan dan bimbingan teknis, untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sehingga pengelolaan kearsipan berjalan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Usuran Pemerintahan Bidang Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.22 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Capaian indikator kinerja Renstra perangkat daerah pada urusan kearsipan tahun 2022 yaitu Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) sebesar 101,34%, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut. Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) adalah laporan yang disusun berdasarkan laporan hasil audit penyelenggaraan kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan daerah.

Tabel 3.90
Capaian Indikator Kinerja Renstra Perangkat Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE)	%	94,56	95,82	101,34%

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2023



Tabel 3.91
Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun 2022

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	a. Pelestarian Arsip (kali)	4	4	2	2	1
	b. Arsip Dinamis (berkas)	433.411	479.583	475.747	504.988	290.908
	Arsip Vital (berkas)	17.861	17.861	17.662	18.328	18.328
	Arsip Aktif (berkas)	229.586	255.095	228.499	228.499	253.970
	Arsip Inaktif (berkas)	185.964	206.627	229.586	258.161	18.610
	c. Arsip Statis (berkas)	22.530	22.984	25.733	25.939	26.317
	d. Arsip Tekstual (boks)	2.066	2.076	2.088	2.088*)	1.858
	e. Arsip Audio (buah)	17	20	20	20	68
	f. Arsip Audio visual (buah)	62	74	109	109	323
	g. Arsip Foto (lembar)	709	1.245	1.685	1685	3514
	h. Arsip Peta/Kartografi dan Kearsitekturan (lembar)	665	988	1.017	1017	1726
2	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	79,17	81,25	100,00	93,75	97,92
3	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (jiwa)	70	71	62	88	98
4	Jumlah SDM pengelola kearsipan (Jiwa)	221	188	327	333	333

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2023

Urusan pemerintahan bidang kearsipan didukung dengan beberapa program dengan tingkat capaian masing-masing indikator kinerja program, sebagai berikut:

Tabel 3.92
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun 2022

No	Program / Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Program pengelolaan arsip				
	a) Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	91,67	97,92	106,81%
	b) Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	75,58	75,02	99,26%
	c) Persentase perangkat daerah menerapkan e-arsip terintegrasi	%	100	100	100,00%
2	Program perlindungan dan penyelamatan arsip				
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	100	100	100,00%
3	Program perijinan penggunaan arsip				
	Persentase Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kaputane/kota	%	100	100	100,00%

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2023





Urusan pemerintahan bidang kearsipan dilaksanakan dengan anggaran Rp417.410.273,00 dan terealisasi sebesar Rp411.533.975,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan urusan pemerintahan bidang kearsipan sebesar 98,59%. Urusan pemerintahan bidang kearsipan didukung dengan beberapa program, dengan capaian indikator kinerja program, sebagai berikut:

1) Program pengelolaan arsip

Program pengelolaan arsip dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp312.191.900,00 dan terealisasi sebesar Rp307.032.550,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan program pengelolaan arsip 98,35%. Program pengelolaan arsip memiliki indikator kinerja program dengan tingkat capaian sebagai berikut:

- a) persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku dengan target 91,67% terealisasi 97,92% sehingga capaian indikator kinerja 106,81%;
- b) tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional dengan target 75,58% terealisasi 75,02% sehingga tercapai 99,26%; dan
- c) persentase perangkat daerah menerapkan e-arsip terintegrasi dengan target 100,00% terealisasi 100,00% sehingga capaian indikator kinerja 100,00%.

2) Program perlindungan dan penyelamatan arsip

Program perlindungan dan penyelamatan arsip dilaksanakan dengan anggaran Rp103.218.373,00 terealisasi Rp102.501.925,00 sehingga tingkat capaian indikator kinerja 99,31%.

Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat dengan target 100,00% terealisasi 100,00% sehingga capaian indikator kinerja 100,00%.



3) Program perizinan penggunaan arsip

Program perizinan penggunaan arsip dilaksanakan dengan anggaran Rp2.000.000,00 terealisasi Rp1.999.500,00 sehingga tingkat capaian indikator kinerja 99,98%.

Persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota dengan target 100,00% terealisasi 100,00% sehingga capaian indikator kinerja sebesar 100,00%

Capaian kinerja keluaran kegiatan pada urusan pemerintahan bidang kearsipan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran secara terinci tertuang pada Buku 2 Laporan Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Tabel 3.93
Permasalahan dan Solusi Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun 2022

No.	Permasalahan	Solusi
1	Kurangnya pengetahuan dan pemahaman pengelola arsip tentang pengelolaan arsip	Peningkatan kapasitas pengelola arsip melalui bimbingan teknis, pendampingan dan pembinaan kearsipan Peningkatan Kapasitas pengawasan kearsipan melalui diklat
2	Minimnya SDM yang mempunyai sertifikat pengawas kearsipan Prasarana	
3	Prasarana dan sarana kearsipan belum memadai	Mengusulkan penambahan sarana prasarana kearsipan
4	Terbatasnya sumber informasi arsip	
5	Sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan e arsip masih kurang	
6	Pengembangan aplikasi SIMARDA belum optimal	Optimalisasi pengembangan aplikasi SIMARDA atau SRIKANDI
7	Digitalisasi arsip belum optimal	

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2023

Pengukuran kinerja pembangunan dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis. Pelaksanaan kegiatan pada Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan tahun 2022 menunjukkan konsistensi/kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Target kinerja keluaran dari setiap kegiatan telah mendukung pencapaian target indikator kinerja program yang telah ditetapkan sebagai perjanjian kinerja Perangkat Daerah, sebagaimana ditetapkan pada RPJMD, Renstra, RKPD, dan APBD.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan.

Perkembangan hasil indikator urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Sleman meningkat selama 5 (tahun) terakhir, dengan capaian seperti dalam table dibawah ini.

Tabel 3.94
Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sleman
Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Produksi Ikan Konsumsi (ton)	59.781,40	67.850,00	54.552,11	54.625,82	54.968,62
2	Kebutuhan Produksi Ikan (kg)	39.278.540,00	36.699.282,00	40.765.363,00	40.340.276,90	40.448.122,00
3	Tingkat Konsumsi ikan (kg / kapita / tahun)	32,55	32,55	36,21	37,10	37,13
4	Tingkat ketersediaan ikan (kg / kapita / tahun)	33,99	36,71	37,39	37,39	37,31

Sumber: Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan, 2023

Produksi ikan konsumsi di Kabupaten Sleman berasal dari produksi perikanan budi daya dan produksi perikanan tangkap. Produksi perikanan budi daya di Kabupaten Sleman berasal dari produksi di kolam, mina padi, dan karamba. Produksi perikanan tangkap berasal dari perairan umum. Produksi ikan konsumsi di Kabupaten Sleman ini didominasi oleh ikan nila (merah dan hitam), ikan lele, ikan gurami, ikan mas, ikan *grasscarp*, ikan bawal, mujair, dan udang.

Pada tahun 2022 jumlah produksi ikan konsumsi meningkat 0,63% atau 342,80 ton dari 54.625,82 ton pada tahun 2021 menjadi 54.968,62 ton pada tahun 2022. Kebutuhan produksi ikan naik 0,27% atau 107,85 ton dari 40.340.276,90 kg pada tahun 2021 menjadi 40.448.122,00 kg. Tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Sleman pada tahun 2022 naik sebesar 0,08% dari 37,10 kg/kapita/tahun menjadi 37,13 kg/kapita/tahun. Tingkat ketersediaan ikan justru mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 0,21% dari 37,39 kg/kapita/tahun menjadi 37,31 kg/kapita/tahun.

Tabel 3.95
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2022

No	Program / Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Program pengelolaan perikanan tangkap				
	Penambahan populasi ikan lokal di perairan umum	kg	2.000	2.000	100,00%
2	Program pengelolaan perikanan budidaya				
	Persentase peningkatan produksi ikan konsumsi	%	0,3	0,45	150,00%
3	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan				
	Peningkatan jumlah produk olahan perikanan yang bersertifikasi	produk	2	2	100,00%

Sumber: Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan, 2023

Pada tahun anggaran 2022 Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan memperoleh anggaran sebesar Rp4.333.507.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp4.129.724.500,20 atau tercapai 95,30% dengan capaian realisasi fisik sebesar 100,00%.

1) Program pengelolaan ikan tangkap

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap terdiri dari 1 kegiatan yaitu pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota. Target anggaran sebesar Rp160.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp158.233.800,00 atau sebesar 98,90 % dengan realisasi fisik mencapai 100%. Target dan realisasi indikator kinerja program Penambahan populasi ikan lokal di perairan umum sebesar 2.000 kg benih ikan dan terealisasi 2.000 kg benih ikan sehingga tingkat capaian kinerja indikator program sebesar 100,00%.



2) Program pengelolaan ikan budidaya

Program pengelolaan perikanan budidaya adalah kegiatan penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dengan pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudi daya ikan kecil; pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari 2 kegiatan. Target anggaran sebesar Rp2.991.565.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.860.811.437,00 atau sebesar 95,63% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Target dan realisasi indikator kinerja program persentase peningkatan produksi ikan konsumsi sebesar 0,30% dan terealisasi 0,45% sehingga tingkat capaian kinerja indikator program sebesar 150,00%.

3) Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan adalah kegiatan peningkatan pemasaran hasil perikanan dan produk perikanan yang bersertifikasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dengan pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil; peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha; dan pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Terdiri dari 1 kegiatan. Target anggaran sebesar Rp1.181.942.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.110.679.263,00 atau sebesar 93,97 % dengan realisasi fisik mencapai 66,67%. Target dan realisasi indikator kinerja program Peningkatan jumlah produk olahan perikanan yang bersertifikasi sebesar 2 produk dan terealisasi 2 produk capaian kinerja indikator program sebesar 100,00%.

Capaian kinerja keluaran kegiatan pada urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran secara terinci tertuang pada Buku 2 Laporan Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.



Pengukuran kinerja pembangunan dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis. Pelaksanaan kegiatan pada urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan tahun 2022 menunjukkan konsisten/kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Target kinerja keluaran (output) dari setiap kegiatan telah mendukung pencapaian target indikator kinerja program yang telah ditetapkan sebagai perjanjian kinerja, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, Renstra, RKPD, maupun APBD.

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan pada tahun 2022 antara lain:

Tabel 3.96
Permasalahan dan Solusi Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2022

No.	Permasalahan	Solusi
1	Kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan ekosistem perairan umum masih kurang.	Penebaran benih ikan di perairan umum sebanyak 2.000kg benih ikan
2	Produksi ikan konsumsi belum mampu mencukupi kebutuhan konsumen	
3	Masih rendahnya penerapan teknologi perikanan oleh pembudidaya ikan dan Kemampuan dalam pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil produk pertanian masih rendah	Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil; peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha; dan pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
3	Belum optimalnya kelembagaan petani pembudidaya perikanan;	

Sumber: Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan, 2023

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Urusan pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Nomor 55.23 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata.

Sektor pariwisata di Kabupaten Sleman, berdasarkan jumlah wisatawan, merupakan destinasi unggulan DIY. Wisatawan tersebut berkunjung bukan semata-mata untuk menikmati alam yang ada, melainkan juga untuk berinteraksi baik dengan masyarakat maupun adat dan budayanya. Oleh karena itu, arah pengembangan pariwisata harus

diletakkan kepada pembangunan manusia dan kemanusiaan yang melibatkan masyarakat lokal dalam setiap langkah dan tahapnya.

Potensi kepariwisataan di Kabupaten Sleman terdiri dari wisata alam meliputi wisata ekologi dan wisata petualangan, wisata budaya yang meliputi wisata warisan budaya dan sejarah serta wisata kota dan desa, wisata buatan meliputi wisata meetings, incentives, conferences and exhibitions (MICE) dan wisata olahraga. Desa wisata memiliki ciri dan keunikan tersendiri karena berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, potensi alam, seni budaya, dan keunikan kehidupan desa yang alami.

Desa wisata menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kecenderungan pasar yang mulai bergeser dari kondisi yang serba modern kepada kondisi skala kecil yang unik. Pengembangan desa wisata yang baik, dalam perspektif ekonomi daerah, dapat pemeratakan pendapatan secara lebih luas, mulai dari masyarakat yang tinggal di desa tersebut, masyarakat sekitar desa, sampai dengan pemerintah yang menaungi desa wisata tersebut. Kerja sama antar pihak-pihak tersebut perlu terus ditingkatkan untuk terjalinnya keterkaitan ke depan dan ke belakang (*foreward and backward linkage*) antarsektor tersebut. Pengelolaan desa wisata dan penguatan kapasitas para pengelola desa wisata dan kelembagaan masih perlu ditingkatkan untuk mewujudkan desa wisata mandiri yang berkelanjutan.

Perkembangan potensi kepariwisataan di Kabupaten Sleman dalam kurun waktu 2017-2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman saat ini memiliki 18 jenis wisata alam, 10 jenis wisata candi, 20 jenis wisata museum, dan 80 jenis desa wisata sebagai berikut.

Tabel 3.97
Potensi Obyek Wisata Di Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Wisata Alam (jenis)	4	4	8	18	18
2	Wisata Candi	12	12	9	10	10
3	Wisata Museum	14	14	8	20	20
4	Kegiatan Luar (<i>event</i>)	5	5	1	2	2
5	Kategori Desa Wisata	39	39	53	53	80

Sumber: Dinas Pariwisata, 2023

Kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Sleman perlu terus dikembangkan melalui revitalisasi maupun pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) serta penataan yang menyeluruh termasuk fasilitas pendukung wisata, peningkatan kapasitas SDM pariwisata, serta pemasaran yang terintegrasi sehingga dapat berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan. Selain itu, penyediaan akomodasi berkualitas bagi para wisatawan sangat diperlukan sehingga dapat meningkatkan length of stay wisatawan baik nusantara maupun mancanegara yang berdampak peningkatan belanja wisata serta peningkatan nilai tambah bagi masyarakat.

Capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran rencana strategis perangkat daerah pada urusan pemerintahan bidang pariwisata, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.98
Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Pembelanjaan Wisata (<i>spending of money</i>)				
	a. Wisatawan mancanegara	US\$	450	328,60	73,02%
	b. Wisatawan nusantara	Rp	850.000	1.104.869	129,98%
2	Persentase PAD sektor pariwisata terhadap PAD total	%	19,24	28,65	148,91%
3	Cakupan pembinaan ekonomi kreatif berbasis sub sektor ekonomi kreatif	%	29,41	29,41	100,00%
4	Cakupan peningkatan kapasitas SDM pelaku wisata dan ekonomi kreatif	%	35,12	35,12	100,00%
5	Persentase cakupan ruang publik dan destinasi wisata yang dimanfaatkan sebagai ruang kreatif	%	17,00	17,00	100,00%

Sumber: Dinas Pariwisata, 2023

Pada tahun 2022, pembiayaan wisata (*spending of money*) dari wisatawan mancanegara tercapai 73,02% yaitu dari yang ditargetkan 450 US\$ terealisasi 328,60 US\$, sedangkan untuk wisatawan nusantara terealisasi 129,98% dari target sebesar Rp850.000,00 yaitu sebesar Rp1.104.869,00. Persentase PAD sektor pariwisata terhadap PAD total tercapai 148,91%, yaitu dari target 19,24% terealisasi 28,65%. Pelaksanaan urusan pariwisata mencakup pengembangan sub sektor ekonomi kreatif. Capaian kinerja pengembangan ekonomi kreatif diukur melalui tiga indikator, yaitu cakupan pembinaan ekonomi kreatif berbasis

sub sektor ekonomi kreatif, cakupan peningkatan kapasitas SDM pelaku wisata dan ekonomi kreatif dan persentase cakupan ruang publik dan destinasi wisata yang dimanfaatkan sebagai ruang kreatif. Capaian kinerja masing-masing indikator tersebut tercapai 100%.

Tabel 3.99
Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Wisatawan (jiwa)	8.531.738	10.378.118	4.250.119	1.728.418	7.171.071
	a. Nusantara	8.224.033	10.145.104	4.226.075	1.723.256	7.105.769
	b. Mancanegara	307.705	233.014	24.044	5.162	65.302
2	Persentase Wisatawan (%)					
	a. Nusantara	96,39	97,75	99,43	99,70	99,09
	b. Mancanegara	3,61	2,25	0,57	0,30	0,91
3	Kontribusi terhadap Total PAD (%)	24,42	27,42	8,84	18,34	28,65
4	Kontribusi terhadap PDRB HB (%)	10,16	10,36	8,84	8,56	n/a

Sumber: Dinas Pariwisata, 2023

Pada tahun 2022 jumlah wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara mengalami kenaikan dibanding tahun 2021, hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata sudah mulai pulih kembali pasca pandemi Covid-19. Kondisi tersebut juga berdampak pada peningkatan PAD sektor pariwisata, meningkat menjadi 28,65% pada tahun 2022, dari 18,34% pada tahun 2021. Sektor pariwisata memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Sleman sebesar 18,34%, dan memberikan kontribusi terhadap PDRB 8,56%.

Pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan bidang pariwisata didukung dengan beberapa program, dengan tingkat capaian indikator kinerja program, sebagai berikut:

Tabel 3.100
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun 2022

No	Program / Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				
	a. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%
	b. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100,00	100,00	100,00%
2	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata				

No	Program / Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Lama Tinggal Wisatawan (LOS)				
	a. Wisatawan Mancanegara	hari	1,3	1,5	115%
	b. Wisatawan Nusantara	hari	1,1	1,3	118%
3	Program pemasaran pariwisata				
	Jumlah Kunjungan Wisatawan				
	a. Wisatawan Mancanegara	kunjungan	100	65.302	653,02%
	b. Wisatawan Nusantara	kunjungan	2.000.000	7.105.769	355,29%
	c. Persentase tingkat hunian akomodasi wisatawan mancanegara	%	0,44	0,44	100,00%
	d. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	%	5,00	314,05	6281,00%
4	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan				
	Jumlah ruang ekonomi kreatif di ruang publik dan destinasi wisata	ruang	10	10	100,00%
5	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif				
	a. Cakupan kelompok usaha pariwisata yang dibina	kelompok UJP	8,00	8,00	100,00%
	b. Cakupan kelompok desa wisata/destinasi wisata yang dibina	Kelompok desa / destinasi wisata	25,00	25,00	100,00%
	c. Cakupan komunitas ekonomi kreatif yang difasilitasi dalam aktivitas	komunitas ekraf	4,00	8,00	200,00%

Sumber: Dinas Pariwisata, 2023

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp20.093.812.527,00 terealisasi sebesar Rp18.971.490.553,70 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan urusan pemerintahan bidang pariwisata sebesar 94,41%. Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pariwisata didukung dengan 5 (lima) program dengan tingkat capaian indikator kinerja program, sebagai berikut:

1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota didukung dengan anggaran Rp9.085.217.362,00 dengan realisasi Rp8.481.329.708,50 dan tingkat capaian kinerja keuangan program sebesar 93,35%. Capaian indikator kinerja program, sebagai berikut:



- a) persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran tercapai 100,00%; dan
 - b) persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja tercapai 100,00%.
- 2) Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
- Program peningkatan daya tarik destinasi wisata pada tahun 2022 dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp2.994.683.932,00 terealisasi Rp2.983.859.526,20 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan 99,64%. Capaian indikator kinerja program sebagai berikut:
- a) Lama Tinggal Wisatawan (LOS) Wisatawan Mancanegara target 1,3 hari terealisasi 1,5 hari dengan tingkat capaian indikator kinerja 115%; dan
 - b) Lama Tinggal Wisatawan (LOS) Wisatawan Nusantara target 1,1 hari terealisasi 1,3 hari, dengan tingkat capaian indikator kinerja 118%.
- 3) Program pemasaran pariwisata
- Anggaran pelaksanaan program pemasaran pariwisata sebesar Rp5.412.543.684,00 terealisasi Rp4.911.591.823,00 dengan tingkat capaian kinerja keuangan program 90,74%. Capaian indikator kinerja program sebagai berikut:
- a) Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara target 100 kunjungan terealisasi 65.302 kunjungan, dengan tingkat capaian indikator kinerja 653,02%;
 - b) Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara target 2.000.000 kunjungan terealisasi 7.105.769 kunjungan dengan tingkat capaian indikator kinerja 355,29%;
 - c) Persentase tingkat hunian akomodasi Wisatawan Mancanegara target 0,44% terealisasi 0,44% dengan tingkat capaian indikator kinerja 100%; dan
 - d) Persentase peningkatan perjalanan Wisatawan Nusantara yang datang ke Kabupaten Sleman target 5,00% terealisasi 314,05% dengan tingkat capaian indikator kinerja 6281,00%.



- 4) Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan

Pelaksanaan program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan didukung anggaran sebesar Rp2.624.985,00 terealisasi Rp2.623.850,00 dengan tingkat capaian kinerja keuangan program 99,96%. Indikator kinerja program yaitu jumlah ruang ekonomi kreatif di ruang publik dan destinasi wisata dari 10 ruang terealisasi 10 ruang, sehingga capaian indikator kinerja program 100,00%.

- 5) Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
Pelaksanaan program pengembangan sumber daya pariwisata dan didukung anggaran sebesar Rp2.598.742.564,00 terealisasi Rp2.592.085.646,00 dengan tingkat capaian kinerja keuangan program 99,74%. Capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

- a) Cakupan kelompok usaha pariwisata yang dibina target 8 kelompok/UJP terealisasi 8 kelompok/UJP dengan tingkat capaian indikator kinerja 100,00%;
- b) Cakupan kelompok desa wisata/destinasi wisata yang dibina tercapai 100% dari 25 kelompok desa/destinasi wisata yang ditargetkan;
- c) Cakupan komunitas ekonomi kreatif yang difasilitasi dalam aktivitas target 4 komunitas ekraf terealisasi 8 komunitas ekraf dengan tingkat capaian indikator kinerja 200,00%.

Capaian kinerja keluaran kegiatan pada urusan pemerintahan bidang pariwisata sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran secara terinci tertuang pada Buku 2 Laporan Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Pengukuran kinerja pembangunan dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis. Pelaksanaan kegiatan pada urusan pemerintahan bidang pariwisata tahun 2022 menunjukkan konsistensi/kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Target kinerja/keluaran dari setiap kegiatan telah



mendukung pencapaian target indikator kinerja program yang telah ditetapkan sebagai perjanjian kinerja Perangkat Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, Renstra, RKPD, maupun APBD.

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pariwisata pada tahun 2022 antara lain:

- 1) Pembelanjaan wisatawan di Kabupaten Sleman masih rendah, khususnya untuk wisatawan mancanegara.

Hasil penghitungan Belanja Wisatawan tahun 2022, untuk wisatawan mancanegara sebesar 328,60 U\$, sedangkan target pada RPJMD dan Renstra sebesar 450 U\$. Untuk belanja wisatawan nusantara sebesar Rp.1.104.899, sedangkan target RPJMD dan Renstra sebesar 850.000;

Solusi yang dilakukan adalah:

- a) Mengembangkan wisata belanja/oleh-oleh bekerjasama dengan UMKM berupa peningkatan kualitas produk dan layanan serta inovasi pelaku usaha;
 - b) Mengembangkan wisata kuliner. Sektor kuliner memberi kontribusi besar pada peningkatan perekonomian dan belanja wisata;
 - c) Mengembangkan wisata MICE. Wisatawan MICE membelanjakan 1,5 kali lipat dari wisatawan umum dan tinggal lebih lama.
 - d) mengembangkan sub sektor ekonomi kreatif yang menjadi *unique selling point* kepariwisataan Sleman (kuliner, kriya, fesyen, seni pertunjukkan).
- 2) Pemasaran pariwisata masih belum *segmented* dan *well-targeted* (berdasarkan tema dan segmen pasar yang disasar). Solusi yang dilakukan adalah mengembangkan paket wisata yang tematik dan *segmented* dengan bekerja sama dengan biro perjalanan wisata.
 - 3) Kurangnya pengembangan atraksi dan *event* pariwisata yang berciri khas Sleman dan berskala nasional.

Solusi yang dilakukan adalah mengembangkan event kreatif budaya kesenian yang menjadi produk wisata unggulan dan mengembangkan signature event yang mengangkat citra kepariwisataan Sleman.



c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Urusan pemerintahan bidang pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan.

Capaian Indikator Kinerja Daerah sebagai perjanjian kinerja perangkat daerah pada urusan pemerintahan bidang pertanian, sebagai berikut:

Tabel 3.101
Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai	112,73	107,59	95,44%
2	Persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan	%	2,195	2,745	125,06%

Sumber: Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan, 2023

Pada tahun 2022, NTP ditargetkan sebesar 112,73 tercapai 107,59 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 95,44%. Nilai tukar petani adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tahun 2022 menyebabkan kenaikan harga sarana produksi pertanian dan mengakibatkan indeks harga yang dibayar petani meningkat. Hal ini mengakibatkan nilai NTP menurun dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 107,96. Persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan pada tahun 2022 dari target yang ditetapkan sebesar 2,195% terealisasi sebesar 2,745% sehingga capaian kinerja indikator persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan sebesar 125,06%.

Pembangunan pertanian diarahkan untuk mewujudkan masyarakat pertanian, perikanan dan kehutanan yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera, dengan mewujudkan peningkatan produksi pertanian, dan perikanan untuk memantapkan ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah produk pertanian, perikanan dan meningkatkan kelas kemampuan kelompok tani serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang lestari.

Capaian indikator urusan pemerintahan bidang pertanian tahun 2022, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.102
Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan bina kelompok tani (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Produktivitas padi/bahan pangan utama lokal (kuintal/ha)	53,37	58,52	59,35	60,12	60,01
3	Produksi sektor pertanian dan peternakan (ton)					
a.	Padi sawah	246.539,00	242.707,00	245.291,80	253.708,00	255.144
b.	Padi ladang	3.339,00	1.569,00	1.568,61	1.626,87	1.564,00
c.	Jagung	31.558,00	35.502,00	37.473,80	33.722,76	34.066,17
d.	Kedelai	211,00	51,00	21,00	228,46	71,81
e.	Kacang tanah	4.516,00	4.084,00	4.453,88	3.733,00	
f.	Ubi kayu	8.631,00	9.468,00	8.060,11	5.026,00	8.394,00
g.	Ubi jalar	1.728,00	141,00	1.619,71	1.737,00	1.513,00
h.	Talas	1.156,00	871,00	947,14	947,14	
i.	Ganyong	129,00	85,00	128,85	128,85	
j.	Irut	569,00	522,00	422,15	422,15	
k.	Sayuran	394.667,63	256.600,23	434.913,73	252.759,56	
l.	Buah-buahan	262.302,93	235.305,43	855.960,67	886.172,3	
m.	Daging (ton)	13.330,79	24.721,93	13.251,04	14.944,15	22.106,40
n.	Telur (ton)	16.309,91	16.390,28	12.707,30	13.705,23	14.475,50
o.	Susu sapi (liter)	3.819.360,00	3.829,94	4.982.849,75	5.222.128,00	4.817.312,25
4	Jumlah produksi komoditas perkebunan					
a	Kelapa	67.492,97	6.270,18	62.641,67	62.641,70	77.837,65
b	Kakao	705,69	12,00	115,04	115,04	
c	Mete	133,52	5,01	48,25	48	45,94
d	Kopi Robusta	2.396,17	58,88	581,67	581,90	663,33
e	Kopi Arabica	554,70	9,51	172,63	172,80	160,75
f	Mendong	785,70	377,00	377,00	376,70	377,00
g	Lada	172,93	1,04	12,57	13,00	13,97
h	Tembakau rakyat	1.373,00	2.131.83,00	3.012,90	3.012,00	1.844,12
i	Panili	2,56	0,34	5,16	5,30	
k	Tebu	2.053.624,00	30.440,00	336.537,20	409.075,39	29.595,28

Sumber: Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan, 2023



Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertanian didukung dengan beberapa program, dengan tingkat capaian indikator kinerja program, sebagai berikut:

Tabel 3.103
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun 2022

No	Program / Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				
	a. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%
	b. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100,00	100,00	100,00%
2	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian				
	a. Persentase peningkatan produksi tanaman pangan	%	0,30	-22,28	-7.425,82%
	b. Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura	%	0,50	62,70	12.539,42%
	c. Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	%	0,30	-23,13	-7.711,12%
	d. Persentase peningkatan produk komoditas peternakan	%	0,28	-2,01	-717,46%
3	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian				
	a. Peningkatan jumlah kelompok tani hortikultura dan perkebunan yang menerima bantuan alat	kelompok	15	15	100,00%
	b. Peningkatan jumlah kelompok tani tanaman pangan penerima bantuan alat	kelompok	5	5	100,00%
	c. Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan dan Perikanan (BP4) klasifikasi kelas madya	balai	3	7	233,33%
4	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner				
	Persentase pelayanan kesehatan ternak	%	100,00	100,00	100,00%
5	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian				
	a. Persentase luas serangan hama dan penyakit tanaman pangan yang tertangani	%	90,00	90,00	100,00%
	b. Persentase luas serangan hama dan penyakit hortikultura dan perkebunan yang tertangani	%	90,00	90,00	100,00%
6	Program penyuluhan pertanian				
	a. Peningkatan kinerja penyuluh pertanian sesuai tugas dan fungsinya	%	2,00	2,00	100,00%
	b. Persentase peningkatan kelompok yang menerapkan SOP cara-cara penanganan/pengolahan hasil hortikultura dan perkebunan	%	5,00	5,00	100,00%
	c. Kelembagaan petani dengan klasifikasi kelas lanjut	kelompok	16	46	100,00%
	d. Jumlah wirausaha muda pertanian	orang	400	777	100,00%

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan, 2023





Urusan pemerintahan bidang pertanian dilaksanakan dengan anggaran Rp65.968.584.107,00 dan terealisasi Rp59.668.378.504,25 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan urusan pertanian sebesar 90,45%. Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertanian didukung dengan program, dengan tingkat capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

- 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota pada urusan pertanian dilaksanakan dengan anggaran Rp41.232.408.050,00 dan terealisasi Rp35.916.101.607,00 tingkat capaian kinerja keuangan program 87,11%. Capaian indikator kinerja program, sebagai berikut:
 - a) persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran terealisasi 100,00%; dan
 - b) persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja terealisasi 100,00%.
- 2) Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dilaksanakan menggunakan anggaran Rp8.376.194.410,00 dan terealisasi Rp8.216.994.327,90 tingkat capaian kinerja keuangan program sebesar 98,10%. Capaian indikator kinerja program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, sebagai berikut:
 - a) persentase peningkatan produksi tanaman pangan tercapai - 7.425,82%. Hal ini terjadi karena ada penurunan produksi komoditas kedelai sebesar 68%
 - b) persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura tercapai 12.539,42%.
 - c) persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan tercapai - 7.711,12%; dan
 - d) persentase Peningkatan Produk Komoditas Peternakan tercapai - 717,46%. Adanya serangan penyakit mulut dan kuku pada sapi menyebabkan produksi susu dan satuan ternak menurun.



3) Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian

Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp5.377.155.902,00 dan terealisasi sebesar Rp5.115.789.162,13 tingkat capaian kinerja keuangan program 95,14%. Capaian indikator kinerja pada program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, sebagai berikut:

- a) peningkatan jumlah kelompok tani hortikultura dan perkebunan yang menerima bantuan alat tercapai 100,00%;
- b) peningkatan jumlah kelompok tani tanaman pangan yang menerima bantuan alat tercapai 100,00%; dan
- c) Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan dan Perikanan (BP4) dengan klasifikasi kelas madya tercapai 100,00%.

4) Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat *veteriner*

Capaian indikator kinerja program pengendalian kesehatan hewan dan masyarakat *veteriner* yaitu persentase penanganan pelayanan kesehatan ternak dari target 100,00% terealisasi 100,00%. Tingkat capaian kinerja keuangan program sebesar 98,77% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.276.363.600,00 terealisasi sebesar Rp3.236.124.081,00.

5) Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian

Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dilaksanakan dengan anggaran Rp798.116.045,00 dan terealisasi Rp770.568.944,00 dengan tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 96,55%. Capaian indikator kinerja program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, sebagai berikut:

- a) persentase luas serangan hama dan penyakit tanaman pangan yang tertangani tercapai 100,00%; dan
- b) persentase luas serangan hama dan penyakit hortikultura dan perkebunan yang tertangani tercapai 100,00%.



6) Program penyuluhan pertanian

Capaian kinerja keuangan program penyuluh pertanian sebesar 92,83% dari target alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.908.346.100,00 terealisasi Rp6.412.800.382,12.

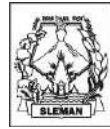
- a) peningkatan kinerja penyuluh pertanian sesuai tugas dan fungsinya tercapai 100,00%;
- b) persentase peningkatan kelompok yang menerapkan SOP cara-cara penanganan / pengolahan hasil hortikultura dan perkebunan tercapai 100,00%;
- c) kelembagaan petani dengan klasifikasi kelas lanjut target 16 kelompok terealisasi 46 kelompok, dengan capaian 287,50%; dan
- d) jumlah wirausaha muda pertanian target 400 orang terealisasi 777 orang sehingga capaian kinerja sebesar 194,24%.

Capaian kinerja keluaran kegiatan pada urusan pemerintahan bidang pertanian sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran secara terinci tertuang pada Buku 2 Laporan Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertanian pada tahun 2022 antara lain:

- 1) Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang masih tinggi.
Alih fungsi lahan pertanian cukup tinggi salah satu sebabnya karena meningkatnya kebutuhan akan ruang untuk permukiman dan sarana pendukung kehidupan masyarakat. Di sisi lain, upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan masih belum implementatif. Berdasarkan data lahan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan luas lahan pertanian sawah di Kabupaten Sleman menurun sebesar 3.515 ha selama 5 tahun terakhir;
- 2) Kepemilikan lahan sempit sehingga skala ekonomi tidak terpenuhi.
Dari segi *economy of scale*, petani skala kecil Kabupaten Sleman dengan posisi tawar yang lemah harus berhadapan dengan industri pangan skala besar yang lebih bersifat padat modal dan padat teknologi (*capital and technology intensive*).





- 3) Adanya penurunan produktivitas (levelling off) lahan dengan masa eksploitasi yang panjang.

Penggunaan pupuk kimia khususnya urea dalam jangka waktu yang panjang dan dalam dosis yang berlebihan akan berakibat menurunnya kualitas struktur kandungan unsur hara tanah. Solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan kampanye penggunaan pupuk organik.

- 4) Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang masih tinggi. Serangan hama tikus, penggerek batang dan Bacterial Leaf Blight semakin meningkat. Perlu penanganan OPT secara bersama dalam satu manajemen kelompok tani dan pengendalian secara terpadu dan berkesinambungan. Di masa yang akan datang dengan adanya perubahan iklim menjadikan pengendalian OPT sebagai langkah strategis untuk mempertahankan produktivitas tanaman pertanian.

- 5) Generasi muda kurang tertarik ke sektor pertanian.

Saat ini generasi muda yang bermata pencaharian utama sebagai petani sangat sedikit sekali jumlahnya. Di sub sektor tanaman pangan hanya $\pm 5\%$, di sub sektor Peternakan $\pm 10\%$, dan yang paling besar di subsektor Hortikultura dan perkebunan $\pm 20\%$. Kurang berminatnya generasi muda bekerja di sektor pertanian utamanya subsektor tanaman pangan disebabkan kurangnya insentif dalam usaha tani ini. Selain itu penguasaan lahan yang sempit dan tidak adanya akses terkait dengan lahan menyebabkan generasi muda enggan menekuni sektor pertanian ini.

Pengukuran kinerja pembangunan dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis. Pelaksanaan kegiatan pada urusan pemerintahan bidang pertanian tahun 2022 menunjukkan konsistensi/kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Target kinerja/keluaran dari setiap kegiatan telah mendukung pencapaian target indikator kinerja program yang telah ditetapkan sebagai perjanjian kinerja Perangkat Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, Renstra, RKPD, dan APBD.



d. Urusan Perdagangan

Urusan perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Tabel 3.104
Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Nilai ekspor Kabupaten Sleman	US \$	47.148.000	86.627.614,89 ¹⁾	183,74%
2	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	%	≤ 5	4,83	103,40%
3	Persentase sarana dan prasarana perdagangan tradisional dikelola dengan baik	%	11,63	13,50	116,02%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2023

Nilai ekspor Kabupaten Sleman pada tahun 2022 mencapai 86.627.614,89 US\$. Nilai ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 47.148.000 US\$. Tingkat capaian kinerja indikator nilai ekspor Kabupaten Sleman tahun 2022 sebesar 184%. Nilai ekspor adalah nilai transaksi ekspor dari pelaku usaha di Kabupaten Sleman pada tahun yang memiliki Surat Keterangan Asal dari DIY.

Persentase koefisien variasi harga antar waktu pada tahun 2022 mencapai 4,83%. Nilai ini melebihi target yang ditetapkan sebesar ≤ 5%. Tingkat capaian kinerja indikator persentase koefisien variasi harga antar waktu Kabupaten Sleman tahun 2022 sebesar 103,40%.

Persentase sarana dan prasarana perdagangan tradisional dikelola dengan baik pada tahun 2022 mencapai 13,5% Nilai ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 11,63%. Tingkat capaian kinerja indikator Persentase sarana dan prasarana perdagangan tradisional dikelola dengan baik Kabupaten Sleman tahun 2022 sebesar 116%.



Perkembangan jumlah sarana perdagangan di Kabupaten Sleman tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.105
Jumlah Sarana Perdagangan di Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pasar desa	41	41	41	44	41
2	Pasar lokal/kabupaten	35	37	37	35	34
3	Pasar hewan	2	2	2	2	2
4	Usaha perdagangan milik pemerintah kabupaten	6	6	6	5	5
5	Toko modern					
	a. Minimarket cabang/waralaba nasional	203	209	219	226	279
	b. Toko modern lokal	184	187	212	213	214
	c. Pusat perbelanjaan	4	4	4	5	5
	d. Perbakulan/grosir	2	2	2	2	2
	e. <i>Hypermarket</i>	5	5	5	8	8
	f. <i>Supermarket</i>	12	14	14	21	21
	g. <i>Department store</i>	7	8	8	3	3

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2023

Pelaksanaan urusan perdagangan didukung dengan beberapa program dengan capaian indikator kinerja program, sebagai berikut:

Tabel 3.106
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Tahun 2022

No	Program / Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				
	a. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%
	b. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100,00	100,00	100,00%
2	Program perizinan dan pendaftaran perusahaan				
	a. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	36,32	43,89	120,84%
	b. Persentase pedagang pasar yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	77,00	75,85	98,51%
3	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan				
	a. Rasio sarana prasarana perdagangan tradisional dalam kondisi baik	Rasio	0,88	0,80	90,91%
	b. Jumlah kejadian gangguan keamanan yang terjadi di sarana prasarana perdagangan tradisional	kejadian	5	5	100,00%
	c. Rasio sarana prasarana perdagangan tradisional yang menerapkan pengelolaan sampah	Rasio	11,63	13,50	116,08%
	d. Cakupan pembinaan pedagang pasar dan sarana usaha milik pemerintah Kabupaten Sleman	%	2,76	4,74	171,74%





No	Program / Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	e. Jumlah sarana dan prasarana perdagangan tradisional tertata	pasar	15	29	193,33%
4	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting				
	Persentase kecukupan stok barang kebutuhan pokok daerah	%	75	100	133,33%
5	Program pengembangan ekspor				
	Persentase jumlah pelaku usaha berorientasi ekspor	%	18	28,44	158,00%
6	Program standardisasi dan perlindungan konsumen				
	Persentase Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah	%	19	32,36	170,32%
7	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri				
	a. Persentase peningkatan kunjungan ke pasar kabupaten	%	2	5	250,00%
	b. Jumlah pelaku UMKM yang bermitra dengan pelaku usaha ritel modern	UMKM	36	36	100,00%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2023

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perdagangan menggunakan anggaran sebesar Rp39.741.768.210,00 terealisasi sebesar Rp38.137.789.185,00 tingkat capaian kinerja keuangan 95,96%.

- 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari 6 kegiatan dan 25 sub kegiatan. Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp27.112.412.325,00 terealisasi Rp26.126.283.643,00 tingkat capaian kinerja keuangan program 96,36%.
 - a) Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran tercapai 100,00%.
 - b) Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja tercapai 100,00%
- 2) Program perizinan dan pendaftaran perusahaan
Program perizinan dan pendaftaran perusahaan terdiri dari 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan. Program ini dilaksanakan dengan anggaran Rp398.178.311,00 terealisasi Rp395.083.220,00 tingkat capaian kinerja keuangan 99,20%



- a) Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan target 36,32% terealisasi 43,89% capaian kinerja 120,84%.
 - b) Persentase pedagang pasar yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan target 77,00% terealisasi 75,85% capaian kinerja 98,51%.
- 3) Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
- Program peningkatan sarana distribusi perdagangan terdiri dari 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan. Program ini menggunakan anggaran Rp8.055.528.804,00 terealisasi Rp7.468.166.017,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan program 92,71%.
- a) Rasio sarana prasarana perdagangan tradisional dalam kondisi baik tercapai 90,91%
 - b) Jumlah kejadian gangguan keamanan yang terjadi di sarana prasarana perdagangan tradisional tercapai 100,00%
 - c) Rasio sarana prasarana perdagangan tradisional yang menerapkan pengelolaan sampah target 11,63% terealisasi 13,50% capaian kinerja 116,08%.
 - d) Cakupan pembinaan pedagang pasar dan sarana usaha milik pemerintah Kabupaten Sleman target 2,76% terealisasi 4,74% capaian kinerja 171,74%.
 - e) Jumlah sarana dan prasarana perdagangan tradisional tertata target 15 pasar terealisasi 29 pasar sehingga capaian kinerja 193,33%.
- 4) Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
- Indikator kinerja persentase kecukupan stock barang kebutuhan pokok daerah target 75,00% terealisasi 100,00% sehingga capaian kinerja 133,33%. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan. Program ini menggunakan anggaran sebesar Rp895.210.946,00 terealisasi sebesar Rp890.633.838,00 capaian kinerja keuangan 99,49%.

5) Program pengembangan ekspor

Program pengembangan ekspor terdiri dari 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan. Program ini menggunakan anggaran Rp559.224.433,00 terealisasi Rp558.538.035,00 capaian kinerja keuangan 99,88%. Indikator kinerja persentase jumlah pelaku usaha berorientasi ekspor target 18,00% terealisasi 28,44% capaian kinerja 158%.

6) Program standardisasi dan perlindungan konsumen

Program standardisasi dan perlindungan konsumen terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Program ini dilaksanakan dengan anggaran Rp545.819.963,00 terealisasi Rp545.257.783,00 capaian kinerja keuangan 99,90%. Capaian indikator kinerja persentase Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda terasah target 19,00% terealisasi 32,36% capaian kinerja indikator 170,32%.

7) Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri

Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan. Program ini dilaksanakan dengan anggaran Rp2.175.393.428,00 terealisasi Rp2.153.826.649,00 capaian kinerja keuangan program 99,01%

a) Persentase peningkatan kunjungan ke pasar kabupaten target 2,00% realisasi 5% capaian kinerja 250%

b) Jumlah pelaku UMKM yang bermitra dengan pelaku usaha ritel modern tercapai 100,00%.

Capaian kinerja keluaran kegiatan pada urusan pemerintahan bidang perdagangan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran secara terinci tertuang pada Buku 2 Laporan Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Tabel 3.107
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Tahun 2022

No.	Permasalahan	Solusi
1	Regulasi pergudangan sudah tidak sesuai dengan kondisi lapangan	Tahun 2022 disiapkan Naskah Akademik Raperda Gudang
2	Masih kurangnya kemampuan pengelolaan toko tradisional	Dilakukan pelatihan dan bimtek untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha toko tradisional

No.	Permasalahan	Solusi
3	Pengembangan pasar ber-SNI dibutuhkan oleh masyarakat	Disiapkan pasar untuk dapat di SNI-kan
4	Literasi pedagang pasar akan <i>platform</i> online dan digital masih sangat rendah	Dilakukan pendampingan kepada pedagang terkait <i>platform</i> online dan digital
5	Sampah pasar perlu dikelola dan dipilah dengan lebih baik	Dilakukan sosialisasi kepada pedagang pasar terkait pengelolaan sampah
6	Konsep dari revitalisasi pasar masih perlu penyempurnaan (kearifan lokal dan cakupan pedagang)	Mulai dikembangkan pasar rakyat yang tidak terlalu 'baku' dan 'masiv'. Contohnya Pasar Godean yang perencanaanya melalui sayembara
7	Cakupan dan kualitas program Tertib Ukur masih perlu ditingkatkan	Intensifikasi pelayanan tera/tera ulang

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2023

Pengukuran kinerja pembangunan dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis. Pelaksanaan kegiatan pada urusan pemerintahan bidang perdagangan tahun 2022 menunjukkan konsistensi/kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Target kinerja/keluaran dari setiap kegiatan telah mendukung pencapaian target indikator kinerja program yang telah ditetapkan sebagai perjanjian kinerja Perangkat Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, Renstra, RKPD, maupun APBD.

e. Urusan Perindustrian

Urusan perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Tabel 3.108
Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja
1	Persentase pertumbuhan nilai produksi industri	%	2,10	2,20	104,76%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2023

Capaian indikator kinerja perangkat daerah pada urusan perindustrian tahun 2022 menunjukkan bahwa persentase pertumbuhan nilai produksi industri tercapai 104,76% dari target yang ditetapkan sebesar 2,10% terealisasi 2,20%.

Tabel 3.109
Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kontribusi Sektor Industri PDRB ADHB (%)	13,19	13,12	13,44	13,06	13,40
2	Jumlah Usaha Industri	16.945	17.016	11.362	11.445	11.571
3	Pertumbuhan Industri (%)	0,28	0,42	-3,4	2,1	2,2
4	Jumlah industri kecil & rumah tangga (unit)	16.770	16.898	11.153	11.233	11.353

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023; Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2023

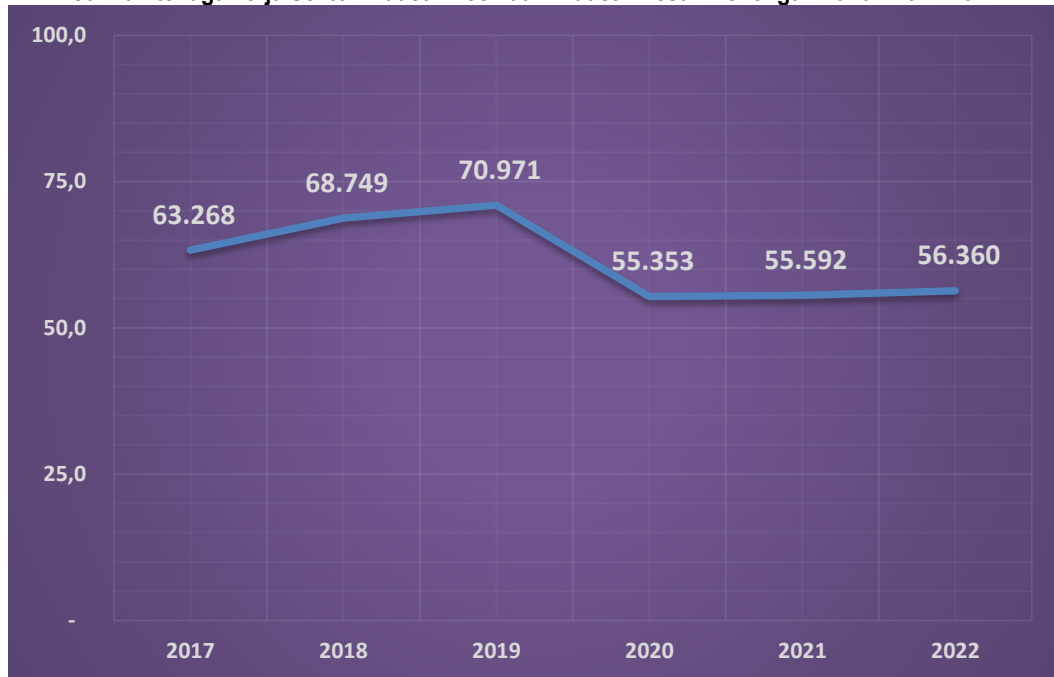
Kontribusi sektor industri pada PDRB ADHB sebesar 13,40%, naik dibandingkan tahun 2021 sebesar 13,06%. Jumlah usaha industri pada tahun 2021 dan tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2020 terdapat jumlah usaha industri 11.362 unit, sementara itu pada tahun 2021 naik menjadi 11.445 unit dan 11.571 unit pada tahun 2022. Hal yang sama juga terjadi pada jumlah industri kecil dan rumah tangga. Pada tahun 2020 jumlah usaha kecil dan rumah tangga 11.153, naik menjadi 11.233 pada tahun 2021 dan 11.353 pada tahun 2022. Jumlah usaha industri dan jumlah industri kecil dan rumah tangga pada tahun 2022 lebih baik dibandingkan tahun 2021. Pertumbuhan industri pada tahun 2022 juga lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 pertumbuhan industri sebesar 2,10% dan pada tahun 2022 sebesar 2,20%.

Tabel 3.110
Jumlah Industri Kecil (IK) dan Industri Besar-Menengah (IBM) per Kapanewon Tahun 2020-2022

No	Kapanewon	2020		2021		2022	
		IK	IBM	IK	IBM	IK	IBM
1.	Kapanewon Gamping	1.232	-	1.195	-	1.202	-
2.	Kapanewon Godean	1.309	-	794	-	801	-
3.	Kapanewon Moyudan	974	5	841	5	548	5
4.	Kapanewon Minggir	1.286	5	1.107	5	1.114	5
5.	Kapanewon Seyegan	502	23	740	23	747	23
6.	Kapanewon Mlati	669	34	513	34	520	34
7.	Kapanewon Depok	496	35	327	35	334	35
8.	Kapanewon Berbah	314	7	570	7	578	7
9.	Kapanewon Prambanan	228	6	239	6	246	6
10.	Kapanewon Kalasan	524	34	626	34	633	35
11.	Kapanewon Ngemplak	440	8	608	8	615	10
12.	Kapanewon Ngaglik	596	19	547	19	554	10
13.	Kapanewon Sleman	533	22	842	22	849	22
14.	Kapanewon Tempel	1.058	3	732	3	739	4
15.	Kapanewon Turi	386	1	681	1	688	2
16.	Kapanewon Pakem	278	8	606	8	613	8
17.	Kapanewon Cangkringan	328	2	265	2	272	2
	Jumlah	11.153	212	11.233	212	11.353	218

Sumber: Kabupaten Sleman dalam Angka (BPS), 2023

Grafik 3.19
Jumlah tenaga kerja Sektor Industri Kecil dan Industri Besar-Menengah Tahun 2017-2022



Sumber: Kabupaten Sleman dan Angka (BPS), 2023

Jumlah tenaga kerja pada sektor industri kecil dan industri besar-menengah di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan dari 55.353 orang pada tahun 2020 menjadi 55.592 orang pada tahun 2021 (naik 239 orang atau 0,43%), dan 56.360 orang pada tahun 2022 (naik 768 orang atau 1,38%).

Pelaksanaan urusan perindustrian didukung dengan beberapa program dengan capaian indikator kinerja dan keuangan program, sebagai berikut:

Tabel 3.111
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun 2022

No	Program / Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Program perencanaan dan pembangunan industri				
	Persentase sentra industri aktif	%	82	82	100,00%
2	Program pengendalian izin usaha industri				
	Jumlah pelaku usaha industri yang mempunyai izin berlaku sesuai dengan ketentuan	pelaku usaha	1.173	1.217	103,75%
3	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional				
	Persentase data industri yang dimutakhirkan	%	100	100	100,00%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2023



Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perindustrian dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.995.124.547,00 terealisasi sebesar Rp9.061.566.111,00 sehingga capaian kinerja keuangan urusan pemerintahan bidang perindustrian sebesar 90,66%. Capaian indikator kinerja keuangan dan indikator kinerja setiap program, diuraikan sebagai berikut:

1) Program perencanaan dan pembangunan industri

Program perencanaan dan pembangunan industri terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan. Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp9.898.002.047,00 terealisasi sebesar Rp8.964.707.310,70 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan program sebesar 90,57%. Capaian indikator kinerja persentase sentra industri aktif tercapai sebesar 100,00%.

2) Program pengendalian izin usaha industri

Program pengendalian izin usaha industri terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Program pengendalian izin usaha industri dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.112.500,00 terealisasi sebesar Rp7.008.600,00 sehingga capaian kinerja keuangan program sebesar 98,40%. Indikator kinerja jumlah pelaku usaha industri yang mempunyai izin berlaku sesuai dengan ketentuan target 1.173 pelaku usaha terealisasi 1.217 pelaku usaha sehingga capaian indikator kinerja sebesar 103,75%.

3) Program pengelolaan sistem informasi industri nasional

Program pengelolaan sistem informasi industri nasional terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Program ini dilaksanakan dengan anggaran Rp90.000.000,00 terealisasi Rp89.850.200,00 capaian kinerja keuangan program sebesar 99,83%. Capaian indikator kinerja program yaitu persentase data industri yang dimutakhirkan tercapai sebesar 100,00%.



Capaian kinerja keluaran kegiatan pada urusan pemerintahan bidang perindustrian sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran secara terinci tertuang pada Buku 2 Laporan Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perindustrian pada tahun 2022 antara lain:

Tabel 3.112
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun 2022

No	Permasalahan	Solusi
1	Belum optimalnya pengembangan desain dan kualitas produk	Pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan desain dan kualitas produk melalui kegiatan Bidang Perindustrian baik melalui kegiatan kajian untuk menyediakan bahan pengambilan keputusan pengembangan produk lokal maupun melalui kegiatan-kegiatan bimbingan teknis terkait melalui dukungan PUPM, POKIR, dan lainnya
2	Masih sangat dibutuhkannya peningkatan kapasitas produksi dan perluasan pangsa pasar	Fasilitasi promosi dan pemasaran melalui penyelenggaraan maupun partisipasi pada pameran-pameran local sampai dengan skala nasional melalui kegiatan-kegiatan Bidang Usaha Perdagangan
3	Belum terpenuhinya standarisasi dan pemenuhan syarat perijinan usaha industri	Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian industri melalui kegiatan pengawasan industri yang memantau kepatuhan pelaku usaha industri terhadap peraturan perundangan yang berlaku
4	Masih terbatasnya digitalisasi pelaku usaha industri	pelaksanaan penguatan digitalisasi pelaku industri melalui pelayanan Rumah Kreatif Sleman Bidang Perindustrian serta melalui kegiatan Bidang Usaha Perdagangan
5	Kurang permodalan untuk pengembangan usaha industri	Penguatan permodalan melalui pelaksanaan verifikasi pemohon dana penguatan modal industri
6	Masih belum optimalnya pengembangan usaha pelaku industri	a. Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis/ <i>workshop</i> pengembangan usaha bagi pelaku usaha industri tingkat lanjut b. Melakukan pola-pola kemitraan dengan industri lain yang sudah mapan

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2023

Pengukuran kinerja pembangunan dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis. Pelaksanaan kegiatan pada urusan pemerintahan bidang perindustrian tahun 2022 menunjukkan konsistensi/kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Target kinerja/keluaran dari setiap kegiatan telah mendukung pencapaian target indikator kinerja program yang telah ditetapkan sebagai perjanjian kinerja Perangkat Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, Renstra, RKPD, dan APBD.



f. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Urusan pemerintahan bidang transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang transmigrasi pada tahun 2022 dilaksanakan melalui Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi. Capaian kinerja indikator program diukur dengan persentase calon transmigran yang diberangkatkan dengan rumus penghitungan jumlah calon transmigran yang diberangkatkan dibagi jumlah calon transmigran yang lolos seleksi dikalikan 100%. Pada tahun 2022, target indikator kinerja program 80% dengan realisasi capaian indikator program sebesar 80%, sehingga indikator kinerja program tercapai 100%. Adapun target keuangan program sebesar Rp685.304.900,00 dengan realisasi sebesar Rp569.284.279,00 atau sebesar 83,07% dari target.

Kegiatan dalam program ini adalah kegiatan penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota, yang terdiri dari:

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi Yang Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Target keuangan sebesar Rp121.121.201,00 dengan realisasi sebesar Rp100.267.150,00 atau sebesar 82,78%. Adapun target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan adalah:
 - a) Pra penempatan calon transmigran 4 lokasi tercapai 100%;
 - b) Pasca penempatan calon transmigran 2 lokasi tercapai 100%;
 - c) Terselenggaranya kerja sama antar daerah pengirim dan penerima transmigran 3 lokasi tercapai 100%
- 2) Sub Kegiatan Pemandahan dan Penempatan Transmigrasi Yang Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota



Target keuangan sebesar Rp473.290.444,00 dengan capaian sebesar Rp380.629.004,00 atau sebesar 80,42%. Target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan adalah:

- a) Seleksi calon transmigran 25 Kepala Keluarga (KK) tercapai 100%;
- b) Pembinaan pendaftar terseleksi 12 KK tercapai 100%

3) Sub Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi

Target keuangan sebesar Rp90.893.255,00 dengan realisasi sebesar Rp88.388.125,00 atau sebesar 97,24%. Target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan adalah penyuluhan transmigrasi regional sebanyak 14 kali dengan peserta 40 orang per pertemuan, tercapai 100%. Berikut ini merupakan target dan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota:

Tabel 3.113
Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari Satu Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022

Target	Realisasi	Prosentase
Prosentase calon transmigran yang berangkat 80 %	Persentase calon transmigran yang berangkat 80 %	100 %
Calon Transmigran yang ditempatkan 12 KK	Calon Transmigran yang ditempatkan 12 KK	100%
Cakupan keberhasilan penempatan transmigran asal Kabupaten Sleman 80 %	Cakupan keberhasilan penempatan transmigran asal Kabupaten Sleman 80 %	100%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, 2023

Capaian kinerja keluaran kegiatan pada urusan pemerintahan bidang transmigrasi sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran secara terinci tertuang pada Buku 2 Laporan Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Sleman berkomitmen terhadap pelaksanaan program transmigrasi berupa pengiriman transmigran sesuai dengan karakteristik masyarakat Sleman yang mayoritas petani dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran di kabupaten Sleman. Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Sleman telah memberangkatkan/mengirimkan sebanyak 12 KK sejumlah 49 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.114
Pengiriman transmigran dan Tujuan Transmigrasi Tahun 2022

No.	Jumlah KK	Tujuan Kawasan Transmigrasi
1	2 KK	Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat
2	6 KK	Mahalona Kabupaten Luwutimur Provinsi Sulawesi Selatan
3	2 KK	Tempirai Selatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan
4	2 KK	Raimuna Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2023

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang transmigrasi pada tahun 2022 antara lain:

Tabel 3.115
Permasalahan dan Solusi Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Tahun 2022

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Ketergantungan pada kebijakan pemerintah pusat dalam program transmigrasi, terutama dalam hal kuota penempatan calon transmigrasi	Perlu dilakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait kuota penempatan calon transmigrasi
2	Terbatasnya daerah tujuan transmigrasi yang sesuai dengan minat calon transmigran	Solusi yang dilakukan adalah memberikan informasi calon lokasi secara lengkap meliputi kondisi lahan, kondisi sosial ekonomi, infrastruktur, potensi dan arah pengembangan melalui penyuluhan, penyebaran leaflet dan siaran radio
3	Permasalahan pertanahan di lokasi penempatan antara lain: pertama, masalah lahan usaha yang diberikan kepada transmigran yang belum memenuhi syarat <i>clear and clean</i> (2C) serta layak huni, layak usaha, dan layak berkembang (3L). Kedua, sertifikat tanah/lahan pekarangan, lahan usaha 1 dan lahan usaha 2 beberapa transmigran belum menerima sesuai dengan yang tertuang dalam naskah perjanjian kerja sama antar daerah.	Solusi yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan Pemda daerah penempatan, Pemda DIY dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, dan melakukan monitoring dan evaluasi ke daerah penempatan untuk mengetahui progres penyelesaian permasalahan dan mendorong penyelesaiannya. Mengupayakan memastikan informasi lebih lengkap dan akurat atas legalitas lahan pada saat peninjauan dan checking lokasi sebelum penempatan.

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2023

Pengukuran kinerja pembangunan dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis. Pelaksanaan kegiatan pada urusan pemerintahan bidang transmigrasi tahun 2022 menunjukkan konsistensi/kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Target kinerja / keluaran dari setiap kegiatan telah mendukung pencapaian target indikator kinerja program yang telah ditetapkan sebagai perjanjian kinerja Perangkat Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, Renstra, RKPD, maupun APBD.

4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

a. Urusan Sekretariat Daerah

Pelaksanaan unsur pendukung urusan pemerintahan, yaitu urusan sekretariat daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.2 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Tabel 3.116
Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2022

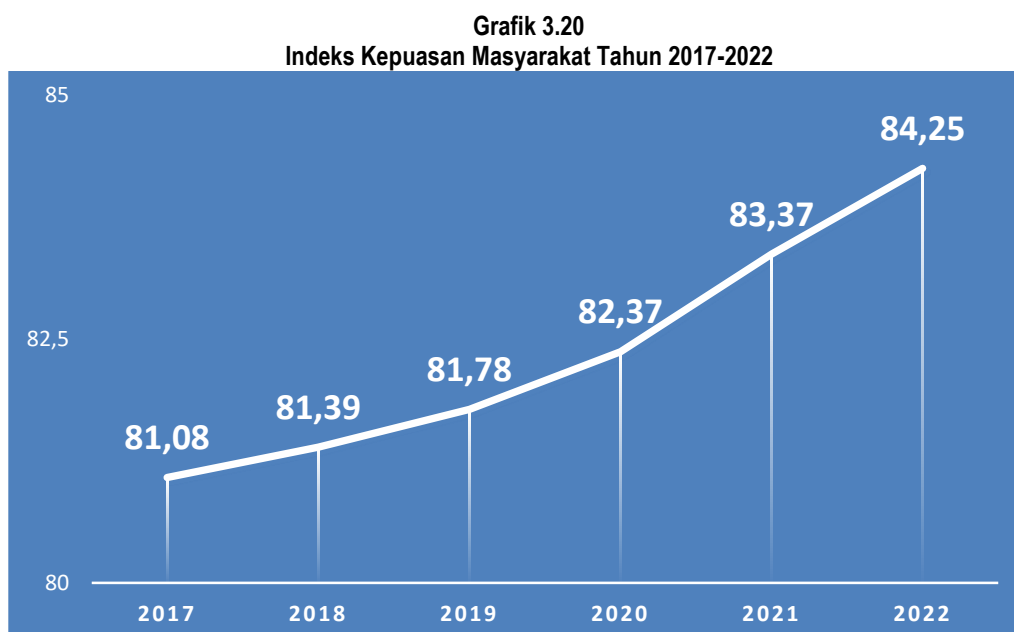
No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	82,05	84,25	102,68%
2	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	76,34 (BB)	77,50 (BB)	101,52%
3	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	predikat	81,58 (A)	81,89 (A)	100,38%
4	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	predikat	3.5200 (sangat tinggi)	n/a	-

Sumber: Sekretariat Daerah, 2023

Indikator kinerja daerah pada urusan sekretariat daerah adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil survei kepuasan masyarakat yang merupakan predikat kualitas dan kinerja pelayanan publik tingkat kabupaten berdasarkan nilai IKM yang dicapai oleh semua perangkat daerah dan UPT.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Sleman tahun 2022 dari target 82,05 terealisasi 84,25 sehingga tingkat capaian Indeks Kepuasan Masyarakat 102,68%. Capaian IKM pada tahun 2022 sebesar 84,25 lebih tinggi dari capaian tahun 2021 sebesar 83,37 atau meningkat 0,88 poin atau 1,06%. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sleman tahun 2022 terealisasi 77,50 dengan predikat BB atau tercapai 101,52% dari target yang ditetapkan sebesar 76,34. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sleman tersebut meningkat 0,73 poin atau 0,95% dibandingkan capaian 2021 sebesar 76,77.

Capaian IKM selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada grafik berikut:



Sumber: Sekretariat Daerah, 2023

Salah satu tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah adalah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Pada tahun 2022 telah ditetapkan Peraturan Daerah, sebagai berikut:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021;
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2022 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2022-2045;
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;

- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2022 tentang Gudang;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Desa Wisata;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada;
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.

Urusan sekretariat daerah didukung dengan beberapa program dengan capaian kinerja indikator program, sebagai berikut:

Tabel 3.117
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2022

No	Program / Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				
	a. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%
	b. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100,00	100,00	100,00%
	c. Tingkat kepuasan terhadap layanan tata usaha, pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan rumah tangga	angka	77,05	77,11	100,08%
	d. Persentase kinerja perangkat daerah dengan predikat "baik" berdasarkan indikator penilaian kinerja perangkat daerah	%	90,00	100,00	111,11%



No	Program / Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	e. Tingkat kepuasan terhadap protokoler dan komunikasi pimpinan	angka	76,95	83,83	108,94%
2	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat				
	a. Persentase dokumen LPPD tersedia tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00%
	b. Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	%	100,00	100,00	100,00%
	c. Persentase raperda yang diundangkan menjadi peraturan daerah	%	75,00	100,00	133,34%
	d. Persentase kerjasama yang aktif	%	100,00	100,00	100,00%
3	Program perekonomian dan pembangunan				
	a. Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian	%	100,00	100,00	100,00%
	b. Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang pembangunan	%	100,00	100,00	100,00%
	c. Persentase pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik	%	100,00	100,00	100,00%
4	Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan				
	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	%	90,00	100,00	111,11%

Sumber: Sekretariat Daerah, 2023

Sekretariat Daerah sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan dilaksanakan dengan anggaran Rp66.077.416.203,00 terealisasi Rp60.423.243.183,75 dan tingkat capaian kinerja keuangan program 91,44%.

- 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan dengan anggaran Rp 53.252.003.640,00 terealisasi Rp48.545.444.646,55 capaian kinerja keuangan program 91,16%.
 - a) persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran tercapai 100,00%;
 - b) persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja tercapai 100,00%;
 - c) tingkat kepuasan terhadap layanan tata usaha, pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan rumah tangga tercapai 77,11%;



- d) Persentase kinerja perangkat daerah dengan predikat "baik" berdasarkan indikator penilaian kinerja perangkat daerah tercapai 100,00%; dan
 - e) Tingkat kepuasan terhadap protokoler dan komunikasi pimpinan tercapai 83,83%.
- 2) Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
- Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp7.891.200.342,00 terealisasi sebesar Rp7.052.026.755,00 capaian kinerja keuangan program 89,37%.
- a) persentase dokumen LPPD tersedia tepat waktu tercapai 100,00%;
 - b) persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat tercapai 100,00%;
 - c) persentase raperda yang diundangkan menjadi peraturan daerah tercapai 133,34%; dan
 - d) persentase kerjasama yang aktif tercapai 100,00%.
- 3) Program perekonomian dan pembangunan
- Program perekonomian dan pembangunan dilaksanakan dengan anggaran Rp3.139.016.521,00 terealisasi Rp3.096.538.195,20 sehingga capaian kinerja keuangan program 98,65%.
- a) persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian tercapai 100,00%;
 - b) persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang pembangunan tercapai 100,00%; dan
 - c) persentase pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik tercapai 100,00%.
- 4) Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan
- Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional sebagai indikator kinerja program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan terealisasi 100,00%. Program dilaksanakan dengan anggaran Rp1.795.195.700,00 terealisasi Rp1.729.233.587,00 sehingga kinerja keuangan 96,33%.



Capaian kinerja keluaran kegiatan pada unsur pendukung urusanyaitu urusan sekretariat daerah sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran secara terperinci tertuang pada Buku 2 Laporan Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan sekretariat daerah pada tahun 2022 dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, antara lain:

- 1) Koordinasi penanganan permasalahan pemerintahan umum dan kebijakan nasional yang sangat kompleks membutuhkan peran serta peran berbagai pimpinan lintas sektor di daerah dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda);
- 2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas perangkat daerah belum optimal mendorong terwujudnya efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas dan fungsi Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) Perangkat Daerah dan Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan;
- 3) Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Reformasi Birokrasi, dan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sleman yang cukup tinggi harus dibarengi dengan upaya peningkatan indeks dan predikat tersebut pada tataran perangkat daerah dengan capaian yang masih tergolong rendah. Hal ini mengingat capaian indeks dan predikat pada setiap perangkat daerah tentunya berbeda sata dengan yang lain;

Pengukuran kinerja pembangunan dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis. Pelaksanaan kegiatan pada urusan sekretariat daerah tahun 2022 menunjukkan konsistensi/kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Target kinerja/keluaran dari setiap kegiatan telah mendukung pencapaian target indikator kinerja program yang telah ditetapkan sebagai perjanjian kinerja Perangkat Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, Renstra, RKPD, maupun APBD.



b. Urusan Sekretariat DPRD

Pelaksanaan unsur pendukung urusan pemerintahan, yaitu unsur sekretariat DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.2 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD.

Tabel 3.118
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Sekretariat DPRD Tahun 2022

No	Program / Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				
	a. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%
	b. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100,00	100,00	100,00%
2	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd				
	a. Persentase raperda dalam propemperda yang dibahas	%	90,50	90,50	100,00%
	b. Persentase nota kesepakatan KUA PPAS yang terselesaikan tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00%
	c. Persentase pengawasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan	%	80,20	100,00	124,69%
	d. Indeks kepuasan DPRD atas fasilitas layanan kehumasan, protokol dan layanan administrasi	%	80,20	97,50	121,57%

Sumber: Sekretariat DPRD, 2023

Urusan Sekretariat DPRD sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan dilaksanakan dengan anggaran Rp100.387.235.642,00 terealisasi Rp88.936.765.527,19 capaian kinerja keuangan urusan sekretariat DPRD sebesar 88,59%.

1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan dengan anggaran Rp50.920.733.519,00 terealisasi Rp47.190.527.181,19 tingkat capaian kinerja keuangan program sebesar 92,67%.

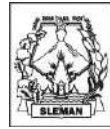


- a) Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran tercapai 100,00%; dan
 - b) Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja tercapai 100,00%.
- 2) Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp49.466.502.123,00 terealisasi Rp41.746.238.346,00 tingkat capaian kinerja keuangan program 84,39%.
- a) Persentase raperda dalam propemperda yang dibahas tercapai 100,00%;
 - b) Persentase nota kesepakatan KUA PPAS yang terselesaikan tepat waktu tercapai 100,00%;
 - c) Persentase pengawasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan tercapai 100,00%; dan
 - d) Indeks kepuasan DPRD atas fasilitasi layanan kehumasan, protokol dan layanan administrasi tercapai 97,50%.

Capaian kinerja keluaran kegiatan pada unsur pendukung urusan yaitu urusan sekretariat DPRD sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran secara terperinci tertuang pada Buku 2 Laporan Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Zero Growth dan *Moratorium* dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan kedepan akan bergeser menjadi *negative growth* akan memberikan dampak cukup signifikan terhadap kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman jika tidak diimbangi dengan sumber daya manusia. Realitas cepatnya perubahan peraturan pemerintah dan kedudukan Sekretariat DPRD adalah unsur fasilitasi DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya dan mempunyai fungsi pelayanan administrasi kepada DPRD. Merupakan tantangan dan permasalahan sendiri bagi Institusi Sekretariat DPRD, maka permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi dan menjadi tantangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah:





- 1) Kualifikasi SDM tidak merata baik dari segi kuantitas maupun kualitas sebagai dampak adanya zero growth menjadi negative growth dalam beberapa tahun ke depan pada penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) serta minimnya Tenaga Legal Drafter yang akan menyebabkan berkurangnya kualitas kinerja lembaga pada pemerintahan Daerah Kabupaten Sleman termasuk Sekretariat DPRD.
- 2) Penyelesaian kinerja Sekretariat DPRD yang belum optimal sebagai akibat dari menurunnya jumlah kuantitas maupun kualitas sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dan hal ini dapat berlanjut kepada menurunnya jumlah yang lebih signifikan akibat zero growth dalam penerimaan pegawai negeri sipil beberapa tahun ke depan.
- 3) Penyelenggaraan penyerapan aspirasi dan penyampaian informasi terhadap lapisan masyarakat belum sesuai harapan, hal ini disebabkan jejaring kerjasama yang di fasilitasi Sekretariat DPRD belum terintegrasi dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dewan.
- 4) Peran ganda yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD sebagai lembaga yang melayani DPRD sekaligus sebagai OPD yang berada di bawah Bupati dimana kedua lembaga tersebut memiliki tugas dan fungsi yang berbeda yaitu legislatif dan eksekutif menjadikan posisi Sekretariat DPRD harus bisa menyelaraskan kepentingan keduanya.
- 5) Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan terhadap kebijakan yang ditetapkan, sehingga alokasi waktu pembahasan bahan acara tidak dapat diseragamkan. Pengukuran kinerja pembangunan dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis.

Pelaksanaan kegiatan pada urusan sekretariat DPRD tahun 2022 menunjukkan konsistensi/kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Target kinerja/keluaran dari setiap kegiatan telah mendukung pencapaian target indikator kinerja program yang telah ditetapkan sebagai perjanjian kinerja Perangkat Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, Renstra, RKPD, maupun APBD.



5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Urusan Perencanaan

Urusan perencanaan sebagai salah satu unsur penunjang urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman yang lebih rinci diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan pada masa yang akan datang, melalui suatu urutan pilihan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki dalam jangka waktu tertentu di suatu daerah. Perencanaan pembangunan di Kabupaten Sleman dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Tabel 3.119
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Perencanaan Tahun 2022

No	Program/ Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				
	a. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%
	b. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100,00	100,00	100,00%
2	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah				
	a. Persentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan	%	100,00	100,00	100,00%
	b. Persentase dokumen bahan pengambilan kebijakan komunikasi, informasi,	%	100,00	100,00	100,00%

No	Program/ Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	perpustakaan, dan kearsipan tersedia tepat waktu				
	c. Persentase konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	%	90,00	95,74	106,36%
3	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah				
	a. Persentase dokumen bahan pengambilan kebijakan kesejahteraan rakyat dan pemerintahan tersedia tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00%
	b. Persentase dokumen bahan pengambilan kebijakan perekonomian tersedia tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00%
	c. Persentase dokumen bahan pengambilan kebijakan fisik dan prasarana tersedia tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00%

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2023

Urusan perencanaan dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp12.917.221.284,00 dengan realisasi sebesar Rp12.566.613.260,36 dan tingkat capaian kinerja keuangan urusan sebesar 97,29%. Urusan perencanaan didukung dengan program dengan capaian indikator kinerja dan keuangan program sebagai berikut:

- 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan dengan anggaran Rp10.145.943.029,00 terealisasi Rp9.837.954.201,36 capaian kinerja keuangan program 96,96%.
 - a) Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran tercapai 100,00%; dan
 - b) Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja tercapai 100,00%.
- 2) Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
Pelaksanaan program menggunakan anggaran Rp1.723.638.269,00 terealisasi Rp1.689.730.182,00 capaian kinerja keuangan 98,03%.
 - a) Persentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan tercapai 100,00%;

- b) Persentase dokumen bahan pengambilan kebijakan komunikasi, informasi, perpustakaan, dan kearsipan tersedia tepat waktu tercapai 100,00%; dan
 - c) Persentase konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah target 90,00% terealisasi 95,74% sehingga capaian indikator kinerja 106,36%.
- 3) Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
- Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan anggaran Rp1.047.639.986,00 terealisasi Rp 1.038.928.877,00 tingkat capaian kinerja keuangan program 99,17%
- a) Persentase dokumen bahan pengambilan kebijakan kesejahteraan rakyat dan pemerintahan tersedia tepat waktu tercapai 100,00%;
 - b) Persentase dokumen bahan pengambilan kebijakan perekonomian tersedia tepat waktu tercapai 100,00%; dan
 - c) Persentase dokumen bahan pengambilan kebijakan fisik dan prasarana tersedia tepat waktu tercapai 100,00%.

Capaian kinerja keluaran kegiatan pada unsur pendukung urusan yaitu urusan perencanaan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) secara terinci tertuang pada Buku 2 Laporan Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan perencanaan pada tahun 2022 antara lain:

Tabel 3.120
Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Urusan Perencanaan Tahun 2022

No.	Permasalahan	Solusi
1	Jadwal/agenda pelaksanaan proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang padat dan saling berisan waktu pelaksanaannya	Melakukan penjadwalan proses perencanaan dengan lebih cermat sehingga agenda-perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik

No.	Permasalahan	Solusi
2	Penjadwalan ulang pelaksanaan pembayaran hibah sekberkartamantul karena adanya perubahan besaran anggaran hibah yang harus diserahkan kepada sekberkartamantul	Kekurangan anggaran hibah dapat tercukupi pada saat mekanisme perubahan anggaran. Untuk meminimalisir terjadinya hal seperti ini lagi telah dilakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak sekberkartamantul terkait penganggaran hibah kepada sekberkartamantul.

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2023

Pengukuran kinerja pembangunan dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis. Pelaksanaan kegiatan pada urusan perencanaan tahun 2022 menunjukkan konsistensi/kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Target kinerja/keluaran dari setiap kegiatan telah mendukung pencapaian target indikator kinerja program yang telah ditetapkan sebagai perjanjian kinerja Perangkat Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, Renstra, RKPD, maupun APBD.

b. Urusan Keuangan

Urusan keuangan dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman yang lebih rinci diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 28.2 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Indek pengelolaan keuangan daerah adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tatakelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Dimensi penilaian indeks pengelolaan keuangan terdiri dari kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasin anggaran belanja dalam APBD, tranparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran; dan kondisi keuangan daerah dan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.

Tabel 3.121
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2021	Capaian Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Kinerja
1.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	B	B	B	100,00%

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Indeks pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2022 adalah B sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja indikator sasaran indeks pengelolaan keuangan daerah 100,00%. Hal ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 bahwa pada periode akhir RPJMD tahun 2026 indeks pengelolaan keuangan daerah B.

Capaian indikator kinerja keuangan urusan keuangan tahun 2018 sampai 2022 dijelaskan pada tabel berikut:

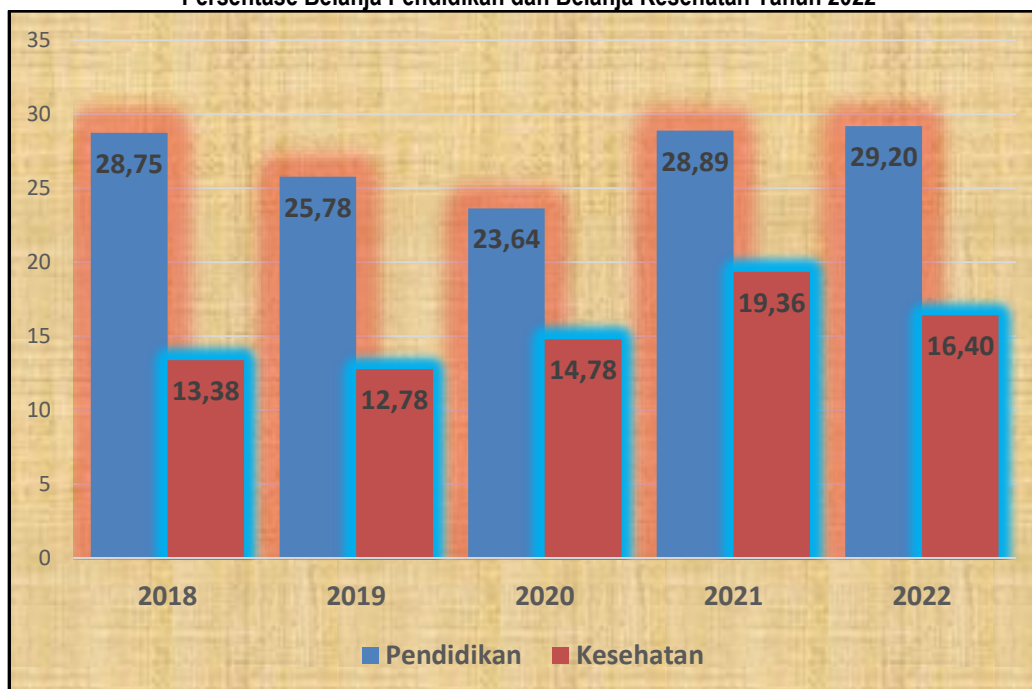
Tabel 3.122
Capaian Indikator Urusan Keuangan Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Hasil Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA terhadap realisasi APBD	15,4	14,35	14,43	16,41	9,39
3	Persentase SILPA terhadap APBD	13,73	12,81	13,09	14,54	8,67
4	Jumlah program tidak dilaksanakan	0	0	0	0	0
5	Jumlah kegiatan tidak dilaksanakan	0	0	0	0	0
6	Persentase belanja pendidikan (%)	28,75	25,78	23,64	28,89	29,20
7	Persentase belanja kesehatan (%)	13,38	12,78	14,78	19,36	16,40
8	Persentase belanja langsung (%)	45,89	46,21	49,25	45,72	44,72
9	Persentase belanja tidak langsung (%)	54,11	53,79	50,75	54,21	55,28
10	Persentase belanja bagi hasil kabupaten/desa	2,13	2,22	1,74	8,06	2,68

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sleman mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP tersebut telah didapatkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman secara berturut-turut sejak tahun 2011. Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sleman telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian 11 kali berturut-turut. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dan cerminan dari profesionalitas aparatur sipil negara yang dimiliki.

Grafik 3.21
Persentase Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan Tahun 2022



Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Persentase belanja pendidikan dan belanja kesehatan mengalami kenaikan pada tahun 2022. Persentase belanja pendidikan pada tahun 2021 sebesar 28,89% naik sebesar 1,07% menjadi 29,20% pada tahun 2022. Persentase belanja kesehatan pada tahun 2021 sebesar 19,36% turun sebesar 15,29% menjadi 16,40% pada tahun 2022. Sejak tahun 2021 klasifikasi dalam APBD tidak lagi menggunakan belanja langsung dan tidak langsung.

Tabel 3.123
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Keuangan Tahun 2022

No	Program / Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				
	a. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%
	b. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100,00	100,00	100,00%
2	Program pengelolaan keuangan daerah				
	a. Persentase dokumen anggaran yang disusun tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00%
	b. Persentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah	%	100,00	100,00	100,00%
	c. Persentase ketepatan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD	%	100,00	100,00	100,00%



No	Program / Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
3	Program pengelolaan barang milik daerah				
	Persentase perangkat daerah yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) kategori a	%	84,00	84,00	100,00%
4	Program pengelolaan pendapatan daerah				
	a. Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	%	2,98	26,10	878,86%
	b. Indeks kepuasan terhadap layanan pajak daerah	indeks	78,80	81,94	103,98%

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Pelaksanaan urusan keuangan menggunakan anggaran sebesar Rp565.141.272.677,01 terealisasi Rp513.956.380.745,36 capaian kinerja keuangan urusan keuangan 90,94%. Pelaksanaan urusan keuangan didukung dengan beberapa program, dengan tingkat capaian indikator kinerja program, sebagai berikut:

- 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan dengan anggaran Rp127.883.451.732,00 terealisasi Rp109.550.792.575,00 tingkat capaian kinerja keuangan program 85,66%;
 - a) Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran tercapai 100,00%; dan
 - b) Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja tercapai 100,00%.
- 2) Program pengelolaan keuangan daerah
Program pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan anggaran Rp413.061.478.037,00 terealisasi Rp381.885.481.436,00 tingkat capaian kinerja keuangan program 92,45%.
 - a) Persentase dokumen anggaran yang disusun tepat waktu tercapai 100,00%;
 - b) Persentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah tercapai 100,00%; dan
 - c) Persentase ketepatan waktu penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD tercapai 100,00%.



- d) Persentase ketepatan waktu penyaluran keuangan penunjang urusan keuangan tercapai 100,00%.
- 3) Program pengelolaan barang milik daerah
Program pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan dengan anggaran Rp6.717.248.133,00 terealisasi Rp5.902.684.605,00 capaian kinerja keuangan program 87,87%. Capaian indikator kinerja persentase perangkat daerah yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah kategori A tercapai 100,00%.
- 4) Program pengelolaan pendapatan daerah
Program pengelolaan pendapatan daerah dilaksanakan dengan anggaran Rp16.519.094.775,00 terealisasi Rp15.793.082.177,00 tingkat capaian kinerja keuangan program 95,61%.
- a) Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah target 2,98% terealisasi 26,19% capaian indikator kinerja 878,86%; dan
- b) Indeks kepuasan terhadap layanan pajak daerah target 78,80 terealisasi 81,94 capaian indikator kinerja 103,98%.

Capaian kinerja keluaran kegiatan pada unsur pendukung urusan yaitu urusan keuangan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran secara terinci tertuang pada Buku 2 Laporan Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Mayoritas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2022 dan pada tahun anggaran sebelumnya dapat dikatakan merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi BKAD sebagai SKPKD/PPKD bahkan kegiatan kesekretariatan pun dilaksanakan dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi BKAD sebagai SKPKD/PPKD. Berdasarkan pengalaman saat ini dan masa lalu permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi BKAD diantaranya:

- 1) Sistem informasi dari pemerintah pusat dibangun secara bertumbuh sehingga dalam perjalanannya perlu upaya pendampingan pada setiap tahapannya. Hal ini juga menjadikan kekhawatiran terhadap sistem terkait tahapan-tahapan selanjutnya, yaitu tahapan rencana



umum pengadaan, tahap penatausahaan dan tahapan pelaporan. Penyesuaian terhadap sistem baru ini membutuhkan upaya besar untuk dapat mengaplikasikannya dengan kemungkinan resiko yang menyertai, diantaranya adalah resiko lebih lambatnya waktu yang dicapai serta validitas data yang tersaji.

- 2) Adanya keterbatasan sumber pendanaan dari pemerintah pusat sehingga perlu penggalan potensi sumber pendapatan asli daerah untuk dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam rangka menjaga kualitas pelayanan publik.
- 3) Adanya peraturan baru terkait pengelolaan keuangan daerah antara lain tentang pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan barang milik daerah, dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah, sehingga diperlukan upaya untuk menginternalisasi peraturan tersebut kepada perangkat daerah agar terdapat keseragaman administrasi dalam hal pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan barang milik daerah, dan pengelolaan pelaporan keuangan daerah antar perangkat daerah.
- 4) Adanya kebijakan desentralisasi pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah diharapkan dapat menjadi salah satu faktor pendorong pemenuhan kebutuhan perangkat daerah dalam rangka memperlancar jalannya pemerintahan. Hal ini tentu saja harus diimbangi dengan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan dokumen penyusunan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah secara tertib. Periodisasi penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah harus diatur secara tepat sehingga TAPD memiliki waktu yang cukup untuk menyusun prioritas kebutuhan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
- 5) Realisasi fisik dan keuangan di beberapa kegiatan tidak berjalan sesuai rencana dan terakumulasi di akhir tahun anggaran serta penyerapan anggaran kurang dapat berjalan optimal walaupun sudah lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dengan adanya kebijakan



penyerapan anggaran yang dikaitkan dengan tunjangan penghasilan pegawai dapat mendorong masing-masing koordinator kegiatan untuk menepati jadwal penyerapan sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

- 6) Kapasitas dan kapabilitas pegawai dalam mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan yang sepenuhnya berbasis akrual serta dalam hal pengelolaan keuangan dan aset masih perlu ditingkatkan untuk mendapatkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan dan dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan dan aset.
- 7) Perencanaan program dan kegiatan belum menggunakan data/informasi yang akurat sebagai dasar penentuan kebutuhan dimasa datang.
- 8) Program dan kegiatan belum semuanya didukung dengan SOP sehingga berpotensi menimbulkan masalah pengendalian.
- 9) Tuntutan peningkatan kualitas layanan baik dari masyarakat maupun instansi lain mengharuskan Badan keuangan dan Aset Daerah senantiasa melakukan perbaikan mutu produk layanan baik layanan kepada wajib pajak maupun layanan kepada perangkat daerah secara terus menerus.
- 10) Inkompetensi secara teknologi, karena kesuksesan pengembangan sistem informasi tidak hanya bergantung pada penggunaan alat atau teknologinya saja, tetapi juga manusia sebagai perancang dan penggunanya.

Pengukuran kinerja pembangunan dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis. Pelaksanaan kegiatan pada urusan keuangan tahun 2022 menunjukkan konsistensi/kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Target kinerja/keluaran dari setiap kegiatan telah mendukung pencapaian target indikator kinerja program yang telah ditetapkan sebagai perjanjian kinerja Perangkat Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, Renstra, RKPD, maupun APBD.

c. Urusan Kepegawaian

Kepegawaian sebagai salah satu urusan penunjang urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman yang lebih rinci diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan.

Capaian indikator kinerja urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan tahun 2017 sampai 2022 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.124
Capaian Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2017-2022

No	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	18,99	10,04	16,73	13,51	56,1	36,80
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2,00	2,47	4,60	3,60	12,9	7,05
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	86,00	82,60	79,02	81,85	78,6	53,07
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	36	34	33	30	28	35
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi Pemerintah	677	755	741	688	793	2.470
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	6.324	5.950	6.174	5.739	6115	6.138

Sumber: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, 2023

Urusan kepegawaian didukung dengan beberapa program dengan capaian indikator kinerja program tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 3.125
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Kepegawaian Tahun 2022

No	Program/ Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				
	a. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%
	b. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100,00	100,00	100,00%

No	Program/ Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2	Program kepegawaian daerah				
	a. Tingkat kualitas pengadaan ASN	Nilai	16	18	112,50%
	b. Persentase kesesuaian penempatan PNS dalam jabatan sesuai kualifikasi jenjang pendidikan	%	97,00	99,62	102,70%
	c. Persentase kualifikasi pendidikan ASN	%	0,20	1,23	613,50%
	d. Tingkat kualitas perencanaan dan pengembangan karir ASN	Nilai	35	61,25	175,00%
	e. Persentase kinerja ASN	Nilai	95	99,89	105,15%
	f. Persentase disiplin ASN	%	0,20	0,11	144,23%
	g. Persentase aplikasi kepegawaian yang dikembangkan	%	100,00	100,00	100,00%
	h. Persentase pemberian pelayanan dan penghargaan bagi pegawai ASN	%	65,00	72,67	111,80%

Sumber: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, 2023

Urusan kepegawaian dilaksanakan dengan menggunakan anggaran Rp14.990.005.559,00 terealisasi Rp13.477.010.364,00 dengan realisasi keuangan 89,91%. Pelaksanaan urusan kepegawaian didukung dengan beberapa program dengan tingkat capaian indikator kinerja program, sebagai berikut:

- 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan dengan anggaran Rp10.645.466.404,00 terealisasi Rp10.151.485.804 sehingga capaian kinerja keuangan program sebesar 95,36%. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dan pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja tercapai 100,00%.
- 2) Program kepegawaian daerah
Program kepegawaian daerah dilaksanakan dengan anggaran Rp4.344.539.155,00 terealisasi Rp3.325.524.560,00 sehingga capaian kinerja keuangan program 76,54%.
 - a) tingkat kualitas pengadaan ASN target 16 terealisasi 18 capaian indikator kinerja 112,50%;
 - b) persentase kesesuaian penempatan PNS dalam jabatan sesuai kualifikasi jenjang pendidikan dengan target 97 terealisasi 99,62 sehingga capaian indikator kinerja program 102,70%;



- c) persentase kualifikasi pendidikan ASN target 0,20 realisasi 1,23 capaian indikator kinerja 613,50%;
- d) tingkat kualitas perencanaan dan pengembangan karir ASN target 35 realisasi 61,25 tingkat capaian indikator kinerja program 175,00%;
- e) persentase kinerja ASN target 95 terealisasi 99,89 capaian indikator kinerja 105,15%;
- f) persentase disiplin ASN target 0,20 terealisasi 0,11 capaian indikator kinerja 144,23%;
- g) persentase aplikasi kepegawaian yang dikembangkan target 100 realisasi 100 capaian indikator kinerja 100,00%; dan
- h) persentase pemberian pelayanan dan penghargaan bagi pegawai ASN target 65 terealisasi 72,67 capaian indikator kinerja 111,80%.

Capaian kinerja keluaran kegiatan pada unsur pendukung urusan yaitu urusan kepegawaian sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran secara terperinci tertuang pada Buku 2 Laporan Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepegawaian pada tahun 2022 antara lain pada proses seleksi pengadaan PPPK tenaga kesehatan dibiayai oleh Kementerian Kesehatan dan PPPK Guru dibiayai oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi baru (hal ini baru dapat dipastikan dan dilaksanakan pada akhir triwulan 4), sedangkan proses pengangkatan untuk menjadi PPPK akan dilaksanakan pada tahun 2023 sehingga hal ini mengakibatkan belanja yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut tidak terealisasi secara maksimal. Solusi atas permasalahan tersebut adalah dengan melaksanakan pengangkatan untuk menjadi PPPK akan dilaksanakan pada tahun 2023 sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengukuran kinerja pembangunan dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis. Pelaksanaan kegiatan pada urusan kepegawaian tahun 2022 menunjukkan konsistensi/kesesuaian antara perencanaan dan



penganggaran. Target kinerja/keluaran dari setiap kegiatan telah mendukung pencapaian target indikator kinerja program yang telah ditetapkan sebagai perjanjian kinerja Perangkat Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, Renstra, RKPD, maupun APBD.

d. Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Unsur pendidikan dan pelatihan adalah salah satu unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi ketugasan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman yang lebih rinci diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan.

Data perkembangan pegawai yang mengikuti diklat di Kabupaten Sleman tahun 2018 sampai 2022 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.126
Data Perkembangan Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Diklatpim Tingkat II	7	2	-	1	2
2	Diklatpim Tingkat III	18	10	10	10	18
3	Diklatpim Tingkat IV	30	10	12	20	10
4	Diklat Teknis	174	72	51	131	195
5.	Pemberian Izin Belajar	68	100	102	104	232
	- Paket B	-	-	1	-	13
	- Paket C	-	2	-	-	60
	- Spesialis	-	-	1	-	-
	- Sub spesialis	-	-	-	2	-
	- UPER	-	-	-	-	-
	- D2	-	-	-	-	-
	- D3	19	1	1	-	-
	- D4/S1	22	40	35	44	58
	- S2	26	54	53	58	68
	- S3	-	-	-	-	-
	- Profesi	1	3	11	-	33
6.	Pengiriman tugas belajar	8	8	2	2	14
	- D3	-	-	-	-	-
	- D4	-	-	-	-	-
	- S1	3	1	-	-	5
	- S2	5	7	2	2	9

Sumber: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, 2023

Pada tahun 2022 dilaksanakan pengiriman diklatpim II 2 orang, diklatpim III 18 orang, diklatpim IV 10 orang, dan diklat teknis 195 orang. Sedangkan pemberian izin belajar paket B 13 orang, paket C 60 orang, D4/S1 58 orang, S2 68 orang dan profesi 33 orang.

Unsur penunjang urusan pemerintahan pendidikan dan pelatihan didukung dengan program dengan capaian indikator kinerja program, sebagai berikut:

Tabel 3.127
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022

No	Program / Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Program pengembangan sumber daya manusia				
	Persentase pengembangan kompetensi ASN	%	50,00	55,22	110,44%

Sumber: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, 2023

Unsur penunjang urusan pemerintahan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp4.915.556.700,00 terealisasi Rp4.433.399.992,00 sehingga capaian kinerja keuangan urusan pendidikan dan pelatihan sebesar 90,19%. Pelaksanaan urusan pendidikan dan pelatihan didukung dengan program pengembangan sumber daya manusia, dengan indikator kinerja persentase pengembangan kompetensi ASN tercapai 110,44% dari target yang ditetapkan 50,00% terealisasi 55,22%.

Capaian kinerja keluaran kegiatan pada urusan pendidikan dan pelatihan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran secara terinci tertuang pada Buku 2 Laporan Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Permasalahan dalam pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan pendidikan dan pelatihan pada tahun 2022 antara lain belum semua ASN mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP/tahun.

Pengukuran capaian kinerja dilaksanakan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja. Pelaksanaan kegiatan pada unsur penunjang urusan pemerintahan pendidikan dan pelatihan pada

tahun 2022 menunjukkan konsistensi/kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Target kinerja/keluaran dari setiap kegiatan telah mendukung pencapaian target indikator kinerja program yang telah ditetapkan sebagai perjanjian kinerja perangkat daerah, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, Renstra, RKPD, dan APBD. Kegiatan pada program pengembangan sumber daya manusia adalah Pengembangan kompetensi teknis dan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional.

e. **Urusan Penelitian dan Pengembangan**

Urusan penelitian dan pengembangan sebagai salah satu unsur penunjang urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman yang lebih terperinci diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Terdapat dua indikator kinerja daerah yang menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Indikator kinerja daerah yang pertama adalah indikator tujuan daerah yaitu persentase inovasi yang diimplementasikan dengan target kinerja sebesar 90,00%. Indikator yang kedua adalah indikator sasaran daerah yaitu persentase inovasi yang telah ditetapkan dengan keputusan dan atau peraturan lainnya dengan target kinerja sebesar 58,00%.

Tabel 3.128
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan

No	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya pengembangan inovasi daerah		Persentase inovasi yang diimplementasikan
2		Meningkatnya perlindungan terhadap inovasi daerah	Persentase inovasi yang telah ditetapkan dengan surat keputusan dan atau peraturan lainnya

Sumber: RPJMD Kabupaten Sleman 2021-2026

Capaian kinerja tujuan dan sasaran pada urusan penelitian dan pengembangan tahun 2022 menunjukkan nilai yang baik. Berdasarkan capaian dua indikator kinerja menunjukkan nilai diatas 100,00%. Penjelasan lebih rinci sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.129
Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Capaian	Tingkat Capaian
1	Persentase inovasi yang diimplementasikan	90,00%	100,00%	111,11%
2	Persentase inovasi daerah yang telah ditetapkan dengan keputusan dan atau peraturan lainnya	58,00%	100,00%	172,41%

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2023

Program penelitian dan pengembangan daerah merupakan program yang dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten Sleman. Indikator yang menjadi tolok ukur untuk menilai keberhasilan program penelitian dan pengembangan daerah yaitu tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan.

Tabel 3.130
Capaian Kinerja Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan	%	25,00	50,00	200,00%

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2023

Pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan menggunakan anggaran sebesar Rp504.321.100,00 terealisasi Rp502.175.352,00 sehingga capaian kinerja keuangan urusan penelitian dan pengembangan 99,57%. Urusan penelitian dan pengembangan didukung dengan program penelitian dan pengembangan daerah dengan indikator kinerja tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan, dari target 25,00% terealisasi 50,00%.

Program penelitian dan pengembangan daerah dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp 504.321.100,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 502.175.352,00. Tingkat capaian kinerja keuangan program sebesar 99,57%.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan penelitian dan pengembangan terdiri dari:

- 1) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- 2) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan; dan
- 3) Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Indikator yang menjadi tolok ukur untuk menilai keberhasilan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yaitu persentase dokumen penelitian dan pengembangan tersedia tepat waktu. Capaian kinerja kegiatan dan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun anggaran 2022 secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.131
Capaian Kinerja Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Persentase dokumen penelitian dan pengembangan tersedia tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2023

Kegiatan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp 378.242.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 378.108.006,00. Tingkat capaian kinerja keuangan kegiatan sebesar 99,96%.

Indikator yang menjadi tolok ukur untuk menilai keberhasilan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan yaitu persentase fasilitasi pemberian rekomendasi ijin KKN. Capaian kinerja kegiatan dan keuangan Bappeda tahun anggaran 2022 secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.132
Capaian Kinerja Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Persentase fasilitasi pemberian rekomendasi ijin KKN	%	100,00	100,00	100,00%

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2023

Kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp 17.307.250,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 16.607.120,00. Tingkat capaian kinerja keuangan kegiatan sebesar 95,95%.

Indikator yang menjadi tolok ukur untuk menilai keberhasilan kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi yaitu persentase pelaksanaan kegiatan utama kelitbangan. Capaian kinerja kegiatan dan keuangan Bappeda tahun anggaran 2022 secara terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.133
Capaian Kinerja kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Tahun 2022

No	Indikator Kinerja kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Persentase pelaksanaan kegiatan utama kelitbangan	%	42,00	42,00	100,00%

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2022

Kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp 108.771.350,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 107.460.226,00. Tingkat capaian kinerja keuangan kegiatan sebesar 98,79%. Keberhasilan pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan dapat dilihat dari tercapainya indikator kinerja tujuan daerah dan indikator kinerja sasaran daerah yang didukung oleh tercapainya indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut:

- 1) belum dijadikannya Agenda Riset Daerah sebagai pedoman dalam penelitian dan pengembangan di wilayah Kabupaten Sleman;
- 2) belum optimalnya implementasi hasil riset sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah atau yang ditindaklanjuti sebagai program dan kegiatan perangkat daerah;
- 3) hasil temuan inovasi alat teknologi tepat guna rawan plagiarisme/duplikasi;
- 4) belum memadainya alokasi anggaran untuk riset-riset terapan; serta

5) belum adanya mekanisme kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi di Sleman dan DIY.

Pengukuran kinerja pembangunan dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis. Pelaksanaan kegiatan pada urusan penelitian dan pengembangan tahun 2022 menunjukkan konsistensi/kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Target kinerja/keluaran dari setiap kegiatan telah mendukung pencapaian target indikator kinerja program yang telah ditetapkan sebagai perjanjian kinerja Perangkat Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, Renstra, RKPD, dan APBD.

6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

a. Urusan Inspektorat Daerah

Unsur pengawasan urusan pemerintahan inspektorat daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan secara rinci diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.3 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten.

Urusan pengawasan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Capaian indikator kinerja unsur pengawasan urusan pemerintahan di Kabupaten Sleman yaitu:

1) Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sleman

Nilai capaian Maturitas SPIP Kabupaten Sleman tahun 2022 sebesar 3,3900 dari target nilai 3,0900, dengan capaian kinerja 109,96%. Hasil Evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2022, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah 3,390 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Level 3 (Terdefinisi).
 - b) Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,08 atau telah memenuhi karakteristik Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada Level 3.
 - c) Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 3,09. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Sleman telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, sebagaimana ditetapkan dalam pedoman (Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D.
- 2) Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
Hasil Pemeriksaan dan Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tahun 2018 sampai 2022 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.134
Capaian Indikator Urusan Pengawasan Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah obyek pemeriksaan	94	121	71	83	73
2	Jumlah temuan inspektorat	103	119	22	14	38
3	Jumlah temuan inspektorat yang ditindaklanjuti	85	94	18	12	30
4	Persentase tindak lanjut temuan (%)	82,52	78,99	81,82	85,71	78,95
5	Jumlah temuan BPK	415	436	461	466	491
6	Jumlah rekomendasi BPK	818	848	902	936	965
7	Jumlah tindak lanjut sesuai rekomendasi BPK	807	778	787	815	917
8	Persentase tindak lanjut sesuai rekomendasi BPK (%)	98,66	91,74	87,25	87,07	95,03

Sumber: Inspektorat, 2023

Pada tahun 2022, jumlah temuan inspektorat naik signifikan menjadi 38 temuan dan jumlah temuan yang ditindaklanjuti sejumlah 30 temuan atau 78,95%. Jumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga meningkat, sejumlah 491 temuan, jumlah rekomendasi BPK sejumlah 965 rekomendasi dan rekomendasi BPK ini yang sudah ditindaklanjuti hanya 917 rekomendasi atau 95,03%.

Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan inspektorat mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena kepatuhan sebagian auditan masih rendah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan terutama bila terkait dengan pihak ketiga. Solusi yang telah dilakukan yaitu mengajak pimpinan auditan untuk berkomitmen segera menyelesaikan seluruh temuan/kelemahan hasil pemeriksaan internal dan eksternal; temuan inspektorat berkaitan piutang tak tertagih belum dapat ditindaklanjuti karena Pemerintah Kabupaten Sleman belum pernah melakukan penghapusan piutang. Solusi yang akan dilakukan, Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2023 akan melakukan penghapusan piutang dimulai dari piutang PBB.

Capaian indikator kinerja program unsur pengawasan urusan pemerintahan di Kabupaten Sleman tahun 2022 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.135
Capaian Indikator Kinerja Program pada Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2022

No	Program / Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				
	a. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%
	b. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100,00	100,00	100,00%
2	Program penyelenggaraan pengawasan				
	a. Persentase catatan/saran hasil review dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00%
	b. Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	%	86,00	86,99	101,15%
	c. Persentase nilai hasil audit kinerja perangkat daerah dengan kategori sangat baik	%	80,00	37,50	46,88%
	d. Persentase kasus/pengaduan yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00%
3	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi				
	a. Persentase perangkat daerah dengan tingkat maturitas spip ≥ 3	%	100,00	100,00	100,00%
	b. Persentase tingkat capaian monitoring center of prevention (mcp) kabupaten	%	87,00	94,27	108,36%

Sumber: Inspektorat, 2023



Pelaksanaan unsur pengawasan urusan pemerintahan didukung dengan anggaran Rp11.055.199.889,00 dan terealisasi sebesar Rp10.022.222.653,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan unsur pengawasan urusan pemerintahan sebesar 90,66%.

1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota didukung dengan anggaran sebesar Rp9.680.642.939,00 dan terealisasi Rp8.786.201.453,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan program 90,76%. Keberhasilan pelaksanaan program dapat dilihat dari capaian indikator kinerja program, sebagai berikut:

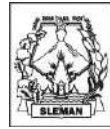
- a) Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran terealisasi 100,00% dari target sehingga capaian indikator kinerja program sebesar 100,00%.
- b) Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja terealisasi 100,00% dari target sehingga capaian indikator kinerja program sebesar 100,00%.

2) Program penyelenggaraan pengawasan

Anggaran pelaksanaan program penyelenggaraan pengawasan sebesar Rp680.709.000,00 dengan capaian kinerja keuangan 85,88% atau terealisasi sebesar Rp584.606.000,00. Keberhasilan pelaksanaan program dapat dilihat dari capaian indikator kinerja program, berikut:

- a) Persentase catatan/saran hasil review dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditindaklanjuti tercapai sebesar 100%. Inspektorat Kabupaten Sleman pada tahun 2022 melaksanakan review atas dokumen perencanaan dan penganggaran antara lain review Renstra, Renja/Renja Perubahan, RPJMD, RKPD/RKPD Perubahan, KUA-PPAS/KUA-PPAS Perubahan, RKA/RKA Perubahan. Catatan/saran atas review dokumen perencanaan dan penganggaran telah ditindaklanjuti seluruhnya oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah ataupun Organisasi Perangkat Daerah, sehingga capaian indikator kinerja sebesar 100%.





b) Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti dengan target 86,00% dan terealisasi 86,99% sehingga capaian indikator kinerja sebesar 101,15%. Hasil pemeriksaan adalah hasil pemeriksaan oleh BPK dan Inspektorat Kabupaten. Berdasarkan laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK)

Tabel 3.136
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK s.d. Tahun 2022

No	Uraian	s.d. Tahun 2022
1	Jumlah Temuan	491
2	Jumlah Rekomendasi	965
3	TL sesuai Rekomendasi	917
4	TL Belum sesuai Rekomendasi	46
5	TL Belum Ditindaklanjuti	1
	% Tindak lanjuti sesuai rekomendasi	95,03

Sumber : Inspektorat, 2023

(2) Tindak lanjut hasil pemeriksaan internal (APIP)

Tabel 3.137
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP s.d. Tahun 2022

No	Uraian	s.d. Tahun 2022
1	Jumlah Temuan	396
2	Jumlah Rekomendasi	575
3	TL sesuai Rekomendasi	454
4	TL Belum sesuai Rekomendasi	26
5	TL Belum Ditindaklanjuti	95
	% Tindak lanjuti sesuai rekomendasi	78,95

Sumber : Inspektorat, 2023

Capaian kinerja Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan rerata dari persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK) dan persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal (APIP) yaitu = $(95,03\% + 78,95\%) / 2 = 86,99\%$.

c) Persentase nilai hasil audit kinerja perangkat daerah dengan kategori sangat baik tercapai 46,88% dari target yang ditetapkan sebesar 80,00% dan terealisasi 37,50%. Dari 8 Perangkat Daerah yang dilakukan audit kinerja, 3 Perangkat Daerah yang memperoleh predikat sangat baik. Perangkat Daerah yang dilakukan audit belum semua memperoleh hasil audit dengan kategori sangat baik,





disebabkan beberapa auditan masih belum optimal dalam merealisasikan output dan kurangnya kelengkapan administrasi kegiatan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dengan cara melakukan pembinaan atas kinerja perangkat daerah.

d) Pengaduan yang diterima oleh Inspektorat pada tahun 2022 sebanyak 5 aduan dan seluruhnya telah ditindaklanjuti, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

3) Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi

Program perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi dilaksanakan dengan anggaran Rp693.847.950,00 dan terealisasi Rp651.415.200,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 93,88%.

a) Persentase perangkat daerah dengan tingkat maturitas spip ≥ 3 tercapai 100,00%. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Metode pengukuran indikator kinerja tersebut berdasarkan

$$= \frac{\text{jumlah perangkat daerah dengan tingkat maturitas SPIP} \geq 3}{\text{jumlah perangkat daerah yang dievaluasi oleh Inspektorat}} \times 100\%$$

Persentase perangkat daerah dengan tingkat maturitas SPIP ≥ 3 , target 100, terealisasi 100 sehingga capaian kinerjanya 100%

b) Persentase tingkat capaian *Monitoring Center of Prevention (MCP)* Kabupaten dengan target 87,00% terealisasi 94,27% sehingga capaian indikator kinerja sebesar 108,04%.

Monitoring Center of Prevention (MCP) adalah rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi difokuskan pada pembangunan sistem dan langkah-langkah perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk mengurangi resiko dan potensi korupsi di daerah serta dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, yang meliputi 8 area intervensi, yaitu :



- (1) Perencanaan dan Penganggaran APBD
- (2) Pengadaan Barang dan Jasa
- (3) Perizinan
- (4) Pengawasan APIP
- (5) Manajemen ASN
- (6) Optimalisasi Pajak Daerah
- (7) Manajemen Aset Daerah
- (8) Tata Kelola Dana Desa

Metode pengukuran indikator kinerja ini berdasarkan nilai capaian aksi pemberantasan korupsi terintegrasi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja unsur pengawasan yaitu:

1. Komitmen pimpinan dan ASN Inspektorat untuk meningkatkan kapabilitas APIP dengan mengimplementasikan *Key Process Area* dengan baik;
2. Melakukan *self assessment* secara berkala untuk menjaga dan memelihara kapabilitas APIP;
3. Komitmen tinggi dari para pimpinan instansi pemerintah Kabupaten Sleman dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dengan berusaha meningkatkan penguatan berbasis pengendalian internal;
4. Komitmen pimpinan dalam penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan aparat pengawas tepat waktu, hal ini memberikan gambaran pentingnya inventarisasi, monitoring dan evaluasi atas temuan hasil pemeriksaan yang telah dapat diselesaikan sesuai dengan rekomendasi;
5. Melaksanakan Pelatihan Kantor Sendiri guna menambah wawasan aparat pengawas bekerjasama dengan BPKP DIY sebagai nara sumber atau ASN/fungsional auditor yang diberi tanggungjawab untuk menyampaikan ilmu dan wawasannya terkait pemeriksaan/pengawasan yang lebih professional.



Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan unsur pengawasan urusan pemerintahan pada tahun 2022 antara lain:

- 1) Evaluasi berkala atas efektifitas pengendalian/pemantauan SPIP belum optimal. Upaya yang dilakukan dengan adanya komitmen Bupati dan Pimpinan Perangkat Daerah bahwa implementasi SPIP sebagai salah satu strategi dalam mempertahankan opini WTP.
- 2) Perangkat Daerah belum optimal dalam pemenuhan dokumen evaluasi reformasi birokrasi. Upaya mengatasi masalah dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung reformasi birokrasi.
- 3) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) belum berdasarkan Peraturan Deputi BPKP Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Berbasis Resiko. Tahun 2022 telah dilakukan pelatihan implementasi Peraturan Deputi BPKP Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Berbasis Resiko, kemudian pada tahun 2023 akan diterapkan program kerja berbasis resiko.
- 4) Tuntutan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mempertahankan opini WTP, peningkatan indeks reformasi birokrasi dan SAKIP.
- 5) Temuan BPK Tahun 2004 yang berkaitan kerugian daerah belum dapat ditindaklanjuti, disebabkan nama/alamat personil tidak lengkap, personil sudah meninggal dan ahli waris menyatakan tidak sanggup mengembalikan.
- 6) Temuan Inspektorat berkaitan piutang tak tertagih belum dapat ditindaklanjuti karena Pemerintah Kabupaten Sleman belum pernah melakukan penghapusan piutang.

Pengukuran kinerja pembangunan dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis. Pelaksanaan kegiatan pada urusan inspektorat tahun 2022 menunjukkan konsistensi/kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Target kinerja/keluaran dari setiap kegiatan telah mendukung pencapaian target indikator kinerja program yang telah ditetapkan sebagai perjanjian kinerja Perangkat Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, Renstra, RKPD, maupun APBD.



7. Unsur Kewilayahan

a. Kecamatan

Pada unsur kewilayahan, kecamatan di Kabupaten Sleman menggunakan istilah/nomenklatur kapanewon. Kabupaten Sleman terdiri dari 17 Kapanewon. Program dan kegiatan yang mendukung unsur kewilayahan dengan tingkat capaian kinerja secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.138
Capaian Indikator Kinerja Program pada Unsur Kewilayahan Tahun 2022

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				
	a. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%
	b. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100,00	100,00	100,00%
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				
	a. Persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam berita acara musrenbang kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita acara hasil musrenbang kapanewon	%	30,00	30,00	100,00%
	b. Persentase pelayanan perizinan selesai tepat waktu.	%	100,00	100,00	100,00%
3	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				
	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	30,00	30,00	100,00%
4	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum				
	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon	%	100,00	100,00	100,00%
5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				
	Persentase penanganan permasalahan yang terkait isu sara	%	100,00	100,00	100,00%
6	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				
	a. Persentase kalurahan menetapkan peraturan desa tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00%
	b. Persentase kalurahan yang melaksanakan siklus tahunan tepat waktu	%	50,00	50,00	100,00%

Sumber: Data diolah dari 17 kapanewon, 2023



Pelaksanaan unsur kewilayahan diampu oleh 17 (tujuh belas) kapanewon, yang didukung dengan anggaran Rp78.031.088.006,00 dan terealisasi Rp72.729.629.471,20 capaian kinerja keuangan 93,21%.

- 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
Alokasi anggaran pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Rp65.690.437.947,00 realisasi Rp60.732.374.622,65 capaian kinerja keuangan program 92,45%. Indikator persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dan persentase pemenuhan layanan sarana prasarana kerja 100,00%.
- 2) Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Alokasi anggaran pelaksanaan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sebesar Rp2.280.965.451,00 dengan realisasi sebesar Rp2.211.787.269,60 sehingga capaian kinerja keuangan program sebesar 96,97%. Persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam berita acara musrenbang kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita acara hasil musrenbang kapanewon dan persentase pelayanan perizinan selesai tepat waktu tercapai 100,00%.
- 3) Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
Alokasi anggaran pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sebesar Rp3.870.729.066,00 dengan realisasi sebesar Rp3.839.649.260,00 sehingga capaian kinerja keuangan program sebesar 99,20%. Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi 100,00%.
- 4) Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
Alokasi anggaran pelaksanaan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Rp3.120.533.198,00 dengan realisasi Rp2.907.090.187,40 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 93,16%. Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon tercapai 100,00%.



- 5) Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
Alokasi anggaran pelaksanaan program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebesar Rp1.656.599.221,00 dengan realisasi Rp1.635.347.381,00 atau sebesar 98,72%. Persentase penanganan permasalahan yang terkait isu SARA tercapai 100,00%.
- 6) Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
Alokasi anggaran pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sebesar Rp1.411.823.123,00 terealisasi sebesar Rp1.403.380.750,55 sehingga capaian kinerja keuangan 99,40%. Persentase kalurahan menetapkan peraturan desa dan siklus tepat waktu tercapai 100,00%.

8. Unsur Pemerintahan Umum

a. Kesatuan Bangsa dan Politik

Perangkat Daerah pelaksana unsur pemerintahan umum adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Unsur pemerintahan umum memiliki target capaian kinerja indikator kinerja Renstra perangkat daerah yaitu angka kejadian konflik, dimana dari target yang ditetapkan sebesar 0 kejadian terealisasi sebesar 0 kejadian sehingga tingkat capaian sebesar 100,00%.

Tabel 3.139
Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Angka Kejadian Konflik	Kejadian	0	0	100,00%

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2023

Konflik sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas



nasional dan menghambat pembangunan nasional sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Angka kejadian konflik sosial merupakan jumlah konflik sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Sleman dalam kurun waktu satu tahun.

Tabel 3.140
Capaian Indikator Kinerja Program pada Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2022

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				
	a. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%
	b. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100,00	100,00	100,00%
2	Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan				
	Jumlah kalurahan berkarakter Pancasila	kalurahan	16,00	16,00	100,00%
3	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik				
	a. Persentase penanganan kasus kerawanan bidang politik	%	100,00	100,00	100,00%
	b. Persentase partai politik penerima bantuan keuangan partai politik dengan kesimpulan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan kriteria yang berlaku	%	88,00	100,00	113,64%
4	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan				
	Persentase ormas dan LSM yang aktif	%	50,00	65,00	130,00%
5	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya				
	Persentase penanganan kasus kerawanan bidang ekonomi, sosial dan budaya	%	100,00	100,00	100,00%
6	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial				
	Persentase realisasi kinerja Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial (PKS)	%	80,00	80,00	100,00%

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2022

Pelaksanaan unsur pemerintahan umum menggunakan anggaran Rp.14.471.738.558,00 dan terealisasi Rp.13.691.900.019,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan urusan pemerintahan umum adalah 94,61%. Urusan pemerintahan umum didukung dengan beberapa program, dengan capaian indikator kinerja dan keuangan program, sebagai berikut:



- 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota menggunakan anggaran sebesar Rp.5.113.926.383,00 dan terealisasi Rp4.720.281.525,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan program sebesar 92,30%. Keberhasilan pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat dilihat dari capaian indikator kinerja program, yaitu persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dan persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja masing-masing tercapai 100,00%.
- 2) Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan
Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan didukung dengan anggaran Rp.942.791.212,00 dengan realisasi Rp.824.844.013,00 (87,49%). Capaian indikator kinerja program 100% berupa 16 kalurahan berkarakter Pancasila.
- 3) Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
Program ini dilaksanakan dengan menggunakan dukungan anggaran Rp2.415.719.703,00 dan terealisasi Rp2.319.440.050,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan program 96,01%.
 - a) persentase penanganan kasus kerawanan bidang politik dengan target 100,00% terealisasi 100,00% sehingga tingkat capaian indikator kinerja sebesar 100,00%; dan
 - b) persentase partai politik penerima bantuan keuangan partai politik dengan kesimpulan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan kriteria yang berlaku dari target 88,00% terealisasi 100,00% sehingga tingkat capaian kinerja 113,64%.
- 4) Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
Pelaksanaan program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan didukung dengan anggaran Rp.4.360.809.925,00 dengan realisasi Rp.4.328.133.250,00 (99,25%). Persentase ormas dan LSM yang aktif sebagai indikator kinerja program terealisasi 65,00% dari target 50,00% (130,00%).



- 5) Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya

Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya menggunakan anggaran Rp.838.701.429,00 dengan realisasi Rp.769.644.603,00 (91,77%). Capaian indikator kinerja program, yaitu persentase penanganan kasus kerawanan bidang ekonomi, sosial dan budaya dengan target 100,00% terealisasi 100,00% sehingga capaian indikator kinerja program 100,00%.

- 6) Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

Anggaran program sebesar Rp.799.789.906,00 dan terealisasi Rp.729.556.578,00 sehingga kinerja keuangan program sebesar 91,22%. Capaian indikator kinerja program, yaitu persentase realisasi kinerja Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial (PKS) dari target 80,00% terealisasi 80,00% sehingga tingkat capaian indikator kinerja program 100,00%.

Capaian kinerja keluaran kegiatan pada unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) secara terperinci tertuang pada Buku 2 Laporan Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum pada tahun 2022 antara lain:

- 1) Meningkatnya jumlah potensi konflik sosial sebanyak 30 kejadian. Tahun 2021 sebanyak 78 kejadian tahun 2022 sebanyak 108 kejadian. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sampai tahun 2022 baru terbentuk di 5 Kapanewon yaitu Kapanewon Tempel, Depok, Seyegan, Godean, Gamping;
- 2) Forum koordinasi antara pimpinan di wilayah Kabupaten Sleman dengan stakeholder belum optimal;
- 3) Belum optimalnya sistem integrasi data kesbangpol yang mampu mendukung pengambilan kebijakan, tata kelola pemerintahan belum berbasis teknologi informasi, sehingga perlu peningkatan tata kelola



yang berbasis teknologi informasi, sehingga perlu peningkatan tata kelola yang berbasis teknologi informasi, yang akan meningkatkan profesionalisme aparat dan meningkatnya partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah;

- 4) Adanya indikasi menurunnya rasa nasionalisme dan pemahaman wawasan kebangsaan di masyarakat, serta adanya indikasi pergerakan kelompok radikal kanan atau kiri;
- 5) Kurangnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat, masih kurangnya kesadaran masyarakat akan bela negara dan cinta tanah air;
- 6) Meningkatnya prevalensi penyalahgunaan NAPZA;
- 7) Belum optimalnya pemahaman masyarakat akan kehidupan demokrasi dan pemahaman tentang HAM sehingga tingkat partisipasi politik tidak maksimal; dan
- 8) Adanya organisasi masyarakat (ormas) yang tidak terdaftar pada pemerintah dan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, berpotensi meresahkan masyarakat;

Pengukuran kinerja pembangunan dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis. Pelaksanaan kegiatan pada unsur pemerintahan umum tahun 2022 menunjukkan konsistensi/kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Target kinerja/keluaran dari setiap kegiatan telah mendukung pencapaian target indikator kinerja program yang telah ditetapkan sebagai perjanjian kinerja Perangkat Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, Renstra, RKPD, maupun APBD

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pemerintah Kabupaten Sleman pada Tahun 2022 mengusung Tema Pembangunan yang masih diarahkan pada percepatan pemulihan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Sleman sebagai dampak adanya Pandemi Covid-19, yaitu **“Mempercepat Kebangkitan Ekonomi dan Pemulihan Kondisi Sosial Masyarakat Sleman”**.



Kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam pembangunan ekonomi tahun 2022 sebagai berikut:

1. Peningkatan nilai tambah ekonomi, melalui:
 - a. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), koperasi, industri kreatif dan ekonomi digital
 - b. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industri pengolahan
 - c. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi
 - d. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Pengembangan destinasi pariwisata berbasis alam, budaya, dan *meeting, incentive, convention, exhibition* (MICE)
3. Mendorong pertumbuhan dengan memperhatikan karakteristik masing-masing wilayah dengan arahan sebagai berikut:
 - a. Arah Pembangunan Wilayah Sleman Timur melalui:
 - 1) penataan permukiman yang mendukung wisata budaya peninggalan sejarah
 - 2) pengembangan sentra industri yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan teknologi tinggi menuju industri 4.0
 - b. Arah Pembangunan Sleman Tengah melalui:
 - 1) penataan permukiman perkotaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif prioritas (jasa pariwisata, jasa pendidikan, perdagangan jasa)
 - 2) pengembangan sentra industri yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan teknologi tinggi menuju industri 4.0
 - c. Arah Pembangunan Sleman Barat melalui:
 - 1) pengembangan relasi permukiman kota dan pedesaan untuk mendorong ekonomi kawasan berbasis pertanian modern, agrobisnis, dan agrowisata.
 - 2) pengendalian pembangunan untuk menekan laju alih fungsi lahan produktif.
 - 3) pengembangan sentra industri yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan teknologi tinggi menuju industri 4.0.



d. Arah Pembangunan Sleman Utara melalui:

- 1) penataan permukiman mendukung wisata alam yang berbasis kebencanaan
- 2) pengembangan sentra industri yang berorientasi ekspor
4. Mengentaskan kemiskinan, melalui akselerasi penguatan ekonomi keluarga
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing, melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kerjasama industri

Sebagai bentuk penterjemahan dari visi, misi Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan janji politik kepada masyarakat, maka diperlukan penyelarasan kebijakan strategis Bupati dan Wakil Bupati dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

1. Tata Kelola Pemerintahan dan Revolusi Mental

Tata kelola pemerintahan dan revolusi mental merupakan kebijakan penguatan dan pengembangan karakter, yang dilaksanakan dengan:

- a. mengembangkan budaya birokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
- b. pengembangan kegiatan pengembangan mental dan karakter melalui pendidikan formal dan informal.
- c. memberi subsidi pada gerakan partisipasi warga misalnya jaga warga, kerja bakti, relawan sosial.
- d. Kemah Pemuda Berjiwa Pancasila.

2. Sleman Beriman

Sleman beriman merupakan upaya penguatan kualitas penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dengan insentif/apresiasi bagi petugas berdedikasi yang mengelola tempat beribadah, bantuan peralatan dan perlengkapan rumah ibadah, dan bantuan penyelenggaraan perayaan hari-hari besar keagamaan.

3. Kalurahan Prima

Kalurahan prima merupakan kebijakan strategis yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas administrasi pemerintahan kalurahan, yang dilaksanakan melalui:



- a. meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan bpd;
- b. melakukan pembinaan dan pemberdayaan BUMDes;
- c. menyelenggarakan lomba desa;
- d. pemberian Bantuan Keuangan Khusus dan penyaluran Dana Desa

4. Internet Gratis

Kebijakan strategis internet gratis dilaksanakan dalam rangka pelayanan informasi dan komunikasi publik, yang dilaksanakan dengan:

- a. pengembangan pemanfaatan internet untuk pengembangan usaha rakyat
- b. pemasangan hotspot internet gratis pada tiap padukuhan
- c. literasi *sosial media* bagi masyarakat (cerdas bersosmed)

5. Sleman *Smart Regency*

Sleman *smart regency* dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dengan:

- a. mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat baik pelayanan perizinan maupun non perizinan
- b. mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
- c. penguatan teknologi informasi untuk administrasi pemerintahan

6. Sleman Cerdas

Kebijakan strategis sleman cerdas dimaksudkan untuk peningkatan pengelolaan pendidikan, yang dilaksanakan dengan:

- a. memberikan bantuan pendidikan bagi siswa miskin dan rentan miskin
- b. merehabilitasi fasilitas sekolah
- c. pengembangan dan pembinaan karakter siswa
- d. peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran *online*
- e. pengembangan perpustakaan digital.
- f. meningkatkan kompetensi guru
- g. pemberian apresiasi pada guru berdedikasi dan pengelola layanan pendidikan
- h. memberikan beasiswa/ bantuan pada guru (PNS dan Non PNS).



7. Sleman Sehat

Sleman sehat merupakan kebijakan strategis dalam rangka pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dengan:

- a. bantuan operasional kesehatan (BOK) pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, lansia
- b. pelayanan kesehatan penduduk miskin, rentan miskin, kader kesehatan, kader sosial, kader IMP dan anggota Linmas
- c. insentif/apresiasi bagi kader kesehatan berdedikasi, kader sosial berdedikasi

8. Puskesmas Prima

Kebijakan strategis puskesmas prima dilaksanakan dengan perluasan akreditasi puskesmas dan penambahan sarana dan prasarana dan jaringan pelayanan serta akses pelayanan daring puskesmas.

9. Sleman Juara

Sleman juara merupakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan prestasi, fasilitas olahraga, dan kepemudaan, yang dilaksanakan dengan:

- a. pembinaan dan pengembangan olah raga masyarakat
- b. mengembangkan kelas khusus olahraga
- c. apresiasi pada individu dan kelompok berprestasi dalam bidang olahraga
- d. mengembangkan daya saing kepemudaan

10. Sport Center Kalurahan

Kebijakan strategis ini dimaksudkan untuk membangun dan mengembangkan sarana olah raga dan seni di setiap kalurahan dan hibah/ pemberian peralatan olahraga ke kalurahan.

11. Koperasi dan UKM Maju

Kebijakan strategis ini dimaksudkan untuk pengembangan koperasi dan UMKM di Kabupaten Sleman, yang dilaksanakan melalui:

- a. fasilitasi akses Koperasi dan UKM terhadap subsidi pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19
- b. pendampingan Koperasi dan UKM untuk naik kelas
- c. membangun minat berusaha bagi generasi muda
- d. fasilitasi promosi produk daerah
- e. pengembangan industri produk ekspor dan substitusi impor.



12. Pasar Gumregah

Pasar gumregah adalah kebijakan strategis pengembangan pasar tradisional yang dilaksanakan dengan:

- a. merehabilitasi sarana dan prasarana pasar tradisional
- b. merehabilitasi sarana dan prasarana pasar tradisional
- c. pengembangan pasar *online* bagi pedagang pasar tradisional
- d. festival pasar rakyat, termasuk hadiah bagi pengunjung pasar tradisional
- e. penguatan Borong Bareng membeli produk loka

13. Wisata dan Desa Wisata Sleman

Kebijakan strategis ini ditujukan untuk pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilaksanakan dengan:

- a. mempercepat pemulihan pariwisata (promosi wisata aman covid)
- b. mengembangkan destinasi dan infrastruktur pariwisata
- c. mengembangkan desa wisata berbasis komunitas
- d. meningkatkan kapasitas SDM pariwisata, desa wisata dan ekonomi kreatif
- e. fasilitas promosi pariwisata baik internasional, Nasional, dan Desa wisata
- f. penyediaan sarana pendukung protokol Covid-19 pada destinasi wisata

14. Tani Makmur

Kebijakan strategis tani makmur merupakan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, yang dilaksanakan dengan:

- a. hibah/ pemberian sarana produksi pertanian (traktor dan jenis saprotan lain) untuk kelompok tani
- b. pelatihan dan pendampingan produktivitas pertanian
- c. pengembangan varietas tanaman lokal unggul
- d. peningkatan produktivitas tanaman, peternakan, perikanan berbasis kelompok
- e. pengembangan lumbung pangan desa
- f. penyediaan sarana dan prasarana pertanian
- g. pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pertanian
- h. pengembangan Beras Sleman (termasuk sembada merah dan hitam)
- i. pengembangan komoditas pertanian bernilai tinggi



- j. meningkatkan nilai tambah produk pertanian
- k. penyediaan dana penguatan modal petani

15. Tani Milenial

Kebijakan strategis tani milenial dimaksudkan untuk peningkatan minat generasi muda Bertani, yang dilaksanakan dengan:

- a. pelatihan dan pendampingan agroteknopreneur
- b. pengembangan minat bertani bagi generasi muda
- c. hibah/pemberian sarana produksi pertanian (traktor dan jenis saprotan lain) untuk komunitas tani muda.
- d. penyediaan modal usaha bagi tani muda.

16. Mal Pelayanan Publik

Kebijakan strategis Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan kebijakan untuk peningkatan layanan penanaman modal dan perizinan, yang dilaksanakan dengan memberikan insentif dan kemudahan bagi penanaman modal sektor usaha ramah lingkungan/industri hijau, penguatan mall perizinan, inovasi layanan penanaman modal, dan fasilitasi kemitraan investasi.

17. Bansos Sembada

Kebijakan strategis Bansos Sembada dilaksanakan sebagai upaya perlindungan sosial dan jaminan sosial, yang dilaksanakan dengan:

- a. membentuk kampung siaga bencana
- b. menguatkan kelembagaan Tim Penanggulangan Kemiskinan.
- c. memfasilitasi warga untuk akses bansos yang bersumber dari pemerintah (APBN, APBD) dan swasta (CSR).
- d. memperkuat basis data kemiskinan dan penanganan sosial menggunakan teknologi informasi.
- e. Memperluas cakupan kartu miskin

18. Sleman Inklusi

Kebijakan strategis Sleman inklusi merupakan upaya pemberdayaan disabilitas yang dilaksanakan melalui:

- a. pemberdayaan ekonomi dan sosial penyandang disabilitas
- b. penanganan masalah sosial (anjak, gelandangan, pengemis, psikotik, lansia, anak terlantar, difabel, serta fakir miskin)



- c. memberikan bantuan sosial untuk lansia, anak terlantar, dan penyandang disabilitas.
- d. memastikan fasilitas publik yang ramah difabel
- e. Pengembangan sekolah inklusi

19. Sleman Produktif

Sleman produktif merupakan kebijakan strategis dalam rangka pengelolaan tenaga kerja yang dilaksanakan dengan meningkatkan kapasitas tenaga kerja melalui magang dan pelatihan dan pembinaan lembaga pelatihan kerja.

20. Cipta Kerja

Kebijakan strategis cipta kerja adalah upaya untuk Peningkatan Kesempatan Kerja di Kabupaten Sleman yang dilaksanakan dengan pengembangan informasi pasar kerja (*job fair*) dan apresiasi pada perusahaan yang memperluas kesempatan kerja baru.

21. Sleman Kreatif

Sleman kreatif merupakan upaya pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Sleman, yang dilaksanakan melalui:

- a. perluasan rumah kreatif pada tingkat kapanewon
- b. pengembangan studio animasi (*Animation Park*).
- c. fasilitasi akses industri kreatif terhadap subsidi pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

22. Sleman Tangguh

Kebijakan strategis sleman tangguh dimaksudkan sebagai upaya pengelolaan berbagai macam bencana dan ancaman, yang dilaksanakan dengan:

- a. membangun tatanan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi segala macam bencana dengan membentuk desa tangguh bencana, sekolah siaga bencana
- b. membangun sarana dan prasarana mitigasi bencana
- c. menciptakan sistem pembiayaan yang responsif dan antisipatif terhadap terjadinya bencana
- d. meningkatkan intensitas konsolidasi gugus tugas penanganan Covid-19 hingga level padukuhan berbasis manajemen krisis
- e. memperluas sosialisasi pencegahan penularan Covid-19.



- f. pengembangan sistem informasi kebencanaan daerah
 - g. memproduksi dan membagi secara gratis APD masker pada masyarakat Sleman dalam jumlah yang cukup
 - h. perlindungan pada para petugas medis dan keluarganya dari resiko tertular Covid-19
 - i. menambah sarana dan prasarana isolasi bagi pasien terinfeksi Covid-19
 - j. memberikan insentif / Apresiasi pada relawan kebencanaan tingkat desa
23. Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air bersih dan air minum merupakan kebijakan strategis yang dilaksanakan dengan:
- a. meningkatkan pengelolaan air bersih dan menyediakan air bersih perpipaan bagi masyarakat terutama di daerah langka air tanah
 - b. memfasilitasi perusahaan daerah untuk mengembangkan layanan di kawasan perkotaan
 - c. pengembangan PAM berbasis masyarakat (PAMSIMAS)
24. Dusun Asri
- Kebijakan strategis dusun asri merupakan kebijakan pengembangan permukiman, yang dilaksanakan dengan:
- a. menciptakan kondisi permukiman yang nyaman
 - b. penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur dasar kawasan permukiman
 - c. penataan kawasan permukiman kumuh
 - d. rehabilitasi rumah tidak layak huni dan bedah rumah gratis
25. Dalan Alus
- Dalan alus merupakan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan jalan, yang dilaksanakan dengan pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
26. Sleman Lestari
- Sleman lestari merupakan kebijakan strategis dalam rangka pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup:
- a. monitoring dan pengawasan terhadap kualitas lingkungan
 - b. mengembangkan sistem pengelolaan sampah dan limbah cair yang baik
 - c. mengembangkan ruang terbuka hijau (RTH)
 - d. penumbuhan bank sampah tiap desa.



27. Perlindungan Perempuan dan Anak

Perlindungan perempuan dan anak dimaksudkan untuk Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan sosialisasi regulasi terkait KDRT kepada Masyarakat dan mengimplementasikan keluarga sadar gender dan Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan.

28. Perempuan Tangguh

Perempuan tangguh merupakan upaya untuk mewujudkan perlindungan dan peningkatan kualitas perempuan, yang dilaksanakan melalui insentif/ apresiasi pada kader PKK berdedikasi dan peningkatan kesehatan reproduksi

29. Keluarga Berdaya

Keluarga berdaya adalah upaya mewujudkan peningkatan kualitas keluarga, yang dilaksanakan dengan:

- a. hibah/pemberian peralatan budidaya pertanian lahan sempit.
- b. hibah/pemberian bibit tanaman buah dan sayuran, benih ikan, dan pupuk organik untuk kemandirian pangan keluarga
- c. meningkatkan peran keluarga dalam menghadapi berbagai ancaman & bencana
- d. pembinaan desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri)

30. Kota Ramah Anak

Kota ramah anak merupakan upaya perlindungan anak dan peningkatan sarana prasarana umum yang ramah anak, yang dilaksanakan dengan:

- a. pencegahan kekerasan terhadap anak
- b. penanganan anak yang memerlukan perlindungan dan kebutuhan khusus
- c. mengembangkan minat seni, olahraga, dan ketrampilan khusus bagi anak

31. Sleman Berbudaya dan Jaga Keistimewaan

Sleman berbudaya dan jaga keistimewaan merupakan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan, yang dilaksanakan dengan:

- a. membangun sarana seni di setiap desa
- b. mengembangkan sanggar seni setiap desa
- c. insentif/apresiasi bagi pelaku seni berprestasi dan individu/kelompok pelestari dan inovasi pengembang seni budaya lokal.
- d. pelaksanaan festival dan gebyar seni budaya Sleman



- e. mendukung status istimewa DIY
- f. menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa
- g. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan keistimewaan

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sleman melaksanakan 10 (sepuluh) Paket Strategis, sebagai berikut:

1. Belanja Modal Konstruksi Bangunan PICU RSUD Prambanan dengan nilai kontrak Rp2.615.494.494,00 dengan capaian kinerja fisik dan keuangan 100,00%.
2. Pembangunan/Revitalisasi Sarana Terpadu Sentra IKM (Sentra Jadah Tempe) dengan nilai kontrak Rp5.047.396.299,00 dengan capaian kinerja fisik dan keuangan 100,00%.
3. Pembangunan Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) dengan nilai kontrak Rp66.327.731.000,00. Proyek pembangunan dilaksanakan *multi years* 2022-2023, pada akhir tahun 2022 capaian kinerja fisik 45,50% dan kinerja keuangan 40,00%.
4. Pembangunan Gedung Kapanewon Moyudan dengan nilai kontrak sebesar Rp 6.789.992.978,38. Proyek ini melewati tahun anggaran 2022 dengan cut off 92,82%, sisanya dibayarkan ABT tahun anggaran 2023.
5. Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 2 Line dengan nilai kontrak Rp4.758.031.000,00 dengan realisasi fisik dan keuangan 100,00%.
6. Pembangunan Jembatan Merah Prayan dengan nilai kontrak Rp6.151.152.000,00 dengan realisasi fisik dan keuangan 100,00%.
7. Pembangunan Jaringan Distribusi Utama SPAM Regional Sleman 1 dengan nilai kontrak Rp3.460.758.000,00 dengan realisasi fisik dan keuangan 100,00%.
8. Pembangunan Jalan paket Glondong – Tegalrejo dengan nilai kontrak Rp9.731.465.000,00 dengan realisasi fisik dan keuangan 100,00%.
9. Pematangan Lahan Taman Budaya Sleman dengan nilai kontrak Rp2.513.207.000,00 dengan realisasi fisik dan keuangan 100,00%.
10. Rehab Jaringan Irigasi DI Kaliputih dengan nilai kontrak Rp4.415.214.000,00 dengan realisasi fisik dan keuangan 100,00%.



C. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

Tabel 3.141

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sleman Tahun Anggaran 2021

N	REKOMENDASI DPRD	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	RENCANA TINDAK LANJUT PADA TAHUN ANGGARAN 2022
A. BIDANG PEMERINTAHAN			
1	Perlu penguatan dan peningkatan kapasitas SDM Aparatur Sipil Negara dalam mengelola tata pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga diharapkan mampu meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat;	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Mengikutsertakan PNS dalam pengembangan kompetensi yang dilaksanakan melalui Pelatihan Klasikal maupun Non Klasikal minimal 20 jpl/ASN/tahun yang sudah disusun dalam Analisis Kebutuhan Diklat sebagai berikut: 1. Pengiriman diklat teknis 91 orang 2. Pengiriman pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang jasa 74 orang 3. Penyelenggaraan Pelatihan Analisis Jabatan 30 orang 4. Penyelenggaraan Pelatihan Bahasa Jawa bagi Guru SD 30 orang 5. Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Kepegawaian 30 orang 6. Penyelenggaraan Pelatihan Orientasi CPNS 167 orang 7. Pengiriman Latihan Dasar CPNS 167 orang 8. Pengiriman Diklat Calon Kepala Sekolah 30 orang 9. Pengiriman diklat fungsional 10 orang 10. Pengiriman Diklat Kepemimpinan Administrator 18 orang 11. Pengiriman Diklat Kepemimpinan Nasional 2 orang 12. Pengiriman Diklat Kepemimpinan Pengawas 10 orang 13. Pengiriman diklat tenaga kesehatan 75 orang 14. Pengiriman diklat tenaga pendidikan 60 orang.
2	Mendorong penegakan Peraturan Daerah yang menjamin adanya ketentraman dan ketertiban umum agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas di ruang publik;	Satuan Polisi Pamong Praja	1. Tetap terus Melaksanakan Patroli Wilayah terutama di obyek-obyek Vital Kabupaten Sleman untuk tetap menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dilaksanakan 3 kali sehari (1095 kali setahun) 2. Lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap Perizinan Usaha, baik itu usaha perdagangan dan jasa (Perdagangan, Pemandoran dan usaha lainnya) 3. Lebih meningkatkan lagi terkait tindak lanjut aduan yang disampaikan masyarakat baik itu melalui Lapor Sleman atau langsung ke Satpol PP terutama yang menyangkut Trantibumlinmas. 4. Lebih meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta operasi peredaran Minuman beralkohol (MINOL) 5. Melaksanakan operasi bersama Pemberantasan BKC Illegal 6. Melaksanakan Operasi Penutupan Papan Reklame tanpa izin (illegal)



3	Mendorong lebih intens keterlibatan Linmas dalam penegakan Peraturan Daerah yang berhubungan dengan ketertiban umum;	Satuan Polisi Pamong Praja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Linmas di 17 Kapanewon dan mendorong keterlibatan Satlinmas Desa dalam penegakan peraturan desa. 2. Mendorong Satlinmas Inti Kabupaten yang telah dibentuk di tingkat Kabupaten untuk membantu Patroli wilayah yang dilaksanakan Satpol PP.
4	Menjaga komitmen dan konsistensi dari pelibatan perempuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan agenda-agenda strategis pembangunan di Sleman agar orientasi pembangunan yang berjalan lebih humanis dan mendorong eksistensi perempuan di ruang public.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Rencana tindak lanjut yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 untuk pelibatan perempuan sebagai bagian dari pembangunan dan pengambilan keputusan dan mendorong eksistensi di ruang public dengan mengadakan lanjutan pendidikan politik bagi perempuan yang masih belum mengikuti ditahun sebelumnya Anggota GOW Kab. Sleman dan Anggota DWP Kab. Sleman dan pelatihan citra diri dan public speaking untuk perempuan yang menysasar pada pendamping Kapanewon, Kader Kalurahan. Selain itu dalam upaya agar orientasi pembangunan yang berjalan lebih humanis dan mendorong eksistensi perempuan di ruang public dengan masih berlanjutnya pendampingan penyusunan POKJA PUG Kalurahan dan rencana aksi PUG Kalurahan yang belum menysasar seluruh Kalurahan, Temu forum PUG di 4 Bidang (Tenaga Kerja, Lingkungan Hidup, Budaya dan Pariwisata). Serta telah dilakukan implementasi keluarga sadar gender dan sosialisasi PUG bagi karang taruna dan dilaksanakan sosialisasi PERDA PUG dengan menysasar OPD, intansi vertikal dilingkungan Kabupaten Sleman.
5	Komitmen dalam implementasi atas amanat Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang secara umum menysasar kepada perempuan dan anak-anak.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	<p>Rencana tindak lanjut yang dilaksanakan pada tahun 2022 untuk menjaga komitmen dalam implementasi atas amanat Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang secara umum menysasar kepada perempuan dan anak-anak kurang lebih kegiatannya sama dengan yang dilakukan pada tahun 2021, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melanjutkan kegiatan Preventif lewat Puspaga Kesengsem Kabupaten dan puspaga Kalurahan Wedomartani dan Margodadi 2. Penguatan HWDI, Penguatan TPPO 3. Penguatan FPKK 4. Sosialisasi UU PKDRT dan TPPO dengan sasaran peserta yang berbeda dari tahun 2021 5. Terdapat 1 kegiatan tambahan yaitu adanya Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (Ktp) dan TPPO. <p>Selain itu juga dilakukan upaya penambahan anggaran agar kegiatan dapat menjangkau lebih luas sasaran</p>
6	Menginisiasi agenda atau program-program yang bertemakan ketahanan keluarga, baik pada aspek sosial maupun ekonomi.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Lebih meningkatkan lagi program-program yang bertemakan ketahanan keluarga sehingga sasaran kita lebih luas dan optimal
7	Melakukan inovasi dalam pelayanan administrasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Dan Pemberian Penghargaan Pelaksanaan Gerakan Indonesia Sadar



<p>kependudukan dan pencatatan sipil, agar proses pelayanan lebih cepat dan mudah</p>		<p>Administrasi Kependudukan Di Kapanewon, Kalurahan, Dan Padukuhan. Inovasi evaluasi dan pemberian penghargaan kepada kecamatan/kapanewon, desa/kalurahan, dusun/padukuhan ini dilakukan bagi kecamatan/kapanewon/padukuhan yang penduduknya sadar memiliki dokumen kependudukan dan senantiasa memutakhirkan data kependudukan serta aparat memberikan pelayanan yang membahagiakan. Melalui inovasi ini diharapkan dapat memacu pemerintah kalurahan dan kecamatan meningkatkan daya saing dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan masing-masing wilayahnya.</p> <ol style="list-style-type: none">2. SOLAH SAE dilatarbelakangi pemenuhan hak anak untuk memiliki identitas penduduk berupa Kartu Identitas Anak (KIA). Inovasi ini hadir melalui kolaborasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dengan sekolah-baik di lingkup Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama. Memperhatikan potensi yang ada, kegiatan inovasi ini berkembang dengan pelayanan perekaman wajib KTP-el PEMULA bagi siswa sekolah yang sudah berusia 17 tahun dan penduduk Sleman. Manfaat dari inovasi ini antara lain: 1) meningkatkan cakupan kepemilikan KIA; 2) menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengurus KIA; 3) meningkatkan sinergitas antara Disdukcapil, Dinas Kependidikan, wali siswa dan siswa dalam membangun karakter sadar adminduk; dan 4) Pelayanan KIA lebih cepat dan mudah.3. FASPINDUK merupakan pelayanan fasilitasi pindah penduduk yang sudah berjalan sejak tahun 2018. Pelayanan ini memberikan kemudahan bagi penduduk yang berasal dari luar daerah yang akan masuk menjadi penduduk Sleman. FASPINDUK dapat diperoleh dengan mengajukan surat permohonan kepada Disdukcapil Kabupaten Sleman dengan melampirkan persyaratan berupa KK. Selanjutnya Disdukcapil Kabupaten Sleman akan melakukan koordinasi dengan Disdukcapil kab/kota asal dari pemohon untuk dilakukan penerbitan SKPWNI. SKP WNI tersebut akan menjadi dasar pemindahan penduduk masuk Kabupaten Sleman.4. Pelayanan jemput bola menjelang safari sholat Jumat Bupati bersama anggota forkompinda beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Sleman (JAFAR BERKAH) diselenggarakan bagi penduduk di dusun/padukuhan lokasi masjid. Dokumen kependudukan diserahkan setelah pelaksanaan sholat Jumat. Inovasi pelayanan ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan yang
---	--	---



		<p>lengkap dan akurat melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat di wilayah, dalam hal ini safari salat jumat.</p> <p>5. JAFAR BERKAH ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 23.1/Kep.Ka.Din/2022 tentang Inovasi Pelayanan Jemput bola Dokumen Kependudukan Menjelang Safari Salat Jumat Bupati Bersama Anggota FORKOMPINDA dan Jajaran Pemerintah Kabupaten Sleman. Pos/tempat alternatif bagi penduduk untuk mengajukan permohonan akta kelahiran dan akta kematian melalui petugas yang ditunjuk oleh Lurah dan Pimpinan Fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit, Klinik) yg telah menjalin kerjasama dengan Disdukcapil.</p> <p>6. YANDUK DARING merupakan pelayanan dokumen kependudukan secara daring website: dukcapionline.slemankab.go.id. Penerapan YANDUK DARING melalui dukcapionline versi 2 dimulai dengan pembukaan akses kepada masyarakat mulai hari Senin, 28 November 2022 pukul 12.00 WIB. Jumlah akun pengguna YANDUK DARING pada dukcapionline versi 2 adalah 4.167.</p> <p>7. KLINIK CAPIL (Konsultasi dan Informasi Permasalahan Dokumen Pencatatan Sipil) merupakan layanan bagi penduduk yang memiliki permasalahan atau membutuhkan informasi khusus dokumen pencatatan sipil. Mekanisme pelayanan ini adalah penduduk mengisi permohonan melalui link google form yang terdapat di web Disdukcapil Kabupaten Sleman dengan mengisi data identitas dan permasalahan/informasi yang diperlukan. Kemudian penduduk akan dikonfirmasi melalui wa untuk agenda pertemuan/konsultasi tatap muka dengan petugas yang memiliki kewenangan sesuai permasalahan yang disampaikan.</p> <p>8. SI GARUDA (Siaga Antar Dokumen Kependudukan Anda) adalah pelayanan pengantaran dokumen administrasi kependudukan melalui jasa pengiriman. Pelayanan melalui SI GARUDA diberikan pada masyarakat mulai 12 Desember 2022. Layanan antar dokumen dapat diperoleh apabila pemohon tidak memiliki email. Saat pengajuan berkas permohonan melalui loket, pemohon mengisi berkas permohonan layanan antar. Selanjutnya petugas akan memproses permohonan dan berkoordinasi dengan jasa pengiriman.</p>
	Kapanewon Gamping	Inovasi kado manten dilaksanakan lebih baik lagi agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga masyarakat Kapanewon Gamping
	Kapanewon Godean	Sosialisasi administrasi kependudukan, monitoring/ Pembinaan adminduk ke lokasi, SISIR ADMINDUK di



			kalurahan Sidoarum dan lokasi Monev Adminduk di Padukuhan Sebaran, Sidoarum, Godean.
		Kapanewon Moyudan	Meningkatkan sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan sasaran Warga Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, PKK, Dukuh, Lurah dan Pamong Kalurahan.
		Kapanewon Minggir	Sosialisasi administrasi kependudukan Monitoring/ Pembinaan adminduk ke lokasi SISIR ADMINDUK
		Kapanewon Seyegan	Kapanewon Seyegan mengembangkan Inovasi Kado Manten (KK dan KTP Elektronik) dan Inovasi LUKADESI (Keluarga Berduka Desa Siaga) yaitu pemberian akte kematian dilengkapi dengan KK dan KTP Elektronik yang dilaksanakan bulan Februari 2022 dan dianggarkan dalam DPA Kapanewon Seyegan
		Kapanewon Mlati	<ol style="list-style-type: none">1. Kado Manten (inovasi dibidang adminduk dengan memberikan KTP berstatus kawin bagi warga Mlati yang melangsungkan pernikahan di wilayah Mlati, KTP diserahkan langsung pada saat hari akad nikah)2. Satu Hati (Sinergi Aksi untuk Sejahterakan Mlati) merupakan inovasi dalam penanganan masalah sosial di Kapanewon Mlati yang semula dilakukan secara sepihak, menjadi langkah sinergis yang kolaboratif & melibatkan multistakeholder, penanganan masalah sosial tidak terbatas pada Kapanewon Mlati, namun meluas dengan melibatkan berbagai pihak berkompeten yang berimplikasi pada perluasan jangkauan ketercakupan permasalahan, hingga permasalahan sosial yang bersifat insidental & memerlukan penanganan cepat dan tepat antara lain pemberian paket sembako dan pemberian santunan bagi anak yatim
		Kapanewon Depok	<ol style="list-style-type: none">1. Pengiriman dokumen bagi difabel dan lansia minimal 2 kali seminggu2. Penambahan computer dan printer untuk layanan SIPAKDE (Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kapanewon Depok)3. Penambahan sarpras untuk layanan mandiri (melakukan aplikasi sendiri di kantor Kapanewon)
		Kapanewon Prambanan	Inovasi sidang isbat dengan pelayanan terpadu 1 atap dengan memberikan KK baru, KTP baru, dan akta nikah. Inovasi berupa pemberian pelayanan, pemberian rekomendasi akta nikah, akta kematian
		Kapanewon Kalasan	Pelaksanaan Inovasi Laki Pasutri. Kapanewon Kalasan dalam rangka peningkatan pelayan tertib administrasi kependudukan membuat inovasi baru yang diberi nama LAKI PASUTRI (Layanan Administrasi Kependudukan Pasangan suami Istri) untuk KTP elektronik dan KKnya yaitu pemberian Bingkisan bagi pengantin baru setelah akad nikah mendapatkan KTPel dan KK baru, diserahkan ditempat akad nikah sebagai Bingkisan Pengantin dari Kapanewon Kalasan. Pasangan suami istri berasal dari warga yang tinggal di Kalasan. Kelebihan inovasi ini pelayanan cepat, Legal dan istimewa. Inovasi menjalin Kerjasama dengan KUA Kapanewon kalasan,



			Kalurahan-kalurahan di Kapanewon kalasan, Serta Dinas DukCapil Sleman. Sampai dengan bulan mei 2022 sudah ada 4 pasangan pengantin yang sudah menerima hasil inovasi Laki Pasutri
		Kapanewon Ngemplak	Tetap menjalankan inovasi Pratudaman dan Kado Manten. Ditambah dengan inovasi melakukan sosialisasi dokumen kependudukan pasca keputusan pengadilan agama. Selain itu Kapanewon Ngemplak juga melakukan inovasi jemput bola perekaman KTP khusus ODGJ, manula, sakit berat dan penduduk non permanen. Inovasi dari Kabupaten juga dijalankan dengan mendapatkan Juara 2 tingkat Kapanewon Kelompok A.
		Kapanewon Ngaglik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka layanan administrasi perubahan elemen data pada Kartu Keluarga melalui WhatsApp (WA) 2. Diselesaikan dalam waktu 3 hari. 3. Membuka pelayanan khusus update data dan penerbitan KK dan KTP baru bagi penduduk yg melakukan perkawinan pertama – 1 hari
		Kapanewon Sleman	Inovasi "Tandha Tresna" dilakukan lebih masif agar kemanfaatannya dapat dirasakan oleh seluruh warga masyarakat Kapanewon Sleman
		Kapanewon Pakem	Inovasi Pakem Mangayubagyo dan merencanakan inovasi baru monitoring pelayanan adminduk
		Kapanewon Cangkringan	<p>Telah terlaksana kegiatan dari inovasi kado manten dan 3 jam buat sweet seventeen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2022 upaya yang dilakukan untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat terutama dalam layanan Adminduk adalah melaksanakan inovasi yang selama ini dikembangkan melalui Kado manten dan sweet seventeen (3 jam) Katerku, KTP elektronik melalui digitalisasi layanan kependudukan. 2. Menjalin komunikasi dengan dukuh di padukuihan untuk selalu menampung permasalahan adminduk di wilayah kapanewon Cangkringan 3. Melakukan terobosan-terobosan melakukan pengembangan inovasi agar adminduk di kapanewon lebih sistematis, dengan penjelasan waktu yang sesingkat-singkatnya
8	Implementasi atas amanah Peraturan Daerah tentang BUMDes harus menjadi prioritas agar BUMDes-BUMDes yang sudah lahir tidak "mati suri" dan sesuai dengan tujuan dihadirkan BUMDes yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya pemberdayaan sosial-ekonomi;	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Mengadakan pembinaan BUMKal dan pelatihan SDM pengelola BUMKal sebagai implementasi atas amanah Peraturan Daerah tentang BUMDes serta pelatihan pendaftaran Badan Hukum BUMKal
		Kapanewon Gamping	Dilaksanakan pembinaan kepada BUMDesa yang ada di Kapanewon Gamping
		Kapanewon Godean	Pendampingan revitalisasi kepengurusan BUMDES dan pemberdayaan BUMDES dalam ikut mengelola Aset Desa/Kalurahan dengan optimalisasi Unit Usaha yang dikelola BUMDES Pembinaan dan Sosialisasi Badan Hukum BUMDES sehingga sesuai dengan UU Cipta Kerja



		Kapanewon Moyudan	Pembinaan dan pendampingan BUMDes yang sudah ada: <ol style="list-style-type: none">1. Sudah dilakukan pembinaan atau peningkatan kapasitas pengelola dan stockholder terkait BUMDes, dalam hal "Penguatan kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Usaha BUMDes (melalui Anggaran PUPM untuk mendukung kebijakan secara teknis dan anggaran Kapanewon untuk memfasilitasi kegiatan BUMDes, yang PUPM sudah Dilaksanakan boleh Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Sleman selama tiga bulan (Bimtek 3 hari, pendampingan 2 bulan dan evaluasi 1 bulan)2. Anggaran Kapanewon Moyudan melalui Kegiatan Peningkatan SDM pengelola BUMDes.
		Kapanewon Minggir	<ol style="list-style-type: none">1. Pendampingan revitalisasi kepengurusan BUMDES dan pemberdayaan BUMDES dalam ikut mengelola Aset Desa/Kalurahan dengan optimalisasi Unit Usaha yang dikelola BUMDES2. Pembinaan dan Sosialisasi Badan Hukum BUMDES sehingga sesuai dengan UU Cipta Kerja
		Kapanewon Seyegan	Kapanewon Seyegan memotivasi kalurahan yang belum melaksanakan kegiatan pelatihan BUMDes untuk mengusulkan kegiatan pelatihan dengan mengusulkan kegiatan melalui anggaran PUPM
		Kapanewon Mlati	Mendorong Pemerintah Kalurahan untuk: <ol style="list-style-type: none">1. Kalurahan Sinduadi (SINDU MANDIRI), dengan potensi unggulan desa/pasar desa bidang usaha BUMDESA Jasa dan Perdagangan Jenis Usaha Sindu Water2. Kalurahan Tlogoadi (TLAGA USAHA MANDIRI) yang sedang berproses sedangkan3. Kalurahan Tirtoadi (TIRTA MAS) potensi unggulan desa Kerajinan bambu, Desa Wisata4. Kalurahan Sumberadi (SUMBER MAKMUR) Water5. Kalurahan Sendangadi (SENDANG MAKMUR) potensi unggulan Desa Home Industri dan Wana Desa Bidang Usaha BUMDESA Jasa dan Perdagangan6. Agar BUMDES semakin maju dan berkembang sesuai bidang usaha yang dilakukan dimasing-masing kalurahan
		Kapanewon Depok	<ol style="list-style-type: none">1. Mendorong Pemkal Condongcatur untuk segera melakukan pembentukan BUMDes karena sudah ada unit usaha yang berjalan (pertashop)2. Memotivasi kalurahan Maguwoharjo untuk melaksanakan pengelolaan BUMDes3. Mendorong/ pendampingan Kalurahan Caturtunggal segera melakukan pembentukan BUMDesa
		Kapanewon Prambanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pendampingan pembentukan BUMDesa2. Peningkatan kapasitas pengurus BUMDesa
		Kapanewon Kalasan	Untuk Tahun 2022, Jawatan Praja melaksanakan Bimtek bagi Bumdes yang ada di Kalurahan agar keberadaannya bisa memberikan manfaat bagi



			masyarakat luas. Kalurahan Selomartani telah membentuk BUMDes dalam pengelolaan pasar desa.
		Kapanewon Ngemplak	Kapanewon Ngemplak aktif melakukan pembinaan Bumdes dengan cara: 1. Menganggarkan pembinaan dalam DPA Jawatan Praja Kapanewon Ngemplak; 2. Melakukan pembenahan Bumdes meliputi kelembagaan, infrastruktur organisasi, dan unit usaha Bumdes;
		Kapanewon Ngaglik	Melakukan pembinaan ke 6 Kalurahan (masing-masing 2 kali dan 1 kali laporan) dalam setahun. Pembinaan, bekerjasama dengan Dinas Koperasi.
		Kapanewon Sleman	Seluruh BumDes didorong untuk terus mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal dimana pada tahun 2022 iBumDes di Triharjo sedang mengembangkan sub unit BumDes baru yang artinya diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru bagi warga.
		Kapanewon Pakem	1. Pembinaan rutin pengelola BUMDes 2. Monitoring rutin pengelola BUMDes 3. Evaluasi rutin pengelola BUMDes 4. Rapat Koordinasi rutin pengelola BUMDes se-Kapanewon 5. Mendorong peran Pemkal dalam penyertaan modal BUMDes 6. Mendorong terbentuknya BUMDes di 1 Kalurahan
		Kapanewon Cangkringan	1. Untuk kalurahan glagaharjo pada tahun 2022 kegiatan yang dilakukan penguatan peningkatan kapasitas, penyaringan manajemen BUMKal/BUMDes, serta pemantauan dan pelatihan BUMKal dengan menggunakan anggaran APBKal 2. Pada tahun 2023 kalurahan glagaharjo akan melakukan pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan legalisasi pengelolaan BUMKal, selain pemberian modal dan sosialisasi pemberian BUMKal 3. Untuk kalurahan Umbulharjo pada bulan November tahun 2022 telah terbit surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan dan penguatan peningkatan kapasitas melalui bimtek, lokakarya, dan sosialisasi. 4. Pada tahun 2023 Bumkal Umbulharjo kegiatan yang dilakukan penyertaan modal BUMKal bagi anggota dan dilaksanakan pelatihan untuk mendukung BUMKal 5. Untuk kalurahan Umbulharjo pada tahun 2022 rencana akan membentuk BUMKal , kondisi saat ini tahun 202
9	BUMDes-BUMDes eksisting yang mengalami persoalan dalam hal SDM maupun permodalan harus segera didampingi dan dicarikan solusi;	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan melakukan pendampingan dan memfasilitasi pengajuan penguatan modal Pertashop 20 BUMKal
10	Mengalokasikan anggaran untuk penanganan kasus	Dinas Pemberdayaan Perempuan,	1. Menggeser beberapa anggaran kegiatan yang outputnya bisa dilaksanakan setelah perubahan



	klitih, sebagaimana yang kita tahu saat ini semakin marak terjadinya kasus klitih yang terjadi di masyarakat. Hal ini perlu mendapatkan penanganan khusus;	Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	anggaran untuk digunakan mensupport kegiatan Satgas Penanganan Kejahatan Jalanan. 2. Upaya menambahkan anggaran pada perubahan anggaran Tahun 2022. 3. Anggaran untuk Pencegahan kekerasan anak lewat Fungsi Forum Anak 2 P (Pelapor dan Pelopor) Forum Anak Kabupaten dan Forum anak kapanewon lewat anggaran PUPM dan POKIR sejumlah Rp 808.750.555,-
		Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Telah dibentuk satgas pencegahan kejahatan anak di jalanan baik dari segi promotif, preventif, rehabilitasi sosial, deteksi dini, penegakan. Selain itu, telah disusun rencana aksi dari masing-masing pokja. Aksi tersebut juga telah dilaksanakan di tahun 2022.
		Badan Keuangan dan Aset Daerah	Penggeseran anggaran dan penambahan anggaran untuk pencegahan dan penanganan kasus klitih melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.
11	Sejalan dengan penanganan kasus kejahatan yang dilakukan oleh pelaku anak, dirasa Kabupaten Sleman perlu mendirikan pusat rehabilitas khusus untuk penanganan kasus kejahatan perempuan dan anak;	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Wacana akan melakukan MoU dengan Pondok pesantren yang siap untuk dijadikan tempat rehabilitasi bagi ABH yang akan di kawal oleh Dinas Sosial dan Bagian Pemerintahan Setda. Untuk Pengawasan dan pemberian masukan terkait Penyelenggaraan Kebijakan Perlindungan anak di Kabupaten perlu membuat KPAD (Komisi Perlindungan Anak Daerah).
12	meningkatkan skill dan kompetensi tenaga pengarsipan di semua level jenjang birokratif, agar rencana kerja/desain pengarsipan di masing-masing kantor bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan standar	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Peningkatan skill dan kompetensi tenaga pengarsipan dilakukan melalui sosialisasi, bimbingan teknis, pembinaan dan pendampingan di perangkat daerah, desa, BUMD, organisasi sosial, maupun masyarakat serta audit pengawasan kearsipan internal pada 48 perangkat daerah
13	menambah jumlah eksisting perpustakaan di wilayah Kabupaten Sleman, mulai dari tingkat Kalurahan hingga Padukuhan/RW	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pada tahun 2022 adanya penambahan sarana prasarana pojok baca/bahan pustaka yang merupakan embrio perpustakaan di 22 lokasi baik di tingkat Kalurahan maupun padukuhan/RW. Adapun 22 lokasi pojok baca sebagaimana tersebut dibawah ini: 1. Pojok Membaca Masyarakat "Nakulo Sadewo" di Pakem Tegal 2. Pojok Baca " Aswani Cendekia" di Padukuhan Temuwuh Kidul Balecatur 3. Pojok Baca "Danurdara" di Padukuhan Nyamplung Kidul Balecatur 4. Pojok Baca " Gudang Ilmu" di Padukuhan Sumber Balecatur 5. Pojok Baca "Bale Ilmu" di Padukuhan Pasekan Lor Balecatur 6. Pojok Baca "Mekar Sari" di Padukuhan Pasekan Kidul Balecatur 7. Pojok Baca "Insan Cendekia" di Padukuhan Sembung Balecatur



		<ol style="list-style-type: none"> 8. Pojok Baca "Az Zahra" di Padukuhan Jatisawit Balecatur 9. Pojok Baca "Pondok Baca" di Padukuhan Jitengan Balecatur 10. Pojok Baca "Pelangi" di Padukuhan Ngaran Balecatur 11. Pojok Baca TBM "Widodari" di Padukuhan Kluwih Balecatur 12. Pojok Baca "Bausastra Pustaka" di Padukuhan Gejawan Kidul Balecatur 13. Pojok Baca "Cahaya Pustaka" di Padukuhan Nyamplung Lor Balecatur 14. Perpustakaan "Sumber Ilmu" di Kalurahan Balecatur 15. Perpustakaan "Komunitas Teras Baca Sisuka Baca" di Rejodani 2 Sariharjo 16. Pojok Baca "Urip Sumoharjo" di Kalurahan Sardonoharjo 17. Pojok Baca "Istiqomah" TPA di Kamdanen Sariharjo 18. Pojok Baca "Karya Mandiri" di Karang Bajang Tlogoadi 19. Pojok Baca Perpustakaan "Masjid An-Nur" di Padukuhan Karangmojo Purwomartani 20. Pojok Baca "Pesantren Daarul Hira'ah I" di Padukuhan Nglarang Malangrejo Wedomartani 21. Pojok Baca "Intan" di Padukuhan Gamol Balecatur 22. Pojok Baca SPS Pelangi Bunda di Kalongan Maguwoharjo
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Sleman secara teknis tidak menangani kaitannya dengan perpustakaan, akan melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait dengan perpustakaan.
	Kapanewon Gamping	Melakukan pembinaan terhadap Kalurahan yang sudah memiliki perpustakaan dan mendorong kalurahan yang belum memiliki perpustakaan untuk membentuk atau membuat perpustakaan dengan menggunakan dana desa
	Kapanewon Godean	Upaya promosi/ mendorong kalurahan untuk melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas maupun kuantitas perpustakaan melalui forum koordinasi yang melibatkan kalurahan yaitu rapat koordinasi kasi pelayanan.
	Kapanewon Moyudan	Mendorong kalurahan untuk meningkatkan keaktifan Perpustakaan yang ada baik di Tingkat Kalurahan Hingga Padukuhan/RW.
	Kapanewon Minggir	Upaya promosi/ mendorong kalurahan untuk melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas maupun kuantitas perpustakaan melalui forum koordinasi yang melibatkan kalurahan yaitu rapat koordinasi kasi pelayanan.
	Kapanewon Mlati	memberikan dukungan untuk pengelolaan arsip kapanewon dan kalurahan serta perpustakaan kalurahan.
	Kapanewon Depok	1. Mendorong/ pendampingan pengadaan buku perpustakaan Kalurahan Caturtunggal



			2. Mendorong penambahan buku-buku (literasi) perpustakaan Kalurahan Condongcatur
		Kapanewon Prambanan	Memberikan pelayanan pendampingan pengelolaan arsip terintegrasi dan mendorong agar setiap desa melalui padukuhan se kapanewon Prambanan ada TBM (Taman Bacaan Masyarakat) yang sudah ada contohnya di desa Sumberharjo
		Kapanewon Kalasan	Tahun 2022 masih memberikan dukungan untuk pengelolaan arsip kapanewon dan kalurahan serta perpustakaan kalurahan.
		Kapanewon Ngemplak	Melalui pembinaan pengelolaan Dana Desa, mengarahkan Kalurahan untuk menghidupkan kembali perpustakaan. Hasilnya adalah Kalurahan Widodomartani dan Sindumartani melakukan penambahan jumlah buku
		Kapanewon Sleman	Kegiatan koordinasi, pembinaan dan pendampingan perpustakaan terhadap Kalurahan tetap terus ditingkatkan, namun demikian pada 2022 ini belum ada rencana penambahan untuk mengembangkan perpustakaan hingga Padukuhan/RW
		Kapanewon Pakem	Monitoring dan evaluasi tata kearsipan
		Kapanewon Cangkringan	Sesuai anggaran APBKal tahun 2023 teralokasi anggaran untuk kegiatan perpustakaan dan arsip, sehingga fungsi koordinasi kapanewon melalui dan berkoordinasi dengan instansi terkait melakukan pemantauan dan monitoring pengelolaan arsip dimasing-masing kalurahan
14	mendorong adanya "proyek-proyek literasi" seperti: bazar buku, lomba tulisan/karya tulis, lomba puisi, dan lain-lain, di tingkat Kalurahan hingga padukuhan dengan menggunakan dana desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kegiatan Pembinaan, pendampingan Perpustakaan Desa, dan lomba perpustakaan kalurahan, mendorong agar Perpustakaan Desa melakukan kegiatan proyek literasi dengan menggunakan dana desa. Pada tahun 2022 beberapa perpustakaan desa/kalurahan melakukan proyek literasi antara lain: Kalurahan Tamanmartani Sebagai Smart Village dengan menyelenggarakan pameran, lomba dan workshop baca menjadi karya, Rintisan Kalurahan Gemar Membaca di Sumberangung, melakukan pembinaan Desa Mandiri Budaya: di Kalurahan Pendowoharjo, Girikerto, Bangunkerto, Wedomartani, Margodadi.
		Kapanewon Gamping	Mendorong kalurahan untuk menyelenggarakan kegiatan literasi
		Kapanewon Godean	Monitoring percepatan serapan dana desa yang berhubungan dengan kegiatan non fisik peningkatan SDM
		Kapanewon Moyudan	Mendampingi dan mendukung Kalurahan-kalurahan menggunakan Dana Desa untuk kegiatan-kegiatan yang terkait proyek literasi hingga sampai ke tingkat Padukuhan.
		Kapanewon Minggir	Monitoring percepatan serapan dana desa yang berhubungan dengan kegiatan non fisik peningkatan SDM
		Kapanewon Mlati	memfasilitasi pameran buku (literasi) di Kapanewon Mlati dan pembinaan untuk terbentuknya / terwujudnya perpustakaan di kalurahan Tlogoadi, Sinduadi, Sumberadi.



		Kapanewon Depok	Mendorong/ pendampingan Kalurahan untuk menginisiasi terbentuknya Perpustakaan Digital (Caturtunggal, Condongcatur, dan Maguwoharjo)
		Kapanewon Prambanan	Adanya lomba karya tulis dan literasi di tingkat SMP dan SMA
		Kapanewon Kalasan	Tahun 2022 melanjutkan fasilitasi kordinasi pembinaan literasi di sekolah SD dan SMP.
		Kapanewon Sleman	Dana desa tidak ada yang digunakan untuk mendorong adanya "proyek-proyek literasi" seperti bazar buku, lomba tulisan/karya tulis, lomba puisi dan lain-lain di tingkat Kalurahan hingga padukuhan. Penggunaan dana desa sudah ada ketentuannya tersendiri sehingga belum dapat dialokasikan untuk kegiatan tersebut.
		Kapanewon Cangkringan	Sebagai tindak lanjut dari poin 3 (tiga) mendorong tingkat kalurahan untuk berpartisipasi dalam kegiatan bazar buku lomba karya tulis, literasi (digital/konvensional)
15	Mendorong penguatan agenda atau program-program yang mengarah pada pemberian edukasi tentang politik dan demokrasi (political and democracy literate) kepada masyarakat;	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Upaya yang akan dilaksanakan untuk peningkatan pemahaman tentang politik dan demokrasi kepada masyarakat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Seminar Pemahaman Demokrasi dan HAM sebanyak 4 kali 2. Seminar Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik sebanyak 2 kali 3. Sosialisasi Pemilu Serentak sebanyak 3 kali 4. Bimbingan teknis pengelolaan keuangan Bantuan Keuangan kepada Parpol sebanyak 1 kali 5. Penyaluran Hibah Bantuan Keuangan kepada 8 Parpol 6. Seminar Forum Komunikasi Antar Partai Politik sebanyak 4 kali
16	Menguatkan dan melibatkan lebih intens organisasi massa atau forum-forum sosial-keagamaan dalam memberikan pemahaman atas nilai-nilai Pancasila serta wawasan kebangsaan kepada masyarakat;	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Dalam melakukan penguatan dan meningkatkan pelibatan organisasi massa/forum social-keagamaan dan meningkatkan pemahaman atas nilai-nilai Pancasila serta wawasan kebangsaan kepada masyarakat akan dilaksanakan upaya : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan Rintisan Kalurahan Berkarakter Pancasila sebanyak 13 kali, Pendampingan kalurahan berkarakter 2 kali dan Pembentukan Kalurahan berkarakter Pancasila sebanyak 6 kali 2. Mengoptimalkan kegiatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) sebanyak 1 kali 3. Forum Pembauran Kebangsaan sebanyak 1 kali 4. Workshop Kader Pancasila sebanyak 1 kali 5. Seminar Pancasila sebanyak 1 kali 6. Pembinaan Generasi Muda 9 kali 7. Wasbang Goes To School sebanyak 10 kali 8. Upacara 17an dan Hari Besar 6 kali 9. Pelatihan Duta Pancasila 1 kali 10. Pengangkatan dan pengukuhan Duta Pancasila 2022 11. Penyusunan Dokumen Pengukuran Indeks Kalurahan Berkarakter Pancasila 12. Penyusunan Perbub Tata Upacara Bendera 1 dokumen



17	Melakukan tertib administrasi dan penegakan aturan bagi keberadaan ormas-ormas yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat;	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Dalam upaya tertib administrasi dan penegakan aturan bagi keberadaan ormas-ormas makan telah dilakukan upaya: 1. Pemantauan Ormas/LSM 2. Pelayanan Registrasi LOrmas/LSM 3. Pembinaan Ormas/LSM sebanyak 1 kali 4. Seminar Ormas dan LSM se Kabupaten Sleman sebanyak 2 kali 5. Pemberian Hibah Kepada Ormas/ Ormas Keagamaan
18	Postur anggaran Kabupaten Sleman harus disesuaikan dengan visi dan misi Bupati terpilih	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Postur anggaran Kabupaten Sleman sudah disesuaikan dengan visi dan misi Bupati terpilih yang diterjemahkan dalam penganggaran program dan kegiatan. Anggaran ini telah dijabarkan dalam APBD tahun 2022
		Inspektorat	Inspektorat telah melakukan : a. Reviu RKPd Tahun Anggaran 2023; b. Reviu KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023.
		Badan Keuangan dan Aset Daerah	Postur anggaran telah disesuaikan dengan visi dan misi Bupati terpilih.
B	BIDANG KEUANGAN		
1	Perlu prioritas strategis dalam pengelolaan pajak & retribusi daerah. 5 (lima) tahun terakhir ini, pemungutan pajak hanya sebesar 64,992%. Targetnya naik menjadi 80%. Prioritas strategis ini harusnya diwujudkan dalam bentuk "PEMISAHAN FUNGSI PENGELOLA PAJAK & RETRIBUSI DAERAH" di satu BADAN tersendiri. Pengelolaan pajak dan retribusi daerah masih tersebar di beberapa OPD. Persoalan rentang kendali dalam koordinasi dan pelaksanaan pemungutan pajak berdampak pada kurang optimalnya pemungutan pajak.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Untuk meningkatkan pelayanan, tata kelola, dan pengutan basis data BKAD melakukan inovasi dengan mengembangkan sistem informasi manajemen pajak daerah (SIMPAD) sebagai berikut: 1. pemetaan digital wajib pajak reklame, fitur ini memberikan kemudahan memperoleh informasi tentang wajib pajak reklame maupun objek pajak berdasarkan kode lokasi reklame yang terintegrasi dengan citra dari goole maps sehingga sangat bermanfaat untuk optimalisasi pemungutan pajak reklame. 2. QR code pada SPPT PBB, berfungsi memberikan informasi terkait NOP PBB, data subjek pajak, objek pajak serta rekapan catatan pembayaran. 3. QR code pada Surat Teguran wajib pajak hotel dan restoran, berfungsi memberikan informasi nomor surat, tanggal surat, nama wajib pajak, dan masa pajak yang belum melaporkan setiap bulannya. 4. QR code pada SSPD BPHTB, memuat informasi data-data wajib pajak BPHTB. SIMPAD berbasis android, berfungsi memudahkan wajib pajak melakukan pendaftaran dan pelaporan pajak daerah.
2	perlu keseriusan dalam pengawasan penegakan hukum atas kepatuhan pelaksanaan pajak. Pemeriksaan dan Verifikasi Data secara rutin dan terukur harus diterapkan dalam rangka mengumpulkan data riil yang dapat dipakai membentuk basis data perpajakan.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pendaftaran, pendataan, penagihan dan pemeriksaan. Disusun Peraturan Bupati Sleman Nomor 52.1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah
		Inspektorat	Inspektorat telah melaksanakan reviu tata Kelola pajak daerah.



3	Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja operasi (52,48%) masih lebih tinggi dibanding belanja barang jasa terhadap total belanja operasi (41,50%). Sudah seharusnya Kabupaten Sleman mulai melakukan penilaian terhadap EFEKTIFITAS dan EFISIENSI pelaksanaan TUGAS & FUNGSI masing-masing Dinas/Badan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran jangka pendek dan jangka menengah.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pada APBD 2023 yang ditetapkan pada tahun 2022, prosentase belanja pegawai terhadap belanja operasi turun sehingga menjadi 46,16%. Belanja Barang dan Jasa terhadap belanja operasi prosentase naik menjadi 43,44%.
4	LKPJ perlu mencantumkan hal-hal yang menjadi penyebab tidak terserapnya anggaran yang sudah direncanakan. Serapan anggaran di Belanja Barang & Jasa tahun 2021 adalah yang terendah sejak 2017. Tidak ada penjelasan terkait rendahnya serapan Belanja Barang dan Jasa di tahun 2021 dibanding tahun- tahun sebelumnya.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan Surat Edaran Bupati lebih awal terkait penyusunan laporan keuangan, sehingga perangkat daerah cukup waktu untuk menata jadwal pencairan dan memastikan program dan kegiatan tidak ada yang tidak terbayar. 2. Koordinasi dengan kasubag keuangan dan bendahara pengeluaran perangkat daerah untuk mendorong penyerapan dan memastikan program dan kegiatan tidak ada yang tidak terbayar. - Realisasi belanja tahun 2022 adalah sebesar 92,30%
5	Sampai tahun anggaran 2021, belum jelas dukungan Kabupaten Sleman terhadap peningkatan kualitas UMKM dalam proses pengadaan barang dan jasa. Tidak ada data berapa prosentase anggaran Belanja Barang dan Jasa yang dapat diakses dan diprioritaskan oleh dan untuk UMKM, terlebih UMKM yang sudah dibina oleh Dinas Koperasi dan UMKM.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi UMKM telah menindaklanjuti dengan mengirimkan data pelaku usaha catering/took snack yang siap masuk dalam Bela Pengadaan sejumlah 234 pelaku usaha untuk tahap pertama.
		Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggaran urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp 12,52 M
6	Belanja modal mampu direalisasikan pada level yang relatif lebih tinggi dibanding rata-rata serapan 5 tahun terakhir sejak 2017 yaitu 94,87% disbanding 86,32%. Tingginya realisasi belanja modal ini patut diapresiasi, sebab Bupati telah berupaya memenuhi rekomendasi Dewan atas LKPJ TA 2020. Namun demikian, agar kenaikan anggaran dan realisasi Belanja Modal tersebut dapat diyakini telah memberikan manfaat yang	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Rincian peruntukkan Aset tetap secara ruti menjabi bagian pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada bagian CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan).



	lebih substantif kepada warga Sleman, maka perlu diinformasikan peruntukan setiap RUPIAH di pos Aset tetap yang telah direalisasikan tersebut. Tujuan model pelaporan dengan rincian akan mengoptimalkan fungsi pengawasan Dewan dengan basis data dan fokus pada isu efisiensi dan efektifitas. Bukan lagi hanya pada kinerja serapan anggaran.		
C	BIDANG PEMBANGUNAN		
1	Penanganan RTLH perlu diberikan perhatian yang serius, mengingat masih banyaknya rumah sebanyak ± 9.738 unit yang belum tertangani perlunya penambahan anggaran perbaikan RTLH.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Penanganan RTLH Tahun 2022 sejumlah 1387 Unit - APBD Kab: 495 Unit - APBD Prov: 165 Unit - DAK: 222 Unit - BSPS: 475 Unit - Baznas: 30 Unit Untuk mengurangi RTLH, Pemerintah Kabupaten Sleman pada Tahun 2022 melaksanakan beberapa kegiatan yaitu: 1. Peningkatan kualitas (PK) anggaran APBD sebanyak 196 unit dengan anggaran Rp3.920.000.000,00 2. Pembangunan Baru (PB) sebanyak 222 unit DAK Rp4.665.000.000,00 sharing APBD Rp.2.220.000.000,00
2	Kualitas pembangunan jalan harus berbanding lurus dengan kualitas drainase, agar adanya keseimbangan antara perawatan jalan dan drainase	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pada semua pekerjaan Peingkatan Jalan di Tahun Anggaran 2022 terdapat item pekerjaan saluran drainase jalan : a. Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Kebondalem – Tanjung terdapat item pekerjaan saluran drainase jalan sepanjang : 75,50 m b. Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Kronggahan – Jaban terdapat item pekerjaan saluran drainase jalan sepanjang : 1.956,40 m c. Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Pagerjurgang – Glagahmalang terdapat item pekerjaan saluran drainase jalan sepanjang : 856,50 d. Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Kemasan – Grogolan terdapat item pekerjaan saluran drainase jalan sepanjang : 1.296 m e. Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Karang Kalasan – Salakan terdapat item pekerjaan saluran drainase jalan sepanjang : 362,3 m f. Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Glondong – Tegalrejo terdapat item pekerjaan saluran drainase jalan sepanjang : 2.210 m g. Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Watuadeg - Plosorejo terdapat item pekerjaan saluran drainase jalan sepanjang : 1.427,7 m
3	Penambahan lampu penerangan jalan pertanian agar mampu meningkatkan produktifitas dan memperulas	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	Penambahan lampu penerangan pada jalan pertanian tidak berpengaruh pada peningkatan produktivitas dan perluasan areal tanam, pekerjaan dilakukan petani umunya pada saat terang atau pagi



	areal tanam di Kabupaten Sleman	Dinas Perhubungan	hari hingga sore hari Penambahan lampu penerangan di permukiman (termasuk daerah pertanian) sebanyak 124 titik
4	Penambahan lampu penerangan jalan terutama di jalan poros yang masih minim penerangan. Selain untuk mempermudah pengguna jalan melihat dengan jelas juga meminimalisir terjadinya kejahatan begal/klithih yang cukup meresahkan masyarakat.	Dinas Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasangan LPJU ruas jalan Tempel-Seyegan : 4 titik 2. Pemasangan LPJU ruas jalan Nglampis : 22 titik (LED) dan 2 titik (Solar cell) 3. Koordinasi dengan Dishub DIY dan akan dilakukan penambahan lampu penerangan di ruas jalan Klangon - Tempel sebanyak 30 titik 4. Penambahan lampu penerangan jalan di Ruas Jalan Kabupaten sebanyak 276 titik
5	Dikarenakan kondisi TPA sampah piyungan seringkali mengalami kelebihan muatan sampah. Pemerintah kab. Sleman sebaiknya membuat perencanaan pengolahan sampah secara mandiri hulu hilir. Bisa dimulai dari penambahn Depo sampah ditingkat kelurahan.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	<p>Pada tahun 2022 dilakukan pengadaan konsultan untuk penyusunan DED Pagar TPST Tamanmartani Kalasan sebagai acuan pembangunan Pagar TPST Tamanmartani Kalasan yang akan dilakukan di Tahun 2023.</p> <p>Tindak lanjut yang sudah dilakukan pada tahun anggaran 2022</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Rumah Maggot (Black Soldier Fly-BSF) di : <ol style="list-style-type: none"> a. Tempat Pengolahan Sampah 3R Purwo Berhati (Bayen, Purwomartani, Kalasan, Sleman) b. Tempat Pengolahan Sampah 3R Mexicana (Calukan, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman) 2. Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di : <ol style="list-style-type: none"> a. Denokan, Sendangsari, Minggir (wilayah barat) b. Sentono, Tamanmartani, Kalasan (wilayah timur) 3. Optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah 3R di TPS3R Bisma (Nglaran, Balecat, Gamping) 4. Penyusunan DED TPST Pringwulung, Condong Catur 5. Optimalisasi pemilahan sampah di 13 Depo sebesar 20 s/d 30 % 6. Optimalisasi pemilahan sampah Depo panas sebesar 80% 7. Composting di Depo Kragilan dan Depo Tridadi 8. Telah dilaksanakan road show sosialisasi pilah sampah dari rumah menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Nomor : 30 Tahun 2022
6	Melakukan penyesuaian bantuan sesuai dengan kebutuhan petani barang yang diberikan sebaiknya tidak terlalu berteknologi tinggi sehingga secara kualitas bisa lebih banyak	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan berusaha memberi bantuan sarana prasarana pertanian seperti yang diusulkan oleh petani, yang berkualitas dan tidak gampang rusak.
7	Penambahan bantuan dan subsidi bagi kelompok tani seperti pupuk organik, mulsa, bibit dan obat-obatan	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan telah melakukan bantuan pupuk organik dan benih tanaman pangan untuk pengembangan padi sembara merah dan sembara hitam melalui dana keistimewaan Yogyakarta untuk demplot sebanyak



			10 hektar
8	Memaksimalkan pembudidayaan tanaman buah dan menjadikan beberapa kecamatan sebagai ikon kebudayaan tanaman buah seperti buah buahan seperti contohnya jambu di berbah, salak pondoh, madu di turi dan lainnya	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	Pendampingan pelatihan dan bantuan bibit tanaman buah sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui anggaran Pokir dan PUPM seperti di Gamping, Mlati, Pakem dan Kalasan. Dari dana Tugas Pembantuan APBN ada pengembangan kelengkeng 20 Ha di Prambanan.
9	Program wifi untuk seluruh padukuhan terus ditingkatkan dalam rangka pemerataan teknologi informasi hingga ke warga masyarakat menengah ke bawah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terpasang 604 lokasi padukuhan sehingga total menjadi 1043 lokasi padukuhan
10	Membentuk tim dalam rangka penyelesaian konflik dan sengketa Tukar Guling Pertanahan.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Dibentuk tim penyelesaian konflik dengan Keputusan Bupati Sleman Nomor 18.3/Kep.KDH/A/2022 tentang Tim Pelaksana Sub Kegiatan Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa.
11	Aplikasi LAPOR SLEMAN merupakan turunan dari aplikasi LAPOR yang direncanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Aplikasi ini memiliki semangat dalam rangka meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di sleman. Aplikasi ini perlu ditingkatkan agar masyarakat bisa berinteraksi dengan baik dalam pelayanan publik di Sleman	Dinas Komunikasi dan Informatika	Mengembangkan aplikasi LAPOR SLEMAN untuk kemudahan bagi masyarakat semisal untuk registrasi user dan mendownload aplikasi
		Dinas Kesehatan	Memperkuat interaksi masyarakat dengan RSUD Prambanan melalui berbagai kanal media social untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
12	Menguatkann karakter Sleman sesuai dengan 4 zona karakteristik sumberdaya: a. Utara, Kawasan sumberdaya air dan ekosistem b. Timur, Kawasan Hiratage peninggalan purbakala dan pusat wisata budaya. c. Tengah, wilayah pusat Pendidikan, perdagangan, dan jasa. d. Barat, pertanian dan industry kerajinan.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Rencana penyusunan RDTR Kawasan Sleman Tengah dengan tema penataan permukiman dan fasilitas perkotaan, pendukung kegiatan jasa Pendidikan dan pariwisata.
		Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Untuk menguatkan karakter Sleman sesuai dengan 4 zona karakteristik sumberdaya tersebut pada Tahun 2022 dilakukan beberapa upaya, yaitu: 1. Penyusunan KLHS Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Tengah. 2. Pemutakhiran Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Tengah. 3. Penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Tengah. 4. Kegiatan Rutin Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 5. Koordinasi dan Fasilitasi Kebijakan dan Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Geoheritage melalui Forum Warisan Budaya Geologi.
		Dinas Kesehatan	Mengusulkan relokasi/pembangunan gedung baru RSUD Prambanan di lahan baru yang lebih strategis



			melalui pendanaan APBN/Dana Keistimewaan agar bangunan memenuhi standar rumah sakit kelas C.
13	Indeks Kualitas Air (IKA) rendah, salah satunya disebabkan oleh perilaku masyarakat dan industri dalam membuang limbah ke sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu. Oleh karena itu, pengolahan daerah aliran sungai, termasuk kualitas air didalamnya, harus dilakukan secara terpadu, meliputi bagian hulu, tengah dan hilir sungai tanpa terhambat oleh batas-batas administrasi.	Dinas Lingkungan Hidup	<p>Pembenahan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup dimasa yang akan datang, diantaranya adalah dengan mengendalikan sejumlah sumber utama pencemaran, seperti tidak membuang sampah domestik ke sungai. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan/pengujian kualitas air badan air secara periodic dengan 3 periode pengambilan sampel dalam 1 tahun 2. Kegiatan edukasi dan penyadaran masyarakat dalam bentuk pembinaan dan secara langsung bersama masyarakat pada kegiatan bersih sungai melalui Program Kali Bersih (PROKASIH). 3. Pemantauan/pengujian kualitas air limbah pada IPAL Komunal secara berkala serta melakukan penyusunan buku monitoring dan evaluasi terhadap IPAL-IPAL Komunal yang sudah terbangun 4. Penanganan kasus dugaan pencemaran air sungai 5. Pengawasan dan pemantauan terhadap usaha/kegiatan yang effluent nya dibuang ke sungai 6. Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar terhadap Sungai Winongo, Sungai Boyong dan Sungai/ Kali Kuning. 7. Pendampingan pengelola SPALD-T Skala Permukiman (IPAL Komunal), yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) 63 Lokasi 8. Melakukan publikasi hasil pengujian melalui web DLH 9. Berkonsultasi dengan akademisi yang berkompeten dalam bidang sanitasi untuk mengoptimalkan IPAL Komunal dan pengelolaan air limbah lainnya agar air limbah yang akan dibuang ke media lingkungan memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan. 10. Membangun SPALD-T Skala Permukiman (IPAL Komunal) sebanyak 2 unit 11. Pembangunan SPALD-S skala individu sebanyak 1.018 unit. 12. Optimalisasi pengelolaan IPLT Madurejo - Prambanan, IPAL Kawasan Berbah, IPAL Kawasan Depok 13. Perencanaan peningkatan kapasitas IPLT Madurejo – Prambanan. 14. Penyusunan Master Plan Air Limbah
		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bidang SDA tidak mempunyai kewenangan pengelolaan sungai (ada pada BBWS-SO) dan penanganan indeks kualitas air pada DLH, dan hanya jika ada laporan terkait pembuangan benda apapun pada saluran irigasi menjadi kewenangan bidang SDA untuk melarangnya. Utk industri pengelolaan



			limbahnya sdh tercantum dlm dokumen lingkungan yang harus ditaati pada saat pengajuan ijin berusaha.
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	melakukan pengawasan dan pengendalian perijinan di dalamnya termasuk pengendalian lingkungan bagi yang sudah ber-NIB
14	Perlu dilakukan percepatan pembangunan daerah rawan bencana.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Percepatan pembangunan di Kawasan rawan bencana pada Tahun 2022 dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yaitu: 1. Peningkatan jalan ruas Pagerjurang-Glagahmalang di Kap Cangkringan sepanjang 1 Km dengan anggaran Rp5.771,961,800,00 (DAK) 2. Peningkatan jalan Watuadeg –Plosorejo (DAK Temati-DPP) 1,8 Km anggaran Rp7.703.902.000,00 3. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kab/Kota dengan alokasi Rp1.249.800,00
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pada tahun 2022 telah dilaksanakan pembangunan daerah rawan bencana sebagai berikut: 1. Pembangunan jalur evakuasi di 6 lokasi (Kaliadem- Petung, Petung- Tangkisan, Petung-Plosokerep, Turgo- Tritis, Tritis- Ngandong, Ngandong- Kemirigebo) 2. Penguatan tebing di 3 lokasi (Jetis, Caturharjo Sleman; Tempursari, Ngaglik; Gayamharjo, Prambanan) 3. Rehabilitasi barak pengungsi Purwobinangun dan barak kelompok rentan Purwobinangun
		Dinas Kesehatan	Mengusulkan relokasi/pembangunan gedung baru RSUD Prambanan di lahan baru yang lebih strategis
		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (Bid Perumahan)	Melakukan penyusunan kajian identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan. Penyempurnaan PSD Hunian Tetap Karangkendal, Umbulharjo
15	Perlu dilakukan pemasangan lampu penerangan jalan yang merata di seluruh wilayah kabupaten sleman khususnya di daerah rawan klithih.	Dinas Perhubungan	a. Pemasangan LPJU ruas jalan Tempel-Seyegan : 4 titik b. Pemasangan LPJU ruas jalan Nglampis : 22 titik (LED) dan 2 titik (Solar cell) c. Penambahan lampu penerangan jalan di daerah rawan klithih
16	Perlu dilakukan pemasangan CCTV di daerah rawan kejahatan sosial.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Telah dilaksanakan pemasangan CCTV sebanyak 8 titik sehingga total menjadi 140 titik CCTV terpasang sampai dengan tahun 2022
		Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan menyiapkan daya di ujung-ujung ruas jalan Tempel-Seyegan untuk dipasang CCTV oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Perlu dilakukan evaluasi terhadap perijinan dan pemasangan tiang telekomunikasi khususnya yang berada di padukuhan.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPSTP Kabupaten Sleman dalam mengeluarkan perizinan berdasarkan rekomendasi yg dikeluarkan oleh DPUPKP, dan rekomendasi tersebut salah satunya mendasarkan pada cellplan yg dibuat oleh Kominfo, sepanjang semua sdh sesuai dan sdh ada rekomendasi serta cellplan maka DPMPSTP akan mengeluarkan izinnya.



	BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT		
1	<p>IPM dan HLS merupakan 2 indikator yang saling terkait. Harapan Lama sekolah merupakan salah satu indikator penyusun IPM. HLS mengalami pertumbuhan paling kecil diantara 3 indikator penyusun lainnya (HLS 0,06%, RLS 0,15%, AHH 0,15%, pengeluaran perkapita 0,84%). Upaya pencapaian target IPM harus difokuskan pada peningkatan HLS pada tahun kinerja berikutnya. Oleh karena itu, untuk dicantumkan komponen penyusun agar dapat diketahui factor penyebab IPM belum bisa mencapai target RPJMD.</p>	<p>Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah</p>	<p>IPM Kab Sleman Tahun 2021 adalah 84,00 lebih tinggi dibandingkan IPM Prov DIY sebesar 80,22 , serta menduduki peringkat kedua di Provinsi DIY setelah Kota Yogyakarta yaitu 87,18 Capaian IPM disusun/ dihitung oleh BPS, melalui pendekatan 3 dimensi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat, melalui capaian indikator Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) 2. Dimensi pengetahuan, melalui indikator Harapan 3. Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 4. Dimensi Standar Hidup Layak, melalui indikator pengeluaran per kapita per tahun. <p>Upaya pencapaian target IPM di fokuskan pada peningkatan HLS pada tahun tahun berikutnya karena pertumbuhan HLS paling kecil sebesar 0,06% jika dibandingkan indikator yang lain. Namun demikian HLS Kab. Sleman tahun 2021 sebesar 16,74 masih lebih tinggi dibandingkan Provinsi DIY yaitu 15,64 dan menduduki peringkat ke dua di DIY setelah Kota Yogyakarta dengan HLS sebesar 17,60</p> <p>Adapun HLS sendiri diperoleh melalui penghitungan komponen: jumlah penduduk umur 7 tahun ke atas; jumlah penduduk yang masih sekolah menurut umur usia 7 tahun ke atas, dan partisipasi sekolah menurut umur. Untuk pencantuman komponen penyusun indikator IPM melalui 3 Dimensi tersebut dalam RPJMD sudah dikoordinasikan dengan BPS sebagai lembaga penyusun dan penghitung capaian IPM beserta indikator-indikatornya.</p>
2	<p>Penting sekali untuk dicantumkan komponen penyusun agar agar dapat diketahui faktor penyebab indeks pembangunan olahraga (IPO) masih belum bisa mencapai target RPJMD. Didalam LKPJ tidak ditemukan capaian ke-4 (keempat) indikator sehingga terkesan tiba-tiba muncul angka indeks pembangunan olahraga.</p>	<p>Dinas Pemuda dan Olah raga</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Penambahan jumlah responden dalam survei <i>Sport Development Indeks</i> (SDI). b. Menginventarisasikan kekurangan dan memperbaiki parameter yang masih lemah antara lain dengan kampanye olahraga 3 (tiga) kali dalam satu minggu dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) instruktur/ pelatih. c. Penganggaran 14 Sport Center. d. Pendataan ulang kesiapan ke-14 lokasi rencana sport center (utamanya data kepemilikan tanah yang tidak bermasalah). e. Pembangunan dan atau renovasi Venue Olahraga (mendukung kegiatan PORDA dan PEPARDA 2022) f. Updating Sumber Daya Manusia (SDM)/ tenaga keolahragaan termasuk relawan olahraga melalui kegiatan Pendataan Sarana dan Prasarana Tahun 2022. g. Peningkatan kapasitas tenaga keolahragaan h. Pelaksanaan senam rutin pada jumat pagi i. Pembinaan Kelompok Olahraga Masyarakat j. Pelaksanaan event olahraga bersama dengan kelompok masyarakat



			k. Pelaksanaan lomba olahraga tradisional sampai dengan tingkat kalurahan (Smart Village di Kalurahan Tamanmartani, Kapenewon Kalasan
3	Perlu terobosan baru dalam memfasilitasi kreatifitas dan inovasi yang tumbuh di tengah masyarakat dan karyanya berpotensi dapat membuka lapangan kerja baru dan menyerap tenaga kerja.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	1. Memberikan penghargaan berupa Sertifikat Bupati kepada sekolah-sekolah yang berperan aktif dalam mendukung kegiatan inovasi. Bappeda tetap melaksanakan pendataan inovasi yang dilakukan oleh OPD, serta melaksanakan verifikasi inovasi yang akan diikuti dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun 2022. 2. Menyusun Surat Edaran Sekda tentang usulan Inovasi Tahun 2023 bagi OPD yang kemudian dimasukkan dalam Rencana Kerja masing-masing OPD. Akan menyusun Surat Keputusan Bupati tentang Uji Coba Inovasi yang akan dilaksanakan tahun 2023. Untuk OPD yang akan melaksanakan Inovasi pada tahun 2023 diberikan dana stimulant sebesar lima puluh juta rupiah.
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Melanjutkan program tahun 2021
		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi UKM telah menyusun Road Map pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Penekanannya adalah : 1. Program Pemberdayaan UMKM yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. 2. Program Pengembangan Usaha Mikro dengan melalui Fasilitas Usaha Mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi. Dengan program tersebut diharapkan UMKM dapat meningkatkan usahanya sehingga mampu memberikan lowongan kerja dan juga mampu memberikan peluang bagi masyarakat yang belum berusaha untuk membuka usaha.
4	Perlu kerjasama dengan perguruan tinggi di wilayah kabupaten sleman agar terbentuk link and match berbasis potendi desa melalui teknologi tepat guna maupun ilmu terapan lainnya, sehingga angkatan kerja usia produktif di desa dapat berdaya dan berkarya untuk kemajuan desanya.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Bappeda memfasilitasi terlaksananya Penelitian Terapan untuk 5 (lima) proposal, dengan dana sebesar Rp 50.000.000,- (Limapuluh juta rupiah) tiap proposal. Adapun yang lolos adalah: 1. Ellsya Angeline Rawar, S.Farm., M.Pharm.Sci., dkk., dari Universitas Kristen Immanuel (UKRIM) Yogyakarta, dengan judul proposal "Strategi Eksistensi Jamu Tradisional Sebagai Minuman Kesehatan Keluarga Di Masa Pandemi Covid19 Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Umkm Kabupaten Sleman." 2. Wahyu Setya Ratri, S.P.,M.P., dkk., dari Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST), dengan judul proposal "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengolahan Limbah Tahu Sebagai Pakan Ikan Untuk Meningkatkan Produktivitas Peternak Ikan Air Tawar Di Margoagung, Sayegan, Sleman." 3. John Suprihanto. M.I.M., dkk. dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, dengan judul proposal "Potensi Revitalisasi Dan





			<p>Pengembangan Ekstrakurikuler Produktif Dalam Upaya Mendukung Tumbuh Kembangnya Entrepreneur Pemula Dan Guru-Guru Penggerak..”</p> <p>4. Hermanto, M.Pd. dkk., dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), dengan judul proposal “Pengembangan Panduan Praktik Inclusive Leadership Untuk Kepala Sekolah Di Sekolah Inklusif.”</p> <p>5. Wahyu Setyaningrum Ph.D., dkk., dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), dengan judul proposal “Pengembangan E- Modul Pembelajaran Matematika Berbasis Case Method Untuk Mendukung Ketrampilan Abad 21 Di Sekolah Inklusif Smp.”</p>
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan selalu kerjasama dengan perguruan tinggi di wilayah Kabupaten Sleman agar terbentuk Lind and Match berbasis potensi desa melalui teknologi tepat guna maupun ilmu terapan lainnya.
5	Pengolahan BUMDes harus semakin profesional hingga berdampak pada terbukanya lahan kerja baru.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan selalu berupaya untuk melakukan pembinaan dan pendampingan BUMKal agar pengelolaan BUMKal bisa semakin profesional hingga berdampak pada terbukanya lahan kerja baru
		Kapanewon Gamping	Seluruh BUMDesa yang sudah terbentuk di Kapanewon Gamping didorong untuk semakin profesional hingga mampu berkembang dengan baik sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi penduduk local dan mendorong kalurahan yang belum memiliki BUMDes untuk segera membentuk BUMDes
		Kapanewon Godean	Fasilitasi Pembinaan BUMDes dengan materi antara lain kelembagaan, pemberdayaan potensi daerah
		Kapanewon Moyudan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapanewon telah melakukan pembinaan ekonomi dan pendampingan terhadap pengembangan BUMDes Kalurahan 2. Kapanewon telah memfasilitasi kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas pengelola BUMDes dengan mengusulkan Anggaran PUPM
		Kapanewon Minggir	Fasilitasi Pembinaan BUMDes dengan materi antara lain kelembagaan, pemberdayaan potensi daerah
		Kapanewon Depok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kalurahan Caturtunggal (belum ada BUMDes), Memberikan motivasi Kalurahan untuk mewujudkan BUMDesa. Menjembatani/ pendampingan mewujudkan BUMDesa 2. Kalurahan Concongatur (belum ada BUMDes). Memberikan motivasi Kalurahan untuk mewujudkan BUMDes. Menjembatani/ pendampingan mewujudkan BUMDes 3. Kalurahan Maguwoharjo (Sudah ada BUMDes) Motivasi menambah unit usaha dan menjembatani/ pendampingan pengembangan BUMDes
		Kapanewon Ngemplak	Kapanewon Ngemplak aktif melakukan pembinaan Bumdes dengan cara Melakukan pembenahan





			Bumdes meliputi kelembagaan, infrastruktur organisasi, dan unit usaha Bumdes;
		Kapanewon Pakem	<ol style="list-style-type: none">1. Pembinaan rutin2. Pendampingan pengembangan usaha BUMDes3. Pendampingan Analisa usaha BUMDes4. Pelatihan Pengelola BUMDes.
		Kapanewon Cangkringan	<ol style="list-style-type: none">1. Pada tahun 2022 sudah melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas pengelola BUMDesa dengan koordinasi dengan instansi terkait melalui angsuran dana PUPM2. Melakukan monitoring penyelenggaraan bidang ekonomi di wilayah kapanewon (5 kalurahan)3. Pada tahun 2023 sebagai progress report adalah melakukan pelatihan manajemen pengelolaan BUMDes dan BUMKalma melalui anggaran PUPM tahun 20234. Pembentukan Badan Pengawas Kalurahan Mensosialisasikan tugas dan fungsi BUMKal/ BUMDesa
6	Pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan dana APBD Kabupaten Sleman dan peningkatan kapasitas melalui berbagai pelatihan bagi penduduk miskin maupun keluarga miskin. Perlu trobosan baru untuk melalui percepatan pengentasan kemiskinan di tengah kenaikan harga-harga yang semakin memukul kemampuan daya	Dinas Sosial	Dinas Sosial akan bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) melalui Sistem Informasi Desa (SID). Tenaga Pendamping Sosial Kalurahan (TPSK) diberikan akses mengelola data melalui SIMNANGKIS
7	Perlu kemudahan akses data keluarga miskin by name by address berikut updating-nya. Tagline Smart Regency harus mampu menjawab persoalan ini dengan langkah-langkah yang smart.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika siap memfasilitasi jika ada kebijakan dari Pemkab Sleman
8	Pemanfaatan Jaring Pengaman Sosial (JPS) belum efektif dalam mengatasi persoalan anak tidak sekolah/putus sekolah yang disebabkan karena faktor ekonomi di masa pandemi.	Dinas Sosial	Perluasan cakupan pelaksanaan sosialisasi JPS Pendidikan di Lembaga Masyarakat dan Kalurahan.
9	Indeks Ketahanan Keluarga merupakan rerata indeks ketahanan fisik ekonomi dan indeks sosial psikologis, namun di dalam LKPJ belum dimunculkan angka capaian kedua indeks tersebut.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Lebih meningkatkan pembinaan ketahanan keluarga
10	Perlu dipaparkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	Masih terus dilakukan upaya preventif dan promotif untuk mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.



	anak korban kekerasan yang terjadi dan sejauh mana perkembangan dari beberapa tahun sebelumnya untuk melihat apakah ada tren naik atau turun dan melihat efektifitas program pencegahannya.	Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
11	Belanja modal mampu direalisasikan pada level yang relative lebih tinggi dibanding rata-rata serapan 5 tahun terakhir sejak 2017 yaitu 94,87% dibanding 86,32%. Tingginya realisasi belanja modal ini patut diapresiasi, sebab Bupati telah berupaya memenuhi rekomendasi Dewan atas LKPJ TA 2020. Namun demikian, agar kenaikan anggaran dan realisasi Belanja Modal tersebut dapat diyakini telah memberikan manfaat yang lebih substantif kepada warga Sleman, maka perlu diinformasikan peruntukan setiap RUPIAH di pos Aset tetap yang telah direalisasikan tersebut. Tujuan model pelaporan dengan rincian akan mengoptimalkan fungsi pengawasan Dewan dengan basis data dan fokus pada isu efisiensi dan efektifitas. Bukan lagi hanya pada kinerja serapan anggaran.	Dinas Kesehatan	Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan untuk menunjang penurunan AKI dan AKB yang bersumber dari DAK, yaitu 1 unit bangunan ruang PICU, 2 unit HFNC, 3 unit Infant Ventilator, 3 unit Pasien Monitor, 2 set Suction Pump, 2 unit Bed Electric, 2 unit Bedside Monitor, 2 Unit Syringe Pump, dan 2 unit Ventilator
12	Perlu dilakukan sosialisasi yang massif terkait peralihan izin mendirikan bangunan (IMB) berubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Efisiensi system yang dimulai dari Dokumen masuk hingga keluarnya dokumen PBG	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (Bid Perumahan)	Sudah dialokasikan anggaran sosialisasi PBG dan SLF untuk masyarakat. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) yang digunakan untuk pelayanan dan pemrosesan permohonan PBG dan SLF merupakan system yang disusun oleh Kementerian PUPR, sedangkan DPUPKP hanya selaku pengelola. DPUPKP selalu berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk setiap masalah yang timbul dalam penggunaan SIMBG.
13	Penambahan Saluran Irigasi Pertanian agar mampu meningkatkan produktifitas dan memperluas areal tanam di Kabupaten Sleman		Di sleman nggak ada penambahan saluran. Yg ada peningkatan dan rehab saluran. Peningkatan saluran di Sleman tujuannya utk meningkatkan IP bukan nambah areal oncoran. Rehab untuk mengembalikan fungsi saluran seperti semula. Produktifitas banyak dipengaruhi faktor pertaniannya (bibit, pupuk, pengendalian hama, dll)
14	Mengoptimalkan pembangunan kalurahan dan pelayanan masyarakat	Kapanewon Tempel	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa : 1. Fasilitasi Penyusunan Perdes dan Perkades



	dengan masyarakat dengan memperkuat komponen penyelenggaraan Pemerintahan kalurahan antara lain dengan meningkatkan kapasitas SDM perangkat kalurahan, mendorong program pembangunan desa/ kalurahan yang populis		<ol style="list-style-type: none">2. Fasilitas Tata PemerintahanDesa3. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa4. Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan PerangkatDesa5. Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan KepalaDesa6. Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa7. Fasilitas Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
		Kapanewon Turi	<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitas penyusunan perdes dan perkades2. Fasilitas tata pemerintahan desa3. Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa4. Fasilitas pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa5. Fasilitas pelaksanaan pemilihana kepala desa6. Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa7. Fasilitas penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa
15	Kalurahan harus menjadi contoh bila terjadi bencana/pandemic (baik alam maupun social) sehingga desain desa/ kalurahan tangguh bencana harus menjadi priorias. Serta memberdayakan secara optimal linmas di level kalurahan dan satpol pp kapanewon dalam rangka mewujudkan ketertiban masyarakat	Kapanewon Tempel	Mewujudkan sinergitas para pemangku kebijakan dalam menghadapi bencana
		Kapanewon Turi	Penyelenggaraan forum koordinasi peduli bencana





BAB IV
TUGAS PEMBANTUAN

Buku I

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Bupati Sleman**

Tahun Anggaran 2022

SLEMAN



BAB IV

TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Kabupaten Sleman

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sleman tidak mendapatkan alokasi tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat.

B. Tugas Pembantuan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang Dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sleman

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, kota, dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

1. Tugas Pembantuan

Pada tahun anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Sleman mendapatkan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi DIY/Pemda DIY, sebagai berikut:

a. Satuan Kerja Tanaman Pangan

1) Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan tugas pembantuan pada Satuan Kerja Tanaman Pangan adalah DIPA Kementerian Pertanian Nomor 018.03.049087/2022.

2) Capaian Kinerja

a) Capaian kinerja keuangan

Capaian kinerja keuangan Satuan Kerja Tugas Pembantuan Bidang Tanaman Pangan tercapai sebesar 98,47% dari anggaran sebesar Rp58.650.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp57.750.000,00.

b) Capaian kinerja program

Capaian kinerja program Satuan Kerja Tugas Pembantuan Bidang Tanaman Pangan terealisasi 100%.





b. Satuan Kerja Hortikultura

1) Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan tugas pembantuan Satuan Kerja Hortikultura adalah DIPA Kementerian Pertanian Nomor 018.04.4.049088/2022

2) Capaian Kinerja

a) Capaian kinerja keuangan

Capaian kinerja keuangan pada Satuan Kerja Tugas Pembantuan Bidang Tanaman Pangan tercapai sebesar 98,79% dari anggaran sebesar Rp749.390.000,00 terealisasi sebesar Rp740.331.050,00.

b) Capaian kinerja program

Capaian kinerja program Satuan Kerja Tugas Pembantuan Bidang Hortikultura terealisasi 100%.

c. Satuan Kerja Sarana dan Prasarana Pertanian

1) Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan tugas pembantuan Satuan Kerja Sarana dan Prasarana Pertanian adalah DIPA Kementerian Pertanian Nomor 018.08.049094/2022

2) Capaian Kinerja

a) Capaian kinerja keuangan

Capaian kinerja keuangan pada Satuan Kerja Tugas Pembantuan Bidang Tanaman Pangan sebesar 99,71% dari anggaran sebesar Rp1.576.995.000,00 terealisasi sebesar Rp1.572.464.840,00.

b) Capaian kinerja program

Capaian kinerja program Satuan Kerja Tugas Pembantuan Bidang Tanaman Pangan terealisasi 100%.

2. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan DIY

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan





Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

- 3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- 6) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan.

b. Gambaran Umum

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah daerah setingkat provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan istimewa tersebut meliputi wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Untuk melaksanakan kewenangan istimewa tersebut maka dialokasikan Dana Keistimewaan DIY. Dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan, Dana Keistimewaan DIY diartikan sebagai dana yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan belanja transfer pada bagian transfer lainnya. Dengan demikian, Perangkat Daerah (PD) kabupaten/kota dapat menyampaikan usulan program dan kegiatan yang didanai dengan dana keistimewaan.





Pengampu Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan DIY adalah:

- 1) Urusan Kelembagaan dilaksanakan oleh:
 - a) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
 - b) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
 - c) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - d) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - e) 17 Kapanewon.
 - 2) Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh:
 - a) Bappeda;
 - b) Dinas Kebudayaan;
 - c) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
 - d) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - e) Dinas Pariwisata;
 - f) Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - g) 17 Kapanewon.
 - 3) Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
 - 4) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
- c. Capaian Kinerja BKK Dana Keistimewaan Tahun 2022

Alokasi Anggaran BKK Dana Keistimewaan Tahun 2022 sebesar Rp107.644.018.095,00 sesuai Berita Acara (BA) Perubahan II (kedua) pada tanggal 25 November 2022. Sedangkan Capaian Kinerja BKK Dana Keistimewaan Tahun 2022 ini sesuai dengan Berita Acara (BA) Pemantauan dan Evaluasi Kinerja atas Laporan Pencapaian Keluaran (Output) terhadap Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahap Akhir BKK Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 1 Februari 2023. Capaian kinerja BKK Dana Keistimewaan Kabupaten Sleman Tahun 2022 dari total pagu anggaran Rp107.644.018.095,00 yaitu berupa realisasi keuangan sebesar Rp102.444.467.658,44 atau 95,17%, dan realisasi fisik sebesar 98,67%.





Tabel 4.1
Capaian Kinerja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan DIY Kabupaten Sleman
Tahun 2022

No	Urusan / Perangkat Daerah	Tahap Akhir (30 Desember 2022)			
		Pagu (Rp)	Realisasi		
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	Urusan Kelembagaan	1.795.195.700,00	1.728.733.587,00	96,30%	100,0%
	Bagian Organisasi	366.588.000,00	354.778.050,00	96,78%	100,0%
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	112.380.700,00	104.448.195,00	92,94%	100,0%
	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	425.708.000,00	402.680.570,00	94,59%	100,0%
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	404.259.000,00	401.327.572,00	99,27%	100,0%
	Kap. Gamping	28.500.000,00	27.100.000,00	95,09%	100,0%
	Kap. Godean	28.600.000,00	28.600.000,00	100,00%	100,0%
	Kap. Moyudan	28.100.000,00	28.100.000,00	100,00%	100,0%
	Kap. Minggir	28.500.000,00	27.100.000,00	95,09%	100,0%
	Kap. Seyegan	28.500.000,00	27.100.000,00	95,09%	100,0%
	Kap. Mlati	26.500.000,00	25.100.000,00	94,72%	100,0%
	Kap. Depok	28.160.000,00	25.510.000,00	90,59%	100,0%
	Kap. Berbah	28.500.000,00	28.100.000,00	98,60%	100,0%
	Kap. Prambanan	30.000.000,00	28.600.000,00	95,33%	100,0%
	Kap. Kalasan	28.500.000,00	26.898.200,00	94,38%	100,0%
	Kap. Ngemplak	28.500.000,00	27.100.000,00	95,09%	100,0%
	Kap. Ngaglik	30.000.000,00	28.544.500,00	95,15%	100,0%
	Kap. Sleman	28.500.000,00	28.100.000,00	98,60%	100,0%
	Kap. Tempel	30.000.000,00	28.440.000,00	94,80%	100,0%
	Kap. Turi	28.400.000,00	27.000.000,00	95,07%	100,0%
	Kap. Pakem	28.500.000,00	27.100.000,00	95,09%	100,0%
	Kap. Cangkringan	28.500.000,00	27.006.500,00	94,76%	100,0%
2	Urusan Kebudayaan	18.604.900.669,00	18.285.442.139,44	98,28%	100,00%
	Dinas Kebudayaan	13.357.590.469,00	13.127.376.971,00	98,28%	100,00%
	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	395.415.000,00	382.006.778,00	96,61%	100,00%
	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.954.461.200,00	2.903.104.500,00	98,26%	100,00%
	Dinas Pariwisata	1.000.000.000,00	997.784.590,44	99,78%	100,00%
	Satuan Polisi Pamong Praja	468.120.000,00	445.881.000,00	95,25%	100,00%
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	66.314.000,00	66.314.000,00	100,00%	100,00%
	Kap. Gamping	18.250.000,00	18.250.000,00	100,00%	100,00%
	Kap. Godean	23.750.000,00	23.750.000,00	100,00%	100,00%
	Kap. Moyudan	19.250.000,00	19.244.400,00	99,97%	100,00%
	Kap. Minggir	20.500.000,00	20.500.000,00	100,00%	100,00%
	Kap. Seyegan	20.250.000,00	20.250.000,00	100,00%	100,00%
	Kap. Mlati	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00%	100,00%
	Kap. Depok	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00%	100,00%
	Kap. Berbah	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00%	100,00%
	Kap. Prambanan	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00%	100,00%
	Kap. Kalasan	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00%	100,00%





No	Urusan / Perangkat Daerah	Tahap Akhir (30 Desember 2022)			
		Pagu (Rp)	Realisasi		
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
	Kap. Ngemplak	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00%	100,00%
	Kap. Ngaglik	25.750.000,00	25.750.000,00	100,00%	100,00%
	Kap. Sleman	24.250.000,00	24.250.000,00	100,00%	100,00%
	Kap. Tempel	29.500.000,00	29.500.000,00	100,00%	100,00%
	Kap. Turi	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00%	100,00%
	Kap. Pakem	18.750.000,00	18.729.900,00	99,89%	100,00%
	Kap. Cangkringan	21.750.000,00	21.750.000,00	100,00%	100,00%
3	Urusan Pertanahan	2.813.796.096,00	2.681.584.302,00	95,30%	97,82%
	Dinas Pertanahan dan Tata Runag	2.813.796.096,00	2.681.584.302,00	95,30%	97,82%
4	Urusan Tata Ruang	84.430.125.630,00	79.748.707.630,00	94,46%	98,38%
	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	84.430.125.630,00	79.748.707.630,00	94,46%	98,38%
	KABUPATEN SLEMAN	107.644.018.095,00	102.444.467.658,44	95,17%	98,67%

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman, 2023 (data diolah)

1) Urusan Kelembagaan

Urusan Kelembagaan dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah yaitu Bagian Organisasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan 17 Kapanewon. Pagu anggaran sebesar Rp1.795.195.700,00 dengan realisasi keuangan Rp1.728.733.587,00 atau 96,30%, dan realisasi fisik 100,00%.

a) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Pagu anggaran di Bagian Organisasi sebesar Rp366.588.000,00, dengan realisasi keuangan sebesar Rp354.778.050,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 96,78% dan realisasi fisik 100,00%. Kegiatan pada Bagian Organisasi yang dilaksanakan dengan BKK Dana Kesitimewaan DIY sebagai berikut:

- (1) Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan, subkegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan output kegiatan 1 dokumen.
- (2) Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan, Subkegiatan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota dengan output kegiatan 1 dokumen.





b) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

Pagu anggaran BKK Dana Kesitimewaan DIY pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan tahun 2022 sebesar Rp112.380.700,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp104.448.195,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 92,94% dan realisasi fisik 100,00%. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan, Subkegiatan Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan dengan output kegiatan pengukuhan 84 lurah.

c) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Pagu anggaran BKK Dana Kesitimewaan DIY pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan tahun 2022 sebesar Rp425.708.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp402.680.570,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 94,59% dan realisasi fisik 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan yaitu Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan dengan output kegiatan 2 angkatan sejumlah 60 orang.

d) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pagu anggaran BKK Dana Keistimewaan DIY pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2022 sebesar Rp404.259.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp401.327.572,00 sehingga capaian kinerja keuangan 99,27% dan realisasi fisik 100,00%. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan dengan capaian output kegiatan:

- (1) Dokumen Perubahan/Penyesuaian Perencanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Tahun 2023 sejumlah 1 dokumen
- (2) Dokumen Usulan Perencanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Tahun 2024 sejumlah 1 dokumen





- (3) Dokumen Perubahan/Redesain I Perencanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Tahun 2022 sejumlah 1 dokumen
- (4) Dokumen Perubahan/Redesain II Perencanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Tahun 2022 sejumlah 1 dokumen
- (5) Dokumen Pedoman usulan BKK Dana Keistimewaan sejumlah 1 dokumen

e) 17 Kapanewon

Pagu anggaran BKK Dana Keistimewaan DIY pada 17 Kapanewon tahun 2022 sebesar Rp486.260.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp465.499.200,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 95,73% dan realisasi fisik 100,00%.

Kegiatan yang dilaksanakan dengan BKK Dana Kesitimewaan DIY pada 17 kapanewon adalah Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan dengan telah tersusunnya Dokumen Usulan Perencanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Kapanewon dan Kaluran Tahun 2024 sejumlah 1 dokumen pada masing-masing kapanewon.

2) Urusan Kebudayaan

Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah yaitu Dinas Kebudayaan, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja, dan 17 kapanewon. Pagu anggaran BKK Dana Keistimewaan DIY Urusan Kebudayaan sebesar Rp18.604.900.669,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp18.285.442.139,44 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 98,28% dengan realisasi fisik 100,00%. Capaian kinerja pelaksanaan BKK Dana Kesitimewaan DIY Urusan Kebudayaan pada perangkat daerah, sebagai berikut:

a) Dinas Kebudayaan

Pagu anggaran BKK Dana Kesitimewaan DIY tahun 2022 pada Dinas Kebudayaan sebesar Rp13.357.590.469,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp13.127.376.971,00 sehingga capaian kinerja





keuangan 98,28% dengan realisasi fisik 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran BKK Dana Keistimewaan DIY pada Dinas Kebudayaan, sebagai berikut:

- (1) Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman dengan akan dilaksanakan:
 - (a) Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan
 - (b) Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra
 - (c) Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman
- (2) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya dengan akan dilaksanakan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya
- (3) Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan dengan telah dilaksanakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya
- (4) Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya dengan akan dilaksanakan:
 - (a) Pembinaan Lembaga Penggiat Seni;
 - (b) Misi Kebudayaan kedalam dan Luar negeri Dalam Rangka Diplomasi Budaya;
 - (c) Penghargaan Seniman dan Budayawan;
 - (d) Festival Kebudayaan Yogyakarta;
 - (e) Gelar Budaya Jogja;
 - (f) Publikasi Seni dan Budaya Daerah;
 - (g) Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi;
 - (h) Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur Dalam Masyarakat;
 - (i) Penyelenggaraan Event Penggiat Seni;
 - (j) Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi; dan
 - (k) Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya dengan telah dilaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota.





b) Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan

Pagu anggaran BKK Dana Kesitimewaan DIY pada Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan tahun 2022 sebesar Rp395.415.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp382.006.778,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 96,61% dan realisasi fisik 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya, Subkegiatan Pengembangan Lumbung Mataramam dengan output kegiatan terlaksananya:

- (1) Pengembangan Lumbung Mataraman 6 kelompok;
- (2) Pengembangan Padi Sembada Merah dan Hitam di 5 Lokasi;
- (3) Penumbuhan KWT Lumbung Mataraman di 2 kelompok.

c) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pagu anggaran BKK Dana Kesitimewaan DIY pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp2.954.461.200,00 terealisasi Rp2.903.104.500,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 98,26% dan realisasi fisik 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan dengan BKK Dana Kesitimewaan DIY Urusan Kebudayaan pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya Subkegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota dengan output kegiatan adalah Pematangan Lahan Taman Budaya 1 paket.

d) Dinas Pariwisata

Pagu anggaran BKK Dana Keistimewaan DIY pada Dinas Pariwisata tahun 2022 sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp997.784.590,44 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 99,78% dan realisasi fisik 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pariwisata dengan anggaran BKK Dana Keistimewaan DIY Urusan Kebudayaan adalah Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya, Subkegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya dengan output kegiatan:





- (1) Atraksi Seni Even Khusus sebanyak 10 kali;
- (2) Pembangunan Seni Instalasi di 2 Desa Wisata.

e) Satuan Polisi Pamong Praja

Pagu anggaran BKK Dana Keistimewaan DIY pada Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2022 sebesar Rp468.120.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp445.881.000,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 95,25% dan realisasi fisik 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan pada Satuan Polisi Pamong Praja dengan BKK Dana Keistimewaan DIY Urusan Kebudayaan adalah Pembinaan Jaga Warga dengan terbentuknya Jaga Warga di 32 Padukuhan.

f) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pagu anggaran BKK Dana Keistimewaan DIY Urusan Kebudayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2022 sebesar Rp66.314.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp66.314.000,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 100,00% dan realisasi fisik 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan dengan BKK Dana Keistimewaan DIY Urusan Kebudayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kegiatan Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia dengan Fasilitas Forum Warisan Geologi Kabupaten Sleman dengan output kegiatan sebanyak 1 dokumen.

g) 17 Kapanewon

Pagu anggaran BKK Dana Kesitimewaan DIY Urusan Kebudayaan pada 17 kapanewon tahun 2022 sebesar Rp363.000.000,00, dengan realisasi keuangan sebesar Rp362.974.300,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 99,99% dan realisasi fisik 100,00%. Kegiatan di 17 kapanewon yang dilaksanakan dengan anggaran BKK Dana Kesitimewaan DIY Urusan Kebudayaan adalah Kegiatan Gelar Budaya Yogyakarta dengan telah dilaksanakan Acara Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 1 kali di masing-masing kapanewon.





3) Urusan Pertanahan

BKK Dana Kesitimewaan DIY Urusan Pertanahan diampu oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dengan pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp2.813.796.096,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp2.681.584.302,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 95,30% dan realisasi fisik 97,82%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dengan subkegiatan:

- a) Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, dengan output sebagai berikut:
 - (1) Data Identifikasi dan sket bidang sebanyak 875 bidang;
 - (2) Dokumentasi video hasil kegiatan penatausahaan 6 video;
 - (3) Pemasangan patok bidang tanah kalurahan 875 bidang;
 - (4) Pemberkasan peta bidang tanah kalurahan 875 bidang;
 - (5) Pembuatan patok bidang tanah kalurahan 7.000 patok;
 - (6) Pendaftaran pencatatan perubahan sertifikat tanah desa 1.248 sertifikat;
 - (7) Pendaftaran tanah kalurahan di Badan Pertanahan Nasional 324 bidang;
 - (8) Penegasan batas wilayah kalurahan di 9 kalurahan; dan
 - (9) Verifikasi tanah kalurahan yang belum bersertifikat sebanyak 800 bidang.
- b) Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten dengan hasil keluaran:
 - (1) Dokumentasi video hasil kegiatan 2 Video; dan
 - (2) Rekomendasi Bupati/Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang penggunaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah kalurahan di Kabupaten Sleman sebanyak 20 rekomendasi.
- c) Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Kalurahan fisik 100%
 - (1) Dokumentasi video hasil kegiatan sebanyak 2 video;





- (2) Fasilitasi rekomendasi Bupati / Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang penanganan permasalahan tanah kalurahan sejumlah 3 kalurahan; dan
 - (3) Identifikasi permasalahan pertanahan tanah kalurahan sebanyak 86 kalurahan.
- d) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan Berita Acara Kesepakatan dengan telah tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan Kabupaten Sleman sebanyak 9 unit.
- 4) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diampu oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman. Pagu anggaran BKK Dana Kesitimewaan DIY Urusan Kebudayaan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang tahun 2022 sebesar Rp84.430.125.630,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp79.748.707.630,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 94,46% dan realisasi fisik 98,38%. Kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran BKK Dana Kesitimewaan DIY adalah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten, Subkegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo dengan output, sebagai berikut:
- a) Apraisal tanah, bangunan, dan tanaman ruas jalan Prambanan-Lemahbang Segmen B sejumlah 1 dokumen;
 - b) Apraisal tanah, bangunan, dan tanaman 3 (tiga) bidang tanah ruas jalan Prambanan-Lemahbang Segmen A sejumlah 1 dokumen;
 - c) Pengadaan lahan ruas jalan Prambanan-Lemahbang Segmen B dari target pembebasan lahan seluas 147.450m² (sudah terbebaskan 142.940 m², tanah sisa warga yang tidak jadi dijual 223m² sehingga lahan yang belum terbebaskan 4.510m²);
 - d) Pengadaan tanah bidang tanah ruas jalan Prambanan-Lemahbang segmen A yang belum terbebaskan tahun 2021 dan sedang dilaksanakan pembebasan di tahun 2022 seluas 1.729 m²;





- e) Sertifikasi Bidang Tanah Segmen A dilaksanakan pada tahun 2023 karena Kantor Pertanahan pada bulan Oktober (sesudah perubahan 2 tahun 2022) sudah tidak menerima permohonan pensertifikatan.
- d. Permasalahan
 - 1) Urusan Pertanahan
 - a) Pendaftaran Tanah Desa di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, dari target 400 bidang terealisasi 324 bidang, masih ada 76 bidang yang belum selesai. Hal ini dikarenakan Peta Bidang Tanah (PBT) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman keluar di Bulan Oktober sehingga tidak dapat terfasilitasi pada Pendaftaran di Loker Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman; dan
 - b) Pendaftaran Pencatatan Perubahan Sertifikat Tanah Desa, dari target 1.250 sertifikat terealisasi 1.248 sertifikat, masih ada 2 bidang yang belum tersertifikasi. Hal ini dikarenakan 2 bidang ini yang tidak dapat dilakukan karena perbedaan luas pada sistem internal Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.
 - 2) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a) Pengadaan Lahan Ruas Jalan Prambanan-Lemahbang Segmen B, dari target pembebasan lahan adalah seluas 147.450 m², sampai saat ini yang sudah terbebaskan adalah seluas 142.940 m², ada tanah sisa warga yang tidak jadi dijual seluas 223 m², sehingga lahan yang belum terbebaskan adalah seluas 4.510 m².
 - b) Sertifikasi Bidang Tanah Segmen A sedang dilaksanakan pemberkasan untuk pensertifikatan, dikarena Kantor Pertanahan pada bulan oktober (sesudah perubahan 2 Tahun 2022) sudah tidak menerima Permohonan pensertifikatan sampai akhir tahun,
- e. Solusi
 - 1) Urusan Pertanahan:
 - a) Telah berkoordinasi dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemda DIY terkait 2 bidang yg terkendala saat cetak sps untuk mendapatkan arahan selanjutnya.





- b) Telah melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman agar bidang tanah *clean and clear* sebelum dilakukan pendaftaran.
 - c) Telah melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman terkait penerbitan PBT terkait waktu dan kendala yg dihadapi saat penerbitan PBT.
 - d) Terhadap kekurangan 76 bidang tanah yang belum terdaftar sudah dilaporkan ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemda DIY agar dapat dianggarkan di tahun berikutnya.
- 2) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a) Kewenangan atas Tanah Desa dan Sultan Ground (SG) ada di Propinsi.
 - b) Warga belum setuju dengan besaran ganti rugi, berkas sudah masuk ke pengadilan (konsinyasi) sejumlah 1 bidang.
 - c) Tanah desa sebanyak 6 bidang, sudah diajukan izin pelepasan tanah kasultanan, untuk pembebasannya menunggu izin pelepasan tanah dari Keraton.
 - d) Tanah SG sebanyak 1 bidang dengan luas 60 m², sedang diajukan permohonan palilah ke keraton karena sesuai instruksi dari keraton bahwa tanah tanah SG tidak akan dilepaskan. Informasi dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral Pemda DIY tidak mengganggu pembangunan jalan.
 - e) Tanah wakaf sebanyak 1 bidang dengan luas 194 m² dan Tanah PT Telkom (yang didalamnya terdapat tanah SG) sebanyak 1 bidang seluas 449 m² sudah terbayarkan. Untuk tanah yang dibayarkan hanya tanah PT Telkom saja seluas 72 m², sedangkan untuk tanah SG seluas 377 m² tidak dibayarkan karena sesuai instruksi dari keraton bahwa tanah tanah SG tidak akan dilepaskan tapi hanya bisa dipakai dengan Surat Palilah.





3. Bantuan Khusus Keuangan (BKK) Pemerintah Daerah DIY

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 4) Peraturan Gubernur DIY Nomor 89 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah dan Tata Cara Bagi Hasil Daerah;
- 5) Keputusan Gubernur DIY Nomor 303/KEP/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 134/KEP/2022 tentang Penerima Bantuan Pengembangan Usaha Bagi Kelompok Usahan Bersama Tahun 2022 pada Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Dengan Mekanisme Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2022;
- 6) Keputusan Gubernur DIY Nomor 306/KEP/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 135/KEP/2022 tentang Penerima Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif Program Keluarga Harapan Graduasi tahun 2022 dan Penerima Bantuan Pengembangan Usaha bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Graduasi Tahun 2019 dengan Mekanisme Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2022;
- 7) Peraturan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 443/02668 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Keuangan Daerah Bersifat Khusus untuk Jambanisasi di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman tahun anggaran 2022;



- 8) Peraturan Bupati Sleman Nomor 3.2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Padat Karya; dan
- 9) Keputusan Bupati Sleman Nomor 50.11/Kep.KDH/A/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 16.3/Kep.KDH/A/2022 tentang Penerima Bantuan Sosial untuk Jambanisasi Tahun 2022.

b. Gambaran Umum

Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sleman adalah bantuan Pemerintah Daerah DIY kepada Pemerintah Kabupaten Sleman dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja tidak langsung dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Tahun 2022 Kabupaten Sleman menerima BKK Pemda DIY terdiri dari 3 (tiga) Perangkat Daerah yaitu: Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Tenaga Kerja.

c. Capaian Kinerja BKK Propinsi DIY

Capaian kinerja BKK DIY Tahun 2022, disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.2
Capaian Kinerja BKK DIY yang Dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2022

No	Program / Kegiatan	Perencanaan Kegiatan		Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan	
		Volume	Pagu (Rp)	Volume	%	Rp	%
1	Jambanisasi						
	APBD murni	100 KK	400.000.000	100 KK	100	400.000.000	100
	APBD Perubahan (SILPA 2021)	94 KK	376.000.000	94 KK	100	376.000.000	100
2	Padat karya	59 Lokasi	10.620.000.000	59 Lokasi	100	10.620.000.000	100
3	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Graduasi Tahun 2022	190 KPM	570.000.000	190 KPM	100	570.000.000	100
4	Bantuan Pengembangan UEP bagi KPM PKH Graduasi Tahun 2019	108 KPM	324.000.000	108 KPM	100	324.000.000	100
5	Bantuan pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif (KUBE)	10 KUBE	230.000.000	10 KUBE	100	230.000.000	100



No	Program / Kegiatan	Perencanaan Kegiatan		Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan	
		Volume	Pagu (Rp)	Volume	%	Rp	%
6	Bantuan Pengembangan UEP Bagi KPM PKH Graduasi SILPA 2021	2 Orang	6.000.000	2 Orang	100	6.000.000	100
7	Bantuan Pengembangan KUBE SILPA 2021	1 KUBE	20.000.000	1 KUBE	100	20.000.000	100
	Jumlah		12.546.000.000		100	12.546.000.000	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2023 (data diolah)

Alokasi anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemda DIY untuk Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2022 sebesar Rp12.546.000.000,00. Capaian realisasi kinerja pelaksanaan sebagai berikut:

1) Dinas Kesehatan

Anggaran BKK Pemda DIY tahun 2022 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp776.000.000,00 terdiri anggaran (murni) sebesar Rp400.000.000,00 dan anggaran Perubahan (Silpa Tahun 2021) sebesar Rp376.000.000,00.

Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan jambanisasi untuk 100 sasaran penerima bantuan jambanisasi dengan anggaran murni, terdiri dari:

- a) Kalurahan Balecatur, Gamping sebanyak 61 KK dengan anggaran Rp244.000.000,00;
- b) Kalurahan Sidoluhur, Godean sebanyak 39 KK dengan anggaran Rp156.000.000,00.

Realisasi keuangan sebesar Rp400.000.000,00 atau 100,00% dan sudah direalisasikan kepada 100 KK sehingga capaian realisasi fisik 100,00%.

Sedangkan anggaran perubahan (Silpa Tahun 2021) terdiri dari:

- a) Kalurahan Sumbersari, Moyudan sebanyak 50KK dengan anggaran Rp200.000.000,00 (pada semester I)
- b) Kalurahan Sumbersari, Moyudan sebanyak 44KK dengan anggaran Rp1760.000.000,00 (pada semester II)



Realisasi keuangan sebesar Rp376.000.000,00 atau 100,00% dan telah direalisasikan kepada 100 KK capaian realisasi fisik 100,00%.

2) Dinas Tenaga Kerja

Anggaran BKK Pemda DIY tahun 2022 pada Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp10.620.000.000,00. Dinas Tenaga Kerja melaksanakan kegiatan padat karya untuk pembuatan talud saluran air, talud jalan, talud jalan drainase, talud, drainasi, dan corblok jalan. Jumlah anggaran yang dikelola untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp10.620.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp10.620.000.000,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 100,00%, dan realisasi fisik sebesar 100,00%. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk 59 lokasi penerima berikut:

Tabel 4.3
Lokasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Pemda DIY
(Padat Karya) Tahun 2022

No	Lokasi	Jenis Kegiatan
1	Candi Singo Madurejo Prambanan	Corblok
		Sumur Resapan
2	Serut Madurejo Prambanan	Corblok
3	Bendosari Madurejo Prambanan	Talud
		Corplat
4	Losari 2 Wukirharjoo Prambanan	Corblok
5	Mlakan Sambirejo Prambanan	Corblok
6	Dongkelsari Wukirsari Cangkringan	Talud
7	Ngumbul, Bangunkerto, Turi	Corblok
		Talud
		Corplat
8	Ganggong, Bangunkerto, Turi	unit+C22:C36
9	Jurugan, Bangunkerto, Turi	Talud
10	Klegung, Donokerto, Turi	Talud
11	Bandaran, Donokerto, Turi	Talud
12	Sidomulyo, Trimuyo, Sleman	Corblok
		Sumur Resapan
13	Kadipolo, Sendangtirto, Berbah	Jalan Corblok
14	Sambiroto, Purwomartani, Kalasan	Talud
15	Sumber Kidul, Kalitirto, Berbah	Jalan Corblok
16	Ringinsari, Maguwoharjo, Depok	Jalan Corblok
		Talud
		Sumur Resapan
17	Pugeran, Maguwoharjo, Depok	Jalan Corblok
18	Sanggrahan, Maguwoharjo, Depok	Jalan Corblok
19	Sokabinangun, Merdikorejo	Corblok
20	Gamblok, Merdikorejo	Saluran Irigasi
21	Glagahombo, Pondokrejo	Talud
22	Gerjen, Seyegan	Corblok
23	Purworejo, Hargobinangun	Saluran Irigasi
24	Sumberan, Candibinangun	Talud
		Corblok



No	Lokasi	Jenis Kegiatan
25	Banyumeneng, Banyuraden	Talud
		Drainase
26	Watulangkah, Ambarketawang	Talud Jalan
27	Bendosari, Sumbersari	Drainase
		Gorong-Gorong
28	Nasri, Sumbersari	Corblok
29	Candran, Sidoarum	Corblok
30	Rewulu Wetan	Corblok
		Talud
31	Sembung, Sendangtirto	Corblok
32	Karang Wetan, Tegaltirto	Corblok
33	Berbah Sanggrahan, Tegaltirto	Corblok
34	Demangan, Maguwoharjo	Corblok
35	Meguwo, Maguwoharjo	Corblok
36	Blotan, Wedomartani	Corblok
37	Bedog, Trihanggo	Corblok
38	Dukuh, Sidokarto	Corblok
		Talud Jalan
		Gorong-Gorong
39	Pasar Kowen, Sidokarto	Corblok
		Talud
		Gorong-Gorong
40	Patran, Sumbersari	Corblok
		Talud
		Gorong-Gorong
41	Gadingan, Sinduharjo	Corblok
		Drainase & Talud
42	Brongkol, Sidomulyo	Talud Jalan
		Plat Gorong gorong
43	Srodokan, Wukirsari	Corblok
44	Watuadeg, Wukirsari	Talud
45	Balangan, Wukirsari	Talud
46	Pakem, Tamanmartani	Corblok
47	Cageran, Tamanmartani	Talud
48	Geneng, Tirtomartani	Corblok
49	Sub LMPK Padukuhan Klepu Kidul Sendangmulyo	Corblok
50	Sub LPMK Padukuhan Jongke Kidul Sendangadi	Talud
51	Sub Unit LPM Padukuhan Blunyah Gede	Corblok
52	Sub Unit LPM Padukuhan Polowidi Trimulyo	Corblok
53	LPMK Wonokerto	Corblok
54	LPMK Bangunkerto	Corblok
55	Krandon, Malangan, Sumberagung Moyudan	Talud
56	Pedaran, Kaliurang Sumberagung Moyudan	Corblok
57	Kruwet Sumberagung Moyudan	Corblok
58	Gamplong 5 Sumberrahayu Moyudan	Drainase
59	Gatak Sumberagung Moyudan	Corblok

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, 2023

3) Dinas Sosial

Anggaran BKK Pemda DIY tahun 2022 pada Dinas Sosial sebesar Rp1.150.000.000,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a) Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) Graduasi tahun





- 2022 untuk 190 KPM, dengan anggaran Rp570.000.000,00.
Dengan lokasi di Sleman dan Turi;
- b) Bantuan UEP bagi KPM PKH Graduasi tahun 2019 sebanyak 108 KPM, dengan anggaran Rp324.000.000,00;
 - c) Bantuan pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi 10 KPM dengan anggaran Rp230.000.000,00;
 - d) Bantuan UEP Bagi KPM PKH Graduasi SILPA 2021 sebanyak 2 Orang dengan anggaran Rp6.000.000,00; dan
 - e) Bantuan pengembangan KUBE SILPA 2021 sebanyak 1 KUBE dengan anggaran Rp20.000.000,00 dimana sudah direalisasikan bantuan ke 1 KUBE. Lokasi di Kapanewon Pakem.

Realisasi keuangan dan fisiknya sebagai berikut:

- a) Bantuan UEP bagi KPM PKH Graduasi Tahun 2022, realisasi keuangan Rp570.000.000,00 atau 100,00%, realisasi fisik 100,00%, dimana sudah direalisasikan bantuan ke 190 KPM. Lokasi di Kapanewon Sleman dan Turi;
- b) Bantuan pengembangan UEP bagi KPM PKH Graduasi tahun 2019, realisasi keuangan Rp324.000.000,00 atau 100,00%, realisasi fisik 100,00%, dimana sudah direalisasikan bantuan ke 108 KPM. Lokasi di Kapanewon Tempel;
- c) Bantuan pengembangan KUBE tahun 2022, realisasi keuangan Rp230.000.000,00 atau 100%, realisasi fisik 100% dimana sudah direalisasikan bantuan ke 10 KUBE. Lokasi di Kapanewon Prambanan, Kalasan, Cangkringan, Ngemplak, Pakem dan Turi;
- d) Bantuan Pengembangan UEP bagi KPM PKH Graduasi SILPA 2021, realisasi keuangan Rp6.000.000,00 atau 100,00%, dimana sudah direalisasikan bantuan ke 2 orang. Lokasi di Kapanewon Prambanan; dan
- e) Bantuan Pengembangan KUBE SILPA 2021, realisasi keuangan Rp20.000.000,00 dimana sudah direalisasikan bantuan ke 1 KUBE. Lokasi di Kapanewon Pakem.





C. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri dari DAK Fisik dan DAK Nonfisik. DAK Fisik merupakan pendanaan kegiatan khusus yang dialokasikan ke daerah untuk mendanai kegiatan fisik sedangkan DAK Nonfisik digunakan untuk pendanaan Nonfisik daerah. DAK Nonfisik tahun 2022 digunakan untuk mendukung pemenuhan pelayanan publik dan mendukung prioritas nasional. Pemenuhan pelayanan publik tahun 2022 dilaksanakan pada bidang pendidikan dan kesehatan.

Pada bidang Pendidikan pendanaan DAK Nonfisik digunakan untuk kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), Tunjangan Khusus Guru PNS Daerah di Daerah Khusus, Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNS Daerah, dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD. Pada bidang kesehatan pendanaan DAK Nonfisik digunakan untuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB). Sedangkan dalam mendukung prioritas nasional pendanaan DAK Nonfisik digunakan untuk kegiatan pelayanan kepariwisataan dan penguatan kapasitas kelembagaan sentra industry kecil dan menengah.

Arah kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik tahun anggaran 2022 yaitu:

1. memberikan dukungan layanan pada sektor yang menjadi fokus prioritas pada RKP;
2. mendukung peningkatan kualitas layanan sektor produktif seperti pariwisata dan pertanian;
3. mendorong peningkatan investasi di daerah melalui dukungan operasionalisasi dan perbaikan sistem pelayanan investasi di daerah;
4. mengarahkan pemanfaatan DAK Nonfisik untuk peningkatan kualitas SDM dan daya saing daerah; dan
5. memperkuat sinergi pendanaan antara DAK Nonfisik, DAK Fisik, Belanja K/L, dan sumber pendanaan lainnya.





Pendanaan DAK Fisik tahun 2022 terdapat penambahan 2 yaitu bidang perdagangan dan bidang usaha mikro kecil dan menengah. Rencana pengalokasian DAK Fisik memperhatikan beberapa hal, sebagai berikut

1. mengutamakan bidang terkait langsung dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural khususnya *major project* terkait antara lain:
 - a. pertanian (mendukung *food estate*);
 - b. kelautan Perikanan (mendukung Ketahanan Pangan);
 - c. jalan (mendukung dan mendorong ekonomi); dan
 - d. dukungan pariwisata (mempertimbangkan aspek ketuntasan dan sinergi bidang).
2. mempertimbangkan kapasitas pelaksanaan.
3. sinergi alokasi dan pemanfaatan DAK Fisik dan DAK Nonfisik serta dengan Belanja kementerian dan lembaga.

DAK Fisik bertujuan untuk mendorong penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar publik, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pencapaian Prioritas Nasional RKP tahun 2022, serta percepatan pembangunan daerah dan kawasan. Pada tahun 2022, DAK Fisik dibagi menjadi dua jenis, yaitu DAK Reguler dan DAK Penugasan. Arah kebijakan umum DAK Fisik tahun 2022 sebagai berikut:

1. mempertajam fokus kegiatan DAK sehingga berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi sebagai respon dampak pandemi Covid-19;
2. meningkatkan pemerataan layanan dan infrastruktur dasar di daerah;
3. mendukung pencapaian prioritas nasional melalui kebijakan DAK berbasis tematik (khususnya pariwisata dan IKM, Food Estate dan Sentra Produksi Pangan, dan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif);
4. refocusing menu pada kegiatan bernilai signifikan serta menuntaskan hambatan pelaksanaan di daerah;
5. mempertajam penentuan lokasi prioritas berbasis sektoral dan regional; dan
6. memperkuat integrasi pemanfaatan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung oleh sumber pendanaan lainnya.





Landasan hukum perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022 yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan-Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran bahwa Bappenas menyusun rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus yang diarahkan untuk mencapai Sasaran Pembangunan Nasional.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP); dan
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan Dana Transfer Khusus.





Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional memiliki fungsi untuk melakukan koordinasi usulan kegiatan khusus yang akan didanai DAK untuk ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sementara itu, pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 disebutkan bahwa Dana Perimbangan merupakan transfer dana yang bersumber dari APBN ke daerah berupa DBH, DAU, dan DAK. Pengalokasian Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antar daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah, mendorong percepatan pembangunan daerah, dan pencapaian sasaran nasional.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 mengatur bahwa arah kebijakan dan bidang yang dibiayai Dana Transfer Khusus ditetapkan oleh menteri berdasarkan hasil rapat pimpinan bersama seluruh deputi pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2019 mengatur bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan pengusulan, verifikasi, penetapan rencana kegiatan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan Dana Transfer Khusus. Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sistem Informasi KRISNA dikelola bersama antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan serta dirancang untuk pihak yang terlibat dalam perencanaan DAK.

Berikut ini merupakan DAK Fisik dan DAK Nonfisik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Sleman:

1. Dinas Pendidikan

a. Dasar Hukum

- 1) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021;
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2022;





3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun 2022.

b. Gambaran Umum

DAK yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman merupakan pelimpahan ketugasan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan DAK Fisik dan DAK Nonfisik.

1) DAK Fisik, yaitu:

- a) penambahan ruang kelas baru;
- b) pembangunan ruang guru/kepala sekolah/tata usaha;
- c) pembangunan ruang guru beserta perabotnya;
- d) pembangunan ruang unit kesehatan sekolah;
- e) pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;
- f) pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah;
- g) rehabilitasi sedang/berat ruang kelas;
- h) rehabilitasi sedang/berat ruang guru/kepala sekolah/tata usaha;
- i) rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah;
- j) rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah;
- k) rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah;
- l) pengadaan mebel sekolah;
- m) pengadaan alat praktik dan peraga siswa;
- n) pembangunan laboratorium sekolah dasar;
- o) rehabilitasi sedang/berat laboratorium sekolah dasar;
- p) pembangunan perpustakaan sekolah;
- q) rehabilitasi sedang/berat laboratorium;
- r) rehabilitasi sedang/berat ruang tata usaha;
- s) pengadaan mebel pendidikan nonformal/kesetaraan; dan
- t) pengadaan alat praktik dan peraga siswa nonformal/kesetaraan.

2) DAK Nonfisik

- a) Bantuan Operasional Pendidikan (BOP);
- b) BOP Pendidikan;
- c) Tunjangan Profesi Guru (TPG); dan
- d) Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASN Daerah.





c. Capaian Kinerja

Jumlah anggaran DAK Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2022 adalah Rp144.369.048.000,00 dengan realisasi anggaran DAK Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman pada Tahun 2022 sebesar Rp137.166.991.354,00 atau 95,01% yang terdiri dari:

- 1) DAK Fisik sebesar Rp17.858.948.000,00 dengan realisasi Rp16.172.489.990,00 atau 90,56%; dan
- 2) DAK Nonfisik sebesar Rp126.510.100.000,00 dengan realisasi Rp120.994.501.364,00 atau 95,64%.

2. Dinas Kesehatan

a. Dasar Hukum

- 1) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun anggaran 2022.
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun anggaran 2022.

b. Gambaran Umum

DAK Bidang Kesehatan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang difokuskan pada upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), upaya percepatan perbaikan gizi masyarakat, upaya Gerakan Hidup Bersih Sehat (GERMAS), upaya deteksi dini preventif dan respon penyakit, penguatan mutu dan akreditasi laboratorium kesehatan daerah, akreditasi puskesmas, akselerasi PIS-PK, upaya kesehatan lanjut usia, upaya penyehatan lingkungan, serta upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.





Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan bantuan dana dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam membantu pemerintah kabupaten dan kota melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sebagian besar permasalahan di Kabupaten Sleman adalah masih adanya kematian ibu dan bayi yang jumlahnya selalu naik turun dari tahun ke tahun. Angka stunting pada bayi dan balita juga masih cukup tinggi. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu menyelaraskan antara program kegiatan yang akan didukung DAK.

c. Capaian Kinerja

Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman pada Tahun Anggaran 2022 Pagu alokasi DAK Bidang Kesehatan sebesar Rp38.877.162.385,00 dengan rincian DAK Fisik sebesar Rp15.434.809.430,00 dan DAK Nonfisik sebesar Rp23.442.352.955,00. Realisasi DAK Fisik tahun 2022 sebesar Rp14.734.380.105 (95.46%), sedangkan realisasi DAK Nonfisik sebesar Rp20.552.121.237 (87.67%).

3. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prambanan

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022. Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022;
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 012 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit;
- 6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
- 7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;





- 8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit; dan
- 9) Peraturan Bupati Sleman Nomor No. 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

b. Gambaran Umum

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Pelayanan kesehatan diupayakan dapat memberikan pelayanan prima dengan mutu sesuai standar pelayanan. Oleh karena itu sarana prasarana pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan salah satunya melalui Dana Alokasi Khusus Fisik dari pemerintah pusat.

Rumah RSUD Prambanan yang merupakan rumah sakit tipe C yang berada di wilayah Sleman paling timur ingin mengubah stigma yang ada selama ini bahwa RSUD Pemerintah masih bersifat sekedar melayani dan dengan fasilitas yang seadanya. Hal ini harus diubah baik dari aspek perilaku pelayanan maupun fasilitas yang tersedia. Kondisi riil peningkatan kinerja pelayanan di RSUD Prambanan yang cukup signifikan dari waktu ke waktu, menuntut adanya penambahan sarana prasarana pelayanan yang lebih baik.

c. Capaian Kinerja

RSUD Prambanan Kabupaten Sleman pada tahun 2022 mendapatkan alokasi DAK Fisik sebesar Rp3.167.000.000,00 dan terealisasi Rp2.699.356.494,00 (85,23%). Penggunaan DAK Fisik ini adalah untuk bangunan ruang *Pediatric Intensive Care Unit* (PICU) 1 unit yang sudah terealisasi, sehingga capaiannya adalah 100%.

4. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sleman

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022. Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022;





- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 012 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit;
- 6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
- 7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; dan
- 9) Peraturan Bupati Sleman Nomor No. 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

b. Gambaran Umum

RSUD Sleman ditetapkan sebagai Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif* (PONEK) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 237/KEP/2016 tentang Penetapan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Sayang Bayi Tingkat Provinsi Tahun 2016. Berdasarkan hal tersebut RSUD Sleman melalui DAK Fisik mendapatkan beberapa peralatan baru untuk meningkatkan kualitas dan memenuhi standar pelayanan. RSUD Sleman mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp3.524.000.000,00 untuk:

- 1) *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU)
 - a) *Ventilator*;
 - b) *Baby Incubator*;
 - c) *Fototerapi*;
 - d) *Infant Warmer*;
 - e) *Infuse Pump*;
 - f) *Resusitasi table*;
 - g) *Bedside/Patient Monitor*;
 - h) *Suction Pum*;





- i) *T-Piece(Neopuff Infant Resusitator)*; dan
 - j) *Infusion Warmer*.
- 2) *Pediatric Intensive Care Unit (PICU)*.
- a) *Bedside/Patient Monitor*;
 - b) *Ventilator*;
 - c) *Syringe Pump*;
 - d) *Infuse Pump*;
 - e) *Suction Pump*;
 - f) *Infusion Warmer* ; dan
 - g) *Resusitasi Table*.
 - h) *Defibrilator*
- c. *Capaian Kinerja*
- RSUD Sleman pada tahun 2022 memperoleh DAK sebesar Rp3.524.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.293.961.761 (93,47%). Realisasi fisik sebesar 100%.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- a. *Dasar Hukum*
 - 1) Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 - 2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Nasional;
 - 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK/07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;





- 7) Peraturan menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
- 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/MPK/2016 tentang Perubahan ketiga atas PMK Nomor 50/PMK/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
- 9) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
- 11) Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun 2022;
- 12) Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun 2022; dan
- 13) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

b. Gambaran Umum

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan DAK pada dua urusan pemerintahan, yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pada Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diberikan DAK Nonfisik dan pada Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mendapatkan DAK Nonfisik dan DAK Fisik Reguler Subbidang KB.





c. Capaian Kinerja

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman pada Tahun Anggaran 2022 DAK sebesar Rp11.463.074.000,00 dengan realisasi Rp7.712.083.760,00 atau 67,27%. DAK tersebut terdiri dari DAK Fisik dan DAK Nonfisik:

- 1) DAK Fisik Reguler sebesar Rp1.980.607.000,00 dengan realisasi Rp1.943.843.890,00 atau 98,14% serta realisasi fisik sebesar 100%;
- 2) DAK Nonfisik bidang PPA dengan anggaran sebesar Rp601.800.000,00 realisasi Rp447.897.625,00 atau 74,43% serta realisasi fisik sebesar 77,97%; dan
- 3) DAK Nonfisik bidang Keluarga Berencana sebesar Rp8.880.667.000,00 dengan realisasi Rp5.320.342.245,00 atau 59,91% serta realisasi fisik sebesar 60,67%.

d. Permasalahan

- 1) Pada DAK Nonfisik PPA terdapat kendala pada menu mediko legal yang sulit untuk direalisasikan karena biaya tenaga kesehatan/mediko legal seperti visum untuk korban mati, DNA, otopsi, apabila diproses hukum sudah ditanggung oleh pihak kepolisian melalui RS Bhayangkara.
- 2) Pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, permasalahan umum seperti tahun sebelumnya terkait penguncian pagu anggaran per sub menu sehingga dalam beberapa hal sulit untuk bisa direalisasikan secara optimal.

e. Solusi

- 1) Koordinasi dengan pihak terkait, yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, Dinas P3AP2 DIY, dan Kementerian PPPA untuk bisa mengoptimalkan serapan dan pencapaian target kinerja. Kemudian, permasalahan yang ada dijadikan dasar langkah perbaikan penganggaran untuk DAK NF PPA pada tahun berikutnya agar capaian kinerja bisa meningkat.





- 2) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk tetap ber-KB di masa pandemi dengan memberikan jaminan kemudahan layanan dan keamanan kepada para akseptor dan calon akseptor. Setelah masa PPKM dicabut, bakti sosial KB juga langsung diintensifkan sehingga target akseptor KB massal seperti IUD dan Implan dapat terpenuhi.

6. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

a. Dasar Hukum

- 1) Peraturan Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- 2) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro, dan Kecil (DAK Nonfisik PK2UKM).

b. Gambaran Umum

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman tahun 2022 mendapatkan alokasi dana DAK sebesar Rp465.200.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Bidang Koperasi Rp270.419.755,00 berupa pelatihan kompetensi bagi KSP/USP Koperasi.
- 2) Bidang Usaha Mikro Rp194.780.245,00 berupa Bimtek dan Pelatihan penggunaan DAK.

c. Capaian Kinerja

Secara umum pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan lancar pada penyerapan realisasinya sebesar Rp461.782.460,00 dari anggaran sebesar Rp465.200.000,00 atau 99,27% dari target sedangkan untuk realisas fisik kegiatan sebesar 100%.





d. Permasalahan

Selama kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh pendamping Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman memiliki beberapa hambatan/kendala antara lain:

- 1) peserta belum paham akan pentingnya sertifikasi kompetensi bagi koperasi sehingga penyerapan jumlah peserta kurang maksimal;
- 2) kendala kunjungan lapangan, karena adanya Covid-19 sehingga seringkali harus berkoordinasi dengan UMKM terkait untuk mengatur jadwal kembali;
- 3) adanya UMKM yang belum melengkapi *form* biodata dan form identifikasi masalah, sehingga menyulitkan pendamping dalam menghubungi dan membuat perencanaan pendampingan.

e. Solusi

- 1) Pelatihan yang berkesinambungan dan berkelanjutan karena peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya kepada pengurus, pengelola, pengawas sangatlah dibutuhkan sebagai program peningkatan kualitas kelembagaan.
- 2) Pendampingan yang berkesinambungan dan berkelanjutan sehingga dapat diketahui hasil dan kemajuan antara sebelum dan sesudah pelatihan.

7. Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
- 5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/09/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;





- 6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan Dan Perikanan Tahun 2022; dan
- 7) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022.

b. Gambaran Umum

Pembangunan pertanian bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan ketersediaan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, dan meningkatkan ekspor produk pertanian. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan produktivitas, jaminan mutu/kualitas, serta kontinuitas produksi pertanian dengan dukungan gerakan pembaharuan pembangunan pertanian. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu ketersediaan air khususnya irigasi yang sangat menentukan keberhasilan tersebut. Selain faktor tersebut Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan pertanian serta sekaligus merupakan cermin keberhasilan pembangunan pertanian di wilayah kapanewon.

Pada upaya peningkatan produksi ikan dan pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan, Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya bersinergi dengan Kementerian Kelautan Perikanan untuk ikut berperan meningkatkan kesejahteraan para pelaku perikanan. Upaya dilakukan melalui kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha skala kecil masyarakat kelautan dan perikanan (nelayan dan pembudi daya ikan). Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan mengusulkan peningkatan produksi ikan konsumsi dengan paket percontohan nila di kolam dan paket budidaya ikan patin serta program pembangunan/rehabilitasi unit pembenihan rakyat.

c. Capaian Kinerja

Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman pada tahun 2022 memperoleh DAK Fisik, sebagai berikut:





- 1) DAK Fisik Bidang Pertanian sebesar Rp5.075.166.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp4.722.334.946,00,00 atau 93,05%.
- 2) DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.509.411.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp1.347.379.900,00 atau 89,27%.
- 3) DAK Nonfisik Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian Rp416.800.000,00 dengan realisasi Rp399.075.457,00 atau 95,75%.

d. Permasalahan

- 1) Persyaratan teknis yang belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
- 2) Ketidaksiapan penerima manfaat dan kelompok (misalnya kolam belum siap dilakukan penebaran ikan, belum tersedianya jaringan listrik, atau sumber air yang belum tersedia).

e. Solusi

- 1) Pendamping teknis mempersiapkan dan mengkomunikasikan dengan baik persyaratan teknis dan lapangan dengan pemangku kebijakan dan penerima manfaat.
- 2) Penerima manfaat dan kelompok penerima harus siap dengan lapangan baik lahan maupun SDM pengelola serta menerapkan standar operasional pelaksanaan kegiatan budidaya seperti yang sudah ditentukan.

8. Dinas Lingkungan Hidup

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;





- 6) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
- 8) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- 9) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 10) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Penyediaan/ atau Penyedotan Kakus;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- 13) Peraturan Bupati Sleman Nomor 33.2 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Sleman Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

b. Gambaran Umum

Dinas Lingkungan Hidup memiliki ketugasan melakukan pengelolaan persampahan dan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sleman. Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) skala individu merupakan upaya meningkatkan akses sanitasi tak layak menjadi layak dan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) merupakan upaya meningkatkan akses layak menjadi aman. Penyediaan sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah merupakan upaya untuk pengelolaan sampah baik pengurangan maupun penanganan sampah.





c. Capaian Kinerja

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman pada tahun anggaran 2022 memperoleh DAK Fisik sebesar Rp7.505.404.000,00 dengan realisasi Rp7.349.410.160,00 atau 97,92%.

d. Permasalahan

- 1) Pembangunan jaringan dan SR di SPALD-T skala permukiman sudah memasuki musim hujan sehingga agar terganggu ketika hujan.
- 2) Pada saat hujan tanah di lokasi pembangunan berlumpur sehingga sulit digali.
- 3) Tanah di beberapa lokasi di Kalurahan Pondokrejo, Tempel berupa cadas sehingga sulit digali

e. Solusi

Kelompok Swadaya Masyarakat dipilih orang yang benar-benar mengetahui karakteristik lokasi, memiliki kemauan bekerja dan bisa bekerjasama.

9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

a. Dasar Hukum

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022.

b. Gambaran Umum

Peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menetapkan 2 (dua) arah kebijakan yaitu peningkatan inovasi untuk pencapaian target penanaman modal dan peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Arah kebijakan tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal dalam kerangka pencapaian pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,70% sampai 6,00% per tahun. Upaya tersebut perlu dilakukan secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan





iklim, kerjasama, promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, maupun tata kelola internal. Badan Koordinasi Penanaman Modal terus melakukan inovasi dengan melaksanakan hal-hal yang baru sesuai dengan dinamika dan potensi penanaman modal pada 5 (lima) tahun mendatang, serta penguatan kapasitas penanaman modal di daerah.

c. Capaian Kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman pada tahun 2022 memperoleh DAK Nonfisik fasilitasi penanaman modal dari Kementerian Investasi/BKPM sebesar Rp393.394.000,00 dengan realisasi Rp391.636.826,00 atau sebesar 99,55%.

10. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

a. Bidang Bina Marga

1) Dasar Hukum

- a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2) Gambaran Umum

Bidang Bina Marga pada DPUPKP melaksanakan program penyelenggaraan jalan, kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten/kota, sub kegiatan rekonstruksi jalan.

3) Capaian Kinerja

Bidang Bina Marga pada DPUPKP pada tahun anggaran 2022 memperoleh DAK Reguler sebesar Rp14.001.686.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp13.622.102.180,00 atau 97,29% dan DAK Penugasan Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan dan Tematik Penguatan DPP dan SIKM sebesar Rp15.866.097.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp15.432.872.650,00 atau 89,38%.





b. Bidang Cipta Karya

1) Dasar Hukum

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b) Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.

2) Gambaran Umum

Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, kegiatan perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan.

3) Capaian Kinerja

Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun anggaran 2022 memperoleh DAK sebesar Rp6.953.710.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp6.914.874.600,00 atau 99,44%.

4) Permasalahan dan Solusi

Dinamika di dalam masyarakat untuk lokasi Bimomartani dan Widodomartani, yaitu sumber air yang sebelumnya diperbolehkan untuk digunakan pada saat pelaksanaan tidak diperbolehkan untuk digunakan oleh masyarakat sekitar titik lokasi sumber air, sehingga perlu dilakukan pencarian sumber air baru yang tidak terdapat permasalahan sosial.

c. Bidang Perumahan

1) Dasar Hukum

- a) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022;
- b) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022;





- c) Peraturan Bupati Sleman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Stimulan bagi Masyarakat untuk Kegiatan Pembangunan Fisik;
- d) Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial; dan
- e) Surat Keputusan Bupati Nomor 32/Kep.KDH/A/2022 tentang Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang yang Direncanakan kepada Individu Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha (sepuluh hektare) Pekerjaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumber Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022.

2) Gambaran Umum

Bidang Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan program perumahan dan permukiman kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya dan kegiatan pembangunan baru rumah swadaya.

3) Realisasi Kinerja

Bidang Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman menerima DAK tahun anggaran 2022 sebesar Rp4.665.936.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp4.665.936.000,00 atau 100%.

4) Permasalahan dan Solusi

Penerima bantuan meninggal dunia pada saat proses pelaksanaan DAK. Sehingga ahli waris dibantu warga masyarakat menyelesaikan pembangunan pekerjaan swadaya.

d. Bidang Sumber Daya Air

1) Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan DAK Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.





2) Gambaran Umum

Pembangunan/peningkatan jaringan irigasi pada dasarnya meliputi kegiatan peningkatan kualitas/mutu jaringan irigasi sehingga lebih berdaya guna. Salah satu langkah untuk meningkatkan pemanfaatan air irigasi yang ada secara efisien dan optimal adalah dengan pelaksanaan pembangunan/peningkatan jaringan yang tepat guna.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi mengatur bahwa pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas area pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.

3) Realisasi Kinerja

Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun anggaran 2022 memperoleh DAK Fisik sebesar Rp9.213.008.998,2 dan realisasi keuangan sebesar Rp6.882.610.000,00 atau 74,71%.

11. Dinas Pariwisata

a. Dasar Hukum

- 1) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 20121 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022.
- 3) Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022.





b. Gambaran Umum

Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata adalah Dana Alokasi Khusus Fisik yang digunakan untuk membangun amenities dan daya tarik wisata secara terintegrasi di dalam kawasan pariwisata yang menjadi prioritas nasional.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pariwisata diarahkan untuk kegiatan:

- 1) pembangunan amenities kawasan pariwisata; dan
- 2) pembangunan Daya Tarik Wisata.

Selain kegiatan sebagaimana tersebut, terdapat kegiatan penunjang dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pariwisata yang meliputi:

- 1) desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
- 2) biaya tender, tidak termasuk honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa/unit layanan pengadaan dan pengelola keuangan;
- 3) jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
- 4) penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah; dan/atau
- 5) perjalanan dinas ke atau dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan terhadap pengelolaan kegiatan, capaian, keluaran, capaian hasil jangka pendek, serta dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pariwisata dilaksanakan oleh Menteri dan hasil dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Menteri digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian DAK Fisik Bidang Pariwisata pada tahun berikutnya.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, diharapkan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan DAK Fisik Bidang Pariwisata dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan pertumbuhan daya tarik wisata.

c. Capaian Kinerja

Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman pada Tahun Anggaran 2022 memperoleh DAK Nonfisik sebesar Rp836.525.000,00 dengan realisasi sebesar Rp836.504.665,00 (100%).





12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

a. Dasar Hukum

- 1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022;
- 3) Keputusan Bupati Sleman Nomor 55/ Kep.KDH /A/2019 tentang Sentra Industri Kecil di Kabupaten Sleman Tahap V.

b. Gambaran Umum

DAK Fisik Subbidang Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah (PK2SIKM) Tahun 2022 merupakan DAK Penugasan dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

c. Capaian Kinerja

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman pada Tahun Anggaran 2022 memperoleh DAK Fisik sebesar Rp6.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.247.297.312,70 (87,45%) dan DAK Nonfisik Sebesar Rp1.403.201.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.252.413.615,00 (89,26%)

d. Permasalahan

- 1) Desain arsitektur bangunan harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya (DP2WB) Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga memerlukan waktu untuk mendapatkan rekomendasi tersebut. Pada tanggal 19 April 2022 rekomendasi tersebut dikeluarkan DP2WP DIY dengan nomor 433/3533, dengan ini maka kegiatan DAK baru bisa dilakukan pengadaannya.
- 2) Curah hujan yang tinggi sering terjadi di wilayah pembangunan rumah promosi dan wisata edukasi sentra jadah tempe, sehingga waktu pengerjaan dan hasil pekerjaan kurang optimal.
- 3) Ruang produksi belum operasional, sehingga untuk rencana anggaran registrasi pendaftaran MD BPOM, Uji Produk, Uji Masa Simpan belum dapat direalisasikan.
- 4) Belum ada kesepakatan terkait pengelolaan rumah promosi dengan sentra jadah tempe.





- 5) Belum ada pengadaan tenaga keamanan, tenaga kebersihan dan tenaga administrasi gedung.

e. Solusi

- 1) Berkoordinasi dengan pihak Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya (DP2WB) Daerah Istimewa Yogyakarta dan memproses rekomendasi tersebut.
- 2) Segera melakukan kesepakatan dengan sentra terkait pengelolaan rumah promosi, agar ruang produksi dapat operasional.
- 3) Pengadaan tenaga keamanan, tenaga kebersihan dan tenaga administrasi di anggarkan di Tahun 2023.
- 4) Sisa anggaran DAK Nonfisik tahun 2022 dapat digunakan kembali untuk biaya registrasi pendaftaran MD BPOM, uji produk dan uji simpan, apabila mendapat persetujuan dari Pemda.





BAB V
PENUTUP

Buku I

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Bupati Sleman
Tahun Anggaran 2022**

SLEMAN

BAB V

PENUTUP

A. CAPAIAN KINERJA MAKRO

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu gambaran bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM terdiri atas tiga komponen utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Komponen kesehatan diukur dari Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), sedangkan pendidikan ada dua komponen yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Sementara komponen pendapatan diukur dari konsumsi riil per kapita dalam rupiah.

Tabel 5.1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sleman Tahun 2016 – 2022

Indikator	RPJMD 2016-2020					RPJMD 2021-2026	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IPM Kab. Sleman	82,15	82,85	83,42	83,85	83,84	84,00	84,31
1. UHH (tahun)	74,60	74,63	74,69	74,77	74,81	74,92	75,00
2. HLS (tahun)	16,04	16,48	16,71	16,72	16,73	16,74	16,76
3. RLS (tahun)	10,64	10,65	10,66	10,67	10,91	10,92	10,94
4. Pengeluaran per Kapita (Rp000)	14.921,00	15.365,00	15.844,00	16.434,00	15.926,00	16.060,00	16.638,00

Sumber: Kabupaten Sleman dalam Angka, 2023

Umur Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakat. UHH di Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun hamper selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 UHH di Kabupaten Sleman adalah 75,00 tahun dari target yang ditetapkan sebesar 74,85 tahun sehingga terealisasi 100,20%. UHH tahun 2022 meningkat 0,8 tahun atau 0,11% dibandingkan UHH tahun 2021 sebesar 74,92 tahun. UHH di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan harapan hidup bayi yang baru lahir semakin besar. Tingginya UHH tidak lepas dari upaya pemerintah daerah yang konsisten meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penyediaan sarana kesehatan dasar secara berjenjang, tenaga kesehatan, serta penolong persalinan.



Upaya peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang layak, terjangkau, mudah, dan merata bagi semua penduduk juga terus ditingkatkan sampai wilayah yang terpencil. Faktor lain yang turut berpengaruh terhadap tingginya Umur Harapan Hidup adalah pola hidup sehat masyarakat.

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk dalam bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS dihitung untuk penduduk usia 7 tahun keatas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. HLS di Kabupaten Sleman pada tahun 2022 sebesar 16,76 tahun dari target yang ditetapkan sebesar 16,77 tahun atau terealisasi 99,94%. HLS tahun 2022 meningkat sebesar 0,12% atau 0,02 tahun dibandingkan tahun 2021 sebesar 16,74 tahun.

Rata-rata Lama Sekolah atau *years of schooling* (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama sekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. RLS di Kabupaten Sleman pada tahun 2022 tercapai sebesar 10,94 tahun dari target yang ditetapkan 10,93 tahun (100,09%). RSL mengalami peningkatan sebesar 0,02 tahun atau 0,18% dibandingkan tahun 2021 sebesar 10,92 tahun.

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Pada tahun 2022 pengeluaran rata-rata per kapita di Kabupaten Sleman sebesar Rp16.638,00. Hal ini mengalami peningkatan sebesar Rp578,00 atau 3,60% dibandingkan pengeluaran per kapita tahun 2021 sebesar Rp16.060,00.



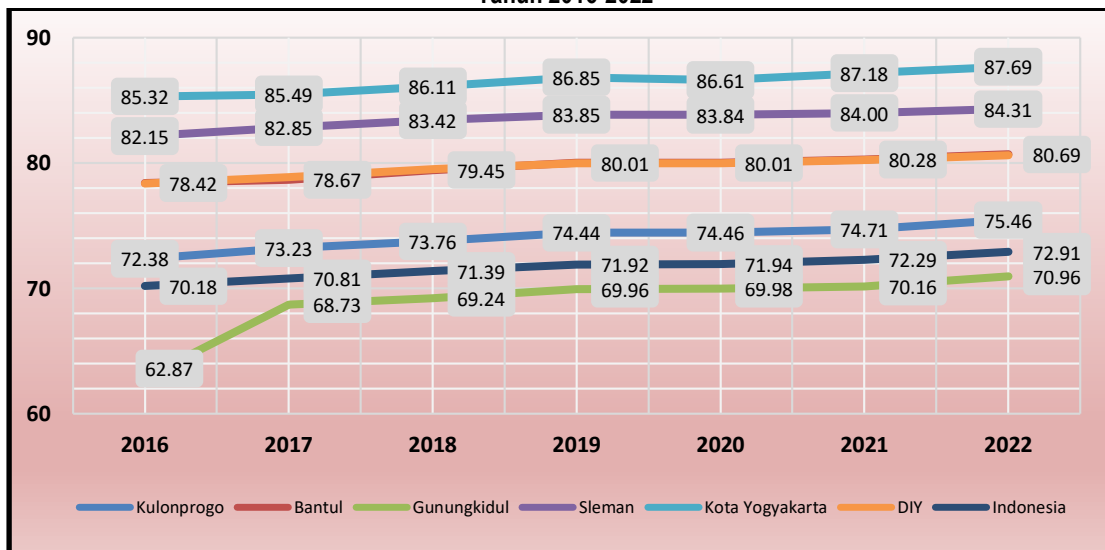
Tabel 5.2
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kota se-DIY
Tahun 2016 – 2022

Indeks Pembangunan Manusia	Tahun						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IPM Kab. Sleman	82,15	82,85	83,42	83,85	83,84	84,00	84,31
IPM Kab. Bantul	78,42	78,67	79,45	80,01	80,01	80,28	80,69
IPM Kab. Gunungkidul	62,87	68,73	69,24	69,96	69,98	70,16	70,96
IPM Kab. Kulonprogo	72,38	73,23	73,76	74,44	74,46	74,71	75,46
IPM Kota Yogyakarta	85,32	85,49	86,11	86,85	86,61	87,18	87,69
IPM DIY	78,38	78,89	79,53	79,99	79,97	80,22	80,64
IPM Indonesia	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91

Sumber: Kabupaten Sleman dalam Angka, 2023

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sleman pada tahun 2022 mencapai 84,31 atau naik sebesar 0,31 poin (0,37%) bila dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 84,00. IPM Kabupaten Sleman selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan IPM kabupaten lain di DIY. IPM Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun juga selalu diatas IPM DIY bahkan diatas IPM Indonesia. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di DIY, maka IPM Kabupaten Sleman selalu lebih rendah dibandingkan IPM Kota Yogyakarta. Secara umum, perkembangan angka ini menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin tinggi dari tahun ke tahun. Pembangunan manusia di wilayah Kabupaten Sleman cukup maju, dan cukup komprehensif pada semua dimensi pembangunan manusia, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi.

Grafik 5.1
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten / Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2016-2022



Sumber: Kabupaten Sleman dalam Angka, 2023

2. Angka Kemiskinan

Gambaran kondisi kemiskinan di Kabupaten Sleman dapat dilihat dari 2 (dua) sumber, yaitu data Badan Pusat Statistik (BPS) dan data Dinas Sosial Kabupaten Sleman. BPS memberikan data mengenai angka kemiskinan secara makro, sedangkan Dinas Sosial memberikan data mikro. Selain persentase penduduk miskin terhadap seluruh penduduk, indikator yang terkait dengan kemiskinan adalah garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan (P1), dan indeks keparahan kemiskinan (P2).

Garis kemiskinan merupakan garis batas antara penduduk miskin dan tidak miskin. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penduduk miskin adalah penduduk yang mempunyai pengeluaran rata-rata kurang dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahannya (*Poverty Severity Index*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Capaian kinerja angka kemiskinan tahun 2015 sampai 2021 dijelaskan pada tabel 5.3 berikut:

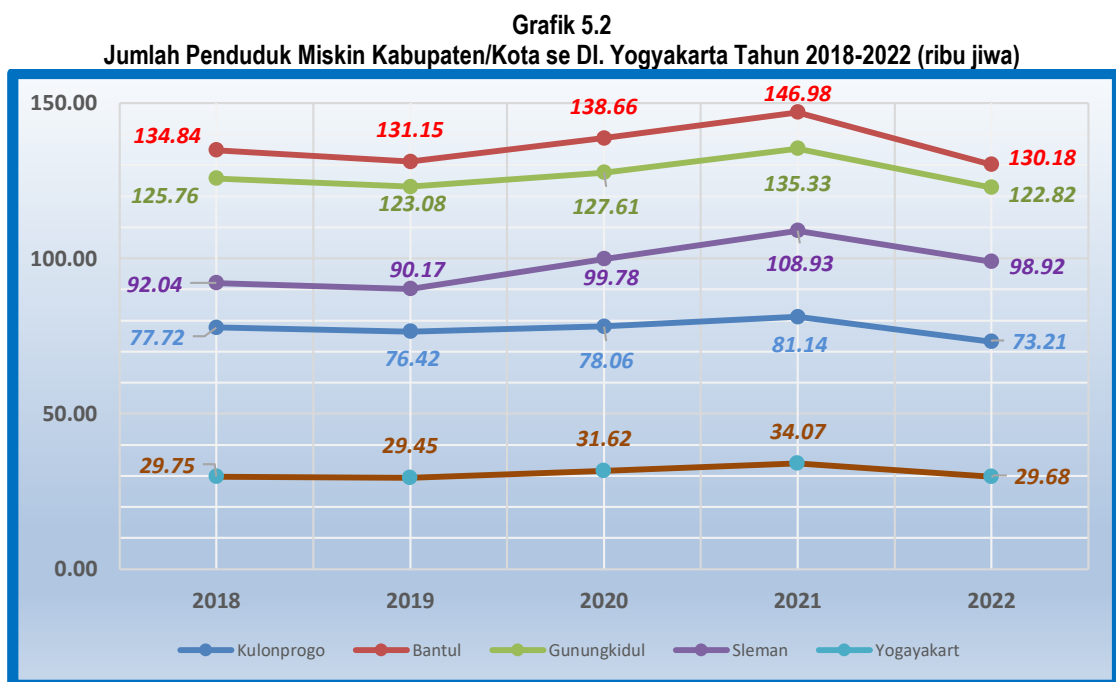
Tabel 5.3
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sleman 2015 –2022

Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahannya
2015	318.312	110.000	9,46%	1,46	0,37
2016	334.406	96.630	8,21%	1,36	0,34
2017	351.331	96.750	8,13%	1,23	0,28
2018	370.127	92.040	7,65%	0,98	0,20
2019	382.868	90.170	7,41%	1,13	0,23
2020	411.610	99.780	8,12%	1,37	0,33
2021	422.933	108.930	8,64%	1,26	0,32
2022	450.763	98.920	7,74%	1,18	0,27

Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2023 dan Dinas Sosial, 2023

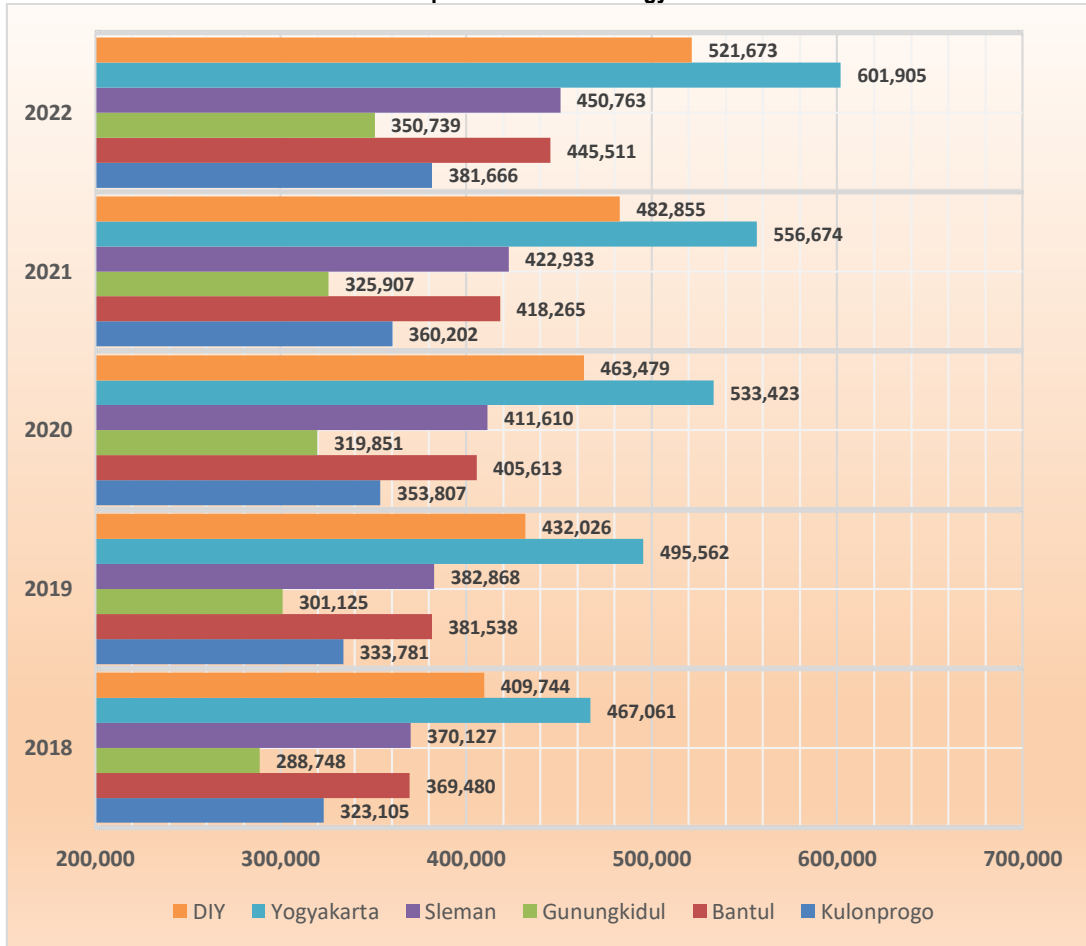
Garis kemiskinan di Kabupaten Sleman selalu meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini terjadi dikarenakan selalu meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok, baik kebutuhan makanan maupun kebutuhan non makanan. Garis kemiskinan di Kabupaten Sleman pada tahun 2022 adalah Rp450.763 per kapita per bulan. Hal ini berarti bahwa jika ada penduduk dengan pengeluaran dibawah Rp450.763,00 perbulan maka penduduk tersebut termasuk kategori penduduk miskin. Garis kemiskinan di Kabupaten Sleman pada tahun 2022 mengalami kenaikan Rp27.830,00 atau 6,58% dibandingkan tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk penduduk semakin naik mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin mengecil.

Jumlah penduduk miskin yaitu penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan sebesar Rp450.763,00 di Kabupaten Sleman pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin adalah 98.920 jiwa sehingga mengalami penurunan 10.010 jiwa atau 9,19% dibandingkan penduduk miskin tahun 2021 sejumlah 108.930 jiwa. Persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan dari 8,64% pada tahun 2021 menjadi 7,74% pada tahun 2022 atau turun 0,90 poin (10,42%).



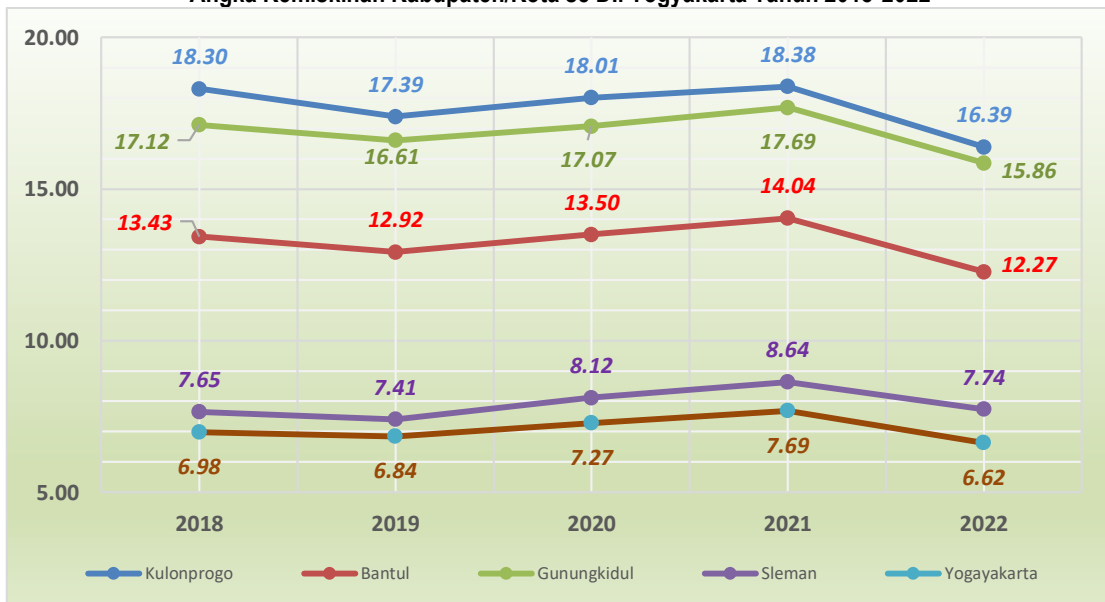
Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2023 dan Dinas Sosial, 2023

Grafik 5.3
Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota se-DI. Yogyakarta Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2023 dan Dinas Sosial, 2023

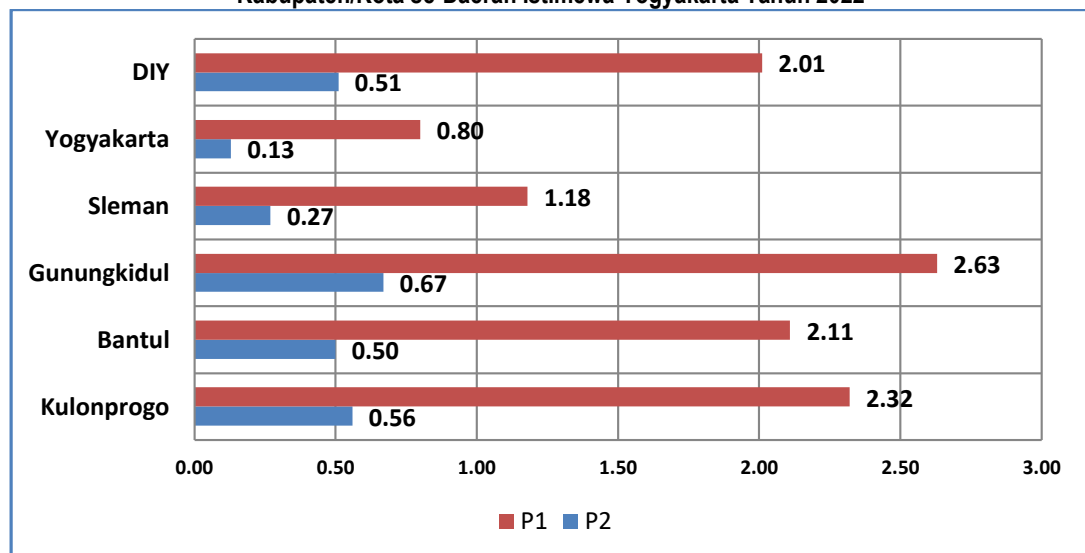
Grafik 5.4
Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota se DI. Yogyakarta Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2023 dan Dinas Sosial, 2023

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Sleman juga mengalami penurunan. P1 pada tahun 2022 sebesar 1,18 atau turun sebesar 0,08 poin (6,35%) dibandingkan tahun 2021 sebesar 1,26. Sedangkan P2 pada tahun 2022 sebesar 0,27 atau mengalami penurunan 0,05 poin (15,63%) dibandingkan tahun 2021 sebesar 0,32.

Grafik 5.5
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022



Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2023 dan Dinas Sosial, 2023

3. Angka Pengangguran

Pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia (*human capital*) adalah dua hal yang saling berkaitan. Kualitas tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja menjadi faktor penting dalam pembangunan ekonomi, dan selanjutnya pembangunan ekonomi akan mampu membuka peluang kerja baru dan menyerap tenaga kerja. Ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas penting dalam pembangunan karena tenaga kerja merupakan modal penting dalam menggerakkan roda pembangunan. Jumlah angkatan kerja yang besar dan cenderung terus meningkat sejalan dengan transisi demografi menyebabkan komposisi penduduk usia produktif meningkat lebih cepat dari pada pertumbuhan penduduk secara keseluruhan. Ketenagakerjaan juga memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai faktor internal dan eksternal, antara lain rendahnya daya beli masyarakat sehingga tidak dapat diandalkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merupakan prasyarat bagi penciptaan lapangan kerja.

Penduduk yang diperhitungkan dalam dunia kerja dan faktor produksi adalah penduduk usia kerja yaitu penduduk usia 15 tahun ke atas. Berdasarkan aktivitasnya, penduduk usia kerja dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri atas penduduk yang masih bersekolah, penduduk yang mengurus rumah tangga dan penduduk penerima pendapatan. Angkatan kerja dibagi menjadi dua kelompok, yaitu angkatan kerja yang bekerja dan angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja yang tidak bekerja ini yang disebut sebagai pengangguran terbuka.

Tabel 5.4
Status Keadaan Ketenagakerjaan di Kabupaten Sleman Tahun 2016-2022

Tahun	Status Keadaan Ketenagakerjaan					
	Angkatan Kerja	Penduduk Bekerja	Penganggur	TPAK	TKK	TPT
2017	659.305	636.132	23.173	71,78	96,49	3,51
2018	675.286	645.596	29.690	72,40	95,60	4,40
2019	676.334	649.763	26.571	70,27	96,02	3,93
2020	703.666	667.823	35.843	70,51	94,91	5,09
2021	739.322	701.123	38.199	73,05	94,83	5,17
2022	698.907	665.512	33.395	68,12	95,22	4,78

Sumber: Dinas Tenaga Kerja 2023, BPS Kabupaten Sleman, 2023

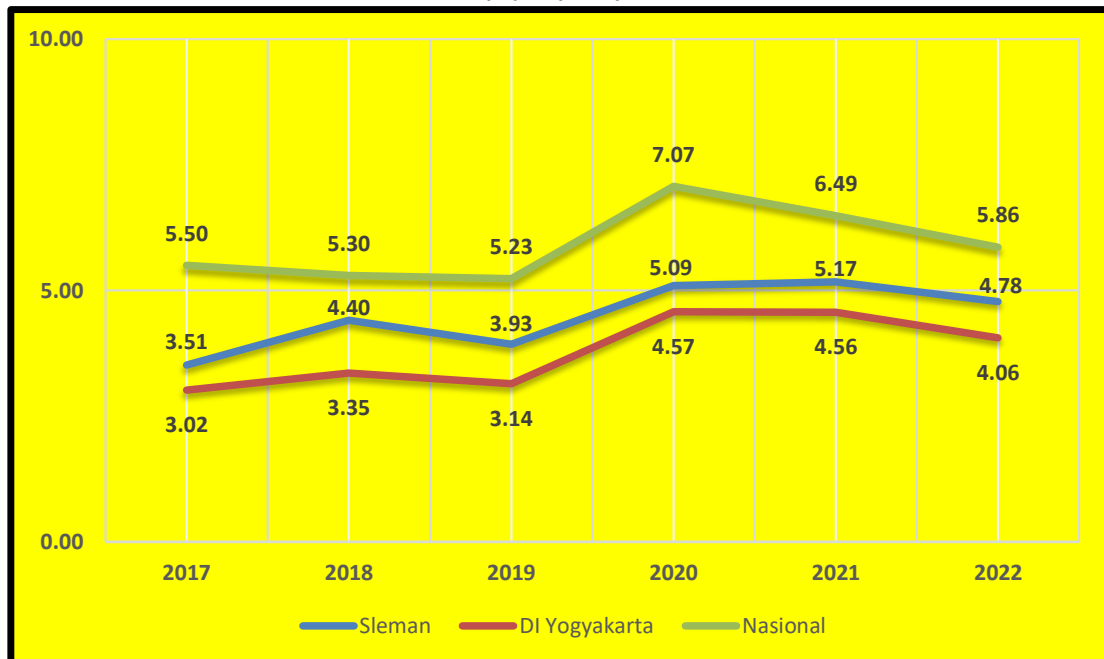
Pada tahun 2022 status keadaan ketenagakerjaan di Kabupaten Sleman menunjukkan angkatan kerja sejumlah 698.607 jiwa, penganggur sejumlah 33.395 jiwa, dan penduduk bekerja sejumlah 665.512 jiwa. Hal ini berarti bahwa di Kabupaten Sleman pada tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,78% dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) sebesar 95,22%. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja pada periode rujukan, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran (*BPS, 2023*). Angkatan kerja di Kabupaten Sleman bersifat fluktuatif. Angkatan kerja pada tahun 2022 sejumlah 698.907 jiwa. Hal ini mengalami penurunan sejumlah 40.415 jiwa atau 5,47% dibandingkan tahun 2021 sejumlah 739.322 jiwa. Jumlah penduduk bekerja pada tahun 2022 adalah 665.512 jiwa. Hal ini mengalami penurunan sejumlah 35.611 jiwa atau 5,08% dibandingkan jumlah penduduk bekerja tahun 2021 sejumlah 701.123 jiwa.

Pengangguran terbuka dan partisipasi angkatan kerja merupakan sebagian indikator ketenagakerjaan. Pengangguran terbuka adalah mereka

yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum memulai. Jumlah pengangguran di Kabupaten Sleman pada tahun 2022 adalah 33.395 jiwa, turun sejumlah 4.804 jiwa atau 12,58% dibandingkan tahun 2021 sejumlah 38.199 jiwa.

Pada Tabel 5.4 menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang rendah dan Tingkat Kesempatan kerja (TKK) yang tinggi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja. TPT dapat digunakan untuk memonitoring dan evaluasi perkembangan angka pengangguran. TPT di Kabupaten Sleman tahun 2022 sebesar 4,78. TPT mengalami penurunan sebesar 0,39 poin atau 7,54% dibandingkan tahun 2021 sebesar 5,17. Tingkat Kesempatan kerja (TKK) adalah persentase penduduk bekerja terhadap penduduk angkatan kerja. TKK di Kabupaten Sleman pada tahun 2022 sebesar 95,22%, meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 94,83%.

Grafik 5.6
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2017-2022

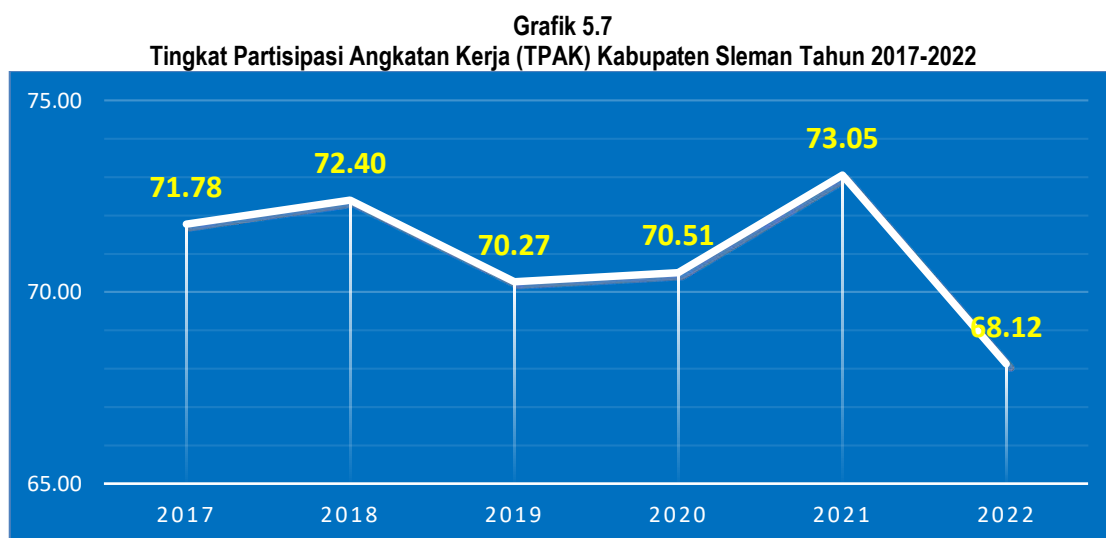


Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2023 dan Dinas Tenaga Kerja, 2023

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK dapat



digunakan untuk melihat potensi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari persediaan tenaga kerja (*labour supply*) untuk memproduksi barang dan jasa. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. TPAK di Kabupaten Sleman pada tahun 2021 sebesar 73,05 turun sebesar 4,93 poin atau 6,75% menjadi 68,12 pada tahun 2022.



Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2023 dan Dinas Tenaga Kerja, 2023

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah terkait erat dengan Produk Domestik regional Bruto (PDRB). PDRB terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). PDRB ADHB merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode saat ini, sementara PDRB ADHK dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar dan sampai saat ini masih menggunakan tahun dasar 2010. PDRB ADHB digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2022 sebesar Rp37.596,38 milyar. PDRB ADHK tahun





2022 lebih tinggi dibandingkan PDRB ADHK tahun 2021 sebesar Rp35.755,99 milyar, atau mengalami peningkatan sebesar Rp1.840,39 milyar (3,26%).

Tabel 5.5
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sleman 2018-2022 (Milyar Rupiah)

No.	Lapangan Usaha / Industri	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.071,62	2.106,28	2.215,36	2.244,33	2.375,78
B	Pertambangan dan Penggalian	126,23	133,53	121,81	115,33	117,23
C	Industri Pengolahan	4.203,10	4.453,46	4.284,95	4.328,50	4.395,82
D	Pengadaan Listrik dan Gas	42,35	44,82	44,26	45,26	48,34
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	14,84	16,08	16,16	17,21	17,77
F	Konstruksi	3.937,81	4.426,77	3.708,66	4.120,63	4.349,55
G	Perdagangan Besar; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.516,58	2.649,33	2.513,80	2.542,53	2.675,82
H	Transportasi dan Pergudangan	2.171,67	2.136,57	1.358,91	1.257,02	1.424,19
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.274,76	3.573,43	2.927,49	3.163,53	3.543,47
J	Informasi dan Komunikasi	3.560,30	3.841,15	4.609,09	5.388,91	5.596,44
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	977,15	1.062,40	1.061,87	1.081,79	1.144,92
L	Real Estat	2.713,51	2.875,19	2.914,28	2.940,60	3.022,08
M N	Jasa Perusahaan	636,15	680,87	584,75	630,80	676,69
O	Adm Pemeirntahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.952,77	2.017,13	1.976,43	1.968,85	2.019,56
P	Jasa Pendidikan	3.351,39	3.580,03	3.777,67	3.980,06	4.036,76
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	810,81	866,98	1.040,54	1.084,35	1.121,12
R S T U	Jasa Lainnya	777,21	822,50	701,30	846,28	1.031,14
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		33.138,26	35.286,51	33.857,33	35.755,99	37.596,38

Sumber: Kabupaten Sleman dalam Angka, 2023

Pada tahun 2020 PDRB ADHK Kabupaten Sleman mengalami penurunan sebagai akibat dari adanya pandemi Covid-19. Hampir semua sektor usaha mengalami penurunan, terutama sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, serta sektor konstruksi, meskipun ada beberapa sektor yang terdampak positif. Sektor tersebut diantaranya adalah sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa pendidikan, dan sektor jasa kesehatan. Pada tahun 2021 keadaan perekonomian sudah mulai membaik. Hal ini terlihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari -4,05 tahun 2020 menjadi 5,61% tahun 2021 dan 5,15% pada tahun 2022.



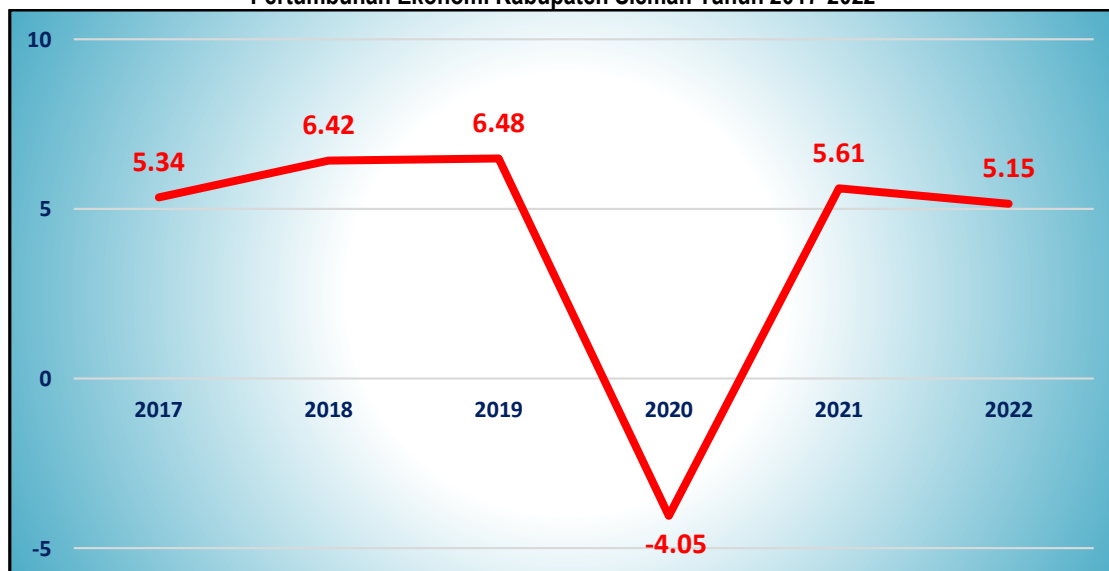
Tabel 5.6
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Sleman Tahun 2018-2021 (juta rupiah)

No.	Lapangan Usaha / Industri	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,53	1,67	5,18	1,31	5,86
B	Pertambangan dan Penggalian	8,93	5,78	-8,77	-5,32	1,65
C	Industri Pengolahan	5,60	5,96	-3,78	1,02	1,56
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,27	5,83	-1,26	2,26	6,81
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,93	8,34	0,51	6,52	3,23
F	Konstruksi	13,11	12,42	-16,22	11,11	5,56
G	Perdagangan Besar; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,01	5,27	-5,12	1,14	5,24
H	Transportasi dan Pergudangan	8,07	-1,62	-36,40	-7,50	13,30
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,77	9,12	-18,08	8,06	12,01
J	Informasi dan Komunikasi	6,17	7,89	19,99	16,92	3,85
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,17	8,72	-0,05	1,88	5,81
L	Real Estat	5,10	5,96	1,36	0,90	2,77
MN	Jasa Perusahaan	5,52	7,03	-14,12	7,88	7,27
O	Adm Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib	4,07	3,30	-2,02	-0,38	2,58
P	Jasa Pendidikan	6,00	6,82	5,52	5,36	1,42
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,07	6,93	20,02	4,21	3,39
RSTU	Jasa Lainnya	4,85	5,83	-14,74	20,67	21,84
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	6,42	6,48	-4,05	5,61	5,15

Sumber: Kabupaten Sleman dalam Angka, 2023

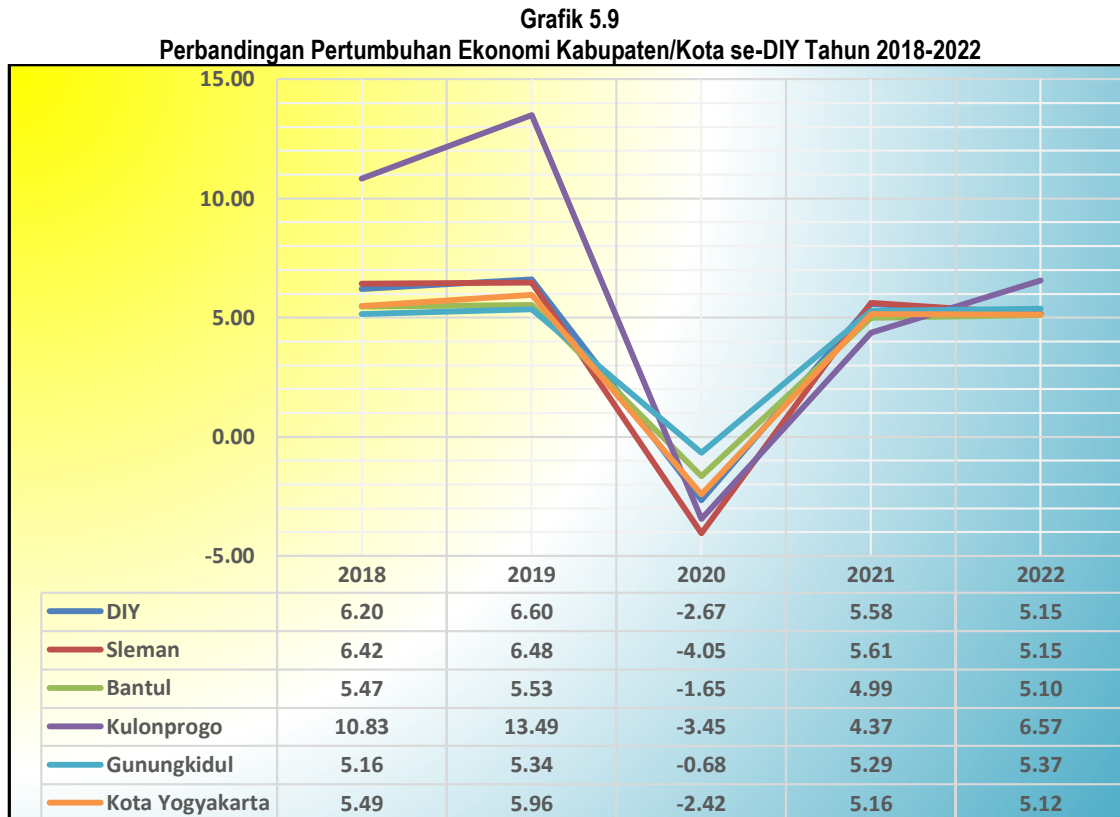
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman setelah sempat mengalami pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi lebih rendah dibandingkan tahun 2021. Penurunan terjadi pada beberapa sektor, terbesar pada sektor informasi dan komunikasi konstruksi, dan jasa pendidikan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman tahun 2017-2022 disampaikan pada Grafik 5.8 berikut:

Grafik 5.8
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman Tahun 2017-2022



Sumber: Dinas Sosial, 2023 dan BPS Kabupaten Sleman, 2023

Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta dan kabupaten/kota se-DIY pada tahun 2022 secara keseluruhan mengalami peningkatan. Berikut disampaikan data pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta dan kabupaten/kota se-DIY tahun 2018-2022.



Sumber: Kabupaten Sleman dalam Angka, 2023

5. Pendapatan per Kapita

Pendapatan per kapita suatu daerah dihitung dengan membagi nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dengan jumlah penduduk. PDRB ADHB Kabupaten Sleman pada tahun 2022 mencapai Rp54.656,66 milyar. Secara nominal, nilai PDRB ADHB ini mengalami kenaikan sebesar Rp5.259,05 milyar (10,65%) dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai Rp49.397,61 milyar. Berdasarkan PDRB ADHB, maka dapat diketahui PDRB per kapita di Kabupaten Sleman pada tahun 2022 sebesar Rp44.990,56 (ribu). Hal ini meningkat dibandingkan PDRB per kapita tahun 2021 sebesar Rp43.556,00 (ribu) dan tahun 2020 sebesar Rp40.719,00 (ribu). Hal ini menunjukkan semakin membaiknya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sleman.



Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Sleman tahun 2018-2021 dijelaskan pada Tabel 5.6 berikut:

Tabel 5.7
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021 (Milyar Rupiah)

No.	Lapangan Usaha / Industri	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.246,73	3.401,82	3.653,61	3.789,64	3.653,61
B	Pertambangan dan Penggalian	168,30	181,38	167,15	165,35	167,15
C	Industri Pengolahan	5.776,07	6.215,24	6.117,43	6.457,70	6.117,43
D	Pengadaan Listrik dan Gas	50,24	54,69	53,67	54,92	53,67
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	20,23	22,00	22,29	24,03	22,29
F	Konstruksi	5.161,19	5.967,73	5.035,66	5.750,04	5.035,66
G	Perdagangan Besar; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.433,15	3.694,96	3.581,91	3.742,56	3.581,91
H	Transportasi dan Pergudangan	3.362,65	3.341,99	2.002,09	1.893,05	2.002,09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.449,71	4.930,57	4.051,03	4.508,54	4.051,03
J	Informasi dan Komunikasi	3.480,97	3.740,30	4.479,82	5.351,85	4.479,82
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.422,57	1.575,43	1.573,57	1.686,47	1.952,63
L	Real Estat	3.382,57	3.703,14	3.832,68	3.954,04	4.212,25
M N	Jasa Perusahaan	724,57	797,83	698,44	771,13	868,21
O	Adm Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2.985,70	3.157,21	3.201,88	3.301,95	3.529,97
P	Jasa Pendidikan	4.108,55	4.500,27	4.852,85	5.284,92	5.591,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.016,16	1.115,21	1.404,64	1.512,32	1.632,77
R S T U	Jasa Lainnya	989,68	1.068,21	926,01	1.149,10	1.477,85
Produk Domestik Regional Bruto		43.779,04	47.467,98	45.654,72	49.397,61	54.656,66

Sumber: Kabupaten Sleman dalam Angka, 2023

Perkembangan PDRB ADHB per kapita selama 5 (lima) tahun terakhir ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 5.8
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) per Kapita di Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021 (Ribu Rupiah)

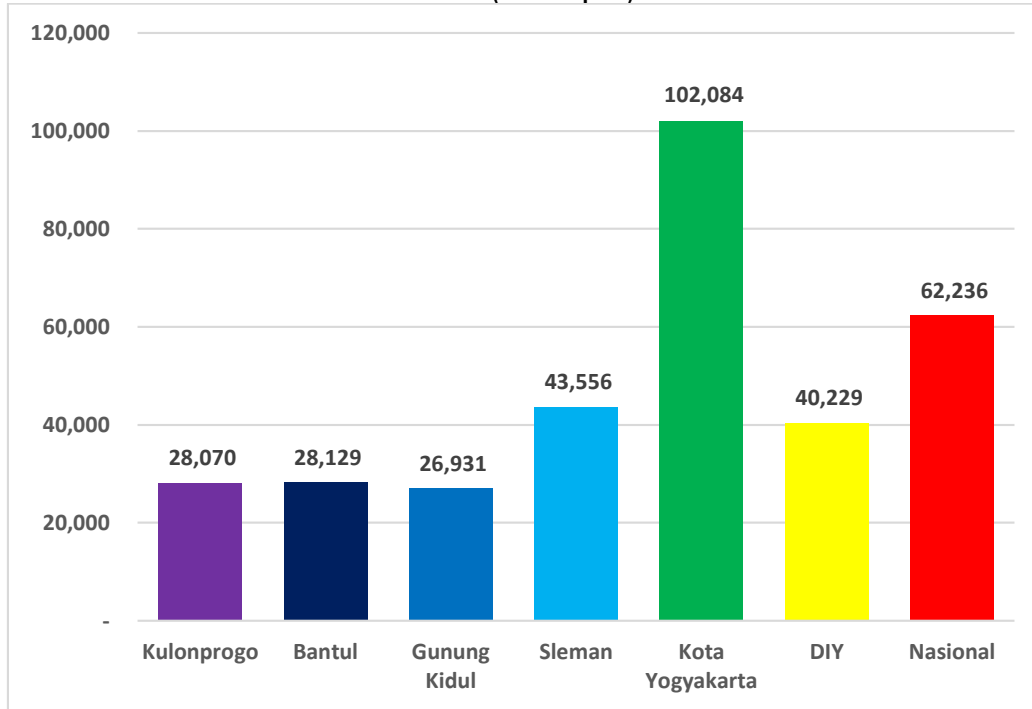
No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	PDRB ADHB Per Kapita	36.279,55	38.553,00	40.719,00	43.556,00	44.990,00

Sumber: Kabupaten Sleman dalam Angka, 2023

PDRB per kapita Kabupaten Sleman pada tahun 2022, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, berada di bawah PDRB per kapita Kota Yogyakarta. Sedangkan dibandingkan dengan kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta, PDRB per kapita Kabupaten Sleman jauh melampaui kabupaten lain. Perbandingan PDRB per kapita kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta ditunjukkan pada grafik berikut:



Grafik 5.10
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) per Kapita
Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022
(Ribu Rupiah)



Sumber: BPS DIY, 2022

6. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan (Rasio Gini) merupakan tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan dengan kriteria $G < 0,30$ berarti ketimpangan rendah; $0,30 \leq G \leq 0,50$ berarti ketimpangan sedang dan $G > 0,50$ berarti ketimpangan tinggi. Nilai Rasio Gini berkisar 0 hingga 1. Jika mendekati 1 maka ketimpangan pendapatan penduduk makin lebar. Jika mendekati 0, maka distribusi pendapatan makin merata.

Rasio Gini Kabupaten Sleman tahun 2022 mencapai 0,418 yang berarti ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Sleman pada kriteria sedang. Rasio Gini tahun 2022 ini lebih rendah jika dibandingkan angka Rasio Gini tahun 2021 sebesar 0,425 yang berarti bahwa ketimpangan pendapatan antar penduduk pada tahun 2021 semakin kecil.

Tabel 5.9
Rasio Gini di Kabupaten Sleman Tahun 2017-2022

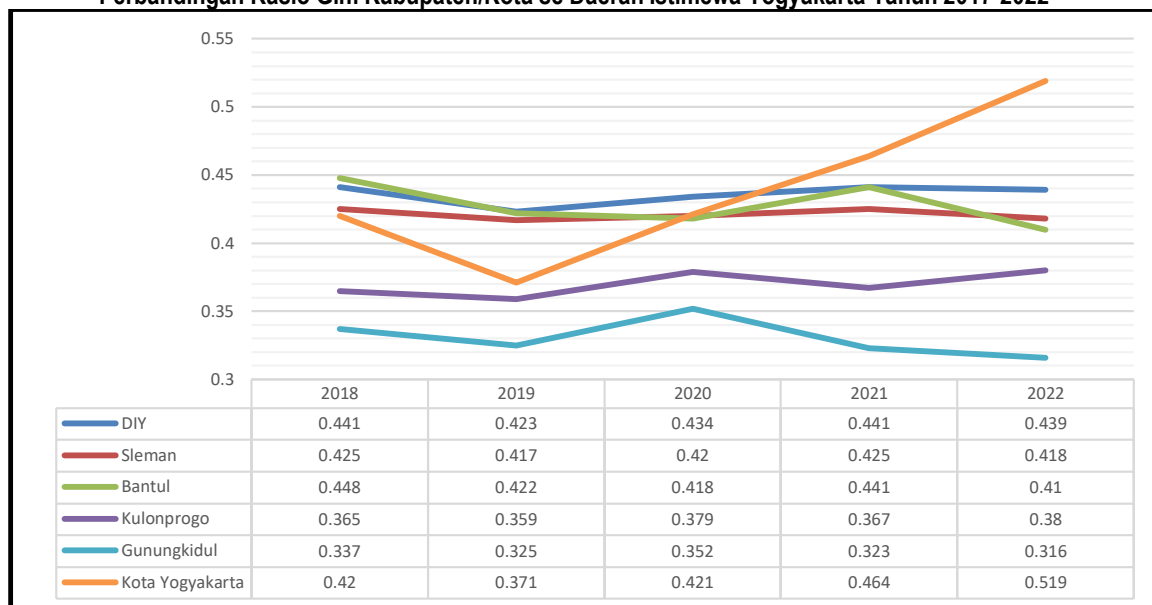
No.	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio Gini	0,410	0,425	0,417	0,420	0,425	0,418

Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2023



Jika dibandingkan dengan DIY dan Nasional, angka Rasio Gini Kabupaten Sleman tahun 2022 lebih rendah dari DIY dan Kota Yogyakarta sebagaimana grafik berikut.

Grafik 5.11
Perbandingan Rasio Gini Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022



Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2023

B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penetapan kinerja daerah dilaksanakan berdasarkan pada asas spesifik, obyektif, berkesinambungan, terukur, dapat diperbandingkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikator kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dibagi dalam tiga aspek, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Indikator Kinerja Daerah ini kemudian dituangkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk matriks yang dipergunakan sebagai acuan dan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah.





1. Indikator Kinerja Daerah

Tabel 5.10
Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Sleman

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2022		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
A	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Belayanan Dasar				
1.	Urusan Pendidikan				
	Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)	%	89,33	90,52	101,33 %
	APK PAUD / Sederajat	%	96,00	99,02	103,15 %
	APK SD / Sederajat	%	100,00	98,86	98,86 %
	APK SMP / Sederajat	%	100,00	104,94	104,94 %
	APM PAUD / Sederajat	%	80,00	67,65	84,56 %
	APM SD / Sederajat	%	85,00	95,59	112,46 %
	APM SMP / Sederajat	%	75,00	77,07	102,76 %
2.	Urusan Kesehatan				
	Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit dengan Status Paripurna	Puskesmas	3	3	100,00 %
3.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	Persentase jalan, jembatan dan drainase kewenangan kabupaten dengan kondisi baik	%	76,76	74,84	97,50 %
4.	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Rasio	0,025	0,027	108,00 %
5.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				
	Indeks Risiko Bencana	Indeks	78,77	80,01	98,43 %
6.	Urusan Sosial				
	Cakupan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Masyarakat) yang mendapatkan perlindungan sosial dan jaminan sosial)	%	83,00	85,40	102,98 %
B	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				
7.	Urusan Tenaga Kerja				
	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	%	94,05	95,22	101,24 %
8.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait Kabupaten	%	100,00	100,00	100,00 %
9.	Urusan Pangan				
	Persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan	%	2,195	2,745	125,06 %
10.	Urusan Pertanahan				
	Persentase tertib penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah	%	65,00	74,29	114,29 %
11.	Urusan Lingkungan Hidup				
	Indeks Kualitas Air	indeks	41,00	43,54	106,20 %
	Indeks Kualitas Udara	indeks	86,66	83,99	96,92 %





No.	Indikator Kinerja	Satuan	2022		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Indeks Kualitas Lahan	indeks	30,52	31,73	103,96 %
12.	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
	Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Indeks	96,05	96,48	100,45 %
13.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
	Indeks Desa Membangun Kategori Desa Mandiri	Desa mandiri	32	44	137,50 %
14.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
	Total Fertility Rate (TFR)	Rasio	2	1,83	91,50 %
15.	Urusan Perhubungan				
	Indeks Kinerja LLAJ	Indeks	0,46	0,52	113,04 %
16.	Urusan Komunikasi dan Informatika				
	Persentase ketersediaan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	%	80,00	80,00	100,00 %
17.	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah				
	Jumlah koperasi baru	Koperasi	5	4	80,00%
	Persentase peningkatan asset koperasi	%	0,5	-21,88	-4.376,00%
	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha mikro	%	5	5	100,00%
	Persentase peningkatan omset pelaku usaha mikro	%	0,05	0,77	1.540,00%
18.	Urusan Penanaman Modal				
	Persentase pelayanan konsultasi, pendampingan, dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat	%	100,00	100,00	100,00 %
19.	Urusan Kepemudaan dan Olahraga				
	Persentase organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang aktif	%	93,50	99,71	106,64 %
20.	Urusan Statistik				
	Persentase perangkat daerah yang berkomitmen terhadap penyelenggaraan statistik sektoral	%	60,00	63,00	105,00 %
21.	Urusan Persandian				
	Cakupan keamanan data dan informasi	%	70,00	70,00	100,00%
22.	Urusan Kebudayaan				
	Jumlah Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	Obyek	53	71	133,96 %
23.	Urusan Perpustakaan				
	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Indeks	46	58,35	126,85 %
24.	Urusan Kearsipan				
	Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal	%	94,56	93,58	98,96 %
25.	Urusan Kelautan dan Perikanan				
26.	Urusan Pariwisata				
	Pembelanjaan Wisata (<i>spending of money</i>)				
	Wisatawan mancanegara	US\$	450,00	328,60	73,02 %





No.	Indikator Kinerja	Satuan	2022		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Wisatawan nusantara	Rupiah	850.000	1.104.869	129,98 %
27.	Urusan Pertanian				
	Persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan	%	2,195	2,745	125,06 %
28.	Urusan Perdagangan				
	Nilai ekspor Kabupaten Sleman	US\$	47.148.000,00	86.627.614,89	183,74 %
29.	Urusan Perindustrian				
	Persentase pertumbuhan nilai produksi industry	%	2,1	2,1	100,00 %

Sumber: Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, 2023
BPS Kabupaten Sleman, 2023

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 5.11
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sleman Tahun 2022

No.	IKU	Satuan	Realisasi 2021	2022		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76,77	76,67	77,50	100,11 %
2.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	B	B	B	100,00 %
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,37	82,05	84,25	102,68 %
4.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Predikat	A (81,73)	A (81,58)	A (81,89)	100,38 %
5.	Indeks Desa Membangun kategori desa mandiri	Desa Mandiri	27	32	44	137,50 %
6.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	84,00	84,24 - 84,92	84,31	100,00 %
7.	Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	0,33	0,36	0,34	94,44 %
8.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,56	3,71 - 5,90	5,15	100,00 %
9.	Nilai Tukar Petani	Nilai	108,83	112,73	107,59	95,44 %
10.	Nilai Ekspor	US\$	77.887.264,63	47.148.000	86.627.614,89	183,74 %
11.	Nilai Investasi (Milyar)	Rp.	1.713,50	591	1.346,00	227,75 %
12.	Indeks Gini	Indeks	0,425	0,429	0,418	100,00 %
13.	Persentase penduduk miskin	%	8,64	6,85 - 7,58	7,74	97,89 %
14.	Persentase Keluarga Miskin	%	9,1	8,25	8,15	101,21 %
15.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,17	5,95	4,78	119,66 %
16.	Pembelanjaan wisawatan Mancanegara	US\$	150	450	328,60	73,02 %
	Pembelanjaan wisawatan Nusantara	Rupiah	752.232	850.000	1.104.869,00	129,98 %
17.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	78,96	78,77	80,01	98,43 %
18.	Persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar	%	59,99	50,31	66,21	131,60 %





No.	IKU	Satuan	Realisasi 2021	2022		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja
19.	Cakupan pembangunan prasarana dan sarana wilayah kondisi mantab yang mendukung pengembangan ekonomi	%	63,58	55,59	81,15	145,98 %
20.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	56,90	57,20	57,33	100,23 %
21.	Indeks Ketahanan Keluarga	Indeks	2,80	2,90	2,90	100,00 %
22.	Persentase pelestarian warisan budaya	%	48,33	45,71	48,50	106,10 %
23.	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,2	96,20	96,25	100,05 %
24.	Angka kejadian konflik Sosial	kejadian	0	0	0	100,00 %

Sumber: Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, 2023; BPS Kabupaten Sleman, 2023; Sekretariat Daerah, 2023





LKPJ 2022



Pemerintah Kabupaten Sleman

Jl. Parasmya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511

Telepon (0274) 865405, Faksimile (0274) 868945

Laman : www.slemankab.go.id , Surel : pemdasleman@slemankab.go.id



@kabarsleman



@Pemkab Sleman



Sleman TV

LKPJ 2022



KABUPATEN SLEMAN



**Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati
Tahun Anggaran 2022**



**BUKU II
LAPORAN PENGUKURAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**



LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2022

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memuat sistematika penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada peraturan dimaksud disebutkan bahwa LKPJ memuat capaian kinerja yang menggambarkan capaian kinerja keluaran (output) dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan target yang telah ditetapkan.

Buku Laporan Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2022 merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari seluruh dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sleman Tahun Anggaran 2022. Buku ini berisi tabel pengukuran kinerja seluruh urusan, program, dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2022. Sumber utama dari pengukuran kinerja ini adalah data laporan tahunan perangkat daerah.

Pengukuran kinerja keuangan dilakukan dengan membandingkan dana yang direalisasikan dalam kegiatan dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan membandingkan output yang terealisasi dengan target yang telah ditetapkan. Data ini menjadi acuan dalam memperhitungkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara umum, kinerja urusan, program, serta kegiatan.





**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN
2022**

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN	894.220.548.151,99	833.096.510.394,97	93,16%				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	894.220.548.151,99	832.543.314.394,97	93,10%				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	555.809.883.214,00	510.475.018.912,00	91,84%				
1 Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				%	100,00	100,00	100,00%
2 Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	916.843.000,00	874.373.535,00	95,37%				
1 Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu				%	100,00	100,00	100,00%
2 Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah				dokumen	6	6	100,00%
Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	73.680.000,00	72.515.250,00	98,42%				
1 Dokumen renja PD dan perubahan renja PD				dokumen	2	2	100,00%
2 Dokumen perjanjian kinerja dan perubahan perjanjian kerja				dokumen	2	2	100,00%
3 Dokumen RKA-DPA dan Perubahan RKA-DPA				dokumen	4	4	100,00%
Sub Kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah	843.163.000,00	801.858.285,00	95,10%				
1 Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan bulanan, laporan dalev, laporan tahunan, LKjIP				dokumen	18	18	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2 Dokumen Evaluasi Kinerja Pendidikan				dokumen	2	2	100,00%
3 Dokumen rekomendasi dewan pendidikan kabupaten Sleman				dokumen	1	1	100,00%
Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	544.102.403.932,00	500.659.228.825,00	92,02%				
1 Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu				%	100,00	100,00	100,00%
2 Dokumen laporan keuangan dan aset				dokumen	4	6	150,00%
Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	538.293.535.932,00	494.900.654.564	91,94%				
1 Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai				bulan	12	12	100,00%
2 Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)				bulan	12	12	100,00%
3 Pembayaran Tambahan Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS SD				triwulan	4	4	100,00%
4 Pembayaran Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNS SD				triwulan	4	4	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	5.412.330.000,00	5.365.000.211,00	99,13%				
1 Pembayaran honorarium pengelola keuangan				bulan	12	12	100,00%
2 Pembayaran honorarium pengurus barang				bulan	12	12	100,00%
3 Pembayaran honorarium panitia pengadaan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Dokumen tanggapan hasil pemeriksaan	72.563.000,00	71.809.650,00	98,96%				
1 Dokumen tanggapan hasil pemeriksaan				dokumen	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran SKPD	323.975.000,00	321.764.400,00	99,32%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Dokumen Laporan Aset/BMD semesteran				dokumen	2	3	150,00%
2 Dokumen Laporan keuangan semesteran				dokumen	2	3	150,00%
Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	2.354.196.000,00	1.520.695.914,00	64,60%				
1 Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu				%	100,00	100,00	100,00%
2 Layanan administrasi kepegawaian dan pembayaran tenaga non PNS/PHL				bulan	12	12	100,00%
3 Penyediaan layanan pengelolaan kepegawaian				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	2.354.196.000,00	1.520.695.914,00	64,60%				
1 Layanan administrasi kepegawaian				bulan	12	12	100,00%
2 Laporan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi				dokumen	1	1	100,00%
3 Pembayaran tenaga non PNS/PHL				orang	36	36	100,00%
Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	4.518.101.500,00	4.040.852.308,00	89,44%				
1 Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum				%	100,00	100,00	100,00%
2 Penyediaan kebutuhan administrasi umum				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	179.573.900,00	179.394.361,00	99,90%				
1 Penyediaan alat-alat listrik kantor Dinas dan 17 Korwil kapanewonan				paket	36	36	100,00%
2 Penyediaan alat-alat listrik 5 TK Negeri dan 1 SKB				paket	31	31	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.661.340.690,00	1.576.706.240,00	94,91%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				unit	122	118	96,72%
2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5 TK Negeri dan 1 SKB				paket	61	60	98,36%
Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	1.028.980.460,00	945.896.121,00	91,93%				
1 Penyediaan alat/bahan kegiatan kantor pakai habis dinas dan 17 Korwil kapanewonan				paket	126	126	100,00%
2 Penyediaan alat/bahan kegiatan kantor pakai habis 5 TK Negeri dan 1 SKB				paket	40	40	100,00%
3 Layanan penyediaan makan minum rapat Dinas dan 17 Korwil kapanewonan				bulan	12	12	100,00%
4 Layanan penyediaan makan minum rapat 5 TK Negeri dan 1 SKB				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	304.773.000,00	261.450.700,00	85,79%				
1 Layanan cetak dan penggandaan dokumen Dinas dan 17 Korwil kapanewonan				bulan	12	12	100,00%
2 Layanan cetak dan penggandaan dokumen 5 TK Negeri dan 1 SKB				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas kunjungan tamu	54.225.000,00	21.966.450,00	40,51%				
1 Penyediaan makan minum tamu				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	865.218.700,00	680.905.686,00	78,70%	-		-	
1 Layanan perjalanan dinas dalam daerah kantor Dinas				bulan	12	12	100,00%
2 Layanan perjalanan dinas dalam daerah 5 TK Negeri				bulan	12	12	100,00%
3 Layanan perjalanan dinas luar daerah				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	213.082.000,00	198.294.000,00	93,06%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Layanan surat menyurat				bulan	12	12	100,00%
2 Layanan arsip dan perpustakaan				bulan	12	12	100,00%
3 Penyediaan tenaga non PNS/PHL				orang	3	3	100,00%
Sub Kegiatan Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	210.907.750,00	176.238.750,00	83,56%				
1 Pengelolaan informasi dan dokumentasi PD				bulan	12	12	100,00%
2 Pengelolaan website PD				bulan	12	12	100,00%
3 Penyediaan Tenaga Non PNS/PHL				orang	1	1	100,00%
Kegiatan pengadaan barang milik daerah	169.400.000,00	148.480.000,00	87,65%				
1 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja				%	100,00	100,00	100,00%
2 Ketersediaan sarana dan prasarana kerja				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pengadaan mebel	169.400.000,00	148.480.000,00	87,65%			-	
1 Pengadaan mebel ruang rapat				paket, unit	21	21	100,00%
Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan	1.634.315.782,00	1.487.098.957,00	90,99%				
1 Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah				%	100	100	100,00%
2 Penyediaan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	676.462.500,00	567.679.799,00	83,92%			-	
1 Pembayaran langganan (telepon, internet, listrik) kantor dinas dan 17 Korwil kapanewonan				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2 Pembayaran langganan (telepon, internet, listrik) 5 TK Negeri dan 1 SKB				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	957.853.282,00	919.419.158,00	95,99%			-	
1 Pelayanan Keamanan dan Kebersihan Kantor Dinas dan 17 Korwil kapanewonan				bulan	12	12	100,00%
2 Pelayanan Keamanan dan Kebersihan 5 TK Negeri dan 1 SKB				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	2.114.623.000,00	1.744.289.373,00	82,49%				
1 Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD				%	100	100	100,00%
2 Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	780.927.000,00	478.181.003,00	61,23%	-		-	
1 Layanan pemeliharaan kendaraan dinas (kantor Disdik)				bulan	12	12	100,00%
2 Layanan pemeliharaan kendaraan dinas SKB				bulan	12	12	100,00%
3 Layanan Penyediaan BBM kendaraan kantor Dinas dan Korwil kapanewonan				bulan	12	12	100,00%
4 Layanan Penyediaan BBM kendaraan SKB				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	167.127.500,00	164.215.640,00	98,26%				
1 Layanan pemeliharaan mebel kantor Dinas dan 16 Korwil kapanewonan				bulan	12	12	100,00%
2 Layanan pemeliharaan mebel TK Negeri dan 1 SKB				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	364.930.500,00	333.840.430,00	91,48%				
1 Pemeliharaan peralatan kerja Kantor Dinas dan 17 Korwil kapanewonan				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2 Pemeliharaan peralatan kerja Kantor 5 TK Negeri dan 1 SKB				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	801.638.000,00	768.052.300,00	95,81%				
1 Pemeliharaan gedung kantor Dinas dan 16 Korwil kapanewonan				bulan	12	12	100,00%
2 Pemeliharaan gedung kantor 5 TK Negeri dan 17 Korwil kapanewonan				bulan	12	12	100,00%
3 Pemeliharaan taman Dinas				bulan	12	12	100,00%
4 Pemeliharaan taman 5 TK Negeri dan 1 SKB Sleman				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	0,00	0,00	0,00%				
1 Pemeliharaan gedung kantor				unit	0	0	0,00%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	338.207.161.187,99	321.924.026.232,97	95,19%				
1 Persentase Satuan Pendidikan PAUD Terakreditasi A				%	32,77	32,07	97,86%
2 Persentase Satuan Pendidikan SD Terakreditasi A				%	69,53	68,10	97,94%
3 Persentase Satuan Pendidikan SMP Terakreditasi A				%	82,08	79,34	96,66%
4 Persentase Satuan Pendidikan Nonformal dan Kesetaraan Yang Penyelenggaraanya Sudah Berizin				%	94,06	100,00	106,32%
5 Persentase Sarpras PAUD, SD, SMP dan pendidikan kesetaraan dalam kondisi baik				%	69,36	96,64	139,33%
Kegiatan Pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar	178.933.694.522,81	169.588.390.973,28	94,78%				
1 Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Sekolah Dasar				%	90	99,61	110,68%
2 Layanan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Sekolah Dasar				area layanan	5	5	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Penambahan ruang kelas baru	1.030.709.000,00	1.011.779.431,73	98,16%				
1 Pembangunan ruang kelas baru (APBD)				ruang	4	4	100,00%
2 Pembangunan ruang kelas baru (DAK)				ruang	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU	671.464.000,00	665.140.200,00	99,06%				
1 Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU				ruang	1	1	100,00%
2 Pembangunan ruang guru (DAK)				ruang	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	256.792.000,00	242.717.613,22	94,52%				
1 Pembangunan ruang UKS (APBD)				ruang	1	1	100,00%
2 Pembangunan ruang UKS (DAK)				ruang	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pembangunan perpustakaan sekolah	1.563.505.000,00	1.495.240.550,78	95,63%				
1 Pembangunan ruang perpustakaan sekolah (APBD)				ruang	4	4	100,00%
2 Pembangunan perpustakaan (DAK)				ruang	3	3	100,00%
Sub Kegiatan Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	1.049.717.000,00	1.015.063.528,26	96,70%				
1 Pembangunan toilet (jamban) (APBD)				paket	3	3	100,00%
2 Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas (DAK)				paket	3	3	100,00%
3 Pembangunan pagar sekolah (APBD)				paket	2	2	100,00%
4 Hibah pembangunan toilet (APBD)				paket	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	10.260.859.000,00	9.770.352.546,96	95,22%				
1 Rehabilitasi sedang ruang kelas (APBD)				ruang	77	77	100,00%
2 Rehabilitasi sedang ruang kelas (DAK)				ruang	25	25	100,00%
3 Hibah uang				ruang	16	16	100,00%
Sub Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang guru/kepala sekolah/TU	971.882.000,00	830.695.314,78	85,47%				
1 Rehabilitasi sedang ruang guru/kepala sekolah/TU (APBD)				ruang	3	3	100,00%
2 Rehabilitasi sedang ruang kepala sekolah (DAK)				ruang	4	4	100,00%
3 Rehabilitasi sedang ruang guru (DAK)				paket	4	4	100,00%
Sub Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah	241.679.000,00	223.008.745,90	92,27%				
1 Rehabilitasi sedang/berat ruang Unit Kesehatan Sekolah (APBD)				ruang	2	2	100,00%
2 Rehabilitasi sedang/berat ruang Unit Kesehatan Sekolah (DAK)				ruang	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	436.942.000,00	400.212.584,87	91,59%				
1 Rehabilitasi sedang perpustakaan sekolah (APBD)				ruang	2	2	100,00%
2 Rehabilitasi sedang perpustakaan sekolah (DAK)				ruang	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	1.294.843.000,00	1.249.956.504,24	96,53%				
1 Rehabilitasi sedang toilet sekolah (APBD)				paket	11	11	100,00%
2 Rehabilitasi sedang pagar sekolah (APBD)				paket	2	2	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
3 Rehabilitasi sedang sarana, prasarana dan utilitas (DAK)				paket	6	6	100,00%
4 Hibah uang rehabilitasi toilet				paket	7	7	100,00%
Sub Kegiatan Pengadaan mebel sekolah	2.866.997.000,00	2.811.556.625,00	98,07%				
1 Pengadaan mebel ruang kelas (APBD)				paket	17	17	100,00%
2 Pengadaan mebel ruang perpustakaan (APBD)				paket	3	3	100,00%
3 Pengadaan mebel ruang guru/KS/TU (APBD)				paket	4	4	100,00%
4 Pengadaan mebel ruang UKS (APBD)				paket	2	2	100,00%
5 Pengadaan mebel ruang perpustakaan (pembangunan perpustakaan) (DAK)				paket	3	3	100,00%
6 Pengadaan mebel ruang UKS (rehabilitasi) (DAK)				paket	2	2	100,00%
7 Pengadaan mebel ruang laboratorium (pembangunan) (DAK)				paket	4	4	100,00%
9 Pengadaan mebel ruang KS (rehabilitasi) (DAK)				paket	4	4	100,00%
10 Pengadaan mebel ruang kelas baru (DAK)				paket	1	1	100,00%
11 Pengadaan mebel ruang perpustakaan (rehabilitasi perpustakaan) (DAK)				paket	2	2	100,00%
12 Pengadaan mebel ruang laboratorium (rehabilitasi) (DAK)				paket	1	1	100,00%
13 Pengadaan mebel ruang guru (pembangunan) (DAK)				paket	2	2	100,00%
14 Pengadaan mebel ruang guru (rehabilitasi) (DAK)				paket	4	4	100,00%
15 Pengadaan mebel ruang UKS (pembangunan) (DAK)				paket	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
16 Pengadaan mebel Ruang Laboratorium (APBD)				paket	1	1	100,00%
## Hibah Pengadaan Mebel Ruang Kelas (APBD)				paket	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar	1.146.766.000,00	1.041.194.550,00	90,79%				
1 Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Didik Miskin				siswa	2000	2.000	100,00%
Sub Kegiatan Pengadaan alat praktek dan peraga Siswa	6.669.283.000,00	5.949.014.775,00	89,20%				
1 Pengadaan alat praktek dan peraga olahraga				paket	5	5	100,00%
2 Pengadaan mebel ruang kelas (DAK)				paket	25	25	100,00%
3 Pengadaan buku induk (APBD)				buku	1000	1.000	100,00%
4 Pengadaan peralatan TIK (DAK)				paket	43	43	100,00%
5 Pengadaan media pendidikan				paket	1	1	100,00%
6 Belanja hibah barang pengadaan alat praktik dan peraga siswa				paket	5	5	100,00%
7 Belanja hibah pengadaan peralatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) (DAK)				paket	3	3	100,00%
8 Belanja modal Pengadaan alat praktik dan peraga siswa				paket	8	8	100,00%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	2.143.403.000,00	1.840.223.564,00	85,86%				
1 Pembinaan dan pengembangan kurikulum SD				kegiatan	5	5	100,00%
2 Penyelenggaraan ujian SD				kegiatan	7	7	100,00%
Sub Kegiatan Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	250.986.000,00	233.125.600,00	92,88%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Pembinaan prestasi dan lomba kesiswaan SD				kegiatan	2	2	100,00%
2 Pembinaan karakter siswa				kegiatan	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar	24.485.470.000,00	22.543.726.325,00	92,07%				
1 Fasilitasi penyediaan penghargaan dan tambahan kesejahteraan				dokumen	6	6	100,00%
Sub Kegiatan Pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	1.586.544.800,00	1.205.815.672,00	76,00%				
1 Pembinaan kompetensi PTK				kegiatan	9	9	100,00%
2 Pengembangan karir PTK				kegiatan	2	2	100,00%
3 Pengawasan dan penilaian kinerja PTK				kegiatan	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	582.975.000,00	499.473.275,00	85,68%				
1 Pembinaan dan pengembangan kelembagaan SD				kegiatan	3	3	100,00%
2 Pelayanan perijinan satuan pendidikan				kegiatan	3	2	66,67%
3 Penyelenggaraan PPDB SD				kegiatan	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pengelolaan dana BOS sekolah dasar	120.161.292.722,81	115.398.744.722,81	96,04%				
1 Laporan pengelolaan dana BOS				dokumen	2	2	100,00%
2 Dokumen APBS				dokumen	510	510	100,00%
Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	889.074.000,00	813.939.894,30	91,55%				
1 Pembangunan Laboratorium Komputer SD (DAK)				ruang	4	4	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	372.511.000,00	347.408.949,43	93,26%				
1 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium TIK Sekolah Dasar (APBD)				ruang	2	2	100,00%
2 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Komputer(DAK)				ruang	1	1	100,00%
Kegiatan Pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama	101.308.206.400,18	96.248.602.890,04	95,01%				
1 Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				%	90	97,58	108,42%
2 Layanan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Jenjang SMP/Sederajat				area layanan	5	5	100,00%
Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru	1.252.073.000,00	1.232.564.320,52	98,44%				
1 Penambahan ruang kelas baru (APBD)				ruang	3	3	100,00%
2 Penambahan ruang kelas baru beserta perabotnya (DAK)				ruang	3	3	100,00%
Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	94.000.000,00	90.592.974,52	96,38%				
1 Jumlah ruang UKS yang terbangun				ruang	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah	854.669.000,00	762.027.875,11	89,16%				
1 Pembangunan ruang perpustakaan sekolah (APBD)				ruang	1	1	100,00%
2 Pembangunan ruang perpustakaan sekolah (DAK)				ruang	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	741.000.000,00	645.182.899,54	87,07%				
Jumlah aula yang terbangun				ruang	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	1.845.933.000,00	1.800.494.064,42	97,54%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Rehabilitasi sedang ruang kelas (APBD)				ruang	13	13	100,00%
2 Rehabilitasi sedang ruang kelas beserta perabotnya (DAK)				ruang	2	2	100,00%
3 Hibah uang				sekolah	5	5	100,00%
Sub Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah	670.804.000,00	660.048.989,94	98,40%				
1 Rehabilitasi ruang guru SMP (APBD)				ruang	2	2	100,00%
2 Rehabilitasi ruang guru SMP beserta perabotnya (DAK)				ruang	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	323.710.000,00	316.351.137,88	97,73%				
1 Rehabilitasi sedang ruang perpustakaan (APBD)				ruang	1	1	100,00%
2 Rehabilitasi sedang ruang perpustakaan (DAK)				ruang	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat laboratorium	867.263.000,00	815.997.739,36	94,09%				
1 Rehabilitasi sedang ruang laboratorium SMP (APBD)				ruang	3	3	100,00%
2 Rehabilitasi sedang ruang laboratorium SMP (DAK)				ruang	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	579.580.000,00	533.559.908,57	92,06%				
1 Rehabilitasi sedang toilet (jamban) (APBD)				paket	2	2	100,00%
2 Rehabilitasi sedang toilet (jamban) beserta sanitasinya (DAK)				ruang	4	4	100,00%
Sub Kegiatan Pengadaan mebel sekolah	907.142.000,00	885.088.750,00	97,57%				
1 Pengadaan mebel ruang kelas SMP (APBD)				paket	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2 Pengadaan mebeler ruang perpustakaan SMP (APBD)				paket	1	1	100,00%
3 Pengadaan mebeler ruang laboratorium SMP (APBD)				paket	2	2	100,00%
4 Pengadaan mebeler ruang kelas SMP (DAK)				paket	4	4	100,00%
5 Pengadaan mebeler ruang perpustakaan SMP (DAK)				paket	2	2	100,00%
6 Pengadaan mebeler ruang Tata Usaha/TU SMP (DAK)				paket	1	1	100,00%
7 Pengadaan mebeler pusat sumber pendidikan inklusif				paket	1	1	100,00%
8 Pengadaan mebeler ruang guru SMP (DAK)				paket	2	2	100,00%
9 Pengadaan mebeler ruang guru SMP (APBD)				paket	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pengadaan perlengkapan Sekolah	376.692.000,00	366.022.750,00	97,17%				
1 Pengadaan komputer PC (APBD)				unit	32	32	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah menengah pertama	2.032.784.000,00	1.875.407.886,00	92,26%				
1 Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik Miskin				Siswa	2385	3.436	144,07%
2 Penanganan Anak Putus Sekolah				kegiatan	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pengadaan alat praktik dan peraga Siswa	984.332.000,00	790.620.250	80,32%				
1 Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) (DAK)				paket	2	2	100,00%
2 Pengadaan peralatan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Biologi (DAK)				paket	3	3	100,00%
3 Pengadaan peralatan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Fisika (DAK)				paket	3	3	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
4 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa				paket	8	8	100,00%
5 Pengadaan komputer/Chrome book/laptop				unit	50	50	100,00%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	1.683.271.000,00	1.622.380.200,00	96,38%				
1 Dukungan Penyelenggaraan Ujian SMP (ASPD)				kegiatan	2	2	100,00%
2 Dukungan Pengembangan Kurikulum SMP				kegiatan	3	3	100,00%
3 Peta Hasil Proses Belajar Mengajar SMP (TKM)				kegiatan	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	1.837.711.000,00	1.412.340.950	76,85%				
1 Dukungan pengembangan minat bakat, dan kreativitas peserta didik				kegiatan	12	11	91,67%
2 Dukungan pengembangan karakter peserta didik				kegiatan	4	4	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah menengah pertama	12.287.008.000,00	10.310.157.650,00	83,91%				
1 Pengelolaan nominatif pendidik dan tenaga kependidikan SMP				dokumen	2	2	100,00%
2 Fasilitasi penyediaan penghargaan dan tambahan kesejahteraan PTK SMP				dokumen	6	6	100,00%
Sub Kegiatan Pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama	297.870.900,00	252.164.250,00	84,66%				
1 Pembinaan Kompetensi PTK				kegiatan	2	2	100,00%
2 Pengembangan Karir PTK				kegiatan	1	1	100,00%
3 Pengawasan dan Penilaian Kinerja PTK				kegiatan	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	423.839.000,00	386.725.900,00	91,24%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Pembinaan kelembagaan SMP				kegiatan	2	2	100,00%
2 Ijin operasional sekolah				sekolah	2	3	150,00%
3 Penyelenggaraan PPDB SMP				kegiatan	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama	72.674.559.500,18	70.950.803.482,18	97,63%				
1 Laporan pengelolaan dana BOS				dokumen	2	2	100,00%
3 Dokumen APBS				dokumen	54	54	100,00%
Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	380.220.000,00	355.304.324,27	93,45%				
1 Rehabilitasi ruang TU SMP (DAK)				ruang	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	193.745.000,00	184.766.587,73	95,37%				
1 Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah SMP (APBD)				ruang	2	2	100,00%
2 Rehabilitasi Ruang KS SMP beserta perabotnya (DAK)				ruang	1	1	100,00%
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	51.518.193.900,00	50.202.673.715,00	97,45%				
1 Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini				%	80	93	116,10%
2 Layanan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini				area layanan	6	6	100,00%
Sub Kegiatan Pembangunan gedung/ruang kelas/ ruang guru PAUD	1.774.239.000,00	1.765.176.950,00	99,49%				
1 Pembangunan Ruang Kelas Baru (PAUD)				ruang	8	8	100,00%
Sub Kegiatan Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD	819.938.000,00	810.566.925,00	98,86%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Pembangunan toilet (jamban) PAUD (APBD)				paket	5	5	100,00%
2 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD (DAK)				paket	2	2	100,00%
3 Pembangunan pagar lembaga				paket	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD	1.064.111.000,00	1.060.447.700,00	99,66%				
1 Rehabilitasi sedang ruang kelas PAUD (APBD)				ruang	18	18	100,00%
Sub Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat pembangunan sarana dan prasarana dan utilitas PAUD	1.168.145.000,00	1.159.954.075,00	99,30%				
1 Rehabilitasi sedang toilet (jamban) PAUD (APBD)				paket	2	2	100,00%
2 Hibah keagamaan dan pendidikan				tahun	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pengadaan mebel PAUD	411.078.000,00	405.983.750,00	98,76%				
1 Pengadaan mebelair ruang kelas PAUD APBD				paket	11	11	100,00%
Sub Kegiatan Pengadaan perlengkapan siswa PAUD	384.788.750,00	366.832.325,00	95,33%				
1 Pengadaan buku gambar dan alat mewarnai				paket	1500	1.500	100,00%
2 Pengadaan laptop				unit	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan biaya personil peserta didik PAUD	387.091.000,00	385.613.675,00	99,62%				
1 Gelar kreativitas anak usia dini				anak	68	68	100,00%
2 Bantuan Pendidikan Bagi peserta didik TK dari Keluarga miskin				anak	1500	1.500	100,00%
Sub Kegiatan Pengadaan alat praktik dan peraga Siswa PAUD	1.242.523.900,00	1.226.211.700,00	98,69%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Pengadaan APE outdoor (APBD)				paket	25	25	100,00%
2 Pengadaan APE outdoor (DAK)				paket	4	4	100,00%
3 Pengadaan APE Indoor (APBD)				paket	28	28	100,00%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan proses belajar PAUD	851.687.250,00	738.744.025,00	86,74%				
1 Pembinaan dan pengembangan kurikulum satuan PAUD				kegiatan	10	10	100,00%
2 Pelatihan diklat "STEAM HOTS" (PUPM kapanewon Godean)				orang	45	45	100,00%
3 Diklat penyusunan KTSP (PUPM Kapanewonn Godean)				orang	45	45	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan PAUD	20.581.331.000,00	20.175.119.525,00	98,03%				
1 Pengelolaan nominatif pendidik dan tenaga kependidikan PAUD				dokumen	2	2	100,00%
2 Penyediaan Penghargaan dan Tambahan Kesejahteraan PTK PAUD				dokumen	6	6	100,00%
Sub Kegiatan Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD	1.886.448.000,00	1.874.846.240,00	99,38%				
1 Pembinaan Kompetensi PTK PAUD				kegiatan	25	25	100,00%
2 Pengawasan dan Penilaian Kinerja PTK PAUD				kegiatan	3	3	100,00%
3 Pengembangan Karir PTK PAUD				kegiatan	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD	659.230.000,00	646.847.925,00	98,12%				
1 Pembinaan dan pengembangan kelembagaan satuan PAUD				kegiatan	7	7	100,00%
2 Pendataan satuan PAUD				dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
3 Pelayanan perizinan satuan PAUD				lembaga	30	206	686,67%
4 Penyelenggaraan PPDB TK				kegiatan	1	1	100,00%
5 Lomba lembaga PAUD inovatif dan kalurahan inovatif				kegiatan	2	2	100,00%
6 Bimtek peningkatan kompetensi kepala lembaga PAUD (PUPM Depok)				paket	2	2	100,00%
7 Pelatihan manajemen pengelola PAUD (PUPM Kapanewonan Minggir)				orang	30	30	100,00%
8 Diklat supervisi kelembagaan PAUD (PUPM Kapanewonan Godean)				orang	37	37	100,00%
9 Diklat kewirausahaan pengelola PAUD (PUPM Kapanewonan Godean)				orang	37	37	100,00%
10 Pendampingan dan penguatan 8 standar nasional PAUD (PUMP Kapanewonan Godean)				orang	50	50	100,00%
11 Pelatihan lembaga PAUD dan TK (PUMPM Prambanan)				paket	1	1	100,00%
12 Workshop dan pendampingan akreditasi lembaga PAUD (PUPM Kapanewonan Moyudan)				orang	28	28	100,00%
Sub Kegiatan Pengelolaan dana BOP PAUD	20.287.583.000,00	19.586.328.900,00	96,54%				
1 Pendampingan pengelolaan BOP PAUD				tahap	2	2	100,00%
2 Penyaluran dana BOP PAUD				tahap	2	2	100,00%
3 Pembinaan pengelolaan RAPBS/APBS				lembaga	6	6	100,00%
Kegiatan Pengelolaan pendidikan non formal dan kesetaraan	6.447.066.365,00	5.884.358.654,65	91,27%				
1 Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kesetaraan				60%	60	86,96	144,93%
2 Layanan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Jenjang Kesetaraan				area layanan	6	6	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	225.922.500,00	220.342.600,00	97,53%				
1 Jumlah ruang belajar yang terbangun				ruang	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	292.694.000,00	258.909.718,65	88,46%				
1 Pembangunan Ruang Praktik Beserta Perabotnya (DAK)				ruang	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat/ Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0,00	0,00	0,00%				
1 Rehabilitasi ruang belajar PKBM					0	0	0,00%
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	45.840.000,00	43.018.500,00	93,84%				
Pengadaan mebel ruang praktik tata boga (DAK)				paket	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan biaya personil peserta didik nonformal/kesetaraan	109.302.000,00	109.301.975,00	100,00%				
1 Lomba Peserta didik berprestasi LKP (Kompetensi)				orang	25	25	100,00%
Sub Kegiatan Pengadaan alat praktik dan peraga siswa nonformal/kesetaraan	431.662.000,00	407.744.850,00	94,46%				
1 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan (DAK)				Paket	4	4	100,00%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan proses belajar nonformal/kesetaraan	1.199.657.965,00	1.101.261.036,00	91,80%				
1 Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				kegiatan	14	14	100,00%
2 Penyelenggaraan Ujian Pendidikan Kesetaraan				kegiatan	3	3	100,00%
3 Pembinaan Anak Putus Sekolah (PUPM Prambanan)				kegiatan	1	1	100,00%
4 PKH Kursus Menjahit Tingkat Dasar				kegiatan	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
5 PKH Kursus Menjahit Tingkat Lanjut				kegiatan	1	1	100,00%
6 PKH Kursus Bordir				kegiatan	1	1	100,00%
7 Peningkatan Kualitas Pendidikan Bagi ASN yang masih berijazah SD dan SMP				bulan	6	6	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan nonformal/kesetaraan	487.189.000,00	302.876.925,00	62,17%				
1 Dokumen Nominatif PTK Nonformal/Kesetaraan				dokumen	2	2	100,00%
2 Penyediaan Penghargaan dan Tambahan Kesejahteraan PTK Nonformal/Kesetaraan				dokumen	6	6	100,00%
Sub Kegiatan Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal/kesetaraan	359.576.900,00	336.674.325,00	93,63%				
1 Pembinaan Kompetensi PTK Nonformal/Kesetaraan				kegiatan	4	4	100,00%
2 Pengawasan Kinerja PTK Nonformal/Kesetaraan				kegiatan	2	2	100,00%
3 Pengembangan Karir PTK Nonformal/Kesetaraan				kegiatan	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah nonformal/kesetaraan	170.284.000,00	168.173.100,00	98,76%				
1 Pembinaan Kelembagaan dan Managemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan				Kegiatan	5	5	100,00%
2 Pelayanan perizinan satuan pendidikan nonformal/kesetaraan				lembaga	10	40	400,00%
3 Pendataan Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pengelolaan dana BOP sekolah nonformal/kesetaraan	3.124.938.000,00	2.936.055.625,00	93,96%				
1 Pendampingan pengelolaan BOP Kesetaraan paket A, B, dan C				tahap	2	2	100,00%
2 Penyaluran dana BOP Kesetaraan				tahap	2	2	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	203.503.750	144.269.250	70,89%				
1 Persentase guru yang memperoleh hasil penilaian kinerja guru dengan nilai minimal baik				%	98,90	99,60	100,71%
2 Persentase guru ASN yang memenuhi kualifikasi pendidikan terakhir S1/D4 yang bersertifikat pendidik.				%	85,00	75,00	88,24%
Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	203.503.750,00	144.269.250,00	70,89%				
1 Persentase mutu pelayanan PTK sesuai standar				%	40	63,28	158,20%
2 Layanan penerapan mutu pelayanan PTK sesuai standar SPM				layanan	3	3	100,00%
Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	194.345.000,00	137.460.500,00	70,73%				
1 Pendataan Nominatif PTK				dokumen	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	9.158.750,00	6.808.750,00	74,34%				
1 Analisis Kebutuhan PTK				kegiatan	1	1	100,00%





**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS KESEHATAN
2022**

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN	559.498.469.424,55	498.544.887.417,31	89,11%				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	559.498.469.424,55	498.544.887.417,31	89,11%				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	90.210.863.126,00	86.128.412.526,00	95,47%				
1 Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				%	100,00	100,00	100,00%
2 Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	212.325.869,00	202.954.369,00	95,59%				
1 Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu				%	100,00	100,00	100,00%
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	87.913.685,00	83.310.253,00	94,76%				
1 Dokumen Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen Renja				dokumen	1	1	100,00%
4 Dokumen Perubahan Renja				dokumen	1	1	100,00%
5 Dokumen Renstra				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	28.920.780,00	28.363.000,00	98,07%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Dokumen RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	13.522.500,00	13.522.500,00	100,00%				
1 Dokumen Perubahan RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	5.816.250,00	5.816.000,00	100,00%				
1 Dokumen DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan perubahan DPA-SKPD	5.692.500,00	5.692.500,00	100,00%				
1 Dokumen Perubahan DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah	70.460.154,00	66.250.116,00	94,02%				
1 Buku Profil Kesehatan				dokumen	1	1	100,00%
2 Buku Sekilas Info Kesehatan				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen Laporan Tahunan				dokumen	1	1	100,00%
4 Dokumen LKjIP				dokumen	1	1	100,00%
5 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renja (E.81)				dokumen	4	4	100,00%
6 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan renja (E.70)				dokumen	1	1	100,00%
7 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja (E.75)				dokumen	4	4	100,00%
8 Dokumen realisasi fisik dan kegiatan (RFK)				dokumen	12	12	100,00%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	85.866.758.367,00	82.181.829.977,00	95,71%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu				%	100	100	100,00%
2 Ketepatan waktu pemenuhan gaji dan tunjangan ASN				%	100	100	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	85.152.858.739,00	81.511.756.392,00	95,72%				
1 Pembayaran gaji dan tunjangan ASN, TPP, iuran BPJS				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	451.140.000,00	413.078.596,00	91,56%				
1 Pembayaran honorarium pengelolaan keuangan, pengadaan barang jasa, dan pengelolaan barang milik daerah				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	262.759.628,00	256.994.989,00	97,81%				
1 Laporan Keuangan semesteran				dokumen	2	2	100,00%
2 Laporan BMD semesteran				dokumen	2	2	100,00%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	527.677.450,00	462.693.238,00	87,68%				
1 Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu				%	100	100	100,00%
Sub Kegiatan Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	491.677.450,00	432.393.238,00	87,94%				
1 Laporan pelaksanaan reformasi birokrasi				dokumen	1	1	100,00%
2 Layanan administrasi kepegawaian				bulan	12	12	100,00%
3 Pembayaran tenaga non PNS/PHL				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan	36.000.000,00	30.300.000,00	84,17%				
1 Pengiriman peserta bimbingan teknis				peserta	4	4	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2 Pengiriman peserta diklat				peserta	2	2	100,00%
3 Pengiriman peserta sosialisasi				peserta	4	4	100,00%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.644.192.921,00	1.535.576.323,00	93,39%				
1 Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum				%	100	100	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	21.393.023,00	20.990.250,00	98,12%				
1 Alat listrik dan elektronik				jenis	11	11	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	710.412.456,00	637.610.000,00	89,75%				
1 Peralatan dan perlengkapan kantor				jenis	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	337.118.752,00	323.220.875,00	95,88%				
1 Alat tulis kantor				paket	1	1	100,00%
2 Layanan penyediaan makanan dan minuman rapat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	99.320.690,00	99.227.152,00	99,91%				
1 Layanan cetak dan penggandaan dokumen				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas kunjungan tamu	30.210.000,00	25.305.000,00	83,76%				
1 Layanan penyediaan makanan dan minuman tamu				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	347.818.000,00	347.463.046,00	99,90%				
1 Layanan perjalanan dinas dalam daerah				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2 Layanan Perjalanan Dinas luar daerah				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	40.220.000,00	32.110.000,00	79,84%				
1 Pelayanan surat menyurat				bulan	12	12	100,00%
2 Pengelolaan arsip dan perpustakaan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	57.700.000,00	49.650.000,00	86,05%				
1 Pengelolaan informasi dan dokumen perangkat daerah				bulan	12	12	100,00%
2 Layanan informasi publik perangkat daerah				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	158.698.380,00	153.200.000,00	96,54%				
1 Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah				%	100	100	100,00%
Sub Kegiatan Pengadaan meubel	158.698.380,00	153.200.000,00	96,54%				
1 Jumlah Pengadaan Mebel				jenis	4	4	100,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.150.386.639,00	1.041.137.192,00	90,50%				
1 Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah				%	100	100	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	247.010.217,00	205.982.049,00	83,39%				
1 Pembayaran jasa langganan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	903.376.422,00	835.155.143,00	92,45%				
1 Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	650.823.500,00	551.021.427,00	84,67%				
1 Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD				%	100	100	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	369.718.000,00	287.093.799,00	77,65%				
1 Layanan pemeliharaan kendaraan dinas				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	177.485.500,00	167.924.128,00	94,61%				
1 Pemeliharaan/perbaikan peralatan kerja				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	103.620.000,00	96.003.500,00	92,65%				
1 Pemeliharaan rutin/berkala				bulan	12	12	100,00%
2 Pemeliharaan taman				bulan	12	12	100,00%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	78.162.220.829,00	67.697.779.685,00	86,61%				
1 Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) sesuai standart pusat >60%				%	82,75	81,95	99,03%
2 Persentase cakupan pelayanan Sleman Emergency Services (SES)				%	100,00	100,00	100,00%
3 Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)				%	90,00	96,71	107,46%
4 Angka penemuan penderita TB Case Detection Rate				%	42,50	61,01	143,55%
5 Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Kesehatan Masyarakat				%	100,00	89,90	89,90%
6 Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit				%	100,00	115,51	115,51%
7 Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk				%	45109,00	2,93	0,01%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	11.680.464.725,00	10.936.463.570,00	93,63%				
1 Cakupan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar				%	100	80,72	80,72%
Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas	1.686.454.300,00	1.585.297.830,00	94,00%				
1 Jumlah DED pengembangan puskesmas				dokumen	1	1	100,00%
2 Jumlah pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) yang dibangun				unit	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas	1.436.093.039,00	1.201.604.193,00	83,67%				
1 DED rehabilitasi Puskesmas Turi				dokumen	1	1	100,00%
2 rehabilitasi Puskesmas Ngemplak I				unit	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	707.000.000,00	674.575.518,00	95,41%				
1 Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				unit	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Pengadaan alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	7.815.917.386,00	7.442.289.579,00	95,22%				
1 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				unit	75	75	100,00%
Sub Kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	35.000.000,00	32.696.450,00	93,42%				
1 Tes kalibrasi				paket	1	1	100,00%
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	57.261.851.109,00	47.773.205.416,00	83,43%				
1 Cakupan pelayanan SPM sesuai standar				%	100,00	100,00	100,00%
Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	481.104.500,00	400.801.700,00	83,31%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Data standar Pelayanan Minimal Kesehatan Ibu Hamil dan PWS KIA				dokumen	1	1	100,00%
2 Kegiatan Penekanan dan Pencegahan Kematian Ibu				Kabupaten Sleman	1	1	100,00%
3 Kegiatan BOK Ibu Hamil				bulan	12	12	100,00%
4 Pendampingan Kelas Ibu Hamil				puskesmas	25	25	100,00%
5 Data kunjungan ibu Hamil ke 4/lengkap				dokumen	1	1	100,00%
6 Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				orang	13.637	11.901	87,27%
Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	1.426.622.870,00	759.134.380,00	53,21%				
1 Data Standar Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				dokumen	1	1	100,00%
2 Implementasi SIM KIA Sembada				Kabupaten Sleman	1	1	100,00%
3 BOK Ibu Bersalin				bulan	12	12	100,00%
4 Pemanfaatan Buku KIA				Kabupaten Sleman	1	1	100,00%
5 Operasional Jaminan Persalinan (Jampersal)				bulan	12	12	100,00%
6 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				orang	13.017	11.970	91,96%
Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi dan ibu	60.910.040,00	51.554.650,00	84,64%				
1 Data Standar Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				dokumen	1	1	100,00%
2 Pelaksaan SDIDTK untuk BBL				Kabupaten Sleman	1	1	100,00%
3 Pemanfaatan Buku KIA				Kabupaten Sleman	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
4 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				orang	12390	11542	93,16%
Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	147.754.750,00	147.681.730,00	99,95%				
1 Data Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Balita				dokumen	1	1	100,00%
2 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)				bulan	12	12	100,00%
3 Pendampingan pemberian Vitamin A pada Balita 6 - 59 bulan				puskesmas	25	25	100,00%
4 Data Pemberian Makan bagi Bayi dan Anak (PMBA)				dokumen	1	1	100,00%
5 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Kesehatan Sesuai Standar				orang	59543	49664	83,41%
Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan lansia	398.700.000,00	353.559.035,00	88,68%				
1 Data penjarangan anak sekolah				dokumen	1	1	100,00%
2 Data kesehatan reproduksi				dokumen	1	1	100,00%
3 Pengadaan Buku Raport Kesehatanku				buku	17.849	17.849	100,00%
4 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)				bulan	12	12	100,00%
5 Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				orang	140.062	126.087	90,02%
Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	109.897.925,00	106.024.750,00	96,48%				
1 Peningkatan Kapasitas Petugas dalam pelayanan kesehatan pada usia produktif				puskesmas	25	25	100,00%
2 Tersedianya KMS Posbindu				lembar	4.500	4.500	100,00%
3 Workshop Penguatan Jejaring IVA Test dan SADANIS				dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
4 Pelayanan PANDU PTM				puskesmas	25	25	100,00%
5 Pelaporan Skrining PTM				bulan	12	12	100,00%
6 Laporan Pelayanan IVA dan SADANIS				bulan	12	12	100,00%
7 Pelayanan IVA dan SADANIS				puskesmas	25	25	100,00%
8 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				orang	459.980	444.924	96,73%
Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	377.175.000,00	351.316.750,00	93,14%				
1 Pertemuan Programmer Lansia				kali	4	4	100,00%
2 Seminar Hari Lanjut Usia (Halun)				kali	1	1	100,00%
3 (BOK) Orientasi Penggunaan Panduan Praktis untuk Caregiver Informal pada Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia				kali	1	1	100,00%
4 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				orang	105.730	97.596	92,31%
5 Cetak Buku Kesehatan Lanjut Usia				buku	26.006	26.006	100,00%
Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi	35.317.500,00	35.317.375,00	100,00%				
1 Peningkatan kapasitas petugas dalam pelayanan hipertensi				puskesmas	25	25	100,00%
2 Seminar Peringatan Hari Hipertensi Sedunia				dokumen	1	1	100,00%
3 Laporan Pelayanan Hipertensi				bulan	12	12	100,00%
4 Media KIE berupa leaflet untuk Pengelolaan pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi (BOK)				lembar	4.700	4.700	100,00%
5 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				orang	46.413	44.423	95,71%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Melitus	34.142.500,00	33.840.000,00	99,11%				
1 Peningkatan kapasitas petugas dalam pengelolaan DM				puskesmas	25	25	100,00%
2 Seminar Peringatan Hari DM				dokumen	1	1	100,00%
3 Pelaporan Pelayanan DM				bulan	12	12	100,00%
4 Media KIE berupa Leaflet Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita DM (BOK)				lembar	4.700	4.700	100,00%
5 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang PTM Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				orang	16.563	15.536	93,80%
Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	176.928.345,00	161.130.325,00	91,07%				
1 Kelurahan Siaga Sehat Jiwa				kelurahan	4	4	100,00%
2 Pelaporan kesehatan jiwa				bulan	12	12	100,00%
3 Peningkatan kapasitas petugas dalam pelayanan keswa				puskesmas	25	25	100,00%
4 TPKJM Kabupaten				tim	1	1	100,00%
5 Seminar Hari Kesehatan Mental Sedunia				dokumen	1	1	100,00%
6 Media KIE dalam pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan ODGJ Berat				dokumen	1	1	100,00%
7 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				orang	2.942	2.895	98,40%
Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberculosis	158.473.530,00	138.973.000,00	87,69%				
1 Data TB Valid				dokumen	1	1	100,00%
2 Desa Peduli TB				desa	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
3 Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar				orang	4.899	10.444	213,19%
Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	146.794.500,00	131.124.250,00	89,33%				
1 Dokumen Data HIV/AIDS				dokumen	4	4	100,00%
2 Pelayanan Konseling dan Test/KT HIV				lokasi	10	10	100,00%
3 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				orang	15.220	19.811	130,16%
Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	502.869.460,00	312.597.250,00	62,16%				
1 Pelacakan kasus dari investigasi analisa dan tindak lanjut (KLB)				bulan	12	12	100,00%
2 Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				dokumen	3	3	100,00%
Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	7.466.116.573,00	5.946.282.688,00	79,64%				
1 Orang terlatih penanganan kegawatdaruratan dalam bencana bagi masyarakat				orang	260	300	115,38%
Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1.370.349.480,00	1.276.349.646,00	93,14%				
1 Data Surveilans Gizi				dokumen	1	1	100,00%
2 Pendampingan Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil KEK dan balita gizi kurang				puskesmas	25	25	100,00%
3 Pendampingan pemberian Tablet Tambah Darah bagi Remaja Putri				puskesmas	25	25	100,00%
4 Pendampingan pemberian Tablet Tambah Darah bagi Ibu Hamil				puskesmas	25	25	100,00%
5 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				bulan	12	12	100,00%
6 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Stunting				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
7 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	252.577.856,00	240.545.475,00	95,24%				
1 Bimtek GP2SP				kali	2	2	100,00%
2 Bimtek Kesehatan Kerja				kali	4	4	100,00%
3 Bimtek Kesehatan Olahraga				kali	2	2	100,00%
4 Bimtek Pos UKK				kali	25	25	100,00%
5 Pos UKK KIT				paket	40	40	100,00%
Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	1.689.016.183,00	1.644.937.846,00	97,39%				
1 Bimtek Inspeksi Kesehatan Lingkungan TTU				kali	3	3	100,00%
2 Bimtek Kesehatan Lingkungan Fasyankes				kali	2	2	100,00%
3 Bimtek Pembinaan Penyehatan Kualitas air Minum				kali	2	2	100,00%
4 BKK (Bansos) Jambanisasi				paket	1	1	100,00%
5 Fasilitasi STBM				kali	10	10	100,00%
6 Monev ABJ				kali	2	2	100,00%
7 Pemeriksaan sampel air bersih				sampel	137	137	100,00%
8 Pemeriksaan sampel air minum				sampel	500	500	100,00%
9 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	219.866.000,00	204.340.700,00	92,94%				
1 Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya	14.564.160,00	14.407.500,00	98,92%				
1 Pembinaan pelayanan kesehatan tradisional				kali	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Pengelolaan surveilans kesehatan	127.706.770,00	98.837.482,00	77,39%				
1 Pelayanan imunisasi anak sekolah				SD/MI	565	565	100,00%
2 Pelayanan imunisasi balita				puskesmas	25	25	100,00%
3 Pelayanan Imunisasi Bayi				puskesmas	25	25	100,00%
4 Pelayanan imunisasi calon penganten				puskesmas	25	25	100,00%
5 Pelayanan imunisasi ibu hamil				puskesmas	25	25	100,00%
6 Pelayanan pemeriksaan kesehatan calon haji				Calhaj	554	554	100,00%
Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	27.283.640,00	27.203.400,00	99,71%				
1 Peningkatan kapasitas dalam pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan Napza				puskesmas	25	25	100,00%
2 Pelaporan penanganan kasus penyalahgunaan Napza				bulan	12	12	100,00%
3 Seminar dalam Rangka Hari Narkoba Internasional				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pengelolaan upaya kesehatan khusus	28.423.880,00	28.140.000,00	99,00%				
1 Pembinaan pelayanan rehabilitasi medis				kali	2	2	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	851.807.130,00	593.581.278,00	69,68%				
1 Data ISPA Pneumonia sesuai standar				dokumen	1	1	100,00%
2 Data DBD				dokumen	1	1	100,00%
3 Larvasida				kg	300	300	100,00%
4 Data Leptospirosis dilayanan sesuai standar				%	100	100	100,00%
5 Data Balita Diare Mendapat Suplementasi Zink				dokumen	1	1	100,00%
6 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				dokumen	3	3	100,00%
Sub Kegiatan Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	33.672.241.176,00	28.009.978.721,00	83,18%				
1 Pelayanan kesehatan penduduk miskin, rentan miskin, kader kesehatan, kader sosial, kader IMP, anggota Linmas, PBI APBN Non Aktif, Ketua RT/RW, relawan bencana, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), penderita penyakit kronis, Rois, pengurus tempat ibadah, anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), guru honorer, guru tidak tetap, penduduk tidak mampu (SKTM), penyandang disabilitas, dll				bulan	12	12	100,00%
2 SK Bupati				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat	282.594.808,00	243.760.700,00	86,26%				
1 Bimtek forkom Desa sehat tingkat Kecamatan				kecamatan	17	17	100,00%
2 Bimtek Pokja Kab. Sehat tingkat Desa				pokja	17	17	100,00%
3 Evaluasi Pelaksanaan Kabupaten Kota Sehat Tingkat Kapanewon				kali	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan telemedicine di fasilitas pelayanan kesehatan	688.000.000,00	640.000.000,00	93,02%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas				unit	16	16	100,00%
Sub Kegiatan Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	4.950.000.000,00	4.658.115.000,00	94,10%				
1 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota	604.866.033,00	478.303.250,00	79,08%				
1 Workshop Peningkatan Mutu				puskesmas	25	25	100,00%
2 Workshop PPI				puskesmas	25	25	100,00%
3 Monitoring dan Evaluasi mutu dan Akreditasi 25 Puskesmas				kali	1	1	100,00%
4 Survei Akreditasi				puskesmas	25	10	40,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	97.888.980,00	90.587.415,00	92,54%				
1 Pencatatan dan pelaporan kasus-kasus epidemiologi				bulan	12	12	100,00%
2 Surveilans terpadu penyakit berbasis puskesmas (kasus baru)				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan sistem penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)	833.857.520,00	569.076.520,00	68,25%				
1 Pelayanan SES				bulan	12	12	100,00%
2 Pelayanan kesehatan dalam PORDA XVI dan PEPARDA III				paket	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	28.000.000,00	25.702.600,00	91,80%				
1 Jumlah Keluarga Yang Sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				keluarga	1250	1250	100,00%
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	236.932.560,00	217.746.831,00	91,90%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Cakupan Sistem Informasi Kesehatan puskesmas				%	100	100	100,00%
Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	236.932.560,00	217.746.831,00	91,90%				
1 Indeks Kepuasan Masyarakat				UPT+Dinkes	28	28	100,00%
2 Pembinaan dan pengembangan SIK dan Bank data				dinkes	1	1	100,00%
3 Perjanjian kerjasama Institusi Pendidikan				institusi	38	41	107,89%
4 Draft Raperbup				draf perbup	1	0	0,00%
Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.982.972.435,00	8.770.363.866,00	97,63%				
1 Cakupan pelayanan kesehatan swasta dan pemerintah memberi laporan kunjungan				%	82	84,44	102,98%
Sub Kegiatan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas c, d dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	86.500.000,00	74.469.666,00	86,09%				
1 Jumlah RS yang dibina dalam aspek perizinan				RS	28	28	100,00%
Sub Kegiatan peningkatan tata kelola rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	8.770.559.710,00	8.575.732.800,00	97,78%				
1 Audit klinis dan update knowledge				puskesmas	25	25	100,00%
2 Kebijakan Tim TPCB				SK	1	1	100,00%
3 Kebijakan PKP				SK	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	95.632.725,00	90.371.650,00	94,50%				
1 Pembinaan Penerapan SMM ISO 9001:2015				Dinkes dan UPT POAK	1	1	100,00%
2 Penilaian Sertifikasi SMM ISO 9001:2015				Dinkes dan UPT POAK	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
3 Pemantapan Mutu Eksternal (PME)				siklus	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	30.280.000,00	29.789.750,00	98,38%				
1 Laporan Kunjungan RS				bulan	12	12	100,00%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	475.830.203,00	346.641.076,00	72,85%				
1 Persentase Tenaga Kesehatan yang memenuhi standart				%	85	85,46	100,54%
2 Persentase praktik tenaga kesehatan yang telah berizin				%	85	97	114,12%
Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	73.000.000,00	71.723.225,00	98,25%				
1 Cakupan tenaga kesehatan puskesmas dan RSUD yang memiliki SIP				%	95	98	103,16%
Sub Kegiatan Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	53.000.000,00	52.234.350,00	98,56%				
1 Jumlah Penerbitan Perizinan Praktek Perorangan				izin	1800	2585	143,61%
Sub Kegiatan Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan	20.000.000,00	19.488.875,00	97,44%				
1 Penerbitan Data Perizinan				dokumen	2	2	100,00%
Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	260.300.000,00	168.379.851,00	64,69%				
1 Persentase Tenaga Kesehatan sesuai standart kompetensi				%	85,00	87,03	102,39%
Sub Kegiatan Pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan sesuai standar	200.000.000,00	111.428.601,00	55,71%				
1 Pemenuhan standar kompetensi tenaga kesehatan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan	60.300.000,00	56.951.250,00	94,45%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Memenuhi standar kompetensi tenaga kesehatan				RS	2	2	100,00%
2 Monev SPMKK				puskesmas	25	25	100,00%
3 Pendataan SDM Kesehatan				fasyankes	50	84	168,00%
Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	142.530.203,00	106.538.000,00	74,75%				
1 Cakupan nakes fungsional yang mengumpulkan DUPAK tepat waktu				%	85,25	95,1	111,55%
Sub Kegiatan Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	142.530.203,00	106.538.000,00	74,75%				
1 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan				jafung	18	18	100,00%
2 Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan				jafung	5	5	100,00%
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	739.328.360,00	610.335.316,00	82,55%				
1 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman				%	60,00	79,49	132,48%
2 Pengelolaan sediaan makanan yang memenuhi syarat				%	90,00	84,79	94,21%
3 Persentase toko, sarana prasarana kesehatan yang berizin				%	83,00	95,00	114,46%
Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	191.910.060,00	174.183.800,00	90,76%				
1 Persentase sarana produksi dan distribusi obat, obat tradisional dan alat kesehatan memenuhi standar				%	95,00	79,49	83,67%
Sub Kegiatan Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	135.340.060,00	129.089.250,00	95,38%				
1 Pemantauan setempat sarana produksi dan distribusi obat, obat tradisional, dan alat kesehatan				bulan	10	7	70,00%
Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	31.570.000,00	20.135.000,00	63,78%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Bimbingan teknis kepada petugas pengelola fasilitas kefarmasian				orang	40	40	100,00%
2 Pelaksanaan pengawasan UMOT				sarana	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan komitmen izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	25.000.000,00	24.959.550,00	99,84%				
1 Jumlah penerbitan rekomendasi komitmen izin				dokumen	25	206	824,00%
2 Penerbitan Data Perizinan				dokumen	2	2	100,00%
Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	292.488.820,00	243.276.416,00	83,17%				
1 Presentase Produk pangan dari industri rumah tangga mempunyai nomor PIRT				%	90	84,79	94,21%
Sub Kegiatan Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor p-irt sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	292.488.820,00	243.276.416,00	83,17%				
1 Penyelenggaraan Bimtek Keamanan pangan				angkatan	10	10	100,00%
2 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga				sertifikat	200	192	96,00%
3 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				dokumen	1	1	100,00%
Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	73.440.700,00	61.282.000,00	83,44%				
1 Cakupan Sertifikat TPM memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi dibuktikan dengan sertifikat laik higiene sanitasi (HS)				%	25	22	88,00%
Sub Kegiatan Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (tpm) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum	73.440.700,00	61.282.000,00	83,44%				
1 Penerbitan Sertifikat Higiene Sanitasi bagi Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)				TPP	40	42	105,00%
Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	51.985.000,00	46.078.500,00	88,64%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Persentase Makanan jajanan memenuhi persyaratan keamanan pangan dibuktikan dengan stiker				%	76	65	85,53%
Sub Kegiatan Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	51.985.000,00	46.078.500,00	88,64%				
1 Stiker Keamanan Makanan Jajanan				stiker	400	109	27,25%
Kegiatan Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	129.503.780,00	85.514.600,00	66,03%				
1 Persentase hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga Produk pangan				%	76,00	85,00	111,84%
Sub Kegiatan Pemeriksaan post market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	129.503.780,00	85.514.600,00	66,03%				
1 Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				unit	20	58	290,00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.048.857.185,00	888.544.468,00	84,72%				
1 Presentase RT yang Tidak Merokok di dalam rumah				%	66,40	69,60	104,82%
2 Presentase Bayi ASI Eksklusif				%	84,60	90,60	107,09%
3 Presentase Edukasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) pada Rumah Tangga (RT)				%	85,40	86,73	101,56%
Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah/ Kabupaten	264.215.485,00	246.353.850,00	93,24%				
1 Kebijakan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat				Jumlah	1	2	200,00%
Sub Kegiatan Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat	264.215.485,00	246.353.850,00	93,24%				
1 Bimtek PHBS				puskesmas	25	25	100,00%
2 Koordinasi Satgas KTR				kali	2	2	100,00%
3 Penguatan Kelembagaan Kader Desa Siaga				kali	2	2	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
4 Kampanye Germas				kali	1	1	100,00%
5 Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				dokumen	3	3	100,00%
Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	625.376.700,00	607.969.033,00	97,22%				
1 Persentase Rumah tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)				%	45,50	59,80	131,43%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih sehat	625.376.700,00	607.969.033,00	97,22%				
1 Media Promosi Kesehatan				jenis	2	2	100,00%
2 Bimtek Media Promosi Kesehatan				puskesmas	25	25	100,00%
Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	159.265.000,00	152.663.275,00	95,85%				
1 Cakupan Posyandu Balita yang masuk dalam strata Mandiri				%	67	80,33	119,90%
Sub Kegiatan Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	159.265.000,00	152.663.275,00	95,85%				
1 Pembinaan Pesantren Sehat				ponpes	1	1	100,00%
2 Pembinaan SBH				kali	6	6	100,00%
3 Pembinaan TOGA dan Akupresur				kali	6	6	100,00%
4 Bimtek kader posyandu balita mandiri				lokus	30	30	100,00%





**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2022**

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	353.541.898.619,00	340.138.468.957,37	96,21%				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	336.682.989.570,00	323.223.411.880,57	96,00%				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.935.027.922,00	24.113.284.969,90	92,98%				
1 Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				%	100,00	100,00	100,00%
2 Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	160.312.568,00	154.084.448,30	96,12%				
1 dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				dokumen	82	82	100,00%
Sub Kegiatan Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.050.800,00	53.052.664,80	96,37%				
1 dokumen Perjanjian Kinerja				dokumen	3	3	100,00%
2 dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja				dokumen	3	3	100,00%
3 dokumen Perubahan renja				dokumen	1	1	100,00%
4 dokumen Renja				dokumen	1	1	100,00%
Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	4.298.750,00	3.919.500,00	91,18%				
1 dokumen RKA SKPD tahun 2023				dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.297.500,00	4.144.250,00	96,43%				
1 dokumen Perubahan RKA SKPD tahun 2022				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.199.918,00	4.027.425,00	95,89%				
1 dokumen DPA SKPD tahun 2023				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.271.000,00	3.209.750,00	98,13%				
1 dokumen Perubahan DPA SKPD tahun 2022				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89.194.600,00	85.730.858,50	96,12%				
1 dokumen Laporan Tahunan ;				dokumen	1	1	100,00%
2 dokumen LKJIP/LAKIP ;				dokumen	1	1	100,00%
3 dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja ;				dokumen	4	4	100,00%
4 dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja ;				dokumen	1	1	100,00%
5 dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja ;				dokumen	4	4	100,00%
6 dokumen RFK				dokumen	12	12	100,00%
7 dokumen LPPD bulanan				dokumen	12	9	75,00%
8 Buku Profil Data DPUPKP				dokumen	1	0	0,00%
9 Buku saku profil DPUPKP				dokumen	1	1	100,00%
10 dokumen SPM DPUPKP				dokumen	1	0	0,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.337.819.352,00	17.860.943.943,80	92,36%				
1 Pemenuhan Gaji, Tunjangan dan Honorarium PNS dan Non PNS serta Kebutuhan Administrasi Perkantoran				bulan	12	12	100,00%
2 Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu				%	100,00	100,00	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.660.344.502,00	16.962.804.679,00	96,05%				
1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS				bulan	12	12	100,00%
2 Pembayaran iuran BPJS				bulan	12	12	100,00%
3 Pembayaran TPP				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.585.474.850,00	807.699.200,00	50,94%				
1 Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan dan Barang				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	92.000.000,00	90.440.064,80	98,30%				
1 Laporan aset/BMD semesteran				dokumen	2	2	100,00%
2 Laporan keuangan semesteran				dokumen	2	2	100,00%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	723.148.371,00	700.622.123,00	96,88%				
1 Layanan Administrasi Kepegawaian dan Pembayaran Tenaga Non PNS/PHL				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	547.195.800,00	527.868.173,00	96,47%				
1 Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				dokumen	1	1	100,00%
2 Layanan administrasi kepegawaian				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
3 Pembayaran honorarium tenaga non PNS / PHL				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	175.952.571,00	172.753.950,00	98,18%				
1 peserta Bimtek/ workshop/seminar/lokakarya				Orang	40	40	100,00%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.963.134.861,00	2.831.792.464,00	95,57%				
1 Layanan Administrasi Umum				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.620.000,00	35.898.000,00	98,03%				
1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor				Jenis	20	20	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.986.308.726,00	1.910.985.750,00	96,21%				
1 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Unit	135	135	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	234.490.000,00	208.900.788,00	89,09%				
1 Alat Tulis Kantor				paket	1	1	100,00%
2 Makan Minum Rapat				bulan	12	9	75,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	246.687.500,00	236.291.000,00	95,79%				
1 Cetakan				Ls	1	1	100,00%
2 Penggandaan				Ls	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	35.125.000,00	27.003.538,00	76,88%				
1 Makan minum kunjungan tamu				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2 Makan Minum Rapat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000,00	340.126.138,00	97,18%				
1 Perjalanan Dinas Dalam Daerah				bulan	12	12	100,00%
2 Perjalanan Dinas Luar Daerah				bulan	12	12	100,00%
Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	26.398.000,00	26.287.750,00	99,58%				
1 Pengelolaan Arsip dan perpustakaan SKPD				bulan	12	12	100,00%
Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	47.505.635,00	46.299.500,00	97,46%				
1 Pengelolaan informasi dan dokumen Perangkat Daerah				bulan	12	12	100,00%
2 Pengelolaan website Perangkat Daerah				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	733.308.000,00	665.682.309,80	90,78%				
1 Pelayanan Keamanan, Kebersihan, Surat-Menyurat dan Jasa Langgan Terpenuhi				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.725.000,00	13.693.600,00	87,08%				
1 Pengelolaan Surat Menyurat (surat masuk dan surat keluar)				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	297.112.000,00	237.013.009,00	79,77%				
1 Pembayaran Jasa Langgan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	420.471.000,00	414.975.700,80	98,69%				
1 Pelayanan Keamananan dan kebersihan				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.017.304.770,00	1.900.159.681,00	94,19%				
1 Layanan Pemeliharaan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.325.389.770,00	1.219.388.681,00	92,00%				
1 Layanan Pembelian BBM Operasional				bulan	12	12	100,00%
2 Pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional kantor				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	42.375.000,00	41.935.000,00	98,96%				
1 Layanan Pemeliharaan Meubelair Kantor				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	106.630.000,00	104.980.000,00	98,45%				
1 Perbaikan Peralatan Kerja				Unit	100	100	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	542.910.000,00	533.856.000,00	98,33%				
1 Pemeliharaan Gedung Kantor				Unit	1	1	100,00%
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	64.851.780.685,00	60.149.019.987,20	92,75%				
1 Persentase irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik				%	71,20	76,99	108,13%
Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.387.259.235,00	6.973.189.758,00	94,39%				
1 Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Perlindungan Sungai, Embung, Mata Air dan bangunan Penampung Air Lainnya				lokasi	80	80	100,00%
Sub Kegiatan Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	1.600.000.000,00	1.552.872.750,00	97,05%				
1 Terlaksananya Penanganan Rehabilitasi Embung dan Penampung Lainnya ;				lokasi	6	6	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2 Tersedianya Data - Data Pendukung (Panjang, Lebar dan Debit)				lokasi	36	36	100,00%
Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	3.381.100.000,00	3.262.449.421,20	96,49%				
1 Terlaksananya Pemeliharaan Sungai, Embung dan Mata Air				kali	10	10	100,00%
2 Terlaksananya Penanganan Pengendalian Daya Rusak Sungai				kali	15	15	100,00%
3 Terlaksananya Penanganan Talud Pengaman				lokasi	5	5	100,00%
4 Terlaksananya penanganan Waled				lokasi	9	9	100,00%
Sub Kegiatan Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	875.000.000,00	834.180.325,00	95,33%				
1 Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air				Paket	1	1	100,00%
2 Pembangunan peningkatan kuantitas dan kualitas mata air				lokasi	4	4	100,00%
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	323.673.345,00	298.178.650,00	92,12%				
1 Gerakan Irigasi Bersih				kali	2	2	100,00%
2 Hari Air Dunia untuk Sasaran Konservasi				kali	1	1	100,00%
3 Pemberdayaan Kelompok GP3A				GP3A	3	3	100,00%
4 Sidang Komisi Irigasi				kali	3	3	100,00%
Sub Kegiatan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	165.000.000,00	128.595.077,00	77,94%				
1 Terlaksananya Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (REKOMTEK) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota				rekomendasi	225	225	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	61.291.700,00	58.717.727,00	95,80%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Pemberdayaan dan Pembinaan Kelembagaan mata air				lokasi	3	3	100,00%
Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	57.464.521.450,00	53.175.830.229,20	92,54%				
1 Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi				DI	65	65	100,00%
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	2.720.990.200,00	2.517.496.080,60	92,52%				
1 dokumen perencanaan Teknis Jaringan Irigasi				paket	4	4	100,00%
2 Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem irigasi (e-Paksi)				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	23.361.222.125,00	21.915.474.709,00	93,81%				
1 Peningkatan Jaringan Irigasi				DI	69	69	100,00%
2 Peningkatan jaringan irigasi DAK fisik Rp.2.881.793.000				DI	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	25.036.714.047,00	23.093.008.176,60	92,24%				
1 Rehabilitasi jaringan Irigasi				DI	58	58	100,00%
2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DAK fisik Rp.6.331.216.000				DI	2	2	100,00%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	46.412.114.663,00	45.083.405.056,20	97,14%				
1 Persentase jumlah rumah tangga yg mendapatkan akses terhadap air minum melalui jaringan perpipaan terhadap jumlah rumah tangga di seluruh kabupaten				%	20,95	21,41	102,20%
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	25.404.595.824,00	24.962.653.128,20	98,26%				
1 Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Kabupaten Sleman				paket	7	7	100,00%
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	562.310.000,00	547.047.524,00	97,29%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Baseline HAMP Kabupaten Sleman				paket	1	1	100,00%
2 Data air minum				paket	1	1	100,00%
3 Kajian Potensi Air Baku				paket	1	1	100,00%
4 Naskah Akademik RISPAM				paket	1	1	100,00%
5 Perencanaan SPAM				paket	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	6.163.193.670,00	6.135.338.480,00	99,55%				
1 Pembangunan distribusi SPAM				paket	2	2	100,00%
2 Perencanaan SPAM Perkotaan				paket	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	7.605.598.150,00	7.447.193.150,00	97,92%				
1 Pembangunan Jaringan Perpipaan				paket	4	4	100,00%
2 Perencanaan SPAM Perdesaan				paket	3	3	100,00%
Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	5.928.400.504,00	5.880.380.955,00	99,38%				
1 Pembangunan Jaringan Perpipaan (APBD)				paket	7	7	100,00%
2 Perencanaan SPAM Perdesaan				paket	6	6	100,00%
Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1.376.950.000,00	1.368.462.135,00	99,38%				
1 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan (DAK) Rp. 1.312.700.000				paket	2	2	100,00%
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	404.753.500,00	383.273.494,40	94,69%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Fasilitasi teknis pengelolaan air bersih tingkat desa				Ls	1	1	100,00%
2 Lomba teknis pengelolaan air bersih tingkat desa				kali	1	1	100,00%
3 Fasilitasi Air Baku Kawasan Kekeringan				Ls	1	1	100,00%
4 Pembinaan teknis pengelolaan air bersih tingkat desa				Ls	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	3.363.390.000,00	3.200.957.389,80	95,17%				
1 Hibah Air Minum Perdesaan (HAMP) PAMSIMAS				Desa	16	18	112,50%
2 HID				Desa	1	1	100,00%
3 Pameran / Gelar Potensi BKM, Uji Petik BKM, FGD				Kecamatan	15	15	100,00%
4 Pendampingan eks PNPM Perkotaan / KOTAKU. Program PISEW				Kecamatan	15	15	100,00%
5 SPAM Berbasis Masyarakat				Desa	1	1	100,00%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	46.412.114.663,00	45.083.405.056,20	97,14%				
1 Berkurangnya genangan pada kawasan permukiman				%	66,50	72,75	109,40%
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.404.595.824,00	24.962.653.128,20	98,26%				
1 Pemeliharaan Saluran Drainase				meter	30.000	23.838	79,46%
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	1.125.000.000,00	1.063.744.900,00	94,56%				
1 Drainase DED				paket	15	12	80,00%
Sub Kegiatan Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	326.250.000,00	282.665.975,00	86,64%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Identifikasi dan pembuatan rencana jaringan drainase pada rawan genangan				paket	1	0,5	50,00%
Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	17.823.458.839,00	17.246.178.715,00	96,76%				
1 Pembangunan Saluran Drainase				paket	8	0,4	5,00%
Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	1.732.810.000,00	1.528.162.338,00	88,19%				
1 Pemeliharaan Saluran Drainase				Meter	30.000	23.838	79,46%
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	29.950.944.552,00	29.548.901.815,00	98,66%				
1 Pembangunan infrastruktur di kawasan strategis cepat tumbuh				%	60	100	166,67%
Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	29.950.944.552,00	29.548.901.815,00	98,66%				
1 Pembangunan Infrastruktur Di kawasan Strategis Cepat tumbuh				lokasi	5	5	100,00%
Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	29.950.944.552,00	29.548.901.815,00	98,66%				
1 DED KSCT				paket	4	4	100,00%
2 Pemeliharaan Infrastruktur KSCT				kawasan	7	7	100,00%
3 Penyediaan Infrastruktur KSCT (APBD)				Paket	9	9	100,00%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	63.579.033.756,00	61.529.531.095,45	96,78%				
1 Persentase kondisi gedung pemerintah baik				%	88,00	88,98	101,11%
Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	63.579.033.756,00	61.529.531.095,45	96,78%				
1 Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintah yang Layak dan Pelayanan SLF Terpenuhi				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	2.696.021.300,00	2.674.892.163,00	99,22%				
1 Data bangunan gedung;				Unit	36.000	36.000	100,00%
2 Fasilitasi tenaga ahli bangunan gedung (TABG);				bulan	12	12	100,00%
3 Layanan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);				Permohonan	1.800	1800	100,00%
4 Layanan permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)				Permohonan	150	150	100,00%
Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	59.398.084.156,00	58.032.946.417,65	97,70%				
1 Pembangunan Gedung Kapanewon Moyudan				paket	1	1	100,00%
2 Pembangunan Gedung MPP				paket	1	1	100,00%
3 Pembangunan Gedung PKB 2 Line				paket	1	1	100,00%
4 Pemeliharaan Rumah Dinas Bupati				paket	1	1	100,00%
5 Penataan Halaman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				paket	1	1	100,00%
6 Penataan Halaman Setda Kabupaten Sleman				paket	1	1	100,00%
7 Rehab. GOR Klebengan				paket	1	1	100,00%
8 Rehab. GOR Pangukan dan Lapangan Tenis Tridadi				paket	1	1	100,00%
9 Rehab. Rumah Dinas Wakil Bupati				paket	1	1	100,00%
10 Rehab. Stadion Maguwoharjo				paket	1	1	100,00%
11 Penyempurnaan Gedung Setda Sleman				paket	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
12 Pengecatan Stadion Maguwoharjo				paket	1	1	100,00%
13 Rehab Atap Gor Pangukan				paket	1	1	100,00%
14 Rehab Plafon Menara Masjid Agung Sleman				paket	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	1.484.928.300,00	1.116.167.514,80	75,17%				
1 DED Bangunan Gedung Pemerintah				Paket	8	6	75,00%
2 Rekomendasi izin penutupan saluran drainase				Permohonan	48	48	100,00%
3 Rekomendasi perencanaan bangunan gedung				dokumen	10	10	100,00%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.101.688.000,00	1.085.965.196,00	98,57%				
1 Presentase jumlah desa yang diawasi atas perizinan bangunan gedung dan bangun bangunan atau prasarana bangunan				%	62,00	62,79	101,27%
Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1.101.688.000,00	1.085.965.196,00	98,57%				
1 Pengawasan bangunan terlaksana				desa	54	54	100,00%
Sub Kegiatan Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1.101.688.000,00	1.085.965.196,00	98,57%				
1 Pengawasan bangunan terlaksana				desa	54	54	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	87.633.147.881,00	85.523.321.017,62	97,59%				
1 persentase jalan mantab dan jembatan dalam kondisi baik				%	83,01	75,93	91,47%
Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			#DIV/0!				
1 Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan gorong - gorong				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	782.142.000,00	746.943.730,00	95,50%				
1 Perencanaan Bangunan Pelengkap Jalan/Talud;				Paket	1	1	100,00%
2 Perencanaan Teknis Peningkatan Gorong-gorong;				Paket	1	1	100,00%
3 Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan;				Paket	1	1	100,00%
4 Perencanaan Teknis Peningkatan Jembatan;				Paket	1	1	100,00%
5 Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan;				Paket	1	1	100,00%
6 Review Desain				Paket	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Pengelolaan Leger Jalan	420.109.700,00	420.004.700,00	99,98%				
1 Leger jalan				Paket	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	895.550.000,00	786.305.143,80	87,80%				
1 Pelayanan Perijinan Rumija				Ls	1	1	100,00%
2 Pemutakhiran data kondisi jalan				Paket	1	1	100,00%
3 Pemutakhiran data kondisi jembatan				Paket	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	16.517.678.200,00	16.217.649.314,00	98,18%				
1 Peningkatan Jalan Kebondalem - Tanjung;				KM	0,5	0,5	100,00%
2 Peningkatan Jalan Kronggahan - Jaban;				KM	0,8	0,8	100,00%
3 Peningkatan Jalan Pagerjurang - Glagahmalang				KM	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar	7.852.250.000,00	7.811.707.000,00	99,48%				
1 Peningkatan Jalan Kemas-an-Grogolan (DAK Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan)				KM	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	22.195.073.000,00	21.506.121.618,00	96,90%				
1 Peningkatan Jalan Glondong - Tegalorejo (DAK Reguler);				KM	2,2	2,2	100,00%
2 Peningkatan Jalan Karangalasan - Salakan (DAK Reguler);				KM	1	1	100,00%
3 Peningkatan Jalan Watuadeg - Plosorejo (DAK Tematik DPP dan SIKM)				KM	1,8	1,8	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	14.057.966.548,00	14.000.374.369,82	99,59%				
1 Pelengkap Jalan/Talud bangunharjo - Kawedan;				M	800	800	100,00%
2 Pelengkap Jalan/Talud Cemoro - Murangan;				M	900	900	100,00%
3 Pelengkap Jalan/Talud Kayunan - Brayut;				M	700	700	100,00%
4 Pelengkap Jalan/Talud Ledoksari - Nglengkong;				M	60	60	100,00%
5 Pelengkap Jalan/Talud Losari - Gayamharjo;				M	150	150	100,00%
6 Pelengkap Jalan/Talud Ngapak-Minggir;				M	15	15	100,00%
7 Pelengkap Jalan/Talud Ngemplak Ngaglik;				M	400	400	100,00%
8 Pelengkap Jalan/Talud Pasekan-Sembung;				M	400	400	100,00%
9 Pelengkap Jalan/Talud Pundong - Klaci;				M	900	900	100,00%
10 Pelengkap Jalan/Talud Sedogan - Sempu;				M	900	900	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
11 Pelengkap Jalan/Talud Setran - Pakelan;				M	400	400	100,00%
12 Pemeliharaan Berkala Jalan Beran - Balong;				KM	1,1	1,1	100,00%
13 Pemeliharaan Berkala Jalan Blendung - Gesikan;				KM	0,75	0,75	100,00%
14 Pemeliharaan Berkala Jalan Sawahan - Tangkilan				KM	0,9	0,9	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	8.079.142.500,00	6.915.218.914,00	85,59%				
1 Pemeliharaan rutin jalan				KM	300	300	100,00%
Sub Kegiatan Penggantian Jembatan	12.608.023.663,00	12.292.462.005,00	97,50%				
1 Peningkatan Jembatan Beji (5 x 8 M);				paket	1	1	100,00%
2 Peningkatan Jembatan Garongan;				paket	1	1	100,00%
3 Peningkatan Jembatan Pancoh 1 (6 x 8 M);				paket	1	1	100,00%
4 Peningkatan Jembatan Poitan (6 x 8 M);				paket	1	1	100,00%
5 Peningkatan Jembatan Prayan (Merah) (22 x 9 M);				paket	1	0,46	46,00%
6 Peningkatan Jembatan Sayidan (9 x 8 M);				paket	1	0,96	96,00%
7 Peningkatan Jembatan Sudimoro				paket	1	0	0,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.786.850.000,00	1.670.715.808,00	93,50%				#DIV/0!
1 Pemeliharaan rutin gorong gorong				buah	25	25	100,00%
2 Pemeliharaan rutin jembatan				buah	29	29	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	758.082.000,00	655.479.502,00	86,47%				
1 Terselenggaranya sistem informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	600.947.000,00	527.509.285,00	87,78%				
1 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil, Bimtek Jasa Konstruksi				Orang	330	330	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	600.947.000,00	527.509.285,00	87,78%				
1 Bimtek tertib penyelenggaraan jasa konstruksi				kali	1	1	100,00%
2 Pelayanan verifikasi proposal BKK Desa sesuai standar				Desa	86	86	100,00%
3 Penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi tenaga trampil konstruksi				Orang	330	330	100,00%
4 Survey harga bahan kostruksi untuk SIPJAKI				kali	4	4	100,00%
Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	157.135.000,00	127.970.217,00	81,44%				
1 Kesesuaian pemanfaatan tertib berusaha Jasa Konstruksi				%	60,00	60,00	100,00%
Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	157.135.000,00	127.970.217,00	81,44%				
1 Tersedianya data pemanfaatan Izin Berusaha				dokumen	1	1	100,00%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			#DIV/0!				
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	4.134.386.240,00	3.904.042.494,00	94,43%				
1 Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program kabupaten				%	100,00	100,00	100,00%
2 Persentase perbaikan rumah akibat bencana				%	100,00	100,00	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.149.800.000,00	1.114.056.200,00	96,89%				
1 Pembangunan Sarana Prasarana Dasar Hunian Tetap				Paket	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.149.800.000,00	1.114.056.200,00	96,89%				
1 Pengawasan Pekerjaan Penyempurnaan PSD Hunian Tetap;				Paket	1	1	100,00%
2 Penyempurnaan PSD Hunian Tetap;				Paket	1	1	100,00%
3 Penyusunan Identifikasi Lahan Potensial Sebagai lokasi Relokasi Perumahan				dokumen	1	1	100,00%
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	18.882.971.084,00	18.666.536.900,00	98,85%				
1 Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani terhadap total luas permukiman kumuh seluruh kabupaten				%	33,33	8,85	26,55%
Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	700.000.000,00	691.417.600,00	98,77%				
1 Penyempurnaan dan penataan lingkungan kawasan kumuh				lokasi	4	4	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	700.000.000,00	691.417.600,00	98,77%				
1 Terawasinya Penuntasan Implementasi Penataan Lingkungan Kawasan Kumuh Perkotaan;				Paket	1	1	100,00%
2 Tersusunnya dokumen DED Penuntasan Implementasi Penataan Lingkungan Kawasan Kumuh Perkotaan;				dokumen	1	1	100,00%
3 Tertatanya kawasan kumuh perkotaan beserta penuntasannya				lokasi	3	3	100,00%
Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.464.941.000,00	1.416.816.950,00	96,71%				
1 Penataan padukuhan rawan kumuh				lokasi	5	5	100,00%
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1.464.941.000,00	1.416.816.950,00	96,71%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Implementasi Penataan Padukuhan Rawan Kumuh Tahun 2021				lokasi	5	5	100,00%
2	Konsultan Manajemen Teknis Pendamping Implementasi Penataan Kawasan Padukuhan Rawan Kumuh				Paket	1	1	100,00%
3	Penyusunan dokumen Teknis Penataan Lingkungan (DPTL) Padukuhan Rawan Kumuh				lokasi	3	3	100,00%
4	Penyusunan Rencana Penataan Permukiman (RPP) Padukuhan Rawan Kumuh				lokasi	2	2	100,00%
Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		16.718.030.084,00	16.558.302.350,00	99,04%				
1	Pengawasan, pendampingan dan pendataan bantuan sosial RTLH				Kalurahan	7	7	100,00%
2	Sosialisasi dan Persiapan Bantuan Sosial RTLH				Kalurahan	7	7	100,00%
3	Pembangunan Baru Rumah Secara Swadaya (DAK) fisik				Unit	222	222	100,00%
Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		8.485.094.084,00	8.412.194.600,00	99,14%				
1	Sosialisasi dan Persiapan Bantuan Sosial RTLH;				Kapanewon	17	17	100,00%
2	Pengawasan dan Pendampingan Bantuan Sosial RTLH (DAK);				Kapanewon	17	17	100,00%
3	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (APBD)				Unit	196	196	100,00%
Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		8.232.936.000,00	8.232.936.000,00	100,00%				
1	Pembangunan Baru Rumah secara Swadayadi Kawasan Permukiman Kumuh				unit	95	95	100,00%
Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni		8.232.936.000,00	8.146.107.750,00	98,95%				
1	Sosialisasi dan Persiapan Bantuan Sosial RTLH;				Kelurahan	7	7	100,00%
2	Pengawasan dan Pendampingan Bantuan Sosial RTLH (DAK)				Kelurahan	7	7	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
3	Pengawasan dan Pendampingan Bantuan Sosial RTLH (DAK) fisik Rp.4.665.936.000				Unit	222	222	100,00%
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		7.348.260.636,00	6.975.876.424,00	94,93%				
1	Persentase penanganan RTLH diluar kawasan kumuh				%	15,59	21,45	137,59%
Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		7.348.260.636,00	6.975.876.424,00	94,93%				
1	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Untuk Mendukung Pelayanan TPU dan Rusunawa				Paket	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		7.348.260.636,00	6.975.876.424,00	94,93%				
1	Grobog / Pusara / Nisan;				lokasi	2	2	100,00%
2	Terawasinya Pembangunan PSD TPU Madurejo dan TPU Seyegan;				Paket	2	2	100,00%
3	Terawasinya Pengawasan Pembangunan Sarana Hunian Wisata;				Paket	1	1	100,00%
4	Terbangunnya PSD TPU Madurejo dan Seyegan;				Paket	2	2	100,00%
5	Terlaksananya Penyerahan PSU perumahan dan Pembentukan P3SRS;				Kecamatan	17	17	100,00%
6	Terpeliharanya mesin IPAL;				Paket	1	1	100,00%
7	Tersedia Data MBR;				Paket	1	1	100,00%
8	Tersusunnya DED SIM Perumahan;				dokumen	1	1	100,00%
9	Tersusunnya DED TPU;				Paket	2	2	100,00%
10	Tersusunnya Review DED PSD Rusunawa;				Paket	1	1	100,00%
11	Tertatanya Permukiman dalam kawasan Desa Wisata				Paket	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.954.461.200,00	2.954.461.201,00	100,00%				
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	2.954.461.200,00	2.954.461.201,00	100,00%				
1 Jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi; Jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan; Rasio kunjungan museum dibanding ke ODTW lain; Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan; Jumlah pemenuhan layanan sarana dan prasarana; Nilai				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya	2.954.461.200,00	2.954.461.201,00	100,00%				
1 Jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi; Jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan; Rasio kunjungan museum dibanding ke ODTW lain; Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan; Jumlah pemenuhan layanan sarana dan prasarana; Nilai				%	100,00	100,00	100,00%
Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	2.954.461.200,00	2.954.461.201,00	100,00%				
1 Pematangan lahan taman budaya				Paket	1	1	92,27





**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
2022**

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	96.955.256.088,00	91.604.400.593,20	94,48%				
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	85.982.678.426,00	81.275.068.205,00	94,52%				
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	42.342.480,00	38.721.050,00	91,45%				
1 Persentase terselesainya dokumen pelayanan pengesahan penguraian pertelaan dan akta pemisahan SKBG				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	42.342.480,00	38.721.050,00	91,45%				
1 Terselesainya dokumen pengesahan uraian pertelaan dan akta pemisahan SKBG				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	42.342.480,00	38.721.050,00	91,45%				
1 Pelayanan pengesahan uraian pertelaan dan akta pemisahan SKBG				bulan	12	12	100,00%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	241.285.393,00	241.262.000,00	99,99%				
1 Persentase terselesainya dokumen penataan bangunan dan lingkungan				%	20	50	250,00%
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	241.285.393,00	241.262.000,00	99,99%				
1. Terselesainya dokumen penataan bangunan dan lingkungan				dokumen	1	1	100,00%
Sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan	241.285.393,00	241.262.000,00	99,99%				
1. dokumen penyusunan Titik lokasi Reklame				dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.268.924.923,00	1.246.377.525,00	98,22%				
1. Persentase rekomendasi kesesuaian tata ruang yang diterbitkan				%	82	95,27	116,18%
2. Persentase ketersediaan dokumen rencana tata ruang yang telah ditetapkan				%	40	50	125,00%
Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	571.240.713,00	566.800.349,00	99,22%				
1. dokumen Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten Sleman				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	164.129.863,00	161.190.950,00	98,21%				
1 dokumen Sinkronisasi RTRW Kabupaten Sleman				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegoata Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	313.279.700,00	313.213.480,00	99,98%				
1 dokumen Rencana dan Raperbup RDTR Kawasan Sleman Tengah				dokumen	1	1	100,00%
2 dokumen KLHS RDTR Kawasan Sleman Tengah				dokumen	1	1	100,00%
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	93.831.150,00	92.395.919,00	98,47%				
1 Publikasi informasi pertanahan dan tata ruang melalui iklan layanan masyarakat				media	3	3	100,00%
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	366.189.510,00	355.071.475,00	96,96%				
1. Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	286.065.675,00	275.095.075,00	96,17%				
1 Rumusan Pertimbangan Forum Penataan Ruang				dokumen	1	1	100,00%
2 Laporan Kinerja Forum Penataan Ruang				dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang	80.123.835,00	79.976.400,00	99,82%				
1 Pengelolaan dan pemeliharaan SIM				aplikasi	1	1	100,00%
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	331.494.700,00	324.505.701,00	97,89%				
1 Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang				dokumen	1	1	100,00%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	112.334.900,00	108.194.900,00	96,31%				
1 Draft Raperbup Insentif dan disinsentif Pelanggaran Pemanfaatan Tata Ruang				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	140.965.575,00	138.366.576,00	98,16%				
1 Laporan Pengawasan				dokumen	1	1	100,00%
2 dokumen Pengawasan Satuan Ruang Strategis tanah kasultanan dan kadipaten				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	78.194.225,00	77.944.225,00	99,68%				
1 Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang				dokumen	1	1	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	84.430.125.630,00	79.748.707.630,00	94,46%				
1. Persentase fasilitasi ruang keistimewaan pada Satuan Ruang Strategis (SRS)				%	30,00	33,33	111,10%
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	84.430.125.630,00	79.748.707.630,00	94,46%				
1. Pengadaan Lahan Ruas Jalan Prambanan-Lemahbang (Segmen A Tahap 2 dan Segmen B Tahap 1)				paket	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	84.430.125.630,00	79.748.707.630,00	94,46%				
1 Pengadaan lahan Ruas Jalan Prambanan- Lemahbang Segmen B				m2	147.450	142.940	96,94%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2 Appraisal Tanah, Bangunan dan Tanaman Ruas jalan Prambananlemahbang Segmen B				dok	1	1	100,00%
3 Sertifikasi Bidang Tanah Segmen A				sertifikat	262	0	0,00%
4 Appraisal Tanah, Bangunan dan Tanaman 3 (Tiga) Bidang Tanah Ruas jalan Prambanan-Lemahbang Segmen A Yang Belum Dibebaskan				dok	1	1	100,00%
5 Pengadaan Tanah 8 (Tiga) Bidang Tanah Ruas jalan Prambanan-Lemahbang Segmen A Yang Belum Dibebaskan				m2	1.729	1280	74,03%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	10.972.577.662,00	10.329.332.388,00	94,14%				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.766.185.291,00	6.271.519.725,00	92,69%				
1 Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran;				%	100	100	100,00%
2 Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja							
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	20.347.427,00	20.338.625,00	99,96%				
1. dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah				dok	44	44	100,00%
Sub Kegiatan Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.032.125,00	5.032.075,00	100,00%				
1 dokumen Perubahan Renja				dok	1	1	100,00%
2 dokumen Rencana Kerja				dok	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	1.429.808,00	1.429.650,00	99,99%				
1 dokumen RKA Perangkat Daerah				dok	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.429.808,00	1.429.650,00	99,99%				
1 dokumen Perubahan RKA Perangkat Daerah				dok	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.729.778,00	1.729.750,00	100,00%				
1 DPA Perangkat Daerah				dok	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	990.000,00	981.900,00	99,18%				
1 DPPA Perangkat Daerah				dok	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.735.908,00	9.735.600,00	100,00%				
1 dokumen Laporan bulanan				dok	12	12	100,00%
2 dokumen Laporan Tahunan				dok	1	1	100,00%
3 dokumen LKJIP/LAKIP				dok	1	1	100,00%
4 dokumen Pengendalian dan Evaluasi terhadap Hasil Renja				dok	4	4	100,00%
5 dokumen Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Renja				dok	1	1	100,00%
6 dokumen Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja				dok	4	4	100,00%
7 dokumen RFK				dok	12	12	100,00%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.126.206.184,00	4.684.046.596,00	91,37%				
1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.822.102.684,00	4.392.935.596,00	91,10%				
1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai				bulan	14	14	100,00%
2 Pembayaran TPP				bulan	14	14	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
3 Pembayaran BPJS				bulan	14	14	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	292.120.000,00	279.127.500,00	95,55%				
1 Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan/Barang				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	11.983.500,00	11.983.500,00	100,00%				
1 dokumen laporan Aset/BMD Semesteran				dok	2	2	100,00%
2 dokumen laporan Keuangan Semesteran				dok	2	2	100,00%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	654.613.913,00	638.897.723,00	97,60%				
1 Pelayanan administrasi kepegawaian dan pembayaran tenaga Non PNS /PHL				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	654.613.913,00	638.897.723,00	97,60%				
1 Laporan pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi				dok	1	1	100,00%
2 Layanan Administrasi Kepegawaian				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	271.793.705,00	264.239.207,00	97,22%				
1 Pelayanan administrasi umum				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.161.560,00	8.159.000,00	99,97%				
1 Alat listrik				unit	50	50	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.362.577,00	60.999.100,00	91,92%				
1 Peralatan dan Perlengkapan Kantor				unit	9	9	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.098.311,00	81.851.776,00	99,70%				
1 Layanan penyediaan makanan dan minuman rapat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.555.192,00	15.542.950,00	99,92%				
1 Layanan cetak dan penggandaan dokumen				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	12.195.000,00	12.181.850,00	99,89%				
1 Layanan makan minum tamu				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsolidasi dan Konsultasi SKPD	32.270.000,00	32.235.413,00	99,89%				
1 Layanan perjalanan dinas dalam daerah				bulan	12	12	100,00%
2 Layanan perjalanan dinas luar daerah				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.353.750,00	3.342.750,00	99,67%				#DIV/0!
1 Pengelolaan arsip dan perpustakaan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	51.797.315,00	49.926.368,00	96,39%				
1 Pengelolaan informasi dan dokumentasi perangkat daerah				bulan	12	12	100,00%
2 Pengelolaan website perangkat daerah				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	406.021.062,00	397.550.077,00	97,91%				
1 Pelayanan jasa penunjang				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	1.426.050,00	1.413.000,00	99,08%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Layanan surat menyurat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air , dan Listrik	103.200.000,00	96.330.714,00	93,34%				
1 Pembayaran jasa langganan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.250.000,00	7.096.000,00	86,01%				
1 Pembayaran jasa setting peralatan				unit	9	9	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	293.145.012,00	292.710.363,00	99,85%				
1 Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor				bulan	12	12	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	287.203.000,00	266.447.497,00	92,77%				
1 Layanan pemeliharaan BMD				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	197.813.000,00	180.206.672,00	91,10%				
1 Layanan Penyediaan BBM Kendaraan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.190.000,00	50.358.000,00	94,68%				
1 Pemeliharaan/Perbaikan peralatan kerja				unit	56	56	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.200.000,00	35.882.825,00	99,12%				
1 Pemeliharaan gedung kantor				unit	4	4	100,00%
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	53.214.678,00	52.755.500,00	99,14%				
1. Persentase permasalahan sengketa tanah garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang tertangani melalui mediasi				%	88	100	113,64%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	53.214.678,00	52.755.500,00	99,14%				
1. Fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan				permasalahan	20	20	100,00%
Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	53.214.678,00	52.755.500,00	99,14%				
1 dokumen penyelesaian permasalahan pertanahan				dok	1	1	100,00%
2 Fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan				permasalahan	10	10	100,00%
3 Fasilitasi penyelesaian permasalahan tanah desa				permasalahan	10	10	100,00%
4 Pelayanan penyelesaian permasalahan tanah desa				kecamatan	2	2	100,00%
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	103.656.250,00	103.013.600,00	99,38%				
1. Persentase tertib penguasaan dan kepemilikan tanah				%	11,1	16,7	150,45%
Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	103.656.250,00	103.013.600,00	99,38%				
1 dokumen subyek dan obyek redistribusi tanah, ganti kerugian tanah, kelebihan maksimum dan absentee				dok	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	103.656.250,00	103.013.600,00	99,38%				
1 dokumen kajian penetapan subjek dan obyek redistribusi tanah, Ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan absentee				dok	1	1	100,00%
2 dokumen updating data tanah desa yang digunakan Pemda				desa	86	86	100,00%
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	153.446.650,00	153.096.400,00	99,77%				
1. Persentase terfasilitasinya pemanfaatan tanah desa				%	91	100	109,89%
Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah	153.446.650,00	153.096.400,00	99,77%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 dokumen Izin Pemanfaatan dan pelepasan tanah desa				dok	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	153.446.650,00	153.096.400,00	99,77%				
1 Laporan hasil monev tanah desa				dok	1	1	100,00%
2 Monev tanah desa yang sudah berizin				izin	30	31	103,33%
3 Rekomendasi izin pemanfaatan dan pelapasan tanah desa				dok	24	35	145,83%
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	1.082.278.697,00	1.067.362.861,00	98,62%				
1 Persentase penggunaan Tanah Kasultanan yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman				%	95	100	105,26%
2 Persentase ketersediaan data informasi geospasial tematik tentang pertanahan dan tata ruang sesuai peraturan perundang-undangan.				%	100	100	100,00%
Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	1.082.278.697,00	1.067.362.861,00	98,62%				#DIV/0!
1. Fasilitasi tertib Administrasi Pertanahan				%	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	937.519.547,00	922.664.521,00	98,42%				
1 Pemutakhiran database pertanahan terbaru				desa	86	86	100,00%
2 Pengembangan simpul jaringan				walidata	1	1	100,00%
3 Workshop simpul jaringan				orang	30	30	100,00%
4 Plotting data bidang TKD				desa	5	5	100,00%
5 Pengelolaan single base map				tema	1	1	100,00%
6 Data tanah bersertifikat				desa	2	2	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
7 Pemetaan batas wilayah kecamatan				kecamatan	1	2	200,00%
8 Pemetaan batas wilayah padukuhan				desa	2	5	250,00%
9 Updating peta dasar 1 : 5.000				kecamatan	1	1	100,00%
10 Penyusunan Data Potensi Desa Berbasis Peta Bidang				dokumen	1	0,75	75,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	144.759.150,00	144.698.340,00	99,96%				
1 Rekomendasi pemanfaatan tanah SG yang dipakai Pemkab				rekomn	6	6	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	2.813.796.096,00	2.681.584.302,00	95,30%				
1 Persentase terfasilitasinya penggunaan tanah kasultanan				%	91,00	100,00	109,89%
2 Persentase jumlah desa yang memiliki kepastian batas administrasi wilayah				%	22,10	47,67	215,70%
Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	2.339.256.348,00	2.213.647.852,00	94,63%				
1. Pendaftaran tanah desa di BPN				bidang	800	800	100,00%
Sub Kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	2.339.256.348,00	2.213.647.852,00	94,63%				
1 Pendaftaran tanah desa di BPN				bidang	400	324	81,00%
2 Pembuatan patok bidang tanah desa				patok	7000	7000	100,00%
3 Pemasangan patok bidang tanah desa				bidang	875	875	100,00%
4 Data identifikasi dan sket bidang				bidang	875	875	100,00%
5 Pemberkasan peta bidang tanah desa				bidang	875	875	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
6 Pendaftaran pencatatan perubahan sertifikat tanah desa				sertifikat	1250	1248	99,84%
7 Verifikasi Tanah Desa Yang Belum Bersertifikat				bidang	800	800	100,00%
8 Penegasan batas wilayah desa				desa	9	9	100,00%
9 Video Hasil Kegiatan Penatausahaan				video	6	6	100,00%
Kegiatan Pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	373.829.748,00	369.515.700,00	98,85%				
1. Pendaftaran tanah desa di BPN				bidang	800	800	100,00%
Sub Kegiatan Penyiapan Bahan pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	101.230.000,00	98.088.700,00	96,90%				
1 Rekomendasi bupati/kepala DPTR penggunaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa di kabupaten sleman				rekom	20	20	100,00%
2 dokumentasi Video Hasil Kegiatan				video	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	272.599.748,00	271.427.000,00	99,57%				
1 Fasilitasi rekomendasi bupati/kepala DPTR penanganan permasalahan tanah desa				desa	3	3	100,00%
2 Identifikasi Permasalahan Pertanahan Tanah Desa				desa	86	86	100,00%
3 dokumentasi Video Hasil Kegiatan				video	2	2	100,00%
Kegiatan Sarana dan Prasarana Keistimewaan	100.710.000,00	98.420.750,00	97,73%				#DIV/0!
1. Pendaftaran tanah desa di BPN				bidang	800	800	100,00%
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan kegiatan keistimewaan Urusan Pertanahan	100.710.000,00	98.420.750,00	97,73%				
1 Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan Kabupaten Sleman				Scanner	1	1	100,00%







**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2022**

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	62.649.890.842,00	60.916.699.454,72	97,23%				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	44.857.582.575,00	43.368.018.066,64	96,68%				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.347.540.820,00	13.613.666.659,15	94,89%				
1 Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				%	100,00	100,00	100,00%
2 Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	116.856.547,00	107.484.100,00	91,98%				
Sub Kegiatan Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.845.000,00	36.465.130,00	96,35%				
1 dokumen perjanjian kinerja				dokumen	1	1	100,00%
2 dokumen perubahan perjanjian kinerja				dokumen	1	1	100,00%
3 dokumen perubahan Renja				dokumen	1	1	100,00%
4 dokumen Renja				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	18.530.625,00	16.533.330,00	89,22%				
1 dokumen RKA-SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	14.930.625,00	12.923.100,00	86,55%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 dokumen Perubahan RKA-SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.267.500,00	6.729.180,00	81,39%				
1 dokumen DPA-SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	14.602.797,00	12.485.460,00	85,50%				
1 dokumen Perubahan DPA-SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.680.000,00	22.347.900,00	98,54%				
1 dokumen Laporan Tahunan				dokumen	1	1	100,00%
2 dokumen LKJIP/LAKIP				dokumen	1	1	100,00%
3 dokumen Pengendalian dan Evaluasi Terhadap hasil Renja				dokumen	4	4	100,00%
4 dokumen Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Renja				dokumen	1	1	100,00%
5 dokumen Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Renja				dokumen	4	4	100,00%
6 dokumen RFK				dokumen	12	12	100,00%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.719.994.663,00	10.474.964.206,00	97,71%				
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.365.459.788,00	10.133.509.346,00	97,76%				
1 Insentif Retribusi Air Limbah dan Sampah				bulan	12	12	100,00%
2 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai				bulan	12	12	100,00%
3 Pembayaran Iuran BPJS				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
4 Pembayaran TPP				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	317.495.000,00	305.225.000,00	96,14%				
1 Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan/Barang				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	37.039.875,00	36.229.860,00	97,81%				
1 Laporan keuangan bulanan/ semester				dokumen	14	14	100,00%
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.950.000,00	4.922.910,00	99,45%				
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.950.000,00	4.922.910,00	99,45%				
1 Laporan barang bulanan/semesteran				dokumen	14	14	100,00%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.271.000,00	146.483.100,00	97,48%				
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain	150.271.000,00	146.483.100,00	97,48%				
1 Laporan Pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi				dokumen	1	1	100,00%
2 Layanan Administrasi Kepegawaian				bulan	12	12	100,00%
3 Pembayaran Tenaga Non PNS/PHL				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	802.225.302,00	749.225.021,00	93,39%				
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	4.783.500,00	95,67%				
1 Alat listrik				paket	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	143.048.060,00	105.855.935,00	74,00%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Alat tulis kantor				paket	1	1	100,00%
2 Layanan penyediaan makanan minuman rapat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.000.000,00	23.574.020,00	98,23%				
1 Layanan cetak dan penggandaan dokumen				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	16.613.742,00	16.579.250,00	99,79%				
1 Layanan penyediaan makanan dan minuman tamu				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	551.990.000,00	541.109.916,00	98,03%				
1 Layanan perjalanan dinas dalam daerah				bulan	12	12	100,00%
2 Layanan perjalanan dinas luar daerah				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	19.436.000,00	16.565.000,00	85,23%				
1 Pengelolaan arsip				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	42.137.500,00	40.757.400,00	96,72%				
1 Pengelolaan informasi dan dokumen PD				bulan	12	12	100,00%
2 Pengelolaan website PD				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	360.829.508,00	337.189.271,00	93,45%				
Sub kegiatan Pengadaan Mebel	25.706.250,00	20.100.000,00	78,19%				
1 Meubelair				buah	20	20	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	335.123.258,00	317.089.271,00	94,62%				
1 Peralatan dan Mesin Lainnya				unit	81	81	100,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.242.237.400,00	1.026.357.501,00	82,62%				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000,00	192.500,00	10,69%				
1 Layanan surat menyurat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	657.060.000,00	507.012.901,00	77,16%				
1 Pembayaran jasa langganan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	583.377.400,00	519.152.100,00	88,99%				
1 Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	950.176.400,00	767.040.550,15	80,73%				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	699.803.400,00	542.779.610,00	77,56%				
1 BBM Kendaraan				bulan	12	12	100,00%
2 Layanan kendaraan Dinas				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	6.250.000,00	5.900.000,00	94,40%				
1 Pemeliharaan Mebelair				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.735.000,00	47.039.350,00	68,44%				
1 Pemeliharaan/ perbaikan peralatan kerja				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	175.388.000,00	171.321.590,15	97,68%				
1 Pemeliharaan gedung kantor				unit	2	2	100,00%
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	284.811.952,00	283.007.206,00	99,37%				
1 Persentase dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Disusun				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	284.811.952,00	283.007.206,00	99,37%				
Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota	284.811.952,00	283.007.206,00	99,37%				
1 dokumen Naskah Akademis-Raperda Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Tahun 2022				dokumen	1	1	100,00%
2 dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				dokumen	1	1	100,00%
3 dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah				dokumen	1	1	100,00%
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.343.798.490,00	1.325.166.510,00	98,61%				
1. Ketersediaan data kualitas lingkungan dan konservasi lingkungan				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.343.798.490,00	1.325.166.510,00	98,61%				
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	353.175.000,00	348.190.150,00	98,59%				
1 Pengujian/ pemeriksaan kualitas air badan air				titik	60	60	100,00%
2 Pengujian/ pemeriksaan kualitas air bersih				titik	50	50	100,00%
3 Pengujian/ pemeriksaan kualitas air embung				titik	25	25	100,00%
4 Pengujian/ pemeriksaan kualitas air hujan				kali	6	6	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
5 Pengujian/ pemeriksaan kualitas mata air				titik	20	20	100,00%
6 Pengujian/ pemeriksaan kualitas udara ambien passive sampler				periode	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	990.623.490,00	976.976.360,00	98,62%				
1 Bibit tanaman sekitar sumber air				batang	3000	3000	100,00%
2 Inventarisasi gas rumah kaca				dokumen	1	1	100,00%
3 Inventarisasi lahan kritis dan penghijauan				dokumen	1	1	100,00%
4 Kajian Area Perburuan				dokumen	1	1	100,00%
5 Kajian Populasi Satwa Lokal Daratan				dokumen	1	1	100,00%
6 Kajian populasi satwa air				dokumen	1	1	100,00%
7 Kompartemen				buah	30	30	100,00%
8 Komposter				buah	100	100	100,00%
9 Pembinaan kampung iklim				kali	10	10	100,00%
10 Pembinaan lahan kritis dan GRK				kali	3	3	100,00%
11 Pengadaan tanaman				batang	2500	2500	100,00%
12 Pengadaan tanaman konservasi				batang	5700	5700	100,00%
13 Penghijauan lingkungan				batang	2000	2000	100,00%
14 Sosialisasi				kali	16	16	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
15 Tutup lubang biopori				buah	1800	1800	100,00%
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	11.008.239.475,00	10.709.104.032,00	97,28%				
1. Luas RTH yang tersedia				%	7,034	6,700	95,25%
Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	11.008.239.475,00	10.709.104.032,00	97,28%				
Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	11.008.239.475,00	10.709.104.032,00	97,28%				
1 Pembangunan Taman/ RTH				taman	3	3	100,00%
2 Penanaman pohon perindang jalan di Tamanmartani				bibit	25	25	100,00%
3 Pengendalian Penebangan Pohon Perindang Jalan				pemohon/ aduan	40	80	200,00%
4 Penyusunan Perbup tentang Kompensasi Dampak Pengelolaan RTH				dokumen	1	1	100,00%
5 Penyusunan Perbup tentang penebangan pohon dan/ atau pemindahan taman				dokumen	1	1	100,00%
6 Terpeliharanya taman dan lahan terbuka hijau				lokasi	70	70	100,00%
7 Terpeliharanya Tanaman Perindang Jalan				ruas jalan	20	20	100,00%
8 Jasa Konsultansi Perencanaan Taman/RTH				dokumen	9	9	100,00%
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	7.500.000,00	7.492.350,00	99,90%				
1. Prosentase layanan izin dan/atau layanan pemeriksaan rincian teknis Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 dan persetujuan teknis dan/atau Sertifikat Layak Operasional (SLO) pengumpulan limbah B3 Skala Kabupaten				%	53,50	71,00	132,71%
Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	7.500.000,00	7.492.350,00	99,90%				
Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	7.500.000,00	7.492.350,00	99,90%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 dokumen proses izin penyimpanan limbah B3 dan izin pengumpulan limbah B3				dokumen	20	29	145,00%
Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	402.281.000,00	399.663.850,00	99,35%				
1. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten				%	20,10	20,88	103,88%
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	402.281.000,00	399.663.850,00	99,35%				
Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau izin PPLH	322.591.000,00	320.447.800,00	99,34%				
1 Berkas pemeriksaan UKL-UPL atau setara UKL-UPL dan atau persetujuan pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (PKPLH)				dokumen	40	48	120,00%
2 Berkas penilaian dokumen AMDAL atau setara AMDAL dan/atau Surat Keputusan Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan				dokumen	3	5	166,67%
3 Berkas permohonan dan/atau berkas persetujuan SPPL				dokumen	40	41	102,50%
4 dokumen proses penapisan jenis dokumen lingkungan yang harus disusun dan kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan				dokumen	50	77	154,00%
5 dokumen proses persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah				dokumen	15	21	140,00%
6 dokumen proses surat kelayakan operasional (SLO) persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah				dokumen	0	0	0,00%
Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	79.690.000,00	79.216.050,00	99,41%				
1 Bimtek				kali	4	4	100,00%
2 Data hasil pemantauan dan pembinaan bidang LH				usaha/ kegiatan	90	91	101,11%
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	871.142.090,00	857.595.220,00	98,44%				
1. Persentase pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat yang dilaksanakan				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	871.142.090,00	857.595.220,00	98,44%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	232.399.290,00	231.573.670,00	99,64%				
1 Pembinaan Saka Kalpataru				kali	3	3	100,00%
2 Pembinaan sekolah				prestator	9	9	100,00%
Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	638.742.800,00	626.021.550,00	98,01%				
1 Buku Inventarisasi Sumber Pencemar				dokumen	3	3	100,00%
2 Buku monitoring dan evaluasi kegiatan sanitasi				buku	1	1	100,00%
3 Gerakan kebersihan sungai				lokasi	45	45	100,00%
4 Pengujian kualitas air limbah IPAL komunal				lokasi	57	57	100,00%
5 Pertemuan Jejaring pengelola IPAL komunal				kali	1	1	100,00%
6 Pertemuan masyarakat peduli sungai				kali	4	4	100,00%
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	325.838.500,00	324.804.030,00	99,68%				
1. Perolehan penghargaan bidang lingkungan hidup				%	75,00	75,00	100,00%
Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	325.838.500,00	324.804.030,00	99,68%				
Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH	325.838.500,00	324.804.030,00	99,68%				
1 Evaluasi Adiwiyata				prestator	15	15	100,00%
2 Evaluasi Proklamasi				prestator	3	3	100,00%
3 Peringatan hari lingkungan hidup				kali	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	38.530.000,00	37.764.050,00	98,01%				
1 Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	38.530.000,00	37.764.050,00	98,01%				
Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat teradap PPLH Kabupaten/ Kota	38.530.000,00	37.764.050,00	98,01%				
1 Penanganan dan/ atau penyelesaian aduan dugaan pencemaran/ perusakan lingkungan hidup				usaha/ keg	38	42	110,53%
Program Pengelolaan Persampahan	16.227.900.248,00	15.809.754.159,49	97,42%				
1 Persentase pengurangan sampah				%	22,54	22,57	100,13%
2 Persentase penanganan sampah				%	33,86	34,11	100,74%
Kegiatan Pengelolaan Sampah	16.048.653.848,00	15.639.273.699,49	97,45%				
Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	754.471.263,00	714.993.820,00	94,77%				
1 Fasilitasi kelompok sampah mandiri				kali	13	13	100,00%
2 Pelatihan pengelolaan sampah mandiri				paket	94	94	100,00%
3 Pelatihan pengelolaan sampah mandiri di Tamanmartani Kalasan				kali	1	1	100,00%
4 Sosialisasi persampahan				kali	32	32	100,00%
5 Sosialisasi persampahan di Tamanmartani, Kalasan				kali	2	2	100,00%
6 Studi banding persampahan reguler di tamanmartani, kalasan				kali	1	1	100,00%
7 Studi banding Kelompok Pengelola Sampah Mandiri				paket	31	31	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	2.733.563.700,00	2.649.977.875,00	96,94%				
1 Alat pengolahan plastik				unit	1	1	100,00%
2 Drum plastik				buah	120	120	100,00%
3 Gerobak pilah				unit	0	0	0,00%
4 Gerobak sampah				unit	17	17	100,00%
5 Gerobak sampah untuk Tamanmartani Kalasan				unit	3	3	100,00%
6 komposter				buah	251	251	100,00%
7 Kontainer				unit	0	0	0,00%
8 Mesin Press				unit	0	0	0,00%
9 Motor roda 3				unit	22	22	100,00%
10 Pembangunan Insinerator				unit	1	1	100,00%
11 Timbangan sampah				unit	17	17	100,00%
12 Truck Amroll				unit	0	0	0,00%
13 Penataan Transfer Depo Tambakboyo				unit	0	0	0,00%
14 Penyusunan DED TPST Tamanmartani				dokumen	1	1	100,00%
15 Penyusunan Kajian Operasional dan Pemeliharaan TPST				dokumen	1	1	100,00%
16 Mesin Pengayak				unit	2	2	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
17 Mesin Pencacah				unit	2	2	100,00%
18 Penyusunan DED TPST Condongcatur				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	12.560.618.885,00	12.274.302.004,49	97,72%				
1 Pelayanan,sampah perumahan dan niaga 500m3/hari				bulan	12	12	100,00%
2 Pembayaran retribusi sampah ke TPA Piyungan				bulan	12	12	100,00%
3 Pemeliharaan transfer depo				lokasi	4	4	100,00%
4 Penyapuan jalan protokol 28 lokasi				bulan	12	12	100,00%
5 Truck Armroll				unit	3	3	100,00%
6 Gerobak Sampah Pilah				unit	5	5	100,00%
7 Kontainer				unit	6	6	100,00%
8 Mesin Press				unit	1	1	100,00%
9 Motor roda 3				unit	5	5	100,00%
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	179.246.400,00	170.480.460,00	95,11%				
Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Penanganan Sampah	179.246.400,00	170.480.460,00	95,11%				
1 Patroli sampah				kali	90	85	94,44%
2 Pendataan pengelolaan sampah swasta				lokasi	10	10	100,00%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	17.792.308.267,00	17.555.895.388,18	98,67%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	17.792.308.267,00	17.555.895.388,18	98,67%				
1. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik				%	98,73	99,21	100,49%
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	17.792.308.267,00	17.555.895.388,18	98,67%				
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.659.360.000,00	1.565.078.795,00	94,32%				
1 Masterplan pengelolaan air limbah Kabupaten Sleman				paket	1	1	100,00%
2 Perencanaan Pembangunan SPALD-S Skala Individu				paket	11	11	100,00%
3 Perencanaan penyempurnaan IPLT				paket	1	1	100,00%
4 Perencanaan penyempurnaan SPALD-T Kawasan Berbah				paket	1	1	100,00%
5 Perencanaan rehabilitasi lokasi jaringan SPALD-T Kawasan Berbah				paket	1	1	100,00%
6 Perencanaan rehabilitasi lokasi jaringan terpusat				paket	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	20.900.000,00	20.035.500,00	95,86%				
1. Supervisi Rehabilitasi lokasi Jaringan Terpusat				paket	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	190.222.500,00	189.133.478	99,43%				
1 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota				paket	1	1	100,00%
2 Rehabilitasi jalur pipa servis jaringan terpusat di Padukuhan Kocoran Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok				paket	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	461.841.250,00	460.023.778,00	99,61%				
1 Penyempurnaan SPALD-T Kawasan Berbah				paket	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2 Rehabilitasi lokasi jaringan SPALD-T Kawasan Berbah				paket	1	1	100,00%
3 Peredam suara ruang Blower di SPALD-T Kawasan Depok				paket	1	1	100,00%
4 Rehabilitasi Jaringan Servis SPALD-T skala permukiman di Padukuhan Jetis Tirtoadi Mlati				paket	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	10.621.803.375,00	10.572.405.199,00	99,53%				#DIV/0!
1 Pembangunan SPALD-S Skala Individu				unit	560	560	100,00%
2 Pembangunan SPALD-S Skala Individu (DAK Fisik Tahun 2022)				unit	420	420	100,00%
3 Pembangunan SPALD-S Skala Individu di Kalurahan Tamanmartani Kapanewon Kalasan				unit	20	20	100,00%
Sub Kegiatan Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	25.500.000,00	25.250.000,00	99,02%				
1 Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik				kali	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	228.935.000,00	216.855.900,00	94,72%				
1 Sosialisasi Pembangunan SPALD-S Skala Individu				kali	24	24	100,00%
2 Sosialisasi Pembangunan SPALD-S Skala Individu (DAK)				kali	5	5	100,00%
3 Sosialisasi Rehabilitasi lokasi Jaringan Ipal Terpusat				kali	1	1	100,00%
4 Sosialisasi Rehabilitasi lokasi Jaringan SPALD-T Kawasan Berbah				kali	2	2	100,00%
5 Sosialisasi Pemeliharaan Jaringan Terpusat / SPALD-T Skala Permukiman / SPALD-T Kawasan / IPLT				kali	18	18	100,00%
6 Sosialisasi Pembangunan SPALD-S Skala Individu di kalurahan Tamanmartani, Kapanewon Kalasan				kali	1	1	100,00%
7 Sosialisasi Pembangunan SPALD - T Skala Permukiman (DAK)				kali	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
8 Sosialisasi Rehabilitasi Jalur Pipa Servis Jaringan Terpusat di Padukuhan Kocoran Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok				kali	2	2	100,00%
9 Sosialisasi Pra Perencanaan Pembangunan Jaringan Pipa Servis dan SR SPALD-T Kawasan Depok				kali	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	44.975.000,00	41.909.500,00	93,18%				
1 FGD Penarikan Retribusi Pengolahan Limbah Cair				kali	2	2	100,00%
2 FGD Pengelolaan SPALD-T Skala Permukiman				kali	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	3.570.187.392,00	3.508.220.350,00	98,26%				
1 Fasilitasi KPP SPALD-T Skala Permukiman				lokasi	30	30	100,00%
2 Pemeliharaan rutin jaringan air limbah Jaringan Terpusat dan Ipal Kawasan				bulan	12	12	100,00%
3 Penarikan retribusi pengelolaan air limbah				bulan	12	12	100,00%
4 Pendampingan KPP SPALD-T Skala Permukiman				lokasi	63	63	100,00%
5 Pengelolaan IPLT				bulan	12	12	100,00%
6 Pengelolaan SPALD-T Kawasan Berbah				bulan	12	12	100,00%
7 Pengelolaan SPALD-T Kawasan Depok				bulan	12	12	100,00%
8 Tenaga fasilitator lapangan				orang	14	14	100,00%
Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	41.200.000,00	40.509.450,00	98,32%				
1 Supervisi Penyempurnaan SPALD-T Kawasan Berbah				paket	1	1	100,00%
2 Supervisi Rehabilitasi lokasi Jaringan SPALD-T Kawasan Berbah				paket	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	605.088.750,00	605.076.300,00	100,00%				
1 Pembangunan SPALD-T Skala Permukiman				unit	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	200.000.000,00	189.750.000,00	94,88%				
1 Pengadaan Kendaraan Sedot Lumpur Tinja Roda Tiga				unit	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	101.995.000,00	101.610.861,00	99,62%				
1 Penyempurnaan IPLT				paket	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	20.300.000,00	20.036.277,00	98,70%				
1 Supervisi Penyempurnaan IPLT				paket	1	1	100,00%



**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS TENAGA KERJA
2022**

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA	32.474.613.091,00	30.946.536.131,00	95,29%				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	31.789.308.191,00	30.377.251.852,00	95,56%				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.848.843.990,00	10.744.748.606,00	90,68%				
1. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				%	100,00	100,00	100,00%
2. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
Sub Kegiatan Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.060.350,00	24.760.328,00	98,80%				
1. dokumen Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
2. dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
3. dokumen Renja				dokumen	1	1	100,00%
4. dokumen Perubahan Renja				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	2.613.600,00	2.613.600,00	100,00%				
1. dokumen RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.025.075,00	1.950.075,00	96,30%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1. dokumen perubahan RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.562.975,00	2.472.975,00	96,49%				
1. dokumen DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.975.275,00	1.840.275,00	93,17%				
1. dokumen Perubahan DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.434.875,00	10.924.875,00	95,54%				
1. dokumen LAKIP/LKJIP				dokumen	1	1	100,00%
2. dokumen Laporan Tahunan				dokumen	1	1	100,00%
3. dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah (E.75)				dokumen	4	4	100,00%
4. dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja Perangkat Daerah				dokumen	1	1	100,00%
5. dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (E.81)				dokumen	4	4	100,00%
6. dokumen RFK				dokumen	1	1	100,00%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.050.426.529,00	8.212.818.809,00	90,75%				
1. Pembayaran gaji dan tunjangan ASN				bulan	12	12	100,00%
2. Pembayaran iuran BPJS				bulan	12	12	100,00%
3. Pembayaran TPP				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	262.965.000,00	232.035.000,00	88,24%				
1. Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19.947.450,00	16.045.775,00	80,44%				
1. dokumen laporan aset/BMD semesteran				dokumen	2	2	100,00%
2. dokumen laporan keuangan semesteran				dokumen	2	2	100,00%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	229.428.301,00	190.262.438,00	82,93%				
1. Laporan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi				dokumen	1	1	100,00%
2. Layanan administrasi kepegawaian				bulan	12	12	100,00%
3. Pembayaran tenaga non PNS/PHL				bulan	12	12	100,00%
4. Pengelolaan informasi dan dokumentasi				bulan	12	9	75,00%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah							
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.007.600,00	19.973.750,00	90,76%				
1. Alat listrik				paket	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.350.000,00	93.942.300,00	82,15%				
1. Penyediaan alat tulis kantor dinas				paket	1	1	100,00%
2. Penyediaan makan minum rapat				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.199.000,00	43.042.520,00	95,23%				
1. Layanan cetak dan penggandaan dokumen				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	32.375.000,00	32.303.250,00	99,78%				
1. Penyediaan makanan dan minuman tamu				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157.467.000,00	103.883.950,00	65,97%				
1. Layanan perjalanan dinas luar daerah				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	143.471.960,00	140.544.133,00	97,96%				
1. Pengadaan kursi direktur				unit	13	13	100,00%
2. Pengadaan kursi staf				unit	27	27	100,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	44.080.000,00	39.531.000,00	89,68%				
1. Layanan surat menyurat				bulan	12	12	100,00%
2. Pengelolaan arsip dan perpustakaan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	221.400.000,00	202.598.483,00	91,51%				
1. Pembayaran langganan telepon, listrik dan air				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	663.905.000,00	629.185.726,00	94,77%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1. Pelayanan jasa kewan dan kebersihan kantor				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	230.439.000,00	198.419.029,00	86,10%				
1. Layanan pemeliharaan kendaraan dinas				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	11.500.000,00	5.405.000,00	47,00%				
1. Layanan pemeliharaan mebelair				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	88.235.000,00	83.714.400,00	94,88%				
1. Layanan pemeliharaan/ perbaikan peralatan kerja				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	465.975.000,00	456.480.915,00	97,96%				
1. Pemeliharaan gedung				unit	2	2	100,00%
2. Pemeliharaan taman				unit	2	2	100,00%
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	5.094.779.472,00	4.910.928.944,00	96,39%				
1. Persentase peserta yang mendapatkan pekerjaan pasca pelatihan				%	26,00	61,39	236,12%
Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi							
Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	796.000.105,00	793.729.954,00	99,71%				
1. Internet Marketing Kap. Moyudan				orang	16	16	100,00%
2. Internet Marketing Kap. Sleman				orang	16	16	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
3. Internet Marketing Kap. Ngemplak				orang	16	16	100,00%
4. Membatik Jogotirto				orang	16	16	100,00%
5. Membatik Kepuharjo				orang	16	16	100,00%
6. Membatik Sardonoharjo				orang	16	16	100,00%
7. Membatik Tlogoadi				orang	16	16	100,00%
8. Menjahit Gayamharjo				orang	16	16	100,00%
9. Menjahit Sendangsari				orang	16	16	100,00%
10. Menjahit Tegaltirto				orang	16	16	100,00%
11. Pelatihan Reguler				orang	16	16	100,00%
12. Tata Boga Argomulyo				orang	16	16	100,00%
13. Tata Boga Banyuraden				orang	16	16	100,00%
14. Tata Boga Margokaton				orang	16	16	100,00%
15. Tata Boga Senden Sumberadi				orang	16	16	100,00%
16. Tata Boga Sidorejo Godean				orang	16	16	100,00%
17. Tata Rias Sindumartani				orang	16	16	100,00%
18. Tata Rias Tamanmartani				orang	16	16	100,00%
19. Operator Komputer Sinduadi, Kap. Mlati				orang	16	16	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	4.243.392.097,00	4.061.811.720,00	95,72%				
1. Bordir Disabilitas (Kap. Pakem)				orang	10	10	100,00%
2. Bordir Non Inst Banyuraden				orang	10	10	100,00%
3. Bordir Non Inst Kap. Kalasan				paket	1	1	100,00%
4. Desain Grafis Non Inst Bangunkerto				paket	1	1	100,00%
5. Desain Grafis Non Inst Wedomartani				paket	1	1	100,00%
6. Instalasi Penerangan Institusional				paket	3	3	100,00%
7. Internet Marketing Non Inst Balecatur				paket	1	1	100,00%
8. Internet Marketing Non Inst Caturtunggal				paket	1	1	100,00%
9. Internet Marketing Non Inst Bokoharjo dan Sumberharjo (Kap)				paket	1	1	100,00%
10. Jahit Disabilitas (Kap Godean)				paket	1	1	100,00%
11. Jahit Disabilitas Tegaltirto				paket	1	1	100,00%
12. Jahit Non Inst Banyurejo				paket	1	1	100,00%
13. Jahit Non Inst Condongcatur				paket	1	1	100,00%
14. Jahit Non Inst Margoluwih				paket	1	1	100,00%
15. Jahit Non Inst Margomulyo				paket	1	1	100,00%
16. Jahit Non Inst Margorejo				paket	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
17. Jahit Non Inst Tamanmartani				paket	1	1	100,00%
18. Jahit Non Inst Triharjo				paket	1	1	100,00%
19. Las Listrik Non Inst Malang Caturharjo				paket	1	1	100,00%
20. Las Listrik Non Inst Tegalsari Trimulyo				paket	1	1	100,00%
21. Las Listrik Non Inst Sendangsari, Minggir				paket	1	1	100,00%
22. Las Listrik Non Inst Trihanggo, Gamping				paket	1	1	100,00%
23. Las Listrik Non Inst Kap. Ngaglik				paket	1	1	100,00%
24. Meubelair Institusional				paket	1	1	100,00%
25. Monitoring dan Evaluasi dan Informasi Pelatihan				orang	336	336	100,00%
26. Operator Komputer Institusional				paket	1	1	100,00%
27. Operator Komputer non Institusional Gayamharjo				paket	1	1	100,00%
28. Operator Komputer non Institusional Sinduadi				paket	1	1	100,00%
29. Sepeda Motor non Institusional Gayamharjo				paket	1	1	100,00%
30. Sepeda Motor non Institusional Banyurejo				paket	1	1	100,00%
31. Stir Mobil non Institusional Jogotirto				paket	1	1	100,00%
32. Stir Mobil non Institusional Margodadi				paket	1	1	100,00%
33. Tata Boga Non Inst Sendangadi				paket	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
34. Tata Boga Non Inst Sumberadi				paket	1	1	100,00%
35. Tata Boga Non Inst Girikerto				paket	1	1	100,00%
36. Tata Boga Non Inst Harjobinangun				paket	1	1	100,00%
37. Tata Boga Non Inst Pondokrejo				paket	1	1	100,00%
38. Tata Boga Non Inst Sendangtirta				paket	1	1	100,00%
39. Tata Boga Non Inst Tambakrejo				paket	1	1	100,00%
40. Tata Boga Non Inst Kap. Mlati (Sinduadi, Sendangadi, Sumberadi)				paket	1	1	100,00%
41. Tata Boga Non Inst Kap. Prambanan (Gayamharjo, Wukirharjo)				paket	1	1	100,00%
42. Tata Rias Non Inst Tamanmartani				paket	1	1	100,00%
43. Tata Rias Non Inst Donoharjo				paket	1	1	100,00%
44. Tata Rias Non Inst Sendangrejo				paket	1	1	100,00%
45. Tata Rias Non Inst Tirtoadi				paket	1	1	100,00%
46. Tata Rias Non Inst Umbulmartani				paket	1	1	100,00%
47. Teknisi HP Non Inst Argomulyo				paket	1	1	100,00%
48. Teknisi HP Non Inst Margokaton				paket	1	1	100,00%
49. Teknisi Komputer non Inst Donokerto				paket	1	1	100,00%
50. Teknisi Komputer non Inst Tlogoadi				paket	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
51. Uji Kompetensi dan Sertifikasi				paket	3	5	166,67%
Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta							
Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	39.842.770,00	39.328.800,00	98,71%				
1. Fasilitasi Forkom HILLSI				kali	1	1	100,00%
2. Monitoring LPK				LPK	15	15	100,00%
3. Pembinaan LPK				kali	1	1	100,00%
4. Data LPK				paket	1	1	100,00%
Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja							
Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	15.544.500,00	15.544.258,00	100,00%				
1. Verifikasi Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja				LPK	10	17	170,00%
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	14.325.834.541,00	14.247.632.525,00	99,45%				
1. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (di dalam dan di luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten				%	60,00	70,60	117,67%
Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja	137.023.000,00	125.969.150,00	91,93%				
1. dokumen AK I				lembar	2000	2000	100,00%
2. dokumen AK II				lembar	2000	2000	100,00%
3. dokumen AK III				lembar	2000	2000	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
4. Forum Komunikasi Petugas Penempatan Tenaga kerja D.I Yogyakarta				kali	1	1	100,00%
5. Pelayanan penempatan tenaga kerja				orang	1000	1135	113,50%
6. Updating Data				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	51.045.000,00	38.148.875,00	74,74%				
1. Forum komunikasi pencari kerja dengan Perusahaan				kali	1	1	100,00%
2. Informasi Pasar Kerja Keliling (Sarkeling)				kali	40	51	127,50%
3. Pembekalan Calon Tenaga Kerja yang lolos seleksi				orang	90	66	73,33%
4. Penyiapan seleksi Calon Tenaga Kerja				orang	405	645	159,26%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	10.000.000,00	7.050.000,00	70,50%				
1. Laporan Penyelenggaraan ULD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	14.052.866.541,00	14.012.034.750,00	99,71%				
1. Sosialisasi dan Pelaksanaan Padat Karya				lokasi	77	77	100,00%
2. Verifikasi Calon lokasi padat karya				lokasi	77	77	100,00%
Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	50.790.000,00	45.262.500,00	89,12%				
1. Forum Komunikasi BKK				kali	1	1	100,00%
2. Pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK) (50 BKK)				kali	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
3. Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja (LPTKS & PPTKIS) LPTKS = Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta PPTKIS = Pelaksana Penempatan TKI Swasta				kali	1	1	100,00%
4. Penerbitan Tanda Daftar BKK				BKK	8	6	75,00%
Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	5.800.000,00	5.427.250,00	93,57%				
1. Monitoring Pengembalian Pinjaman dana Penguatan Modal (DPM) TKI				kali	30	20	66,67%
2. Rekomendasi Pinjaman dana Penguatan Modal (DPM) TKI				orang	5	1	20,00%
3. Forkom PMI				kali	1	1	100,00%
Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	18.310.000,00	13.740.000,00	75,04%				
1. Monitoring Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing				perusahaan	10	9	90,00%
2. Pelayanan Validasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)				orang	15	0	0,00%
3. Sosialisasi Peraturan Tenaga Kerja Asing				perusahaan	40	40	100,00%
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	519.850.188,00	474.455.989,00	91,27%				
1. Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak				%	11,50	21,11	183,57%
Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	25.000.000,00	23.631.250,00	94,53%				
1. Bimbingan penyusunan Peraturan Perusahaan				perusahaan	60	60	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2. Evaluasi Penyusunan Perjanjian Kerja				perusahaan	20	20	100,00%
3. Sosialisasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja				perusahaan	100	100	100,00%
Sub Kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	24.470.000,00	21.670.000,00	88,56%				
1. Bimbingan teknis penyusunan Perjanjian Kerja Bersama				perusahaan	30	30	100,00%
2. Pembinaan Pelaksanaan Pemborongan Pekerja/ Penyediaan Jasa Tenaga Kerja				perusahaan	30	30	100,00%
3. Evaluasi penyusunan perjanjian kerja bersama				perusahaan	5	5	100,00%
4. Evaluasi perjanjian kerjasama perusahaan alih daya				perusahaan	10	10	100,00%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	20.850.000,00	18.441.000,00	88,45%				
1. Laporan pengembalian pinjaman penguatan modal pengguliran 2007-2009				bulan	12	12	100,00%
2. Monitoring pelaksanaan jaminan kehilangan pekerjaan				perusahaan	10	10	100,00%
3. Pemetaan Hubungan Industrial (Perusahaan Skala Besar)				perusahaan	100	100	100,00%
4. Rekomendasi calon penerima pinjaman penguatan modal				rekomendasi	2	2	100,00%
5. Sosialisasi dan Evaluasi Pelaksanaan BPJS Kesehatan dan BPJS Kete nagakerjaan				perusahaan	80	80	100,00%
Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000,00	32.108.864,00	91,74%				
1. Bimtek mekanisme dan Dasar PHK Berdasarkan PP 35 Tahun 2021				perusahaan	100	100	100,00%
2. Deteksi dini kerawanan perselisihan hubungan industrial dan kerawanan pelaksanaan syarat kerja				perusahaan	30	30	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
3. Temu Konsultasi AMHI				kali	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.500.000,00	17.089.875,00	54,25%				
1. Mediasi PHK/PHI (@2orang)				perusahaan	30	17	56,67%
2. Koordinasi fungsional mediator HI				kali	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	60.952.228,00	55.330.000,00	90,78%				
1. Forum Komunikasi HRD				perusahaan	100	100	100,00%
2. Forum Komunikasi SP/SB				SP/SB	90	90	100,00%
3. LKS bipartit award tingkat kabupaten				kali	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	322.077.960,00	306.185.000,00	95,07%				
1. Bimbingan Teknis Penyusunan Struktur-Skala Upah Bagi Perusahaan				perusahaan	80	80	100,00%
2. Koordinasi LKS Tripartit				kali	6	6	100,00%
3. Monitoring pelaksanaan UMK				perusahaan	40	40	100,00%
4. Sosialisasi Pelaksanaan UMK				perusahaan	80	80	100,00%
5. Pemantauan pelaksanaan THR di perusahaan				perusahaan	20	20	100,00%
6. Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Struktur Skala Upah dan Pengupahan Sektor UMKM				rekomendasi	1	1	100,00%
7. Peringatan Hari Buruh Internasional				kali	1	1	100,00%
8. Sidang Dewan Pengupahan Kabupaten				kali	6	6	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
9. Workshop Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit				kali	1	1	100,00%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	685.304.900,00	569.284.279,00	83,07%				
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	685.304.900,00	569.284.279,00	83,07%				
1. Calon transmigran yang ditempatkan				%	80,00	85,71	107,14%
Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	121.121.201,00	100.267.150,00	82,78%				
1. Pasca Penempatan Calon Transmigran				lok kab prop	4	4	100,00%
2. Pra Penempatan Calon Transmigran				lok kab prop	3	3	100,00%
3. Terselenggaranya Kerjasama Antar Daerah Pengirim dan Penerima Transmigrasi/KSAD				lok kab prop	3	4	133,33%
Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	473.290.444,00	380.629.004,00	80,42%				
1. Pembinaan Pendaftar terseleksi				KK	12	12	100,00%
2. Seleksi Calon Transmigran				KK	25	25	100,00%
Sub Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi	90.893.255,00	88.388.125,00	97,24%				
1. Penyuluhan Transmigrasi Regional @30 orang)				kali	30	30	100,00%





**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2022**

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	38.736.549.967,00	37.272.215.257,00	96,22%				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	38.736.549.967,00	37.272.215.257,00	96,22%				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.972.437.990,00	5.241.627.747,00	87,76%				
1 Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				%	100,00	85,00	85,00%
2 Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja				%	100,00	85,00	85,00%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.119.400,00	46.519.400,00	96,67%				
Sub Kegiatan Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.825.300,00	28.225.300,00	94,64%				
1 dokumen Perjanjian Kinerja				dokumen	3	3	100,00%
2 dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja				dokumen	3	3	100,00%
3 dokumen Perubahan Renja				dokumen	1	1	100,00%
4 dokumen Renja				dokumen	1	1	100,00%
5 Musyawarah Kepemudaan dan Olahraga				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	2.388.750,00	2.388.750,00	100,00%				
1 dokumen RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.833.750,00	1.833.750,00	100,00%				
1 dokumen Perubahan RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.342.550,00	2.342.550,00	100,00%				
1 dokumen DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.742.550,00	1.742.550,00	100,00%				
1 dokumen Perubahan DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.986.500,00	9.986.500,00	100,00%				
1 dokumen laporan evaluasi kinerja				dokumen	26	26	100,00%
2 dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil				dokumen	5	5	100,00%
3 dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan				dokumen	2	2	100,00%
4 dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan				dokumen	4	4	100,00%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.614.625.302,00	4.014.732.568,00	87,00%				
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.386.271.784,00	3.799.714.450,00	86,63%				
1 Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai				bulan	12	12	100,00%
2 Pembayaran iuran BPJS				bulan	12	12	100,00%
3 Pembayaran TPP				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	218.900.000,00	205.564.600,00	93,91%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan/ Barang				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.453.518,00	9.453.518,00	100,00%				
1 Laporan Aset/BMD Semesteran				dokumen	2	2	100,00%
2 Laporan Keuangan Semesteran				dokumen	2	2	100,00%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	212.128.803,00	209.688.748,00	98,85%				
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	197.068.803,00	195.498.748,00	99,20%				
1 Laporan Administrasi Kepegawaian				dokumen	12	12	100,00%
2 Laporan Pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi				dokumen	1	1	100,00%
3 Pembayaran Tenaga Non PNS/PHL				bulan	12	12	100,00%
4 Pengelolaan Informasi dan dokumentasi				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.060.000,00	14.190.000,00	94,22%				
1 Pengiriman Peserta Bimtek/Workshop/Seminar/ Lokakarya				peserta	2	5	250,00%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	512.980.085,00	486.700.252,00	94,88%				
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	69.479.400,00	64.491.747,00	92,82%				
1 Alat Listrik				bulan	12	12	100,00%
2 Pemeliharaan Jaringan Listrik				paket	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	119.470.000,00	116.832.000,00	97,79%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97.065.350,00	93.856.990,00	96,69%				
1 Alat Tulis Kantor				bulan	12	12	100,00%
2 Layanan penyediaan makanan dan minuman rapat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.110.500,00	15.049.875,00	99,60%				
Layanan cetak dan penggandaan dokumen				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	62.840.000,00	61.160.000,00	97,33%				
Layanan makan minum tamu				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.942.000,00	120.265.640,00	89,79%				
1 Layanan Perjalanan Dinas Dalam Daerah				bulan	12	12	100,00%
2 Layanan Perjalanan Dinas Luar Daerah				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.072.835,00	15.044.000,00	99,81%				
1 Layanan surat-menyurat				bulan	12	12	100,00%
2 Pengelolaan arsip dan perpustakaan				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51.185.000,00	47.498.000,00	92,80%				
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	51.185.000,00	47.498.000,00	92,80%				
1 Alamari/ Filling Kabinet				unit	5	5	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2 Kursi Pejabat				unit	7	7	100,00%
3 Ruang Studio				unit	0	0	0,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.073.900,00	165.155.632,00	84,66%				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.108.000,00	22.141.054,00	81,68%				
Pembayaran Jasa Langganan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	167.965.900,00	143.014.578,00	85,15%				
1 Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor				bulan	12	12	100,00%
2 Sarana prasarana keamanan kantor				paket	1	1	100,00%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	338.325.500,00	271.333.147,00	80,20%				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	202.373.000,00	139.426.047,00	68,90%				
1 Layanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas				bulan	12	12	100,00%
2 Layanan Penyediaan BBM Kendaraan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	15.050.000,00	14.775.000,00	98,17%				
1 Layanan Pemeliharaan Meubelair				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.902.500,00	59.376.100,00	94,39%				
Pemeliharaan/Perbaikan Peralatan Kerja				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	58.000.000,00	57.756.000,00	99,58%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Pemeliharaan Gedung Kantor				unit	1	1	100,00%
2 Pemeliharaan Taman				bulan	12	12	100,00%
3 Pemeliharaan Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga				paket	1	1	100,00%
4 Sarana Prasarana Olahraga (Lap. Voly)				lapangan	0	0	0,00%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.388.196.895,00	2.107.399.590,00	88,24%				
1 Organisasi kepemudaan dan komunitas pemuda yang aktif				%	100,00	100,00	100,00%
2 Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang bisa mandiri pasca pelatihan				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor	1.993.379.272,00	1.830.987.090,00	91,85%				
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	1.166.975.483,00	1.042.454.440,00	89,33%				
1 Audisi dan Pelatihan Paduan Suara Siswa Kab. Sleman				tim	1	1	100,00%
2 Pemilihan dan Pengiriman Pemuda Pelopor				orang	3	4	133,33%
3 Seleksi dan Pelatihan Paskibraka				kelompok	1	1	100,00%
4 KORSIK GBS Drumband				kelompok	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	241.360.211,00	218.735.825,00	90,63%				
1 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda (Membatik)				kali	1	1	100,00%
2 Pelatihan Jurnalistik				kali	1	1	100,00%
3 Kerjasama Event Kepemudaan				kali	3	3	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
4 Fasilitasi Inkubator Bisnis dan Pasar Riil bagi Wirausaha Muda				kali	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	560.296.425,00	549.518.825,00	98,08%				
1 Penyuluhan Penanganan dan Pencegahan Kenakalan Remaja di Kapanewon Mlati				angkatan	1	1	100,00%
2 Penyuluhan Penanganan dan Pencegahan Kenakalan Remaja di Kapanewon Sleman				angkatan	1	1	100,00%
3 Penyuluhan Penanganan dan Pencegahan Kenakalan Remaja di Kapanewon Seyegan				angkatan	1	1	100,00%
4 Penyuluhan Penanganan dan Pencegahan Kenakalan Remaja di Kendal Bangunkerto Turi				angkatan	1	1	100,00%
5 Penyuluhan Penanganan dan Pencegahan Kenakalan Remaja di Sumberejo Tempel				angkatan	1	1	100,00%
6 Penyuluhan Penanganan dan Pencegahan Kenakalan Remaja di Sinduadi Mlati				angkatan	1	1	100,00%
7 Penyuluhan Penanganan dan Pencegahan Kenakalan Remaja di Donoharjo Ngaglik				angkatan	1	1	100,00%
8 Penyuluhan Penanganan dan Pencegahan Kenakalan bagi Pemuda di Sardonoharjo Ngaglik				angkatan	1	1	100,00%
9 Penyuluhan Penanganan dan Pencegahan Kenakalan bagi Pemuda di BKPRMI Kapanewon Ngaglik				angkatan	1	1	100,00%
10 Penyuluhan Penanganan dan Pencegahan Kenakalan Remaja di Trihanggo Gamping				angkatan	1	1	100,00%
11 Penyuluhan Penanganan dan Pencegahan Kenakalan Remaja di Sindumartani Ngemplak				angkatan	1	1	100,00%
12 Penyuluhan Penanganan dan Pencegahan Kenakalan Remaja di Banyuraden Gamping				angkatan	1	1	100,00%
13 Penyuluhan Penanganan dan Pencegahan Kenakalan bagi Pemuda di Sindumartani Ngemplak				angkatan	1	1	100,00%
14 Penyuluhan Penanganan dan Pencegahan Kenakalan bagi Pemuda di Kelompok Pemuda Matador				angkatan	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
15 Penyuluhan Penanganan dan Pencegahan Kenakalan bagi Pemuda di PIK R AKRAB				angkatan	1	1	100,00%
16 Penyuluhan Penanganan dan Pencegahan Kenakalan bagi Pemuda di BKPRMI Kapanewon Depok				angkatan	1	1	100,00%
17 Penyuluhan Penanganan dan Pencegahan Kenakalan bagi Pemuda di Gamol, Jatisawit, Balecatur Gamping				angkatan	2	2	100,00%
18 Penyuluhan Penanganan dan Pencegahan Kenakalan bagi Pemuda di Jambon Kidul Sindumartani Ngemplak				angkatan	1	1	100,00%
19 Penyuluhan Penanganan dan Pencegahan Kenakalan bagi Pemuda di Jamblangan Margomulyo Seyegan				angkatan	1	1	100,00%
20 Penyuluhan Penanganan dan Pencegahan Kenakalan bagi Pemuda di Klancingan Widodomartani Ngemplak				angkatan	1	1	100,00%
21 Penyuluhan Penanganan dan Pencegahan Kenakalan bagi Pemuda di Gondang 2, Wukirsari Cangkringan				angkatan	1	1	100,00%
22 Penyuluhan Penanganan dan Pencegahan Kenakalan bagi Pemuda di Jetis Widodomartani Ngemplak				angkatan	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	24.747.153,00	20.278.000,00	81,94%				
Sosialisasi, Pemilihan dan Pengiriman Peserta Jambore Pemuda Indonesia (JPI)				kali	1	1	100,00%
Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	394.817.623,00	276.412.500,00	70,01%				
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	394.817.623,00	276.412.500,00	70,01%				
1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan (OKP)				kali	1	1	100,00%
2 dokumen Pendataan Potensi Kepemudaan				dokumen	1	1	100,00%
3 Monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepemudaan Tahun 2020 - 2024				dokumen	1	1	100,00%
4 Lomba OKP Berprestasi				kali	1	0	0,00%
5 Pembinaan OKP Kalurahan Margomulyo				angkatan	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
6 Pembinaan OKP Kapanewon Gamping				angkatan	1	1	100,00%
7 Pembinaan OKP Kalurahan Trihanggo Gamping				angkatan	2	2	100,00%
8 Pembinaan OKP Kalurahan Sariharjo Ngaglik				angkatan	1	1	100,00%
9 Pembinaan OKP Sambego dan Kembang				angkatan	2	2	100,00%
10 Pembinaan OKP Patukan Ambarketawang Gamping				angkatan	1	1	100,00%
11 Pembinaan OKP Kalurahan Argomulyo Cangkringan				angkatan	1	1	100,00%
12 Pembinaan OKP Kalurahan Tirtomartani Kalasan				angkatan	1	1	100,00%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	29.429.055.210,00	28.978.678.395,00	98,47%				
1 Prosentase atlet pelajar yang memperoleh medali di tingkat Provinsi				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	559.664.645,00	506.694.750,00	90,54%				
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	559.664.645,00	506.694.750,00	90,54%				
1 Kelas Khusus Olahraga				sekolah	3	3	100,00%
2 Kelompok Pelajar KKO				kelompok	2	2	100,00%
Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.561.823.375,00	1.435.096.607,00	91,89%				
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1.561.823.375,00	1.435.096.607,00	91,89%				
1 Gala Siswa Indonesia (Liga Pelajar SMP)				kecamatan	17	17	100,00%
2 KOSN SD (Seleksi dan Pengiriman Kontingen ke Tingkat DIY dan Pendampingan ke Tingkat Nasional)				cabor	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
3 KOSN SMP (Seleksi dan Pengiriman Kontingen ke Tingkat DIY dan Pendampingan ke Tingkat Nasional)				cabor	12	12	100,00%
4 Liga Dispora (Liga Pelajar antar SSB)				kali	1	1	100,00%
5 POPDA (Seleksi dan Pengiriman di Tingkat DIY)				cabor	28	29	103,57%
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	2.020.570.860,00	1.926.194.440,00	95,33%				
Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	487.557.525,00	459.218.190,00	94,19%				
1 Pelatihan Tenaga Keolahragaan				peserta	60	60	100,00%
2 Pemusatan Latihan Atlet Pelajar Daerah (PLAPD)				orang	305	303	99,34%
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	697.284.750,00	659.872.000,00	94,63%				
1 Klub Olahraga Pelajar (KOP) Wilayah				klub	0	0	0,00%
2 Penyelenggaraan Event PORDA dan PEPARDA (Tuan Rumah)				event	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	835.728.585,00	807.104.250,00	96,57%				
1 Penghargaan atau Tali Asih bagi Atlet Pelajar dan Pelajar yang Berprestasi Tinggi				pelajar	426	430	100,94%
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	23.887.810.310,00	23.802.803.148,00	99,64%				
Sub Kegiatan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	564.783.335,00	546.318.730,00	96,73%				
1 Pendataan Sarpras				dokumen	1	1	100,00%
2 Sentra Olahraga				sentra	1	1	100,00%
3 Sport Development Index Kabupaten Sleman				dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	23.323.026.975,00	23.256.484.418,00	99,71%				
1 Verifikasi, Pencairan dan Monitoring Hibah KONI				proposal	1	1	100,00%
2 Verifikasi, Pencairan dan Monitoring Hibah NPC				proposal	1	1	100,00%
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1.399.186.020,00	1.307.889.450,00	93,48%				
Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	193.393.050,00	165.261.500,00	85,45%				
1 Peringatan Upacara Hari Olahraga Nasional dan Hari Jalan Kaki se-Dunia Kabupaten Sleman				kegiatan	2	2	100,00%
2 Senam setiap jumat pagi bagi karyawan/karyawati, masyarakat di lingkungan Pemerintah Kab. Sleman dan bantuan instruktur senam bagi masyarakat				kali	271	214	78,97%
3 Seleksi, Pembinaan, Pengiriman, Monitoring Kontingen Tri Lomba Juang Kabupaten Sleman				event	0	0	0,00%
Sub Kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	1.205.792.970,00	1.142.627.950,00	94,76%				
1 Kerjasama Penyelenggaraan Olahraga Masyarakat				event	15	15	100,00%
2 Lomba Olahraga Tradisional				kegiatan	1	1	100,00%
3 Pembinaan dan Latihan Klub Olahraga Sekolah				klub/sekolah	1	1	100,00%
4 Pembinaan dan Latihan Kelompok Olahraga Masyarakat				lokasi	10	31	310,00%
5 Pembinaan dan Latihan Kelompok Olahraga Masyarakat Sanggrahan, Maguwoharjo Depok				paket	2	2	100,00%
6 Pembinaan dan Latihan Kelompok Olahraga Masyarakat Tlogo, Ambarketawang, Gamping				paket	1	1	100,00%
7 Pembinaan dan Latihan Kelompok Olahraga Masyarakat Pasekan Lor, Pasekan Kidul Balecatur Gamping				paket	2	2	100,00%
8 Pembinaan dan Latihan Kelompok Olahraga Masyarakat Tirtoadi, Mlati				paket	3	3	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
9 Pembinaan dan Latihan Kelompok Olahraga Masyarakat Gondanglegi, Sariharjo, Ngaglik				paket	1	1	100,00%
10 Pembinaan dan Latihan Kelompok Olahraga Masyarakat Klajuran, Sidokarto, Godean				paket	2	2	100,00%
11 Pembinaan dan Latihan Kelompok Olahraga Masyarakat Sumberharjo, Prambanan				paket	2	2	100,00%
12 Pembinaan dan Latihan Kelompok Olahraga Masyarakat Daerah Mlati				paket	1	1	100,00%
13 Pembinaan dan Latihan Kelompok Olahraga Masyarakat PTM Griya Kartika, Berbah, Tegaltirto				paket	1	1	100,00%
14 Pembinaan dan Latihan Kelompok Olahraga Masyarakat Pondok Kulon dan Sumber Lor, kalitirto, Berbah				paket	2	2	100,00%
15 Pembinaan dan Latihan Kelompok Olahraga Masyarakat Krikilan dan Pandem, Tegaltirto, Berbah				paket	2	2	100,00%
16 Pembinaan dan Latihan Kelompok Olahraga Masyarakat Krandon, Sendangtirtio, Berbah				paket	1	1	100,00%
17 Pembinaan dan Latihan Kelompok Olahraga Masyarakat 35 RW di Kalurahan Trihanggo, Gamping				paket	3	3	100,00%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	946.859.872,00	944.509.525,00	99,75%				
1 Persentase Peningkatan Kapasitas Pembina Pramuka dan Aktifitas Kepramukaan				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	946.859.872,00	944.509.525,00	99,75%				
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	946.859.872,00	944.509.525,00	99,75%				
1 Hibah Uang Organisasi Kepramukaan				paket	1	1	100,00%
2 Kursus Pembina Pramuka				kali	4	4	100,00%
3 Verifikasi dan Monitoring Dana Hibah Kwarcab				proposal	1	1	100,00%
4 Lomba Gugus Depan dan Pembina Pramuka				kali	1	1	100,00%





**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2022**

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	24.943.768.332,00	20.645.055.732,00	82,77%				
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11.293.309.964,00	10.600.424.522,00	93,86				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.012.789.639,00	7.560.795.360,00	94,36				
1. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				%	100,00	100,00	100,00
2. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja				%	100,00	100,00	100,00
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.255.350,00	43.020.000,00	99,46				
Dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah				dokumen	12	12	100,00
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.904.650,00	21.814.650,00	99,59				
1. Dokumen Perjanjian kinerja				dokumen	3	3	100,00
2. Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja				dokumen	3	3	100,00
3. Dokumen Renja				dokumen	1	1	100,00
4. Dokumen Perubahan Renja				dokumen	1	1	100,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.434.825,00	1.434.825,00	100,00				
1. Dokumen RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.434.825,00	1.421.325,00	99,06				
1. Dokumen Perubahan RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.434.825,00	1.371.825,00	95,61				
1. Dokumen Perubahan RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.434.825,00	1.406.475,00	98,02				
1. Dokumen Perubahan RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.611.400,00	15.570.900,00	99,74				
1. Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja				dokumen	4	4	100,00
2. Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja				dokumen	1	1	100,00
3. Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja				dokumen	4	4	100,00
4. Dokumen RFK				dokumen	12	12	100,00
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.451.088.122,00	5.101.033.262,00	93,58				
Dokumen keuangan perangkat daerah				dokumen	4	4	100,00
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.146.550.347,00	4.803.092.715,00	93,33				
1. Gaji dan Tunjangan ASN				bulan	12	12	100,00
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penautusahaan dan Pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	272.906.600,00	266.343.122,00	97,59				
1. Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang				bulan	12	12	100,00





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	31.631.175,00	31.597.425,00	99,89				
1. Dokumen Laporan Aset/Barang Milik Daerah Semesteran				dokumen	2	2	100,00
2. Dokumen Laporan Keuangan Semesteran				dokumen	2	2	100,00
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	878.134.700,00	862.261.877,00	98,19				
Layanan administrasi kepegawaian dan Pembayaran tenaga non PNS / PHL				bulan	12	12	100,00
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	874.534.700,00	858.666.877,00	98,19				
1. Laporan Roadmap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				bulan	12	12	100,00
2. Laporan administrasi kepegawaian				bulan	12	12	100,00
3. Pembayaran tenaga non PNS				bulan	12	12	100,00
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3.600.000,00	3.595.000,00	99,86				
1. Kursus, Pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis				paket	2	2	100,00
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	315.469.777,00	298.179.876,00	94,52				
Layanan administrasi umum				bulan	12	12	100,00
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.926.280,00	18.652.180,00	98,55				
1. Alat listrik				paket	5	5	100,00
2. Jasa pemeliharaan jaringan listrik				kali	2	2	100,00
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.779.687,00	26.713.340,00	96,16				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1. Penyediaan peralatan perlengkapan kantor				bulan	12	12	100,00
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	185.758.135,00	172.962.075,00	93,11				
1. Alat Tulis Kantor				paket	1	1	100,00
2. Layanan penyediaan makan dan minum rapat				bulan	12	12	100,00
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.948.675,00	28.931.400,00	99,94				
1. Layanan cetak dan penggandaan dokumen				bulan	12	12	100,00
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	13.500.000,00	13.485.000,00	99,89				
1. Layanan penyediaan makan dan minum tamu				bulan	12	12	100,00
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.557.000,00	37.435.881,00	92,30				
1. Layanan perjalanan dinas dalam daerah				bulan	12	12	100,00
2. Layanan perjalanan dinas luar daerah				bulan	12	12	100,00
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	576.554.110,00	559.337.970,00	97,01				
Layanan jasa penunjang				bulan	12	12	100,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	4.800.000,00	96,00				
1. Layanan surat menyurat				bulan	12	12	100,00
2. Pengelolaan arsip dan perpustakaan				bulan	12	12	100,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122.700.000,00	109.945.884,00	89,61				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1. Pembayaran jasa langganan				bulan	12	12	100,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00				
1. Pemeliharaan website				kali	5	5	100,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	443.854.110,00	439.592.086,00	99,04				
1. Pelayanan kebersihan				bulan	12	12	100,00
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	748.287.580,00	696.962.375,00	93,14				
Layanan pemeliharaan BMD				bulan	12	12	100,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	463.444.000,00	415.630.550,00	89,68				
1. Layanan pemeliharaan kendaraan dinas				bulan	12	12	100,00
2. Layanan penyediaan BBM kendaraan				bulan	12	12	100,00
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	4.950.000,00	4.270.000,00	86,26				
1. Pemeliharaan mebel				bulan	12	12	100,00
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.580.000,00	73.148.275,00	96,78				
1. Pemeliharaan peralatan kerja				bulan	12	12	100,00
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	204.313.580,00	203.913.550,00	99,80				
1. Pemeliharaan gedung kantor				bulan	12	12	100,00
2. Pemeliharaan tanaman				bulan	12	12	100,00





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
3. Pembuatan Taman Layak Anak				paket	1	1	100,00
4. Pembuatan kanopi				paket	2	2	100,00
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	837.471.300,00	800.043.625,00	95,53				
1. Persentase lembaga PUG yang aktif				%	100	100	100,00
Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	211.176.275,00	193.559.225,00	91,66				
Sosialisasi dan FGD PUG, Review dan Bimtek PPRG				kali	15	15	100,00
Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	211.176.275,00	193.559.225,00	91,66				
1. Pertemuan Pokja PUG				kali	1	1	100,00
2. Reviu dan Evaluasi PPRG				kali	1	1	100,00
3. Sosialisasi PUG dan PPRG bagi Karang Taruna				kali	1	1	100,00
4. Temu forum PUG Bidang Agama				kali	1	1	100,00
5. Temu forum PUG bidang Kebencanaan				kali	1	1	100,00
6. Pendampingan Penyusunan RA PUG Kalurahan				kali	2	2	100,00
7. Temu Forum PUG bidang Lingkungan Hidup				kali	1	1	100,00
8. Temu Forum PUG bidang Budaya				kali	1	1	100,00
9. Profil Lembaga Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan				kali	1	1	100,00
10. Evaluasi RAD PUG 2019-2021				dokumen	1	1	100,00





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
11. Dokumentasi pelaksanaan PUG				kali	1	1	100,00
12. Bimtek Assesmen LPLPP				kali	2	2	100,00
Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	77.654.925,00	77.654.925,00	100,00				
Pendidikan dan pelatihan untuk perempuan dalam politik hukum sosial dan ekonomi				kali	9	9	100,00
Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	77.654.925,00	77.654.925,00	100,00				
1. Pendidikan politik bagi pejabat publik perempuan				kali	2	2	100,00
2. Pembinaan lokus PUSPA				kali	2	2	100,00
3. Temu PUSPA				kali	1	1	100,00
4. Pelatihan Citra Diri dan Public Speaking Perempuan Kalurahan Sardonoharjo Ngaglik				kali	1	1	100,00
5. Pelatihan Citra Diri dan Public Speaking Perempuan Kalurahan Sumberejo Tempel				kali	4	4	100,00
6. Pelatihan Citra Diri dan Public Speaking Perempuan Padukuhan Soka Tegal Kalurahan Merdikorejo Tempel				kali	1	1	100,00
7. Pelatihan Citra Diri dan Public Speaking Perempuan Kalurahan Trihanggo Gamping				kali	1	1	100,00
8. Pelatihan Citra Diri dan Public Speaking Perempuan Kapanewon Ngaglik				kali	1	1	100,00
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	548.640.100,00	528.829.475,00	96,39				
Pembinaan organisasi perempuan GOW dan DWP serta peringatan Hari Kartini, Hari Ibu dan HUT DWP				kali	37	37	100,00
Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	548.640.100,00	528.829.475,00	96,39				
1. Pembinaan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sleman				kali	22	22	100,00





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2. Pembinaan Organisasi Perempuan (GOW)				kali	6	6	100,00
3. Peringatan Hari Kartini				kali	1	1	100,00
4. Peringatan Hari Ibu				kali	1	1	100,00
5. Peringatan HUT DWP				kali	1	1	100,00
6. Honor Tenaga Administrasi Dharma Wanita Persatuan				kali	12	12	100,00
7. Honor Non PNS Jasa Lainnya Orang Perorangan				bulan	3	3	100,00
8. Peningkatan Kapasitas Perempuan DWP				paket	1	1	100,00
9. Pelatihan bagi pengurus dan anggota GOW				paket	6	6	100,00
Program Perlindungan Perempuan	387.885.525,00	304.186.566,00	78,42				
1. Cakupan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan/pendampingan perlindungan perempuan				lembaga	52	52	100,00
Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	200.842.925,00	200.272.775,00	99,72				
Penguatan gugus tugas dan implementasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan				kali	18	18	100,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	200.842.925,00	200.272.775,00	99,72				
1. Sosialisasi Simulasi PKDRT, Trafficking dan Keluarga Sadar Gender				kali	2	2	100,00
2. Penguatan FPKK				kali	2	2	100,00
3. Penguatan Gugus Tugas TPPO				kali	2	2	100,00
4. Penguatan HWDI				kali	2	2	100,00





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
5. Sosialisasi Undang - Undang KDRT, TPPO dan Peraturan Perlindungan				kali	3	3	100,00
6. DAK - Sosialisasi Pencegahan Kekerasan pada Perempuan (KtP)				kali	4	4	100,00
7. DAK - Sosialisasi Pencegahan KTP dan TPPO (Pengembangan Jejaring)				kali	1	1	100,00
8. Pembinaan Kelompok Simulasi Perlindungan Perempuan				kali	17	17	100,00
9. Sosialisasi Rumah Perlindungan Perempuan (RP3)				kali	2	2	100,00
10. Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bagi Pelaku UMKM				kali	1	1	100,00
Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	187.042.600,00	103.913.791,00	55,56				
Terlayannya perempuan dan anak korban kekerasan				bulan	12	12	100,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	187.042.600,00	103.913.791,00	55,56				
1. Terlayannya perempuan dan anak korban kekerasan				bulan	12	12	100,00
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	706.452.425,00	691.324.190,00	97,86				
1. Jumlah kelompok Desa Prima dan Industri rumahan				kelompok	Desa Prima 26 Industri rumahan 28	Desa Prima 26 Industri rumahan 28	100,00
2. Persentase pemenuhan atas layanan UPTD PPA terhadap Korban Kekerasan				%	100	100	100,00
Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	337.724.450,00	337.380.950,00	99,90				
Pembinaan dan pelatihan perempuan untuk peningkatan kualitas keluarga				kali	47	47	100,00
Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	337.724.450,00	337.380.950,00	99,90				
1. Pelatihan Desa PRIMA				kali	2	2	100,00





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2. Pelatihan Industri Rumahan				kali	2	2	100,00
3. Pelatihan Energi Terbarukan				kali	1	1	100,00
4. Pembinaan Desa PRIMA				kali	2	2	100,00
5. Pembinaan Industri Rumahan				kali	2	2	100,00
6. Pembinaan PPEP				kali	3	3	100,00
7. Pelatihan/keterampilan bagi kaum perempuan (PUPM Jogotirto, Sumberrahayu, Sumberagung, Bimomartani, Sambirejo)				paket	5	5	100,00
8. Pelatihan Keterampilan Bagi Kaum Perempuan Budidaya Anggrek (PUPM Seyegan				paket	2	2	100,00
9. Pelatihan/Keterampilan Bagi Kaum Perempuan Boga (PUPM Banyurejo, Tambakrejo, Pondokrejo, Sumberrejo, Merdikorejo, Lumbungrejo, Margorejo, Mororejo)				paket	8	8	100,00
10. Pelatihan/Keterampilan Bagi Kaum Perempuan Bunga dari akrilik (PUPM Turi)				paket	1	1	100,00
11. Raperbup PPEP				paket	1	1	100,00
Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	368.727.975,00	353.943.240,00	95,99				
Operasional Pelayanan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak				bulan	12	12	100,00
Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	368.727.975,00	353.943.240,00	95,99				
1. Operasional Pelayanan UPTD PPA				bulan	12	12	100,00
2. Honor Non PNS Jasa Lainnya Orang Perorangan				bulan	3	3	100,00
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	60.814.800,00	57.899.650,00	95,21				
1. Cakupan ketersediaan Data Gender dan Anak				%	42	42	100,00





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.814.800,00	57.899.650,00	95,21				
Profil Kabupaten Layak Anak				dokumen	1	1	100,00
Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	60.814.800,00	57.899.650,00	95,21				
1. Tersedianya Dokumen Profil KLA				dokumen	1	1	100,00
2. Koordinasi Satgas Pencegahan Kekerasan Anak Dijalanan				kali	10	10	100,00
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	809.355.275,00	806.501.822,00	99,65				
1. Persentase Pemenuhan Hak Anak				%	100	100	100,00
Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	115.401.850,00	115.069.472,00	99,71				
Penyelenggaraan HAN dan Temu Hati Anak Sleman				orang	300	300	100,00
Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	115.401.850,00	115.069.472,00	99,71				
1. Hari Anak Nasional				orang	150	150	100,00
2. Workshop Temu Hati Anak Sleman				orang	150	150	100,00
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	693.953.425,00	691.432.350,00	99,64				
Pengembangan Kabupaten Layak Anak				kabupaten	1	1	100,00
Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	693.953.425,00	691.432.350,00	99,64				
1. Pengembangan Kabupaten Layak Anak				kabupaten	1	1	100,00
2. Penguatan dan pengembangan kapasitas forum anak kalurahan dan kapanewon (PUPM Girikerto, Ambarketawang, Sumberagung, Mororejo, Merdikorejo, Donoharjo, Sambirejo)				paket	7	7	100,00





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
3. Penguatan dan pengembangan kapasitas forum anak kalurahan dan kapanewon (Sex Education) (PUPM Godean)				paket	1	1	100,00
4. Penguatan dan pengembangan kapasitas forum anak kalurahan dan kapanewon (Pelatihan KHA) (PUPM Minggir, Turi, Wedomartani, Umbulmartani, Bimomartani, Sindumartani, Prambanan)				paket	7	7	100,00
5. Penguatan dan pengembangan kapasitas forum anak kalurahan dan kapanewon (Pelatihan Public Speaking) (PUPM Depok, PUPM Minggir, Mlati, Moyudan, Wedomartani, Minomartani, Sinduharjo, Sardonoharjo, Sukoharjo, Sariharjo, Prambanan)				paket	11	11	100,00
6. Penguatan dan pengembangan kapasitas forum anak kalurahan dan kapanewon (Pelatihan LKD) (PUPM Mlati)				paket	1	1	100,00
7. Penguatan dan pengembangan kapasitas forum anak kalurahan dan kapanewon (Pembentukan Forum Anak Kalurahan) (PUPM Sumberarum, Sumbersari, Sumberrahayu)				paket	3	3	100,00
8. Penguatan dan pengembangan kapasitas forum anak kalurahan dan kapanewon (Pelatihan Bahasa Isyarat) (PUPM Moyudan)				paket	1	1	100,00
9. Penguatan dan pengembangan kapasitas forum anak kalurahan dan kapanewon (Regenerasi Forum Anak) (PUPM Moyudan)				paket	1	1	100,00
10. Penguatan dan pengembangan kapasitas forum anak kalurahan dan kapanewon (Pelatihan Jurnalistik) (PUPM Seyegan, PUPM Kalasan, Sleman, Tempel)				paket	4	4	100,00
11. Penguatan dan pengembangan kapasitas forum anak kalurahan dan kapanewon (Pendewasaan Usia Perkawinan) (PUPM Prambanan)				paket	1	1	100,00
12. Grand Design KLA				dokumen	1	1	100,00
Program Program Perlindungan Khusus Anak	478.541.000,00	379.673.309,00	79,34				
1. Presentase pemenuhan perlindungan khusus anak				%	53,33	53,33	100,00
Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	185.321.300,00	156.990.689,00	84,71				
Pelatihan dan penguatan forum pencegahan kekerasan terhadap anak				kali	11	11	100,00
Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	110.071.300,00	84.758.200,00	77,00				
1. Pendampingan pengisian SIMEP				kali	1	1	100,00
2. Pertemuan forum SPPA Terpadu				kali	2	2	100,00





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
3. Pendampingan forum AMPK				kali	3	3	100,00
4. Penguatan forum AMPK				kali	1	1	100,00
5. Pencegahan kekerasan seksual pada anak di SLB				kali	2	2	100,00
6. Ekspose karya AMPK				kali	1	1	100,00
7. Kunjungan forum SPPA ke BPRSR				kali	1	1	100,00
8. Pembentukan KPAD				paket	1	1	100,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	75.250.000,00	72.232.489,00	95,99				
1. Pelatihan trauma healing				kali	1	1	100,00
2. Pelatihan penyusunan kode etik pendampingan perempuan dan anak di UPTD PPA				kali	1	1	100,00
3. Pelatihan manajemen kasus				kali	1	1	100,00
4. Pelatihan Simfoni PPPA				kali	1	1	100,00
Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	190.913.700,00	124.627.620,00	65,28				
Penguatan dan pelatihan sistem perlindungan anak				kali	9	9	100,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	162.001.400,00	96.215.345,00	59,39				
1. Operasional Pelayanan UPTD PPA				bulan	12	12	100,00
Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	28.912.300,00	28.412.275,00	98,27				
1. Bimbingan teknis PATBM				kali	1	1	100,00





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2. Penguatan Keluarga Ramah Anak melalui simulasi				kali	4	4	100,00
3. Inisiasi Pondok Pesantren Ramah Anak dan sosialisasi Lantera ZIMANJA				kali	2	2	100,00
4. Pembuatan Beberan Keluarga Ramah Anak				paket	20	20	100,00
5. Lomba Keluarga Ramah Anak				kali	1	1	100,00
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	102.306.000,00	98.055.000,00	95,84				
Pelatihan manajemen kasus dan pelatihan pendataan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Simfoni				kali	2	2	100,00
Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	102.306.000,00	98.055.000,00	95,84				
1. Bimtek Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak di Pondok Pesantren				kali	2	2	100,00
2. Bimtek Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak di Tempat Pengasuhan Anak				kali	2	2	100,00
3. Pelatihan Mediator				paket	1	1	100,00
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13.650.458.368,00	10.044.631.210,00	73,58				
Program Pengendalian Penduduk	2.308.942.538,00	2.280.940.435,00	98,79				
1. Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita pada usia 15 - 49 tahun				%	23,1	23,1	100,00
Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.308.942.538,00	2.280.940.435,00	98,79				
Terlaksananya pendataan dan update data keluarga di Kabupaten Sleman				kali	1	1	100,00
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.000.000,00	59.193.763,00	98,66				
1. Dukungan manajemen BOKB				bulan	12	12	100,00





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	2.172.142.538,00	2.158.706.672,00	99,38				
1. Terlaksananya update data dan informasi keluarga di Kabupaten Sleman				kali	2	2	100,00
2. Terlaksananya Program Bangga Kencana				kali	12	12	100,00
3. Latihan Dasar PLKB Non ASN				kali	1	1	100,00
4. Honor PLKB Non ASN				bulan	12	12	100,00
5. Cetak Data Keluarga				lembar	7493	7493	100,00
Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	76.800.000,00	63.040.000,00	82,08				
1. Dukungan paket data komunikasi di Balai penyuluh (SIGA)				bulan	12	12	100,00
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5.979.191.075,00	4.815.936.932,00	80,54				
1. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate / mCPR);				%	76,8	76,81	100,01
2. Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);				%	39,12	40,04	102,35
3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)				%	7,92	7,92	100,00
Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.053.215.000,00	1.050.644.875,00	99,76				
Operasional balai penyuluhan KB				kecamatan	16	16	100,00
Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.375.000,00	3.074.875,00	70,28				
1. Advokasi Program Bangga Kencana				kali	2	2	100,00
Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000,00	24.529.500,00	98,12				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1. Media KIE momentum dan kearifan lokal				jenis	2	2	100,00
Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	70.640.000,00	70.637.000,00	100,00				
1. Media KIE Media Cetak				jenis	2	2	100,00
2. Media KIE Media Elektronik dan Tradisional				jenis	3	3	100,00
Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	265.200.000,00	265.200.000,00	100,00				
1. Mini lokakarya kecamatan penurunan stunting				kali	6	6	100,00
Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	648.000.000,00	647.232.000,00	99,88				
1. Operasional balai penyuluhan KB				kecamatan	16	16	100,00
Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	40.000.000,00	39.971.500,00	99,93				
1. Audit kasus stunting				kali	4	4	100,00
2. Rakor laporan audit kasus stunting				kali	2	2	100,00
Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	412.800.000,00	412.800.000,00	100,00				
Operasional Kader PPKBD dan Sub PPKBD				desa	86	86	100,00
Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	412.800.000,00	412.800.000,00	100,00				
1. Operasional Kader PPKBD dan Sub PPKBD				desa	86	86	100,00
Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	3.908.676.075,00	2.750.797.312,00	70,38				
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB				kabupaten	1	1	100,00





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	46.350.000,00	30.640.000,00	66,11				
1. Distribusi Alokon				faskes	78	50	64,10
Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.091.519.075,00	966.542.822,00	46,21				
1. Bimtek KBPPPK				kali	1	1	100,00
2. Penjaringan Bhakti sosial				kali	17	17	100,00
3. Sosialisasi distribusi alokon				kali	1	1	100,00
4. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi				kali	1	1	100,00
5. Biaya operasional penggerakan KB MOW				orang	154	154	100,00
6. Biaya operasional penggerakan KB MOP				orang	12	12	100,00
7. Biaya operasional KB IUD				orang	5871	1364	23,23
8. Biaya operasional penggerakan KB implant				orang	1177	866	73,58
9. Biaya operasional penggerakan cabut implant				orang	47	0	0,00
10. Honor Non PNS jasa lainnya Orang Perorang				bulan	3	3	100,00
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.736.607.000,00	1.720.851.490,00	99,09				
1. Pengadaan kendaraan roda dua antar jemput akseptor KB				unit	17	17	100,00
2. Pengadaan rehabilitasi gedung balai penyuluhan KB				paket	1	1	100,00
3. Pengadaan laparascopi				unit	1	1	100,00





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
4. Pengadaan VTP Kit				unit	3	3	100,00
Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	34.200.000,00	32.763.000,00	95,80				
1. Pembinaan pelayanan KB di faskes				kali	4	4	100,00
2. Operasional koordinasi pelayanan KB di faskes				kali	2	2	100,00
Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	604.500.000,00	601.694.745,00	99,54				
Pengendalian program KKBPK di Kampung KB				kampung KB	16	16	100,00
Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	604.500.000,00	601.694.745,00	99,54				
1. Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan				kali	9	9	100,00
2. Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB				kali	7	7	100,00
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	5.362.324.755,00	2.947.753.843,00	54,97				
1. Persentase jumlah Poktan yang mendukung program Bangga Kencana				%	84	84	100,00
Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	5.272.734.555,00	2.858.181.643,00	54,21				
Pembinaan dan pelatihan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui kelompok BKS dan PIK R				kabupaten	1	1	100,00
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	244.000.000,00	222.992.000,00	91,39				
1. Pengadaan KIT Siap Nikah Anti Stunting				unit	8	8	100,00
2. Pengembangan BKB Kit				unit	10	10	100,00
Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	434.110.225,00	418.600.488,00	96,43				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1. Forum BKS Tingkat Kabupaten				kabupaten	1	1	100,00
2. Koordinasi Penanganan Kejahatan Jalanan				kali	3	3	100,00
3. Pembinaan BKS (BKL , BKS, BKR)				kali	5	5	100,00
4. Honor Non PNS Jasa Lainnya Orang Perorang				bulan	3	3	100,00
5. Honor Tim Percepatan Penurunan Stunting, Sekretariat, dan Tim Audit Kasus				paket	1	1	100,00
6. Rapat KoordinasiTPPS				kali	2	2	100,00
7. Pembinaan TPK				kapanewon	17	17	100,00
Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4.541.160.000,00	2.163.125.000,00	47,63				
1. Pendampingan calon pengantin				kali	8483	469	5,53
2. Pendamping Ibu hamil				kali	18659	1315	7,05
3. Pendamping Pasca Persalinan				kali	18359	8504	46,32
4. Surveillance Stunting				bulan	12	12	100,00
Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	53.464.330,00	53.464.155,00	100,00				
1. Pelatihan bagi Pendidik Sebaya				kali	1	1	100,00
2. Pembinaan kelompok PIK R				kelompok	5	5	100,00
3. Penyuluhan dan Deklarasi PUP dan Pembentukan Satgas PUP Tingkat Padukuhan				kali	2	2	100,00





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	89.590.200,00	89.572.200,00	99,98				
Pembinaan, pelatihan dan evaluasi mitra kerja, organisasi masyarakat dalam pengelolaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (TNI Polri, PKK, BKB, BKR, BKL, UPPPKS dan PIK-R)				kabupaten	1	1	100,00
Sub Kegiatan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	43.425.725,00	43.425.725,00	100,00				
1. Evaluasi Bhakti TNI KB Kesehatan Tk. DIY				kali	1	1	100,00
2. Evaluasi Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan Tk.DIY				kali	1	1	100,00
3. Pembinaan IMP Tk. Kabupaten				kali	3	3	100,00
4. Pembinaan Motivator KB Pria Tk. Kabupaten				kali	2	2	100,00
5. Pembinaan Lengkab (Binkap) bg PKB				kali	4	4	100,00
6. Cetak Buku laporan untuk lomba (IMP, KB Lestari, PKB, BTKT)				buku	5	5	100,00
Sub Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	46.164.475,00	46.146.475,00	99,96				
1. Ekspose Pasar Tani				bulan	12	12	100,00
2. Pembinaan Kelompok UPPKS				kali	2	2	100,00
3. Rakor UPPKA				kali	5	5	100,00





**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PERHUBUNGAN
2022**

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
DINAS PERHUBUNGAN	30.512.612.963,00	29.699.245.777,60	97,33%				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.024.572.947,00	10.223.831.072,00	92,74%				
1 Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				%	100,00	100,00	100,00%
2 Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	176.281.450,00	172.559.367,00	97,89%				
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	145.618.900,00	141.896.823,00	97,44%				
1 Dokumen Perjanjian Kinerja				dokumen	3	3	100,00%
2 Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja				dokumen	3	3	100,00%
3 Dokumen Perubahan Renja				dokumen	1	1	100,00%
4 Dokumen Renja				dokumen	1	1	100,00%
5 Pengadaan Drone				unit	1	1	100,00%
6 Pengadaan Handycam				paket	1	1	100,00%
7 Pengadaan Laptop				unit	1	1	100,00%
8 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Smart PJJ				ls	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.044.925,00	3.044.924,00	100,00%				
1 Dokumen RKA - SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.044.925,00	3.044.925,00	100,00%				
1 Dokumen Perubahan RKA - SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.986.200,00	2.986.199,00	100,00%				
1 Dokumen DPA - SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.316.825,00	2.316.824,00	100,00%				
1 Dokumen Perubahan DPA - SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.999.850,00	5.999.849,00	100,00%				
1 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				dokumen	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.269.825,00	13.269.823,00	100,00%				
1 Dokumen Laporan Tahunan				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen LKjIP/LAKIP				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja				dokumen	4	4	100,00%
4 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja				dokumen	1	1	100,00%
5 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja				dokumen	4	4	100,00%
6 Dokumen RfK				dokumen	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
7 Dokumen SIM LPPD				dokumen	12	12	100,00%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.470.699.784,00	7.925.813.087,00	93,57%				
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.059.691.564,00	7.517.882.820,00	93,28%				
1 Pembayaran gaji dan tunjangan ASN				bulan	14	14	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	373.197.000,00	370.163.125,00	99,19%				
1 Pembayaran honorarium pengelola keuangan / barang				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	37.811.220,00	37.767.142,00	99,88%				
1 Dokumen laporan bulanan				dokumen	12	12	100,00%
2 Dokumen rekonsiliasi aset				dokumen	12	12	100,00%
3 Dokumen rekonsiliasi persediaan				dokumen	12	12	100,00%
4 Laporan Aset/BMD Semesteran				dokumen	2	2	100,00%
5 Laporan Keuangan Semesteran				dokumen	2	2	100,00%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	81.666.000,00	76.200.000,00	93,31%				
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	65.166.000,00	62.700.000,00	96,22%				
1 Laporan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi				dokumen	1	1	100,00%
2 Layanan administrasi kepegawaian				bulan	12	12	100,00%
3 Pembayaran tenaga non-PNS PHL				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16.500.000,00	13.500.000,00	81,82%				
1 Bimtek/Workshop/Seminar/Lokakarya				OA	2	2	100,00%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	642.366.000,00	614.616.816,00	95,68%				
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.000.000,00	15.092.000,00	94,33%				
1 Penyediaan alat listrik				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	209.292.500,00	208.367.077,00	99,56%				
1 Pakaian Kerja dan kelengkapannya				paket	2	2	100,00%
2 Pengadaan PDL				paket	121	121	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	155.950.000,00	140.840.503,00	90,31%				
1 Alat Tulis Kantor				paket	51	51	100,00%
2 Layanan penyediaan makanan dan minuman rapat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.200.000,00	33.379.100,00	89,73%				
1 Layanan cetak dan penggandaan dokumen				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	13.125.000,00	12.879.600,00	98,13%				
1 Layanan penyediaan makanan dan minuman tamu				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	164.852.000,00	160.718.590,00	97,49%				
1 Layanan Perjalanan Dinas Dalam Daerah				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2 Layanan Perjalanan Dinas Luar Daerah				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	450.000,00	450.000,00	100,00%				
1 Pengelolaan arsip dan perpustakaan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	45.496.500,00	42.889.946,00	94,27%				
1 Pengelolaan informasi dan dokumen PD				bulan	12	12	100,00%
2 Pengelolaan website PD				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	122.875.460,00	114.425.000,00	93,12%				
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	122.875.460,00	114.425.000,00	93,12%				
1 Filling Cabinet				unit	10	10	100,00%
2 Komputer				unit	2	2	100,00%
3 Laptop				unit	1	1	100,00%
4 Rak Arsip				unit	3	3	100,00%
# Printer				unit	4	4	100,00%
# Scanner				unit	1	1	100,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	685.026.923,00	552.762.407,00	80,69%				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.184.500,00	17.536.225,00	91,41%				
1 Layanan Surat Menyurat				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	228.000.000,00	136.623.197,00	59,92%				
1 Pembayaran jasa langganan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	437.842.423,00	398.602.985,00	91,04%				
1 Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	845.657.330,00	767.754.395,00	90,79%				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	668.502.330,00	593.164.395,00	88,73%				
1 Layanan pemeliharaan kendaraan dinas				bulan	12	12	100,00%
2 Layanan penyediaan BBM kendaraan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	10.975.000,00	10.625.000,00	96,81%				
1 Layanan Pemeliharaan Mebeleur				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.930.000,00	60.277.000,00	97,33%				
1 Pemeliharaan peralatan kerja				unit	88	88	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	104.250.000,00	103.688.000,00	99,46%				
1 Acrylic Nama Dishub				paket	1	1	100,00%
2 Pemel gedung Dishub				paket	5	5	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	17.621.975.668,00	16.481.494.865,17	93,53%				
1 Persentase ketersediaan Sarpras perhubungan				%	31	38,46	124,06%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2 Rasio konektivitas kabupaten/kota				Rasio	50	50	100,00%
3 Accident Rate				kejadian per kilometer	2,293	3,321	55,17%
4 Tingkat pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan				%	21,00	22,44	106,86%
5 Kinerja lalu lintas kabupaten/kota				Rasio	<0,6	0,49	100,00%
6 Persentase lokasi parkir yang berizin				%	78,25	93,33	119,27%
7 Persentase terlaksananya pelayanan uji kendaraan berkala				%	53,50	54,42	101,72%
Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	49.924.800,00	47.982.394,00	96,11%				
Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	49.924.800,00	47.982.394,00	96,11%				
1 Dokumen rencana jalur sepeda				dokumen	1	1	100,00%
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	10.702.687.438,00	10.167.880.327,17	95,00%				
Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.452.419.395,00	1.276.196.345,00	87,87%				
1 Cermin Cembung				unit	10	10	100,00%
2 Cermin Cembung				unit	276	276	100,00%
3 Cermin Cembung (tambahan)				unit	100	100	100,00%
4 Zona Selamat Sekolah				unit	1	1	100,00%
5 Pengadaan pagar pengaman jalan				lokasi	3	3	100,00%
6 Pengadaan Zona Selamat Sekolah				unit	2	2	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	5.797.734.323,00	5.624.786.960,17	97,02%				
1 Dokumen perencanaan LPJU permukiman				kelurahan	3	3	100,00%
2 Dokumen perencanaan LPJU ruas jalan				ruas jalan	15	15	100,00%
3 Konsultan Pengawas Pemasangan LPJU Permukiman				paket	2	2	100,00%
4 Konsultan Pengawas Pemasangan LPJU Ruas jalan (5 ruas jalan)				paket	5	5	100,00%
5 Konsultan Pengawas Pemasangan LPJU Tenaga Surya (Paket 1&2)				paket	2	2	100,00%
6 LED 90 Watt Non Smart				unit	45	45	100,00%
7 Meterisasi PJU Permukiman				paket	1	1	100,00%
8 Pemasangan LPJU Permukiman				unit	225	225	100,00%
9 Pemasangan LPJU Permukiman Paket 1				kelurahan	1	1	100,00%
# Pemasangan LPJU Permukiman Paket 2				kelurahan	1	1	100,00%
# Pemasangan LPJU Permukiman Paket 3				titik	30	30	100,00%
# Pemasangan LPJU ruas jalan Paket 1				titik	26	26	100,00%
# Pemasangan LPJU ruas jalan Paket 2				titik	55	55	100,00%
# Pemasangan LPJU ruas jalan Paket 3				titik	55	55	100,00%
# Pemasangan LPJU ruas jalan Paket 4				titik	55	55	100,00%
# Pemasangan LPJU ruas jalan Paket 5				titik	55	55	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
# Pemasangan LPJU ruas jalan Paket 6				titik	10	10	100,00%
# Pembangunan/ Pemasangan PJU Tenaga Surya Paket 1				titik	10	10	100,00%
# Pembangunan/ Pemasangan PJU Tenaga Surya Paket 2				titik	10	10	100,00%
# Pembangunan/ Pemasangan PJU Tenaga Surya Paket 3				titik	10	10	100,00%
# Pembangunan/ Pemasangan PJU Tenaga Surya Paket 4				titik	10	10	100,00%
# Pengadaan Lampu LED 90 W				unit	29	29	100,00%
Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	27.456.470,00	23.787.920,00	86,64%				
1 Terpeliharanya fasilitas sarana dan prasarana jalan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	3.425.077.250,00	3.243.109.102,00	94,69%				
1 Pemeliharaan LPJU				titik	2950	3873	131,29%
2 Pengadaan bahan khusus LPJU				bulan	12	12	100,00%
3 Survey dan monitoring LPJU				bulan	12	12	100,00%
4 Kabel				meter	3000	3000	100,00%
5 KWh meter				unit	6	6	100,00%
6 Pengadaan LED 90 W				unit	25	25	100,00%
7 Pengadaan Tiang				unit	25	25	100,00%
Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	559.151.825,00	536.147.547,00	95,89%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	259.151.825,00	241.375.682,00	93,14%				
1 Pengelolaan Terminal				terminal	4	4	100,00%
2 Pengadaan Laptop				unit	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	300.000.000,00	294.771.865,00	98,26%				
1 Pemeliharaan gedung terminal Pakem				paket	1	1	100,00%
2 Pemeliharaan jalan terminal				paket	1	1	100,00%
3 Pemeliharaan pagar terminal Condat				paket	1	1	100,00%
Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	2.490.166.400,00	2.164.611.143,00	86,93%				
Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	619.640.750,00	420.515.764,00	67,86%				
1 Gembok kendaraan besar				buah	12	12	100,00%
2 Jasa Konsultasi Survei Potensi Parkir				ls	1	1	100,00%
3 Pengembangan SIM Parkir				paket	1	1	100,00%
4 Terinventarisnya lokasi parkir di seluruh Kabupaten Sleman				kapanewon	17	17	100,00%
5 Terlaksananya pelayanan perizinan parkir berbasis teknologi informasi				kapanewon	17	17	100,00%
6 Terlaksananya sosialisasi parkir di seluruh Kabupaten Sleman				kapanewon	17	17	100,00%
7 Paket sembako untuk masyarakat tertentu				paket	1200	30	2,50%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1.870.525.650,00	1.744.095.379,00	93,24%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Laptop				unit	1	1	100,00%
2 Papan Informasi Parkir				unit	28	28	100,00%
3 Pembinaan Perparkiran				bulan	12	12	100,00%
4 Pengawasan penyelenggaraan perparkiran				bulan	12	12	100,00%
5 Penyelenggaraan perizinan perparkiran				rekomendasi	510	476	93,33%
6 Printer				unit	1	1	100,00%
7 Stick lamp				buah	200	200	100,00%
8 Kamera				unit	1	1	100,00%
9 Komputer				unit	1	1	100,00%
# Penyusunan Naskah Akademik Parkir				ls	1		0,00%
Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.378.861.765,00	1.248.623.774,00	90,55%				
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.130.706.265,00	1.024.325.000,00	90,59%				
1 Pengadaan Smart Card				buah	12000	12000	100,00%
2 Pengembangan Sistem PKB				ls	1	1	100,00%
3 Pengujian Kendaraan Bermotor				kendaraan	22000	20674	93,97%
4 Pengadaan Komputer				unit	1	1	100,00%
5 Pengadaan Laptop				unit	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
6 Pengadaan meja kursi (untuk helpdesk)				unit	1	1	100,00%
7 Pengadaan printer smart card				unit	2	2	100,00%
# Pengadaan printer				unit	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	43.595.500,00	40.025.375,00	91,81%				
1 Pengujian Kelayakan Angkutan Wisata di Sekolah				kendaraan	275	501	182,18%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	204.560.000,00	184.273.399,00	90,08%				
1 Belanja UPS				unit	10	10	100,00%
2 Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor				kali	1	1	100,00%
3 Pemeliharaan Alat Uji				paket	1	1	100,00%
4 Perawatan Genset				ls	1	1	100,00%
Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.427.080.700,00	1.390.299.831,00	97,42%				
Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	82.176.000,00	75.974.850,00	92,45%				
1 Jasa konsultasi dokumen perencanaan DRK Kabupaten Sleman				paket	1	1	100,00%
2 Kampanye keselamatan lalu lintas				kali	1	1	100,00%
3 Pengamatan, pengawasan dan pemantauan keselamatan jalan				kali	20	20	100,00%
Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1.086.646.000,00	1.066.934.610,00	98,19%				
1 Marka Jalan				m2	300	300	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2 Mesin Cutting Plat				unit	1	1	100,00%
3 Mesin Cutting Stiker				unit	0	0	
4 Pengadaan Alat Pemantau Kecepatan Volume Kendaraan di Jalan				unit	1	1	100,00%
5 Pengadaan pipa rambu, semen, sekrup dll				paket	0	0	
6 Pengadaan Plat				unit	0	0	
7 Pengadaan Rambu				unit	4	4	100,00%
8 Pengadaan Rambu Lalu Lintas				unit	40	40	100,00%
9 Pengadaan RPPJ				unit	1	1	100,00%
# Pengadaan Stiker Rambu Tipe IV (Sesuai Warna Rambu)				unit	2	2	100,00%
# Suku Cadang Kamera Pemantau ATCS untuk S.4 Santikara dan Kolombo				unit	2	2	100,00%
# Toolkits Pemeliharaan LL, APILL dan Flashing				paket	1	1	100,00%
# Battery Deep				unit	28	28	100,00%
# Pembatas kecepatan portable				meter	36	36	
# Pengadaan Rambu Lalin				unit	8	8	
# Pengadaan stiker rambu 2 warna				unit	0	0	
# Cermin Cembung				unit	60	60	100,00%
# Suku Cadang Rambu Rambu Lalu Lintas				paket	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	39.603.900,00	39.335.042,00	99,32%				
1 Koordinasi Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi				kali	12	23	191,67%
Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	218.654.800,00	208.055.329,00	95,15%				
1 DED Taman Edukasi Lalu Lintas				paket	1	1	100,00%
2 Sosialisasi tiblantas				kali	5	5	100,00%
Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	85.336.300,00	82.642.614,00	96,84%				
Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	21.150.000,00	21.115.025,00	99,83%				
1 Penetapan Kebijakan tata kelola Andalalin				kali	10	16	160,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	37.936.300,00	36.263.630,00	95,59%				
1 Koordinasi dan Sinkronisasi penilaian hasil Andalalin				kali	12	20	166,67%
Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	26.250.000,00	25.263.959,00	96,24%				
1 Pengawasan Andalalin jalan kabupaten				kali	12	11	91,67%
Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	576.238.450,00	567.848.106,00	98,54%				
Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	575.338.450,00	567.398.118,00	98,62%				
1 Non PNS Pengatur lalu Lintas				orang	12	12	100,00%
2 Operasional Car Free Day (CFD)				kali	0	0	0,00%
3 Pembinaan Jeep Wisata				kali	30	38	126,67%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
4 Pengamanan LL dengan Satgas Khusus				kali	78	57	73,08%
5 Pengamanan Pemberangkatan dan Pemulangan Haji				PP	0	0	0,00%
6 Pengawasan Andalalin				kali	0	0	0,00%
7 Pengawasan dan pemeriksaan kendaraan bermotor				kali	11	11	100,00%
8 Peninjauan Pengendalian dan Pengawasan LL				kali	56	64	114,29%
9 Pengadaan HT				unit	15	15	100,00%
# Pengadaan Rig				unit	1	1	100,00%
# Pengadaan Sound System				unit	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	900.000,00	449.988,00	50,00%				
1 Pelaksanaan rapat				kali	1	1	100,00%
Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	341.652.990,00	271.944.129,00	79,60%				
Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	341.652.990,00	271.944.129,00	79,60%				
1 Monitoring angkutan lebaran, natal dan tahun baru				hari	20	24	120,00%
2 Tenda posko				unit	1	1	100,00%
3 Velbed/ Tempat tidur lipat				buah	10	10	100,00%
Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.875.000,00	3.515.000,00	32,32%				
Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10.875.000,00	3.515.000,00	32,32%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Penertiban rekomendasi angkutan				rekomendasi	10	17	170,00%





**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2022**

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	30.512.612.963,00	29.699.245.777,60	97,33%				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15,214,298,988.00	14,755,210,764.00	96.98%				
1. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran;				%	100,00	100,00	100,00%
2. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37,831,500.00	37,707,940.00	99.67%				
Sub Kegiatan Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17,700,000.00	17,695,240.00	99.97%				
1. dokumen Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
2. dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
3. dokumen Perubahan Renja				dokumen	1	1	100,00%
4. dokumen Renja				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	2,430,000.00	2,417,320.00	99.48%				
1. dokumen RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,475,000.00	2,394,400.00	96.74%				
1. dokumen Perubahan RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,414,025.00	2,398,880.00	99.37%				
1. dokumen DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1,884,450.00	1,884,400.00	100.00%				
1. dokumen Perubahan DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,928,025.00	10,917,700.00	99.91%				
1. dokumen Laporan Evaluasi Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
2. dokumen Pengendalian dan Evaluasi terhadap Hasil Perencanaan Renja				dokumen	1	1	100,00%
3. dokumen Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja				dokumen	1	1	100,00%
4. dokumen Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja				dokumen	4	4	100,00%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,446,798,773.00	5,221,225,145.00	95.86%				
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,206,841,023.00	4,988,518,642.00	95.81%				
1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan				bulan	12	12	100,00%
2. Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah				Triwulan	4	4	100,00%
3. Pembayaran iuran BPJS				bulan	12	12	100,00%
4. Pembayaran TPP				bulan	12	12	100,00%
5. Pembayaran Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	227,495,000.00	220,257,903.00	96.82%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1. Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12,462,750.00	12,448,600.00	99.89%				
1. dokumen laporan aset/BMD semesteran				dokumen	2	2	100,00%
2. dokumen laporan keuangan semesteran				dokumen	2	2	100,00%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	112,367,450.00	101,605,710.00	90.42%				
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	112,367,450.00	101,605,710.00	90.42%				
1. Laporan Pelaksanaan Roadmap reformasi birokrasi				dokumen	1	1	100,00%
2. Layanan administrasi kepegawaian				bulan	12	12	100,00%
3. Lisensi pilot Drone				orang	3	0	0,00%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	273,730,260.00	273,250,513.00	99.82%				
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4,381,470.00	4,380,000.00	99.97%				
1. Alat Listrik				unit	8	8	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74,343,690.00	74,290,255.00	99.93%				
1. Alat Tulis Kantor				paket	1	1	100,00%
2. Layanan penyediaan makanan dan minuman rapat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9,499,950.00	9,457,000.00	99.55%				
1. Layanan cetak dan penggandaan dokumen				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	12,750,000.00	12,729,750.00	99.84%				
1. Layanan makan dan minum tamu				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultan SKPD	154,032,000.00	153,916,508.00	99.93%				
1. Layanan perjalanan dinas dalam daerah				bulan	12	12	100,00%
2. Layanan Perjalanan dinas luar daerah				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5,670,225.00	5,471,000.00	96.49%				
1. Pengelolaan arsip dan perpustakaan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13,052,925.00	13,006,000.00	99.64%				
1. Pengelolaan informasi dan dokumen PD				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8,956,873,005.00	8,735,534,362.00	97.53%				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,021,125.00	8,020,960.00	100.00%				
1. Layanan Surat Menyurat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	8,694,140,000.00	8,479,782,482.00	97.53%				
1. Pembayaran Free Wifi Padukuhan				bulan	12	12	100,00%
2. Pembayaran Jasa Langganan Internet				bulan	12	12	100,00%
3. Pembayaran Jasa Langganan Telepon, Listrik dan Surat Kabar				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	254,711,880.00	247,730,920.00	97.26%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1. Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	386,698,000.00	385,878,094.00	99.79%				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	222,113,000.00	207,263,904.00	93.31%				
1. Layanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas				bulan	12	12	100,00%
2. Layanan Penyediaan BBM Kendaraan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	5,000,000.00	4,910,000.00	98.20%				
1. Layanan Pemeliharaan Meubeler				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56,185,000.00	55,968,050.00	99.61%				
1. Pemeliharaan/ Perbaikan Peralatan Kerja				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	103,400,000.00	103,275,060.00	99.88%				
1. Pemeliharaan Gedung Kantor				bulan	12	12	100,00%
PROGRAM KOMUNIASI DAN INFORMASI PUBLIK	3,715,435,800.00	3,558,549,080.00	95.78%				
1. Persentase Aduan Masyarakat terlayani				%	100,00	100,00	100,00%
2. Presentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten				%	75,00	75,00	100,00%
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	3,715,435,800.00	3,558,549,080.00	95.78%				
Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	807,826,825.00	772,006,750.00	95.57%				
1. Desain Grafis Porda				paket	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2. Film/ Video promosi dan publikasi PORDA				paket	2	2	100,00%
3. Liputan Harian media cetak/ online				kali	6	6	100,00%
4. Monitoring dan evaluasi konten website				PD	48	40	100,00%
5. Pengelolaan media center daerah				bulan	12	12	100,00%
6. Pengelolaan media sosial (twitter, facebook, dan instagram)				bulan	12	12	100,00%
7. Publikasi Radio				media	10	10	100,00%
8. Publikasi Televisi Lokal				kali	4	4	100,00%
9. Publikasi Videotron				kali	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	24,750,000.00	24,749,860.00	100.00%				
1. dokumen Monev Pelayanan Informasi Publik				dokumen	12	12	100,00%
2. Pembinaan PPID Pembantu				PD	48	48	100,00%
Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	2,334,860,000.00	2,227,132,050.00	95.39%				
1. Advertorial media (PORDA)				media	5	5	100,00%
2. Baliho				buah	15	15	100,00%
3. Banner PORDA				unit	205	205	100,00%
4. buku Kerja				buku	50	50	100,00%
5 Foto Artistik				paket	5	5	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
6 Iklan Layanan Masyarakat				kali	3	3	100,00%
7. Jumpa Pers				kali	6	6	100,00%
8. Jumpa Pers PORDA				media	25	25	100,00%
9. Kalender Dinding				eksemplar	10000	10000	100,00%
# Kalender Meja				eksemplar	2000	2000	100,00%
11. Penayangan videotron dan media sosial				kali	250	250	100,00%
12. Pers Tour Kecamatan				kali	2	2	100,00%
13. Poster				lembar	4000	4000	100,00%
14. Produksi penayangan hari jadi Sleman				paket	1	1	100,00%
15. Publikasi Kebijakan oleh wartawan				kali	1	1	100,00%
16. Publikasi kebijakan Pemerintah Daerah di Kelurahan Trihanggo				Media	2	2	100,00%
17. Publikasi LPPD				paket	1	1	100,00%
18. Publikasi Media Online 1				paket	2	2	100,00%
19. Publikasi Media Online 2				paket	4	4	100,00%
20. Publikasi Media Sosial (FB, IG)				paket	2	2	100,00%
21. Spanduk				buah	279	279	100,00%
22. Spanduk PORDA				unit	200	200	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
23. Videotron PORDA				kali	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Manajemen Komunikasi Krisis	413,004,000.00	400,190,560.00	96.90%				
1. dokumen aduan/ keluhan				dokumen	12	12	100,00%
2 Optimalisasi Pengelolaan Pengaduan				kali	1	1	100,00%
3. Pelayanan Aduan ke Pemkab Sleman				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	90,000,000.00	89,939,980.00	99.93%				
1. Bimtek Medsos OPD				kali	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	44,994,975.00	44,529,880.00	98.97%				
1.Pembinaan Komunitas				Komunitas	1	1	100,00%
2. Pendampingan KIM				Kelompok	15	15	100,00%
3. Pendampingan KIM tingkat Desa				Kecamatan	17	17	100,00%
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	11,195,614,275.00	9,759,512,906.60	87.17%				
1. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi				%	50,00	50,00	100,00%
2. Persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo				%	100,00	100,00	100,00%
3. Persentase free wifi padukuhan				%	92,33	92,33	100,00%
Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	4,235,692,850.00	4,212,654,393.60	99.46%				
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	4,235,692,850.00	4,212,654,393.60	99.46%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1. Pemasangan WiFi DPRD				paket	1	1	100,00%
2. Pembangunan fasilitas free wifi wilayah Sleman Barat				paket	1	1	100,00%
3. Pembangunan fasilitas free wifi wilayah Sleman Tengah				paket	1	1	100,00%
4. Pembangunan fasilitas free wifi wilayah Sleman Timur				paket	1	1	100,00%
5. Pengembangan CCTV publik				titik	25	25	100,00%
6. Pemasangan CCTV				paket	1	1	100,00%
7. Pengembangan jaringan internet SMP wilayah Sleman Barat Utara				paket	1	1	100,00%
8. Pengembangan jaringan internet Kapanewon				paket	1	1	100,00%
9. Pengembangan jaringan internet SMP wilayah Sleman Barat				paket	1	1	100,00%
# Pengembangan Jaringan internet SMP wilayah Sleman Timur				paket	1	1	100,00%
11. Pengembangan Jaringan LAN				titik	1	1	100,00%
# Pengembangan jaringan wifi RSUD Sleman				paket	1	1	100,00%
# Pengembangan wifi dan CCTV Taman Deggung				paket	1	1	100,00%
14. Sarpras kelengkapan zoom di ruang komisi DPRD				paket	4	4	100,00%
15. Sistem keamanan CCTV Publik				paket	1	1	100,00%
# Video Treaser wifi padukuhan				paket	1	1	100,00%
Kegiatan Pengelolaan e-government Di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	6,959,921,425.00	6,798,377,880.00	97.68%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	332,503,950.00	320,466,435.00	96.38%				
1. Optimalisasi Konten website				domain	1	1	100,00%
2. Pendampingan implementasi sistem informasi				bulan	12	12	100,00%
3. Pengelolaan Informasi broadcast				Sender ID	6	6	100,00%
4. Pengelolaan SMS Gateway				bulan	12	12	100,00%
5. Video Sleman Cerdas				paket	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	4,344,510,725.00	4,248,610,084.00	97.79%				
1 Annual license Nutanix				paket	1	1	100,00%
2. Hyper converge server				paket	1	1	100,00%
3 License Sangor database security patch				paket	1	1	100,00%
4. Operasional Data Center				bulan	12	12	100,00%
5 Sistem Backup server/ storage				paket	1	1	100,00%
6. Sistem back up server/ storage				paket	1	1	100,00%
7. SPBE				Ls	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1,029,879,025.00	1,005,951,070.00	97.68%				
1. dokumen Perangkat Telekomunikasi				dokumen	1	1	100,00%
2. Pemeliharaan CCTV				bulan	6	6	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
3 Pemeliharaan FO				paket	1	1	100,00%
4. Pemeliharaan finger print SKPD				bulan	6	6	100,00%
5. Pemeliharaan jaringan LAN SKPD/ Desa				bulan	6	6	100,00%
6. Pemeliharaan Komputer				bulan	1	1	100,00%
7. Pemeliharaan perangkat wireless SKPD/ Desa				bulan	6	6	100,00%
8. Pemeliharaan Tower/ Grounding				bulan	5	5	100,00%
9. Pemeliharaan VoIP				bulan	4	4	100,00%
# Pemeliharaan wifi padukuhan				paket	1	1	100,00%
11. Pengadaan suku cadang free wifi padukuhan				paket	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	68,284,900.00	67,038,450.00	98.17%				
1. Pengelolaan laboratorium komputer				bulan	12	12	100,00%
2. Pengelolaan Smart Room				bulan	12	12	100,00%
3. Wall Display ruang rapat gedung bupati				paket	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	420,953,450.00	415,617,921.00	98.73%				
1. Pengelolaan Aplikasi Layanan Pemerintahan				bulan	12	9	75,00%
2. Pengelolaan Jenis Pajak Yang Dapat Dibayarkan Online Melalui Bank				pajak	10	10	100,00%
3. Pengelolaan Jumlah Bank Penerima Pembayaran Pajak Sleman				bank	5	5	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
4. Pengelolaan Sistem Data Base				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	763,789,375.00	731,693,920.00	95.80%				
1. Fasilitasi pengurusan ijin bagi komunitas radio				izin	10	10	100,00%
2. Pemeliharaan Repeater				paket	1	1	100,00%
3. Pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi				menara	400	200	50,00%
4. Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi				menara	400	400	100,00%
5. Perangkat Repeater				paket	5	5	100,00%
6. Seminar/bimtek kewirausahaan digital				kali	2	2	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORATL	203,626,325.00	203,469,260.00	99.92%				
1. Presentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah				%	100,00	100,00	18,00%
2. Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	203,626,325.00	203,469,260.00	99.92%				
Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	105,234,000.00	105,218,920.00	99.99%				
1. Analisis Nilai Tukar Petani				dokumen	1	1	100,00%
2. Indeks Gini				dokumen	1	1	100,00%
3. Leaflet				lembar	500	500	100,00%
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	4,569,825.00	4,569,800.00	100.00%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1. Bimbingan Teknis Statistik Sektoral				kali	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik	81,860,200.00	81,718,420.00	99.83%				
1. Monitoring dan Evaluasi Statistik Sektoral				kali	1	1	100,00%
2. Survei				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	11,962,300.00	11,962,120.00	100.00%				
1. Kompilasi Produk Administrasi				dokumen	1	1	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	183,637,575.00	179,993,400.00	98.02%				
1. Tingkat keamanan informasi pemerintah							
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	183,637,575.00	179,993,400.00	98.02%				
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	183,637,575.00	179,993,400.00	98.02%				
1. dokumen Pengaman Informasi				dokumen	1	1	100,00%
2. Jasa Relay Email				paket	1	1	100,00%





**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2022**

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	12.754.980.347,00	11.751.159.042,40	92,13%				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	12.754.980.347,00	11.751.159.042,40	92,13%				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.065.144.164,00	5.798.817.347,20	95,61%				
1 Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				%	100,00	100,00	100,00%
2 Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja				%	100	100	100,00%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	227.310.225,00	189.175.950,00	83,22%				
1 dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				dokumen	15	15	100,00%
Sub Kegiatan Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	190.828.600,00	158.967.925,00	83,30%				
1 dokumen Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
2 dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
3 dokumen Rencana Kerja				dokumen	1	1	100,00%
4 dokumen Perubahan Rencana Kerja				dokumen	1	1	100,00%
5 dokumen Perubahan Renstra				dokumen	1	1	100,00%
6 Kajian Raperda Pengembangan UMKM				dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
7 Roadmap Pengembangan KUKM (Koperasi UKM)				dokumen	1	1	100,00%
8 Factory Sharing Pengolahan Susu				bulan	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA SKPD	2.149.425,00	2.014.425,00	93,72%				
1 dokumen RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	2.149.425,00	1.399.425,00	65,11%				
1 dokumen Perubahan RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	2.107.800,00	1.692.075,00	80,28%				
1 dokumen DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	2.850.000,00	1.613.025,00	56,60%				
1 dokumen Perubahan DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.224.975,00	23.489.075,00	86,28%				
1 Laporan Tahunan				dokumen	1	1	100,00%
2 dokumen LAKjIP				dokumen	1	1	100,00%
3 dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD				dokumen	1	1	100,00%
4 dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja				dokumen	4	4	100,00%
5 dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap Kebijakan Renja SKPD				dokumen	1	1	100,00%
6 dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan				dokumen	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.397.076.361,00	4.362.039.391,00	99,20%				
1 Laporan Keuangan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.219.053.888,00	4.188.756.116,00	99,28%				
1 PNS Dinas Koperasi UKM Sleman				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	168.775.018,00	164.575.225,00	97,51%				
1 Pembayaran honorarium pengelola keuangan/barang				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	9.247.455,00	8.708.050,00	94,17%				
1 Laporan aset/BMD Semester I dan Semester II				dokumen	2	2	100,00%
2 Laporan Keuangan				bulan	12	12	100,00%
3 Laporan Keuangan Semester I dan Semester II				dokumen	2	2	100,00%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	62.181.528,00	57.640.637,00	92,70%				
1 Layanan Administrasi Kepegawaian dan pembayaran tenaga non PNS/ PHL				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	62.181.528,00	57.640.637,00	92,70%				
1 Pembinaan Pegawai				kali	4	4	100,00%
2 Pengelolaan kepegawaian				Orang	55	55	100,00%
3 Pengiriman peserta bimtek, workshop, seminar, diklat				Orang	3	3	100,00%
4 Bimtek				kali	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	452.254.745,00	432.696.339,00	95,68%				
1 Layanan Administrasi Umum				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.325.445,00	32.380.329,00	97,16%				
1 Penyediaan kebutuhan alat kantor				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.735.000,00	8.824.609,00	90,65%				
1 Pengadaan alat rumah tangga				Jenis	4	4	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	143.835.542,00	142.889.667,00	99,34%				
1 Layanan penyediaan makan dan minuman rapat				bulan	12	12	100,00%
2 Penyediaan ATK				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.838.078,00	23.100.025,00	96,90%				
1 Layanan cetakan dan penggandaan dokumen				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	240.000,00	240.000,00	100,00%				
1 Pengadaan buku perpustakaan				Paket	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	24.605.000,00	21.903.000,00	89,02%				
1 Layanan makan minuman tamu				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123.326.610,00	122.417.719,00	99,26%				
1 Layanan perjalanan dinas dalam daerah				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2 Layanan perjalanan dinas luar daerah				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	26.468.770,00	19.677.990,00	74,34%				
1 Pengelolaan arsip dan perpustakaan perangkat daerah				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	66.880.300,00	61.263.000,00	91,60%				
1 Pengelolaan informasi dan dokumentasi perangkat daerah				bulan	12	12	100,00%
2 dokumen laporan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi yang dimonitoring kewenangan perangkat daerah				dokumen	1	1	100,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	504.291.082,00	421.911.579,20	83,66%				
1 Layanan Jasa Penunjang				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa surat Menyurat	10.450.000,00	10.450.000,00	100,00%				
1 Layanan jasa surat menyurat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.060.000,00	72.137.098,00	72,82%				
1 Pembayaran Jasa Langganan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	394.781.082,00	339.324.481,20	85,95%				
1 Jasa pengemudi kantor				bulan	12	12	100,00%
2 Pelayanan keamanan kantor				bulan	12	12	100,00%
3 Pelayanan kebersihan kantor				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	422.030.223,00	335.353.451,00	79,46%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Layanan pemeliharaan BMD				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	212.035.473,00	149.251.776,00	70,39%				
1 Layanan pemeliharaan kendaraan dinas				bulan	12,00	12	100,00%
2 Layanan penyediaan BBM kendaraan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	24.888.175,00	23.735.675,00	95,37%				
1 Layanan pemeliharaan meubelair				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.970.000,00	47.168.550,00	76,12%				
1 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	123.136.575,00	115.197.450,00	93,55%				
1 Pemeliharaan gedung beserta sarana pendukung lainnya				bulan	12	12	100,00%
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	29.400.000,00	20.514.135,00	69,78%				
1 Persentase KSP/USP Koperasi yang memiliki Izin				%	19,61	25,87	131,92%
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	29.400.000,00	20.514.135,00	69,78%				
1 Jumlah Koperasi yang difasilitasi ijin usahanya				Koperasi	10	13	130,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	29.400.000,00	20.514.135,00	69,78%				
1 Pendampingan OSS				Koperasi	5	8	160,00%
2 Penumbuhan koperasi sektor real				Koperasi	5	5	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	20.949.564,00	20.272.050,00	96,77%				
1 Persentase koperasi aktif				%	76,5	77,8	101,70%
Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.949.564,00	20.272.050,00	96,77%				#DIV/0!
1 Jumlah Koperasi yang diperiksa kepatuhannya				Koperasi	15	15	100,00%
Sub Kegiatan Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota	20.949.564,00	20.272.050,00	96,77%				
1 Workshop pengawasan koperasi				Koperasi	40	40	100,00%
2 Koperasi yang diperiksa kepatuhannya				Koperasi	15	15	100,00%
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	157.371.756,00	131.833.955,00	83,77%				
1 Persentase KSP/USP Koperasi sehat				%	14,75	16	108,47%
Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	157.371.756,00	131.833.955,00	83,77%				
1 Koperasi yang dinilai kesehatannya				Koperasi	100	75	75,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota	157.371.756,00	131.833.955,00	83,77%				
1 Koperasi yang dinilai kesehatannya				Koperasi	75	75	100,00%
2 dokumen data hasil identifikasi koperasi yang akan dibubarkan oleh pemerintah				dokumen	1	1	100,00%
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	855.323.890,00	762.205.046,00	89,11%				
1 Persentase Pengelola koperasi yang bersertifikasi				%	22,31	22,68	101,66%
Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	855.323.890,00	762.205.046,00	89,11%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Jumlah Peserta Pelatihan dan Sosialisasi				orang	200	240	120,00%
Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	855.323.890,00	762.205.046,00	89,11%				
1 Pelatihan kompetensi bagi KSP/USP koperasi (Berbah, Trimulyo)				orang	75	75	100,00%
2 Pelatihan Pengurus dan Pengawas Koperasi (Donoharjo, Sariharjo)				orang	40	40	100,00%
3 Pendampingan koperasi (Maguwoharjo, Tlogoadi, Sidokarto)				orang	45	45	100,00%
4 Peserta pelatihan kompetensi bagi KSP/USP Koperasi (DAK)				orang	75	75	100,00%
5 Peserta pelatihan pengurus dan pengawas (2 angkatan)				orang	50	50	100,00%
6 Peserta sosialisasi perkoperasian				orang	200	400	200,00%
7 Sistem Akuntansi Koperasi				Paket	1	1	100,00%
8 Workshop bagi koperasi				Koperasi	75	75	100,00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	393.668.212,00	365.453.110,00	92,83%				
1 Persentase peningkatan volume usaha koperasi				%	1,7	-18,04	-1061,18%
Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	393.668.212,00	365.453.110,00	92,83%				
1 Jumlah Koperasi yang difasilitasi				Koperasi	20	20	100,00%
Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	393.668.212,00	365.453.110,00	92,83%				
1 Koperasi yang dinilai prestasinya				Koperasi	15	16	106,67%
2 Penerima dana penguatan modal yang dimonitor				Koperasi	20	20	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
3 Permohonan dana penguatan modal yang diverifikasi				Koperasi	12	12	100,00%
4 Peserta Forum Komunikasi Koperasi				Koperasi	170	170	100,00%
5 Peserta Workshop Pengembangan Usaha				Koperasi	40	40	100,00%
6 Bimtek Dana Penguatan Modal				Koperasi	30	30	100,00%
7 Workshop Hari Koperasi Tingkat Kabupaten Sleman				orang	125	125	100,00%
8 Pendampingan Koperasi Modern				Koperasi	2	2	100,00%
9 Pengembangan Aplikasi Analisis Dana Penguatan Modal				Paket	1	1	100,00%
10 Pengembangan Koperasi Sektor Rii				kali	1	1	100,00%
11 Factory Sharing Pengolahan Susu				kali	1	1	100,00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	4.073.057.464,00	3.542.802.051,20	86,98%				
1 Jumlah Pelaku Usaha Mikro Baru yang Berijin				UMKM	500	1003	200,60%
Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, penguatan kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan	4.073.057.464,00	3.542.802.051,20	86,98%				
1 Jumlah UMKM terdata				UMKM	500	1003	200,60%
Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1.603.294.627,00	1.588.985.362,00	99,11%				
1 Sistem Satu Data dan Bimtek Operator Sistem (bagi 86 Kalurahan dan 17 Kapanewon)				Sistem	1	1	100,00%
				kali	2	2	100,00%
2 Bimtek dan Pelatihan DAK - @25 orang				Angkatan	3	3	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
3 Bimtek Pengembangan Kapasitas SDM Pengelola Usaha dan Anggota BUMDes (Kalurahan Sendangrejo)				orang	20	20	100,00%
4 Fasilitasi pengembangan usaha KK miskin dan masyarakat pelaku usaha melalui Bimtek peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Pengelola Usaha (Kap Minggir)				orang	20	20	100,00%
5 Bimtek Pengembangan Kapasitas SDM Pengelola Usaha dan Anggota BUMDes (Kalurahan Sidomoyo)				orang	20	20	100,00%
6 Bimtek Pengembangan Diri dan manajemen usaha bagi pelaku UMKM (Kap Kalasan)				orang	20	20	100,00%
7 Bimtek Kewirausahaan (Bokoharjo)				orang	20	20	100,00%
8 Bimtek AMT Bagi anggota forkom UMKM Moyudan - (Kap Moyudan)				orang	20	20	100,00%
9 Bimtek Pengembangan Kapasitas SDM Pengelola Usaha dan Anggota BUMDes (Kap Moyudan)				orang	40	40	100,00%
10 Bimtek Pengembangan Kapasitas SDM Pengelola Usaha dan Anggota BUMDes (Sendangtirta)				orang	20	20	100,00%
11 Bimtek Pengembangan Kapasitas SDM Pengelola Usaha dan Anggota BUMDes (Kalurahan Wukirsari)				orang	20	20	100,00%
12 Bimtek Pengembangan Kapasitas SDM Pengelola Usaha dan Anggota BUMDes (Kalurahan Sardonoharjo)				orang	20	20	100,00%
13 Bimtek Pengembangan Kapasitas SDM Pengelola Usaha dan Anggota BUMDes (Kalurahan Bimomartani)				orang	20	20	100,00%
14 Workshop Kewirausahaan Pemuda (POKIR)				Angkatan	13	13	100,00%
15 Workshop dan Bimtek Digital Marketing serta pembuatan website @50 orang				Angkatan	2	2	100,00%
16 Inkubator kewirausahaan (POKIR)				orang	20	20	100,00%
17 dokumen tindak Lanjut Kajian UMKM Naik Kelas				dokumen	1	1	100,00%
18 Pendataan Lengkap KUMKM				bulan	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui kemitraan Usaha Mikro	303.353.642,00	292.546.186,00	96,44%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Bimtek Pemasaran online dan temu usaha perdagangan mikro kecil dan warga miskin (PUPM-Kalurahan Sendangrejo)				orang	20	20	100,00%
2 Bimtek Pemasaran online dan temu usaha perdagangan mikro kecil dan warga miskin (PUPM-Kalurahan Sidorejo)				orang	20	20	100,00%
3 Bimtek Pemotretan Produk (PUPM-Kap Kalasan)				orang	20	20	100,00%
4 Bimtek Pemasaran online dan temu usaha perdagangan mikro kecil dan warga miskin (PUPM-Kalurahan Sumberagung)				orang	20	20	100,00%
5 Forum UMKM				Angkatan	2	2	100,00%
6 Bimtek kemasan dan label produk (PUPM-Kap Kalasan)				orang	20	20	100,00%
7 Bimtek Desain Grafis tingkat dasar bagi UMKM (PUPM Kap Minggir)				orang	20	20	100,00%
8 Bimtek Pemasaran online dan temu usaha perdagangan mikro kecil dan warga miskin (PUPM-Kalurahan Sendangagung)				orang	20	20	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitasi kemudahan Perizinan Usaha Mikro	103.745.000,00	94.276.637,20	90,87%				
1 Jumlah UMKM yang mendapatkan informasi perizinan				UMKM	75	75	100,00%
Sub Kegiatan Pemberdayaan kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	2.062.664.195,00	1.566.993.866,00	75,97%				
1 Sosialisasi PIRT (PRIORITAS)				orang	40	40	100,00%
2 Workshop Kewirausahaan Pemuda (PUPM-KEL)				orang	60	60	100,00%
3 Bimtek dan Implementasi Digital Marketing bagi generasi muda untuk menciptakan Reseller Handal untuk UMKM (PUPM-Depok)				orang	20	20	100,00%
4 Bimtek Pembentukan dan pemberdayaan kelompok wanita dari KK miskin untuk menjadi usaha mikro kecil (Seyegan-Margodadi)				orang	20	20	100,00%
5 Bimtek penguatan modal dan pemberdayaan kelompok wanita dari KK miskin untuk menjadi usaha mikro kecil (PUPM-KEL)				orang	20	20	100,00%
6 Bimtek Pengurusan PIRT (POKIR)				angkatan	14	14	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
7 Bimtek dan Implementasi Digital Marketing bagi generasi muda untuk menciptakan Reseller Handal untuk UMKM (POKIR)				orang	100	100	100,00%
8 Bimtek penguatan modal dan pemberdayaan kelompok wanita dari KK miskin untuk menjadi usaha mikro kecil (POKIR-Caturtunggal)				orang	20	20	100,00%
9 Workshop Kewirausahaan Pemuda (POKIR)				Angkatan	12	12	100,00%
10 Workshop dan Bimtek Digital Marketing serta pembuatan website bagi UMKM (Aspirasi) 2 angkatan @50 orang				Angkatan	2	2	100,00%
11 Bimtek Pembuatan Laporan Keuangan Berbasis Aplikasi				orang	20	20	100,00%
12 Bimtek Pembuatan Rencana Usaha dan Proposal Pembiayaan				orang	20	20	100,00%
13 Sosialisasi HKI (PRIORITAS)				orang	20	20	100,00%
14 Bimtek Teknologi Tepat Guna Pengolahan Hasil Panen				orang	20	20	100,00%
15 Bimtek dan Implementasi Digital Marketing bagi generasi muda untuk menciptakan Reseller Handal untuk UMKM (PUPM-KEL)				orang	20	20	100,00%
16 Jumlah UMKM yang terfasilitasi Self Declare Produk Halal				UMKM	1032	300	29,07%
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.160.065.297,00	1.109.261.348,00	95,62%				
1 Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha				UMKM	10	558	5580,00%
Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil	1.160.065.297,00	1.109.261.348,00	95,62%				
1 Jumlah UMKM yang difasilitasi pemasaran				UKM	100	250	250,00%
Sub Kegiatan Fasilitas usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi, pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	1.160.065.297,00	1.109.261.348,00	95,62%				
1 Fasilitas Pemasaran Online				Paket	1	1	100,00%
2 Kendi Sembada				kali	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
3 Bimtek Usaha Mikro (Ambarketawang)				Orang	20	20	100,00%
4 Bimtek Pemasaran berbasis Digital untuk UMKM (PUPM-Kap Mlati)				Orang	20	20	100,00%
5 Bimtek Pemasaran berbasis Digital untuk UMKM (PUPM-Kalurahan Sumberadi)				Orang	20	20	100,00%
6 Bimtek pemasaran/ digital marketing (Kap Seyegan)				Orang	20	20	100,00%
7 Bimtek pemasaran/ digital marketing (Margoluwih)				Orang	20	20	100,00%
8 Bimtek pemasaran/ digital marketing (Margokaton)				Orang	20	20	100,00%
9 Bimtek dan implementasi digital marketing -Forkom UMKM (Kap Turi)				Orang	20	20	100,00%
10 Pelatihan pemasaran/ marketing (Maguwoharjo, Sariharjo, Sumberadi, Tlogoadi, Trihanggo)				Angkatan	5	5	100,00%
11 Profiling UKM Terpilih				UKM	7	7	100,00%
12 Transformasi Digital UMKM Sleman				Kegiatan	1	1	100,00%
13 Fasilitasi Pasar Artisan: Tenda dan Meja Lipat				Buah	20	20	100,00%





**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2022**

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	9.695.481.134,00	9.220.599.906,00	95,10%				
URUSAN PERPUSTAKAAN	9.278.070.861,00	8.809.065.931,00	94,95%				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.594.114.306,00	8.128.675.281,00	94,58%				
1. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				%	100,00	100,00	100,00%
2. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.502.500,00	59.302.425,00	99,66%				
1. dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi				dokumen	10	10	100,00%
Sub kegiatan Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.512.500,00	40.312.500,00	99,51%				
1. dokumen Perjanjian kinerja				dokumen	1	1	100,00%
2. dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
3. dokumen Perubahan Renja				dokumen	1	1	100,00%
4. dokumen Renja				dokumen	1	1	100,00%
5. dokumen Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	1.770.000,00	1.770.000,00	100,00%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1. dokumen RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.770.000,00	1.770.000,00	100,00%				
1. dokumen Perubahan RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.037.500,00	3.037.500,00	100,00%				
1. dokumen DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.062.500,00	2.062.500,00	100,00%				
1. dokumen Perubahan DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.350.000,00	10.349.925,00	100,00%				
1. dokumen Laporan Tahunan				dokumen	1	1	100,00%
2. dokumen LKJIP/LAKIP				dokumen	1	1	100,00%
3. dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja				dokumen	4	4	100,00%
4. dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja				dokumen	4	4	100,00%
5. dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap Kebijakan Renja				dokumen	1	1	100,00%
6. dokumen RFK				dokumen	12	12	100,00%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.811.907.934,00	6.440.424.817,00	94,55%				
1. Penyediaan gaji, penatausahaan keuangan , pelaporan keuangan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.638.190.434,00	6.270.167.390,00	94,46%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS				bulan	12	12	100,00%
2. Pembayaran TPP				bulan	12	12	100,00%
3. Pembayaran BPJS				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	170.860.000,00	167.399.927,00	97,97%				
1. Penatausahaan keuangan SKPD				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.857.500,00	2.857.500,00	100,00%				
1. dokumen Laporan Keuangan bulanan				dokumen	12	12	100,00%
2. dokumen Laporan Keuangan Semesteran				dokumen	2	2	100,00%
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.200.000,00	3.169.908,00	99,06%				
1. dokumen laporan Barang Milik Daerah				dokumen	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.200.000,00	3.169.908,00	99,06%				
1. dokumen Laporan Barang Milik Daerah				dokumen	2	2	100,00%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	543.549.395,00	505.071.729,00	92,92%				
1. Layanan Administasi kepegawaian				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	543.549.395,00	505.071.729,00	92,92%				
1. Laporan pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi				dokumen	1	1	100,00%
2. Layanan administrasi kepegawaian				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
3. Pembayaran tenaga non PNS / PHL				bulan	12	12	100,00%
4. Pembayaran tenaga non PNS/PHL				orang	13	12	92,31%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	297.984.782,00	289.119.751,00	97,03%				
1. Penyediaan Alat listrik, ATK, makan minum, barang cetakan, pengelolaan arsip				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.694.000,00	10.686.750,00	99,93%				
1. Alat listrik				paket	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115.961.574,00	113.003.325,00	97,45%				
1. Penyediaan Alat Tulis Kantor				paket	1	1	100,00%
2. Tersedianya makan dan minum rapat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.761.100,00	35.613.338,00	99,59%				
1. Barang cetakan dan pengadaan				paket	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	11.350.000,00	11.280.000,00	99,38%				
1. Tersedianya makan dan minum tamu				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86.962.000,00	81.514.302,00	93,74%				
1. Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	37.256.108,00	37.022.036,00	99,37%				
1. Pengelolaan arsip perangkat daerah				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	505.722.175,00	489.298.516,00	96,75%				
1. Layanan surat menyurat, penyediaan jasa langganan, jasa keamanan dan kebersihan kantor				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.750.000,00	13.749.704,00	100,00%				
1. Layanan Surat menyurat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	158.586.095,00	150.670.712,00	95,01%				
1. Penyediaan jasa langganan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	333.386.080,00	324.878.100,00	97,45%				
1. Pelayanan Jasa kebersihan dan keamanan kantor				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	372.247.520,00	342.288.135,00	91,95%				
1. Penyediaan BBM, pemeliharaan kendaraan, pemeliharaan mebel, pemeliharaan peralatan kerja, pemeliharaan gedung dan taman				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	279.855.000,00	250.066.335,00	89,36%				
1. Layanan penyediaan BBM				bulan	12	12	100,00%
2. Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional				unit	23	23	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%				
1. Layanan Pemeliharaan mebel				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.550.000,00	66.380.000,00	99,74%				
1. Layanan Pemeliharaan peralatan kerja				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.842.520,00	20.841.800,00	100,00%				
1. Pemeliharaan gedung				paket	1	1	100,00%
2. Pemeliharaan Taman				paket	1	1	100,00%
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	680.516.555,00	676.955.600,00	99,48%				
1. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan				%	5,91	6,05	102,37%
2. Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan				%	23,25	26,74	115,01%
3. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk				nilai	1,95	2,14	109,74%
4. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan jumlah penduduk				nilai	0,000416	0,000464	111,54%
5. Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat				%	17,71	13,00	73,40%
6. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat				kali	6	5	83,33%
Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	422.966.555,00	420.465.110,00	99,41%				
1. Pengelolaan perpustakaan Tingkat Daerah				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	70.687.800,00	70.417.725,00	99,62%				
1. Pengelolaan sistem informasi Perpustakaan berbasis TI				bulan	12	12	100,00%
2. Pengelolaan Jejaring Perpustakaan berbasis TI				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	77.075.600,00	76.995.650,00	99,90%				
1. Layanan menetap				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2. Layanan keliling				bulan	10	10	100,00%
3. Layanan silang layan				bulan	6	7	116,67%
4. Layanan kunjung perpustakaan				kali	35	35	100,00%
5. Wisata Pustaka				kali	1	1	100,00%
6. Dongeng Motor Keliling				kali	3	3	100,00%
Sub Kegiatan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.200.000,00	3.195.000,00	99,84%				
1. Identifikasi kekhasan koleksi perpustakaan daerah				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	8.435.000,00	8.432.300,00	99,97%				
1. Akreditasi Perpustakaan				lokasi	5	6	120,00%
2. Pembinaan perpustakaan Sekolah				lokasi	6	9	150,00%
Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	30.245.000,00	30.151.385,00	99,69%				
1. Pembinaan perpustakaan Kalurahan				lokasi	5	12	240,00%
2. Pembinaan perpustakaan Perangkat Daerah				lokasi	5	7	140,00%
3. Rintisan Desa Gemar Membaca				lokasi	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	24.373.950,00	97,50%				
1. Bimtek pengelolaan perpustakaan				kali	2	2	100,00%
2. Literasi Di Rumah				kali	3	3	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	1.934.605,00	1.934.550,00	100,00%				
1. Inventarisasi pengembangan layanan perpustakaan rujukan				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pengembangan Bahan Pustaka	16.025.000,00	16.024.875,00	100,00%				
1. Stock Opname				bulan	9	9	100,00%
2. Pelestarian bahan pustaka				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	143.200.000,00	142.146.400,00	99,26%				
1. Pengadaan Bahan Pustaka				paket	1	1	100,00%
2. Pengolahan buku/ bahan pustaka				paket	1	1	100,00%
3. Pengadaan E book				paket	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	47.163.550,00	46.793.275,00	99,21%				
1. Pengelolaan informasi dan dokumentasi perangkat daerah				bulan	12	12	100,00%
2. Penerbitan Buletin Literasia				eksemplar	36	36	100,00%
3. Laporan Hasil Survei Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)				dokumen	1	1	100,00%
Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	257.550.000,00	256.490.490,00	99,59%				
1. Pembudayaan Gemar Membaca				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	24.750.000,00	24.749.800,00	100,00%				
1. Lomba Bercerita				kali	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di TempatTempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	222.000.000,00	220.948.740,00	99,53%				
1. Inventarisasi sarana perpustakaan pojok Baca				dokumen	1	1	100,00%
2. Pojok Baca				lokasi	22	22	100,00%
Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	10.800.000,00	10.791.950,00	99,93%				
1. Workshop membaca menjadi karya				kali	1	1	100,00%
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	3.440.000,00	3.435.050,00	99,86%				
1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar dalam wilayahnya				naskah kuno	0	0	#DIV/0!
Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	3.440.000,00	3.435.050,00	99,86%				
1. Jumlah koleksi naskah kuno				dokumen	0	0	#DIV/0!
Sub Kegiatan Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	3.440.000,00	3.435.050,00	99,86%				
1. Identifikasi Naskah kuno yang dimiliki masyarakat				dokumen	1	1	100,00%
URUSAN KEARSIPAN	417.410.273,00	411.533.975,00	98,59%				
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	312.191.900,00	307.032.550,00	98,35%				
1. Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku				%	91,67	97,92	106,81%
2. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional				%	75,58	75,02	99,26%
3. Persentase perangkat daerah menerapkan e-arsip terintegrasi				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	127.327.090,00	126.644.532,00	99,46%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1. Pembinaan, pengelolaan arsip dinamis				PD	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	116.615.000,00	115.993.612,00	99,47%				
1. Monev Pengawasan Kearsipan Internal				PD	48	48	100,00%
2. Pelatihan Pengelolaan Arsip Desa				Desa	1	1	100,00%
3. Bimtek pengelolaan Arsip lembaga Desa				Desa	4	4	100,00%
4. Penyusunan pedoman pengelolaan arsip di lingkungan pemerintah Kabupaten Sleman				dokumen	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	10.712.090,00	10.650.920,00	99,43%				
1. Penataan arsip inaktif				depo	2	2	100,00%
2. Pemeliharaan arsip dinamis inaktif				depo	2	2	100,00%
Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	44.369.010,00	42.931.993,00	96,76%				
1. Akuisisi arsip statis Perangkat Daerah				PD	3	3	100,00%
Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	44.369.010,00	42.931.993,00	96,76%				
1. Pengolahan arsip statis				daftar	2	2	100,00%
2. Pemeliharaan dan perawatan arsip statis				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	140.495.800,00	137.456.025,00	97,84%				
1. Pendampingan e arsip				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	50.000.000,00	48.459.800,00	96,92%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1. Penyediaan informasi kearsipan melalui JIKN				bulan	12	12	100,00%
2. Daftar arsip tersedia di JIKN				daftar	6	6	100,00%
3. Bimtek Srikandi				Angkatan	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	90.495.800,00	88.996.225,00	98,34%				
1. Pendampingan e arsip				PD	22	28	127,27%
2. Penerbitan Buletin Arsip				eksemplar	36	36	100,00%
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	103.218.373,00	102.501.925,00	99,31%				
1. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	99.218.373,00	98.530.375,00	99,31%				
1 Jumlah penilaian, penetapan, dan pelaksanaan pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun				PD	17	26	152,94%
Sub Kegiatan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	92.309.650,00	91.621.725,00	99,25%				
1. Verifikasi dan uji petik arsip usul musnah				PD	10	28	280,00%
2. Bimbingan teknis				kali	2	2	100,00%
3. Penyusunan draf kebijakan				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	6.908.723,00	6.908.650,00	100,00%				
1. Pelaksanaan Pemusnahan Arsip				kali	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	4.000.000,00	3.971.550,00	99,29%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan				dokumen	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000,00	1.973.500,00	98,68%				
1. Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000,00	1.998.050,00	99,90%				
1. Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				dokumen	1	1	100,00%
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	2.000.000,00	1.999.500,00	99,98%				
1. Persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten/ kota				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	2.000.000,00	1.999.500,00	99,98%				
1. Terlaksananya pelayanan izin penggunaan arsip tertutup				kali	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	2.000.000,00	1.999.500,00	99,98%				
1. SOP penggunaan Arsip yang bersifat Tertutup				dokumen	1	1	100,00%





**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS SOSIAL
2022**

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
DINAS SOSIAL	33.240.452.409,00	28.028.874.302,00	84,32%				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.845.450.074,00	7.407.546.320,00	94,42%				
1. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				%	100,00	100,00	100,00%
2. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.737.223,00	30.203.928,00	95,17%				
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.705.375,00	7.698.825,00	99,91%				
1. Dokumen Perjanjian Kinerja				dokumen	3	3	100,00%
2. Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja				dokumen	3	3	100,00%
3. Dokumen Perubahan Renja				dokumen	1	1	100,00%
4. Dokumen Renja				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.507.370,00	1.506.375,00	99,93%				
1. Dokumen RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.507.370,00	1.507.320,00	100,00%				
1. Dokumen Perubahan RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.507.370,00	1.502.820,00	99,70%				
1. Dokumen DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.507.370,00	1.507.320,00	100,00%				
1. Dokumen Perubahan DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.002.368,00	16.481.268,00	91,55%				
1. Dokumen Laporan Tahunan				dokumen	1	1	100,00%
2. Dokumen LKJIP/LAKIP				dokumen	1	1	100,00%
3. Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Renja terhadap Hasil Renja				dokumen	4	4	100,00%
4. Dokumen Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja				dokumen	1	1	100,00%
5. Dokumen Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja				dokumen	4	4	100,00%
6. Dokumen RFK				dokumen	12	12	100,00%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.661.836.403,00	4.397.310.831,00	94,33%				
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.424.776.593,00	4.162.168.631,00	94,07%				
1. Penyediaan gaji, tunjangan TPP, luran BPJS, dan Laporan Keuangan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	229.580.000,00	227.892.700,00	99,27%				
1. Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	7.479.810,00	7.249.500,00	96,92%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1. Dokumen laporan aset/BMD semesteran				dokumen	2	2	100,00%
2. Dokumen laporan keuangan semesteran				dokumen	2	2	100,00%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	744.965.353,00	635.208.626,20	85,27%				
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	744.965.353,00	635.208.626,20	85,27%				
1. Laporan Pelaksanaan Roadmap Birokrasi				dokumen	1	1	100,00%
2. Layanan administrasi kepegawaian				bulan	12	12	100,00%
3. Pembayaran tenaga Non PNS/PHL				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.765.482.545,00	1.739.344.688,00	98,52%				
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3.443.000,00	3.438.000,00	99,85%				
1. Listrik dan Elektronik				unit	7	7	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.469.640.000,00	1.454.258.000,00	98,95%				
1. Filling Kabinet				unit	2	2	100,00%
2. Komputer FC				set	13	13	100,00%
3. Laptop				unit	3	3	100,00%
4. Printer				unit	6	6	100,00%
5. Rak Arsip				unit	7	7	100,00%
6. UPS				unit	5	5	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
7. Loker				buah	3	3	100,00%
8. Laptop TPSK				unit	86	86	100,00%
9. Printer TKSK				unit	18	18	100,00%
10. Tablet				unit	6	6	100,00%
11. Scanner				unit	3	3	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84.312.410,00	73.737.500,00	87,46%				
1. Alat Tulis Kantor				paket	1	1	100,00%
2. Layanan penyediaan makanan dan minuman rapat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.589.135,00	14.588.950,00	100,00%				
1. Layanan cetak dan penggandaan dokumen				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00%				
1. Layanan makan dan minum tamu				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultan SKPD	158.798.000,00	158.726.238,00	99,95%				
1. Layanan perjalanan dinas luar daerah				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00%				
1. Pengelolaan arsip dan perpustakaan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	19.700.000,00	19.596.000,00	99,47%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1. Pengelolaan informasi dan dokumen PD				bulan	12	12	100,00%
2. Pengelolaan website PD				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	284.405.550,00	267.271.647,80	93,98%				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.825.000,00	25.824.875,00	100,00%				
1. Layanan Surat Menyurat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	29.900.000,00	27.863.688,00	93,19%				
1. Pembayaran Jasa Langganan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	228.680.550,00	213.583.084,80	93,40%				
1. Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	357.023.000,00	338.206.599,00	94,73%				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	269.003.000,00	255.710.849,00	95,06%				
1. Layanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	3.000.000,00	2.970.000,00	99,00%				
1. Layanan Pemeliharaan Mebel				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.020.000,00	59.526.000,00	91,55%				
1. Pemeliharaan Peralatan Kerja				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	19.999.750,00	100,00%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1. Pemeliharaan Gedung				unit	1	1	100,00%
2. Pemeliharaan Taman				unit	1	1	100,00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.881.022.291,00	1.841.588.139,80	97,90%				
1. Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif				%	69	88,25	127,90%
Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.881.022.291,00	1.841.588.139,80	97,90%				
Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten	117.784.958,00	117.055.750,00	99,38%				
1. Bimbingan teknis PSM				angkatan	1	1	100,00%
2. Fasilitasi Forum Komunikasi IPSM Kabupaten Sleman				kali	4	4	100,00%
3. Pembinaan PSM				kali	12	12	100,00%
4. Forum Komunikasi PSM				kali	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	228.199.950,00	228.199.950,00	100,00%				
1. Forum TKSK				kali	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.355.837.383,00	1.320.822.614,80	97,42%				
1. Hibah Lembaga				LKS	33	33	100,00%
2. Jejaring FORKAPA				kali	2	2	100,00%
3. Jejaring Karang Taruna				kali	33	33	100,00%
4. Jejaring Komda Lansia				kali	6	6	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
5. Jejaring LKKS				kali	15	15	100,00%
6. Jejaring WKSBM				kali	15	15	100,00%
7. Pelatihan Desain Grafis bagi Karang Taruna Sinduadi, Mlati				orang	20	20	100,00%
8. Pelatihan Internet Marketing bagi Karang Taruna Sleman				orang	20	20	100,00%
9. Pelatihan Internet Marketing untuk Karang Taruna Seyegan				orang	20	20	100,00%
10. Pelatihan Internet Marketing untuk Karang Taruna Tirtoadi, Mlati				orang	20	20	100,00%
11. Pelatihan Kader Sosial (WKSBM) Sleman				orang	20	20	100,00%
12. Pelatihan Kelembagaan bagi WKSBM (2 angkatan) Tempel				orang	40	40	100,00%
13. Pelatihan Kelembagaan bagi WKSBM Ngemplak				orang	20	20	100,00%
14. Pelatihan Manajemen Organisasi bagi Karang Taruna Tempel				orang	20	20	100,00%
15. Pelatihan Manajemen Organisasi bagi Karang Taruna Minggir				orang	20	20	100,00%
16. Pelatihan Manajemen Organisasi bagi Karang Taruna Pakem				orang	20	20	100,00%
17. Pelatihan Manajemen Organisasi bagi Karang Taruna Maguwaharjo, Depok				orang	20	20	100,00%
18. Pelatihan Manajemen Organisasi bagi Karang Taruna Sambirejo, Prambanan				orang	20	20	100,00%
19. Pelatihan Manajemen Organisasi bagi Karang Taruna Umbulmartani, Ngemplak				orang	20	20	100,00%
20. Pelatihan Perawatan Lansia untuk Pendamping Lansia Wukirsari, Cangkringan				orang	20	20	100,00%
21. Pelatihan Sablon untuk Karang Taruna Kalasan				orang	20	20	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
22. Pelatihan Sablon untuk Karang Taruna Pakem				orang	20	20	100,00%
23. Pemilihan PSKS Berprestasi (KT, PSM, TKSK, LKS, WKSBM)				PSKS	5	5	100,00%
24. Bimtek Manajemen Organisasi Karang Taruna				angkatan	1	1	100,00%
25. bulan Bakti KT				kali	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	179.200.000,00	175.509.825,00	97,94%				
1. CC Penanganan Kasus				kali	36	36	100,00%
2. Home visit penanganan kasus				kali	24	24	100,00%
3. Operasional LK3				bulan	12	12	100,00%
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	13.897.747.580,00	9.516.407.204,60	68,47%				
1. Persentase PPKS sasaran SPM yang ditangani				%	100,00	100,00	100,00%
2. Persentase pelayanan rujukan terpadu penanggulangan kemiskinan				%	100,00	100,00	100,00%
3. Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang menerima bantuan sosial				%	80,00	98,10	122,63%
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	13.897.747.580,00	9.516.407.204,60	68,47%				
Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	9.370.400.000,00	6.057.185.250,00	64,64%				
1. Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas				bulan	12	12	100,00%
2. Bantuan kebutuhan dasar bagi Lanjut Usia Terlantar				bulan	12	12	100,00%
3. Bantuan kebutuhan dasar bagi Anak Terlantar				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
4. Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas Minggir				bulan	12	12	100,00%
5. Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas Sleman				bulan	12	12	100,00%
6. Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas Cangkringan				bulan	12	12	100,00%
7. Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas Prambanan				bulan	12	12	100,00%
8. Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas Ngaglik				bulan	12	12	100,00%
9. Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas Mlati				bulan	12	12	100,00%
10. Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas Gamping				bulan	12	12	100,00%
11. Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas Moyudan				bulan	12	12	100,00%
12. Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas Godean				bulan	12	12	100,00%
13. Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas Depok				bulan	12	12	100,00%
14. Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas di Kebur Kidul, Argomulyo, Cangkringan				bulan	12	12	100,00%
15. Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas di Ngemplak				bulan	12	12	100,00%
16. Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas di Margoagung, Seyegan				bulan	12	12	100,00%
17. Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas di Margoadi, Seyegan				bulan	12	12	100,00%
18. Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas di Margomulyo, Seyegan				bulan	12	12	100,00%
19. Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas Ngemplak				bulan	12	12	100,00%
20. Bantuan kebutuhan dasar bagi Anak Yatim, Piatu, dan Yatim Piatu yang orang tuanya meninggal karena COVID 19				bulan	3	3	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
21. Bantuan kebutuhan dasar bagi Anak Yatim, Piatu, dan Yatim Piatu yang orang tuanya meninggal bukan karena COVID 19				bulan	3	3	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	2.153.000.000,00	1.363.400.000,00	63,33%				
1. Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas				bulan	12	12	100,00%
2. Bantuan kebutuhan dasar bagi Lanjut Usia Terlantar				bulan	6	6	100,00%
3. Bantuan kebutuhan dasar bagi Anak Terlantar				bulan	6	6	100,00%
4. Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas Minggir				bulan	12	12	100,00%
5. Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas Sleman				bulan	12	12	100,00%
6. Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas Cangkringan				bulan	12	12	100,00%
7. Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas Prambanan				bulan	12	12	100,00%
8. Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas Ngaglik				bulan	12	12	100,00%
9. Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas Mlati				bulan	12	12	100,00%
10. Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas Gamping				bulan	12	12	100,00%
11. Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas Moyudan				bulan	12	12	100,00%
12. Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas Godean				bulan	12	12	100,00%
13. Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas Depok				bulan	12	12	100,00%
14. Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas di Kebur Kidul, Argomulyo, Cangkringan				bulan	12	12	100,00%
15. Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas di Ngemplak				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
16. Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas di Margoagung, Seyegan				bulan	12	12	100,00%
17. Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas di Margoadi, Seyegan				bulan	12	12	100,00%
18. Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas di Margomulyo, Seyegan				bulan	12	12	100,00%
19. Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas Ngemplak				bulan	12	12	100,00%
20. Bantuan kebutuhan dasar bagi Anak Yatim, Piatu, dan Yatim Piatu yang orang tuanya meninggal karena COVID 19				bulan	1	1	100,00%
21. Bantuan kebutuhan dasar bagi Anak Yatim, Piatu, dan Yatim Piatu yang orang tuanya meninggal bukan karena COVID 19				bulan	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	95.918.000,00	65.090.000,00	67,86%				
1. Pemulangan/tukar informasi ke daerah asal (Jawa Tengah)				kali	25	18	72,00%
2. Penjemputan atau pemulangan dan tukar informasi ke daerah Jawa Timur				kali	1	0	0,00%
3. Penjemputan atau pemulangan dan tukar informasi ke daerah Jawa Barat				kali	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	1.164.083.600,00	1.042.563.248,80	89,56%				
1. Bantuan OT kehabisan bekal				orang	60	72	120,00%
2. Operasional Rumah Singgah Sementara (RPS)				bulan	12	12	100,00%
3. Pemeliharaan gedung RPS				bulan	12	12	100,00%
4. Penanganan adopsi anak				kali	10	17	170,00%
5. Penanganan anjal, gelandangan psikotik, gelandangan dan pengemis				bulan	12	12	100,00%
6. Penanganan kasus temuan bayi				kali	3	2	66,67%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
7. Perawatan, visum dan pemakaman jenazah terlantar				kali	3	24	800,00%
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	1.114.345.980,00	988.168.705,80	88,68%				
1. Jejaring kelembagaan				Lembaga	5	5	100,00%
2. Operasional jamkesus				kali	1	1	100,00%
3. Pelatihan tata boga				angkatan	1	1	100,00%
4. Pelatihan Tata Boga di Kalurahan Donoharjo, Trihanggo, dan Sumberharjo (Pokir)				angkatan	3	3	100,00%
5. Pelatihan Tata Boga di Pondok, Widodomartani, Ngemplak; Dadapan, Wonokerto, Turi; dan Sardonoharjo, Ngaglik (Pokir)				angkatan	3	3	100,00%
6. Pelatihan Tata Boga (Sendangagung, Sumberagung, dan Pondokrejo)				angkatan	3	3	100,00%
7. Pendampingan Usaha bagi Disabilitas di Kalurahan Sardonoharjo (Pokir)				angkatan	1	1	100,00%
8. Pendampingan Usaha bagi Disabilitas di Kalurahan Trihanggo (Pokir)				angkatan	1	1	100,00%
9. Penyelenggaraan HDI				kali	1	1	100,00%
10. Pelatihan Pijat Refleksi				angkatan	1	1	100,00%
11. Pembinaan keluarga Penyandang Disabilitas (Ngaglik, Cangkringan, dan Ngemplak)				angkatan	3	3	100,00%
12. Pembinaan Pendampingan Usaha (Tempel, Pakem, dan Condongcatur)				angkatan	3	3	100,00%
13. Pendampingan usaha bagi disabilitas				angkatan	1	1	100,00%
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	8.701.607.189,00	8.426.264.077,60	96,84%				
1. Persentase pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan				%	100,00	100,00	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	8.701.607.189,00	8.426.264.077,60	96,84%				
Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	3.154.314.668,00	3.146.488.502,60	99,75%				
1. Cetak kartu miskin				Kalurahan	86	86	100,00%
2. Data kemiskinan				dokumen	1	1	100,00%
3. Data PBI				dokumen	1	1	100,00%
4. Data PMKS 86 kalurahan 17 kapanewon				dokumen	1	1	100,00%
5. Profil keluarga miskin dan rentan miskin				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	415.111.750,00	403.633.000,00	97,23%				
1. Forum TKPKD				kali	6	6	100,00%
2. Laporan hasil survey indeks kepuasan masyarakat				dokumen	1	1	100,00%
3. Laporan penanganan pengaduan				dokumen	1	1	100,00%
4. Pelayanan pengaduan masyarakat				bulan	12	12	100,00%
5. Penguatan dan revitalisasi TPK Kalurahan Sumberharo, Prambanan				angkatan	1	1	100,00%
6. Penguatan TPK kalurahan				Kalurahan	6	6	100,00%
7. Penyaluran bantuan Jaring Pengaman Sosial				bulan	12	12	100,00%
8. Verifikasi dan validasi permohonan jaring pengaman sosial				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3.396.880.152,00	3.157.587.925,00	92,96%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1. Pendistribusian bantuan sosial pangan bagi KPM				bulan	12	12	100,00%
2. Penyaluran bantuan program keluarga harapan bagi KPM				bulan	12	12	100,00%
3. Fasilitasi pertemuan P2K2 bidang kesehatan dan gizi tingkat kecamatan				bulan	12	12	100,00%
4. Forum PKH tingkat Kabupaten				kali	8	8	100,00%
5. Forum PKH tingkat Kecamatan				kali	34	34	100,00%
6. Pemberian BLT untuk buruh tani dan buruh pabrik rokok				orang	945	744	78,73%
7. Bantuan Sosial untuk Keluarga Miskin				orang	12750	12204	95,72%
8. Sosialisasi Pendampingan KPM PKH				kali	72	51	70,83%
Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1.735.300.619,00	1.718.554.650,00	99,03%				
1. Bantuan sosial pengembangan UEP PKH Graduasi 2019 (3 juta)				orang	108	108	100,00%
2. Bantuan sosial UEP KUBE Pengembangan (23 Juta)				paket	10	10	100,00%
3. Bantuan Sosial UEP PKH Graduasi (3 juta)				orang	190	190	100,00%
4. Bantuan Sosial Warga Binaan PRSE (2 Juta)				orang	80	80	100,00%
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	875.320.310,00	834.673.685,00	95,36%				
1. Jumlah kampung siaga yang terbentuk				KSB	18	20	111,11%
Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	439.000.975,00	402.418.950,00	91,67%				
Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	414.807.025,00	378.493.400,00	91,25%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1. Bantuan beras untuk tanggap darurat dan antisipasi bencana				bulan	12	12	100,00%
2. Bantuan lauk pauk korban bencana				bulan	12	12	100,00%
3. Operasional gudang logistik				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	24.193.950,00	23.925.550,00	98,89%				
1. Fasilitasi pembinaan tenaga pelopor perdamaian				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	436.319.335,00	432.254.735,00	99,07%				
Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	190.033.685,00	188.906.485,00	99,41%				
1. Pembentukan kampung siaga bencana				lokasi	4	4	100,00%
2. Peningkatan kapasitas Kampung Siaga Bencana dalam antisipasi bencana di Berbah				angkatan	1	1	100,00%
3. Peningkatan kapasitas Kampung Siaga Bencana dalam antisipasi bencana di Mlati				angkatan	1	1	100,00%
4. Sarana dapur umum				lokasi	4	4	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	246.285.650,00	243.348.250,00	98,81%				
1. Peningkatan kapasitas tagana dalam antisipasi bencana				orang	113	113	100,00%
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	39.304.965,00	36.594.875,00	93,10%				
1. Cakupan pengelolaan Tetenger/Monumen/Tempat Sejarah				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	39.304.965,00	36.594.875,00	93,10%				
Sub Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten	39.304.965,00	36.594.875,00	93,10%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1. Pengelolaan Tetenger				lokasi	15	15	100,00%
2. Sarasehan Kepahlawanan				kali	2	2	100,00%





**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2022**

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	13.058.288.950,00	12.399.229.338,57	94,95%				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	13.058.288.950,00	12.399.229.338,57	94,95%				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.583.352.250,00	10.982.273.614,57	94,81%				
1. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				%	100,00	100,00	100,00%
2. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.775.106,00	44.564.060,00	99,53%				
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.948.180,00	9.947.250,00	99,99%				
1. Dokumen perencanaan kinerja				dokumen	5	5	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.719.713,00	1.651.000,00	96,00%				
1. Dokumen RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.149.250,00	2.083.000,00	96,92%				
1. Dokumen perubahan RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.223.775,00	1.221.250,00	99,79%				
1. Dokumen DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.635.250,00	1.635.250,00	100,00%				
1. Dokumen Perubahan DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.098.938,00	28.026.310,00	99,74%				
1. Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil				dokumen	4	4	100,00%
2. Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan				dokumen	1	1	100,00%
3. Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan				dokumen	4	4	100,00%
4. Dokumen LKJIP/LAKIP				dokumen	1	1	100,00%
5. Dokumen laporan tahunan				dokumen	1	1	100,00%
6. Dokumen RFK				dokumen	12	12	100,00%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.341.364.890,00	5.078.662.954,00	95,08%				
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.146.981.290,00	4.902.381.848,00	95,25%				
1. Pembayaran gaji dan tunjangan ASN				bulan	12	12	100,00%
2. Pembayaran iuran BPJS				bulan	12	12	100,00%
3. Pembayaran TPP				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	191.680.000,00	173.585.956,00	90,56%				
1. Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.703.600,00	2.695.150,00	99,69%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1. Laporan keuangan semesteran				dokumen	2	2	100,00%
2. Laporan aset/BMD semesteran				dokumen	2	2	100,00%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.038.374.945,00	1.018.435.570,00	98,08%				
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	649.896.600,00	635.371.200,00	97,76%				
1. Laporan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi				dokumen	1	1	100,00%
2. Layanan administrasi kepegawaian				bulan	12	12	100,00%
3. Pembayaran tenaga non PNS/PHL				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	226.708.875,00	226.708.875,00	100,00%				
1. Sosialisasi adminduk				kali	17	17	100,00%
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	161.769.470,00	156.355.495,00	96,65%				
1. Pengiriman peserta Bimtek/ Workshop/ Seminar/ Lokakarya				peserta	10	10	100,00%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.061.030.209,00	1.920.082.397,00	93,16%				
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.597.530,00	8.492.980,00	98,78%				
1. Alat Listrik				paket	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.175.191.927,00	1.099.022.655,00	93,52%				
1. ATK ADM				paket	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	326.981.252,00	313.363.425,00	95,84%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1. Alat tulis kantor				paket	4	4	100,00%
2. Layanan penyediaan makanan dan minuman tamu				bulan	12	12	100,00%
3. Layanan penyediaan makanan dan minuman rapat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	63.327.500,00	60.893.220,00	96,16%				
1. Layanan cetak dan pengadaan dokumen				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	486.932.000,00	438.310.117,00	90,01%				
1. Layanan perjalanan dinas dalam daerah				bulan	12	12	100,00%
2. Layanan perjalanan dinas luar daerah				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.876.475.000,00	1.807.060.980,00	96,30%				
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00%				
1. Rak arsip				unit	15	15	100,00%
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.831.475.000,00	1.762.060.980,00	96,21%				
1. Perlengkapan gedung kantor				unit	66	66	100,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	550.389.100,00	514.934.330,00	93,56%				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	83.508.980,00	80.243.610,00	96,09%				
1. Layanan surat menyurat				bulan	12	12	100,00%
2. Pengelolaan arsip dan perpustakaan				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128.820.000,00	128.615.579,00	99,84%				
1. Pembayaran jasa langganan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	338.060.120,00	306.075.141,00	90,54%				
1. Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	670.943.000,00	598.533.323,57	89,21%				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	228.343.000,00	161.289.356,00	70,63%				
1. Layanan pemeliharaan kendaraan dinas				bulan	12	12	100,00%
2. Layanan penyediaan BBM kendaraan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	4.450.000,00	4.418.200,00	99,29%				
1. Layanan pemeliharaan meubelair				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	142.900.000,00	139.125.000,00	97,36%				
1. Pemeliharaan/ Perbaikan peralatan kerja				unit	80	80	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	295.250.000,00	293.700.767,57	99,48%				
1. Pemeliharaan gedung kantor				unit	1	1	100,00%
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	368.798.440,00	363.605.403,00	98,59%				
1. Cakupan dokumen KK, Cakupan dokumen KTP-el, Cakupan dokumen KIA				%	90,00	90,00	100,00%
Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	368.798.440,00	363.605.403,00	98,59%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	57.754.250,00	56.856.250,00	98,45%				
1. Pemutakhiran KK				KK	10.000	10.000	100,00%
2. Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan penduduk rentan				Berkas	60	62	103,33%
Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	259.246.140,00	255.190.833,00	98,44%				
1. KTP Elektronik				keping	60.000	88.547	147,58%
2. KK				set	60.000	109.847	183,08%
3. KIA				set	45.000	45.281	100,62%
4. SKTT				kali	350	543	155,14%
5. Layanan Jemput Bola				kali	100	104	104,00%
6. Pembinaan adminduk bagi siswa SMA/SMK				jenis	10	12	120,00%
Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	51.798.050,00	51.558.320,00	99,54%				
1. Surat Keterangan Pindah (SKPWNI)				permohonan	7000	11.027	157,53%
2. Surat Keterangan Pindah Datang (SKDWNl)				permohonan	10000	14.291	142,91%
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	404.491.710,00	391.664.179,00	96,83%				
1. Cakupan dokumen akta kelahiran;Cakupan dokumen akta kematian;Cakupan dokumen akta perkawinan;Cakupan dokumen akta perceraian;Cakupan pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak;Cakupan dokumen akta pengakuan anak;Cakupan dokumen akta pengesahan anak				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	291.139.110,00	286.215.563,00	98,31%				
Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	185.230.900,00	183.448.824,00	99,04%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1. Akta Kelahiran				akta kelahiran	12.000	20.689	172,41%
2. Akta Kelahiran bagi keluarga miskin				akta kelahiran	300	300	100,00%
3. Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil Kelahiran dari Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia				suket	50	98	196,00%
Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	105.908.210,00	102.766.739,00	97,03%				
1. Pencatatan pengakuan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak				pemohon	55	77	140,00%
2. Akta kematian				akta kematian	8.000	13.613	170,16%
3. Akta kematian bagi keluarga miskin				akta kematian	10	10	100,00%
4. Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil Kematian dari Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia				suket	2	2	100,00%
Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	113.352.600,00	105.448.616,00	93,03%				
Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	113.352.600,00	105.448.616,00	93,03%				
1. Akta Perkawinan				akta perkawinan	550	646	117,45%
2. Akta Perceraian				akta perceraian	100	126	126,00%
3. Akta perkawinan bagi keluarga miskin (non muslim)				pemohon	10	10	100,00%
4. Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil Perkawinan dari Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia				suket	10	18	180,00%
5. Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil Perceraian dari Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia				suket	2	5	250,00%
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	594.592.075,00	555.016.107,00	93,34%				
1. Cakupan ketersediaan data SIAK				%	89,00	89,00	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	404.367.075,00	366.234.107,00	90,57%				
<i>Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan</i>	<i>221.852.400,00</i>	<i>194.370.456,00</i>	<i>87,61%</i>				
1. Pelaksanaan SIAK				SKPD	18	18	100,00%
2. Digitalisasi Akta				lembar	2000	2000	100,00%
3. Jilid Dokumen Akta				eksemplar	100	100	100,00%
<i>Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan</i>	<i>182.514.675,00</i>	<i>171.863.651,00</i>	<i>94,16%</i>				
1. Dokumentasi inovasi pelayanan				paket	2	2	100,00%
2. Monitoring				kali	6	6	100,00%
3. Pemanfaatan data kependudukan				lembaga	5	5	100,00%
Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	190.225.000,00	188.782.000,00	99,24%				
<i>Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat</i>	<i>190.225.000,00</i>	<i>188.782.000,00</i>	<i>99,24%</i>				
1. Bimtek petugas register desa				desa	86	86	100,00%
2. Monitoring GISA				kali	6	6	100,00%
3. Workshop Pelayanan Online				kali	2	2	100,00%
4. Pemberian Penghargaan GISA				kali	1	1	100,00%
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	107.054.475,00	106.670.035,00	99,64%				
1. Cakupan ketersediaan profil kependudukan				%	100,00	100,00	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	107.054.475,00	106.670.035,00	99,64%				
Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	107.054.475,00	106.670.035,00	99,64%				
1. Buku agregat kependudukan semester II Tahun 2021				dokumen	1	1	100,00%
2. Buku agregat kependudukan semester I Tahun 2022				dokumen	1	1	100,00%
3. Buku profil perkembangan kependudukan Tahun 2021				dokumen	1	1	100,00%
4. Indikator kependudukan				dokumen	1	1	100,00%
5. Penjilidan dokumen akta capil				buku	500	500	100,00%
6. Jilid Buku Agregat				eksemplar	100	100	100,00%
7. Jilid Buku Profil				eksemplar	100	100	100,00%





**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PARIWISATA
2022**

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
DINAS PARIWISATA	21.093.812.527,00	19.969.275.144,14	94,67%				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.000.000.000,00	997.784.590,00	99,78%				
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	1.000.000.000,00	997.784.590,00	99,78%				
1. Jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi				sumber	3	1	33%
2. Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana				pelayanan	2	5	250%
3. Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi				event	2	5	250%
Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	1.000.000.000,00	997.784.590,00	99,78%				
Sub Kegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	1.000.000.000,00	997.784.590,00	99,78%				
1. Atraksi Seni Event Khusus				Kali	10	10	100,00%
2. Pembangunan seni Instalasi				Paket	5	5	100,00%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	18.243.005.992,00	18.971.490.553,50	103,99%				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.085.217.362,00	8.481.329.708,50	93,35%				
1. Persentase pemenuhan Kebutuhan Administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana Kerja				%	100,00	100,00	100,00%
2. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana Kerja				%	100,00	100,00	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.670.433,00	84.278.700,00	99,54%				
Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	10.010.025,00	10.010.025,00	100,00%				
1. Dokumen Perjanjian Kinerja				dokumen	3	3	100,00%
2. Dokumen perubahan Perjanjian kinerja				dokumen	3	3	100,00%
3. Dokumen Perubahan Renja 2022				dokumen	1	1	100,00%
4. Dokumen Renja				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.567.325,00	2.567.325,00	100,00%				
1. Dokumen RKA-SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.567.250,00	2.567.250,00	100,00%				
1. Dokumen Perubahan RKA-SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.517.750,00	2.517.750,00	100,00%				
1 DPA-SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.953.450,00	1.953.450,00	100,00%				
1. DPPA-SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.054.633,00	64.662.900,00	99,40%				
1. Dokumen Laporan Tahunan				dokumen	1	1	100,00%
2. Dokumen LKJIP/LAKIP				dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
3. Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja				dokumen	4	4	100,00%
4. Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap Kebijakan Renja				dokumen	1	1	100,00%
5. Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap renja				dokumen	4	4	100,00%
6. Dokumen RFK				dokumen	12	12	100,00%
7. Kajian UPT Destinasi Pariwisata Kabupaten Sleman				dokumen	1	1	100,00%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	6.323.519.635,00	5.939.613.543,50	93,93%				
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.005.180.161,00	5.623.944.853,50	93,65%				
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanakan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	297.222.775,00	294.569.537,00	99,11%				
1. Pembayaran honorarium pengelolaan keuangan dan barang				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	21.116.699,00	21.099.153,00	99,92%				
1. Dokumen laporan keuangan bulanan				bulan	12	12	100,00%
2. Dokumen laporan keuangan semesteran				dokumen	2	2	100,00%
3. Laporan aset/BMD semesteran				dokumen	2	2	100,00%
Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	641.477.660,00	562.133.251,00	87,63%				
Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	641.477.660,00	562.133.251,00	87,63%				
1. Operasional pemungutan retribusi Kawasan Kaliurang dan ODTW Lainnya				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	282.143.763,00	280.329.008,00	99,36%				
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	274.963.763,00	273.149.008,00	99,34%				
1. Laporan Roadmap refomasi birokrasi				dokumen	1	1	100,00%
2. Layanan administrasi kepegawaian				bulan	12	12	100,00%
3. Pembayaran tenaga Non PNS/PHL				bulan	12	12	100,00%
4. Pengelolaan Informasi dan dokumentasi				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	7.180.000,00	7.180.000,00	100,00%				
1. Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	460.152.173,00	412.623.195,00	89,67%				
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.826.530,00	15.821.085,00	94,02%				
1. Alat Listrik				Paket	1	1	100,00%
2. Pemeliharaan Jaringan Listrik				bulan	12	12	100,00%
3. Pemeliharaan Jaringan Telpon				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	9.700.230,00	97,00%				
1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				unit	2	2	100,00%
Sub Kegiatan penyediaan bahan logistik Kantor	92.559.225,00	92.230.447,00	99,64%				
1. Layanan Kebutuhan ATK, Serta makanan dan minum rapat				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor dan makan minum rapat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	164.120.460,00	129.847.632,00	79,12%				
1. Penyediaan cetak dan pengadaan keperluan kantor				bulan	12	12	100,00%
2. Penyedia cetak karcis obyek wisata				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	21.675.000,00	20.417.000,00	94,20%				
1. Pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman tamu				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154.970.958,00	144.606.801,00	93,31%				
1. Layanan Perjalanan dinas dalam daerah				bulan	12	12	100,00%
2. Layanan Perjalanan dinas luar daerah				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Penyediaan jasa penunjang	868.575.098,00	805.484.888,00	92,74%				
Sub Kegiatan Penyediaan jasa Surat Menyurat	19.904.318,00	19.229.318,00	96,61%				
1. Layanan surat menyurat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123.000.000,00	95.267.194,00	77,45%				
1. Pelayanan jasa langganan telepon air listrik dan surat kabar				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor	725.670.780,00	690.988.376,00	95,22%				
1. Pelayanan keamanan dan kebersihan				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	424.678.600,00	396.867.123,00	93,45%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	194.578.600,00	167.604.123,00	86,14%				
1. Layanan pemeliharaan kendaraan dinas				bulan	12	12	100,00%
2. layanan penyediaan BBM				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%				
1. Layanan pemeliharaan meubeler				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Peralatan dan Mesin lainnya	100.100.000,00	100.095.000,00	100,00%				
1. Pemenuhan pemeliharaan peralatan kerja				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	115.000.000,00	114.168.000,00	99,28%				
1. Pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				paket	1	1	100,00%
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.994.683.932,00	2.983.859.526,00	99,64%				
1. Lama tinggal wisatawan (LOS) (Wisatawan Mancanegara;Wisatawan nusantara)				hari	(1,3;1;1)	1,5 dan 1,1	100,00%
2. Tingkat Hunian akomodasi Wisman				%	0,44	0,44	100,00%
3. Persentase peningkatan perjalanan wisnus yang datang ke Kab Sleman				%	33,33	314,05	942,24%
Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/kota	1.769.141.289,00	1.758.580.678,00	99,40%				
Sub kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/kota	452.009.000,00	446.023.925,00	98,68%				
1. Kajian Interkoneksi Destinasi Wisata di Kecamatan Tempel				Dokumen	1	1	100,00%
2. Kajian Klasterisasi Wisata Tematik Kaliurang				Dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
3. Kajian Masterplan Kawasan Wisata Tempel				Dokumen	1	1	100,00%
4. Penyusunan Naskah Akademis Raperda Perubahan Rencana Iduk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sleman				Dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/kota	1.059.619.889,00	1.055.045.313,00	99,57%				
1. Pemeliharaan Lingkungan ODTW				Paket	1	1	100,00%
2. Pembangunan Toilet di Desa Wisata Cibuk Kidul, Margoluwih, Seyegan				Paket	1	1	100,00%
3. Penataan Sarana dan Prasarana Pariwisata Desa Wisata Tegal Arum Kronggahan II, Kalurahan Trihanggo, Gamping, Kab.Sleman				Paket	1	1	100,00%
4. Penataan Sarana dan Prasarana Pariwisata Watu Ledhek dan Kedung Ngelo, Dusun Dayakan, Sardonoarjo, Ngaglik, Kab. Sleman				Paket	1	1	100,00%
5. Penataan Sarana dan Prasarana Pariwisata Dusun Ngebel Gede, Sardonoarjo, Ngaglik, Kab. Sleman				Paket	1	1	100,00%
6. Penataan Sarana dan Prasarana Pariwisata Dusun Tanjungtirta, Jogotirta, Berbah, Kab. Sleman				Paket	1	1	100,00%
7. Penataan Sarana dan Prasarana Pariwisata Gondang 2 Wukirsari, Cangkringan, Kab. Sleman				Paket	1	1	100,00%
8. Penataan Sarana dan Prasarana Pariwisata Joholanang, Sindumartani, Ngemplak, Kab. Sleman				Paket	1	1	100,00%
9. Penataan Sarana dan Prasarana Pariwisata Kaliurang Timur, Hargobinangun, Pakem, Kab. Sleman				Paket	1	1	100,00%
10. Penataan Sarana dan Prasarana Pariwisata Pangukrejo Umbulharjo, Cangkringan, Kab. Sleman				Paket	1	1	100,00%
11. Penataan Sarana dan Prasarana Pariwisata Taman Opak, Mojosari, Bokoharjo, Prambanan, Kab. Sleman				Paket	1	1	100,00%
12. Penataan Sarana dan Prasarana Pariwisata Turgo Purwobinangun, Pakem, Kab. Sleman				Paket	1	1	100,00%
13. Penataan Sarana dan Prasarana Pariwisata Umbul Sidomulyo, Brintikan, Tirtomartani, Kalasan, Kab. Sleman				Paket	1	1	100,00%
14. Pembenahan Pos Retribusi Candi Ijo				Paket	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
15 Penyusunan DED Tlogo Putri				Paket	1	1	100,00%
16 Pemeliharaan TIC Tlogo Putri				Paket	1	1	100,00%
17 Pemeliharaan TIC Gardu Pandang				Paket	1	1	100,00%
18 Pemeliharaan Museum Bakalan				Paket	1	1	100,00%
19 Pembuatan Akses Jalan Jalur Jeep Wisata				Paket	1	1	100,00%
20 Pemeliharaan Pos Retribusi Sementara Candi Kalasan				Paket	1	1	100,00%
21 Penyusunan DED Gardu Pandang				Paket	1	1	100,00%
Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	239.000.000,00	238.999.790,00	100,00%				
1. Pelatihan Keamanan dan Keselamatan di Destinasi/Daya Tarik Wisata dan Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran (termasuk Digitalisasi) Destinasi Pariwisata				Angkatan	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Penerapan destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	18.512.400,00	18.511.650,00	100,00%				
1. Koordinasi Pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Sleman				Kegiatan	1	1	100,00%
Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/kota	215.841.603,00	215.677.733,00	99,92%				
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	215.841.603,00	215.677.733,00	99,92%				
1. Monitoring usaha Pariwisata				Kali	24	24	100,00%
2. Pendataan usaha pariwisata				dokumen	1	1	100,00%
3. Analisis Belanja Wisatawan				dokumen	1	1	100,00%
Kegiatan Pengelolaan daya Tarik Wisata Kabupaten Sleman	1.009.701.040,00	1.009.601.115,00	99,99%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	928.439.607,00	928.346.050,00	99,99%				
1. Penyelenggaraan atraksi dan daya tarik wisata				Kali	24	24	100,00%
2. Sleman temple run				Kali	1	1	100,00%
3. Ngayogjazz				kali	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	81.261.433,00	81.255.065,00	99,99%				
1. Monitoring dan Evaluasi Penarikan Retribusi				bulan	12	12	100,00%
2. Pelatihan Motivasi pengelola ODTW				kali	1	1	100,00%
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	5.412.543.684,00	4.911.591.823,00	90,74%				
1. Jumlah kunjungan wisatawan				kunjungan	881.200,00	7.171.071,00	813,78%
Kegiatan Pemasaran Pariwisata dalam dan luar Negeri Daya tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	5.412.543.684,00	4.911.591.823,00	90,74%				
Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media cetak, Elektronik dan media lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	220.162.500,00	220.162.300,00	100,00%				
1. Familiarization Trip bagi mahasiswa (lokal maupun mancanegara), Pemandu wisata, blogger, vlogger maupun fotografer				kali	2	2	100,00%
2. Vidio miniseri Sleman				video	5	5	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	3.867.403.689,00	3.366.589.832,00	87,05%				
1. Pameran (MTF surabaya)				kali	1	1	100,00%
2. Promosi di media Masa (baliho)				pcs	6	6	100,00%
3. Promosi di media massa (jumpa press)				kali	4	4	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
4. Promosi di media massa (Pemuatan Advetorial)				kali	1	1	100,00%
5. Promosi di media massa (Spot Iklan di Radio)				kali	1	1	100,00%
6. Promosi di media massa (Streaming TV Lokal)				kali	1	1	100,00%
7. Promosi di media massa (Talkshow TV Lokal)				kali	1	1	100,00%
8. Tour de Merapi				kali	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan data dan penyebaran Informasi pariwisata Kabupaten/kota, Baik dalam dan luar Negeri	146.203.750,00	146.203.350,00	100,00%				
1. Sistem booking desa wisata				paket	1	1	100,00%
2. Pencatat Kunjungan Wisata				orang	22	22	100,00%
Sub Kegiatan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1.178.773.745,00	1.178.636.341,00	99,99%				
1. Bantuan Hibah Operasional BPPS				paket	1	1	100,00%
2. Pendampingan BPPS dalam pelaksanaan promosi pariwisata Sleman				bulan	12	12	100,00%
3. Operasional Sekber Java Promo				bulan	12	12	100,00%
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.598.742.564,00	2.592.085.646,00	99,74%				
1. Cakupan kelompok usaha, desa wisata/destinasi yang dibina dan cakupan komunitas ekonomi kreatif yang difasilitasi dalam aktivitas pariwisata				Kelompok (UJP)	8	8	100,00%
Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi kreatif Tingkat Dasar	2.598.742.564,00	2.592.085.646,00	99,74%				
Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kratif Tingkat Dasar	13.416.428,00	13.416.428,00	100,00%				
1. Bimtek Usaha jasa Pariwisata				Kegiatan	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pengembangan Kemitraan Pariwisata	761.608.155,00	761.587.953,00	100,00%				
1. Forkom desa Wisata				kali	2	2	100,00%
2. Forkom Podarwis				kali	2	2	100,00%
3. Kampanye Sadar Wisata Melalui saka pariwisata				kali	4	4	100,00%
4. Latihan krida saka pariwisata				kali	4	4	100,00%
5. Operasional petugas pengamanan ODTW, SAR, Polpar				bulan	6	6	100,00%
6. Pembinaan bagi pedagang dan pelaku pariwisata di ODTW				kali	1	1	100,00%
7. Peningkatan kapasitas Ikatan Dimas Dijeng (IDDS)				kali	2	2	100,00%
8. Pelatihanpeningkatan inovasi dan Higienitas sajian Kuliner (DAK Non Fisik)				angkatan	1	1	100,00%
9. Pelatihan pengelolaan Desa wisata (DAK Non Fisik)				angkatan	1	1	100,00%
10. Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (DAK Non Fisik)				angkatan	1	1	100,00%
11. Pelatihan Pemandu Wisata Buatan (DAK Non Fisik)				angkatan	1	1	100,00%
12. Pelatihan Digitalisasi: Branding, Pemasaran dan Penjualan pada Desa Wisata, Homestay, Kuliner, Souvenir, Fotografi - DAK Non Fisik				angkatan	1	1	100,00%
13. Peran Saka Nasional 2022				Kegiatan	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/guru)	1.345.945.731,00	1.343.243.115,00	99,80%				
1. Bimtek usaha pariwisata (Desa Wisata Tegalarum, Kronggahan II, Trihanggo, Gamping)				orang	30	30	100,00%
2. Bimtek usaha pariwisata (Maguwoharjo, Depok)				orang	30	30	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
3. Kajian Klasifikasi Desa Wisata 2022				kegiatan	1	1	100,00%
4. Pelatihan dan pendampingan pengelolaan desa wisata/ pokdarwis (Kalurahan Minomartani)				orang	30	30	100,00%
5. Pelatihan dan pendampingan pengelolaan desa wisata/pokdarwis (Pokdarwis Lava Bantal, Pokdarwis Jambu Dalhari, Pokdarwis Candi Abang, Jogotirto, Berbah)				orang	25	25	100,00%
6. Pelatihan dan pendampingan pengelolaan desa wisata/ pokdarwis (Sambirejo, Prambanan)				orang	25	25	100,00%
7. Pelatihan dan pendampingan pengelolaan desa wisata/pokdarwis (Soprayan, Girikerto, Turi)				orang	25	25	100,00%
8. Pelatihan dan pendampingan pengelolaan desa wisata/ pokdarwis (Sumber arum, Moyudan)				orang	25	25	100,00%
9. Pelatihan dan pendampingan pengelolaan desa wisata/pokdarwis (Tajem, Banjeng, Sembego dan Demangan, Maguwoharjo Depok)				orang	25	25	100,00%
10. Kegiatan Pelatihan dan pendampingan pengelolaan desa wisata/pokdarwis (Tangkilan, Sidoarum, Godean)				orang	25	25	100,00%
11. Pelatihan dan pendampingan pengelolaan desa wisata/ pokdarwis (Tegaltirto, Berbah)				orang	25	25	100,00%
12. Pelatihan manajemen pengeloaan destinasi wisata Kapanewon Cangkringan (Wukirsari, Umbulharjo dan Argomulyo)				orang	30	30	100,00%
13. Pelatihan manajemen pengeloaan destinasi wisata Kapanewon Gamping (Sukunan dan Kradenan Banyuraden)				orang	30	30	100,00%
14. Pelatihan manajemen pengeloaan destinasi wisata Kapanewon Minggir (Jonggrangan, Sendangrejo dan Daratan III, Sendangarum)				orang	30	30	100,00%
15. Pelatihan manajemen pengeloaan destinasi wisata Kapanewon Mlati (Rajek Wetan, Tirtoadi dan Banaran, Sendangadi)				orang	30	30	100,00%
16. Pelatihan manajemen pengeloaan destinasi wisata Kapanewon Moyudan (Sumberrahayu dan Sumberagung)				orang	25	25	100,00%
17. Pelatihan manajemen pengeloaan destinasi wisata Kapanewon Ngemplak (Bimomartani dan Sindumartani)				orang	30	30	100,00%
18. Pelatihan manajemen pengeloaan destinasi wisata Kapanewon Ngemplak (Widodomartani dan Wedomartani)				orang	30	30	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
19 Pelatihan manajemen pengelolaan destinasi wisata Kapanewon Prambanan (Gayamharjo, Bokoharjo dan Madurejo)				orang	30	30	100,00%
20 Pelatihan manajemen pengelolaan destinasi wisata Kapanewon Tempel (Lumbungrejo dan Pondokrejo)				orang	30	30	100,00%
21 Pelatihan manajemen pengelolaan destinasi wisata Kapanewon Tempel (Sumberrejo dan Banyurejo)				orang	30	30	100,00%
22 Pelatihan manajemen pengelolaan destinasi wisata (kuliner) Kapanewon Turi (Desa Wisata di Wilayah Wonokerto)				orang	25	25	100,00%
23 Pelatihan manajemen pengelolaan destinasi wisata (studi orientasi) Kapanewon Ngaglik (Dayakan Sardonojarjodan Wonorejo Sariharjo)				orang	30	30	100,00%
24 Pelatihan manajemen pengelolaan destinasi wisata (studi orientasi) Kapanewon Sleman (Tridadi dan Trimulyo)				orang	30	30	100,00%
25 Pelatihan manajemen pengelolaan Pokdarwis Kapanewon Seyegan (Cibuk Kidul, Margoluwih)				orang	25	25	100,00%
26 Pelatihan manajemen pengelolaan Desa Wisata (Catur Tunggal, Depok)				orang	25	25	100,00%
27 Pelatihan manajemen pengelolaan Desa Wisata (Desa Sidomulyo, Godean)				orang	30	30	100,00%
28 Pelatihan manajemen pengelolaan Desa Wisata (Kalurahan Donokerto, Turi)				orang	25	25	100,00%
29 Pelatihan manajemen pengelolaan Desa Wisata (Kalurahan Tridadi dan Pandowoharjo)				orang	30	30	100,00%
30 Pelatihan manajemen pengelolaan Desa Wisata (Palgading, Sinduharjo, Ngaglik)				orang	30	30	100,00%
31 Pelatihan SDM usaha pariwisata (Desa Wisata Nganggring, Girikerto, Turi)				orang	35	35	100,00%
32 Pelatihan SDM usaha pariwisata (Kalurahan Sumberharjo, Prambanan)				orang	30	30	100,00%
33 Pelatihan SDM usaha pariwisata (Turgo, Purwobinangun, Pakem)				orang	40	40	100,00%
34 Peningkatan partisipasi masyarakat melalui kampanye sadar wisata				kali	30	30	100,00%
Sub Kegiatan Setifikasi kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	50.507.250,00	46.657.250,00	92,38%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1. Pelatihan SDM Usaha Pariwisata				Kegiatan	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	427.265.000,00	427.180.900,00	99,98%				
1. Forum Komite ekonomi Kreatif				kali	2	2	100,00%
2. Sleman Creative Week				kali	1	1	100,00%
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN	2.625.000,00	2.623.850,00	99,96%				
1. Jumlah ruang ekonomi kreatif diruang publik dan Destinasi Wisata				ruang	10	10	100,00%
Kegiatan Penyediaan Prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota Kreatif) sebagai ruang berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	2.625.000,00	2.623.850,00	99,96%				
Sub Kegiatan Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	2.625.000,00	2.623.850,00	99,96%				
1. Perencanaan Revisi Master Plan Taman Kuliner Menjadi Sleman Creative Park				kali	1	1	100,00%



**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
2022**

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN	18.340.368.196,00	16.382.523.891,00	89,32%				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	7.454.063.344,00	6.134.614.236,00	82,30%				
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.732.430,00	26.242.875,00	98,17%				
Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.184.765,00	5.034.675,00	97,11%				
1 Dokumen perjanjian kinerja				dokumen	3	3	100,00%
2 Dokumen perubahan perjanjian kinerja				dokumen	3	3	100,00%
3 Dokumen perubahan renja				dokumen	1	1	100,00%
4 Dokumen renja				dokumen	1	1	100,00%
Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.589.885,00	2.567.250,00	99,13%				
1 Dokumen RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.589.885,00	2.567.250,00	99,13%				
1 Dokumen perubahan RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.589.885,00	2.505.750,00	96,75%				
1 Dokumen DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.589.885,00	2.386.450,00	92,15%				
1 Dokumen perubahan DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.188.125,00	11.181.500,00	99,94%				
1 Dokumen dalev terhadap hasil kebijakan				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen dalev terhadap hasil renja PD (form e75)				dokumen	4	4	100,00%
3 Dokumen dalev terhadap pelaksanaan renja PD (form e81)				dokumen	4	4	100,00%
4 Dokumen evaluasi kinerja				dokumen	14	14	100,00%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.148.503.124,00	4.201.269.817,00	81,60%				
Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.899.668.353,00	4.003.809.757,00	81,72%				
1 Pembayaran gaji, tunjangan, premi asuransi dan TPP ASN				bulan	12	12	100,00%
Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	231.625.000,00	180.448.060,00	77,91%				
1 Pembayaran honorarium pengelola keuangan/barang				bulan	12	12	100,00%
Sub kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6.259.973,00	6.232.750,00	99,57%				
1 Dokumen tanggapan hasil pemeriksaan				dokumen	1	1	100,00%
Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.949.798,00	10.779.250,00	98,44%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Laporan aset/barang milik daerah				dokumen	2	2	100,00%
2 Laporan keuangan semesteran				dokumen	2	2	100,00%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	606.236.613,00	525.260.778,00	86,64%				
Sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	606.236.613,00	525.260.778,00	86,64%				
1 Laporan pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi				dokumen	1	1	100,00%
2 Layanan administrasi kepegawaian				bulan	12	12	100,00%
3 Pembayaran tenaga non PNS/ PHL				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	662.431.016,00	597.865.330,00	90,25%				
Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.273.704,00	22.910.480,00	90,65%				
1 Alat listrik				macam	9	9	100,00%
2 Jasa penambahan daya listrik				kali	1	1	100,00%
Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.797.589,00	41.455.000,00	80,03%				
1 Peralatan dan perlengkapan kantor				paket	1	1	100,00%
Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	211.306.610,00	194.199.189,00	91,90%				
1 Alat tulis kantor				paket	2	2	100,00%
Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.949.755,00	36.896.000,00	92,36%				
1 layanan cetak dan penggandaan dokumen				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	24.000.000,00	23.975.001,00	99,90%				
1 Layanan makan minum tamu				bulan	12	12	100,00%
Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	207.342.000,00	177.680.850,00	85,69%				
1 Layanan perjalanan dinas dalam daerah				bulan	12	12	100,00%
2 Layanan perjalanan dinas luar daerah				bulan	12	12	100,00%
Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	46.387.590,00	46.006.000,00	99,18%				
1 Pengelolaan arsip dan perpustakaan				bulan	12	12	100,00%
2 Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah				bulan	12	12	100,00%
Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	56.373.768,00	54.742.810,00	97,11%				
1 Pengelolaan Informasi dan Dokumen Perangkat Daerah				bulan	12	12	100,00%
2 Pengelolaan Website Perangkat Daerah				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	465.697.636,00	366.766.521,00	78,76%				
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.139.833,00	4.980.000,00	96,89%				
1 Layanan surat menyurat				bulan	12	12	100,00%
2 Pengelolaan arsip dan perpustakaan				bulan	12	12	100,00%
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	185.300.000,00	133.887.014,00	72,25%				
1 Pembayaran langganan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	275.257.803,00	227.899.507,00	82,79%				
1 Pelayanan keamanan dan kebersihan				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	544.462.525,00	417.208.915,00	76,63%				
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	313.608.000,00	217.809.615,00	69,45%				
1 Layanan penyediaan bahan bakar minyak (BBM) kendaraan				bulan	12	12	100,00%
2 Pemeliharaan kendaraan dinas				bulan	12	12	100,00%
Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel	17.500.000,00	17.400.000,00	99,43%				
1 Layanan pemeliharaan meubelair				bulan	12	12	100,00%
Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.524.771,00	79.679.800,00	72,09%				
1 Pemeliharaan peralatan kerja				unit	132	132	100,00%
Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	102.829.754,00	102.319.500,00	99,50%				
1 Pemeliharaan gedung kantor				bulan	12	12	100,00%
2 Pemeliharaan taman				bulan	12	12	100,00%
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	7.284.984.696,00	6.777.885.435,00	93,04%				
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	7.284.984.696,00	6.777.885.435,00	93,04%				
Sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	950.651.040,00	875.280.040,00	92,07%				
1 Dokumen hasil pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa				dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2 Peningkatan Kapasitas bagi lurah				kali	1	1	100,00%
Sub kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	170.174.080,00	143.334.950,00	84,23%				
1 Rapat koordinasi pembahsan produk hukum daerah				kali	22	23	104,55%
2 Sosialisasi produk hukum daerah				kali	1	1	100,00%
3 Penyusunan Naskah Akademik				dokumen	2	2	100,00%
Sub kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	371.942.260,00	355.617.632,00	95,61%				
1 Bimtek pengelolaan sistem informasi desa				angkatan/ orang	3/18	3/18	100,00%
2 Pembinaan dan pengembangan sistem informasi desa				desa	86	86	100,00%
3 Pembinaan siklus tahunan desa				desa	86	86	100,00%
4 Lounching Sistem Informasi Desa				kali	1	1	0,00%
Sub kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	2.312.941.034,00	1.972.223.939,00	85,27%				
1 Dokumen Hasil Monev Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khususah desa oleh pemda				dokumen	86	86	100,00%
2 Pembinaan Kaur Keuangan dan Pembantu Pelaksana				desa	86	86	100,00%
3 Pencairan dan Penyampaian Alokasi Dana Desa				desa	86	86	100,00%
4 SK Bupati tentang besaran alokasi dana desa, penghasilan tetap dan dana desa				SK	3	1	33,33%
5 Pencairan dan Penyampaian BKK				desa	86	86	100,00%
6 Pencairan dan Penyampaian Dana Desa				desa	86	86	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
7 Peraturan Bupati				perbup	2	4	200,00%
8 Petunjuk Pelaksanaan				juklak	2	9	450,00%
9 Petunjuk Teknis				juknis	2	0	0,00%
10 Surata Edaran				SE	4	20	500,00%
Sub kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	9.060.000,00	8.506.175,00	93,89%				
1 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pungutan desa				raperdes	30	15	50,00%
2 Klarifikasi peraturan-peraturan desa				desa	86	18	20,93%
3 Pembinaan dan monitoring raperdes tentang pungutan desa				desa	86	86	100,00%
Sub kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	666.865.000,00	649.697.200,00	97,43%				
1 Bimtek peningkatan kapasitas BUMDesa (PUPM)				kali	1	1	100,00%
2 Pembinaan BUMDesa				kali	1	2	200,00%
3 Sosialisasi pengamanan air minum berbasis masyarakat (PAMSIMAS)				kali	2	2	100,00%
4 Kalurahan Inovatif				kali	1	1	100,00%
Sub kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	90.582.572,00	84.403.650,00	93,18%				
1 Pembinaan dan monitoring pengisian perangkat desa				orang	25	102	408,00%
Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	34.788.000,00	33.575.100,00	96,51%				
1 Updating IDM (Indeks Desa Membangun)				dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2 Updating profil desa				dokumen	1	1	100,00%
Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	2.207.123.180,00	2.187.026.699,00	99,09%				
1 Pembayaran sewa Tanah Kas Desa				bidang	143	188	131,47%
2 Pembinaan pengelolaan aset desa				desa	86	86	100,00%
3 Pembinaan pengurus dan pembantu pengurus aset desa				desa	86	86	100,00%
4 Pembuatan dan penyelesaian perijinan sewa tanah desa oleh pemda				bidang	15	25	166,67%
Sub kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	114.828.760,00	113.131.650,00	98,52%				
1 Bintek BPD				angkatan	7	7	100,00%
2 Dukumen laporan kinerja BPD				dokumen	1	1	100,00%
3 Pemrosesan PAW BPD dan Pemantuannya				PAW BPD	5	5	100,00%
Sub kegiatan Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	5.599.770,00	5.570.700,00	99,48%				
1 Pembinaan LPPD, LKPPD dan IPPD				desa	86	86	100,00%
Sub kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	350.429.000,00	349.517.700,00	99,74%				
1 Dokumen evaluasi perkembangan desa				dokumen	1	1	100,00%
2 Lomba Desa				nominator	1	1	100,00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.488.939.456,00	3.365.576.025,00	96,46%				
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat	3.488.939.456,00	3.365.576.025,00	96,46%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota							
Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	390.295.706,00	354.846.175,00	90,92%				
1 Pembinaan Karang Taruna Desa				lokasi	18	18	100,00%
2 Pembinaan Karang Taruna Kabupaten				kali	1	1	100,00%
3 Pembinaan LPM				kali	1	1	100,00%
4 Pembinaan Posyandu				kecamatan	17	17	100,00%
5 Pembinaan RT/RW				kali	1	1	100,00%
6 Evaluasi Posyandu Tingkat Provinsi				kali	1	1	
Sub kegiatan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	44.000.000,00	41.547.050,00	94,43%				
1 Pebinaan Karang Taruna				Kalurahan	4	4	100,00%
Sub kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	45.627.000,00	42.256.750,00	92,61%				
1 Pembinaan pelatihan pengelolaan pasar desa				Pasar	6	6	100,00%
2 Pembinaan PNPm paska program				kecamatan	10	10	100,00%
Sub kegiatan Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1.573.494.000,00	1.569.983.000,00	99,78%				
1 Pelaksanaan TMMD				lokasi	3	3	100,00%
2 Pembukaan TMMD				lokasi	3	3	100,00%
3 Penutupan TMMD				lokasi	3	3	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.435.522.750,00	1.356.943.050,00	94,53%				
1 Dokumen rencana aksi tentang 10 program pkk				dokumen	1	1	100,00%
2 Lomba PKK Tingkat Kabupaten				kali	1	1	100,00%
3 Lomba PKK tingkat Propinsi				kali	1	1	100,00%
4 Operasional TPA (tempat Penitipan anak)				kali	1	1	100,00%
5 Pameran pembangunan				kali	0	0	0,00%
6 Penyelenggaraan 10 program pokok				kali	24	24	100,00%
7 Sekolah jumat				kali	48	49	102,08%
8 Peningkatan Kapasitas Pengurus PKK Kabupaten				kali	1	1	100,00%
9 Peningkatan Kapasitas Pengurus PKK Kalurahan Kapanewon Kabupaten				kali	1	1	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KESITIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	112.380.700,00	104.448.195,00	92,94%				
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan	112.380.700,00	104.448.195,00	92,94%				
Sub kegiatan pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	112.380.700,00	104.448.195,00	92,94%				
1 Dokumen kegiatan pembinaan kelembagaan pelaksanaan kesitimewaan				dokumen	1	1	100,00%



**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2022**

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	13.697.837.714,00	12.724.959.632,19	92,90%				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	13.697.837.714,00	12.724.959.632,00	92,90%				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	10.713.984.236,00	9.787.275.168,00	91,35%				
1. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				persen	100,00	100,00	100,00%
2. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja				persen	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.995.416,00	27.812.730,00	99,35%				
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.100.000,00	8.095.500,00	99,94%				
1. Dokumen Renja				dokumen	1	1	100,00%
2. Dokumen Perubahan Renja				dokumen	1	1	100,00%
3. Dokumen Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
4. Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.412.258,00	1.393.900,00	98,70%				
1. Dokumen RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.404.983,00	1.375.000,00	97,87%				



URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1. Dokumen Perubahan RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.224.800,00	2.143.450,00	96,34%				
1. Dokumen DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.726.200,00	1.702.000,00	98,60%				
1. Dokumen Perubahan DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.127.175,00	13.102.880,00	99,81%				
1. Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja				dokumen	1	1	100,00%
2. Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja				dokumen	4	4	100,00%
3. Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja				dokumen	4	4	100,00%
4. Dokumen RFK				dokumen	12	12	100,00%
5. Dokumen LKJIP/LAKIP				dokumen	1	1	100,00%
6. Dokumen Laporan Tahunan				dokumen	1	1	100,00%
7. Dokumen Laporan bulanan				dokumen	12	12	100,00%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.243.540.991,00	6.360.328.796,00	87,81%				
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.032.100.991,00	6.150.906.546,00	87,47%				
1. Pembayaran gaji dan tunjangan				bulan	14	14	100,00%
2. Pembayaran iuran BPJS				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
3. Pembayaran TPP				bulan	14	14	100,00%
4. Pembayaran luran Tappera				bulan	12	12	100,00%
5. Pembayaran Insentif Retribusi PBG				Triwulan	4	4	100,00%
Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	207.165.000,00	205.170.500,00	99,04%				
1. Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4.275.000,00	4.251.750,00	99,46%				
1. Dokumen Laporan keuangan semesteran				dokumen	2	2	100,00%
2. Dokumen Laporan aset/ BMD semesteran				dokumen	2	2	100,00%
3. Dokumen tanggapan pemeriksaan				dokumen	1	1	100,00%
Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1.620.000,00	1.575.000,00	97,22%				
Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	1.620.000,00	1.575.000,00	97,22%				
1. Terselenggaranya pelaporan retribusi PBG				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.159.628.375,00	1.143.860.064,00	98,64%				
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.159.628.375,00	1.143.860.064,00	98,64%				
1. Layanan Administrasi Kepegawaian				bulan	12	12	100,00%
2. Pembayaran tenaga non PNS / PHL				bulan	12	12	100,00%
3. Dokumen Laporan pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi				dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	558.889.617,00	557.662.482,00	99,78%				
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.174.000,00	8.171.500,00	99,97%				
1. Penyediaan peralatan listrik				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	167.144.514,00	166.796.333,00	99,79%				
1. Layanan administrasi umum				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.236.353,00	9.236.350,00	100,00%				
1. Layanan cetak dan penggandaan dokumen DPMPPT dan MPP				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	21.825.000,00	21.708.850,00	99,47%				
1. Layanan makanan dan minuman tamu				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	271.596.000,00	271.565.989,00	99,99%				
1. Layanan perjalanan dinas luar daerah				bulan	12	12	100,00%
2. Layanan perjalanan dinas dalam daerah				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40.911.750,00	40.739.900,00	99,58%				
1. Pengelolaan arsip dan perpustakaan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	40.002.000,00	39.443.560,00	98,60%				
1. Pengelolaan PPID Pembantu				bulan	12	12	100,00%
2. Pengelolaan website				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.171.879.177,00	1.150.212.881,00	98,15%				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00%				
1. Layanan surat menyurat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	320.225.000,00	314.282.850,00	98,14%				
1. Pembayaran jasa langganan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	843.154.177,00	827.430.031,00	98,14%				
1. Pembayaran jasa kebersihan (6 orang) DPMPPT dan MPP				bulan	12	12	100,00%
2. Pembayaran jasa keamanan (7 orang) DPMPPT dan MPP				bulan	12	12	100,00%
3. Pembayaran jasa pengemudi (1 orang)				bulan	12	12	100,00%
4. Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemerintahan Daerah	550.430.660,00	545.823.215,00	99,16%				
Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	220.144.000,00	220.096.375,00	99,98%				
1. Layanan pemeliharaan kendaraan dinas				bulan	12	12	100,00%
2. Layanan penyediaan BBM				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	6.750.000,00	6.750.000,00	100,00%				
1. Layanan pemeliharaan mebel				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79.176.500,00	76.019.475,00	96,01%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1. Layanan pemeliharaan peralatan kerja				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	244.360.160,00	242.957.365,00	99,43%				
1. Pemeliharaan gedung kantor				bulan	12	12	100,00%
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	258.050.214,00	257.842.159,00	99,92%				
1. Persentase izin prinsip, izin lokasi, dan izin usaha yang ditindaklanjuti				persen	85	99,71	117,31%
Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	150.243.320,00	150.107.058,00	99,91%				
Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	94.974.620,00	94.859.950,00	99,88%				
1. Izin Sektor Kesehatan				Izin	4.250	4.393	103,00%
2. Izin Sektor Pendidikan				Izin	150	191	127,00%
3. Izin Sektor Tenaga Kerja				Izin	25	26	104,00%
4. Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial				Izin	20	22	110,00%
5. Izin Surat Keterangan Penelitian				Izin	15	13	87,00%
6. Izin KKN				Izin	40	41	103,00%
Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	55.268.700,00	55.247.108,00	99,96%				
1. Fasilitas persyaratan dasar perizinan sektor perdagangan dan industri di OSS industri di OSS				Perusahaan	90	90	100,00%
2. Inventarisasi Izin Sektor Perdagangan dan Sektor Industri				Izin	9.000	9.028	100,00%
Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	107.806.894,00	107.735.101,00	99,93%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	107.806.894,00	107.735.101,00	99,93%				
1. Pelayanan perizinan berusaha sektor pertanian				Izin	60	93	155,00%
2. Pelayanan perizinan berusaha sektor pariwisata				Izin	4.000	4.023	101,00%
3. Pelayanan perizinan berusaha sektor perhubungan				Izin	8	7	88,00%
PROGRAM PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	540.405.207,00	535.562.544,00	99,10%				
1. Jumlah Investor Baru				Investor	925	1.004	108,54%
2. Jumlah Investor yang bermitra dengan UMKM				UMKM	160		
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	540.405.207,00	535.562.544,00	99,10%				
Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	99.012.207,00	96.872.678,00	97,84%				
1. Ploting Keterangan Rencana Kabupaten				KRK	975	1.122	115,00%
2. Ploting PKKPR Berusaha Non UMK				Izin	60	91	152,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	441.393.000,00	438.689.866,00	99,39%				
1. APKASI/AITIS				Kali	1	1	100,00%
2. Dokumen pemetaan potensi investasi				dokumen	2	2	100,00%
3. Analisis ekonomi terhadap investasi baru				dokumen	2	2	100,00%
4. Pembuatan dan penyiaran iklan layanan masyarakat melalui media sosial				Kali	1	1	100,00%
5. Materi Promosi (Cetak Leaflet)				Lembar	352	352	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
6. Materi Promosi (Cetak Booklet)				Buku	99	99	100,00%
7. Materi Majalah/Buletin				Eksemplar	90	90	100,00%
8. Temu Kemitraan 5 PMA-PMDN				Perusahaan	7	7	100,00%
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.223.754.357,00	1.190.100.091,00	97,25%				
1. Persentase jumlah permohonan izin yang dilayani				Persen	100,00	100,00	100,00%
2. Persentase peningkatan jumlah bangunan ber IMB di Kabupaten Sleman				Persen	1	1	103,00%
3. Dokumen evaluasi perizinan dan non-perizinan				dokumen	1	1	100,00%
Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1.223.754.357,00	1.190.100.091,00	97,25%				
Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non-Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	225.025.200,00	223.980.216,00	99,54%				
1. Layanan OSS				Pemohon	9.000	9.853	109,00%
2. Layanan Pengambilan/pengiriman SK jadi				SK	9.500	9.312	98,00%
3. Pembayaran SKRD				SKRD	1.750	1.493	85,00%
4. Pendaftaran Perizinan				Pemohon	17.500	19.251	110,00%
5. Map SK				Buah	2.500	2.500	100,00%
Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non- Perizinan Penanaman Modal	884.030.990,00	853.180.022,00	96,51%				
1. Izin penutupan drainase				Izin	10	21	210,00%
2. Izin pemindahan saluran irigasi				Izin	10	8	80,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
3. Izin penutupan saluran irigasi dan sempadan saluran irigasi				Izin	120	172	143,00%
4. Izin pemanfaatan ruang milik jalan untuk jalan masuk				Izin	50	56	112,00%
5. Izin pemanfaatan ruang milik jalan untuk media iklan				kali	15	15	100,00%
6. Izin pemanfaatan ruang milik jalan untuk utilitas				Izin	10	12	120,00%
7. Izin reklame				Izin	25	40	160,00%
8. Dispensasi PBG				Izin	4.000	2.924	73,00%
9. Persetujuan Bangunan Gedung				Izin	1.500	1.726	115,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non- Perizinan	33.963.000,00	32.902.100,00	96,88%				
1. Layanan konsultasi pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Izin Mendirikan Bangunan				Surat	10	5	50,00%
2. Layanan Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan				Aduan	25	40	160,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Perizinan Penanaman Modal	80.735.167,00	80.037.753,00	99,14%				
1. Updating SP dan SOP				dokumen	1	1	100,00%
2. Raperbup tentang Perizinan Berusaha				dokumen	1	1	100,00%
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	714.038.100,00	709.991.814,00	99,43%				
1. Persentase izin pemanfaatan ruang yang terselesaikan				%	90,00	81,40	90,00%
2. Prosentase peningkatan investasi di Kabupaten				%	6,03	4,79	79,00%
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	714.038.100,00	709.991.814,00	99,43%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	167.612.783,00	166.607.934,00	99,40%				
1. Keterangan Rencana Kabupaten				KRK	975	1.122	115,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	340.794.374,00	339.507.200,00	99,62%				
1. Jumlah pelaku usaha dari pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal				Pelaku Usaha	605	622	103,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	205.630.943,00	203.876.680,00	99,15%				
1. Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan				Kegiatan Usaha	50	57	114,00%
2. Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang non berusaha				Izin	550	843	153,00%
5. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR)				Izin	380	418	110,00%
PROGRAM PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	247.605.600,00	244.187.856,00	98,62%				
1. Persentase jumlah izin yang diselesaikan				Persen	92,24	93,53	101,40%
Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	247.605.600,00	244.187.856,00	98,62%				
Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	247.605.600,00	244.187.856,00	98,62%				
1. Pelayanan Informasi dan data				Pemohon	10.000	10.167	102,00%
2. Pemeliharaan dan Evaluasi Aplikasi Sistem Perizinan				Paket	1	1	100,00%
3. Publikasi lewat media TV				Paket	4	4	100,00%





**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN
2022**

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN				
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN	75.575.645.542,00	68.995.535.116,35	91,29%				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4.878.139.435,00	4.802.575.834,00	98,45%				
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	49.883.510,00	49.719.245,00	99,67%				
1 Jumlah lumbung pangan masyarakat yang aktif				unit	32	32	100,00%
Kegiatan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota	49.883.510,00	49.719.245,00	99,67%				
Sub kegiatan penyediaan infrastruktur lumbung pangan	49.883.510,00	49.719.245,00	99,67%				
1 Pelatihan pengelola lumbung				angkatan	1	1	100,00%
2 Pembinaan Kelembagaan lumbung pangan desa				bulan	12	12	100,00%
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	4.738.287.755,00	4.663.066.872,00	98,41%				
1 Peningkatan jumlah KWT pengelola pemanfaatan pekarangan				kelompok	3		
2 Peningkatan jumlah toko mitra tani				unit	2		
3 Penambahan cadangan pangan pemerintah daerah				ton	15		
Kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	1.220.468.905,00	1.204.420.994,00	98,69%				
Sub kegiatan penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	23.819.850,00	22.718.667,00	95,38%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN				
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Forkom Bidang Ketahanan Pangan				kali	1	1	100,00%
2 Forkom PMHP				kali	1	1	100,00%
3 Laporan hasil analisa Neraca Bahan Makanan (NBM)				dokumen	1	1	100,00%
4 Workshop NBM				kali	1	1	100,00%
Sub kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan/penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	1.071.370.550,00	1.060.582.394,00	98,99%				
1 Bimbingan Pengemasan Produk Olahan				angkatan	1	1	100,00%
2 Buku Profil Bidang Tanaman Pangan				buku	13	13	100,00%
3 Pelatihan Olahan Hasil Komoditas TP (Cageran, Tamanmartani, Kalasan)				angkatan	1	1	100,00%
4 Pelatihan Olahan Hasil Komoditas TP (Gamol, Balecat, Gamping)				angkatan	1	1	100,00%
5 Pelatihan Olahan Hasil Komoditas TP (Gondang 3, Wukirsari, Cangkringan)				angkatan	1	1	100,00%
6 Pelatihan Olahan Hasil Komoditas TP (Gondanglegi, Candibinangun, Pakem)				angkatan	1	1	100,00%
7 Pelatihan Olahan Hasil Komoditas TP (Jitar, Sumberarum, Moyudan)				angkatan	1	1	100,00%
8 Pelatihan Olahan Hasil Komoditas TP (Jogotirto, Berbah)				angkatan	1		
9 Pelatihan Olahan Hasil Komoditas TP (Kalitirto, Berbah)				angkatan	1	1	100,00%
10 Pelatihan Olahan Hasil Komoditas TP (Kalurahan Wonokerto, Turi)				angkatan	1	1	100,00%
11 Pelatihan Olahan Hasil Komoditas TP (KWT Klegen, Trimulyo, Sleman)				angkatan	1	1	100,00%
12 Pelatihan Olahan Hasil Komoditas TP (KWT Tunas Mekar, Karangwuni, Caturtunggal)				angkatan	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN				
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
13 Pelatihan Olahan Hasil Komoditas TP (Pangukrejo, Umbulharjo, Cangkringan)				angkatan	1	1	100,00%
14 Pelatihan Olahan Hasil Komoditas TP (Sambilegi dan Ringinsari, Maguwoharjo, Depok)				angkatan	2	2	100,00%
15 Pelatihan Olahan Hasil Komoditas TP (Sardonoharjo, Ngaglik)				angkatan	1	1	100,00%
16 Pelatihan Olahan Hasil Komoditas TP (Sendangtirto, Berbah)				angkatan	1	1	100,00%
17 Pelatihan Olahan Hasil Komoditas TP (Sidorejo, Umbulharjo, Cangkringan)				angkatan	1	1	100,00%
18 Pelatihan Olahan Hasil Komoditas TP (Sumberharjo, Prambanan)				angkatan	1	1	100,00%
19 Pelatihan Olahan Hasil Komoditas TP (Tegalmbarep, Wukirsari, Cangkringan)				angkatan	1	1	100,00%
20 Pelatihan Olahan Hasil Komoditas TP (Tegaltirto, Berbah)				angkatan	1	1	100,00%
21 Pelatihan Olahan Hasil Tanaman Pangan (Kapanewon Minggir)				angkatan	1	1	100,00%
22 Pelatihan Olahan Hasil Tanaman Pangan (KWT Makmur Sejahtera, Ambarketawang, Gamping)				angkatan	1	1	100,00%
23 Pelatihan Pemasaran Hasil Pertanian (Kapanewon Turi)				angkatan	1		
24 Pelatihan Pemasaran Hasil Pertanian (Merdikorejo, Tempel)				angkatan	1	1	100,00%
25 Pelatihan Pengemasan Olahan Hasil Pertanian (Kader PKK Kalurahan Margorejo, Tempel)				angkatan	1	1	100,00%
26 Pelatihan Pengemasan Olahan Hasil Pertanian (Kalurahan Bokoharjo, Prambanan)				angkatan	1	1	100,00%
27 Pelatihan Pengemasan Olahan Hasil Pertanian (Kalurahan Jogotirto, Berbah)				angkatan	1	1	100,00%
28 Pelatihan Pengemasan Olahan Hasil Pertanian (Kalurahan Lumbungrejo, Tempel)				angkatan	1	1	100,00%
29 Pelatihan Pengemasan Olahan Hasil Pertanian (Kalurahan Sendangadi, Mlati)				angkatan	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN				
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
30 Pelatihan Pengemasan Olahan Hasil Pertanian (Kalurahan Widodomartani, Ngemplak)				angkatan	1	1	100,00%
31 Pelatihan Pengemasan Olahan Hasil Pertanian (Kalurahan Wonokerto, Turi)				angkatan	1	1	100,00%
32 Pelatihan UPJA (Kapanewon Mlati)				angkatan	1	1	100,00%
33 Pelatihan UPJA (Usaha Pelayanan Jasa Alsintan)				angkatan	1	1	100,00%
34 Penyaluran Dana Penguatan Modal				kelompok	25	25	100,00%
Sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	40.000.000,00	38.917.552,00	97,29%				
1 Bimtek LDPM				kali	1	1	100,00%
2 Laporan Perkembangan Kegiatan LDPM (Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat)				dokumen	1	1	100,00%
3 Pembinaan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi				kali	3	3	100,00%
4 Pengadaan Kemasan Beras				paket	1	1	100,00%
5 Penguatan Modal Melalui Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan				kelompok	12	12	100,00%
Sub kegiatan pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan	25.000.000,00	24.999.678,00	100,00%				
1 Bimtek Lembaga Akses Pangan Masyarakat				kali	1	1	100,00%
2 Laporan harga pangan pokok				dokumen	1	1	100,00%
3 Laporan monitoring harga pasar menjelang hari besar keagamaan				dokumen	1	1	100,00%
4 Monitoring LAPM				kali	8	8	100,00%
5 Pertemuan gapoktan LAPM (Lembaga Akses Pangan Masyarakat)				kali	16	16	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN				
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub kegiatan pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani indonesia	60.278.505,00	57.202.703,00	94,90%				
1 Laporan stok opname PUPM/TTI				dokumen	1	1	100,00%
2 Monitoring PUPM/TTI				kali	10	10	100,00%
3 Paparan analisis ketahanan pangan				kali	1	1	100,00%
4 Pengadaan Kendaraan Roda 3 (tiga)				unit	1	1	100,00%
Kegiatan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota	181.362.750,00	170.251.704,00	93,87%				
Sub kegiatan pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	181.362.750,00	170.251.704,00	93,87%				
1 Pembelian beras cadangan pangan				ton	15	15	100,00%
2 Pengelolaan cadangan pangan daerah				bulan	12	12	100,00%
3 Statistik/ profil ketahanan pangan				dokumen	1	1	100,00%
Kegiatan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	3.336.456.100,00	3.288.394.174,00	98,56%				
Sub kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	3.312.283.325,00	3.264.221.984,00	98,55%				
1 KRPL (Sendangmulyo, Minggir)				angkatan	1	1	100,00%
2 Pelatihan Hidroponik (Kalasan)				angkatan	1	1	100,00%
3 Pelatihan pemanfaatan Pekarangan				angkatan	49	49	100,00%
4 Pelatihan Pemanfaatan pekarangan				angkatan	1	1	100,00%
5 Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan (Ambarketawang, Gamping)				angkatan	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN				
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
6 Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan (KWT Strawberry, Ambarketawang, Gamping)				angkatan	1	1	100,00%
7 Pelatihan Pemanfaatan pekarangan (Mlati)				angkatan	1	1	100,00%
8 Pelatihan pemanfaatan pekarangan (Sendangarum, Minggir)				angkatan	1	1	100,00%
9 Pelatihan Pemanfaatan pekarangan (Seyegan)				angkatan	1	1	100,00%
10 Pelatihan Pemanfaatan pekarangan (Tempel)				angkatan	2	2	100,00%
11 Pelatihan Pemanfaatan pekarangan (Usulan langsung)				angkatan	16	16	100,00%
12 Pembinaan KWT pemanfaatan pekarangan				kelompok	46	46	100,00%
13 Pengembangan P2L (Pekarangan Pangan Lestari)				lokasi	2	2	100,00%
14 Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari P2L				lokasi	4	4	100,00%
15 Penyediaan benih dan bibit sayuran dan dan buah				paket	1	1	100,00%
16 Penyediaan sarana pemanfaatan pekarangan				paket	1	1	100,00%
17 PHL				bulan	12	12	100,00%
Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun	24.172.775,00	24.172.190,00	100,00%				
1 Laporan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat				dokumen	1	1	100,00%
2 Pelatihan aplikasi konsumsi				angkatan	3	3	100,00%
3 Penyusunan Pola Pangan Harapan dan konsumsi pangan				kali	1	1	100,00%
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	66.298.750,00	66.126.675,00	99,74%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN				
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Penanganan daerah rawan pangan / waspada pangan				desa	3		
Kegiatan penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota	66.298.750,00	66.126.675,00	99,74%				
Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	66.298.750,00	66.126.675,00	99,74%				
1 Pelatihan pengembangan kelembagaan dan pengelolaan keuangan kelompok afinitas				angkatan	1	1	100,00%
2 Pembinaan pengembangan desa mandiri pangan				desa	8	8	100,00%
3 Penanganan daerah potensi rawan pangan/ waspada pangan				lokasi	3	3	100,00%
4 Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi				dokumen	1	1	100,00%
5 Workshop SKPG				kali	1	1	100,00%
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	23.669.420,00	23.663.042,00	99,97%				
1 Peningkatan Jumlah sertifikasi mutu dan keamanan pangan				sertifikasi	3	3	100,00%
Kegiatan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	23.669.420,00	23.663.042,00	99,97%				
Sub kegiatan penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	23.669.420,00	23.663.042,00	99,97%				
1 Bimbingan penerapan jaminan mutu produk pangan				angkatan	1	1	100,00%
2 Legalitas mutu keamanan produk segar				sertifikat	3	3	100,00%
3 Pendampingan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)				bulan	12	12	100,00%
4 Pengawasan pangan segar				bulan	12	12	100,00%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	395.415.000,00	394.856.278,00	99,86%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN				
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	395.415.000,00	394.856.278,00	99,86%				
PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI BUDAYA	395.415.000,00	394.856.278,00	99,86%				
<i>PENGEMBANGAN LUMBUNG MATARAMAN</i>	395.415.000,00	394.856.278,00	99,86%				
1 Pengembahan padi sembada merah dan sembada hitam				lokasi	5	5	100,00%
2 Penumbuhan KWT lumbung mataraman				kelompok	2	2	100,00%
3 Pengembangan Lumbung Mataraman				kelompok	6	6	100,00%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.333.507.000,00	4.129.724.500,00	95,30%				
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	160.000.000,00	158.233.800,00	98,90%				
1 Penambahan populasi ikan lokal di perairan umum				kg	2000		
Kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	160.000.000,00	158.233.800,00	98,90%				
<i>Sub kegiatan penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap</i>	160.000.000,00	158.233.800,00	98,90%				
1 Penebaran benih ikan di perairan umum				kg	2000	2000	100,00%
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.991.565.000,00	2.860.811.437,00	95,63%				
Kegiatan pemberdayaan pembudi daya ikan kecil	1.541.796.300,00	1.524.717.988,00	98,89%				
<i>Sub kegiatan pengembangan kapasitas pembudi daya ikan kecil</i>	181.200.603,00	179.156.288,00	98,87%				
1 Kursus Budidaya Ikan Balai Kalurahan Margorejo Tempel				angkatan	1	1	100,00%
2 Kursus Budidaya Ikan Mororejo Tempel				angkatan	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN				
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
3 Kursus Budidaya Ikan Nila Maguwoharjo Depok				angkatan	1	1	100,00%
4 Kursus Budidaya Ikan Sidoagung Godean				angkatan	1	1	100,00%
5 Kursus Budidaya Ikan Sindumartani Ngemplak				angkatan	1	1	100,00%
6 Kursus Budidaya Ikan Sumberadi Mlati				angkatan	1	1	100,00%
7 Kursus Budidaya Ikan Sumbersari Moyudan				angkatan	1	1	100,00%
8 Pelatihan Pembuatan Pakan Alternatif Pembudidaya Gurami Seyegan				angkatan	1	1	100,00%
9 Pengadaan Obat-obatan ikan				paket	1	1	100,00%
Sub kegiatan pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil	12.389.800,00	12.371.580,00	99,85%				
1 Pembuatan Buletin Tiga Bulanan OVA				eksemplar	0	0	#DIV/0!
2 Pertemuan forum kemitraan pelaku usaha perikanan				kali	1	1	100,00%
3 Pertemuan forum pelaku pakan mandiri				kali	1	1	100,00%
4 Pertemuan forum pembenihan				kali	1	1	100,00%
5 Pertemuan forum pembudidaya gurami/udang galah				kali	1	1	100,00%
6 Pertemuan forum pembudidaya ikan hias				kali	1	1	100,00%
Sub kegiatan pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	1.348.205.897,00	1.333.190.120,00	98,89%				
1 Demfarm Budidaya Nila dengan Kincir				paket	1	1	100,00%
2 Demfarm UGADI				paket	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN				
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
3 Honor Pegawai Harian Lepas				bulan	12	12	100,00%
4 Pelatihan Budidaya Ikan dan Sayur				angkatan	62	62	100,00%
5 Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan				angkatan	6	6	100,00%
6 Pelatihan Pengelolaan Budidaya Perikanan				angkatan	13	13	100,00%
Kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan	1.449.768.700,00	1.336.093.449,00	92,16%				
Sub kegiatan penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	22.639.500,00	22.584.850,00	99,76%				
1 Brosur perikanan				lembar	0		
2 Data base/Profil Perikanan Sleman				buku	65	65	100,00%
Sub kegiatan penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	190.055.000,00	187.516.620,00	98,66%				
1 Optimalisasi BBI (Balai Benih Ikan)				bulan	12	12	100,00%
Sub kegiatan penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	1.237.074.200,00	1.125.991.979,00	91,02%				
3 Calon Induk Unggul beserta Pakan Calon Induk Unggul (DAK)				paket	1	1	100,00%
4 Genset untuk Sarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila) di Sleman Barat (DAK)				unit	11	11	100,00%
5 Genset untuk Sarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila) di Sleman Timur (DAK)				unit	10	10	100,00%
6 Kincir untuk Sarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila) di Sleman Barat (DAK)				unit	11	11	100,00%
7 Kincir untuk Sarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila) di Sleman Timur (DAK)				unit	10	10	100,00%
8 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR) (DAK)				paket	2	2	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN				
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
9 Peralatan Budidaya Perikanan Krapyak, Wedomartani, Ngemplak				paket	1	1	100,00%
10 Sarana Budidaya Ikan Air Tawar (Lele) (DAK)				paket	3	3	100,00%
11 Sarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila) di Sleman Barat (DAK)				paket	11	11	100,00%
12 Sarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila) di Sleman Timur (DAK)				paket	10	10	100,00%
13 Sumur dan Pompa				paket	2	2	100,00%
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.181.942.000,00	1.110.679.263,00	93,97%				
1 Peningkatan jumlah produk olahan perikanan yang bersertifikasi				produk	2		
Kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	605.000.000,00	587.518.095,00	97,11%				
Sub kegiatan pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	605.000.000,00	587.518.095,00	97,11%				
1 Pelatihan bagi pengolah dan pemasar hasil perikanan (reguler pemula)				angkatan	1	1	100,00%
2 Pelatihan olahan ikan Jetis Depok Sendangsari				angkatan	1	1	100,00%
3 Pelatihan olahan ikan Kal Donoharjo, Ngaglik				angkatan	1	1	100,00%
4 Pelatihan olahan ikan Kalurahan Argomulyo, Cangkringan				angkatan	1	1	100,00%
5 Pelatihan olahan ikan Kalurahan Kalitirto, Berbah				angkatan	1	1	100,00%
6 Pelatihan olahan ikan Kalurahan Minomartani, Ngaglik				angkatan	1	1	100,00%
7 Pelatihan olahan ikan Kalurahan Minomartani, Ngaglik				angkatan	3	3	100,00%
8 Pelatihan olahan ikan Kalurahan Sidomulyo, Godean				angkatan	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN				
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
9 Pelatihan olahan ikan Kalurahan Widodomartani, Ngemplak				angkatan	1	1	100,00%
10 Pelatihan olahan ikan KWT Taman Cemara Padukuhan Krodan, Maguwoharjo				angkatan	1	1	100,00%
11 Pelatihan olahan ikan Padukuhan Tanjungtiro, Berbah				angkatan	1	1	100,00%
12 Pelatihan olahan ikan Purwomartani, Kalasan				angkatan	10	10	100,00%
13 Pelatihan olahan ikan Sentono Tamanmartani Kalasan				angkatan	1	1	100,00%
14 Pelatihan olahan ikan Sumberrahayu, Moyudan				angkatan	1	1	100,00%
15 Pelatihan olahan ikan Tegaltiro, Berbah				angkatan	3	3	100,00%
16 Pelatihan olahan ikan Tirtoadi, Mlati				angkatan	1	1	100,00%
17 Pelatihan pemasaran hasil pertanian (jaringan pemasaran ikan Kapanewon Turi)				angkatan	1	1	100,00%
18 Pelatihan pengolahan hasil perikanan Kapanewon Minggir				angkatan	1	1	100,00%
Kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	576.942.000,00	523.161.168,00	90,68%				
Sub kegiatan peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	22.759.500,00	22.734.750,00	99,89%				
1 Bahan lomba masak ikan tingkat propinsi				paket	0		
2 Forum pelaku pasar				kali	5	5	100,00%
3 Forum pengolah hasil perikanan				kali	4	4	100,00%
4 Forum peningkatan konsumsi makan ikan				kali	1	1	100,00%
5 Kampanye makan ikan				orang	130	130	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN				
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
6 Pembinaan kelompok penerima penguatan modal				kelompok	10	10	100,00%
7 Penyaluran dana penguatan modal				kelompok	40	40	100,00%
8 Sosialisasi gizi ikan				kali	1	1	100,00%
Sub kegiatan pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	554.182.500,00	500.426.418,00	90,30%				
1 Bedah UPI Skala kecil (DAK)				paket	1	1	100,00%
2 optimalisasi UPI (Unit Pengolah Ikan)				kali	10	10	100,00%
3 Rehabilitasi Pasar Ikan Rewulu (DAK)				paket	1	1	100,00%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	65.968.584.107,00	59.672.472.504,00	90,46%				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.232.408.050,00	35.916.101.607,00	87,11%				
1 Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase				%	100		
2 pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja				%	100		
Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	117.260.355,00	114.528.273,00	97,67%				
Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	72.166.200,00	70.404.296,00	97,56%				
1 Dokumen Perjanjian kinerja				dokumen	3	3	100,00%
2 Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja				dokumen	3	3	100,00%
3 Dokumen Perubahan Renja				dokumen	1	1	100,00%
4 Dokumen renja				dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN				
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen rka-skpd	3.877.500,00	3.867.975,00	99,75%				
1 Dokumen RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan rka-skpd	2.582.370,00	2.564.685,00	99,32%				
1 Dokumen Perubahan RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dpa-skpd	4.271.785,00	4.250.880,00	99,51%				
1 Dokumen DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan dpa-skpd	2.582.500,00	2.566.307,00	99,37%				
1 Dokumen Perubahan RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	31.780.000,00	30.874.130,00	97,15%				
1 Dokumen Laporan evaluasi kinerja				dokumen	26	26	100,00%
2 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil				dokumen	4	4	100,00%
3 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan				dokumen	1	1	100,00%
Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan				dokumen	4	4	100,00%
Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	37.438.472.021,00	32.606.655.537,00	87,09%				
Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan asn	36.876.915.501,00	32.083.213.608,00	87,00%				
1 Penyediaan administrasi keuangan SKPD				bulan	12	12	100,00%
Sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd	511.400.000,00	473.435.209,00	92,58%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN				
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan/barang				bulan	12	12	100,00%
Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran skpd	50.156.520,00	50.006.720,00	99,70%				
1 Dokumen laporan keuangan semesteran				dokumen	2	2	100,00%
2 Laporan aset/BMD semesteran				dokumen	2	2	100,00%
Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95.266.674,00	89.335.929,00	93,77%				
Sub kegiatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	82.566.674,00	79.170.129,00	95,89%				
1 Layanan administrasi kepegawaian				bulan	12	12	100,00%
2 Layanan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi				dokumen	1	1	100,00%
3 Pembayaran tenaga non PNS/PHL				bulan	12	12	100,00%
Sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	12.700.000,00	10.165.800,00	80,05%				
1 Bimtek implementasi perundang-undangan				angkatan	1	1	100,00%
Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	563.098.000,00	506.504.852,00	89,95%				
Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	49.725.000,00	36.606.566,00	73,62%				
1 Alat Listrik				paket	1	1	100,00%
Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	39.900.000,00	38.564.500,00	96,65%				
1 Perlengkapan dan Peralatan Kantor				bulan	12	12	100,00%
Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor	160.010.000,00	123.902.375,00	77,43%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN				
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Alat tulis kantor				paket	1	1	100,00%
Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	34.592.000,00	34.590.385,00	100,00%				
1 Layanan cetak dan penggandaan dokumen				bulan	12	12	100,00%
Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu	14.325.000,00	13.232.249,00	92,37%				
1 Layanan penyediaan makanan dan minuman tamu				bulan	12	12	100,00%
Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	228.716.000,00	223.894.519,00	97,89%				
1 Layanan perjalanan dinas luar daerah				bulam	12	12	100,00%
Sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada skpd	5.070.000,00	5.022.600,00	99,07%				
1 Jumlah surat/dokumen arsip yang dikelola				bulan	12	12	100,00%
2 Pengelolaan arsip dan perpustakaan				bulan	12	12	100,00%
Sub kegiatan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada skpd	30.760.000,00	30.691.658,00	99,78%				
1 Pengelolaan informasi dan dokumen PD				bulan	12	12	100,00%
2 Pengelolaan website PD				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1.896.350.000,00	1.742.391.882,00	91,88%				
Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	19.100.000,00	19.100.000,00	100,00%				
1 Layanan surat menyurat				bulan	12	12	100,00%
Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	227.250.000,00	212.123.690,00	93,34%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN				
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Jumlah layanan langganan komunikasi, sumber daya air dan listrik				bulan	12	12	100,00%
Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1.650.000.000,00	1.511.168.192,00	91,59%				
1 Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1.121.961.000,00	856.685.133,00	76,36%				
Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	935.241.000,00	703.628.370,00	75,23%				
1 Layanan pemeliharaan kendaraan dinas				bulan	12	12	100,00%
2 Layanan penyediaan BBM kendaraan				bulan	12	12	100,00%
Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	58.720.000,00	55.439.350,00	94,41%				
1 Pemeliharaan peralatan kerja kantor				bulan	12	12	100,00%
Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	128.000.000,00	97.617.413,00	76,26%				
1 Pemeliharaan gedung kantor				bulan	12	24%	2,00%
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	8.376.194.410,00	8.216.994.328,00	98,10%				
1 Persentase peningkatan produksi tanaman pangan;				%	0,3	0,3	100,00%
2 Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura				%	0,5	0,5	100,00%
3 Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan;				%	0,3	0,3	100,00%
4 Persentase peningkatan produk komoditas peternakan				%	0,28	0,28	100,00%
Kegiatan Pengawasan penggunaan sarana pertanian	5.377.662.110,00	5.266.569.042,00	97,93%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN				
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub kegiatan Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	2.256.480.000,00	2.248.236.484,00	99,63%				
1 Benih Padi Inbrida				ha	0	0	0,00%
2 Pelatihan Pertanian Organik (Harjobinangun, Pakem)				angkatan	1	1	c
3 Pelatihan Pertanian Organik (Kalitirto)				angkatan	1	1	100,00%
4 Pelatihan Pertanian Organik (KT. Sambirejo)				angkatan	1	1	100,00%
5 Pelatihan Pertanian Organik (Minomartani, Ngaglik)				angkatan	2	2	100,00%
6 Pelatihan Pertanian Organik (Ploso Kuning II, Minomartani, Ngaglik)				angkatan	1	1	100,00%
7 Pelatihan pertanian Organik (Tirtoadi)				angkatan	1	1	100,00%
8 Pelatihan Pertanian Organik (Turi)				angkatan	1	1	100,00%
9 Pemantauan, Pengawasan, Peredaran, Penggunaan Pupuk dan Pestisida)				paket	1	1	100,00%
10 Pengawasan Produksi Dalam Rangka Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan				ha	18137	18137	100,00%
11 Pengembangan Padi Sembada Merah dan Sembada Hitam				ha	0	0	0,00%
12 Sekolah Lapang Budidaya Padi (KT. Murtamasari, KT. Mulus, KT Guyub Makmur Minggir)				angkatan	1	1	100,00%
13 SL Budidaya Tanaman Garut (Maguwoharjo)				angkatan	1	1	100,00%
14 SL Budidaya Tanaman Padi (Reguler)				angkatan	1	1	100,00%
15 SL Budidaya Tanaman Pangan (Caturharjo)				angkatan	1	1	100,00%
16 SL Budidaya Tanaman Pangan (Condongcatur)				angkatan	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN				
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
17 SL Budidaya Tanaman Pangan Jagung (Tambakrejo, Tempel)				angkatan	1	1	100,00%
18 SL Budidaya Tanaman Pangan Padi (Maguwoharjo)				angkatan	1	1	100,00%
19 SL Budidaya Tanaman Pangan Padi (Sendangmulyo, Minggir)				angkatan	1	1	100,00%
20 SL Budidaya Tanaman Pangan Padi (Sendangtirta)				angkatan	1	1	100,00%
21 SL Budidaya Tanaman Pangan Padi (Wedomartani)				angkatan	1	1	100,00%
22 SL Budidaya Tanaman Pangan Ubi Jalar (Margomulyo, Seyegan)				angkatan	1	1	100,00%
23 SL Padi Organik (reguler)				angkatan	1	1	100,00%
24 SL Pengendalian Hama Terpadu (SL PHT) Padi				angkatan	2	2	100,00%
25 SL PHT Tanaman Pangan (Nambongan, Tlogoadi, Mlati)				angkatan	1	1	100,00%
26 SL PHT Tanaman Pangan (Sidorejo, Godean)				angkatan	1	1	100,00%
27 Pengadaan Color Sorter (DAK 2022-murni)				unit	3	3	100,00%
Sub kegiatan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	3.121.182.110,00	3.018.332.558,00	96,70%				
1 Bawang Merah				angkatan	1	1	100,00%
2 Data statistik hortikultura dan perkebunan				bulan	12	12	100,00%
3 Demplot Budidaya Cabai				ha	6	6	100,00%
4 Pelatihan Budidaya Alpukat (Gapoktan Purwo Agro Mandiri, Purwobinangun Pakem)				angkatan	1	1	100,00%
5 Pelatihan Budidaya Anggrek (Glagaharjo)				angkatan	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN				
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
6 Pelatihan Budidaya Anggur (Cebongan Lor, Tlogoadi, Mlati)				angkatan	1	1	100,00%
7 Pelatihan Budidaya Anggur (Pundong II Tirtoadi Mlati)				angkatan	1	1	100,00%
8 Pelatihan Budidaya Anggur (Tirtoadi, Mlati)				angkatan	1	1	100,00%
9 Pelatihan budidaya kelengkeng				angkatan	1	1	100,00%
10 Pelatihan Budidaya Pisang Raja				angkatan	2	2	100,00%
11 Pelatihan Pembibitan Bawang Merah TSS				angkatan	1	1	100,00%
12 Pelatihan pembibitan Cabai				angkatan	5	5	100,00%
13 Pengawalan peningkatan produksi cabai - bawang merah				bulan	12	12	100,00%
14 Pengembangan buah (nangka genjah, durian unggul, klengkeng itoh, sirsak madu) PUPM Kalasan				paket	1	1	100,00%
15 Sekolah Lapang Budidaya Cabai				angkatan	4	4	100,00%
16 Sekolah Lapang Budidaya Semangka (KT Sri Makmur Bejen, Caturharjo, Sleman)				angkatan	1	1	100,00%
17 SL bawang merah				angkatan	11	11	100,00%
18 SL bawang merah (Condongcatur)				angkatan	1	1	100,00%
19 SL bawang merah (Janti, Caturtunggal)				angkatan	1	1	100,00%
20 SL bawang merah (Janti, Maguwoharjo),				angkatan	1	1	100,00%
21 SL bawang merah (Sendangtirto)				angkatan	1	1	100,00%
22 SL Budidaya Bawang Merah				angkatan	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN				
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
23 SL Budidaya Cabai				angkatan	1	1	100,00%
24 SL Budidaya Cabai (Daratan III, Sendangarum)				angkatan	1	1	100,00%
25 SL Budidaya Cabai (Duwet Sendangadi, Mlati)				angkatan	1	1	100,00%
26 SL Budidaya Cabai (Jaten Sendangadi, Mlati)				angkatan	1	1	100,00%
27 SL Budidaya Cabai (Jogotirto, Berbah)				angkatan	1	1	100,00%
28 SL Budidaya Cabai (Kelompok Holtikultura Nggayuh Rejeki, Sendangsari)				angkatan	1	1	100,00%
29 SL Budidaya Cabai (Kepuharjo)				angkatan	1	1	100,00%
30 SL Budidaya Cabai (Lumbungrejo)				angkatan	1		
31 SL Budidaya Cabai (Margomulyo, Seyegan)				angkatan	1	1	100,00%
32 SL Budidaya Cabai (Sendangmulyo, Minggir)				angkatan	1	1	100,00%
33 SL Budidaya Cabai (Sendangsari, Minggir)				angkatan	1	1	100,00%
34 SL Budidaya Cabai (Sendangtirto)				angkatan	1	1	100,00%
35 SL Budidaya Cabai (Sidorejo, Godean)				angkatan	1	1	100,00%
36 SL Budidaya Cabai (Sukoharjo)				angkatan	1	1	100,00%
37 SL Budidaya Cabai (Sumpersari)				angkatan	1	1	100,00%
38 SL Budidaya Cabai (Tegaltirto)				angkatan	1	1	100,00%
39 SL Budidaya Cabai (Tridadi)				angkatan	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN				
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Kegiatan peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/kota	2.998.532.300,00	2.950.425.286,00	98,40%				
Sub kegiatan pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil	2.998.532.300,00	2.950.425.286,00	98,40%				
1 Data Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan				bulan	12	12	100,00%
2 Pelatihan Budidaya Ternak Ayam (Kalurahan Tegaltirto Berbah)				angkatan	1	1	100,00%
3 Pelatihan Budidaya Ternak Bebek (Kalurahan Pondokrejo Tempel, Kalurahan Lumbungrejo Tempel, Kalurahan Wonokerto Turi, Kalurahan Girikerto Turi, Kalurahan Sendangadi Mlati)				angkatan	1	1	100,00%
4 Pelatihan Budidaya Ternak Sapi (Kalurahan Wukirharjo Prambanan, Kalurahan Kalitirto Berbah 2 lokasi, Kalurahan Tlogoadi Mlati, Dusun Kowang Selomartani Kalasan)				angkatan	5	5	100,00%
5 Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak (Kapanewon Seyegan, Kapanewon Kalasan, Kalurahan Margorejo Tempel, Kalurahan Maguwoharjo Depok, Kalurahan Sariharjo Ngaglik, Kalurahan Sambirejo Prambanan, Kalurahan Kalitirto Berbah)				angkatan	7	7	100,00%
6 Pengembangan Budidaya Ternak Ayam Jawa Super				lokasi	15	15	100,00%
7 Pengembangan Budidaya Ternak Domba (Kalurahan Sendangarum)				unit	1	1	100,00%
8 Penguatan Sapi Betina Bunting				ekor	150	150	100,00%
9 Profil Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan				dokumen	1	1	100,00%
10 Sekolah Lapang Ayam Jawa Super (Karang Taruna Kalurahan Maguwoharjo Depok, Dusun Pundong I Tirtoadi Mlati, Dusun Keboan Sumberadi Mlati, Kalurahan Sindumartani Ngemplak 2 lokasi, Kalurahan Sendangadi Mlati 2 lokasi, Dusun Paten Tridadi Sleman, Kalurahan Sinduadi Mlati 2 lokasi, Kalurahan Sendangarum Minggu 3 lokasi)				angkatan	24	24	100,00%
11 Sekolah Lapang Budidaya Ayam (Kapanewon Ngaglik, Kalurahan Argomulyo Cangkringan, Kalurahan Pondokrejo Tempel)				angkatan	3	3	100,00%
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.377.155.902,00	5.119.883.162,00	95,22%				
1 Peningkatan jumlah kelompok tani hortikultura dan perkebunan yang menerima bantuan alat				kelompok	15	15	100,00%
2 Peningkatan jumlah kelompok tani tanaman pangan yang menerima bantuan alat				kelompok	5	5	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN				
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
3 Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan dan Perikanan (BP4) dengan klasifikasi kelas madya				balai	2	2	100,00%
Kegiatan pengembangan prasarana pertanian	692.021.954,00	672.517.121,00	97,18%				
Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	692.021.954,00	672.517.121,00	97,18%				
1 Chopper				unit	2	2	100,00%
2 Hand Sprayer				unit	10	10	100,00%
3 Kendaraan roda tiga				unit	2	2	100,00%
4 Pelatihan alat dan mesin				angkatan	4	4	100,00%
5 Pelontar/RTH				unit	2	2	100,00%
6 Pemotong rumput				unit	24	24	100,00%
7 Pompa air				unit	2	2	100,00%
8 Traktor Dangir/Cultivator				unit	12	12	100,00%
9 Pelatihan Budidaya Tembakau				angkatan	1	1	100,00%
10 Pupuk ZK (DBHCHT)				kg	0	0	0,00%
11 Traktor Dangir/Cultivator (DBHCHT)				unit	3	3	100,00%
12 Pelatihan alat dan mesin (DBHCHT)				angkatan	1	1	100,00%
Kegiatan pembangunan prasarana pertanian	4.685.133.948,00	4.447.366.041,00	94,93%				
Sub kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	3.868.083.948,00	3.700.276.823,00	95,66%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN				
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Bak Penampung Air (Upah Tenaga Kerja)				unit	6	6	100,00%
2 Fasilitasi Prasarana dan Sarana Pertanian				pertemuan	7	7	100,00%
3 Koordinasi Rancangan Peraturan Bupati Terkait Insentif LP2B				pertemuan	3	2	66,67%
4 Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal (DAK 2022-murni)				unit	7	3	42,86%
5 Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal (DAK 2022-murni) bidang hortikultura				unit	1	1	100,00%
6 Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal (DAK 2022-murni) bidang peternakan				unit	2	2	100,00%
7 Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal (Sisa DAK)				unit	9	8	88,89%
8 Pembangunan sumur ladang (sisa DAK)				unit	8	8	100,00%
9 Pengadaan Color Sorter (DAK 2022-murni)				unit	3	3	100,00%
10 Pengadaan Pompa Air				unit	15	15	100,00%
11 Pengadaan Power Thresher Mobile				unit	4	4	100,00%
12 Pengadaan Traktor Roda 2 Singkal				unit	4	4	100,00%
13 Perencanaan IATD bidang peternakan				dokumen	1	1	100,00%
14 Perencanaan Irigasi Air Tanah Dangkal (IATD) 7 unit				dokumen	1	1	100,00%
15 Perencanaan Irigasi Air Tanah Dangkal (IATD) 8 unit				dokumen	1	1	100,00%
16 Revitalisasi P3A				p3a	2	2	100,00%
PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERTANIAN LAINNYA	817.050.000,00	747.089.218,00	91,44%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN				
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Rehabilitasi Puskesmas dan Sarana Pendukung				puskesmas	2	2	100,00%
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.276.363.600,00	3.236.124.081,00	98,77%				
1 Persentase penanganan pelayanan kesehatan ternak				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota	235.000.000,00	230.272.049,00	97,99%				
<i>Sub kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis</i>	<i>235.000.000,00</i>	<i>230.272.049,00</i>	<i>97,99%</i>				
1 Pemantauan Pasar Hewan Kurban				dokumen	1	1	100,00%
2 Pembelian Bahan/Vaksin/Obat: Antigen RBT				vial	10	10	100,00%
3 Pembelian Bahan/Vaksin/Obat: Vaksin AI				vial	100	100	100,00%
4 Pembelian Bahan/Vaksin/Obat: Vaksin ND				vial	100	100	100,00%
5 Pembuatan Peta Penyakit Hewan				buku	8	8	100,00%
6 Pemeriksaan Hewan Kurban				kecamatan	17	17	100,00%
7 Pemeriksaan Sampel Laboratorium Rujukan Diagnostik				kali	13	13	100,00%
8 Pemrosesan Rekomendasi Perijinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner				ijin	10	10	100,00%
9 Pengendalian Penyakit Zoonosa				dokumen	1	1	100,00%
Kegiatan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/kota	1.903.913.600,00	1.876.146.454,00	98,54%				
<i>Sub kegiatan penyediaan pelayanan jasa medik veteriner</i>	<i>1.903.913.600,00</i>	<i>1.876.146.454,00</i>	<i>98,54%</i>				
1 Monitoring puskesmas				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN				
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2 Operasional Puskesmas (DAK Non Fisik)				lokasi puskesmas	6	6	100,00%
3 Pelayanan puskesmas keliling				bulan	12	12	100,00%
4 Pengadaan bahan laboratorium				paket	1	1	100,00%
5 Pengadaan bahan obat-obatan				paket	1	1	100,00%
6 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan				bulan	12	12	100,00%
7 Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)				kabupaten	1	1	100,00%
Kegiatan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	1.137.450.000,00	1.129.705.578,00	99,32%				
Sub kegiatan pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan	1.047.450.000,00	1.039.969.837,00	99,29%				
1 Alat Pencacah Pupuk Organik Selomartani, Tamanmartani, Purwomartani (DM)				unit	3	3	100,00%
2 Kampanye minum susu kambing				paket	1	1	100,00%
3 Kampanye minum susu sapi				paket	1	1	100,00%
4 Pelatihan Pembuatan Pupuk organik Cair Sruni, Wukirsari; Tambakan, Sindumartani, Gondang 2, Wukirsari; Balong, Umbulharjo; Sidorejo, Umbulharjo; Kalitengahlor, Glagaharjo; Bawuk, Minomartani, Karyamanunggal, Jambon, Trihanggo; Kalongan, Maguwoharjo; Ngaglik, Sumbersari (DP)				angkatan	10	10	100,00%
5 Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Padat Mesan, Sinduadi; Cilikan, Umbulmartani; Jangkang, Wedomartani; Gantalan Minomartani; Surirejo, Sukoharjo; Tegalmakmur, Ngawen, Trihanggo; Kaliwanglu, Harjobinangun; Wadas, Tridadi; Kemusuh, banyurejo; Karangbajang, Tlogoadi; Pondokrejo; Ngemplaksari, Margomulyo (DP)				angkatan	12	12	100,00%
6 Pelatihan pembuatan pupuk organik Padat Purwomartani; Tamanmartani; Selomartani; Kel. Setia maju, Trimulyo; Kel. KUBE Widodomartani; Sumberharjo; Guyub Rukun, Tegalyoso, Banyuraden; Tirtoadi; Dondongan, Sengangmulyo; KUBE Bimomartani; Lestari Maju, Krasan, Jogotirto; Sumberlor, Demangan, Teguhan, Krasan Jogotitiro; Tegaltirto; Rejosari, Kledokan, Caturtunggal; Amanah, Singosutan Sambego, Maguwoharjo; Sentulgeneng Sidoagung; Pondokrejo (DM)				angkatan	17	17	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN				
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
7 Pelatihan Pengolahan Daging Gambahan V, Gambahan VI, Sumberadi; Bangsan, Sindumartani; Tlogoadi (DP)				angkatan	3	3	100,00%
8 Pelatihan Pengolahan Daging Kapanewon Minggir; Sumberagung; KWT. Tresno Nur Ati, Sambego, Maguwoharjo; Wukirsari (DM)				angkatan	4	4	100,00%
9 Pembinaan dan monitoring kelompok ternak				kel	17	17	100,00%
10 Penyaluran dana penguatan modal				kel	30	30	100,00%
11 Temu usaha peternakan				kali	1	1	100,00%
12 Uji laboratorium pupuk organik				sampel	24	24	100,00%
Sub kegiatan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	90.000.000,00	89.735.741,00	99,71%				
1 Pemeriksaan Bakso				sampel	50	50	100,00%
2 Pemeriksaan Daging				sampel	125	125	100,00%
3 Pemeriksaan Susu				sampel	125	125	100,00%
4 Pemeriksaan Telur				sampel	125	125	100,00%
5 Pengawasann Peredaran Daging				dokumen	1	1	100,00%
6 Pengawasan Obat Hewan				dokumen	1	1	100,00%
7 Pengujian Laboratorik Rujukan				kali	10	10	100,00%
8 Pemeliharaan bangunan Pasar Hewan Ambarketawang dan RPH				tahun	1	1	100,00%
9 Pengelolaan Pasar Hewan Ambarketawang dan RPH				bulan	12	12	100,00%
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	798.116.045,00	770.568.944,00	96,55%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN				
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Persentase luas serangan hama dan penyakit tanaman pangan yang tertangani				%	90,00	90,00	100,00%
2 Persentase luas serangan hama dan penyakit hortikultura dan perkebunan yang tertangani				%	90,00	90,00	100,00%
Kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	798.116.045,00	770.568.944,00	96,55%				
Sub kegiatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (opt) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	318.116.045,00	312.470.239,00	98,23%				
1 Gerakan Pengendalian OPT				kali	50	50	100,00%
2 Gerakan Pengendalian OPT (Kalitirto, Berbah)				kali	15	15	100,00%
3 Kajian Teknis Pengendalian Hama				paket	1	1	100,00%
4 Kompensasi Penangkapan Ekor Tikus				ekor	12900	12900	100,00%
5 Pelatihan Pembuatan Agensia Hayati (KT. Watu Gajah, Sendangagung, Minggir)				angkatan	1	1	100,00%
6 Pembuatan Rubuha				unit	1	1	100,00%
7 Pembuatan Trap Barrier System (TBS) Tikus				unit	1	1	100,00%
8 SL Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Pangan (Sidorejo, Godean)				angkatan	1	1	100,00%
Sub kegiatan penanganan dampak perubahan iklim (dpi) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	480.000.000,00	458.098.705,00	95,44%				
1 Gerakan Gerakan Pengendalian OPT Cabai (Pendowoharjo, Sleman)				kali	10	10	100,00%
2 Bintek antisipasi dampak perubahan iklim				angkatan	6	6	100,00%
3 Gerakan pengendalian OPT				kali	7	7	100,00%
4 Pembelian bahan obat-obatan				paket	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN				
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
5 Pengamatan OPT tanaman hortikultura dan perkebunan				bulan	3	3	100,00%
6 SL PHT Cabai (Kalipentung, Kalitirto, Berbah)				angkatan	1	1	100,00%
7 SL PHT Cabai (Trimulyo, Sleman)				angkatan	1	1	100,00%
8 SL PHT Pepaya (Purwobinangun, Pakem)				angkatan	1	1	100,00%
9 SL PHT Salak (Merdikorejo, Tempel)				angkatan	1	1	100,00%
10 SL PHT Semangka (Trimulyo, Sleman)				angkatan	1	1	100,00%
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	6.908.346.100,00	6.412.800.382,00	92,83%				
1 Peningkatan kinerja penyuluh pertanian sesuai tugas dan fungsinya; Persentase				%	2	2	100,00%
2 peningkatan kelompok yang menerapkan SOP cara-cara penanganan/pengolahan hasil				%	5	5	100,00%
3 hortikultura dan perkebunan ; Kelembagaan petani dengan klasifikasi kelas lanjut;				kelompok	16	16	100,00%
4 Jumlah wirausaha				orang	200	200	100,00%
Kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian	6.908.346.100,00	6.412.800.382,00	92,83%				
Sub kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	704.226.800,00	689.374.639,00	97,89%				
1 Diseminasi Teknologi Pertanian				kali	1	1	100,00%
2 Evaluasi BP4, PP PNS, PP P3K, dan Penyuluh Swadaya teladan/berprestasi				uptd	8	8	100,00%
3 Media Penyuluhan Audio Visual				judul	1	1	100,00%
4 Pelatihan peningkatan kapasitas Kelompok Penyuluh Pertanian (P3K / PNS)				angkatan	2	2	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN				
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
5 Pelatihan peningkatan kapasitas Kelompok Penyuluh Swadaya				angkatan	2	2	100,00%
6 Pembuatan Folder/Leaflet				lembar	500	500	100,00%
7 Penyediaan Sarana/Media Penyuluhan Bagi Penyuluh (PPA, PPL, P3K, Penyuluh swadaya)				paket	28	28	100,00%
8 Profil				dokumen	1	1	100,00%
9 Programa Penyuluhan Tingkat Kabupaten				dokumen	1	1	100,00%
10 RDKK tk Kabupaten				dokumen	1	1	100,00%
11 Supervisi Penyuluh				UPTD	8	8	100,00%
12 Pelatihan tematik				UPTD	8	8	100,00%
13 Pendataan pertanian				UPTD	8	8	100,00%
Sub kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	3.180.203.300,00	3.030.404.748,00	95,29%				
1 Monitoring, evaluasi dan Penilaian Gapoktan berprestasi tingkat Kabupaten				kali	8	8	100,00%
2 Pelatihan Agribisnis Petani Muda Milenial				kali	26	26	100,00%
3 Pelatihan Agribisnis Petani Muda Milenial (PUPM)				kali	12	12	100,00%
4 Pelatihan Agribisnis Saka Taruna Bumi				kali	1	1	100,00%
5 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Petani Muda/Milenial				kali	15	15	100,00%
6 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Petani Muda/Milenial (PUPM)				kali	10	10	100,00%
7 Pelatihan Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani (KT, Gapoktan, KWT, KEP, Asosiasi)				kali	34	34	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN				
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
8 Pelatihan Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani (KT, Galpoktan, KWT, KEP, Asosiasi) PUPM				kali	19	19	100,00%
9 Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan Petani				kelompok	24	24	100,00%
10 Penumbuhan POSLUHDES				posluhdes	8	2	25,00%
11 Updating Data Kemampuan Lembaga Petani				kali	3	1	33,33%
Sub kegiatan enyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	2.001.616.000,00	1.704.481.192,00	85,16%				
1 Sarana Pendukung UPTD BP4				paket	3	3	100,00%
2 Dokumentasi analisis usaha tani dan informasi pasar komoditas hortikultura strategis				dokumen	1	1	100,00%
3 Dukungan Sleman Fair dan Pameran Sejenisnya				paket	1	1	100,00%
4 informasi harga pasar komoditas unggulan				dokumen	1	1	100,00%
5 Optimalisasi Kebun Sawungan				paket	1	1	100,00%
6 Temu Usaha				kali	3	3	100,00%
7 pasar tani (komoditas pertanian, pangan dan perikanan baik olahan maupun segar				kali	12	12	100,00%
Sub kegiatan pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota	1.022.300.000,00	988.539.803,00	96,70%				
1 Bimbingan Manajemen Pemasaran				angkatan	1	1	100,00%
2 Bimbingan teknis peningkatan mutu produk				angkatan	1	1	100,00%
3 Forum komunikasi Bidang Hortikultura dan Perkebunan				kali	2	2	100,00%
4 Pelatihan budidaya jamur Gayamharjo, Prambanan				angkatan	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN				
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
5 Pelatihan Budidaya Jamur Kalurahan Tirtoadi, Mlati dan Pelatihan budidaya jamur (tiram) Kalurahan Sardonoarjo, Ngaglik				angkatan	2	2	100,00%
6 Pelatihan Budidaya Jamur Tiram Depok				angkatan	1	1	100,00%
7 Pelatihan olahan hasil tanaman TOGA (KWT Wukirharjo, Prambanan)				angkatan	1	1	100,00%
8 Pelatihan Penanganan pascapanen hortikultura perkebunan				angkatan	1	1	100,00%
9 Pelatihan pengolahan hasil hortikultura buah-buahan (Margoluwih, Seyegan)				angkatan	1	1	100,00%
10 Pelatihan pengolahan hasil pertanian hortikultura dan perkebunan (Bekelan 10, Sendangagung, Minggir)				angkatan	1	1	100,00%
11 Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian Hortikultura dan perkebunan bawang merah Kalasan				angkatan	1	1	100,00%
12 Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian Hortikultura dan Perkebunan Candirejo, Sardonoarjo; Candiwinangun, Sardonoarjo; Candikarang, Sardonoarjo (Ngaglik); dan Poktan Ngudi Mulyo Karangmloko Sariharjo (Ngaglik)				angkatan	4	4	100,00%
13 Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian Hortikultura dan perkebunan Glagaharjo, Cangkringan; Kalurahan Sendangarum, Minggir (VCO); Sumberrahayu, Moyudan; Margodadi, Seyegan; Kalurahan Bangunkerto, Turi; komoditas serai, Condongcatur, Depok; komoditas buah-buahan (Candy Fruits), Condongcatur, Depok; komoditas pepaya, Caturtunggal, Depok; komoditas labu, Caturtunggal, Depok; komoditas lidah buaya, Caturtunggal, Depok				angkatan	10	10	100,00%
14 Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian Hortikultura dan Perkebunan Kaliurang Timur, Hargobinangun; Kaliurang Barat, Hargobinangun; Turgo Hargobinangun; Duwetsari, Pakembinangun (Pakem); dan Kelurahan Hargobinangun 2 angkatan (Pakem,)				angkatan	6	6	100,00%
15 Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian Hortikultura dan Perkebunan Kapanewon Turi 2 angkatan				angkatan	2	2	100,00%
16 Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian Hortikultura dan Perkebunan Karang, Kalitirto; Kelompok Tani Makmur: Demangan Tangkisan, Kalitirto; Kelompok Tani Utama: Tegalsari, Tegaltirto; Kelompok Tani Bumikerto: Kadisono, Tegaltirto; Kelompok Tani Suka Maju: Semoya, Tegaltirto; Kelompok Tani Dawung Manunggal: Dawung, Kuncen, Tegaltirto; Kalipentung dan Kebonan, Kalitirto (Berbah)				angkatan	8	8	100,00%
17 Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian Hortikultura dan Perkebunan Plumbon Kidul Mororejo; Kaliasin Mororejo; dan Pondokrejo (Tempel)				angkatan	3	3	100,00%
18 Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian Hortikultura dan Perkebunan Sinduadi; Sendangadi (Mlati); dan Karang Bajang, Tlogoadi (Mlati)				angkatan	3	3	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN				
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
19 Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian (jamur tiram) Tridadi (KWT Jaya Mandiri Abadi)				angkatan	1	1	100,00%
20 Pelatihan Tematik				angkatan	1	1	100,00%
21 Pendataan Pertanian				BP4	1	1	100,00%
22 Penyaluran dana dan pembinaan kelompok penerima penguatan modal				kelompok	25	25	100,00%
23 Profil Hortikultura dan Perkebunan				dokumen	1	1	100,00%
24 Temu Mitra				kali	1	1	100,00%





**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2022**

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN				
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	75.575.645.542,00	68.995.535.116,35	91,29%				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	39.741.768.210	38.137.789.185	95,96%				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.112.412.325	26.126.283.643	96,36%				
1 Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				%	100	100	100,00%
2 Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja				%	100	100	100,00%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.073.393	24.408.651	97,35%				
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.939.000	3.848.400	97,70%				
1 Dokumen Perjanjian kinerja				dokumen	3	3	100,00%
2 Dokumen Perubahan Perjanjian kinerja				dokumen	3	3	100,00%
3 Dokumen Perubahan Renja				dokumen	1	1	100,00%
4 Dokumen Renja				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.919.900	2.820.900	96,61%				
1 Dokumen RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.594.425	1.474.425	92,47%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN				
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Dokumen Perubahan RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	2.989.898	2.911.500	97,38%				
1 Dokumen DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.759.920	1.687.200	95,87%				
1 Dokumen Perubahan DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.870.250	11.666.226	98,28%				
1 Dokumen Laporan Tahunan				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen LKJIP/LAKIP				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja				dokumen	4	4	100,00%
4 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja				dokumen	1	1	100,00%
5 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja				dokumen	4	4	100,00%
6 Dokumen RFK				dokumen	12	12	100,00%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.518.597.235	16.907.583.136	96,51%				
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	17.074.519.500	16.468.423.038	96,45%				
1 Pembayaran gaji dan tunjangan PNS				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	430.769.000	426.035.950	98,90%				
1 Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN				
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.686.960	1.637.100	97,04%				
1 Laporan Keuangan Audited				dokumen	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	11.621.775	11.487.048	98,84%				
1 Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik SKPD				dokumen	1	1	100,00%
2 Laporan Aset / BMN semesteran				dokumen	2	2	100,00%
3 Laporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran				bulan	12	12	100,00%
4 Laporan Keuangan				dokumen	2	2	100,00%
5 LPJ Penerimaan				dokumen	12	12	100,00%
6 LPJ Pengeluaran				dokumen	12	12	100,00%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.113.732.290	3.032.832.721	97,40%				
Sub Kegiatan Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.113.732.290	3.032.832.721	97,40%				
1 Laporan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi				dokumen	1	1	100,00%
2 Layanan administrasi kepegawaian				bulan	12	12	100,00%
3 Pembayaran tenaga non PNS /PHL				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	605.777.550	587.805.665	97,03%				
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.620.631	22.608.400	99,95%				
1 Penyediaan alat listrik				jenis	19	19	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN				
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	284.928.829	268.962.560	94,40%				
1 ATK				paket	3	3	100,00%
2 Penyediaan makanan dan minuman rapat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	6.224.625	6.195.750	99,54%				
1 layanan cetak dan panggandaan dokumen				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	36.810.000	36.282.485	98,57%				
1 Penyediaan makanan dan minuman tamu				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	199.608.000	199.579.428	99,99%				
1 Layanan perjalanan dinas dalam daerah				bulan	12	12	100,00%
2 Layanan perjalanan dinas luar daerah				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	29.496.765	29.361.292	99,54%				
1 Pengelolaan arsip dan perpustakaan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	26.088.700	24.815.750	95,12%				
1 Pengelolaan informasi dan dokumen PD				bulan	12	12	100,00%
2 Pengelolaan website				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.003.337.857	4.761.951.189	95,18%				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.694.250	26.652.000	99,84%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN				
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 layanan surat menyurat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	1.000.908.900	931.585.310	93,07%				
1 Pembayaran jasa langganan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	157.050.000	156.695.700	99,77%				
1 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.818.684.707	3.647.018.179	95,50%				
1 Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	845.894.000	811.702.281	95,96%				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	572.210.000	539.420.522	94,27%				
1 Layanan pemeliharaan kendaraan dinas				bulan	12	12	100,00%
2 Layanan penyediaan BBM kendaraan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	20.500.000	20.370.979	99,37%				
1 Layanan pemeliharaan mebel				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	253.184.000	251.910.780	99,50%				
1 Pemeliharaan gedung kantor				unit	2	2	100,00%
2 Pemeliharaan taman				unit	2	2	100,00%
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	398.178.311	395.083.220	99,22%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN				
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan				%	36	44	120,84%
2 Persentase pedagang pasar yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan				%	77	76	98,51%
Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	166.316.061	163.927.470	98,56%				
Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	166.316.061	163.927.470	98,56%				
1 Pelayanan Perijinan SPTD				sptd	2.400	1.774	73,92%
2 Pendampingan administrasi bagi pengelola retribusi				orang	63	63	100,00%
Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	142.507.300	142.507.300	100,00%				
Sub Kegiatan Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	142.507.300	142.507.300	100,00%				
1 Distribusi minuman beralkohol yang dimonitor				ijin	15	20	133,33%
2 Ijin usaha perdagangan yang dimonitor				ijin siup	60	72	120,00%
3 TDG yang dimonitor				tdg	20	20	100,00%
4 Toko Modern yang ditertibkan				toko	15	15	100,00%
Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	89.354.950	88.648.450	99,21%				
Sub Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan Dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)	89.354.950	88.648.450	99,21%				
1 Laporan monitoring pengawasan pangan dan bahan berbahaya				dokumen	1,00	1,00	100,00%
2 Lokasi pengawasan pangan dan bahan berbahaya				lokasi pkl	2	2	100,00%
3 Lokasi pengawasan pangan dan bahan berbahaya				pasar	27,00	27,00	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN				
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
4 Sosialisasi bahan berbahaya				pasar	3,00	3,00	100,00%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	8.055.528.804	7.468.166.017	92,71%				
1 Rasio sarana prasarana perdagangan tradisional dalam kondisi baik				rasio	1	1	90,91%
2 Jumlah kejadian gangguan keamanan yang terjadi di sarana prasarana perdagangan tradisional				kejadian	5	5	100,00%
3 Rasio sarana prasarana perdagangan tradisional yang menerapkan pengelolaan sampah				rasio	12	14	116,08%
4 Cakupan pembinaan pedagang pasar dan sarana usaha milik pemerintah Kabupaten Sleman				%	3	5	171,74%
5 Jumlah sarana dan prasarana perdagangan tradisional tertata				pasar	15	29	193,33%
Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	7.435.713.451	6.875.266.521	92,46%				
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	5.345.422.952	4.880.079.340	91,29%				
1 Bangunan pasar terpelihara dengan baik				pasar	31	31	100,00%
2 DED Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan				dokumen	1	1	100,00%
3 Fisik Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan				lokasi	1	1	100,00%
4 Laporan monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana pasar tradisional				dokumen	1	1	100,00%
5 Pemeliharaan Eskalator Pasar Prambanan				unit	2	2	100,00%
6 Pengawasan Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan				lokasi	1	1	100,00%
7 Perencanaan Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.090.290.499	1.995.187.181	95,45%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN				
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Evakuasi sampah pasar				uptd pelayanan pasar	5	5	100,00%
2 Gerakan bersih pasar				kali	25	25	100,00%
3 Laporan monitoring kesiagaan petugas keamanan pasar				pasar	3	3	100,00%
Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	619.815.353	592.899.496	95,66%				
Sub Kegiatan Pembinaan Dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	401.951.873	375.184.757	93,34%				
1 Penataan PKL				lokasi diluar pasar	2	2	100,00%
2 Penataan PKL				pasar	2	2	100,00%
3 Pendataan pedagang, tempat dagangan, dan monitoring				pasar	2	3	150,00%
4 Penerbitan Ijin PKL				ijin	200	203	101,50%
5 Reklamasi lahan relokasi				lokasi	1	1	100,00%
6 Sewa Lahan Pasar Untuk Relokasi				pasar	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	217.863.480	217.714.739	99,93%				
1 Pemantauan Bantuan Modal Pedagang Pasar				kelompok pedagang	100	110	110,00%
2 Pembinaan Organisasi paguyuban PKL				angkatan	2	2	100,00%
3 Pembinaan Pedagang Pasar				UPTD Pelayanan Pasar	3	3	100,00%
4 Pendampingan Pengelolaan Administrasi Penguatan Modal				kelompok pedagang	10	18	180,00%
5 Pengembangan Potensi Paguyuban Pedagang Pasar				paguyuban	3	3	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN				
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	895.210.946	890.633.838	99,49%				
1 Persentase kecukupan stock barang kebutuhan pokok daerah				%	75	100	133,33%
Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	884.506.046	879.928.938	99,48%				
Sub Kegiatan Pemantauan Harga Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	39.080.013	39.044.438	99,91%				
1 Monitoring barang rusak dan kadaluarsa				toko	30	30	100,00%
2 Monitoring gas bersubsidi				kecamatan	17	17	100,00%
Sub Kegiatan Pemantauan Harga Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	845.426.033	840.884.500	99,46%				
1 Laporan monitoring harga barang kebutuhan pokok dan barang penting				dokumen	12	12	100,00%
2 Pemetaan rantai distribusi barang kebutuhan pokok				dokumen	1	1	100,00%
Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.704.900	10.704.900	100,00%				
Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran Dan Penggunaan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi	10.704.900	10.704.900	100,00%				
1 Monitoring pupuk bersubsidi				kecamatan	17	17	100,00%
Program Pengembangan Ekspor	559.224.433	558.538.035	99,88%				
1 Persentase jumlah pelaku usaha berorientasi ekspor				%	18	28	158,00%
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	559.224.433	558.538.035	99,88%				
Sub Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	13.254.600	13.136.000	99,11%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN				
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Laporan realisasi ekspor impor				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional	328.851.750	328.543.180	99,91%				
1 Keikutsertaan dalam IFEX 2022				kali	1	1	100,00%
2 Pameran Virtual				kali	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor	142.493.275	142.258.630	99,84%				
1 Temu Bisnis				orang	35	85	242,86%
2 Virtual Business Matching				kali	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	74.624.808	74.600.225	99,97%				
1 Fasilitasi paguyuban eksportir				paguyuban	1	1	100,00%
2 Pendampingan pengembangan ekspor				ikm	6	6	100,00%
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	545.819.963	545.257.783	99,90%				
1 Persentase UTTP yang bertanda Tera Sah							
Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	545.819.963	545.257.783	99,90%				
Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	545.819.963	545.257.783	99,90%				
1 Pelayanan Tera/Tera Ulang				bulan	12	12	100,00%
2 peserta sosialisasi pelayanan tera/tera ulang				orang	1.000	1.000	128,80%
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	2.175.393.428	2.153.826.649	99,01%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN				
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Persentase peningkatan kunjungan ke pasar kabupaten				%	2	5	2
2 Jumlah pelaku UMKM yang bermitra dengan pelaku usaha ritel modern				UMKM	36	36	36
Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	2.175.393.428	2.153.826.649	99,01%				
Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	362.898.067	361.749.480	99,68%				
1 Kajian Pengembangan Pasar				dokumen	1	1	100,00%
2 Kajian Roadmap Pasar Rakyat				dokumen	1	1	100,00%
3 Pengelolaan radio pasar				pasar	3	3	100,00%
Sub Kegiatan Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	968.678.431	962.322.014	99,34%				
1 Bazar UMKM dalam pelaksanaan PORDA XVI dan PEPARDA III				kali	1	1	100,00%
2 Pameran di Gedung Dekranas				kali	1	1	100,00%
3 Penyelenggaraan Pameran HUT Dekranas				kali	1	1	100,00%
4 Promosi tetap produk IKM di Galeri Upakarti Sleman				IKM	150	214	142,67%
5 Promosi tetap produk IKM di Showroom Dekranasda				IKM	100	100	110,00%
Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Dan Jaringan Informasi Perdagangan	843.816.930	829.755.155	98,33%				
1 Fasilitasi Pemasaran Online (Kalurahan Sidoagung)				orang	20	20	100,00%
2 Naskah Akademik Raperda Gudang				dokumen	1	1	100,00%
3 Pelatihan Pemasaran Online dan temu usaha perdagangan mikro, kecil dan warga Miskin (Kalurahan Jogotirto)				orang	20	20	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN				
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
4 Pelatihan Pemasaran Online dan temu usaha perdagangan mikro, kecil dan warga Miskin (Kalurahan Margoagung)				orang	20	20	100,00%
5 Pelatihan Pemasaran Online dan usaha perdagangan mikro, kecil dan warga Miskin (Kalurahan Sindumartani)				orang	20	20	100,00%
6 Pelatihan Pemasaran Online dan temu usaha perdagangan mikro, kecil dan warga Miskin (Kalurahan Wedomartani)				orang	20	20	100,00%
7 Pelatihan pemasaran online dan temu usaha perdagangan mikro, kecil dan warga miskin (Sendangsari, Hargobinangun, Sinduadi, Somodaran-Purwomartani, Sentono-Tamanmartani, Celungan-Sumberagung, Nogosari-Sidokarto, Tlogoadi)				angkatan	8	8	100,00%
8 Pembinaan Usaha Dagang (Kaliwanglu, Harjobinangun; Condongcatur)				angkatan	2	2	100,00%
9 Pembinaan Usaha Ritel Lokal (Tridadi, Pendowoharjo, dan Berbah)				angkatan	3	3	100,00%
10 Temu usaha (Kapanewon Pakem)				orang	20	20	100,00%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	9.995.124.547	9.061.566.111	90,66%				
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	9.898.002.047	8.964.707.311	90,57%				
1 Persentase sentra industri aktif				%	82	82	82
Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	9.898.002.047	8.964.707.311	90,57%				
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran Dan Perwilayahan Industri	135.909.420	135.035.750	99,36%				
1 Pendampingan Kelompok industri (PUPM Kapanewon Sleman)				kelompok	2	2	100,00%
2 Pendampingan Kelompok Sentra Industri (PUPM Kalurahan Pondokrejo)				orang	20	20	100,00%
3 Pendampingan kelompok/sentra industri (PUPM Kalurahan Sidoagung)				orang	15	15	100,00%
4 Sentra yang dikukuhkan berdasarkan SK Bupati				sentra	5	5	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	536.628.891	517.044.976	96,35%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN				
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Bimtek manajemen usaha industri (PUPM)				orang	20	20	100,00%
2 Pelayanan Rumah Kreatif Sleman				bulan	12	12	100,00%
3 Pemohon dana penguatan modal sektor industri yang diverifikasi				pemohon	10	10	100,00%
4 Penerima dana penguatan modal industri yang dipantau (dimonitor dan dievaluasi)				ikm	40	40	100,00%
5 Peserta Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dekranasda				orang	150	150	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	9.225.463.736	8.312.626.585	90,11%				
1 Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen Lingkungan Hidup				dokumen	1	1	100,00%
3 Kajian Substitusi Impor				dokumen	1	1	100,00%
4 Pembangunan Rumah Promosi dan Wisata Edukasi Sentra Jadah Tempe				paket	1	1	100,00%
5 Peserta Bimtek Bambu Laminasi di Dondong RT 05 RW 21 Tegaltirto Berbah				orang	20	20	100,00%
6 Peserta Bimtek Bambu Laminasi di Dondong RT 06 RW 21 Tegaltirto Berbah				orang	20	20	100,00%
7 Peserta Bimtek Bambu Laminasi di Jragung, Jogotito				orang	20	20	100,00%
8 Peserta Bimtek Bambu Laminasi di Sardonojarjo				orang	20	20	100,00%
9 Peserta Bimtek Bambu Laminasi di Sendangmulyo				orang	20	20	100,00%
10 Peserta Bimtek Bambu Laminasi di Tegaltirto, Berbah				orang	20	20	100,00%
11 Peserta Bimtek Batik di Bulu, Jogotito				orang	20	20	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN				
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
12 Peserta Bimtek Batik di Cageran, Tamanmartani				orang	20	20	100,00%
13 Peserta Bimtek Batik di Denokan, Maguwoharjo				orang	20	20	100,00%
14 Peserta Bimtek Batik di Donoharjo, Ngaglik				orang	20	20	100,00%
15 Peserta Bimtek Batik di Gadingan, Sumberrejo				orang	20	20	100,00%
16 Peserta Bimtek Batik di Jongkangan, Tamanmartani				orang	20	20	100,00%
17 Peserta Bimtek Batik di Sardonoharjo				orang	20	20	100,00%
18 Peserta Bimtek Batik Karang Taruna Kalurahan Trihanggo				orang	20	20	100,00%
19 Peserta Bimtek Batik Kelompok Mekar Lestari Kalurahan Trihanggo				orang	20	20	100,00%
20 Peserta Bimtek Batik Lanjutan di Condongcatur				orang	20	20	100,00%
21 Peserta Bimtek Batik Lanjutan di Gayamharjo				orang	20	20	100,00%
22 Peserta Bimtek Batik Lanjutan di Kepuharjo				orang	20	20	100,00%
23 Peserta Bimtek Batik Lanjutan di Margodadi				orang	20	20	100,00%
24 Peserta Bimtek Batik Lanjutan di Merdikorejo				orang	20	20	100,00%
25 Peserta Bimtek Batik Lanjutan di Purwobinangun				orang	20	20	100,00%
26 Peserta Bimtek Batik Lanjutan di Sidorejo				orang	20	20	100,00%
28 Peserta Bimtek dan Pendampingan GMP				orang	30	30	100,00%
29 Peserta Bimtek dan Pendampingan HKI				orang	60	60	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN				
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
27 Peserta Bimtek Diversifikasi Produk				orang	60	60	100,00%
30 Peserta Bimtek Fiberglass Karang Taruna Melati di Sendangadi				orang	20	20	100,00%
31 Peserta Bimtek Keamanan Pangan dan Produk Halal				orang	60	60	100,00%
32 Peserta Bimtek Kemasan				orang	60	60	100,00%
33 Peserta Bimtek Kerajinan Rajut di Gempol, Condongcatur				orang	20	20	100,00%
34 Peserta Bimtek Kerajinan Rajut di Sono Kulon, Merdikorejo				orang	20	20	100,00%
35 Peserta Bimtek Komunikasi Publik				orang	20	20	100,00%
36 Peserta Bimtek Kue Basah dan Kering di Minomartani				orang	40	40	100,00%
37 Peserta Bimtek Kue Basah dan Kering di Sendangadi				orang	20	20	100,00%
38 Peserta Bimtek Kue Basah dan Kering di Sendangmulyo				orang	20	20	100,00%
39 Peserta Bimtek Kue Basah dan Kering di Sidoarum				orang	20	20	100,00%
41 Peserta Bimtek Kue Basah dan Kering di Sinduadi				orang	20	20	100,00%
42 Peserta Bimtek Kue Basah dan Kering di Soka Tegal, Merdikorejo				orang	20	20	100,00%
43 Peserta Bimtek Manajemen Usaha Industri				orang	40	40	100,00%
44 Peserta Bimtek Pasir Semen di Sidoagung				orang	20	20	100,00%
45 Peserta Bimtek Sablon di Banyurejo				orang	20	20	100,00%
46 Peserta Bimtek Sablon di Kaliurang Barat, Hargobinangun				orang	20	20	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN				
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
47 Peserta Bimtek Sablon di Kaliurang Timur, Hargobinangun				orang	20	20	100,00%
48 Peserta Bimtek Sablon di Minomartani				orang	20	20	100,00%
49 Peserta Bimtek Sablon di Pangukrejo, Umbulharjo				orang	20	20	100,00%
50 Peserta Bimtek Sablon di Sendangsari				orang	20	20	100,00%
51 Peserta Bimtek Sablon di Sidorejo				orang	20	20	100,00%
52 Peserta Bimtek Sablon di Sidorejo, Umbulharjo				orang	20	20	100,00%
53 Peserta Bimtek Sablon di Sumberarum				orang	20	20	100,00%
54 Peserta Bimtek Sablon di Wukirharjo				orang	20	20	100,00%
55 Peserta Bimtek Sablon Karang Taruna Melati di Sendangadi				orang	20	20	100,00%
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	7.122.500,00	7.008.600,00	98,40%				
1 Jumlah pelaku usaha industri yang mempunyai izin berlaku sesuai dengan ketentuan				pelaku usaha	1.173	1.217	103,75%
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	7.122.500,00	7.008.600,00	98,40%				
Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	7.122.500,00	7.008.600,00	98,40%				
1 IKM pangan yang diawasi/BTP				IKM	35	35	100,00%
2 pelaku usaha yang di verifikasi				pemohon	20	20	100,00%
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	90.000.000,00	89.850.200,00	99,83%				
1 Persentase data industri yang dimutakhirkan				%	100,00	100,00	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN				
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	90.000.000,00	89.850.200,00	99,83%				
<i>Sub kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas</i>	90.000.000,00	89.850.200,00	99,83%				
1 Buku data industri Kabupaten Sleman				buku	20	20	100,00%



**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2022**

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	66.314.000,00	66.314.000,00	100,00%				
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	66.314.000,00	66.314.000,00	100,00%				
Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	66.314.000,00	66.314.000,00	100,00%				
Sub Kegiatan Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	66.314.000,00	66.314.000,00	100,00%				
1 Fasilitasi Forum Warisan Geologi Kabupaten Sleman				dokumen	1	1	100,00%
URUSAN SEKRETARIAT DAERAH	404.259.000,00	401.327.572,00	99,27%				
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	404.259.000,00	401.327.572,00	99,27%				
Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	404.259.000,00	401.327.572,00	99,27%				
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	404.259.000,00	401.327.572,00	99,27%				
1 Dokumen Perubahan / Penyesuaian Perencanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Tahun 2023				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen Perubahan / Redesain I Perencanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Tahun 2022				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen Perubahan / Redesain II Perencanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Tahun 2022				dokumen	1	1	100,00%
4 Dokumen Usulan Perencanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Tahun 2024				dokumen	1	1	100,00%



URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
5 Dokumen Panduan Usulan BKK Dana Keistimewaan				dokumen	1	1	100,00%
URUSAN PERENCANAAN	12.917.221.284,00	12.566.613.260,00	97,29%				
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	10.145.943.029,00	9.837.954.201,00	96,96%				
1 Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				%	100	100	100,00%
2 Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja				%	100	100	100,00%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.299.611,00	21.099.257,00	99,06%				
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.839.675,00	7.801.500,00	99,51%				
1 Dokumen Perjanjian Kinerja				dokumen	3	3	100,00%
2 Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja				dokumen	3	3	100,00%
3 Dokumen Renja				dokumen	1	1	100,00%
4 Dokumen Perubahan Renja				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.218.000,00	1.151.620,00	94,55%				
1 Dokumen RKA-SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.184.588,00	1.156.505,00	97,63%				
1 Dokumen Perubahan RKA-SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.089.000,00	1.084.286,00	99,57%				
1 Dokumen DPA-SKPD				dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.348.875,00	1.337.955,00	99,19%				
1 Dokumen Perubahan DPA-SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.619.473,00	8.567.391,00	99,40%				
1 Dokumen Laporan Tahunan				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen LKjIP/LAKIP				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja				dokumen	4	4	100,00%
4 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja				dokumen	1	1	100,00%
5 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja				dokumen	4	4	100,00%
6 Dokumen RFK				dokumen	12	12	100,00%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.746.174.952,00	7.502.859.531,00	96,86%				
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.517.816.952,00	7.276.162.813,00	96,79%				
1 Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai				bulan	12	12	100,00%
2 Pembayaran iuran BPJS				bulan	12	12	100,00%
3 Pembayaran TPP				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	216.460.000,00	214.820.700,00	99,24%				
1 Pembayaran honorarium pengelola keuangan / barang				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	11.898.000,00	11.876.018,00	99,82%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Laporan aset/BMD semesteran				dokumen	2	2	100,00%
2 Laporan keuangan semesteran				dokumen	2	2	100,00%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	468.922.585,00	464.309.040,00	99,02%				
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	446.922.585,00	443.709.040,00	99,28%				
1 Laporan pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi				dokumen	1	1	100,00%
2 Layanan administrasi kepegawaian				bulan	12	12	100,00%
3 Pembayaran tenaga non PNS / PHL				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22.000.000,00	20.600.000,00	93,64%				
1 Pengiriman peserta bimtek/workshop/lokakarya/seminar				orang	4	4	100,00%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	727.275.046,00	703.167.766,00	96,69%				
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.746.911,00	11.633.500,00	99,03%				
1 Alat Listrik				macam	5	5	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	254.750.000,00	243.088.996,00	95,42%				
1 Peralatan dan perlengkapan kantor				unit	47	47	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	136.822.153,00	133.199.755,00	97,35%				
1 ATK				paket	1	1	100,00%
2 Layanan makanan dan minuman rapat				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.325.982,00	25.111.405,00	99,15%				
1 Layanan cetak dan penggandaan dokumen				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	23.400.000,00	22.735.600,00	97,16%				
1 Layanan makanan dan minuman tamu				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	255.516.000,00	248.622.764,00	97,30%				
1 Layanan perjalanan dinas dalam daerah				bulan	12	12	100,00%
2 Layanan perjalanan dinas luar daerah				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	19.714.000,00	18.775.746,00	95,24%				
1 Pengelolaan arsip dan perpustakaan				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.000.000,00	17.885.000,00	94,13%				
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	19.000.000,00	17.885.000,00	94,13%				
1 Rak Arsip				unit	3	3	100,00%
2 Sofa				paket	1	1	100,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	560.803.835,00	550.606.645,00	98,18%				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000,00	6.413.230,00	85,51%				
1 Layanan surat menyurat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144.000.000,00	143.825.110,00	99,88%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Pembayaran jasa langganan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	409.303.835,00	400.368.305,00	97,82%				
1 Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	602.467.000,00	578.026.962,00	95,94%				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	278.327.000,00	273.500.713,00	98,27%				
1 Layanan pemeliharaan kendaraan dinas				bulan	12	12	100,00%
2 Layanan penyediaan BBM kendaraan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	11.000.000,00	10.985.000,00	99,86%				
1 Layanan pemeliharaan mebelair				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	143.140.000,00	124.560.800,00	87,02%				
1 Pemeliharaan peralatan kerja				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	170.000.000,00	168.980.449,00	99,40%				
1 Pemeliharaan gedung				paket	1	1	100,00%
2 Pemeliharaan taman				paket	1	1	100,00%
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.723.638.269,00	1.689.730.182,00	98,03%				
1 Persentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan				%	100	100	100,00%
2 Persentase Dokumen bahan pengambilan kebijakan komunikasi informasi, perpustakaan dan kearsipan tersedia tepat waktu				%	100	100	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
3 Persentase konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah				%	90	90	100,00%
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.290.489.869,00	1.268.016.452,00	98,26%				
Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	90.928.025,00	89.939.413,00	98,91%				
1 Dokumen rekap proposal usulan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Tahun 2023				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen usulan kegiatan DAK Tahun 2023				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen usulan kegiatan TJSP Tahun 2023				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	49.349.100,00	48.043.302,00	97,35%				
1 Dokumen Hasil Forum Konsultasi Publik RKP				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	125.772.000,00	122.947.132,00	97,75%				
1 Dokumen Hasil Forum Perangkat Daerah				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	293.675.250,00	284.066.969,00	96,73%				
1 Dokumen hasil Musrebang RKP				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	730.765.494,00	723.019.636,00	98,94%				
1 Dokumen Peraturan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Renja PD Tahun 2022				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen Peraturan Bupati tentang Pengesahan Renja PD Tahun 2023				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen Peraturan Bupati tentang Perubahan RKP Tahun 2022				dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
4 Dokumen Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2023				dokumen	1	1	100,00%
Kegiatan Analisis Data Dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	355.334.400,00	344.059.990,00	96,83%				
Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	53.442.000,00	53.062.514,00	99,29%				
1 Buku informasi program dan kegiatan pembangunan tahun 2022				dokumen	1	1	100,00%
2 Buku saku data urusan komunikasi informasi, perpustakaan dan kearsipan Tahun 2023				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen data RKPD tahun 2023				dokumen	1	1	100,00%
4 Dokumen perencanaan pembangunan urusan komunikasi informasi, perpustakaan dan kearsipan sebagai bahan masukan RKPD Tahun 2024				dokumen	1	1	100,00%
5 Pengelolaan DATAKU				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	301.892.400,00	290.997.476,00	96,39%				
1 Pengelolaan forum satu data kabupaten				bulan	12	12	100,00%
2 Pengelolaan informasi dan dokumentasi				bulan	12	12	100,00%
3 Pengelolaan website perangkat daerah				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	77.814.000,00	77.653.740,00	99,79%				
Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	34.686.000,00	34.601.082,00	99,76%				
1 Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD				dokumen	4	4	100,00%
3 Laporan monitoring dan evaluasi Dana BKK Provinsi ke Kabupaten tahun 2022				dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
4 Laporan monitoring dan evaluasi Dana Keistimewaan tahun 2022				dokumen	3	3	100,00%
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	43.128.000,00	43.052.658,00	99,83%				
1 Dokumen Evaluasi terhadap Hasil RPJPD				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen Evaluasi terhadap Hasil RPJMD tahun 2021				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen Evaluasi terhadap Hasil RKPD tahun 2022				dokumen	1	1	100,00%
4 Dokumen Evaluasi terhadap Evaluasi Hasil Renja PD tahun 2022				dokumen	1	1	100,00%
5 Dokumen Laporan Akhir DAK tahun 2022				dokumen	1	1	100,00%
6 Dokumen Monitoring Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2021				dokumen	1	1	100,00%
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.047.639.986,00	1.038.928.877,00	99,17%				
1 Persentase dokumen bahan pengambilan kebijakan kesejahteraan rakyat dan pemerintahan tersedia tepat waktu				%	100	100	100,00%
2 Persentase dokumen bahan pengambilan kebijakan perekonomian tersedia tepat waktu				%	100	100	100,00%
3 Persentase dokumen bahan pengambilan kebijakan fisik dan prasarana tersedia tepat waktu				%	100	100	100,00%
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	376.401.875,00	373.404.850,00	99,20%				
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	107.695.000,00	106.664.196,00	99,04%				
1 Buku saku urusan pemerintahan				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan urusan pemerintahan sebagai bahan masukan RKPD tahun 2024				dokumen	11	11	100,00%
3 Dokumen hasil monitoring dan evaluasi RAD Kependudukan tahun 2021				dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	41.389.875,00	41.200.495,00	99,54%				
1 Buku saku urusan kesehatan dan sosial				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan urusan kesehatan dan sosial sebagai bahan masukan RKPD tahun 2024				dokumen	3	3	100,00%
3 Dokumen aksi stunting				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	193.565.000,00	191.955.670,00	99,17%				
1 Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan				dokumen	1	1	100,00%
2 Laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan				dokumen	1	1	100,00%
3 Fasilitasi sekretariat Pemberdayaan Masyarakat Sleman (Sepeda Mas)				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	33.752.000,00	33.584.489,00	99,50%				
1 Buku saku urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga sebagai bahan masukan RKPD tahun 2024				dokumen	1	1	100,00%
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	218.717.261,00	215.327.635,00	98,45%				
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	83.102.600,00	80.785.464,00	97,21%				
1 Buku saku data urusan pertanian, pangan, perikanan dan pemberdayaan masyarakat				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan urusan pertanian, pangan, perikanan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bahan masukan RKPD tahun 2024				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen laporan pemetaan kawasan komoditas pertanian Kabupaten Sleman				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	46.630.495,00	46.433.393,00	99,58%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Buku saku data urusan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan urusan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi sebagai bahan masukan RKPD tahun 2024				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	88.984.166,00	88.108.778,00	99,02%				
1 Buku saku data urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal sebagai bahan masukan RKPD tahun 2024				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan				dokumen	1	1	100,00%
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	452.520.850,00	450.196.392,00	99,49%				
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	33.606.125,00	32.669.890,00	97,21%				
1 Buku saku data urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan pemukiman				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan pemukiman sebagai bahan masukan RKPD tahun 2024				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	80.564.375,00	79.881.761,00	99,15%				
1 Buku saku data urusan penataan ruang dan pertanahan				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan urusan penataan ruang dan pertanahan sebagai bahan masukan RKPD tahun 2024				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	33.303.350,00	32.598.241,00	97,88%				
1 Dokumen data sanitasi terbaru dan data evaluasi pelaksanaan strategi sanitasi				dokumen	1	1	100,00%
2 Laporan pelaksanaan kebijakan sanitasi dan air minum				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	305.047.000,00	305.046.500,00	100,00%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Buku saku lingkungan hidup dan perhubungan				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan urusan lingkungan hidup dan perhubungan sebagai bahan masukan RKPD tahun 2024				dokumen	1	1	100,00%
3 luran Sekber Kartamantul				bulan	12	12	100,00%
URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	504.321.100,00	502.175.352,00	99,57%				
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	504.321.100,00	502.175.352,00	99,57%				
1 Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan				%	25	25	100,00%
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	378.242.500,00	378.108.006,00	99,96%				
Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	378.242.500,00	378.108.006,00	99,96%				
1 Buku Jurnal				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen Dewan Litbang				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen inventarisasi hasil penelitian di Kabupaten Sleman				dokumen	1	1	100,00%
4 Dokumen penelitian tematis hasil seleksi proposal Perguruan Tinggi tahun 2022				dokumen	1	1	100,00%
5 Tema Penelitian Tahun 2023				dokumen	1	1	100,00%
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	17.307.250,00	16.607.120,00	95,95%				
Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	17.307.250,00	16.607.120,00	95,95%				
1 Laporan Kegiatan				dokumen	1	1	100,00%
2 Pelayanan rekomendasi ijin KKN				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	108.771.350,00	107.460.226,00	98,79%				
Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	65.122.350,00	64.686.267,00	99,33%				
1 Dokumen Pelaksanaan Smart Villaage				dokumen	1	1	100,00%
2 Laporan analisis dan olah data inovasi daerah				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	43.649.000,00	42.773.959,00	98,00%				
1 Laporan pelaksanaan pembinaan sertifikasi HKI				dokumen	1	1	100,00%
2 Sosialisasi HKI				dokumen	1	1	100,00%





**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KEPEGAWAIN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2022**

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
URUSAN SEKRETARIAT DAERAH	425.708.000	402.680.570	94,59%				
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	425.708.000	402.680.570	94,59%				
1 Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional;				persentase	80,00	80,00	100,00%
2 Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada OPD Pemerintah Kabupaten Sleman				persentase	50,00	50,00	100,00%
Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan	425.708.000	402.680.570	94,59%				
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	425.708.000	402.680.570	94,59%				
1 Jumlah ASN Pemerintah Kabupaten Sleman Mengikuti Internalisasi Keistimewaan				orang	60	60	100,00%
URUSAN KEPEGAWAIN							
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	10.645.466.404	10.151.485.804	95,36%				
1 Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				persentase	100,00	100,00	100,00%
2 Persentase pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana kerja				persentase	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.795.425	28.666.752	99,55%				
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.023.200	11.000.850	99,80%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Dokumen Perjanjian kinerja				dokumen	3	3	100,00%
2 Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja				dokumen	3	3	100,00%
3 Dokumen Perubahan Renja				dokumen	1	1	100,00%
4 Dokumen Renja				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.608.900	1.608.900	100,00%				
1 Dokumen Perubahan RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1.564.800	1.556.400	99,46%				
1 Dokumen DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.726.350	1.705.350	98,78%				
1 Dokumen Perubahan DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.237.175	11.160.252	99,32%				
1 Dokumen Laporan Tahunan				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen LKJIP/LAKIP				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja				dokumen	4	4	100,00%
4 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja				dokumen	1	1	100,00%
5 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja				dokumen	4	4	100,00%
6 Dokumen RFK				dokumen	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.577.576.000	8.166.144.382	95,20%				
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.339.442.000	7.929.477.232	95,08%				
1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan				bulan	12	12	100,00%
2 Pembayaran iuran BPJS				bulan	12	12	100,00%
3 Pembayaran TPP				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	224.534.000	223.128.300	99,37%				
1 Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	13.600.000	13.538.850	99,55%				
1 Dokumen laporan aset/BMD semester I dan II				dokumen	2	2	100,00%
2 Dokumen laporan keuangan per bulan				dokumen	12	12	100,00%
3 Dokumen laporan keuangan semester I dan II				dokumen	2	2	100,00%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	205.567.850	164.519.811	80,03%				
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	205.567.850	164.519.811	80,03%				
1 Laporan Pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi				dokumen	1	1	100,00%
2 Layanan administrasi kepegawaian				dokumen	12	12	100,00%
3 Pembayaran tenaga Non PNS/ PHL				dokumen	12	12	100,00%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.116.869.569	1.092.631.605	97,83%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	7.205.650	7.114.750	98,74%				
1 Alat listrik				jenis	8	8	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	617.731.759	606.109.800	98,12%				
1 Peralatan dan perlengkapan kantor				jenis	20	20	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	146.374.850	146.244.675	99,91%				
1 Alat Tulis Kantor (ATK)				paket	1	1	100,00%
2 Layanan makan minum rapat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.729.745	22.707.700	99,90%				
1 Layanan cetak dan penggandaan dokumen				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	18.450.000	18.120.000	98,21%				
1 Layanan penyediaan makanan dan minuman tamu				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	304.377.565	292.334.680	96,04%				
1 Layanan perjalanan dinas dalam daerah				bulan	12	12	100,00%
2 Layanan perjalanan dinas luar daerah				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	439.805.560	428.137.991	97,35%				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.360.000	17.230.150	93,85%				
1 Layanan surat menyurat				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2 Pengelolaan arsip dan perpustakaan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	107.250.000	102.883.271	95,93%				
1 Pembayaran jasa langganan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	314.195.560	308.024.570	98,04%				
1 Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	276.852.000	271.385.263	98,03%				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	197.401.000	193.701.431	98,13%				
1 Layanan pemeliharaan BBM kendaraan				bulan	12	12	100,00%
2 Layanan pemeliharaan kendaraan dinas				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.700.000	44.475.832	97,32%				
1 Pemeliharaan peralatan kerja				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33.751.000	33.208.000	98,39%				
1 Layanan pemeliharaan BMD				bulan	3	3	100,00%
Program Kepegawaian Daerah	4.344.539.155	3.325.524.560	76,54%				
1 Persentase kualifikasi pendidikan ASN				persentase	0,2	1,23	613,50%
2 Persentase kinerja ASN				persentase	95	99,89	105,15%
3 Persentase disiplin ASN				persentase	0,2	0,11	144,23%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
4 Tingkat kualitas perencanaan dan pengembangan karir ASN				nilai	35	61,25	175,00%
5 Persentase aplikasi kepegawaian yang dikembangkan				persentase	100	100,00	100,00%
6 Persentase pemberian pelayanan dan penghargaan bagi Pegawai ASN				persentase	65	72,67	111,80%
7 Persentase kesesuaian penempatan PNS dalam jabatan sesuai kualifikasi jenjang pendidikan				persentase	97	99,62	102,70%
8 Tingkat kualitas pengadaan ASN				nilai	16	18	125,00%
Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.873.571.425	1.087.131.307	58,02%				
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	61.520.250	59.399.400	96,55%				
1 Formasi				OPD	48	48	100,00%
2 Non PNS				OPD	48	45	93,75%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1.066.007.550	310.435.910	29,12%				
1 Pendaftar dan seleksi ASN				orang	8000	729	9,11%
2 Penetapan formasi ASN				dokumen	1	1	100,00%
3 Pendaftar dan seleksi PPPK				orang	0	0	
4 Penetapan formasi PPPK				dokumen	0	0	
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	227.888.125	219.382.550	96,27%				
1 Pembekalan PNS Calon Puma Tugas				orang	524	499	95,23%
2 Penerbitan KARIP dan TASPEN				orang	524	529	100,95%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
3 Penerbitan SK Pensiun				orang	524	656	125,19%
Sub Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	384.602.500	372.171.246	96,77%				
1 Evaluasi Perumusan program kerja/ rakorkab				kali	1	1	100,00%
2 Pembinaan dan Menjaring Aspirasi unit KORPRI				unit	60	60	100,00%
3 Pembinaan Kelompok Kesenian KORPRI				kelompok	3	3	100,00%
4 Penerbitan Buletin KORPRI				kali	1	1	100,00%
5 Pengelolaan Dana Sosial anggota KORPRI				bulan	12	12	100,00%
6 Pengelolaan dan Penyampaian Tali Asih KORPRI				kali	2	2	50,00%
7 Peringatan HUT KORPRI				kali	1	1	100,00%
8 MTQ KORPRI				kali	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	82.098.000	76.321.000	92,96%				
1 Penyajian data Kepegawaian				data	24	24	100,00%
2 Rekonsiliasi/ Pengembangan database				data	500	500	100,00%
3 Updating database kepegawaian				orang	3500	3527	100,77%
4 Pendamping Tenaga Ahli Pengembangan Aplikasi SIMPEG				bulan	12	11	91,67%
5 Integrasi SAPK - SIMPEG				dokumen	1	1	100,00%
6 Bimtek Integrasi SAPK - SIMPEG melalui Web Service (Implementasi)				orang	5	5	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
7 Bimtek Integrasi SAPK - SIMPEG melalui Web Service (Maintenance & Troubleshooting)				orang	5	5	100,00%
Sub Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	51.455.000	49.421.201	96,05%				
1 Bimtek dasar fotografi				orang	16	16	100,00%
2 Bimtek dasar video shooting				orang	16	16	100,00%
3 Bimtek penulisan artikel dan konten medsos				orang	16	16	100,00%
4 Buku Pedoman Pembinaan				file	30	30	100,00%
5 Pelaksanaan Scanning Dokumen, Editing dan Upload Hasil Scanning				dokumen	6000	6037	100,62%
6 Pembinaan, Pemantauan dan Penataan File				file	2000	2000	100,00%
7 Pemeliharaan Tata Naskah Kepegawaian				dokumen	2500	2523	100,92%
8 Penataan Dokumen Kepegawaian				dokumen	2500	2523	100,92%
9 Pengelolaan PPID Perangkat Daerah				bulan	12	12	100,00%
10 Pengelolaan Website				bulan	12	12	100,00%
11 Penyusunan FIP Pegawai Baru				dokumen	1000	1008	100,80%
12 Penyusunan video profil BKPP				paket	1	1	100,00%
Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	308.180.500	292.540.775	94,93%				
Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	106.219.500	95.481.650	89,89%				
1 Pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural dan kepala sekolah				orang	115	340	295,65%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2 Rekomendasi Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah				orang	40	104	260,00%
3 Seleksi PNS mutasi antar daerah masuk dan keluar				orang	90	125	138,89%
4 SK Penempatan JFU dan JFT				SK	400	1580	395,00%
Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	106.306.000	102.399.200	96,32%				
1 Data administrasi calon purna tugas/ pensiun				orang	524	460	87,79%
2 Data administrasi CPNS				orang	100	164	164,00%
3 Data administrasi kenaikan pangkat				orang	900	928	103,11%
4 Data administrasi penempatan pegawai				orang	400	1516	379,00%
5 Data administrasi pengangkatan, pemindahan pejabat struktural dan pemberian tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah				orang	115	340	295,65%
6 Nota persetujuan teknis dan penetapan SK kenaikan pangkat				orang	900	928	103,11%
7 Nota persetujuan teknis dan penetapan SK peninjauan masa kerja				orang	10	53	530,00%
8 Pengendalian dalam penetapan angka kredit bagi JFT				orang	600	991	165,17%
9 Pertimbangan jabatan dan kepangkatan PNS				orang	255	271	106,27%
Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	95.655.000	94.659.925	98,96%				
1 Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan PNS				orang	255	271	106,27%
Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	1.805.819.500	1.601.017.106	88,66%				
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	1.567.903.500	1.372.103.206	87,51%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Balon calon peserta UPKP				orang	15	15	100,00%
2 Calon peserta ujian dinas				orang	120	117	97,50%
3 Pelaksanaan seleksi substansi calon pengawas							
4 Pelaksanaan uji kompetensi calon pejabat				orang	183	180	98,36%
5 Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama				jabatan	4	3	75,00%
Sub Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	237.916.000	228.913.900	96,22%				
1 Izin belajar dan tugas belajar				surat	50	209	418,00%
2 Laporan selesai pendidikan				surat	75	122	162,67%
3 Pemantauan alumni tugas belajar				dokumen	1	1	100,00%
4 Pemantauan perkembangan studi peserta TB/ IB				kali	7	7	100,00%
5 Penyaluran biaya pengembangan SDM				orang	24	57	237,50%
Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	356.967.730	344.835.372	96,60%				
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	52.508.730	50.470.784	96,12%				
1 Bimtek Penyusunan SKP sesuai PP 30 Tahun 2019				OPD	48	48	100,00%
2 Pemantauan kinerja pegawai				OPD	48	48	100,00%
3 Sosialisasi PP 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS				OPD	48	48	100,00%
Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	119.477.000	114.520.258	95,85%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Dokumentasi Rekapitulasi Kenaikan Gaji Berkala PNS				OPD	48	48	100,00%
2 Kartu Pengenal Pegawai				buah	1000	1130	113,00%
3 Penganugerahan SLKS				orang	190	354	186,32%
4 Pengelolaan TPP				kali	12	12	100,00%
5 Pengusulan dan Penetapan Karis/Karsu				buah	100	263	263,00%
6 Pengusulan dan Penetapan Karpeg				buah	20	316	1580,00%
7 Pengusulan dan Penetapan Taspen				buah	20	25	125,00%
8 Pengusulan, Penetapan JKK & JKM				orang	5	1	20,00%
9 Rekomendasi Cuti				orang	200	174	87,00%
10 Rekomendasi KGB				orang	23	19	82,61%
11 Rekomendasi Taperum				orang	30	34	113,33%
12 Sosialisasi Bidang Kepegawaian				kali	2	2	100,00%
13 Bimtek TPP				kali	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	184.982.000	179.844.330	97,22%				
1 Kompilasi LHKPN Pemerintah Kabupaten Sleman				orang	150	150	100,00%
2 Pemantauan dan pembinaan disiplin pegawai				OPD	48	48	100,00%
3 Pemantauan kinerja pegawai				OPD	48	48	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
4 Pembinaan perkawinan dan konseling pegawai				orang	50	60	120,00%
5 Pengujian kesehatan bagi PNS yang mengalami gangguan jasmani dan rohani				orang	15	11	73,33%
6 Pertimbangan penyelesaian kasus				kasus	15	5	33,33%
7 Pelaksanaan uji narkoba bagi ASN dan ceramah P4GN				orang	150	150	100,00%
URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.915.556.700	4.433.399.992	90,19%				
1 Persentase pengembangan kompetensi ASN				persentase	50	55	110,44%
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	1.725.978.700	1.614.798.243	93,56%				
Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	118.486.000	111.252.815	93,90%				
1 Pengukuran Tingkat Kepuasan pengguna alumni diklat				dokumen	1	2	200,00%
2 Penyempurnaan program diklat dan data AKD				dokumen	1	1	100,00%
3 Penyusunan Kurikulum Diklat				dokumen	5	9	180,00%
4 Presentasi Hasil Diklat				presentasi	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.607.492.700	1.503.545.428	93,53%				
1 Pengiriman pelatihan teknis				orang	91	195	214,29%
2 Pengiriman pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang jasa				orang	74	66	89,19%
3 Penyelenggaraan Pelatihan Analisis Jabatan				orang	30	30	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
4 Penyelenggaraan Pelatihan Bahasa Jawa bagi Guru SD				orang	30	30	100,00%
5 Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Kepegawaian				orang	30	30	100,00%
6 Penyelenggaraan Pelatihan Orientasi CPNS				orang	167	164	98,20%
Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	3.189.578.000	2.818.601.749	88,37%				
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	3.189.578.000	2.818.601.749	88,37%				
1 Pengiriman Latihan Dasar CPNS Golongan III/II pola kemitraan				orang	104	104	100,00%
2 Pengiriman Latihan Dasar CPNS Golongan III				orang	60	60	100,00%
3 Pengiriman Pelatihan Calon Pengawas				orang	0	0	
4 Pengiriman Pelatihan Fungsional				orang	15	53	353,33%
5 Pengiriman Pelatihan Kepemimpinan Administrator				orang	18	18	100,00%
6 Pengiriman Pelatihan Kepemimpinan Nasional				orang	2	2	100,00%
7 Pengiriman Pelatihan Kepemimpinan Pengawas				orang	10	10	100,00%
8 Pengiriman Pelatihan Tenaga Kesehatan				orang	75	65	86,67%
9 Pengiriman Pelatihan Tenaga Pendidikan				orang	60	60	100,00%
TOTAL ANGGARAN	20.331.270.259	18.313.090.926	90,07%				





**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2022**

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.197.737.557,00	5.806.243.799,64	93,68%				
1 Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				%	100	100,00	100,00%
2 Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja				%	100	100,00	100,00%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.146.360,00	57.615.521,28	97,41%				
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.106.075,00	40.632.539,28	96,50%				
1 Dokumen Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen Perubahan Renja				dokumen	1	1	100,00%
4 Dokumen Renja				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.118.720,00	2.118.580,00	99,99%				
1 Dokumen RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.518.720,00	1.518.580,00	99,99%				
1 Dokumen Perubahan RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.147.310,00	2.147.310,00	100,00%				
1 Dokumen DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.667.310,00	1.658.850,00	99,49%				
1 Dokumen Perubahan DPA SKPD				dokumen	1	1	100%
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.588.225,00	9.539.662,00	99,49%				
1 Dokumen Laporan Tahunan				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen LKjIP				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen LPPD Bulanan				dokumen	12	12	100,00%
4 Dokumen RFK Bulanan				dokumen	12	12	100,00%
5 Dokumen Pengendalian dan Evaluasi terhadap Hasil				dokumen	4	4	100,00%
6 Dokumen Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan				dokumen	1	1	100,00%
7 Dokumen Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan				dokumen	4	4	100,00%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.961.395.862,00	4.691.256.243,00	94,56%				
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.730.973.684,00	4.471.341.158,00	94,51%				
1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				bulan	12	12	100,00%
2 Pembayaran iuran BPJS				bulan	12	12	100,00%
3 Pembayaran TPP				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	223.560.000,00	213.110.000,00	95,33%				
1 Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan dan Barang				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.862.178,00	6.805.085,00	99,17%				
1 Laporan Aset BMD Semesteran				dokumen	2	2	100,00%
2 Laporan Keuangan Semesteran				dokumen	2	2	100,00%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.191.260,00	8.163.684,00	99,66%				
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8.191.260,00	8.163.684,00	99,66%				
1 Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				dokumen	1	1	100,00%
2 Layanan Administrasi Kepegawaian				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	275.542.912,00	265.645.279,34	96,41%				
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.234.718,00	10.959.400,00	97,55%				
1 Persediaan Peralatan Listrik				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.513.950,00	58.000.450,00	97,46%				
1 Alat Tulis Kantor				Paket	1	1	100,00%
2 Layanan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.517.614,00	22.489.030,00	99,87%				
1 Layanan Cetak dan Penggandaan Dokumen				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	25.440.000,00	20.250.250,00	79,60%				
1 Layanan Makan Minum Tamu				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.846.000,00	76.547.154,00	99,61%				
1 Layanan Perjalanan Dinas Luar Daerah				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	38.773.050,00	36.335.165,34	93,71%				
1 Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	41.217.580,00	41.063.830,00	99,63%				
1 Pengelolaan Informasi dan Dokumen PD				bulan	12	12	100,00%
2 Pengelolaan Website				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	501.865.173,00	447.814.398,02	89,23%				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	194.112.000,00	162.341.455,00	83,63%				
1 Pembayaran Jasa Langganan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	307.753.173,00	285.472.943,02	92,76%				
1 Pelayanan Kebersihan dan Keamanan Kantor				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	391.595.990,00	335.748.674,00	85,74%				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	335.355.160,00	279.769.574,00	83,42%				
1 Layanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2 Layanan Penyediaan BBM				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	6.875.000,00	6.875.000,00	100,00%				
1 Layanan Pemeliharaan Mebel				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.400.000,00	34.304.100,00	99,72%				
1 Layanan Pemeliharaan Peralatan Kerja				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.965.830,00	14.800.000,00	98,89%				
1 Pemeliharaan Gedung Kantor				unit	2	2	100%
Program Penanggulangan Bencana	7.283.425.301,00	6.894.392.638,76	94,66%				
1 Persentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				%	100	100	100,00%
2 Persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				%	100	100	100,00%
3 Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				%	100	100	100,00%
4 Persentase warga yang memperoleh layanan penyediaan, rehabilitasi dan rekonstruksi melalui penataan sistem dasar pelaksanaan pasca bencana				%	80	80	100,00%
Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	548.003.033,00	540.268.373,00	98,59%				
Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	548.003.033,00	540.268.373,00	98,59%				
1 Apel Siaga				angkatan	1	1	100%
2 Pelatihan Relawan				angkatan	18	18	100,00%
3 Pelatihan Relawan di Kapanewon Ngaglik				angkatan	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
4 Pembinaan Unit Operasional Kecamatan				angkatan	1	1	100%
5 Pembinaan Unit Pelaksana Desa				angkatan	1	1	100%
6 Sosialisasi				angkatan	5	5	100%
Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	3.599.707.064,00	3.396.578.015,96	94,36%				
Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	262.308.060,00	251.503.131,34	95,88%				
1 Desa Tangguh Bencana				desa	2	2	100%
2 Forum Guru				angkatan	1	1	100,00%
3 Forum Pengurangan Resiko Bencana				angkatan	1	1	100%
4 Konsolidasi Sister School				sekolah	54	54	100,00%
5 Konsolidasi Sister Village				desa	10	10	100,00%
6 Satuan Pendidikan Aman Bencana				SPAB	3	3	100,00%
Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	495.925.407,00	488.167.276,62	98,44%				
1 Operasional dan Pemeliharaan Bunker				lokasi	2	2	100%
2 Prosentase Data Informasi Kebencanaan				%	80	80	100%
3 Prosentase Early Warning System yang Berfungsi Baik				%	80	80	100%
Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	2.131.219.697,00	2.062.623.359,00	96,78%				
1 Akses Jalur Evakuasi Terhubung dengan Titik Kumpul				lokasi	6	6	100%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2 Penguatan Tebing				lokasi	3	3	100%
Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	710.253.900,00	594.284.249,00	83,67%				
1 Fasum dan Fasos yang Rusak Akibat Bencana Diperbaiki				%	80	80	100,00%
Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.462.004.071,00	2.309.209.438,52	93,79%				
Sub Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	22.646.150,00	22.394.290,00	98,89%				
1 Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi tentang Wabah Zoonosis				orang	105	105	100,00%
Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	240.171.746,00	223.264.098,00	92,96%				
1 Koordinasi Penanggulangan Bencana				kali	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.222.079.606,00	1.106.327.002,52	90,53%				
1 Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC)				%	100	100	100,00%
2 Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC)				%	100	100	100,00%
3 Penanganan Covid-19				%	100	100	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	681.834.571,00	668.128.819,76	97,99%				
1 Distribusi Bantuan Logistik Penanggulangan Bencana				bulan	12	12	100,00%
2 Pelatihan Pengelolaan Barak Pengungsi Bencana				orang	50	50	100,00%
3 Pemeliharaan Barak Pengungsi				bulan	12	12	100,00%
4 Pengadaan Logistik Penanggulangan Bencana				paket	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
5 Pengelolaan Gudang Logistik				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	295.271.998,00	289.095.228,24	97,91%				
1 Data Kejadian Bencana Bulanan				bulan	12	12	100,00%
2 Operasional Rpusdalops				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	673.711.133,00	648.336.811,28	96,23%				
Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	96.359.025,00	93.162.234,00	96,68%				
1 Dokumen Monitoring dan Evaluasi Hasil Pekerjaan Fisik Kegiatan Rehab Rekon				dokumen	1	1	100%
2 Dokumen Profil Huntap				dokumen	1	1	100%
Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	354.913.500,00	341.868.135,00	96,32%				
1 Jumlah barak pengungsian yang telah dilakukan perbaikan atau penyempurnaan				unit	2	2	100%
Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	77.144.850,00	71.036.292,28	92,08%				
1 Persentase bantuan sosial penanganan korban dampak bencana kabupaten				%	80	80	100,00%
Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	145.293.758,00	142.270.150,00	97,92%				
1 Dokumen pendataan rumah di wilayah KRB III Kapanewon Cangkringan				dokumen	1	1	100,00%
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	13.481.162.858,00	12.700.636.438,40	94,21%				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.197.737.557,00	5.806.243.799,64	93,68%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				%	100	100,00	100,00%
2 Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja				%	100	100,00	100,00%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.146.360,00	57.615.521,28	97,41%				
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.106.075,00	40.632.539,28	96,50%				
1 Dokumen Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen Perubahan Renja				dokumen	1	1	100,00%
4 Dokumen Renja				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.118.720,00	2.118.580,00	99,99%				
1 Dokumen RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.518.720,00	1.518.580,00	99,99%				
1 Dokumen Perubahan RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.147.310,00	2.147.310,00	100,00%				
1 Dokumen DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.667.310,00	1.658.850,00	99,49%				
1 Dokumen Perubahan DPA SKPD				dokumen	1	1	100%
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.588.225,00	9.539.662,00	99,49%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Dokumen Laporan Tahunan				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen LKjIP				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen LPPD Bulanan				dokumen	12	12	100,00%
4 Dokumen RFK Bulanan				dokumen	12	12	100,00%
5 Dokumen Pengendalian dan Evaluasi terhadap Hasil				dokumen	4	4	100,00%
6 Dokumen Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan				dokumen	1	1	100,00%
7 Dokumen Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan				dokumen	4	4	100,00%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.961.395.862,00	4.691.256.243,00	94,56%				
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.730.973.684,00	4.471.341.158,00	94,51%				
1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				bulan	12	12	100,00%
2 Pembayaran Iuran BPJS				bulan	12	12	100,00%
3 Pembayaran TPP				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	223.560.000,00	213.110.000,00	95,33%				
1 Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan dan Barang				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.862.178,00	6.805.085,00	99,17%				
1 Laporan Aset BMD Semesteran				dokumen	2	2	100,00%
2 Laporan Keuangan Semesteran				dokumen	2	2	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.191.260,00	8.163.684,00	99,66%				
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8.191.260,00	8.163.684,00	99,66%				
1 Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				dokumen	1	1	100,00%
2 Layanan Administrasi Kepegawaian				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	275.542.912,00	265.645.279,34	96,41%				
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.234.718,00	10.959.400,00	97,55%				
1 Persediaan Peralatan Listrik				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.513.950,00	58.000.450,00	97,46%				
1 Alat Tulis Kantor				Paket	1	1	100,00%
2 Layanan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.517.614,00	22.489.030,00	99,87%				
1 Layanan Cetak dan Penggandaan Dokumen				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	25.440.000,00	20.250.250,00	79,60%				
1 Layanan Makan Minum Tamu				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.846.000,00	76.547.154,00	99,61%				
1 Layanan Perjalanan Dinas Luar Daerah				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	38.773.050,00	36.335.165,34	93,71%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1. Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	41.217.580,00	41.063.830,00	99,63%				
1. Pengelolaan Informasi dan Dokumen PD				bulan	12	12	100,00%
2. Pengelolaan Website				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	501.865.173,00	447.814.398,02	89,23%				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	194.112.000,00	162.341.455,00	83,63%				
1 Pembayaran Jasa Langganan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	307.753.173,00	285.472.943,02	92,76%				
1 Pelayanan Kebersihan dan Keamanan Kantor				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	391.595.990,00	335.748.674,00	85,74%				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	335.355.160,00	279.769.574,00	83,42%				
1 Layanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas				bulan	12	12	100,00%
2 Layanan Penyediaan BBM				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	6.875.000,00	6.875.000,00	100,00%				
1 Layanan Pemeliharaan Mebel				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.400.000,00	34.304.100,00	99,72%				
1 Layanan Pemeliharaan Peralatan Kerja				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.965.830,00	14.800.000,00	98,89%				
1 Pemeliharaan Gedung Kantor				unit	2	2	100%
Program Penanggulangan Bencana	7.283.425.301,00	6.894.392.638,76	94,66%				
1 Persentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				%	100	100	100,00%
2 Persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				%	100	100	100,00%
3 Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				%	100	100	100,00%
4 Persentase warga yang memperoleh layanan penyediaan, rehabilitasi dan rekonstruksi melalui penataan sistem dasar pelaksanaan pasca bencana				%	80	80	100,00%
Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	548.003.033,00	540.268.373,00	98,59%				
Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	548.003.033,00	540.268.373,00	98,59%				
1 Apel Siaga				angkatan	1	1	100%
2 Pelatihan Relawan				angkatan	18	18	100,00%
3 Pelatihan Relawan di Kapanewon Ngaglik				angkatan	1	1	100,00%
4 Pembinaan Unit Operasional Kecamatan				angkatan	1	1	100%
5 Pembinaan Unit Pelaksana Desa				angkatan	1	1	100%
6 Sosialisasi				angkatan	5	5	100%
Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	3.599.707.064,00	3.396.578.015,96	94,36%				
Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	262.308.060,00	251.503.131,34	95,88%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Desa Tangguh Bencana				desa	2	2	100%
2 Forum Guru				angkatan	1	1	100,00%
3 Forum Pengurangan Resiko Bencana				angkatan	1	1	100%
4 Konsolidasi Sister School				sekolah	54	54	100,00%
5 Konsolidasi Sister Village				desa	10	10	100,00%
6 Satuan Pendidikan Aman Bencana				SPAB	3	3	100,00%
Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	495.925.407,00	488.167.276,62	98,44%				
1 Operasional dan Pemeliharaan Bunker				lokasi	2	2	100%
2 Prosentase Data Informasi Kebencanaan				%	80	80	100%
3 Prosentase Early Warning System yang Berfungsi Baik				%	80	80	100%
Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	2.131.219.697,00	2.062.623.359,00	96,78%				
1 Akses Jalur Evakuasi Terhubung dengan Titik Kumpul				lokasi	6	6	100%
2 Penguatan Tebing				lokasi	3	3	100%
Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	710.253.900,00	594.284.249,00	83,67%				
1 Fasum dan Fasos yang Rusak Akibat Bencana Diperbaiki				%	80	80	100,00%
Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.462.004.071,00	2.309.209.438,52	93,79%				
Sub Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	22.646.150,00	22.394.290,00	98,89%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi tentang Wabah Zoonosis				orang	105	105	100,00%
Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	240.171.746,00	223.264.098,00	92,96%				
1 Koordinasi Penanggulangan Bencana				kali	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.222.079.606,00	1.106.327.002,52	90,53%				
1 Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC)				%	100	100	100,00%
2 Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC)				%	100	100	100,00%
3 Penanganan Covid-19				%	100	100	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	681.834.571,00	668.128.819,76	97,99%				
1 Distribusi Bantuan Logistik Penanggulangan Bencana				bulan	12	12	100,00%
2 Pelatihan Pengelolaan Barak Pengungsi Bencana				orang	50	50	100,00%
3 Pemeliharaan Barak Pengungsi				bulan	12	12	100,00%
4 Pengadaan Logistik Penanggulangan Bencana				paket	1	1	100,00%
5 Pengelolaan Gudang Logistik				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	295.271.998,00	289.095.228,24	97,91%				
1 Data Kejadian Bencana Bulanan				bulan	12	12	100,00%
2 Operasional Rpusdalops				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	673.711.133,00	648.336.811,28	96,23%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	96.359.025,00	93.162.234,00	96,68%				
1 Dokumen Monitoring dan Evaluasi Hasil Pekerjaan Fisik Kegiatan Rehab Rekon				dokumen	1	1	100%
2 Dokumen Profil Huntap				dokumen	1	1	100%
Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	354.913.500,00	341.868.135,00	96,32%				
1 Jumlah barak pengungsian yang telah dilakukan perbaikan atau penyempurnaan				unit	2	2	100%
Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	77.144.850,00	71.036.292,28	92,08%				
1 Persentase bantuan sosial penanganan korban dampak bencana kabupaten				%	80	80	100,00%
Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	145.293.758,00	142.270.150,00	97,92%				
1 Dokumen pendataan rumah di wilayah KRB III Kapanewon Cangkringan				dokumen	1	1	100,00%



**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2022**

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET							
URUSAN KEUANGAN	560.875.314.747,01	509.980.728.214,36	90,93%				
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	127.883.451.732,00	109.550.792.575,00	85,66%				
1 Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				%	100,00	100,00	100,00%
2 Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja				%	100,00	100,00	100,00%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92.157.517,00	91.620.257,00	99,42%				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.169.500,00	63.991.774,00	99,72%				
1 Dokumen renja				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen perubahan renja				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen perjanjian kinerja				dokumen	1	1	100,00%
4 Dokumen perubahan kinerja				dokumen	1	1	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.170.250,00	4.961.132,00	95,96%				
1 Dokumen RKA-SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.588.725,00	1.550.775,00	97,61%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Dokumen perubahan RKA-SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.588.725,00	1.550.775,00	97,61%				
1 Dokumen DPA-SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.588.725,00	1.575.862,00	99,19%				
1 Dokumen perubahan DPA-SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.051.592,00	17.989.939,00	99,66%				
1 Dokumen laporan tahunan				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen LKjIP/Lakip				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan renja (per triwulan)				dokumen	1	1	100,00%
4 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan renja				dokumen	1	1	100,00%
5 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja (per triwulan)				dokumen	1	1	100,00%
6 Dokumen laporan RFK (form sesuai bag pembangunan)				dokumen	1	1	100,00%
7 Dokumen laporan bulanan (form sesuai bag pemerintahan)				dokumen	1	1	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.823.095.670,00	29.862.110.219,36	76,92%		100%	100%	100,00%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38.061.537.445,00	29.216.703.402,00	76,76%				
1 Gaji dan tunjangan				bulan	12	12	100,00%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	622.220.000,00	523.960.500,00	84,21%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Pembayaran honorarium pengelolaan keuangan/barang				bulan	12	12	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	139.338.225,00	121.446.317,00	87,16%				
1 Dokumen laporan aset/BMD				dokumen	2	2	100,00%
2 Dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu				dokumen	2	2	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	890.000.000,00	759.640.757,00	85,35%				
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	890.000.000,00	759.640.757,00	85,35%				
1 Dokumen laporan pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi				dokumen	1	1	100,00%
2 Layanan administrasi kepegawaian				bulan	12	12	100,00%
3 Pembayaran tenaga Non PNS/PHL				bulan	12	12	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.520.849.473,00	1.923.569.447,00	76,31%				
1 Pemenuhan kebutuhan administrasi umum				%	90	90	100,00%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	230.311.906,00	57.304.400,00	24,88%				
1 Alat listrik				bulan	12	12	100,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103.315.960,00	67.814.500,00	65,64%				
1 Peralatan dan perlengkapan kantor				paket	1	1	100,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	833.628.692,00	633.864.579,00	76,04%				
1 Layanan makanan dan minuman rapat				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2 Penyediaan ATK				paket	1	1	100,00%
Penyediaan Cetakan dan Penggandaan	347.035.915,00	188.676.000,00	54,37%				
1 Layanan cetak dan penggandaan dokumen				bulan	12	12	100,00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	101.475.000,00	99.919.342,00	98,47%				
1 Layanan makanan dan minuman tamu				bulan	12	12	100,00%
Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	905.082.000,00	884.990.626,00	97,78%				
1 Layanan perjalanan dinas dalam daerah				bulan	12	12	100,00%
2 Layanan perjalanan dinas luar daerah				bulan	12	12	100,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.728.493.948,00	36.443.499.376,00	83,34%				
1 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja				%	90	90	100,00%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.908.000.008,00	1.851.353.876,00	97,03%				
1 Pemenuhan kebutuhan kendaraan operasional				jenis	45	45	100,00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	41.820.493.940,00	34.592.145.500,00	82,72%				
1 Mebelair				paket	1	1	100,00%
2 Peralatan kantor				paket	1	1	100,00%
3 Tanah				paket	1	1	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.764.885.124,00	39.724.168.685,00	97,45%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	101.000.000,00	72.052.000,00	71,34%				
1 Layanan surat menyurat				bulan	12	12	100,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.156.500.000,00	39.180.065.747,00	97,57%				
1 Pembayaran jasa langganan				bulan	12	12	100,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	507.385.124,00	472.000.938,00	93,03%				
1 Layanan keamanan kantor				bulan	12	12	100,00%
2 Layanan kebersihan kantor				bulan	12	12	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.063.970.000,00	737.233.834,00	69,29%				
1 Persentase barang milik daerah terpelihara				%	90	90	100,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	637.020.000,00	434.593.190,00	68,22%				
1 Layanan pemeliharaan kendaraan dinas				bulan	12	12	100,00%
2 Layanan penyediaan BBM kendaraan				bulan	12	12	100,00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	211.850.000,00	173.834.540,00	82,06%				
1 Layanan pemeliharaan peralatan kerja				bulan	12	12	100,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	215.100.000,00	128.806.104,00	59,88%				
1 Layanan pemeliharaan gedung				bulan	12	12	100,00%
2 Layanan pemeliharaan taman				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	960.000.000,00	867.965.079,00	90,41%				
1 BA verifikasi dan SK penetapan penerima dan besaran DPM				BA & SK	48	100	208,00%
2 Forum komunikasi DPM				Kali	5	5	100,00%
3 Laporan Dana Penguatan Modal				Laporan	12	12	100,00%
4 Laporan Keuangan UPTD DPM				Laporan	1	1	100,00%
5 Laporan Monitoring DPM				Laporan	1	1	100,00%
6 Laporan Penyelesaian tunggakan dana penguatan modal				Laporan	1	1	100,00%
7 Pelayanan informasi dan agunan				Bulan	12	12	100,00%
8 RBA UPT pengelolaan Dana Penguatan Modal				Dokumen	2	2	100,00%
9 Sosialisasi dana penguatan modal				Kali	5	5	100,00%
10 Surat Perjanjian pinjaman DPM				Perjanjian	400	331	82,00%



**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2022**

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLTIK	14.471.738.558,00	13.691.900.018,00	94,61%				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.113.926.383,00	4.720.281.524,00	92,30%				
1 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				%	100	100	100,00%
2 Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja				%	100	100	100,00%
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.039.957,00	41.388.563,00	93,98%				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.764.850,00	25.140.636,00	90,55%				
1 Dokumen Perjanjian Kinerja				dokumen	3	3	100,00%
2 Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja				dokumen	3	3	100,00%
3 Dokumen Perubahan Renja				dokumen	1	1	100,00%
4 Dokumen Profil Data Bakesbangpol				dokumen	1	1	100,00%
5 Dokumen Renja				dokumen	1	1	100,00%
Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.659.218,00	1.656.825,00	99,86%				
1 Dokumen RKA-SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.658.588,00	1.657.350,00	99,93%				



URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Dokumen Perubahan RKA-SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	1.109.588,00	1.108.350,00	99,89%				
1 Dokumen DPA-SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.534.715,00	2.534.715,00	100,00%				
1 Dokumen Perubahan DPA-SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.312.998,00	9.290.687,00	99,76%				
1 Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Renja PD (E.70)				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen Laporan Tahunan				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen LKJIP/LAKIP				dokumen	1	1	100,00%
4 Dokumen Pengendalian Evaluasi Terhadap Hasil Renja PD (E.81)				dokumen	4	4	100,00%
5 Dokumen Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja PD (E.75)				dokumen	4	4	100,00%
6 Dokumen RFK				dokumen	12	12	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.297.103.239,00	3.973.097.562,00	92,46%				
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	4.125.748.841,00	3.805.794.428,00	92,24%				
1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai				bulan	12	12	100,00%
2 Pembayaran Iuran BPJS				bulan	12	12	100,00%
3 Pembayaran TPP				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	167.684.400,00	163.634.200,00	97,58%				
1 Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan/barang				bulan	12	12	100,00%
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.669.998,00	3.668.934,00	99,97%				
1 Laporan Aset/ BMD Semesteran				dokumen	2	2	100,00%
2 Laporan Keuangan Semesteran				dokumen	2	2	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	207.869.578,00	201.696.581,00					
Pendataan Dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	207.869.578,00	201.696.581,00	97,03%				
1 Laporan Pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi				dokumen	1	1	100,00%
2 Layanan Administrasi Kepegawaian				bulan	12	12	100,00%
3 Pembayaran Tenaga Non PNS/PHL				bulan	12	12	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	118.614.966,00	104.057.392,00	87,73%				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.391.860,00	1.239.150,00	89,03%				
1 Alat Listrik				jenis	3	3	100,00%
2 Kabel Listrik				meter	17	17	100,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.166.615,00	38.955.925,00	74,68%				
1 ATK				paket	1	1	100,00%
2 Layanan Makan Minum Rapat				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	11622205	11435123	98,39%				
1 Layanan Cetak dan Penggandaan Dokumen				bulan	12	12	100,00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.725.000,00	4.725.000,00	100,00%				
1 Layanan Makan Minum Tamu				bulan	12	12	100,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	35.438.000,00	35.128.200,00	99,13%				
1 Layanan Perjalanan Dinas Dalam Daerah				bulan	12	12	100,00%
2 Layanan Perjalanan Dinas Luar Daerah				bulan	12	12	100,00%
Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	12.345.313,00	11.648.170,00	94,35%				
1 Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan				bulan	12	12	100,00%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	925.973,00	925.824,00	99,98%				
1 Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi				bulan	12	12	100,00%
2 Pengelolaan Website PD				bulan	12	12	100,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.505.250,00	13.850.000,00	89,32%				
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	15.505.250,00	13.850.000,00	89,32%				
1 Perlengkapan Gedung Kantor				unit	27	27	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.134.433,00	226.910.166,00	92,57%				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1. Layanan Surat Menyurat				bulan	12	12	100,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.140.000,00	16.217.001,00	84,73%				
1 Pembayaran Jasa Langganan				bulan	12	12	100,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	220.394.433,00	205.093.165,00	93,06%				
1 Pelayanan Keamanan dan Kebersihan Kantor				bulan	12	12	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.658.960,00	159.281.260,00	85,79%				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanl atau Lapanagan	153.819.960,00	129.162.760,00	83,97%				
1 Layanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas				bulan	12	12	100,00%
2 Layanan Penyediaan BBM Kendaraan				bulan	12	12	100,00%
Pemeliharaan Mebel	2.145.000,00	1.600.000,00	74,59%				
1 Layanan Pemeliharaan Mebeleur				bulan	12	12	100,00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.994.000,00	18.517.000,00	97,49%				
1 Pemeliharaan/Perbaikan Peralatan Kerja				unit	36	36	100,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.700.000,00	10.001.500,00	93,47%				
1 Pemeliharaan Gedung				unit	1	1	100,00%
2 Pemeliharaan Taman				unit	1	1	100,00%
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	942.791.212,00	824.844.013,00	87,49%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Jumlah Kalurahan Berkarakter Pancasila				kalurahan	16	16	100,00%
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	942.791.212,00	824.844.013,00	87,49%				
Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	127.006.555,00	105.170.050,00	82,81%				
1 Brainstroming Pengukuran Desa Berkarakter Pancasila				kali	1	1	100,00%
2 Dokumen Pengukuran Desa Berkarakter Pancasila				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen Pengukuran Indeks Desa Berkarakter Pancasila				dokumen	1	1	100,00%
4 FGD Draft Pengukuran Indeks Desa Berkarakter Pancasila				kali	1	1	100,00%
5 Seminar Instrumen Pengukuran Indeks Desa Berkarakter Pancasila				kali	1	1	100,00%
6 Workshop Finalisasi Dokumen Instrumen Pengukuran Indeks Desa Berkarakter Pancasila				kali	1	1	100,00%
7 Uji Coba Implementasi Draft Instrumen Pengukuran Indeks Kalurahan Berkarakter Pancasila				kali	1	1	100,00%
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	512.407.630,00	460.738.888,00	89,92%				
1 Forum Pembauran Kebangsaan				kali	1	1	100,00%
2 Pembinaan Generasi Muda/Sekolah				kali	9	9	100,00%
3 Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan				kali	1	1	100,00%
4 Upacara 17an dan Hari Besar				kali	10	8	80,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
5 Wasbang Goes To School				kali	1	1	100,00%
6 Wasbang Goes To School				kali	9	9	100,00%
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	303.377.027,00	258.935.075,00	85,35%				
1 Monev Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila				kali	1	1	100,00%
2 Pembentukan Desa Berkarakter Pancasila				desa	6	6	100,00%
3 Pendampingan Desa Berkarakter Pancasila				kali	2	2	100,00%
4 Pendampingan Rintisan Desa Berkarakter Pancasila				desa	13	13	100,00%
5 Penyusunan dan Pengiriman Laporan Revitalisasi dan Aktualisasi nilai-Nilai Pancasila				dokumen	1	1	100,00%
6 Workshop Kader Pancasila				kali	1	1	100,00%
7 Fasilitasi pengangkatan dan pengukuhan Purna Paskibraka Duta Pancasila Tahun 2022				kali	1	1	100,00%
8 Pelatihan Duta Pancasila				kali	1	1	100,00%
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2.415.719.703,00	2.319.440.050,00	96,01%				
1 Persentase Penanganan Kasus Kerawanan Bidang Politik				%	100	100	100,00%
2 Persentase Parpol Penerima Bantuan Keuangan Partai Politik Dengan Kesimpulan LHP Sesuai Dengan Kriteria Yang Berlaku				%	88	100	113,64%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelambagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	88.516.615,00	76.057.300,00	85,92%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Seminar Pemahaman Demokrasi dan HAM				kali	1	1	100,00%
2 Seminar Pemahaman demokrasi dan HAM di Maguwoharjo, Margomulyo, dan Margoagung				kali	3	3	100,00%
3 Seminar Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik				kali	1	1	100,00%
4 Seminar Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik di Manggung Depok				kali	1	1	100,00%
5 Sosialisasi Pemilu Serentak				kali	3	3	100,00%
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelambagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	2.327.203.088,00	2.243.382.750,00	96,40%				
1 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Bantuan Kepada Parpol				kali	1	1	100,00%
2 Laporan Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik				dokumen	1	1	100,00%
3 Seminar Forum Komunikasi Antar Partai Politik				kali	4	4	100,00%
4 Verifikasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik				parpol	8	8	100,00%
5 Verifikasi Permohonan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Parpol				parpol	8	8	100,00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	4.360.809.925,00	4.325.658.250,00	99,19%				
1 PERSENTASE ORMAS DAN LSM YANG AKTIF				%	50	65	130,00%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan							
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	4.360.809.925,00	4.325.658.250,00	99,19%				
1 Laporan Kegiatan Pemantauan Ormas/LSM				dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2 Pelayanan Surat Keterangan terdaftar Ormas				bulan	12	12	100,00%
3 Pembinaan Ormas/LSM				kali	1	1	100,00%
4 Seminar Ormas dan LSM se Kabupaten Sleman				kali	1	1	100,00%
5 Laporan Pelayanan Hibah				dokumen	2	2	100,00%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	838.701.429,00	772.119.603,00	92,06%				
1 Persentase Penanganan Kaus Kerawanan Bidang Ekonomi, Sosial Dan Budaya				%	100	100	100,00%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya							
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah	363.181.202,00	333.881.806,00	91,93%				
1 Lomba Video Pendek Anti Narkoba				kali	1	1	100,00%
2 Penyuluhan Penanggulangan Narkoba				kali	1	1	100,00%
3 Rintisan Desa Bebas Narkoba				desa	5	5	100,00%
4 Seminar Peringatan Hari Anti Narkoba (HANI)				kali	1	1	100,00%
5 FGD Naskah Akademik Raperda P4GN				kali	2	2	100,00%
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah	475.520.227,00	438.237.797,00	92,16%				
1 Anjagsana ke Pemangku Kepentingan				kali	4	4	100,00%
2 FGD Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				kali	1	1	100,00%
3 Monev Wali Kerukunan				kali	12	10	83,33%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
4 Pelayanan Verifikasi Pendirian Tempat Ibadah				bulan	12	12	100,00%
5 Pemantauan Tempat Ibadah/Pendirian Tempat Ibadah				bulan	12	12	100,00%
6 Pembinaan Aliran Kepercayaan				kali	1	1	100,00%
7 Seminar KUB				kali	2	2	100,00%
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	799.789.906,00	729.556.578,00	91,22%				
1 Persentase Realisasi Kinerja Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial (PKS)				%	80	80	100,00%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial							
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	352.448.725,00	334.920.245,00	95,03%				
1 FGD Pengawasan Orang Asing				kali	1	1	100,00%
2 Laporan Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial				dokumen	1	1	100,00%
3 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				kali	1	1	100,00%
4 Pemantauan dan Pendataan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing				kali	5	5	100,00%
5 Pemantauan Potensi Konflik di Daerah				kali	40	40	100,00%
6 Pemutakhiran data Asrama Mahasiswa				bulan	12	12	100,00%
7 raker Peningkatan Kerjasama Intelijen				bulan	12	12	100,00%
8 Seminar Pengendalian Keamanan Lingkungan				kali	1	1	100,00%
9 Pelatihan SIDENI SIDATIN				kali	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lemabaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik DI Daerah	249.675.646,00	241.170.774,00	96,59%				
1 Peninjauan/Pemantauan				kali	12	12	100,00%
2 Seminar Kewaspadaam				kali	2	2	100,00%
3 Sosialisasi Kewaspadaan Dini				kali	6	6	100,00%
4 Raker FKDM				kali	2	2	100,00%
5 Sosialisasi Reksa Desa				kali	2	2	100,00%
6 Dokumen Pemetaan Daerah Rawan Kekerasan Anak Jalanan di Kabupaten Sleman				dokumen	1	1	100,00%
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	197.665.535,00	153.465.559,00	77,64%				
1 FGD FORKOPIMDA				kali	4	4	100,00%
2 Rapat Koordinasi/Rapat Kerja FORKOPIMDA				kali	12	12	100,00%





**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
INSPEKTORAT
2022**

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
INSPEKTORAT	14.471.738.558,00	13.691.900.018,00	94,61%				
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan							
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.680.642.939,00	8.786.200.853,00	90,76%				
1. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				%	100	100	100,00%
2. Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan prasarana kerja				%	100	100	100,00%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.368.250,00	21.157.250,00	99,01%				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.266.250,00	6.165.350,00	98,39%				
1. Dokumen Renja				dokumen	1	1	100,00%
2. Dokumen Perubahan Renja				dokumen	1	1	100,00%
3. Dokumen Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
4. Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
Koordinasi dan Peyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.137.500,00	2.090.000,00	97,78%				
1. Dokumen RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Koordinasi dan Peyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.137.500,00	2.119.000,00	99,13%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Dokumen Perubahan RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Koordinasi dan Peyusunan DPA-SKPD	2.137.500,00	2.109.950,00	98,71%				
1 Dokumen DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Koordinasi dan Peyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.631.250,00	1.618.600,00	99,22%				
1 Dokumen Perubahan DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.058.250,00	7.054.350,00	99,94%				
1 Dokumen RFK				dokumen	12	12	100,00%
2 Dokumen dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen Laporan Bulanan				dokumen	12	12	100,00%
4 Dokumen Laporan Tahunan				dokumen	1	1	100,00%
5 Dokumen LKjIP/LAKIP				dokumen	1	1	100,00%
6 Dokumen Pengendalian dan Evaluasi terhadap Hasil Renja				dokumen	1	1	100,00%
7 Dokumen Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja				dokumen	1	1	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.135.352.450,00	7.360.880.528,00	90,48%				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.989.396.450,00	7.215.938.428,00	90,32%				
1 Pembayaran gaji, tunjangan ASN				bulan	14	14	100,00%
2 Pembayaran TPP				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	137.620.000,00	136.704.400,00	99,33%				
1 Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang				bulan	12	12	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8.336.000,00	8.237.700,00	98,82%				
1 Dokumen Laporan Aset/BMD semesteran				dokumen	2	2	100,00%
2 Dokumen Laporan Keuangan Semesteran				dokumen	2	2	100,00%
3 Laporan Keuangan Bulanan				dokumen	12	12	100,00%
4 Rekonsiliasi Aset				dokumen	1	1	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	199.452.700,00	184.020.218,00	92,26%				
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	107.936.450,00	104.420.218,00	96,74%				
1 Dokumen Laporan Pelaksanaan Roadmap RB Tahun 2021				dokumen	1	1	100,00%
2 Layanan Administrasi Kepegawaian				bulan	12	12	100,00%
3 Pembayaran Tenaga Non PNS/PHL				bulan	12	12	100,00%
4 Dokumen PAK				dokumen	2	2	100,00%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	91.516.250,00	79.600.000,00	86,98%				
1. Pelatihan Kantor Sendiri				kali	14	15	107,14%
2. Pengiriman Peserta Bimtek, Workshop, Seminar dan Lokakarya				kali	1	1	100,00%
3. <i>Capacity building</i>				kali	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	337.341.009,00	329.177.556,00	97,58%				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.745.905,00	5.490.500,00	95,56%				
1. Komponen Alat Listrik dan Elektronik				paket	1	1	100,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.071.095,00	54.591.700,00	90,88%				
1. Alat Tulis Kantor				paket	2	2	100,00%
2. Layanan Pemenuhan Makan, Minum Rapat				bulan	12	12	100,00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.940.000,00	5.940.000,00	100,00%				
1. Layanan Cetak dan Penggandaan				bulan	12	12	100,00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.200.000,00	7.134.750,00	99,09%				
1. Layanan Makan dan Minum Tamu				bulan	12	12	100,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225.186.000,00	223.574.106,00	99,28%				
1. Layanan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah				bulan	12	12	100,00%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	28.398.309,00	27.659.600,00	97,40%				
1. Layanan Surat-Menyurat				bulan	12	12	100,00%
2. Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah				bulan	12	12	100,00%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.799.700,00	4.786.900,00	99,73%				
1. Pengelolaan Informasi dan Dokumen PD				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2. Pengelolaan Website PD				bulan	12	12	100,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	363.920.826,00	320.583.300,00	88,09%				
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	363.920.826,00	320.583.300,00	88,09%				
1. Pengelolaan Peralatan Kantor				jenis	11	11	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	289.503.704,00	272.190.967,00	94,02%				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.800.000,00	62.072.087,00	91,55%				
1. Pembayaran Jasa Langganan				bulan	12	12	100,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	221.703.704,00	210.118.880,00	94,77%				
1. Pelayanan Keamanan dan Kebersihan Kantor				bulan	12	12	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	333.704.000,00	298.191.034,00	89,36%				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	228.754.000,00	201.676.464,00	88,16%				
1. Layanan Pembelian BBM				bulan	12	12	100,00%
2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas				bulan	12	12	100,00%
Pemeliharaan Mebel	19.500.000,00	18.392.400,00	94,32%				
1. Pemeliharaan Meubelair				bulan	12	12	100,00%
2. Pengadaan Meja Kerja				Unit	1	1	100,00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.900.000,00	28.879.300,00	80,44%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1. Layanan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				bulan	12	12	100,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.550.000,00	49.242.870,00	99,38%				
1. Pemeliharaan Bangunan				paket	2	2	100,00%
2. Pemeliharaan Taman				paket	2	2	100,00%
Inspektorat Daerah							
Program Penyelenggaraan Pengawasan	680.709.000,00	584.606.000,00	85,88%				
1. Persentase Catatan/Saran Hasil Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditindaklanjuti				%	100	100	100,00%
2. Persentase Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti				%	86	86,99	101,15%
3. Persentase Nilai Hasil Audit Kinerja Perangkat Daerah dengan Kategori Sangat Baik				%	100	37,5	37,50%
4. Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti				%	100	100	100,00%
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	292.371.500,00	273.024.800,00	93,38%				
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	35.971.500,00	32.573.900,00	90,55%				
1. Laporan Hasil Audit Kinerja				dokumen	8	8	100,00%
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	23.113.500,00	16.437.750,00	71,12%				
1. Laporan Hasil Audit Keuangan				dokumen	8	8	100,00%
Reviu Laporan Kinerja	20.355.000,00	17.931.950,00	88,10%				
1. Laporan Hasil Reviu LPPD				dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2. Laporan Hasil Reviu Kinerja Pemerintah Daerah				dokumen	1	1	100,00%
3. Laporan Hasil Reviu RKPd				dokumen	1	1	100,00%
4. Laporan Hasil Reviu Renja				dokumen	1	1	100,00%
5. Laporan Hasil Reviu RKPd Perubahan				dokumen	1	1	100,00%
6. Laporan Hasil Reviu Renja Perubahan				dokumen	1	1	100,00%
7. Laporan Hasil Per Reviu				dokumen	1	1	100,00%
8. Evaluasi LKjIP SKPD				dokumen	48	48	100,00%
Reviu Laporan Keuangan	35.295.000,00	33.745.250,00	95,61%				
1. Laporan Hasil Reviu DAK				dokumen	1	1	100,00%
2. Laporan Hasil Reviu Penyerapan Anggaran				dokumen	1	1	100,00%
3. Laporan Hasil Reviu KUA-PPAS				dokumen	1	1	100,00%
4. Laporan Hasil Reviu KUA-PPAS Perubahan				dokumen	1	1	100,00%
5. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Daerah				dokumen	1	1	100,00%
6. Laporan Hasil Reviu RKA				dokumen	1	1	100,00%
7. Laporan Hasil Reviu RKA Perubahan				dokumen	1	1	100,00%
Pengawasan Desa	60.991.500,00	60.378.550,00	99,00%				
1. Laporan Hasil Pemeriksaan				dokumen	16	16	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	116.645.000,00	111.957.400,00	95,98%				
1. Koordinasi Pengawasan				kali	1	1	100,00%
2. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten				dokumen	2	2	100,00%
3. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP Lainnya				dokumen	2	2	100,00%
4. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK				dokumen	2	2	100,00%
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	388.337.500,00	311.581.200,00	80,23%				
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	388.337.500,00	311.581.200,00	80,23%				
1. Laporan Hasil Pemeriksaan				dokumen	24	24	100,00%
2. Laporan Hasil Pemeriksaan kasus				dokumen	5	8	160,00%
3. Laporan Kegiatan Pengawasan				laporan	5	5	100,00%
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	693.847.950,00	651.415.200,00	93,88%				
1. Persentase Perangkat Daerah dengan Tingkat Maturitas SPIP				%	100	100	100,00%
2. Tingkat Capaian MCP Kabupaten				%	87	94,27	108,36%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	6.210.000,00	5.501.700,00	88,59%				
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	6.210.000,00	5.501.700,00	88,59%				
1. Dokumen Program Pengawasan Tahunan				dokumen	1	1	100,00%
Pendampingan dan Asistensi	687.637.950,00	645.913.500,00	93,93%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	35.136.500,00	29.373.750,00	83,60%				
1. Laporan Hasil Pendampingan SKPD dan Desa				dokumen	1	1	100,00%
2. Pendampingan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi				angkatan	1	1	100,00%
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	132.622.200,00	122.925.650,00	92,69%				
1. Evaluasi Kapabilitas APIP				dokumen	1	1	100,00%
2. Evaluasi SPIP SKPD				dokumen	1	1	100,00%
3. Laporan PMPRB				dokumen	1	1	100,00%
4. Monev SPIP Kabupaten				dokumen	1	1	100,00%
5. Laporan Penilaian ZI-WBK				dokumen	1	1	100,00%
6. Laporan Hasil Verifikasi LHKASN				dokumen	1	1	100,00%
7. Aplikasi WBS				paket	1	1	100,00%
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	460.542.750,00	439.709.100,00	95,48%				
1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Pungutan Liar				dokumen	1	1	100,00%
2. Laporan Pengendalian Gratifikasi				dokumen	1	1	100,00%
3. Sosialisasi Gratifikasi				kali	2	2	100,00%
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	59.336.500,00	53.905.000,00	90,85%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1. Laporan Rencana Aksi Percepatan Pemberantasan Korupsi				dokumen	1	1	100,00%
2. Dokumen Survei Penilaian Integritas				dokumen	1	1	100,00%





**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
INSPEKTORAT
2022**

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
INSPEKTORAT	14.471.738.558,00	13.691.900.018,00	94,61%				
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.680.642.939,00	8.786.200.853,00	90,76%				
1. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				%	100	100	100,00%
2. Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan prasarana kerja				%	100	100	100,00%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.368.250,00	21.157.250,00	99,01%				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.266.250,00	6.165.350,00	98,39%				
1. Dokumen Renja				dokumen	1	1	100,00%
2. Dokumen Perubahan Renja				dokumen	1	1	100,00%
3. Dokumen Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
4. Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
Koordinasi dan Peyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.137.500,00	2.090.000,00	97,78%				
1. Dokumen RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Koordinasi dan Peyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.137.500,00	2.119.000,00	99,13%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Dokumen Perubahan RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Koordinasi dan Peyusunan DPA-SKPD	2.137.500,00	2.109.950,00	98,71%				
1 Dokumen DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Koordinasi dan Peyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.631.250,00	1.618.600,00	99,22%				
1 Dokumen Perubahan DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.058.250,00	7.054.350,00	99,94%				
1 Dokumen RFK				dokumen	12	12	100,00%
2 Dokumen dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen Laporan Bulanan				dokumen	12	12	100,00%
4 Dokumen Laporan Tahunan				dokumen	1	1	100,00%
5 Dokumen LKjIP/LAKIP				dokumen	1	1	100,00%
6 Dokumen Pengendalian dan Evaluasi terhadap Hasil Renja				dokumen	1	1	100,00%
7 Dokumen Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja				dokumen	1	1	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.135.352.450,00	7.360.880.528,00	90,48%				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.989.396.450,00	7.215.938.428,00	90,32%				
1 Pembayaran gaji, tunjangan ASN				bulan	14	14	100,00%
2 Pembayaran TPP				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	137.620.000,00	136.704.400,00	99,33%				
1 Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang				bulan	12	12	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8.336.000,00	8.237.700,00	98,82%				
1 Dokumen Laporan Aset/BMD semesteran				dokumen	2	2	100,00%
2 Dokumen Laporan Keuangan Semesteran				dokumen	2	2	100,00%
3 Laporan Keuangan Bulanan				dokumen	12	12	100,00%
4 Rekonsiliasi Aset				dokumen	1	1	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	199.452.700,00	184.020.218,00	92,26%				
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	107.936.450,00	104.420.218,00	96,74%				
1 Dokumen Laporan Pelaksanaan Roadmap RB Tahun 2021				dokumen	1	1	100,00%
2 Layanan Administrasi Kepegawaian				bulan	12	12	100,00%
3 Pembayaran Tenaga Non PNS/PHL				bulan	12	12	100,00%
4 Dokumen PAK				dokumen	2	2	100,00%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	91.516.250,00	79.600.000,00	86,98%				
1. Pelatihan Kantor Sendiri				kali	14	15	107,14%
2. Pengiriman Peserta Bimtek, Workshop, Seminar dan Lokakarya				kali	1	1	100,00%
3. <i>Capacity building</i>				kali	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	337.341.009,00	329.177.556,00	97,58%				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.745.905,00	5.490.500,00	95,56%				
1. Komponen Alat Listrik dan Elektronik				paket	1	1	100,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.071.095,00	54.591.700,00	90,88%				
1. Alat Tulis Kantor				paket	2	2	100,00%
2. Layanan Pemenuhan Makan, Minum Rapat				bulan	12	12	100,00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.940.000,00	5.940.000,00	100,00%				
1. Layanan Cetak dan Penggandaan				bulan	12	12	100,00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.200.000,00	7.134.750,00	99,09%				
1. Layanan Makan dan Minum Tamu				bulan	12	12	100,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225.186.000,00	223.574.106,00	99,28%				
1. Layanan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah				bulan	12	12	100,00%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	28.398.309,00	27.659.600,00	97,40%				
1. Layanan Surat-Menyurat				bulan	12	12	100,00%
2. Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah				bulan	12	12	100,00%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.799.700,00	4.786.900,00	99,73%				
1. Pengelolaan Informasi dan Dokumen PD				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2. Pengelolaan Website PD				bulan	12	12	100,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	363.920.826,00	320.583.300,00	88,09%				
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	363.920.826,00	320.583.300,00	88,09%				
1. Pengelolaan Peralatan Kantor				jenis	11	11	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	289.503.704,00	272.190.967,00	94,02%				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.800.000,00	62.072.087,00	91,55%				
1. Pembayaran Jasa Langganan				bulan	12	12	100,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	221.703.704,00	210.118.880,00	94,77%				
1. Pelayanan Keamanan dan Kebersihan Kantor				bulan	12	12	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	333.704.000,00	298.191.034,00	89,36%				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	228.754.000,00	201.676.464,00	88,16%				
1. Layanan Pembelian BBM				bulan	12	12	100,00%
2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas				bulan	12	12	100,00%
Pemeliharaan Mebel	19.500.000,00	18.392.400,00	94,32%				
1. Pemeliharaan Meubelair				bulan	12	12	100,00%
2. Pengadaan Meja Kerja				Unit	1	1	100,00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.900.000,00	28.879.300,00	80,44%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1. Layanan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				bulan	12	12	100,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.550.000,00	49.242.870,00	99,38%				
1. Pemeliharaan Bangunan				paket	2	2	100,00%
2. Pemeliharaan Taman				paket	2	2	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	680.709.000,00	584.606.000,00	85,88%				
1. Persentase Catatan/Saran Hasil Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditindaklanjuti				%	100	100	100,00%
2. Persentase Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti				%	86	86,99	101,15%
3. Persentase Nilai Hasil Audit Kinerja Perangkat Daerah dengan Kategori Sangat Baik				%	100	37,5	37,50%
4. Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti				%	100	100	100,00%
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	292.371.500,00	273.024.800,00	93,38%				
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	35.971.500,00	32.573.900,00	90,55%				
1. Laporan Hasil Audit Kinerja				dokumen	8	8	100,00%
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	23.113.500,00	16.437.750,00	71,12%				
1. Laporan Hasil Audit Keuangan				dokumen	8	8	100,00%
Reviu Laporan Kinerja	20.355.000,00	17.931.950,00	88,10%				
1. Laporan Hasil Reviu LPPD				dokumen	1	1	100,00%
2. Laporan Hasil Reviu Kinerja Pemerintah Daerah				dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
3. Laporan Hasil Reviu RKPDP				dokumen	1	1	100,00%
4. Laporan Hasil Reviu Renja				dokumen	1	1	100,00%
5. Laporan Hasil Reviu RKPDP Perubahan				dokumen	1	1	100,00%
6. Laporan Hasil Reviu Renja Perubahan				dokumen	1	1	100,00%
7. Laporan Hasil Per Reviu				dokumen	1	1	100,00%
8. Evaluasi LKjIP SKPD				dokumen	48	48	100,00%
Reviu Laporan Keuangan	35.295.000,00	33.745.250,00	95,61%				
1. Laporan Hasil Reviu DAK				dokumen	1	1	100,00%
2. Laporan Hasil Reviu Penyerapan Anggaran				dokumen	1	1	100,00%
3. Laporan Hasil Reviu KUA-PPAS				dokumen	1	1	100,00%
4. Laporan Hasil Reviu KUA-PPAS Perubahan				dokumen	1	1	100,00%
5. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Daerah				dokumen	1	1	100,00%
6. Laporan Hasil Reviu RKA				dokumen	1	1	100,00%
7. Laporan Hasil Reviu RKA Perubahan				dokumen	1	1	100,00%
Pengawasan Desa	60.991.500,00	60.378.550,00	99,00%				
1. Laporan Hasil Pemeriksaan				dokumen	16	16	100,00%
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	116.645.000,00	111.957.400,00	95,98%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1. Koordinasi Pengawasan				kali	1	1	100,00%
2. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten				dokumen	2	2	100,00%
3. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP Lainnya				dokumen	2	2	100,00%
4. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK				dokumen	2	2	100,00%
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	388.337.500,00	311.581.200,00	80,23%				
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	388.337.500,00	311.581.200,00	80,23%				
1. Laporan Hasil Pemeriksaan				dokumen	24	24	100,00%
2. Laporan Hasil Pemeriksaan kasus				dokumen	5	8	160,00%
3. Laporan Kegiatan Pengawasan				laporan	5	5	100,00%
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	693.847.950,00	651.415.200,00	93,88%				
1. Persentase Perangkat Daerah dengan Tingkat Maturitas SPIP				%	100	100	100,00%
2. Tingkat Capaian MCP Kabupaten				%	87	94,27	108,36%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	6.210.000,00	5.501.700,00	88,59%				
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	6.210.000,00	5.501.700,00	88,59%				
1. Dokumen Program Pengawasan Tahunan				dokumen	1	1	100,00%
Pendampingan dan Asistensi	687.637.950,00	645.913.500,00	93,93%				
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	35.136.500,00	29.373.750,00	83,60%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1. Laporan Hasil Pendampingan SKPD dan Desa				dokumen	1	1	100,00%
2. Pendampingan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi				angkatan	1	1	100,00%
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	132.622.200,00	122.925.650,00	92,69%				
1. Evaluasi Kapabilitas APIP				dokumen	1	1	100,00%
2. Evaluasi SPIP SKPD				dokumen	1	1	100,00%
3. Laporan PMPRB				dokumen	1	1	100,00%
4. Monev SPIP Kabupaten				dokumen	1	1	100,00%
5. Laporan Penilaian ZI-WBK				dokumen	1	1	100,00%
6. Laporan Hasil Verifikasi LHKASN				dokumen	1	1	100,00%
7. Aplikasi WBS				paket	1	1	100,00%
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	460.542.750,00	439.709.100,00	95,48%				
1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Pungutan Liar				dokumen	1	1	100,00%
2. Laporan Pengendalian Gratifikasi				dokumen	1	1	100,00%
3. Sosialisasi Gratifikasi				kali	2	2	100,00%
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	59.336.500,00	53.905.000,00	90,85%				
1. Laporan Rencana Aksi Percepatan Pemberantasan Korupsi				dokumen	1	1	100,00%
2. Dokumen Survei Penilaian Integritas				dokumen	1	1	100,00%





**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
SEKRETARIAT DPRD
2022**

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD							
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan							
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.920.733.519,00	47.190.527.181,19	92,67%				
1 Presentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				%	100	100	100,00%
2 Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana				%	100	100	100,00%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56.092.000,00	52.239.500,00	93,13%				
1 Dokumen Perjanjian Kinerja				Dokumen	3	3	100,00%
2 Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja				Dokumen	3	3	100,00%
3 Dokumen Perubahan Renja				Dokumen	1	1	100,00%
4 Dokumen Renja				Dokumen	1	1	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000,00	837.500,00	83,75%				
1 Dokumen RKA-SKPD				Dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000,00	910.000,00	91,00%				
1 Dokumen Perubahan RKA-SKPD				Dokumen	1	1	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000,00	792.500,00	79,25%				
1 Dokumen DPA-SKPD				Dokumen	1	1	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.181.247,00	1.145.000,00	96,93%				
1. Dokumen Perubahan DPA-SKPD				Dokumen	1	1	100,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.611.500,00	7.776.750,00	73,29%				
1 Dokumen Laporan Tahunan				Dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen LKJIP/ LAKIP				Dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Hasil Renja				Dokumen	4	4	100,00%
4 Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Renja				Dokumen	1	1	100,00%
5 Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Renja				Dokumen	4	4	100,00%
6 Dokumen RFK				Dokumen	12	12	100,00%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.270.584.209,00	4.475.681.779,00	84,92%				
1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai				Bulan	12	12	100,00%
2 Pembayaran Iuran BPJS				Bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
3 Pembayaran TPP				Bulan	12	12	100,00%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	297.500.000,00	268.994.400,00	90,42%				
1 Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan/ Barang				Bulan	12	12	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	22.215.671,00	21.969.500,00	98,89%				
1 Laporan Aset/ BMD Semesteran				Dokumen	2	2	100,00%
2 Laporan Keuangan Semesteran				Dokumen	2	2	100,00%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.295.323.882,00	2.060.524.297,99	89,77%				
1 Laporan Pelaksanaan Roadmap reformasi birokrasi				Dokumen	1	1	100,00%
2 Layanan Administrasi Kepegawaian				Bulan	12	12	100,00%
3 Pembayaran Tenaga Non PNS/ PHL				Bulan	12	12	100,00%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	429.564.000,00	266.206.855,00	61,97%				
1 Pengiriman Peserta Bimtek/ Workshop/ Seminar/ Lokakarya				orang	42	30	71,43%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah							
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	29.700.000,00	29.650.400,00	99,83%				
1 Alat Listrik				paket	9	9	100,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.094.113.999,00	3.699.888.687,00	90,37%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Peralatan dan Perlengkapan Kantor				paket	1	1	100,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	642.396.190,00	619.699.950,00	96,47%				
1 ATK				bulan	12	12	100,00%
2 Layanan Makanan dan Minuman Rapat				bulan	12	12	100,00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	297.862.924,00	228.835.750,00	76,83%				
1 Layanan Cetak dan Penggandaan				bulan	12	12	100,00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	436.010.000,00	400.197.540,00	91,79%				
1 Layanan Makan dan Minum Tamu				Bulan	12	12	100,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	958.354.000,00	683.901.670,00	71,36%				
1 Layanan Perjalanan Dinas dalam Daerah				Bulan	12	12	100,00%
2 Layanan Perjalanan Dinas Luar Daerah				Bulan	12	12	100,00%
Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	13.650.813,00	10.690.580,00	78,31%				
1 Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan				Bulan	12	12	100,00%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	2.525.000,00	1.400.000,00	55,45%				
1 Pengelolaan Informasi dan Dokumen PD, Pengelolaan Website PD				Bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
PENGADAAN MEBEL	462.000.000,00	436.387.178,00	94,46%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Mebelur				Paket	1	1	100,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	82.124.084,00	62.356.920,00	75,93%				
1. Layanan Surat Menyurat				Bulan	12	12	100,00%
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.050.168.000,00	601.799.665,00	57,31%				
1 Pembayaran Jasa Langganan				Bulan	12	12	100,00%
PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	870.647.400,00	838.467.775,00	96,30%				
1 Pelayanan Keamanan dan Kebersihan Kantor				Bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	604.408.000,00	461.544.272,00	76,36%				
1 Layanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas				Bulan	12	12	100,00%
2 Layanan Penyediaan BBM Kendaraan				Bulan	12	12	100,00%
PEMELIHARAAN MEBEL	8.800.000,00	8.682.400,00	98,66%				
1 Layanan Pemeliharaan Meubeler				Bulan	12	12	100,00%
PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	527.198.000,00	405.782.218,00	76,97%				
1 Pemeliharaan/ Perbaikan Peralatan Kerja				Bulan	12	12	100,00%
PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	609.000.000,00	594.361.057,20	97,60%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Pemeliharaan Gedung Kantor				Paket	5	5	100,00%
2 Pemeliharaan Taman				Paket	1	1	100,00%
Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD							
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	28.355.808.432,00	28.233.020.761,00	99,57%				
1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Dewan				Bulan	12	12	100,00%
PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	236.092.168,00	234.245.000,00	99,22%				
1 Atribut dan Kelengkapan lainnya				Set	50	50	100,00%
2 Ongkos Jahit				Set	100	100	100,00%
3 Pakaian Dinas Harian/ PDH				Stel	50	50	100,00%
4 Pakaian Sipil Harian/ PSH				Stel	50	50	100,00%
PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP DPRD	180.000.000,00	94.053.951,00	52,25%				
1 Pembayaran Jasa Medical Check Up				Bulan	12	8	66,67%
Kegiatan Layanan Administrasi DPRD							
FASILITASI RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DPRD	3.073.802.000,00	2.388.483.325,00	77,70%				
1 Layanan Kunjungan Kerja Pimpinan DPRD				Bulan	12	12	100,00%
2 Pelaksanaan Undangan Bimtek, Adkasi				kali	4	2	50,00%
3 Pelantikan Antar Waktu				kali	1	0	0,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
4 Pengiriman Rakornas Adkasi				kali	2	2	100,00%
5 Rapat Paripurna				kali	54	44	81,48%
6 Rapat Paripurna Istimewa				kali	5	3	60,00%
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	49.466.502.123,00	41.746.238.346,00	84,39%				
1 Presentase Raperda dalam Propemperda yang dibahas				%	90,5	90,5	100,00%
2 Persentase Nota Kesepakatan KUA PPAS yang terselesaikan tepat waktu				%	100	100	100,00%
3 Persentase Pengawasan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan				%	80,2	100	124,69%
4 Indeks Kepuasan DPRD atas Fasilitasi Layanan Kehumasan, Protokol dan layanan Administrasi				%	80,2	97,5	121,57%
Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD							
PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	918.636.200,00	279.026.140,00	30,37%				
1 Kunjungan Badan Pembentukan Peraturan Daerah/ Propemperda				Kali	4	4	100,00%
2 Propemperda				Dokumen	1	1	100,00%
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	11.613.664.820,00	10.558.906.484,00	90,92%				
1 Perjalanan Dinas Pansus				Kali	6	6	100,00%
2 Rapat Dengar Pendapat/ Public Hearing				Kali	3	3	100,00%
3 Raperda Inisiatif dan Non Inisiatif				Perda	15	15	100,00%
PENYELENGGARAAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.538.460.000,00	1.160.357.250,00	75,42%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1. Bedah Perda/ NA				Kali	3	3	100,00%
FASILITASI PENYUSUNAN PENJELASAN/KETERANGAN DAN/ATAU NASKAH AKADEMIK	3.641.894.390,00	3.496.171.750,00	96,00%				
1 Identifikasi Kebutuhan Perda				Kali	6	6	100,00%
2 Naskah Akademik				NA	6	6	100,00%
PENYUSUNAN TATA TERTIB DPRD	629.516.750,00	255.366.640,00	40,57%				
1 Pembahasan Tata Tertib DPRD				Dokumen	1	1	100,00%
2 Perjalanan Dinas				Kali	2	2	100,00%
Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran							
PEMBAHASAN KUA DAN PPAS	517.583.300,00	217.062.000,00	41,94%				
1 Kunjungan Badan Anggaran				Kali	2	2	100,00%
2 Nota Kesepakatan				Dokumen	1	1	100,00%
PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	909.090,00	882.500,00	97,08%				
1 Kunjungan Badan Anggaran				Kali	0	0	0,00%
2 Nota Kesepakatan				Dokumen	1	1	100,00%
	283.885.450,00	65.475.680,00	23,06%				
1 Kunjungan Badan Anggaran				Kali	1	1	100,00%
2 Nota Kesepakatan				Dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN	200.341.450,00	61.028.200,00	30,46%				
1 Kunjungan Badan Anggaran				Kali	1	1	100,00%
2 Nota Kesepakatan				Dokumen	1	1	100,00%
PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD	431.468.600,00	282.957.600,00	65,58%				
1 Perjalanan Dinas				Kali	2	2	100,00%
2 Rekomendasi				Dokumen	1	1	100,00%
Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan							
PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	1.712.967.340,00	1.274.829.267,00	74,42%				
1 Hearing Pengawasan Peraturan Daerah Bidang Pemerintahan dan Hukum				Kali	2	2	100,00%
2 Kunjungan Kerja Bidang Pemerintahan dan Hukum				Kali	10	10	100,00%
3 Laporan Masa Sidang				Laporan	3	3	100,00%
4 Kunjungan Kerja Dalam Kota Bidang Pemerintahan dan Hukum				Kali	7	6	85,71%
5 Publikasi Bidang Pemerintahan dan Hukum				Kali	8	8	100,00%
PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INFRASTRUKTUR	2.074.808.740,00	1.333.636.300,00	64,28%				
1 Hearing Pengawasan Peraturan Daerah Bidang Infrastruktur				Kali	2	2	100,00%
2 Kunjungan Kerja Bidang Infrastruktur				Kali	10	10	100,00%
3 Laporan Masa Sidang				Laporan	3	3	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
4 Kunjungan Kerja Dalam Kota Bidang Infrastruktur				Kali	6	5	83,33%
5 Publikasi Bidang Infrastruktur				Kali	8	8	100,00%
PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.903.435.740,00	1.329.189.000,00	69,83%				
1 Hearing Pengawasan Peraturan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat				Kali	2	2	100,00%
2 Kunjungan Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat				Kali	10	10	100,00%
3 Laporan Masa Sidang				Laporan	3	3	100,00%
4 Kunjungan Kerja Dalam Kota Bidang Kesejahteraan Rakyat				Kali	6	5	83,33%
5 Publikasi Bidang Kesejahteraan Rakyat				Kali	8	8	100,00%
PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEREKONOMIAN	1.752.764.620,00	1.285.427.880,00	73,34%				
1 Hearing Pengawasan Peraturan Daerah Bidang Perekonomian				Kali	2	2	100,00%
2 Kunjungan Kerja Bidang Perekonomian				Kali	10	10	100,00%
3 Laporan Masa Sidang				Laporan	3	3	100,00%
4 Kunjungan Kerja Dalam Kota Bidang Perekonomian				Kali	6	7	116,67%
5 Publikasi Bidang Perekonomian				Kali	8	8	100,00%
Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD							
PENDALAMAN TUGAS DPRD	3.590.317.700,00	3.051.665.301,00	85,00%				
1 Pengiriman Bimtek, Workshop, Seminar, Rakernas				Kali	6	6	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DEWAN	2.313.480.840,00	1.956.448.081,00	84,57%				
1 Dialog Inteaktif TV/ Radio				Siaran	15	15	100,00%
2 Penulisan website				Naskah	765	765	100,00%
3 Publikasi Kegiatan Anggota DPRD				Anggota	50	50	100,00%
4 Publikasi/ Peliputan				Media	8	8	100,00%
5 Seminar Kaukus Perempuan				Kali	1	1	100,00%
PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI	528.000.000,00	372.129.600,00	70,48%				
1 Pembayaran Kelompok Pakar dan Tim Ahli				Bulan	12	12	75,00%
PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI	297.744.000,00	297.265.600,00	99,84%				
1 Pembayaran Tenaga Ahli Fraksi				Bulan	12	12	100,00%
PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT	130.069.284,00	103.874.750,00	79,86%				
1 Layanan Aspirasi dan Informasi Kegiatan DPRD				Bulan	12	12	100,00%
2 Pelayanan Keprotokolan				Bulan	12	12	100,00%
PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DPRD	716.885.140,00	235.609.673,00	32,87%				
1 Kunjungan Kerja Banmus				Kali	6	4	100,00%
2 Rencana Kegiatan DPRD				Dokumen	1	1	0,00%
Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat							





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
PELAKSANAAN RESES	14.168.862.459,00	13.826.867.000,00	97,59%				
Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD							
PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	257.095.400,00	75.208.400,00	29,25%				
1 Penjaringan Aspirasi Masa Reses Anggota DPRD				Kali	4	4	100,00%
2 Pengawasan Kode Etik DPRD				Dokumen	1	1	100,00%
Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah							
PENYUSUNAN BAHAN KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI	243.710.810,00	226.853.250,00	93,08%				
1 Booklet				Buku	200	200	100,00%
2 Buku Album Foto				Eks	100	100	100,00%
3 Buku Kerja				Buku	200	200	100,00%
4 Kalender				Buah	450	450	100,00%
5 Pembuatan Video Kegiatan DPRD				Paket	1	1	100,00%
6 Suara Parlemen				Eks	2000	2000	100,00%





**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2022**

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		18.841.751.256,00	17.690.779.752,00	93,89%				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		18.373.631.256,00	17.244.898.752,00	93,86%				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		14.819.865.227,00	14.124.777.777,00	95,31%				
1	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja							
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.460.650,00	10.346.175,00	48,21%				
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.683.500,00	3.224.250,00	56,73%				
1	Dokumen Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
2	Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
3	Dokumen Renja				dokumen	1	1	100,00%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.090.925,00	1.200.000,00	57,39%				
1	Dokumen RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.090.925,00	1.200.000,00	57,39%				
1	Dokumen Perubahan RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.090.925,00	600.000,00	28,70%				
1 Dokumen DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.726.200,00	1.200.000,00	69,52%				
1 Dokumen Perubahan Perubahan DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.690.925,00	834.675,00	31,02%				
1 Dokumen Laporan Capaian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.087.250,00	2.087.250,00	41,03%				
1 Dokumen Laporan Tahunan				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen LKJIP/LAKIP				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen Pengendalian dan Evaluasi terhadap hasil Renja				dokumen	4	4	100,00%
4 Dokumen Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan renja				dokumen	4	4	100,00%
5 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja				dokumen	1	1	100,00%
6 Dokumen RFK				dokumen	12	12	100,00%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.675.925.617,00	10.228.247.131,00	95,81%				
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.469.320.717,00	10.036.154.031,00	95,86%				
1 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja				bulan	12	12	100,00%
2 Iuran Jaminan Kematian				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
3 Juran Jaminan Kesehatan				bulan	12	12	100,00%
4 Pembayaran Gaji dan Tunjangan				bulan	12	12	100,00%
5 Pembayaran TPP				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	196.980.000,00	182.468.200,00	92,63%				
1 Pembayaran honorarium pengelola keuangan/barang				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.624.900,00	9.624.900,00	100,00%				
1 Laporan aset/BMD semesteran				dokumen	2	2	100,00%
2 Laporan keuangan semesteran				dokumen	2	2	100,00%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.866.123.200,00	2.849.823.019,00	99,43%				
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.866.123.200,00	2.849.823.019,00	99,43%				
1 Bimtek berkaitan dengan Tupoksi Satpol PP				orang	3	3	100,00%
2 Laporan pelaksanaan Roadmap Reformasi birokrasi				dokumen	1	1	100,00%
3 Layanan Administrasi kepegawaian				bulan	12	12	100,00%
4 Pembayaran tenaga Non PNS/PHL				bulan	12	12	100,00%
5 Pembinaan JFT Satpol PP				orang	45	45	100,00%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	194.210.100,00	173.048.850,00	89,10%				
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.302.020,00	10.262.000,00	99,61%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Penyediaan komponen instalasi listrik				unit	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.588.800,00	26.780.000,00	93,67%				
1 Peralatan dan perlengkapan kantor				unit	7	7	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.338.780,00	41.054.250,00	86,72%				
1 Fasilitas Makan Minum Rapat				bulan	12	12	100,00%
2 Penyediaan ATK				paket	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.272.900,00	7.116.600,00	86,02%				
1 Layanan cetak dan penggandaan dokumen				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	9.450.000,00	9.225.000,00	97,62%				
1 Layanan Makan dan Minum Tamu				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.871.000,00	59.417.400,00	87,54%				
1 Layanan Perjalanan Daerah luar daerah				bulan	12	12	100,00%
2 Layanan perjalanan dinas Dalam Daerah				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.061.600,00	7.161.600,00	88,84%				
1 Pengelolaan Arsip PD				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	14.325.000,00	12.032.000,00	83,99%				
1 Pengelolaan informasi dan dokumen perangkat daerah				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2 Pengelolaan website Perangkat Daerah				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	426.728.060,00	320.011.625,00	74,99%				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.920.820,00	22.626.000,00	87,29%				
1 Layanan Surat menyurat				bulan	12	12	100,00%
2 Pengelolaan arsip dan perpustakaan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128.640.000,00	82.368.646,00	64,03%				
1 Pembayaran jasa langganan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.162.000,00	95.774.375,00	63,78%				
1 Peralatan dan Perlengkapan Kantor				unit	169	70	41,42%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	122.005.240,00	119.242.604,00	97,74%				
1 Pelayanan kemandirian dan kebersihan kantor				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	635.417.600,00	543.300.977,00	85,50%				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	594.192.600,00	502.098.977,00	84,50%				
1 Layanan pemeliharaan kendaraan dinas				bulan	12	12	100,00%
2 Layanan penyediaan BBM kendaraan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41.225.000,00	41.202.000,00	99,94%				
1 Pemeliharaan gedung				unit	2	2	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.890.188.329,00	2.606.884.400,00	90,20%				
1 Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan (IKK)							
2 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK)							
Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.391.341.065,00	2.254.876.600,00	94,29%				
Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.135.529.965,00	1.044.116.600,00	91,95%				
1 Pam Hari Besar Nasional dan keagamaan				kali	10	12	120,00%
2 Pam Pejabat VVIP				kali	10	7	70,00%
3 Pam & voorijder Pejabat				kali	30	105	350,00%
4 Patroli Siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat				bulan	12	12	100,00%
5 Penanganan dan antisipasi kerawanan				bulan	12	12	100,00%
6 Penertiban Jalan Jalur Tambang				hari	237	324	136,71%
Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	243.342.500,00	224.020.000,00	92,06%				
1 evakuasi PKL				kali	3	1	33,33%
2 Laporan Penindakan atas Gangguan Trantibum berdasarkan Perda dan Perkada				dokumen	1	1	100,00%
3 Monitoring / penjangkauan Anjal/Gepeng/ODGJ				kali	35	35	100,00%
4 Penanganan antisipasi tawuran pelajar				kali	5	7	140,00%
5 Penertiban PKL				kali	10	8	80,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
6 Spanduk/reklame ilegal/APK				kali	65	59	90,77%
Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	647.665.100,00	627.635.000,00	96,91%				
1 Karya Bhakti Linmas dalam mendukung kegiatan TMMD				kali	3	3	100,00%
2 Laporan Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				dokumen	1	1	100,00%
3 Operasional Korsik Gita Praja Sembada				bulan	12	12	100,00%
4 Operasional Satlinmas Inti Kabupaten				bulan	12	12	100,00%
5 Operasional Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah VII				bulan	12	12	100,00%
6 Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	108.250.000,00	105.380.000,00	97,35%				
1 Laporan Kegiatan Pembinaan Linmas				dokumen	1	1	100,00%
2 Peningkatan Kapasitas Linmas				orang	510	510	100,00%
3 Update data Linmas				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	256.553.500,00	253.725.000,00	98,90%				
1 Bintek Tupoksi Sat Pol. PP				kali	4	4	100,00%
2 Forkom Trantib				kali	3	3	100,00%
3 Kerjasama Aparat				kali	4	4	100,00%
4 Kesamaptaan Pol PP				kali	5	5	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
5 Kesamaptaan Satpam				kali	7	7	100,00%
6 Mediasi				kali	2	0	0,00%
7 Pembinaan Satpam				kali	5	5	100,00%
8 Pengamanan PORDA				kali	10	10	100,00%
9 Rakor Data Trantib				kali	3	3	100,00%
10 Rakor Kapanewon				kali	4	4	100,00%
11 Sambang Kamling				kali	17	17	100,00%
Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	493.747.264,00	347.157.800,00	70,31%				
Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	69.418.602,00	66.443.400,00	95,71%				
1 Laporan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota				dokumen	1	1	100,00%
2 Sosialisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)				kali	3	3	100,00%
3 Sosialisasi Perbup Ramadhan				kali	1	1	100,00%
4 Sosialisasi perda dan perbup				kali	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	37.073.662,00	25.094.900,00	67,69%				
1 Laporan kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota				dokumen	1	1	100,00%
2 Pembinaan dan Pengawasan Cukai Rokok				kali	2	2	100,00%
3 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perbup Ramadhan				kali	2	2	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
4 Pembinaan dan Pengawasan Pemdokan				kali	10	10	100,00%
5 Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Usaha				kali	10	10	100,00%
6 Penanganan Aduan Masyarakat				kali	2	2	100,00%
7 Penanganan Pelanggaran Perda				kali	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	387.255.000,00	255.619.500,00	66,01%				
1 Focus Group Discussion				kali	1	1	100,00%
2 Forkom Penegakan Perda				kali	2	2	100,00%
3 Kegiatan Pulbaket				kali	45	29	64,44%
4 Penutupan Papan Reklame				kali	4	4	100,00%
5 Laporan kegiatan penanganan pelanggar Perda				dokumen	1	1	100,00%
6 Operasi Non Yustisi				kali	27	21	77,78%
7 Operasi Bersama Pmberantasan BKC Illegal				kali	5	5	100,00%
8 Operasi Tempat Hiburan Malam				kali	2	2	100,00%
9 Sidang di Tempat				kali	0	0	0
10 Sidang Tindak Pidana Ringan di Pengadilan				kali	8	7	87,50%
11 Pengumpulan dan penyampaian informasi BKC Illegal				kali	10	10	100,00%
12 Monitoring dan Evaluasi DBHCHT				kali	5	5	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	5.100.000,00	4.850.000,00	95,10%				
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	5.100.000,00	4.850.000,00	95,10%				
1 Laporan kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS				dokumen	1	1	100,00%
2 Seminar PPNS				kali	1	1	100,00%
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	663.577.700,00	513.236.575,00	77,34%				
1 Persentase kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani			91,80%				
Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	580.955.000,00	439.547.550,00	75,66%				
Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	451.152.000,00	332.915.300,00	73,79%				
1 Laporan pelaksanaan pelayanan kebakaran				dokumen	1	1	100,00%
2 Operasional Pemadaman dan Identifikasi Kebakaran				bulan	12	12	100,00%
3 Pemeliharaan alat komunikasi				unit	22	22	100,00%
4 Pemeliharaan alat pemadam kebakaran				unit	6	2	33,33%
5 Pemeliharaan mobil Damkar				unit	8	8	100,00%
6 Pengamanan				bulan	12	12	100,00%
7 Pengisian tabung APAR				unit	110	98	89,09%
8 Belanja Fire Boot				Buah	45	45	100,00%
Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	129.803.000,00	106.632.250,00	82,15%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Laporan pelaksanaan pelayanan kebakaran				dokumen	1	1	100,00%
2 Operasional evaluasi penyelamatan				kali	70	381	544,29%
3 PDH Damkar				set	8	9	112,50%
Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	4.837.500,00	3.929.425,00	81,23%				
Sub Kegiatan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	4.837.500,00	3.929.425,00	81,23%				
1 Pelaksanaan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				objek	15	13	86,67%
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	77.785.200,00	69.759.600,00	89,68%				
Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	77.785.200,00	69.759.600,00	89,68%				
1 Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran pada masyarakat (Pokir)				kali	15	13	86,67%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	468.120.000,00	445.881.000,00	95,25%				
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	468.120.000,00	445.881.000,00	95,25%				
1 Terbentuknya Jagawarga di 1212 Padukuhan di Sleman							
2 Kegiatan Pembinaan Jagawarga	468.120.000,00	445.881.000,00	95,25%	kelompok	32	32	100,00%







**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON GAMPING
2022**

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
KAPANEWON GAMPING	4.834.616.810,00	4.535.341.147,30	93,81%				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	19.250.000,00	19.244.400,00	99,97%				
PROGRAM PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	19.250.000,00	19.244.400,00	99,97%				
1 Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi				even	1	1	100,00%
Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	19.250.000,00	19.244.400,00	99,97%				
Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja	19.250.000,00	19.244.400,00	99,97%				
1 Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur				even	1	1	100,00%
URUSAN SEKRETARIAT DAERAH	28.100.000,00	28.100.000,00	100,00%				
PROGRAM PELYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	28.100.000,00	28.100.000,00	100,00%				
1 Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proposional				%	90,00	90,00	100,00%
Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	28.100.000,00	28.100.000,00	100,00%				
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	28.100.000,00	28.100.000,00	100,00%				
1 Dokumen Usulan Perencanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2024				dokumen	1	1	100,00%
UNSUR KEWILAYAHAN - KECAMATAN	5.135.395.735,00	4.827.974.561,00	94,01%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.170.006.935,00	3.887.861.557,80	93,23%				
1 Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				%	100,00	100,00	100,00%
2 Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	28.259.050,00	28.120.750,00	99,51%				
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.380.675,00	13.380.675,00	100,00%				
1 Dokumen Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen Perubahan Renja				dokumen	1	1	100,00%
4 Dokumen Renja				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.442.600,00	2.442.450,00	99,99%				
1 Dokumen RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.788.900,00	2.788.900,00	100,00%				
1 Dokumen Perubahan RKA-SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.395.800,00	2.395.650,00	99,99%				
1 Dokumen DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.247.500,00	2.209.250,00	98,30%				
1 Dokumen Perubahan DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.922.100,00	4.909.350,00	99,74%				
1 Dokumen Laporan Tahunan				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen LKJIP				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen pengendalian dan evauasi terhadap hasil				dokumen	4	4	100,00%
4 Dokumen pengendalian dan evauasi terhadap Kebijakan Renja				dokumen	1	1	100,00%
5 Kebijakan Renja Dokumen pengendalian dan evauasi terhadap pelaksanaan Renja PD				dokumen	4	4	100,00%
6 Dokumen RFK				dokumen	12	12	100,00%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.158.847.717,00	2.904.677.394,30	91,95%				
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.049.850.797,00	2.796.231.281,00	91,68%				
1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai				bulan	12	12	100,00%
2 Pembayaran luran BPJS				bulan	12	12	100,00%
3 Pembayaran TPP				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	76.715.000,00	69.720.000,00	90,88%				
1 Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	32.281.920,00	32.203.613,00	99,76%				
1 Laporan Aset/BMD Semesteran				dokumen	2	2	100,00%
2 Laporan Keuangan Semesteran				dokumen	2	2	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	47.709.225,00	47.190.463,00	98,91%				
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	47.709.225,00	47.190.463,00	98,91%				
1 Laporan pelaksanaan roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2021				dokumen	1	1	100,00%
2 Layanan administrasi kepegawaian				bulan	12	12	100,00%
3 Pembayaran tenaga Non PNS/ PHL				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	293.010.863,00	290.437.720,00	99,12%				
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.597.942,00	4.507.100,00	80,51%				
1 Alat listrik dan elektronik				paket	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	185.240.450,00	184.566.085,00	99,64%				
1 Peralatan dan perlengkapan kantor				unit	5	5	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.386.471,00	51.701.950,00	98,69%				
1 Alat tulis kantor				paket	1	1	100,00%
2 Layanan penyediaan makanan dan minuman rapat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.157.360,00	5.157.360,00	100,00%				
1 Layanan Cetak dan Penggandaan Dokumen				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	18.925.000,00	18.871.900,00	99,72%				
1 Makanan dan minuman tamu				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	22.223.715,00	4.773.890,00	21,48%				
1 Pengelolaan arsip dan perpustakaan perangkat daerah				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.479.925,00	3.445.925,00	99,02%				
1 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah				bulan	12	12	100,00%
2 Pengelolaan website Perangkat Daerah				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.948.000,00	156.069.000,00	96,97%				
Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	131.633.000,00	127.659.000,00	96,98%				
1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				paket	1	1	100,00%
2 Penyediaan BBM				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	231.308.155,00	219.805.316,50	95,03%				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4.500.000,00	#DIV/0!				
1 Layanan surat menyurat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.090.000,00	22.877.029,00	58,52%				
1 Pembayaran Jasa Langganan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	175.429.510,00	169.734.264,00	96,75%				
1 Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249.923.925,00	241.560.914,00	96,65%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	103.607.950,00	102.804.539,00	99,22%				
1 Layanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas				bulan	12	12	100,00%
2 Layanan Penyediaan BBM Kendaraan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan mebel	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%				
1 Layanan Pemeliharaan meubelair				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	25.550.000,00	19.750.000,00	77,30%				
1 Layanan Pemeliharaan peralatan kerja				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	118.765.975,00	117.006.375,00	98,52%				
1 Pemeliharaan Gedung Kantor				unit	1	1	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	285.988.950,00	282.836.126,60	98,90%				
1 Presentase usulan Kegiatan atau output Kegiatan yang tercantum dalam beritaacara Musrenbang Kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita Acara hasil Musrenbang Kapanewon				%	30,00	30,00	100,00%
2 Persentase pelayanan perijinan selesai tepat waktu				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	32.624.800,00	31.802.300,00	97,48%				
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	32.624.800,00	34.661.750,00	106,24%				
1 Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan				dokumen	7	7	100,00%
2 Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan kapanewon				dokumen	1	1	100,00%
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	157.092.825,00	155.137.651,60	98,76%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Terlaksananya pelayanan perizinan dan administrasi umum				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	96.271.325,00	95.896.175,00	0,00%				
1 Layanan perizinan IMB				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	157.092.825,00	155.137.652,00	98,76%				
1 Pelayanan administrasi kependudukan				bulan	12	12	100,00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN	155.852.300,00	155.322.900,00	99,66%				
1 Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi				%	30	30	100,00%
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	155.852.300,00	155.322.900,00	99,66%				
1 Terlaksananya pelayanan bidang kesehatan, keagamaan, perempuan dan anak; budaya dan pendidikan							
Sub Kegiatan Sinkronasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	155.852.300,00	155.322.900,00	99,66%				
1 Forum Koordinasi Bidang budaya				kali	5	5	100,00%
2 Forum Koordinasi Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak				kali	9	9	100,00%
3 Forum Koordinasi Bidang Pendidikan				kali	2	2	100,00%
4 Forum Koordinasi Bidang Sosial				kali	11	11	100,00%
5 Forum Koordinasi Kesehatan				kali	1	1	100,00%
6 Forum Korodinası Bidang Keagamaan				kali	2	2	100,00%
7 Forum Korodinası Bidang Pemuda dan Olahraga				kali	4	5	125,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
8 Lomba MTQ tingkat Kecamatan				kali	1	1	100,00%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	312.787.500,00	292.735.376,60	93,59%				
1 Cakupan Gangguan Ketentraman dan ketertiban yang di tangani di wilayah Kapanewon				%	100	100	100,00%
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	210.382.500,00	191.535.876,60	91,04%				
1 Terlaksananya koordinasi bulanan forkompim, lap. Pelaksanaan Kegiatan tokoh masyarakat FKUB; Lap. Pelaksanaan patroli terpadu keamanan dan ketertiban masyarakat; pembinaan linmas kapanewon, penyelenggaraan upacara tahun 2022				dokumen		0	#DIV/0!
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	210.382.500,00	191.535.876,60	91,04%				
1 Forkompim kapanewon				bulan	12	12	100,00%
2 Pembinaan linmas				kali	6	6	100,00%
3 Pemantauan ketentraman dan ketertiban masyarakat				bulan	12	12	100,00%
4 Rakor keamanan dan ketertiban				kali	12	12	100,00%
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4.800.000,00	4.777.000,00	99,52%				
Laporan operasi penegakan Perda				dokumen	1	1	100,00%
Sub keg Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia	4.800.000,00	4.777.000,00	99,52%				
1 Operasi penegakan peraturan daerah				kali	10	10	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	97.605.000,00	96.422.500,00	98,79%				
1 Persentase penanganan permasalahan yang terkait ISU SARA				%	100	100	100,00%
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	97.605.000,00	96.422.500,00	98,79%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Laporan Kegiatan pertemuan tokoh masyarakat dan penyelenggaraan upacara				dokumen		0	#DIV/0!
Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	97.605.000,00	96.422.500,00	98,79%				
1 Forum Kerukunan Umat Beragama				kali	3	3	100,00%
2 Kegiatan Pertemuan Tokoh Kemasyarakatan				kali	2	2	100,00%
3 Penyelenggaraan upacara				kali	8	8	100,00%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	113.155.050,00	112.796.100,00	99,68%				
1 Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu				%	50	50	100,00%
2 Persentase Kalurahan Yang Melaksanakan Siklus Tahunan Tepat Waktu				%	50	100	200,00%
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	113.155.050,00	112.796.100,00	99,68%				
1 Laporan pelaksanaan Kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa							
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10.921.200,00	10.921.200,00	100,00%				
1 Pendampingan penyusunan Peraturan Kalurahan dan Peraturan Lurah				kalurahan	4	4	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.064.400,00	4.014.400,00	98,77%				
1 Data Monografi Kecamatan				dokumen	8	8	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.280.150,00	7.230.550,00	99,32%				
1 Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi keuangan kalurahan				kalurahan	4	4	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2 Pembinaan, pendampingan, penyusunan dan evaluasi APBKal dan Perubahan APBKal				kalurahan	4	4	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.907.500,00	21.738.400,00	99,23%				
1 Pembinaan dan pengawasan lurah dan pamong kalurahan				kalurahan	4	4	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	30.100.000,00	30.030.000,00	99,77%				
1 Pembinaan administrasi pemerintahan desa				kalurahan	4	4	100,00%
2 Pembinaan BPKal				kalurahan	4	4	100,00%
3 Pembinaan LKKal				kalurahan	4	4	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	28.044.950,00	28.024.600,00	99,93%				
1 Pemantauan korban bencana				kali	10	10	100,00%
2 Sosialisasi anti bencana				kali	1	1	100,00%
3 Sosialisasi dan penanggulangan bahaya kebakaran				kali	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	10.836.950,00	10.836.950,00	100,00%				
1 Koordinasi / Monev pengendalian perubahan pemanfaatan tanah				kalurahan	4	4	100,00%
2 Monitoring				kali	4	4	100,00%



**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON GODEAN
2022**

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
KAPANEWON GODEAN	4.789.680.698,00	4.612.200.643,00	96,29%				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	23.750.000,00	23.750.000,00	100,00%				
PROGRAM PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	23.750.000,00	23.750.000,00	100,00%				
1 Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi				even	1	1	100,00%
Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	23.750.000,00	23.750.000,00	100,00%				
Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja	23.750.000,00	23.750.000,00	100,00%				
1 Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur				even	1	1	100,00%
URUSAN SEKRETARIAT DAERAH	28.600.000,00	28.600.000,00	100,00%				
PROGRAM PELYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	28.600.000,00	28.600.000,00	100,00%				
1 Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proposional				%	90,00	90,00	100,00%
Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	28.600.000,00	28.600.000,00	100,00%				
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	28.600.000,00	28.600.000,00	100,00%				
1 Dokumen Usulan Perencanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2024				dokumen	1	1	100,00%
UNSUR KEWILAYAHAN - KECAMATAN	4.737.330.698,00	4.559.850.643,00	96,25%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.941.787.948,00	3.792.184.561,20	96,20%				
1 Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				%	100,00	100,00	100,00%
2 Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	53.472.750,00	52.376.457,00	97,95%				
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.624.000,00	40.108.957,00	98,73%				
1 Dokumen Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen Perubahan Renja				dokumen	1	1	100,00%
4 Dokumen Renja				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.134.400,00	2.113.250,00	99,01%				
1 Dokumen RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	573.750,00	571.500,00	99,61%				
1 Dokumen Perubahan RKA-SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.280.850,00	1.276.750,00	99,68%				
1 Dokumen DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	870.750,00	839.750,00	96,44%				
1 Dokumen Perubahan DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.989.000,00	7.466.250,00	93,46%				
1 Dokumen Laporan Tahunan				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen LKJIP				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil				dokumen	4	4	100,00%
4 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap Kebijakan Renja				dokumen	1	1	100,00%
5 Kebijakan Renja Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD				dokumen	4	4	100,00%
6 Dokumen RFK				dokumen	12	12	100,00%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.125.256.234,00	3.016.024.456,00	96,50%				
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.041.629.734,00	2.935.539.956,00	96,51%				
1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai				bulan	12	12	100,00%
2 Pembayaran iuran BPJS				bulan	12	12	100,00%
3 Pembayaran TPP				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	79.440.000,00	76.379.000,00	96,15%				
1 Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.186.500,00	4.105.500,00	98,07%				
1 Laporan Aset/BMD Semesteran				dokumen	2	2	100,00%
2 Laporan Keuangan Semesteran				dokumen	2	2	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46.548.200,00	43.767.435,20	94,03%				
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	46.548.200,00	43.767.435,20	94,03%				
1 Laporan pelaksanaan roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2021				dokumen	1	1	100,00%
2 Layanan administrasi kepegawaian				bulan	12	12	100,00%
3 Pembayaran tenaga Non PNS/ PHL				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	282.482.178,00	274.741.771,00	97,26%				
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.730.000,00	3.718.750,00	99,70%				
1 Penyediaan alat listrik				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	183.911.578,00	177.314.741,00	96,41%				
1 Penyediaan peralatan rumah tangga				bulan	12	12	100,00%
2 Alat dapur				buah	5	5	100,00%
3 Alat pendingin (AC				buah	2	2	100,00%
4 Layar (screen) untuk LCD				buah	2	2	100,00%
5 Meubelair				buah	26	26	100,00%
6 Mixer sound system				buah	1	1	100,00%
7 Printer				buah	1	1	100,00%
8 Scanner				buah	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
9 Televisi				buah	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.736.000,00	61.327.650,00	99,34%				
1 Alat tulis kantor				paket	1	1	100,00%
2 Layanan penyediaan makanan dan minuman rapat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.953.300,00	11.521.900,00	96,39%				
1 Layanan Cetak dan Penggandaan Dokumen				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	15.550.000,00	15.334.620,00	98,61%				
1 Makanan dan minuman tamu				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.195.300,00	4.165.180,00	99,28%				
1 Pengelolaan arsip dan perpustakaan perangkat daerah				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.406.000,00	1.358.930,00	96,65%				
1 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	236.354.786,00	227.223.692,00	96,14%				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.308.950,00	8.277.676,00	99,62%				
1 Layanan surat menyurat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.900.000,00	41.051.427,00	83,95%				
1 Pembayaran Jasa Langganan				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	179.145.836,00	177.894.589,00	99,30%				
1 Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	197.673.800,00	178.050.750,00	90,07%				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	137.423.800,00	120.321.165,00	87,55%				
1 Layanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas				bulan	12	12	100,00%
2 Layanan Penyediaan BBM Kendaraan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan mebel	3.000.000,00	2.999.000,00	99,97%				
1 Layanan Pemeliharaan meubelair				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	29.250.000,00	26.879.180,00	91,89%				
1 Layanan Pemeliharaan peralatan kerja				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.000.000,00	27.851.405,00	99,47%				
1 Pemeliharaan Gedung Kantor				tahun	1	1,00	100,00%
2 Pemeliharaan taman				tahun	1	1,00	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	161.546.300,00	156.290.573,00	96,75%				
1 Presentase usulan Kegiatan atau output Kegiatan yang tercantum dalam beritaacara Musrenbang Kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita Acara hasil Musrenbang Kapanewon				%	30,00	57,02	190,08%
2 Persentase pelayanan perijinan selesai tepat waktu				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.785.000,00	20.785.000,00	100,00%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	20.785.000,00	20.785.000,00	100,00%				
1 Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan				dokumen	7	7	100,00%
2 Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan kapanewon				dokumen	1	1	100,00%
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	140.761.300,00	135.505.573,00	96,27%				
1 Terlaksananya pelayanan perizinan dan administrasi umum				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	-						
1 Layanan perizinan IMB				bulan	0	0	0,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	140.761.300,00	135.505.573,00	96,27%				
1 Pelayanan administrasi kependudukan				bulan	12	12	100,00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN	225.435.600,00	218.683.401,00	97,00%				
1 Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi				%	30	30	100,00%
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	225.435.600,00	218.683.401,00	97,00%				
1 Terlaksananya pelayanan bidang kesehatan, keagamaan, perempuan dan anak; budaya dan pendidikan							
Sub Kegiatan Sinkronasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	158.330.600,00	155.512.650,00	98,22%				
1 Forum Koordinasi Bidang budaya				kali	8	8	100,00%
2 Forum Koordinasi Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak				kali	15	15	100,00%
3 Forum Koordinasi Bidang Pendidikan				kali	2	2	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
4 Forum Koordinasi Bidang Sosial				kali	11	11	100,00%
5 Forum Koordinasi Kesehatan				kali	4	4	100,00%
6 Forum Korodinas Bidang Keagamaan				kali	11	13	118,18%
7 Forum Korodinas Bidang Pemuda dan Olahraga				kali	4	5	125,00%
8 Lomba MTQ tingkat Kecamatan				kali	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	67.105.000,00	63.170.751,00	94,14%				
1 Pelayanan bidang ekonomi				kali	8	8	100,00%
2 Pelayanan bidang fisik				kali	12	12	100,00%
3 Gebyar UMKM				kali	1	1	100,00%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	230.839.350,00	218.471.007,80	94,64%				
1 Cakupan Gangguan Ketentraman dan ketertiban yang di tangani di wilayah Kapanewon				%	100	100	100,00%
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	223.234.350,00	211.058.007,80	94,55%				
1 Terlaksananya koordinasi bulanan forkompim, lap. Pelaksanaan Kegiatan tokoh masyarakat FKUB; Lap. Pelaksanaan patroli terpadu keamanan dan ketertiban masyarakat; pembinaan linmas kapanewon, penyelenggaraan upacara tahun 2022				dokumen		0	#DIV/0!
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	223.234.350,00	211.058.007,80	94,55%				
1 Forkompim kapanewon				bulan	12	12	100,00%
2 Laporan pembinaan linmas				dokumen	1	1	100,00%
3 Pemantauan ketentraman dan ketertiban masyarakat				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	7.605.000,00	7.413.000,00	97,48%				
Laporan operasi penegakan Perda				dokumen		0	#DIV/0!
Sub keg Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia	7.605.000,00	7.413.000,00	97,48%				
1 Operasi penegakan peraturan daerah				bulan	12	12	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	87.832.000,00	86.245.000,00	98,19%				
1 Persentase penanganan permasalahan yang terkait ISU SARA				%	100	100	100,00%
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	87.832.000,00	86.245.000,00	98,19%				
1 Laporan Kegiatan pertemuan tokoh masyarakat dan penyelenggaraan upacara				dokumen		0	#DIV/0!
Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	87.832.000,00	86.245.000,00	98,19%				
1 Laporan Forum Kerukunan Umat Beragama				dokumen	1	1	100,00%
2 Laporan Kegiatan Pertemuan Tokoh Kemasyarakatan				dokumen	1	1	100,00%
3 Penyelenggaraan upacara				bulan	8	8	100,00%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	89.889.500,00	87.976.100,00	97,87%				
1 Persentase Desa Menetapkan Peraturan DesaTepat Waktu				%	100	100	100,00%
2 Persentase Kalurahan Yang Melaksanakan Siklus Tahunan Tepat Waktu				%	50	100	200,00%
Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	89.889.500,00	87.976.100,00	97,87%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Laporan pelaksanaan Kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa							
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	9.164.500,00	8.812.500,00	96,16%				
1 Laporan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Kepala Desa Tentang APBDes dan Perubahan APBDes				dokumen	2	2	100,00%
2 Pembinaan penyusunan APBDes dan Perubahan APBDes				kali	2	2	100,00%
3 Pendampingan penyusunan APBDes				desa	7	7	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.238.500,00	2.929.250,00	90,45%				
1 Data Monografi Kecamatan				dokumen	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.817.500,00	3.724.850,00	97,57%				
1 Laporan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa				dokumen	1	1	100,00%
2 Pembinaan dan pendampingan pengelolaan keuangan desa				kali	1	1	100,00%
3 Pembinaan pengelolaan DD dan ADD				kali	1	1	100,00%
4 Pembinaan pengelolaan aset desa				desa	7	7	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.000.500,00	2.000.250,00	99,99%				
1 Laporan pelaksanaan Kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa				dokumen	1	1	100,00%
2 Pembinaan dan pengawasan kepala dan perangkat desa				kali	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	44.170.000,00	43.612.750,00	98,74%				
1 Laporan hasil evaluasi kinerja perangkat desa				dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2 Monitoring siklus tahunan desa				desa	7	7	100,00%
3 Pembinaan administrasi pemerintahan desa				kali	7	7	100,00%
4 Pembinaan BPKal				kali	2	2	100,00%
5 Pembinaan LKKal				kali	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	25.220.000,00	24.689.250,00	97,90%				
1 Forum koordinasi komunitas peduli bencana				kali	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2.278.500,00	2.207.250,00	96,87%				
1 Laporan hasil monitoring dan evaluasi tata guna tanah				dokumen	1	1	100,00%
2 Pendampingan pengelolaan tanah				desa	7	7	100,00%





**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON MOYUDAN
2022**

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
KAPANEWON MOYUDAN	4.703.989.969,00	4.432.045.126,00	94,22%				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	19.250.000,00	19.244.400,00	99,97%				
PROGRAM PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	19.250.000,00	19.244.400,00	99,97%				
1 Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi				even	1	1	100,00%
Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	19.250.000,00	19.244.400,00	99,97%				
Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja	19.250.000,00	19.244.400,00	99,97%				
1 Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur				even	1	1	100,00%
URUSAN SEKRETARIAT DAERAH	28.100.000,00	28.100.000,00	100,00%				
PROGRAM PELYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	28.100.000,00	28.100.000,00	100,00%				
1 Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proposional				%	90,00	90,00	100,00%
Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	28.100.000,00	28.100.000,00	100,00%				
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	28.100.000,00	28.100.000,00	100,00%				
1 Dokumen Usulan Perencanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2024				dokumen	1	1	100,00%
UNSUR KEWILAYAHAN - KECAMATAN	4.656.639.969,00	4.384.700.726,00	94,16%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.839.788.419,00	3.588.251.244,00	93,45%				
1 Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				%	100,00	100,00	100,00%
2 Presentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	61.348.900,00	60.095.866,00	97,96%				
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.563.725,00	40.311.741,00	96,99%				
1 Dokumen Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen Perubahan Renja				dokumen	1	1	100,00%
4 Dokumen Renja				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.442.600,00	2.442.450,00	99,99%				
1 Dokumen RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.448.000,00	2.447.550,00	99,98%				
1 Dokumen Perubahan RKA-SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.395.800,00	2.395.650,00	99,99%				
1 Dokumen DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.862.775,00	1.862.625,00	99,99%				
1 Dokumen Perubahan DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.636.000,00	10.635.850,00	100,00%				
1 Dokumen Laporan Tahunan				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen LKJIP				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil				dokumen	4	4	100,00%
4 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap Kebijakan Renja				dokumen	1	1	100,00%
5 Kebijakan Renja Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD				dokumen	4	4	100,00%
6 Dokumen RFK				dokumen	12	12	100,00%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.081.846.711,00	2.863.963.300,00	92,93%				
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.996.842.311,00	2.778.960.550,00	92,73%				
1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai				bulan	12	12	100,00%
2 Pembayaran iuran BPJS				bulan	12	12	100,00%
3 Pembayaran TPP				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	76.125.000,00	76.125.000,00	100,00%				
1 Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8.879.400,00	8.877.750,00	99,98%				
1 Laporan Aset/BMD Semesteran				dokumen	2	2	100,00%
2 Laporan Keuangan Semesteran				dokumen	2	2	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	38.232.775,00	38.078.341,00	99,60%				
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	38.232.775,00	38.078.341,00	99,60%				
1 Laporan pelaksanaan roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2021				dokumen	1	1	100,00%
2 Layanan administrasi kepegawaian				bulan	12	12	100,00%
3 Pembayaran tenaga Non PNS/ PHL				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	149.416.598,00	147.610.445,00	98,79%				
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.033.294,00	2.981.675,00	98,30%				
1 Alat listrik dan elektronik				paket	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.005.500,00	49.904.500,00	99,80%				
1 Peralatan dan perlengkapan kantor				unit	5	5	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.719.864,00	63.398.200,00	97,96%				
1 Alat tulis kantor				paket	1	1	100,00%
2 Layanan penyediaan makanan dan minuman rapat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.497.550,00	6.497.550,00	100,00%				
1 Layanan Cetak dan Penggandaan Dokumen				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	14.875.000,00	14.547.650,00	97,80%				
1 Makanan dan minuman tamu				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3.890.000,00	3.890.000,00	100,00%				
1 Layanan perjalanan dinas dalam kota				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.775.390,00	4.773.890,00	99,97%				
1 Pengelolaan arsip dan perpustakaan perangkat daerah				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.620.000,00	1.616.980,00	99,81%				
1 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah				bulan	12	12	100,00%
2 Pengelolaan website Perangkat Daerah				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.000.000,00	39.831.085,00	99,58%				
Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	40.000.000,00	39.831.085,00	99,58%				
1 Pengadaan APE untuk Taman Layak Anak khusus Kapanewon				paket	1	1	100,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	219.019.510,00	197.111.293,00	90,00%				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00%				
1 Layanan surat menyurat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.090.000,00	22.877.029,00	58,52%				
1 Pembayaran Jasa Langganan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	175.429.510,00	169.734.264,00	96,75%				
1 Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	249.923.925,00	241.560.914,00	96,65%				
<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan</i>	103.607.950,00	102.804.539,00	99,22%				
1 Layanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas				bulan	12	12	100,00%
2 Layanan Penyediaan BBM Kendaraan				bulan	12	12	100,00%
<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan mebel</i>	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%				
1 Layanan Pemeliharaan meubelair				bulan	12	12	100,00%
<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya</i>	25.550.000,00	19.750.000,00	77,30%				
1 Layanan Pemeliharaan peralatan kerja				bulan	12	12	100,00%
<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	118.765.975,00	117.006.375,00	98,52%				
1 Pemeliharaan Gedung Kantor				unit	1	1	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	50.892.400,00	50.880.750,00	99,98%				
1 Presentase usulan Kegiatan atau output Kegiatan yang tercantum dalam beritaacara Musrenbang Kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita Acara hasil Musrenbang Kapanewon				%	30,00	30,00	100,00%
2 Persentase pelayanan perijinan selesai tepat waktu				%	100,00	100,00	100,00%
<i>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	34.668.000,00	34.661.750,00	99,98%				
<i>Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait</i>	34.668.000,00	34.661.750,00	99,98%				
1 Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan				dokumen	7	7	100,00%
2 Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan kapanewon				dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	16.224.400,00	16.219.000,00	99,97%				
1 Terlaksananya pelayanan perizinan dan administrasi umum				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	-	-	0,00%				
1 Layanan perizinan IMB				bulan	0	0	0,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	16.224.400,00	16.219.000,00	99,97%				
1 Pelayanan administrasi kependudukan				bulan	12	12	100,00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN	316.137.050,00	310.045.816,00	98,07%				
1 Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi				%	30	30	100,00%
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	316.137.050,00	310.045.816,00	98,07%				
1 Terlaksananya pelayanan bidang kesehatan, keagamaan, perempuan dan anak; budaya dan pendidikan							
Sub Kegiatan Sinkronasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	171.577.050,00	165.656.676,00	96,55%				
1 Forum Koordinasi Bidang budaya				kali	5	5	100,00%
2 Forum Koordinasi Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak				kali	9	9	100,00%
3 Forum Koordinasi Bidang Pendidikan				kali	2	2	100,00%
4 Forum Koordinasi Bidang Sosial				kali	11	11	100,00%
5 Forum Koordinasi Kesehatan				kali	1	1	100,00%
6 Forum Korodinasi Bidang Keagamaan				kali	2	2	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
7 Forum Korodinasi Bidang Pemuda dan Olahraga				kali	4	5	125,00%
8 Lomba MTQ tingkat Kecamatan				kali	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	144.560.000,00	144.389.140,00	99,88%				
1 Pelayanan bidang ekonomi				kali	12	12	100,00%
2 Pelayanan bidang fisik				kali	12	12	100,00%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	224.701.600,00	210.662.350,00	93,75%				
1 Cakupan Gangguan Ketentraman dan ketertiban yang di tangani di wilayah Kapanewon				%	100	100	100,00%
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	217.201.600,00	203.162.350,00	93,54%				
1 Terlaksananya koordinasi bulanan forkompim, lap. Pelaksanaan Kegiatan tokoh masyarakat FKUB; Lap. Pelaksanaan patroli terpadu keamanan dan ketertiban masyarakat; pembinaan linmas kapanewon, penyelenggaraan upacara tahun 2022				dokumen		0	#DIV/0!
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	217.201.600,00	203.162.350,00	93,54%				
1 Forkompim kapanewon				bulan	12	12	100,00%
2 Pembinaan linmas				kali	6	6	100,00%
3 Pemantauan ketentraman dan ketertiban masyarakat				bulan	12	12	100,00%
4 Rakor keamanan dan ketertiban				kali	12	12	100,00%
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00%				
Laporan operasi penegakan Perda				dokumen	1	1	100,00%
Sub keg Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Operasi penegakan peraturan daerah				kali	10	10	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	126.429.900,00	126.375.300,00	99,96%				
1 Persentase penanganan permasalahan yang terkait ISU SARA				%	100	100	100,00%
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	126.429.900,00	126.375.300,00	99,96%				
1 Laporan Kegiatan pertemuan tokoh masyarakat dan penyelenggaraan upacara				dokumen		0	#DIV/0!
<i>Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	<i>126.429.900,00</i>	<i>126.375.300,00</i>	<i>99,96%</i>				
1 Forum Kerukunan Umat Beragama				kali	3	3	100,00%
2 Kegiatan Pertemuan Tokoh Kemasyarakatan				kali	2	2	100,00%
3 Penyelenggaraan upacara				kali	8	8	100,00%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	98.690.600,00	98.485.266,00	99,79%				
1 Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu				%	50	50	100,00%
2 Persentase Kalurahan Yang Melaksanakan Siklus Tahunan Tepat Waktu				%	50	100	200,00%
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	98.690.600,00	98.485.266,00	99,79%				
1 Laporan pelaksanaan Kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa							
<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	<i>3.375.000,00</i>	<i>3.371.600,00</i>	<i>99,90%</i>				
1 Pendampingan penyusunan Peraturan Kalurahan dan Peraturan Lurah				kalurahan	4	4	100,00%



URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.752.825,00	1.752.025,00	99,95%				
1 Data Monografi Kecamatan				dokumen	8	8	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.762.300,00	5.761.100,00	99,98%				
1 Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi keuangan kalurahan				kalurahan	4	4	100,00%
2 Pembinaan, pendampingan, penyusunan dan evaluasi APBKal dan Perubahan APBKal				kalurahan	4	4	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.874.800,00	14.874.450,00	100,00%				
1 Pembinaan dan pengawasan lurah dan pamong kalurahan				kalurahan	4	4	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	48.751.250,00	48.590.666,00	99,67%				
1 Pembinaan administrasi pemerintahan desa				kalurahan	4	4	100,00%
2 Pembinaan BPKal				kalurahan	4	4	100,00%
3 Pembinaan LKKal				kalurahan	4	4	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.019.600,00	10.019.600,00	100,00%				
1 Pemantauan korban bencana				kali	10	10	100,00%
2 Sosialisasi anti bencana				kali	1	1	100,00%
3 Sosialisasi dan penanggulangan bahaya kebakaran				kali	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	14.154.825,00	14.115.825,00	99,72%				
1 Koordinasi / Monev pengendalian perubahan pemanfaatan tanah				kalurahan	4	4	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2 Monitoring				kali	4	4	100,00%





**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON MINGGIR
2022**

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
KAPANEWON MINGGIR	4.624.097.634,00	4.267.980.080,50	92,30%				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	20.500.000,00	20.500.000,00	100,00%				
PROGRAM PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	20.500.000,00	20.500.000,00	100,00%				
1 Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi				even	1	1	100,00%
Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	20.500.000,00	20.500.000,00	100,00%				
Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja	20.500.000,00	20.500.000,00	100,00%				
1 Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur				even	1	1	100,00%
URUSAN SEKRETARIAT DAERAH	28.500.000,00	27.100.000,00	95,09%				
PROGRAM PELYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	28.500.000,00	27.100.000,00	95,09%				
1 Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proposional				%	90,00	90,00	100,00%
Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	28.500.000,00	27.100.000,00	95,09%				
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	28.500.000,00	27.100.000,00	95,09%				
1 Dokumen Usulan Perencanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2024				dokumen	1	1	100,00%
UNSUR KEWILAYAHAN - KECAMATAN	4.575.097.634,00	4.220.380.080,50	92,25%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.942.771.257,00	3.605.218.506,95	91,44%				
1 Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				%	100,00	100,00	100,00%
2 Presentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	58.914.293,00	58.825.016,00	99,85%				
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.364.643,00	42.289.256,00	99,82%				
1 Dokumen Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen Perubahan Renja				dokumen	1	1	100,00%
4 Dokumen Renja				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.485.000,00	1.485.000,00	100,00%				
1 Dokumen RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.485.000,00	1.485.000,00	100,00%				
1 Dokumen Perubahan RKA-SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.485.000,00	1.480.050,00	99,67%				
1 Dokumen DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.237.500,00	1.237.500,00	100,00%				
1 Dokumen Perubahan DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.857.150,00	10.848.210,00	99,92%				
1 Dokumen Laporan Tahunan				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen LKJIP				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil				dokumen	4	4	100,00%
4 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap Kebijakan Renja				dokumen	1	1	100,00%
5 Kebijakan Renja Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD				dokumen	4	4	100,00%
6 Dokumen RFK				dokumen	12	12	100,00%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.234.925.406,00	2.924.833.223,00	90,41%				
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.142.034.615,00	2.832.907.173,00	90,16%				
1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai				bulan	12	12	100,00%
2 Pembayaran iuran BPJS				bulan	12	12	100,00%
3 Pembayaran TPP				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	76.540.000,00	75.581.300,00	98,75%				
1 Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16.350.791,00	16.344.750,00	99,96%				
1 Laporan Aset/BMD Semesteran				dokumen	2	2	100,00%
2 Laporan Keuangan Semesteran				dokumen	2	2	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	66.766.578,00	47.359.453,00	70,93%				
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	66.766.578,00	47.359.453,00	70,93%				
1 Laporan pelaksanaan roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2021				dokumen	1	1	100,00%
2 Layanan administrasi kepegawaian				bulan	12	12	100,00%
3 Pembayaran tenaga Non PNS/ PHL				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	137.557.757,00	137.276.085,00	99,80%				
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.501.298,00	5.495.300,00	99,89%				
1 Alat listrik dan elektronik				paket	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.376.234,00	57.367.025,00	99,98%				
1 Peralatan dan perlengkapan kantor				unit	5	5	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.236.327,00	43.012.335,00	99,48%				
1 Alat tulis kantor				paket	1	1	100,00%
2 Layanan penyediaan makanan dan minuman rapat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.523.898,00	5.493.125,00	99,44%				
1 Layanan Cetak dan Penggandaan Dokumen				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	14.920.000,00	14.908.300,00	99,92%				
1 Makanan dan minuman tamu				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00%				
1 Layanan perjalanan dinas dalam daerah				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246.117.418,00	242.360.429,95	98,47%				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.494.700,00	13.415.650,00	99,41%				
1 Layanan surat menyurat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.280.000,00	38.124.365,00	99,59%				
1 Pembayaran Jasa Langganan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	194.342.718,00	190.820.415,00	98,19%				
1 Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198.489.805,00	194.564.300,00	98,02%				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	136.194.805,00	132.278.300,00	97,12%				
1 Layanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas				bulan	12	12	100,00%
2 Layanan Penyediaan BBM Kendaraan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan mebel	17.400.000,00	17.400.000,00	100,00%				
1 Layanan Pemeliharaan meubelair				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	19.740.000,00	19.740.000,00	100,00%				
1 Layanan Pemeliharaan peralatan kerja				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.155.000,00	25.146.000,00	99,96%				
1 Pemeliharaan Gedung Kantor				unit	1	1	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	141.253.785,00	137.036.938,00	97,01%				
1 Presentase usulan Kegiatan atau output Kegiatan yang tercantum dalam beritaacara Musrenbang Kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita Acara hasil Musrenbang Kapanewon				%	30,00	30,00	100,00%
2 Persentase pelayanan perijinan selesai tepat waktu				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	74.755.900,00	71.118.588,00	95,13%				
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	74.755.900,00	71.118.588,00	95,13%				
1 Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan				dokumen	7	7	100,00%
2 Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan kapanewon				dokumen	1	1	100,00%
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	66.497.885,00	65.918.350,00	99,13%				
1 Terlaksananya pelayanan perizinan dan administrasi umum				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	-	-	0,00%				
1 Layanan perizinan IMB				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	66.497.885,00	65.918.350,00	99,13%				
1 Pelayanan administrasi kependudukan				bulan	12	12	100,00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN	169.092.413,00	167.551.123,00	99,09%				
1 Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi				%	30	30	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	169.092.413,00	167.551.123,00	99,09%				
1 Terlaksananya pelayanan bidang kesehatan, keagamaan, perempuan dan anak; budaya dan pendidikan							
Sub Kegiatan Sinkronasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	169.092.413,00	167.551.123,00	99,09%				
1 Forum Koordinasi Bidang budaya				kali	5	5	100,00%
2 Forum Koordinasi Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak				kali	9	9	100,00%
3 Forum Koordinasi Bidang Pendidikan				kali	2	2	100,00%
4 Forum Koordinasi Bidang Sosial				kali	11	11	100,00%
5 Forum Koordinasi Kesehatan				kali	1	1	100,00%
6 Forum Korodinasi Bidang Keagamaan				kali	2	2	100,00%
7 Forum Korodinasi Bidang Pemuda dan Olahraga				kali	4	5	125,00%
8 Lomba MTQ tingkat Kecamatan				kali	1	1	100,00%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	164.165.448,00	153.270.900,00	93,36%				
1 Cakupan Gangguan Ketentraman dan ketertiban yang di tangani di wilayah Kapanewon				%	100	100	100,00%
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	153.924.298,00	143.098.900,00	92,97%				
1 Terlaksananya koordinasi bulanan forkompim, lap. Pelaksanaan Kegiatan tokoh masyarakat FKUB; Lap. Pelaksanaan patroli terpadu keamanan dan ketertiban masyarakat; pembinaan linmas kapanewon, penyelenggaraan upacara tahun 2022				dokumen		0	#DIV/0!
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	153.924.298,00	143.098.900,00	92,97%				
1 Forkompim kapanewon				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2 Pembinaan linmas				kali	6	6	100,00%
3 Pemantauan ketentraman dan ketertiban masyarakat				bulan	12	12	100,00%
4 Rakor keamanan dan ketertiban				kali	12	12	100,00%
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10.241.150,00	10.172.000,00	99,32%				
Laporan operasi penegakan Perda				dokumen	1	1	100,00%
Sub keg Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia	10.241.150,00	10.172.000,00	99,32%				
1 Operasi penegakan peraturan daerah				kali	10	10	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	67.848.913,00	67.574.750,00	99,60%				
1 Persentase penanganan permasalahan yang terkait ISU SARA				%	100	100	100,00%
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	67.848.913,00	67.574.750,00	99,60%				
1 Laporan Kegiatan pertemuan tokoh masyarakat dan penyelenggaraan upacara				dokumen		0	#DIV/0!
Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	67.848.913,00	67.574.750,00	99,60%				
1 Forum Kerukunan Umat Beragama				kali	3	3	100,00%
2 Kegiatan Pertemuan Tokoh Kemasyarakatan				kali	2	2	100,00%
3 Penyelenggaraan upacara				kali	8	8	100,00%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	89.965.818,00	89.727.862,55	99,74%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Persentase Desa Menetapkan Peraturan DesaTepat Waktu				%	50	50	100,00%
2 Persentase Kalurahan Yang Melaksanakan Siklus Tahunan Tepat Waktu				%	50	100	200,00%
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	89.965.818,00	89.727.862,55	99,74%				
1 Laporan pelaksanaan Kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa							
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12.997.000,00	12.996.875,00	100,00%				
1 Evaluasi Raperdes perubahan APBDes				kali	1	1	100,00%
2 Laporan fasilitas penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa				dokumen	1	1	100,00%
3 Pembinaan penyusunan Perdes APBDes				kali	1	1	100,00%
4 Pembinaan siklus tahunan desa				kali	1	1	100,00%
1 Pendampingan penyusunan Peraturan Kalurahan dan Peraturan Lurah				kalurahan	4	4	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.035.400,00	3.035.325,00	100,00%				
1 Data Monografi Kecamatan				dokumen	8	8	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pdayagunaan Aset Desa	5.737.575,00	5.716.575,00	99,63%				
1 Pembinaan aset desa				desa	5	5	100,00%
2 Pembinaan dan pendampingan pengelolaan keuangan desa				kali	2	2	100,00%
3 Pembinaan pengelolaan ADD dan DD				kali	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	11.496.600,00	11.368.600,00	98,89%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Pembinaan Kepala Desa				desa	5	5	100,00%
2 Pembinaan Perangkat desa dan dukuh				desa	5	5	100,00%
3 Pembinaan staf desa				desa	5	5	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	47.327.255,00	47.286.913,00	99,91%				
1 Laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah				Dokumen	1	1	100,00%
2 Pembinaan administrasi pemerintahan desa				kali	2	2	100,00%
3 Pembinaan LKD dan BPD				kali	2	2	100,00%
4 Pengisian perangkat desa				kali	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2.302.225	2.263.825	98,33%				
1 Laporan hasil monev tata guna tanah				Dokumen	5	5	100,00%
2 Pendampingan pengelolaan tanah				desa	5	5	100,00%





**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON SEYEGAN
2022**

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
KAPANEWON SEYEGAN	4.821.634.706,00	4.624.468.880,00	95,91%				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	20.250.000,00	20.250.000,00	100,00%				
PROGRAM PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	20.250.000,00	20.250.000,00	100,00%				
1 Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi				even	1	1	100,00%
Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	20.250.000,00	20.250.000,00	100,00%				
Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja	20.250.000,00	20.250.000,00	100,00%				
1 Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur				even	1	1	100,00%
URUSAN SEKRETARIAT DAERAH	28.500.000,00	27.100.000,00	95,09%				
PROGRAM PELYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	28.500.000,00	27.100.000,00	95,09%				
1 Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proposional				%	90,00	90,00	100,00%
Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	28.500.000,00	27.100.000,00	95,09%				
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	28.500.000,00	27.100.000,00	95,09%				
1 Dokumen Usulan Perencanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2024				dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
UNSUR KEWILAYAHAN - KECAMATAN	4.772.884.706,00	4.577.118.880,00	95,90%				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.119.421.241,00	3.944.329.948,00	95,75%				
1 Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				%	100,00	100,00	100,00%
2 Presentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	29.024.550,00	28.998.075,00	99,91%				
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.573.050,00	13.572.975,00	100,00%				
1 Dokumen Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen Perubahan Renja				dokumen	1	1	100,00%
4 Dokumen Renja				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.193.750,00	2.167.400,00	98,80%				
1 Dokumen RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.227.500,00	2.227.500,00	100,00%				
1 Dokumen Perubahan RKA-SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.395.800,00	2.395.650,00	99,99%				
1 Dokumen DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.214.900,00	2.214.900,00	100,00%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Dokumen Perubahan DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.177.500,00	7.177.500,00	100,00%				
1 Dokumen Laporan Tahunan				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen LKJIP				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil				dokumen	4	4	100,00%
4 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap Kebijakan Renja				dokumen	1	1	100,00%
5 Kebijakan Renja Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD				dokumen	4	4	100,00%
6 Dokumen RFK				dokumen	12	12	100,00%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.267.277.396,00	3.130.944.270,00	95,83%				
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	318.541.489.600,00	2.778.960.550,00	0,87%				
1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai				bulan	12	12	100,00%
2 Pembayaran iuran BPJS				bulan	12	12	100,00%
3 Pembayaran TPP				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	77.557.500,00	72.045.600,00	92,89%				
1 Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.305.000,00	4.304.925,00	100,00%				
1 Laporan Aset/BMD Semesteran				dokumen	2	2	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2 Laporan Keuangan Semesteran				dokumen	2	2	100,00%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.025.125,00	32.674.125,00	98,94%				
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	33.025.125,00	32.674.125,00	98,94%				
1 Laporan pelaksanaan roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2021				dokumen	1	1	100,00%
2 Layanan administrasi kepegawaian				bulan	12	12	100,00%
3 Pembayaran tenaga Non PNS/ PHL				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	117.422.267,00	116.070.157,00	98,85%				
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.724.000,00	5.724.000,00	100,00%				
1 Alat listrik dan elektronik				paket	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.800.000,00	37.600.000,00	96,91%				
1 Peralatan dan perlengkapan kantor				unit	5	5	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.711.970,00	40.701.710,00	99,97%				
1 Alat tulis kantor				paket	1	1	100,00%
2 Layanan penyediaan makanan dan minuman rapat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.825.297,00	10.825.297,00	100,00%				
1 Layanan Cetak dan Penggandaan Dokumen				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	16.150.000,00	16.037.250,00	99,30%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Makanan dan minuman tamu				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.211.000,00	5.181.900,00	99,44%				
1 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah				bulan	12	12	100,00%
2 Pengelolaan website Perangkat Daerah				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.906.843,00	161.000.000,00	99,44%				
Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	161.906.843,00	161.000.000,00	99,44%				
1 Pembangunan Taman Layak Anak Khusus Kapanewon (indor)				paket	1	1	100,00%
2 Pembangunan Taman Layak Anak Khusus Kapanewon (outdor)				paket	1	1	100,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	355.927.750,00	323.976.193,00	91,02%				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.045.000,00	32.044.950,00	100,00%				
1 Layanan surat menyurat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.480.000,00	57.228.832,00	75,82%				
1 Pembayaran Jasa Langganan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	248.402.750,00	234.702.411,00	94,48%				
1 Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.837.310,00	150.667.128,00	97,31%				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	105.211.000,00	101.417.128,00	96,39%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Layanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas				bulan	12	12	100,00%
2 Layanan Penyediaan BBM Kendaraan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan mebel	30.268.810,00	30.230.000,00	99,87%				
1 Layanan Pemeliharaan meubelair				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	30.268.810,00	30.230.000,00	99,87%				
1 Layanan Pemeliharaan peralatan kerja				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.357.500,00	19.020.000,00	98,26%				
1 Pemeliharaan Gedung Kantor				unit	1	1	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	115.230.000,00	113.590.082,00	98,58%				
1 Presentase usulan Kegiatan atau output Kegiatan yang tercantum dalam beritaacara Musrenbang Kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita Acara hasil Musrenbang Kapanewon				%	30,00	30,00	100,00%
2 Persentase pelayanan perijinan selesai tepat waktu				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	28.250.000,00	26.615.325,00	94,21%				
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	28.250.000,00	26.615.325,00	94,21%				
1 Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan				dokumen	7	7	100,00%
2 Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan kapanewon				dokumen	1	1	100,00%
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	86.980.000,00	86.974.757,00	99,99%				
1 Terlaksananya pelayanan perizinan dan administrasi umum				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	6.170.000,00	6.169.850,00	0,00%				
1 Layanan perizinan IMB				bulan	0	0	0,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	80.810.000,00	80.804.907,00	99,99%				
1 Pelayanan administrasi kependudukan				bulan	12	12	100,00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN	217.049.900,00	216.941.700,00	99,95%				
1 Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi				%	30	30	100,00%
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	217.049.900,00	216.941.700,00	99,95%				
1 Terlaksananya pelayanan bidang kesehatan, keagamaan, perempuan dan anak; budaya dan pendidikan							
Sub Kegiatan Sinkronasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	153.834.900,00	153.779.250,00	99,96%				
1 Forum Koordinasi Bidang budaya				kali	5	5	100,00%
2 Forum Koordinasi Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak				kali	9	9	100,00%
3 Forum Koordinasi Bidang Pendidikan				kali	2	2	100,00%
4 Forum Koordinasi Bidang Sosial				kali	11	11	100,00%
5 Forum Koordinasi Kesehatan				kali	1	1	100,00%
6 Forum Korodinasi Bidang Keagamaan				kali	2	2	100,00%
7 Forum Korodinasi Bidang Pemuda dan Olahraga				kali	4	5	125,00%
8 Lomba MTQ tingkat Kecamatan				kali	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	63.215.000,00	63.162.450,00	99,92%				
1 Pelayanan bidang ekonomi				kali	12	12	100,00%
2 Pelayanan bidang fisik				kali	12	12	100,00%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	179.149.670,00	161.288.275,00	90,03%				
1 Cakupan Gangguan Ketentraman dan ketertiban yang di tangani di wilayah Kapanewon				%	100	100	100,00%
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	171.689.670,00	153.836.375,00	89,60%				
1 Terlaksananya koordinasi bulanan forkompim, lap. Pelaksanaan Kegiatan tokoh masyarakat FKUB; Lap. Pelaksanaan patroli terpadu keamanan dan ketertiban masyarakat; pembinaan linmas kapanewon, penyelenggaraan upacara tahun 2022				dokumen	0	0	0,00%
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	171.689.670,00	153.836.375,00	89,60%				
1 Forkompim kapanewon				bulan	12	12	100,00%
2 Pembinaan linmas				kali	6	6	100,00%
3 Pemantauan ketentraman dan ketertiban masyarakat				bulan	12	12	100,00%
4 Rakor keamanan dan ketertiban				kali	12	12	100,00%
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	7.460.000,00	7.451.900,00	99,89%				
Laporan operasi penegakan Perda				dokumen	1	1	100,00%
Sub keg Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia	7.460.000,00	7.451.900,00	99,89%				
1 Operasi penegakan peraturan daerah				kali	10	10	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	84.730.000,00	83.757.800,00	98,85%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Persentase penanganan permasalahan yang terkait ISU SARA				%	100	100	100,00%
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	84.730.000,00	83.757.800,00	98,85%				
1 Laporan Kegiatan pertemuan tokoh masyarakat dan penyelenggaraan upacara				dokumen	0	0	0,00%
<i>Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	<i>84.730.000,00</i>	<i>83.757.800,00</i>	<i>98,85%</i>				
1 Forum Kerukunan Umat Beragama				kali	3	3	100,00%
2 Kegiatan Pertemuan Tokoh Kemasyarakatan				kali	2	2	100,00%
3 Penyelenggaraan upacara				kali	8	8	100,00%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	57.303.895,00	57.211.075,00	99,84%				
1 Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu				%	50	50	100,00%
2 Persentase Kalurahan Yang Melaksanakan Siklus Tahunan Tepat Waktu				%	50	100	200,00%
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	57.303.895,00	57.211.075,00	99,84%				
1 Laporan pelaksanaan Kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa							
<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	<i>9.802.700,00</i>	<i>9.788.750,00</i>	<i>99,86%</i>				
1 Pendampingan penyusunan Peraturan Kalurahan dan Peraturan Lurah				kalurahan	4	4	100,00%
<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	<i>3.716.750,00</i>	<i>3.710.000,00</i>	<i>99,82%</i>				
1 Data Monografi Kecamatan				dokumen	8	8	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.309.950,00	9.291.275,00	99,80%				
1 Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi keuangan kalurahan				kalurahan	4	4	100,00%
2 Pembinaan, pendampingan, penyusunan dan evaluasi APBKal dan Perubahan APBKal				kalurahan	4	4	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.045.275,00	3.034.250,00	99,64%				
1 Pembinaan dan pengawasan lurah dan pamong kalurahan				kalurahan	4	4	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	21.692.050,00	21.662.500,00	99,86%				
1 Evaluasi Kinerja Pemerintahan Desa				kali	1	1	100%
2 Laporan Fasilitas Sinkronasi Perencanaan Pembangunan Daerah				dokumen	1	1	100%
3 Pembinaan BPD				kali	1	1	100%
4 Pembinaan LKD				kali	1	1	100%
5 Pembinaan Staf Desa				kali	1	1	100%
6 Pengisian Pamong Kalurahan				kali	1	1	100%
Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6.891.250,00	6.637.000,00	96,31%				
1 Belanja Seragam Tim Reaksi Cepat Kebencanaan				paket	1	1	100,00%
2 Laporan Pelaksanaan Kegiatan				dokumen	1	1	100,00%
3 Rapat Antisipasi Penanggulangan Bencana				Kali	2	2	100,00%
4 Rapat Unit Operasional Kapanewon				Kali	2	2	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
<i>Sub Kegiatan Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa</i>	2.845.920,00	2.841.600,00	99,85%				
1 Laporan Pelaksanaan Tugas Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				kalurahan	4	4	100,00%





**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON MLATI
2022**

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
KAPANEWON MLATI	4.821.634.706,00	4.624.468.880,00	95,91%				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00%				
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00%				
1 Nilai Adat Tradisi dan Seni yang sudah direvitalisasi				event	1	1	100,00%
Kegiatan : Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00%				
Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00%				
1 Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur				event	1	1	100,00%
URUSAN SEKRETARIAT DAERAH	26.500.000,00	25.100.000,00	94,72%				
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	26.500.000,00	25.100.000,00	94,72%				
1 Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang Proporsional				%	90,00	88,07	97,86%
Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	26.500.000,00	25.100.000,00	94,72%				
Sub kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	26.500.000,00	25.100.000,00	94,72%				
1 Dokumen Usulan Perencanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2024				dokumen	1	1	100,00%
UNSUR KEWILAYAHAN - KECAMATAN	4.783.664.961,00	4.191.061.863,00	87,61%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.151.692.776,00	3.600.267.668,00	86,72%				
1 Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				%	100,00	86,00	86,00%
2 Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja				%	100,00	86,00	86,00%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.185.600,00	50.869.560,00	97,48%				
Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.465.600,00	41.278.460,00	97,20%				
1 Dokumen Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen Perubahan Renja				dokumen	1	1	100,00%
4 Dokumen Renja				dokumen	1	1	100,00%
Sub Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.125.000,00	1.125.000,00	100,00%				
1 Dokumen RKA				dokumen	1	1	100,00%
Sub Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.125.000,00	1.072.500,00	95,33%				
1 Dokumen Perubahan RKA				dokumen	1	1	100,00%
Sub Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	900.000,00	900.000,00	100,00%				
1 Dokumen DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	900.000,00	900.000,00	100,00%				
1 Dokumen Perubahan DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.670.000,00	5.593.600,00	98,65%				
1 Dokumen Laporan Tahunan				dokumen	1	1	100%
2 Dokumen LKJP/LAKIP				dokumen	1	1	100%
3 Dokumen Pengendalian dan Evaluasi terhadap hasil Renja				dokumen	4	4	100%
4 Dokumen Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja				dokumen	1	1	100%
5 Dokumen Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja				dokumen	4	4	100%
6 Dokumen RFK/TEPPA				dokumen	12	12	100,00%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.330.985.108,00	2.806.284.408,00	84,25%				
Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.247.670.108,00	2.724.516.748,00	83,89%				
1 Insentif pungutan retribusi IMB				bulan	1	0	0,00%
2 Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai				bulan	12	12	100,00%
3 Pembayaran iuran BPJS				bulan	12	12	100,00%
4 Pembayaran TPP				bulan	12	12	100,00%
Sub kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	77.915.000,00	76.430.660,00	98,09%				
1 Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang				bulan	12	12	100,00%
Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	5.400.000,00	5.337.000,00	98,83%				
1 Dokumen Laporan Aset/BMD Semester I dan II				dokumen	2	2	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2 Dokumen Laporan Keuangan Semester I dan II				dokumen	2	2	100,00%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	44.271.600,00	43.963.160,00	99,30%				
Sub kegiatan Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	44.271.600,00	43.963.160,00	99,30%				
1 Laporan Pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi				dokumen	1	1	100,00%
2 Layanan Administrasi Kepegawaian				bulan	12	12	100,00%
3 Pembayaran Tenaga Non PNS/PHL				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	383.949.801,00	367.936.340,00	95,83%				
Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.286.071,00	5.516.100,00	87,75%				
1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				komponen	14	14	100%
Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	40.622.899,00	40.262.475,00	99,11%				
1 Layanan Penyediaan makanan dan minuman rapat				bulan	4	4	100%
2 Penyediaan ATK				paket	8	8	100%
Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19.447.200,00	19.435.700,00	99,94%				
1 Layanan Cetakan dan Penggandaan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas kunjungan tamu	24.100.000,00	24.063.000,00	99,85%				
1 Layanan Penyediaan makanan dan minuman tamu				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	17.337.953,00	17.252.900,00	99,51%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Layanan Surat Menyurat				bulan	12	12	100,00%
2 Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	4.500.000,00	4.441.500,00	98,70%				
1 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%				
1 Layanan Surat Menyurat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik	48.600.000,00	42.641.015,00	87,74%				
1 Pembayaran Jasa langganan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.191.080,00	57.672.000,00	99,11%				
1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				unit	5	5	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	163.864.598,00	155.651.650,00	94,99%				
1 Pelayanan Keamanan dan Kebersihan Kantor				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Urusan Pemerintahan Daerah	340.300.667,00	247.787.700,00	72,81%				
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	29.446.560,00	29.446.000,00	100,00%				
1 Pengadaan Meja				unit	10	10	100,00%
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000,00	14.750.000,00	19,67%				
1 Pengadaan Peralatan Taman Bermain Outdoor	15.000.000,00	14.750.000,00	98,33%	paket	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2 Belanja modal Bangunan Fasilitas Umum	60.000.000,00	-	0,00%	unit	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	123.343.000,00	91.320.700,00	74,04%				
1 Layanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas				bulan	12	12	100,00%
2 Layanan Penyediaan BBM				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan mebel	9.940.000,00	9.940.000,00	100,00%				
1 Layanan Pemeliharaan mebelair				bulan	12	12	100%
Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	62.450.000,00	62.300.000,00	99,76%				
1 Pemeliharaan /Perbaikan Peralatan Kerja				bulan	12	12	100%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	40.121.107,00	40.031.000,00	99,78%				
1 Pemeliharaan Gedung Kantor				unit	2	2	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	178.099.600,00	150.545.660,00	84,53%				
1 Persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam Berita Acara Musrenbang Kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita Acara hasil musrenbang Kapanewon				%	30	30	100%
2 Persentase pelayanan perizinan selesai tepat waktu				%	100	100	100%
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	50.308.600,00	49.296.660,00	97,99%				
Sub Kegiatan Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	50.308.600,00	49.296.660,00	97,99%				
1 Dokumen Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah				dokumen	3	3	100,00%
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	127.791.000,00	101.249.000,00	79,23%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	25.250.000,00	-	0,00%				
1 Layanan Perizinan IMB				bulan	12	0	0,00%
2 Layanan Perijinan IUMK				bulan	12	0	0,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	102.541.000,00	101.249.000,00	98,74%				
1 Layanan Administrasi Kependudukan				bulan	12	12	100,00%
2 Pembinaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Non Perizinan				kali	7	7	100,00%
3 Sosialisasi Administrasi Kependudukan				kali	1	1	100,00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN	181.172.585,00	180.018.285,00	99,36%				
1 Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi				%	30	30	100,00%
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	181.172.585,00	180.018.285,00	99,36%				
Sub Kegiatan Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	99.510.000,00	98.694.700,00	99,18%				
1 Pelaksanaan forum koordinasi dan Pembinaan di bidang budaya, keagamaan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, pemuda dan olahraga serta sosial				kegiatan	31	31	100,00%
2 Forum Koordinasi Bidang Budaya				kali	4	4	100,00%
3 Forum Koordinasi Bidang Keagamaan				kali	4	4	100,00%
4 Forum Koordinasi Bidang Kesehatan				kali	4	4	100,00%
5 Forum Koordinasi Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak				kali	31	31	100,00%
6 Forum Koordinasi Bidang Pemuda dan Olahraga				kali	2	2	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
7 Forum Koordinasi Bidang Pendidikan				kali	2	2	100,00%
8 Forum Koordinasi Bidang Sosial				kali	4	4	100,00%
Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	81.662.585,00	81.323.585,00	99,58%				
1 Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ekonomi				kali	13	13	100,00%
2 Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Fisik				kali	13	13	100,00%
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	162.600.000,00	150.445.500,00	92,52%				
1 Cakupan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon				%	100	100	100,00%
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	162.600.000,00	150.445.500,00	92,52%				
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	155.600.000,00	143.445.500,00	92,19%				
1 Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan				bulan	12	12	100%
2 Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat				bulan	12	12	100%
Kegiatan Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00%				
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00%				
1 Pelaksanaan Operasi Penegakan Peraturan Daerah				bulan	8	8	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	35.230.000,00	35.204.250,00	99,93%				
1 Persentase penanganan permasalahan yang terkait isu SARA				%	100	100	100,00%
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	35.230.000,00	35.204.250,00	99,93%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
<i>Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara</i>	35.230.000,00	35.204.250,00	99,93%				
1 Penyelenggaraan Upacara				bulan	12	12	100,00%
2 Pertemuan dengan tokoh masyarakat dalam rangka pembentukan Desa Berkarakter Pancasila				kali	4	4	100,00%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	74.870.000,00	74.580.500,00	99,61%				
1 Presentase Kalurahan yang melaksanakan siklus tahunan tepat waktu				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	74.870.000,00	74.580.500,00	99,61%				
<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	<i>2.375.000,00</i>	<i>2.367.500,00</i>	<i>99,68%</i>				
1 Data Monografi Kecamatan Semester II Tahun sebelumnya dan semester I Tahun Berjalan				dokumen	1	1	100,00%
<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	<i>5.925.000,00</i>	<i>5.917.500,00</i>	<i>99,87%</i>				
1 Pembinaan, Pendampingan Penyusunan dan Evaluasi APBDes				desa	5	5	100,00%
<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	<i>8.675.000,00</i>	<i>8.661.500,00</i>	<i>99,84%</i>				
1 Pembinaan dan Pengawasan Kepala Desa dan Perangkat Desa				kali	1	1	100,00%
<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>	<i>36.310.000,00</i>	<i>36.097.000,00</i>	<i>99,41%</i>				
1 Pembinaan BPD				desa	5	5	100,00%
2 Pembinaan LKD				desa	5	5	100,00%
3 Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Desa				desa	5	5	100,00%
<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>17.850.000,00</i>	<i>17.811.000,00</i>	<i>99,78%</i>				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Pembinaan Komunitas Peduli Bencana				kelompok	5	5	100,00%
2 Peserta Gladi Lapang Penanggulangan Bencana Alam				orang	125	125	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3.735.000,00	3.726.000,00	99,76%				
1 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tata Guna Tanah				desa	5	5	100,00%
2 Pendampingan dan Pengelolaan Tanah				desa	5	5	100,00%





LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN KAPANEWON DEPOK 2022

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
KAPANEWON DEPOK	4.978.776.761,00	4.728.877.857,00	94,98%				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00%				
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00%				
1 Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi				Event	1	1	100,00%
Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00%				
Sub kegiatan Gelar Budaya Jogja	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00%				
1 Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur				Event	1	1	100,00%
URUSAN SEKRETARIAT DAERAH	28.160.000,00	25.510.000,00	90,59%				
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	28.160.000,00	25.510.000,00	90,59%				
1 Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang proporsional				%	90,00	90,00	100,00%
Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	28.160.000,00	25.510.000,00	90,59%				
Sub kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	28.160.000,00	25.510.000,00	90,59%				
1 Dokumen Usulan Perencanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2024				dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
UNSUR KEWILAYAHAN - KECAMATAN	4.933.616.761,00	4.686.367.857,00	94,99%				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.077.404.361,00	3.865.609.852,00	94,81%				
1. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				%	100,00	100,00	100,00%
2. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.649.111,00	23.575.200,00	99,69%				
Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.962.486,00	13.888.650,00	99,47%				
1 Dokumen DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen Perubahan DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
4 Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
5 Dokumen Perubahan Renja				dokumen	1	1	100,00%
6 Dokumen Perubahan RKA				dokumen	1	1	100,00%
7 Dokumen Renja				dokumen	1	1	100,00%
8 Dokumen RKA				dokumen	1	1	100,00%
Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.686.625,00	9.686.550,00	100,00%				
1 Dokumen Laporan Tahunan				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen LKjIP				dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
3 Dokumen Pengendalian dan Evaluasi				dokumen	9	9	100,00%
4 Dokumen RFK/TEPPA				dokumen	12	12	100,00%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.301.568.127,00	3.131.994.859,00	94,86%				
Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.214.140.627,00	3.044.682.259,00	94,73%				
1 Insentif pungutan retribusi IMB				bulan	12	0	0,00%
2 Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai				bulan	12	12	100,00%
3 Pembayaran iuran BPJS				bulan	12	12	100,00%
4 Pembayaran TPP				bulan	12	12	100,00%
Sub kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	82.140.000,00	82.140.000,00	100,00%				
1 Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang				bulan	12	12	100,00%
Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	5.287.500,00	5.172.600,00	97,83%				
1 Laporan Aset				dokumen	2	2	100,00%
2 Laporan Keuangan				dokumen	2	2	100,00%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	72.736.500,00	70.325.924,00	96,69%				
Sub kegiatan Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	72.736.500,00	70.325.924,00	96,69%				
1 Pengelolaan Data Kepegawaian				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	78.752.285,00	77.138.820,00	97,95%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.749.580,00	4.690.720,00	98,76%				
1 Jumlah Komponen Penerangan				komponen	30	30	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	39.116.000,00	39.087.200,00	99,93%				
1 Jumlah paket logistik kantor				paket	4	4	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.741.705,00	3.615.900,00	96,64%				
1 Penyediaan Cetakan dan Penggandaan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas kunjungan tamu	12.925.000,00	12.755.000,00	98,68%				
1 Terfasilitasinya Kunjungan Tamu				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	18.220.000,00	16.990.000,00	93,25%				
1 Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	308.077.700,00	282.036.475,00	91,55%				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.892.500,00	8.796.000,00	98,91%				
1 Terfasilitasinya Kegiatan Surat Menyurat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik	91.200.000,00	86.500.599,00	94,85%				
1 Pembayaran biaya langganan penunjang perkantoran				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	207.985.200,00	186.739.876,00	89,79%				
1 Jasa Layanan Keamanan Kantor				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2 Jasa Layanan Kebersihan Kantor				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Urusan Pemerintahan Daerah	292.620.638,00	280.538.574,00	95,87%				
Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	79.943.000,00	75.675.874,00	94,66%				
1 Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan mebel	49.682.138,00	48.105.000,00	96,83%				
1 Terpeliharanya mebeler penunjang perkantoran				unit	10	10	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	110.135.500,00	104.726.200,00	95,09%				
1 Terpeliharanya peralatan dan mesin penunjang perkantoran				unit	11	11	100,00%
1 Tersedianya AC dan TV LCD				unit	4	4	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	52.860.000,00	52.031.500,00	98,43%				
1 Terpeliharanya Gedung dan Bangunan Kantor				paket	4	4	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	191.926.200,00	179.486.243,00	93,52%				
1 Persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam Berita Acara Musrenbang Kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita Acara hasil musrenbang Kapanewon				%	30,00	30,00	100,00%
2 Persentase pelayanan perizinan selesai tepat waktu				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21.070.000,00	20.270.000,00	96,20%				
Sub Kegiatan Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	21.070.000,00	20.270.000,00	96,20%				
1 Dokumen Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan				dokumen	3	3	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2 Dokumen Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan				dokumen	1	1	100,00%
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	170.856.200,00	159.216.243,00	93,19%				
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	63.100.000,00	58.350.000,00	92,47%				
1 Layanan Perizinan IMB				bulan	0	0	0,00%
2 Peningkatan Kapasitas Aparatur Inovasi Pelayanan Publik				orang	30	30	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	107.756.200,00	100.866.243,00	93,61%				
1 Pelayanan Administrasi Kependudukan				bulan	12	12	100,00%
PROGRAM EMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN	281.249.935,00	278.599.187,00	99,06%				
1 Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi				%	30,00	30,00	100,00%
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	281.249.935,00	278.599.187,00	99,06%				
Sub Kegiatan Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	138.408.960,00	136.564.400,00	98,67%				
1 Pelaksanaan forum koordinasi dan Pembinaan di bidang budaya, keagamaan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, pemuda dan olahraga serta sosial				kegiatan	31	31	100,00%
Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	142.840.975,00	142.034.787,00	99,44%				
1 Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ekonomi				kegiatan	5	5	100,00%
2 Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Fisik				kegiatan	5	5	100,00%
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	202.905.550,00	185.900.000,00	91,62%				
1 Cakupan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon				%	100,00	100,00	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	199.072.500,00	182.072.500,00	91,46%				
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	199.072.500,00	182.072.500,00	91,46%				
1 Pelaksanaan Forkompim Kapanewon				bulan	12	12	100,00%
2 Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat				bulan	12	12	100,00%
3 Pembinaan Limnas				kali	2	2	100,00%
4 Pengembangan Limnas				kali	2	2	100,00%
Kegiatan Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	3.833.050,00	3.827.500,00	99,86%				
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.833.050,00	3.827.500,00	99,86%				
1 Pelaksanaan Operasi Penegakan Peraturan Daerah				kali	5	5	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	101.107.640,00	97.877.500,00	96,81%				
1 Persentase penanganan permasalahan yang terkait isu SARA				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	101.107.640,00	97.877.500,00	96,81%				
Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	101.107.640,00	97.877.500,00	96,81%				
1 Penyelenggaraan Upacara				bulan	12	12	100,00%
2 Pertemuan dengan tokoh masyarakat				kali	4	4	100,00%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	79.023.075,00	78.895.075,00	99,84%				
1 Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu				%	100,00	100,00	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2 Persentase kalurahan yang melaksanakan siklus tahunan tepat waktu				%	100,00	100,00	100,00%
Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	79.023.075,00	78.895.075,00	99,84%				
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.949.000,00	5.949.000,00	100,00%				
1 Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa				dokumen	3	3	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.775.000,00	8.775.000,00	100,00%				
1 Laporan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				dokumen	3	3	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.693.125,00	14.593.000,00	99,32%				
1 Laporan Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa				dokumen	1	1	100,00%
2 Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa				kali	3	3	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	41.337.250,00	41.313.750,00	99,94%				
1 Laporan Hasil Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Desa				dokumen	1	1	100,00%
2 Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa, BPD, LKD				kali	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.904.375,00	3.900.000,00	99,89%				
1 Pembinaan Komunitas Peduli Bencana				kali	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegakan Batas Desa	4.364.325,00	4.364.325,00	100,00%				
1 Monitoring tata guna tanah				desa	3	3	100,00%





**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON BERBAH
2022**

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
KAPANEWON BERBAH	4.387.182.323,00	3.925.062.568,00	89,47%				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00%				
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00%				
1 Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi				event	1	1	100,00%
Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00%				
Sub kegiatan Gelar Budaya Jogja	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00%				
1 Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur				event	1	1	100,00%
URUSAN SEKRETARIAT DAERAH	28.160.000,00	25.510.000,00	90,59%				
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	28.160.000,00	25.510.000,00	90,59%				
1 Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang proporsional				%	90,00	90,00	100,00%
Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	28.160.000,00	25.510.000,00	90,59%				
Sub kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	28.160.000,00	25.510.000,00	90,59%				
1 Dokumen Usulan Perencanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2024				dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
UNSUR KEWILAYAHAN - KECAMATAN	4.341.182.323,00	3.879.462.568,00	89,36%				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.643.628.099,00	3.199.905.543,00	87,82%				
1. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				%	100,00	100,00	100,00%
2. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.369.250,00	15.317.614,00	99,66%				
Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.698.600,00	5.674.670,00	99,58%				
1 Dokumen Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen Perubahan Renja				dokumen	1	1	100,00%
4 Dokumen Renja				dokumen	1	1	100,00%
Sub Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	900.000,00	899.800,00	99,98%				
1 Dokumen RKA				dokumen	1	1	100,00%
Sub Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	900.000,00	899.986,00	100,00%				
1 Dokumen Perubahan RKA				dokumen	1	1	100,00%
Sub Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.460.650,00	1.459.325,00	99,91%				
1 Dokumen DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	900.000,00	899.025,00	99,89%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Dokumen Perubahan DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.510.000,00	5.484.808,00	99,54%				
1 Dokumen Laporan Tahunan				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen LKJIP				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen Pengendalian dan Evaluasi				dokumen	9	9	100,00%
4 Dokumen RFK/TEPPA				dokumen	12	12	100,00%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.087.679.570,00	2.664.049.461,00	86,28%				
Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.978.943.970,00	2.561.718.589,00	85,99%				
1 Insentif pungutan retribusi IMB				bulan	12	0	0,00%
2 Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai				bulan	12	12	100,00%
3 Pembayaran iuran BPJS				bulan	12	12	100,00%
4 Pembayaran TPP				bulan	12	12	100,00%
Sub kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	77.340.000,00	72.311.100,00	93,50%				
1 Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang				bulan	12	12	100,00%
Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	31.395.600,00	30.019.772,00	95,62%				
1 Laporan Aset				dokumen	2	2	100,00%
2 Laporan Keuangan				dokumen	2	2	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.830.600,00	36.453.610,00	96,36%				
Sub kegiatan Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	37.830.600,00	36.453.610,00	96,36%				
1 Pengelolaan Data Kepegawaian				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	156.860.084,00	151.177.530,00	96,38%				
Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.720.000,00	670.000,00	9,97%				
1 Jumlah Komponen Penerangan				komponen	30	30	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	46.688.650,00	46.610.652,00	99,83%				
1 Jumlah paket logistik kantor				paket	4	4	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.363.685,00	4.363.650,00	100,00%				
1 Penyediaan Cetakan dan Penggandaan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas kunjungan tamu	11.275.000,00	11.249.250,00	99,77%				
1 Terfasilitasinya Kunjungan Tamu				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	11.200.000,00	11.170.000,00	99,73%				
1 Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.189.258,00	173.452.060,00	95,20%				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%				
1 Terfasilitasinya Kegiatan Surat Menyurat				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik	50.400.000,00	49.972.584,00	99,15%				
1 Pembayaran biaya langganan penunjang perkantoran				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	128.789.258,00	120.479.476,00	93,55%				
1 Jasa Layanan Keamanan Kantor				bulan	12	12	100,00%
2 Jasa Layanan Kebersihan Kantor				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Urusan Pemerintahan Daerah	163.699.337,00	159.455.268,00	97,41%				
Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	85.598.800,00	83.875.268,00	97,99%				
1 Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	29.400.000,00	26.880.000,00	91,43%				
1 Terpeliharanya peralatan dan mesin penunjang perkantoran				unit	11	11	100,00%
1 Tersedianya AC dan TV LCD				unit	4	4	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	48.700.537,00	48.700.000,00	100,00%				
1 Terpeliharanya Gedung dan Bangunan Kantor				paket	4	4	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100.865.024,00	97.548.697,00	96,71%				
1 Persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam Berita Acara Musrenbang Kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita Acara hasil musrenbang Kapanewon				%	30,00	30,00	100,00%
2 Persentase pelayanan perizinan selesai tepat waktu				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34.700.000,00	32.918.550,00	94,87%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
<i>Sub Kegiatan Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait</i>	34.700.000,00	25.538.250,00	73,60%				
1 Dokumen Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan				dokumen	3	3	100,00%
2 Dokumen Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan				dokumen	1	1	100,00%
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	66.165.024,00	64.630.147,00	97,68%				
<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha</i>	-	-	0,00%				
1 Layanan Perizinan IMB				bulan	0	0	0,00%
2 Peningkatan Kapasitas Aparatur Inovasi Pelayanan Publik				orang	0	0	0,00%
<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</i>	66.165.024,00	64.630.147,00	97,68%				
1 Pelayanan Administrasi Kependudukan				bulan	12	12	100,00%
PROGRAM EMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN	224.696.100,00	219.820.169,00	97,83%				
1 Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi				%	30,00	30,00	100,00%
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	224.696.100,00	219.820.169,00	97,83%				
<i>Sub Kegiatan Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan</i>	142.472.000,00	140.721.568,00	98,77%				
1 Pelaksanaan forum koordinasi dan Pembinaan di bidang budaya, keagamaan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, pemuda dan olahraga serta sosial				kegiatan	31	31	100,00%
<i>Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	82.224.100,00	79.098.601,00	96,20%				
1 Forum koordinasi bidang ekonomi				kali	8	8	100,00%
2 Forum koordinasi bidang fisik				kali	5	5	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
3 Pembayaran Tenaga Non PNS				bulan	12	12	100,00%
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	192.428.100,00	184.150.239,00	95,70%				
1 Cakupan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	185.465.600,00	177.187.739,00	95,54%				
<i>Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>185.465.600,00</i>	<i>177.187.739,00</i>	<i>95,54%</i>				
1 Pelaksanaan Forkompim Kapanewon				bulan	12	12	100,00%
2 Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat				bulan	12	12	100,00%
3 Pembinaan Limnas				kali	2	2	100,00%
4 Pengembangan Limnas				kali	2	2	100,00%
Kegiatan Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	6.962.500,00	6.962.500,00	100,00%				
<i>Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	<i>6.962.500,00</i>	<i>6.962.500,00</i>	<i>100,00%</i>				
1 Pelaksanaan Operasi Penegakan Peraturan Daerah				kali	5	5	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	120.875.000,00	119.626.023,00	98,97%				
1 Persentase penanganan permasalahan yang terkait isu SARA				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	120.875.000,00	119.626.023,00	98,97%				
<i>Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara</i>	<i>120.875.000,00</i>	<i>119.626.023,00</i>	<i>98,97%</i>				
1 Penyelenggaraan upacara				Kali	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2 Laporan Kegiatan pertemuan tokoh masyarakat				dokumen	1	1	100,00%
3 Laporan Kerukunan Umat Beragama				dokumen	1	1	100,00%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	58.690.000,00	58.411.897,00	99,53%				
1 Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu				%	100,00	100,00	100,00%
2 Persentase kalurahan yang melaksanakan siklus tahunan tepat waktu				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	58.690.000,00	58.411.897,00	99,53%				
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.150.000,00	4.119.537,00	99,27%				
1 Evaluasi Raperdes APBDes				kali	1	1	100,00%
2 Evaluasi Raperdes Perubahan APBDes				kali	1	1	100,00%
3 Laporan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				dokumen	1	1	100,00%
4 Pembinaan Penyusunan Perdes APBDes				kali	1	1	100,00%
5 Pembinaan Siklus Tahunan Desa				kali	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.000.000,00	2.998.700,00	99,96%				
1 Pembinaan dan pengawasan data ADD dan DD				kali	1	1	100,00%
2 Pembinaan Aset Desa				kali	1	1	100,00%
3 Pembinaan dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa				kali	2	2	100,00%
4 Laporan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa				dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.250.000,00	4.250.000,00	100,00%				
1 Laporan Fasilitas pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa				dokumen	1	1	100,00%
2 Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa				kali	3	3	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	26.775.000,00	26.608.176,00	99,38%				
1 Pembinaan BPKal				kali	1	1	100,00%
2 Pembinaan LKKal				kali	1	1	100,00%
3 Pengisian Perangkat Kalurahan				kali	1	1	100,00%
4 Laporan hasil evaluasi kinerja perangkat kalurahan				kali	1	1	100,00%
5 Pembinaan Administrasi Pemeringtahan Kalurahan				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14.807.034,00	14.807.034,00	100,00%				
1 Pembinaan Komunitas Peduli Bencana				kali	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3.000.000,00	2.952.300,00	98,41%				
1 1, Laporan hasil moev tata guna tanah				dokumen	1	1	100,00%
2 Monitoring tata guna tanah				desa	4	4	100,00%





**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON PRAMBANAN
2022**

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
KAPANEWON PRAMBANAN	4.890.777.865,00	4.471.978.001,00	91,44%				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00%				
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00%				
1 Nilai Adat Tradisi dan Seni yang sudah direvitalisasi				event	1	1	100,00%
Kegiatan : Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00%				
Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00%				
1 Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur				event	1	1	100,00%
URUSAN SEKRETARIAT DAERAH	26.500.000,00	25.100.000,00	94,72%				
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	26.500.000,00	25.100.000,00	94,72%				
1 Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang Proporsional				%	90,00	88,07	97,86%
Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	30.000.000,00	28.600.000,00	95,33%				
Sub kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	30.000.000,00	28.600.000,00	95,33%				
1 Dokumen Usulan Perencanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2024				dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
UNSUR KEWILAYAHAN - KECAMATAN	8.444.436.426,00	4.281.032.374,00	50,70%				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.736.081.159,00	3.600.267.668,00	46,54%				
1 Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				%	100,00	86,00	86,00%
2 Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja				%	100,00	86,00	86,00%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.131.422.598,00	3.741.613.295,00	90,56%				
Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.062.492,00	37.025.000,00	99,90%				
1 Dokumen Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen Perubahan Renja				dokumen	1	1	100,00%
4 Dokumen Renja				dokumen	1	1	100,00%
Sub Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.244.800,00	5.179.675,00	98,76%				
1 Dokumen RKA				dokumen	1	1	100,00%
Sub Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.744.800,00	1.744.650,00	99,99%				
1 Dokumen Perubahan RKA				dokumen	1	1	100,00%
Sub Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.744.800,00	1.731.900,00	99,26%				
1 Dokumen DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.520.150,00	2.494.350,00	98,98%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Dokumen Perubahan DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.472.675,00	12.467.575,00	99,96%				
1 Dokumen Laporan Tahunan				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen LKJP/LAKIP				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen Pengendalian dan Evaluasi terhadap hasil Renja				dokumen	4	4	100,00%
4 Dokumen Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja				dokumen	1	1	100,00%
5 Dokumen Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja				dokumen	4	4	100,00%
6 Dokumen RFK/TEPPA				dokumen	12	12	100,00%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.213.896.517,00	2.846.208.738,00	88,56%				
Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.100.512.317,00	2.735.541.638,00	88,23%				
1 Insentif pungutan retribusi IMB				bulan	1	0	0,00%
2 Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai				bulan	12	12	100,00%
3 Pembayaran iuran BPJS				bulan	12	12	100,00%
4 Pembayaran TPP				bulan	12	12	100,00%
Sub kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	76.540.000,00	73.907.500,00	96,56%				
1 Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang				bulan	12	12	100,00%
Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	36.844.200,00	36.759.600,00	99,77%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Dokumen Laporan Aset/BMD Semester I dan II				dokumen	2	2	100,00%
2 Dokumen Laporan Keuangan Semester I dan II				dokumen	2	2	100,00%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.122.675,00	18.100.757,00	99,88%				
Sub kegiatan Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	18.122.675,00	18.100.757,00	99,88%				
1 Laporan Pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi				dokumen	1	1	100,00%
2 Layanan Administrasi Kepegawaian				bulan	12	12	100,00%
3 Pembayaran Tenaga Non PNS/PHL				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	177.414.369,00	175.125.914,00	98,71%				
Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.899.790,00	6.886.560,00	99,81%				
1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				komponen	14	14	100%
Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	36.176.900,00	36.126.900,00	99,86%				
1 Layanan Penyediaan makanan dan minuman rapat				bulan	4	4	100%
2 Penyediaan ATK				paket	8	8	100%
Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.841.250,00	6.841.125,00	100,00%				
1 Layanan Cetak dan Penggandaan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas kunjungan tamu	13.678.000,00	13.646.564,00	99,77%				
1 Layanan Penyediaan makanan dan minuman tamu				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	41.073.150,00	39.698.820,00	96,65%				
1 Layanan Surat Menyurat				bulan	12	12	100,00%
2 Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	1.687.500,00	1.605.225,00	95,12%				
1 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.750.000,00	2.749.070,00	99,97%				
1 Layanan Surat Menyurat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik	77.940.000,00	69.249.953,00	88,85%				
1 Pembayaran Jasa langganan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.620.000,00	10.605.000,00	99,86%				
1 Layanan perjalanan dinas dalam daerah				bulan	12	12	100,00%
2 Layanan perjalanan dinas luar daerah				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	163.864.598,00	155.651.650,00	94,99%				
1 Pelayanan Keamanan dan Kebersihan Kantor				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Urusan Pemerintahan Daerah	195.225.000,00	194.066.900,00	99,41%				
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	195.225.000,00	194.066.900,00	99,41%				
1 Pengadaan Meja				unit	10	10	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	277.076.910,00	267.002.273,00	96,36%				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.750.000,00	2.749.070,00	99,97%				
1 Terasilitasinya Kegiatan Surat Menyurat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik	77.940.000,00	69.249.953,00	88,85%				
1 Pembayaran biaya langganan penunjang perkantoran				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	196.386.910,00	195.003.250,00	99,30%				
1 Jasa Layanan Keamanan Kantor				bulan	12	12	100,00%
2 Jasa Layanan Kebersihan Kantor				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.897.410,00	180.465.563,00	95,54%				
Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	136.947.410,00	129.570.373,00	94,61%				
1 Layanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas				bulan	12	12	100,00%
2 Layanan Penyediaan BBM				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	16.750.000,00	16.629.000,00	99,28%				
1 Pemeliharaan /Perbaikan Peralatan Kerja				bulan	12	12	100%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	35.200.000,00	34.226.190,00	97,23%				
1 Pemeliharaan Gedung Kantor				unit	2	2	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	194.446.522,00	189.394.451,00	97,40%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam Berita Acara Musrenbang Kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita Acara hasil musrenbang Kapanewon				%	30,00	30,00	100%
2 Persentase pelayanan perizinan selesai tepat waktu				%	100,00	100,00	100%
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35.742.897,00	32.109.725,00	89,84%				
Sub Kegiatan Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	35.742.897,00	32.109.725,00	89,84%				
1 Dokumen Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah				dokumen	3	3	100,00%
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	158.703.625,00	157.284.726,00	99,11%				
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	30.798.375,00	30.798.200,00	100,00%				
1 Layanan Perizinan IMB				bulan	12	0	0,00%
2 Layanan Perijinan IUMK				bulan	12	0	0,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	127.905.250,00	126.486.526,00	98,89%				
1 Layanan Administrasi Kependudukan				bulan	12	12	100,00%
2 Pembinaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Non Perizinan				kali	7	7	100,00%
3 Sosialisasi Administrasi Kependudukan				kali	1	1	100,00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN	170.276.775,00	170.079.655,00	99,88%				
1 Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi				%	30	30	100,00%
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	170.276.775,00	170.079.655,00	99,88%				
Sub Kegiatan Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	97.740.000,00	97.714.905,00	99,97%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Pelaksanaan forum koordinasi dan Pembinaan di bidang budaya, keagamaan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, pemuda dan olahraga serta sosial				kegiatan	31	31	100,00%
2 Forum Koordinasi Bidang Budaya				kali	4	4	100,00%
3 Forum Koordinasi Bidang Keagamaan				kali	4	4	100,00%
4 Forum Koordinasi Bidang Kesehatan				kali	4	4	100,00%
5 Forum Koordinasi Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak				kali	31	31	100,00%
6 Forum Koordinasi Bidang Pemuda dan Olahraga				kali	2	2	100,00%
7 Forum Koordinasi Bidang Pendidikan				kali	2	2	100,00%
8 Forum Koordinasi Bidang Sosial				kali	4	4	100,00%
Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	72.536.775,00	72.364.750,00	99,76%				
1 Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ekonomi				kali	13	13	100,00%
2 Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Fisik				kali	13	13	100,00%
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	222.702.870,00	203.177.500,00	91,23%				
1 Cakupan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon				%	100	100	100,00%
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	221.702.870,00	202.177.675,00	91,19%				
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	221.702.870,00	202.177.675,00	91,19%				
1 Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan				bulan	12	12	100%
2 Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat				bulan	12	12	100%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Kegiatan Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	1.000.000,00	999.825,00	99,98%				
<i>Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	1.000.000,00	999.825,00	99,98%				
1 Pelaksanaan Operasi Penegakan Peraturan Daerah				bulan	8	8	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	42.925.000,00	42.813.975,00	99,74%				
1 Persentase penanganan permasalahan yang terkait isu SARA				%	100	100	100,00%
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	42.925.000,00	42.813.975,00	99,74%				
<i>Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara</i>	42.925.000,00	42.813.975,00	99,74%				
1 Penyelenggaraan Upacara				bulan	12	12	100,00%
2 Pertemuan dengan tokoh masyarakat dalam rangka pembentukan Desa Berkarakter Pancasila				kali	4	4	100,00%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	78.004.100,00	75.299.125,00	96,53%				
1 Presentase Kalurahan yang melaksanakan siklus tahunan tepat waktu				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	78.004.100,00	75.299.125,00	96,53%				
<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	3.720.000,00	3.719.975,00	100,00%				
1 Data Monografi Kecamatan Semester II Tahun sebelumnya dan semester I Tahun Berjalan				dokumen	1	1	100,00%
<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaayagunaan Aset Desa</i>	8.236.500,00	8.236.350,00	100,00%				
1 Pembinaan, Pendampingan Penyusunan dan Evaluasi APBDes				desa	5	5	100,00%
<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	14.100.000,00	14.099.850,00	100,00%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Pembinaan dan Pengawasan Kepala Desa dan Perangkat Desa				kali	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	31.380.100,00	28.675.650,00	91,38%				
1 Pembinaan BPD				desa	5	5	100,00%
2 Pembinaan LKD				desa	5	5	100,00%
3 Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Desa				desa	5	5	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13.170.000,00	13.170.000,00	100,00%				
1 Pembinaan Komunitas Peduli Bencana				kelompok	5	5	100,00%
2 Peserta Gladi Lapang Penanggulangan Bencana Alam				orang	125	125	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	7.397.500,00	7.397.300,00	100,00%				
1 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tata Guna Tanah				desa	5	5	100,00%
2 Pendampingan dan Pengelolaan Tanah				desa	5	5	100,00%





**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON KALASAN
2022**

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
KAPANEWON KALASAN	4.691.486.758,00	4.387.584.596,60	93,52%				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00%				
PROGRAM PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00%				
1 Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi				even	1	1	100,00%
Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00%				
1 Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi				even	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00%				
1 Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur				even	1	1	100,00%
URUSAN SEKRETARIAT DAERAH	28.500.000,00	26.898.200,00	94,38%				
PROGRAM PELYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	28.500.000,00	26.898.200,00	94,38%				
1 Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proposional				%	90,00	90,00	100,00%
Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	28.500.000,00	26.898.200,00	94,38%				
1 Dokumen Usulan Perencanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2024				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	28.500.000,00	26.898.200,00	94,38%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Dokumen Usulan Perencanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2024				dokumen	1	1	100,00%
UNSUR KEWILAYAHAN - KECAMATAN	4.639.986.758,00	4.337.686.396,60	93,48%				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.845.457.583,00	3.566.110.857,60	92,74%				
1 Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				%	100,00	100,00	100,00%
2 Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	31.568.175,00	31.050.712,00	98,36%				
1 Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.000.000,00	8.981.287,00	99,79%				
1 Dokumen Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen Perubahan Renja				dokumen	1	1	100,00%
4 Dokumen Renja				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.531.250,00	2.531.250,00	100,00%				
1 Dokumen RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.927.350,00	1.901.070,00	98,64%				
1 Dokumen Perubahan RKA-SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.518.750,00	1.518.750,00	100,00%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Dokumen DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.465.200,00	1.465.200,00	100,00%				
1 Dokumen Perubahan DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.125.625,00	14.653.155,00	96,88%				
1 Dokumen Laporan Tahunan				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen LKJIP				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil				dokumen	4	4	100,00%
4 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap Kebijakan Renja				dokumen	1	1	100,00%
5 Kebijakan Renja Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD				dokumen	4	4	100,00%
6 Dokumen RFK				dokumen	12	12	100,00%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.819.866.208,00	2.568.374.866,00	91,08%				
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.739.399.708,00	2.488.603.515,00	90,84%				
1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai				bulan	12	12	100,00%
2 Pembayaran luran BPJS				bulan	12	12	100,00%
3 Pembayaran TPP				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	76.340.000,00	75.644.851,00	99,09%				
1 Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.126.500,00	4.126.500,00	100,00%				
1 Laporan Aset/BMD Semesteran				dokumen	2	2	100,00%
2 Laporan Keuangan Semesteran				dokumen	2	2	100,00%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	140.729.675,00	136.226.493,60	96,80%				
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	140.729.675,00	136.226.493,60	96,80%				
1 Laporan pelaksanaan roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2021				dokumen	1	1	100,00%
2 Layanan administrasi kepegawaian				bulan	12	12	100,00%
3 Pembayaran tenaga Non PNS/ PHL				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	163.425.583,00	162.632.100,00	99,51%				
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.599.199,00	8.591.500,00	99,91%				
1 Penyediaan alat listrik				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			#DIV/0!				
1 Penyediaan peralatan rumah tangga				bulan	12	12	100,00%
2 Alat dapur				buah	5	5	100,00%
3 Alat pendingin (AC)				buah	2	2	100,00%
4 Layar (screen) untuk LCD				buah	2	2	100,00%
5 Meubelair				buah	26	26	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
6 Mixer sound system				buah	1	1	100,00%
7 Printer				buah	1	1	100,00%
8 Scanner				buah	1	1	100,00%
9 Televisi				buah	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.997.864,00	34.883.550,00	99,67%				
1 Alat tulis kantor				paket	1	1	100,00%
2 Layanan penyediaan makanan dan minuman rapat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.834.143,00	4.834.000,00	100,00%				
1 Layanan Cetak dan Penggandaan Dokumen				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	24.190.000,00	24.165.000,00	99,90%				
1 Makanan dan minuman tamu				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	31.604.477,00	31.558.150,00	99,85%				
1 Pengelolaan arsip dan perpustakaan perangkat daerah				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	59.199.900,00	58.599.900,00	98,99%				
1 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	462.399.342,00	449.513.686,00	97,21%				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.889.750,00	5.889.750,00	100,00%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Layanan surat menyurat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.800.000,00	65.348.512,00	96,38%				
1 Pembayaran Jasa Langganan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	388.709.592,00	378.275.424,00	97,32%				
1 Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	227.468.600,00	218.313.000,00	95,98%				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	133.893.000,00	125.292.000,00	93,58%				
1 Layanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas				bulan	12	12	100,00%
2 Layanan Penyediaan BBM Kendaraan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan mebel	-	-	0,00%				
1 Layanan Pemeliharaan meubelair				bulan	0	0	0,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	38.728.100,00	38.598.500,00	99,67%				
1 Layanan Pemeliharaan peralatan kerja				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	54.847.500,00	54.422.500,00	99,23%				
1 Pemeliharaan Gedung Kantor				tahun	1	1,00	100,00%
2 Pemeliharaan taman				tahun	1	1,00	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	106.808.525,00	104.633.775,00	97,96%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Presentase usulan Kegiatan atau output Kegiatan yang tercantum dalam beritaacara Musrenbang Kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita Acara hasil Musrenbang Kapanewon				%	30,00	57,02	190,08%
2 Persentase pelayanan perijinan selesai tepat waktu				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25.716.675,00	24.941.575,00	96,99%				
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	25.716.675,00	24.941.575,00	96,99%				
1 Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan				dokumen	7	7	100,00%
2 Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan kapanewon				dokumen	1	1	100,00%
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	81.091.850,00	79.692.200,00	98,27%				
1 Terlaksananya pelayanan perizinan dan administrasi umum				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	49.041.850,00	49.012.450,00	99,94%				
1 Layanan perizinan IMB				bulan	0	0	0,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	32.050.000,00	30.679.750,00	95,72%				
1 Pelayanan administrasi kependudukan				bulan	12	12	100,00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN	273.739.475,00	271.973.665,00	99,35%				
1 Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi				%	30	30	100,00%
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	273.739.475,00	271.973.665,00	99,35%				
1 Terlaksananya pelayanan bidang kesehatan, keagamaan, perempuan dan anak; budaya dan pendidikan							
Sub Kegiatan Sinkronasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	151.744.050,00	151.343.340,00	99,74%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Forum koordinasi bidang budaya				kali	10	10	100,00%
2 Forum koordinasi bidang keagamaan				kali	14	14	100,00%
3 Forum koordinasi bidang kesehatan				kali	4	4	100,00%
4 Forum koordinasi bidang olahraga				kali	2	2	100,00%
5 Forum Koordinasi Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak				kali	19	19	100,00%
6 Forum koordinasi bidang sosial				kali	11	11	100,00%
7 MTQ				kali	1	1	100,00%
8 Pembinaan persiapan pengiriman MTQ				kali	1	1	100,00%
9 Fasilitasi lomba senam Sleman Bangkit				kegiatan	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	121.995.425,00	120.630.325,00	98,88%				
1 Pelayanan bidang ekonomi				kali	8	8	100,00%
2 Forum koordinasi bidang fisik				kali	12	12	100,00%
3 Gebyar UMKM				kali	1	1	100,00%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	156.989.825,00	143.730.199,00	91,55%				
1 Cakupan Gangguan Ketentraman dan ketertiban yang di tangani di wilayah Kapanewon				%	100	100	100,00%
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	152.489.925,00	139.230.299,00	91,30%				
1 Terlaksananya koordinasi bulanan forkompim, lap. Pelaksanaan Kegiatan tokoh masyarakat FKUB; Lap. Pelaksanaan patroli terpadu keamanan dan ketertiban masyarakat; pembinaan linmas kapanewon, penyelenggaraan upacara tahun 2022				dokumen		0	#DIV/0!





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
<i>Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	152.489.925,00	139.230.299,00	91,30%				
1 Forkompim kapanewon				bulan	12	12	100,00%
2 Laporan pembinaan linmas				dokumen	1	1	100,00%
3 Pemantauan ketentraman dan ketertiban masyarakat				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4.499.900,00	4.499.900,00	100,00%				
Laporan operasi penegakan Perda				dokumen		0	#DIV/0!
<i>Sub keg Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia</i>	<i>4.499.900,00</i>	<i>4.499.900,00</i>	<i>100,00%</i>				
1 Operasi penegakan peraturan daerah				bulan	12	12	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	179.642.325,00	174.236.625,00	96,99%				
1 Persentase penanganan permasalahan yang terkait ISU SARA				%	100	100	100,00%
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	179.642.325,00	174.236.625,00	96,99%				
1 Laporan penyelenggaraan upacara HUT RI dan penyelenggaraan upacara bulanan/hari besar, laporan kegiatan pertemuan tokoh masyarakat dan FKUB				dokumen	3	3	100,00%
<i>Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	<i>179.642.325,00</i>	<i>174.236.625,00</i>	<i>96,99%</i>				
1 Laporan FKUB				dokumen	1	1	100,00%
2 Laporan kegiatan pertemuan tokoh masyarakat				dokumen	1	1	100,00%
3 Penyelenggaraan upacara bulanan / hari besar				kali	10	9	90,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
4 Penyelenggaraan HUT RI				kali	1	1	100,00%
5 Fasilitasi lomba HUT KORPRI				kegiatan	1	1	100,00%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	77.349.025,00	77.001.275,00	99,55%				
1 Persentase Desa Menetapkan Peraturan DesaTepat Waktu				%	100	100	100,00%
2 Persentase Kalurahan Yang Melaksanakan Siklus Tahunan Tepat Waktu				%	50	100	200,00%
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	77.349.025,00	77.001.275,00	99,55%				
1 Rekomendasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai peraturan perundang-undangan				dokumen	8	8	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16.219.800,00	16.108.800,00	99,32%				
1 Evaluase Raperdes Perubahan APBDes				kali	4	4	100,00%
2 Evaluasi Raperdes APBDes				kali	4	4	100,00%
3 Laporan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa				dokumen	1	1	100,00%
4 Pembinaan penyusunan Perdes APBDes				kali	4	4	100,00%
5 Pembinaan siklus tahunan desa				kali	8	8	100,00%
6 Rakor penyusunan peraturan desa				kali	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.256.800,00	5.256.800,00	100,00%				
1 Data Monografi Kecamatan				dokumen	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pdayagunaan Aset Desa	15.262.500,00	15.258.500,00	99,97%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Laporan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa				dokumen	1	1	100,00%
2 Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa				bulan	12	12	100,00%
2 Pembinaan dan pendampingan pengelolaan keuangan desa				kali	2	2	100,00%
3 Pembinaan pengelolaan DD dan ADD				kali	4	4	100,00%
4 Pembinaan pengelolan aset desa				kali	4	4	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.835.000,00	7.809.500,00	99,67%				
1 Laporan pelaksanaan Kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa				dokumen	1	1	100,00%
2 Bimtek kepala desa dan perangkat desa				kali	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	13.655.000,00	13.621.000,00	99,75%				
1 Laporan hasil evaluasi kinerja perangkat desa				dokumen	1	1	100,00%
2 Pembinaan administrasi pemerintahan desa				kali	3	3	100,00%
3 Pembinaan BPKal				kali	2	2	100,00%
4 Pembinaan LKKal				kali	2	2	100,00%
5 Perngisian perangkat desa				kali	4	4	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.499.925,00	10.410.675,00	99,15%				
1 Forum koordinasi komunitas peduli bencana				kali	1	1	100,00%
2 Glasi lapang penanggulangan bencana alam				kali	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
<i>Sub Kegiatan Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa</i>	8.620.000,00	8.536.000,00	99,03%				
1 Laporan hasil monitoring dan evaluasi tata guna tanah				dokumen	1	1	100,00%
2 Pendampingan pengelolaan tanah				bulan	12	12	100,00%





**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON NGEMPLAK
2022**

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
KAPANEWON NGEMPLAK	4.618.613.585,00	4.112.388.817,00	89,04%				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00%				
PROGRAM PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00%				
1 Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi				even	1	1	100,00%
Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00%				
Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00%				
1 Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur				even	1	1	100,00%
URUSAN SEKRETARIAT DAERAH	28.500.000,00	27.100.000,00	95,09%				
PROGRAM PELYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	28.500.000,00	27.100.000,00	95,09%				
1 Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proposional				%	90,00	90,00	100,00%
Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	28.500.000,00	27.100.000,00	95,09%				
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	28.500.000,00	27.100.000,00	95,09%				
1 Dokumen Usulan Perencanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2024				dokumen	1	1	100,00%
UNSUR KEWILAYAHAN - KECAMATAN	4.580.349.252,00	4.075.929.784,00	88,99%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.763.015.502,00	3.272.961.184,00	86,98%				
1 Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				%	100,00	100,00	100,00%
2 Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	20.533.475,00	20.500.550,00	99,84%				
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.062.325,00	6.054.800,00	99,88%				
1 Dokumen Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen Perubahan Renja				dokumen	1	1	100,00%
4 Dokumen Renja				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.507.550,00	2.507.550,00	100,00%				
1 Dokumen RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.507.625,00	2.495.725,00	99,53%				
1 Dokumen Perubahan RKA-SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.459.175,00	2.459.175,00	100,00%				
1 Dokumen DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.907.925,00	1.907.925,00	100,00%				
1 Dokumen Perubahan DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.088.875,00	5.075.375,00	99,73%				
1 Dokumen laporan evaluasi kinerja				dokumen	12	12	100,00%
2 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil				dokumen	5	5	100,00%
3 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan				dokumen	2	2	100,00%
4 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan				dokumen	4	4	100,00%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.955.597.653,00	2.520.788.782,00	85,29%				
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.875.256.828,00	2.443.281.414,00	84,98%				
1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai				bulan	12	12	100,00%
2 Pembayaran iuran BPJS				bulan	12	12	100,00%
3 Pembayaran TPP				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	76.438.500,00	73.616.543,00	96,31%				
1 Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.902.325,00	3.890.825,00	99,71%				
1 Laporan Aset/BMD Semesteran				dokumen	2	2	100,00%
2 Laporan Keuangan Semesteran				dokumen	2	2	100,00%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.008.400,00	12.003.700,00	99,96%				
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	12.008.400,00	12.003.700,00	99,96%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Laporan pelaksanaan roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2021				dokumen	1	1	100,00%
2 Layanan administrasi kepegawaian				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	295.818.784,00	274.761.389,00	92,88%				
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.799.200,00	10.799.200,00	100,00%				
1 Penyediaan alat listrik				unit	14	14	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Kantor	166.744.158,00	146.502.530,00	87,86%				
1 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.697.260,00	53.276.997,00	99,22%				
1 Alat tulis kantor				paket	1	1	100,00%
2 Layanan penyediaan makanan dan minuman rapat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.907.266,00	8.831.262,00	99,15%				
1 Layanan Cetak dan Penggandaan Dokumen				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	14.950.000,00	14.939.750,00	99,93%				
1 Makanan dan minuman tamu				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	23.200.000,00	23.195.125,00	99,98%				
1 Pengelolaan Arsip Aktif				bulan	12	12	100,00%
2 Pengelolaan Arsip Pasif				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13.910.900,00	13.606.525,00	97,81%				
1 Pengelolaan PPID				bulan	12	12	100,00%
2 Pembinaan KIM Kapanewon dan Kalurahan				kali	7	7	100,00%
3 Penanganan Pengaduan				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.821.267,00	86.569.274,00	89,41%				
1 Pemenuhan layanan administrasi perkantoran				persen	100,00	100,00	100,00%
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	28.770.000,00	20.300.000,00	70,56%				
1 Pengadaan Rak Arsip				unit	2	2	100,00%
2 Pengadaan filling cabinet				unit	3	3	100,00%
Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	68.051.267,00	66.269.274,00	97,38%				
1 Pengadaan Permainan Edukasi				paket	1	1	100,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	226.272.923,00	207.196.207,00	91,57%				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00%				
1 Layanan surat menyurat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.260.000,00	30.369.537,00	81,51%				
1 Pembayaran Jasa Langganan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	184.812.923,00	172.626.670,00	93,41%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.963.000,00	151.141.282,00	96,91%				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	88.283.000,00	83.461.282,00	94,54%				
1 Layanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas				bulan	12	12	100,00%
2 Layanan Penyediaan BBM Kendaraan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan mebel	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%				
1 Layanan Pemeliharaan meubelair				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	43.180.000,00	43.180.000,00	100,00%				
1 Layanan Pemeliharaan peralatan kerja				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00%				
1 Pemeliharaan Gedung Kantor				tahun	1	1,00	100,00%
2 Pemeliharaan taman				tahun	1	1,00	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	107.382.700,00	106.770.375,00	99,43%				
1 Presentase usulan Kegiatan atau output Kegiatan yang tercantum dalam beritaacara Musrenbang Kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita Acara hasil Musrenbang Kapanewon				%	30,00	57,02	190,08%
2 Persentase pelayanan perijinan selesai tepat waktu				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18.852.700,00	18.852.700,00	100,00%				
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	18.852.700,00	18.852.700,00	100,00%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan				dokumen	7	7	100,00%
2 Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan kapanewon				dokumen	1	1	100,00%
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	88.530.000,00	87.917.675,00	99,31%				
1 Terlaksananya pelayanan perizinan dan administrasi umum				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	-	-	0,00%				
1 Layanan perizinan IMB				bulan	0	0	0,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	-	-	0,00%				
1 Pelayanan administrasi kependudukan				bulan	0	0	0,00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN	254.821.275,00	251.815.425,00	98,82%				
1 Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi				%	30	30	100,00%
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	254.821.275,00	251.815.425,00	98,82%				
1 Terlaksananya pelayanan bidang kesehatan, keagamaan, perempuan dan anak; budaya dan pendidikan							
Sub Kegiatan Sinkronasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	161.483.775,00	161.426.425,00	99,96%				
1 Forum Koordinasi Bidang budaya				kali	25	25	100,00%
2 Forum Koordinasi Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak				kali	2	2	100,00%
3 Forum Koordinasi Bidang Pendidikan				kali	2	2	100,00%
4 Forum Koordinasi Bidang Sosial				kali	4	4	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
5 Forum Koordinasi Kesehatan				kali	4	4	100,00%
6 Forum Korodinasi Bidang Keagamaan				kali	10	10	100,00%
7 Forum Korodinasi Bidang Pemuda dan Olahraga				kali	22	22	100,00%
8 Lomba MTQ tingkat Kecamatan				kali	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	93.337.500,00	90.389.000,00	96,84%				
1 Pelayanan bidang ekonomi				kali	8	8	100,00%
2 Pelayanan bidang fisik				kali	12	12	100,00%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	209.637.375,00	199.915.500,00	95,36%				
1 Cakupan Gangguan Ketentraman dan ketertiban yang di tangani di wilayah Kapanewon				%	100	100	100,00%
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	201.787.500,00	192.080.625,00	95,19%				
1 Terlaksananya koordinasi bulanan forkompim, lap. Pelaksanaan Kegiatan tokoh masyarakat FKUB; Lap. Pelaksanaan patroli terpadu keamanan dan ketertiban masyarakat; pembinaan linmas kapanewon, penyelenggaraan upacara tahun 2022				dokumen		0	#DIV/0!
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	191.438.575,00	171.809.675,00	89,75%				
1 Forkompim kapanewon				bulan	12	12	100,00%
2 Laporan pembinaan linmas				bulan	12	12	100,00%
3 Pemantauan ketentraman dan ketertiban masyarakat				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5.199.800,00	5.199.800,00	100,00%				
Laporan operasi penegakan Perda				dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
<i>Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia</i>	5.199.800,00	5.199.800,00	100,00%				
1 Operasi penegakan peraturan daerah				bulan	12	12	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	125.484.875,00	124.566.675,00	99,27%				
1 Persentase penanganan permasalahan yang terkait ISU SARA				%	100	100	100,00%
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	125.484.875,00	124.566.675,00	99,27%				
1 Laporan Kegiatan pertemuan tokoh masyarakat dan penyelenggaraan upacara				dokumen		0	#DIV/0!
<i>Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	125.484.875,00	124.566.675,00	99,27%				
1 Laporan Forum Kerukunan Umat Beragama				dokumen	1	1	100,00%
2 Laporan Kegiatan Pertemuan Tokoh Kemasyarakatan				dokumen	1	1	100,00%
3 Penyelenggaraan upacara				kali	11	11	100,00%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	120.007.525,00	119.900.625,00	99,91%				
1 Persentase Desa Menetapkan Peraturan DesaTepat Waktu				%	100	100	100,00%
2 Persentase Kalurahan Yang Melaksanakan Siklus Tahunan Tepat Waktu				%	50	100	200,00%
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	120.007.525,00	119.900.625,00	99,91%				
1 Laporan pelaksanaan Kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa							
<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	14.835.000,00	14.806.375,00	99,81%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Laporan Fasilitas Penyusunan Peraturan Kepala Desa Tentang APBDes dan Perubahan APBDes				dokumen	2	2	100,00%
2 Pembinaan penyusunan APBDes dan Perubahan APBDes				kali	2	2	100,00%
3 Pendampingan penyusunan APBDes				desa	7	7	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.749.950,00	5.742.450,00	99,87%				
1 Data Monografi Kecamatan				dokumen	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.074.800,00	11.059.050,00	99,86%				
1 Laporan fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa				dokumen	1	1	100,00%
2 Pembinaan dan pendampingan pengelolaan keuangan desa				kali	1	1	100,00%
3 Pembinaan pengelolaan DD dan ADD				kali	1	1	100,00%
4 Pembinaan pengelolaan aset desa				desa	7	7	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.089.800,00	10.080.575,00	99,91%				
1 Laporan pelaksanaan Kegiatan fasilitas pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa				dokumen	1	1	100,00%
2 Pembinaan dan pengawasan kepala dan perangkat desa				kali	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	63.670.475,00	63.634.975,00	99,94%				
1 Laporan hasil evaluasi kinerja perangkat desa				dokumen	1	1	100,00%
2 Monitoring siklus tahunan desa				desa	7	7	100,00%
3 Pembinaan administrasi pemerintahan desa				kali	7	7	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
4 Pembinaan BPKal				kali	2	2	100,00%
5 Pembinaan LKKal				kali	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.692.550,00	10.689.750,00	99,97%				
1 Forum koordinasi komunitas peduli bencana				kali	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3.894.950,00	3.887.450,00	99,81%				
1 Laporan hasil monitoring dan evaluasi tata guna tanah				dokumen	1	1	100,00%
2 Pendampingan pengelolaan tanah				desa	7	7	100,00%





**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON NGAGLIK
2022**

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
KAPANEWON NGAGLIK	4.785.205.915,00	4.475.550.403,00	93,53%				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	25.750.000,00	25.750.000,00	100,00%				
PROGRAM PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	25.750.000,00	25.750.000,00	100,00%				
1 Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi				even	1	1	100,00%
Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	25.750.000,00	25.750.000,00	100,00%				
Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja	25.750.000,00	25.750.000,00	100,00%				
1 Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur				even	1	1	100,00%
URUSAN SEKRETARIAT DAERAH	30.000.000,00	28.544.500,00	95,15%				
PROGRAM PELYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	30.000.000,00	28.544.500,00	95,15%				
1 Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proposional				%	90,00	90,00	100,00%
Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	30.000.000,00	28.544.500,00	95,15%				
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	30.000.000,00	28.544.500,00	95,15%				
1 Dokumen Usulan Perencanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2024				dokumen	1	1	100,00%
UNSUR KEWILAYAHAN - KECAMATAN	4.729.455.907,00	4.421.255.903,00	93,48%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.015.400.607,00	3.731.944.278,00	92,94%				
1 Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				%	100,00	100,00	100,00%
2 Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	23.508.425,00	23.436.140,00	99,69%				
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.859.725,00	11.855.225,00	99,96%				
1 Dokumen Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen Perubahan Renja				dokumen	1	1	100,00%
4 Dokumen Renja				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.250,00	1.996.950,00	99,84%				
1 Dokumen RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.499.850,00	1.449.450,00	96,64%				
1 Dokumen Perubahan RKA-SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.248.750,00	1.248.750,00	100,00%				
1 Dokumen DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	977.400,00	977.400,00	100,00%				
1 Dokumen Perubahan DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.922.450,00	5.908.365,00	99,76%				
1 Dokumen laporan evaluasi kinerja				dokumen	12	12	100,00%
2 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil				dokumen	5	5	100,00%
3 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan				dokumen	2	2	100,00%
4 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan				dokumen	4	4	100,00%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.079.795.150,00	2.828.435.355,00	91,84%				
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.999.295.500,00	2.750.928.005,00	91,72%				
1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai				bulan	12	12	100,00%
2 Pembayaran iuran BPJS				bulan	12	12	100,00%
3 Pembayaran TPP				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	77.000.000,00	74.007.700,00	96,11%				
1 Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.499.650,00	3.499.650,00	100,00%				
1 Laporan Aset/BMD Semesteran				dokumen	2	2	100,00%
2 Laporan Keuangan Semesteran				dokumen	2	2	100,00%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	218.082.600,00	198.739.395,00	91,13%				
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	218.082.600,00	198.739.395,00	91,13%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Laporan pelaksanaan roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2021				dokumen	1	1	100,00%
2 Layanan administrasi kepegawaian				bulan	12	12	100,00%
3 Pembayaran tenaga Non PNS/ PHL				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	240.050.106,00	238.353.283,00	99,29%				
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.344.215,00	8.342.000,00	99,97%				
1 Penyediaan alat listrik				unit	14	14	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Kantor	139.927.908,00	138.387.000,00	98,90%				
1 Penyediaan peralatan rumah tangga				bulan	12	12	100,00%
2 Alat dapur				buah	5	5	100,00%
3 Alat pendingin (AC)				buah	2	2	100,00%
4 Layar (screen) untuk LCD				buah	2	2	100,00%
5 Meubelair				buah	26	26	100,00%
6 Mixer sound system				buah	1	1	100,00%
7 Printer				buah	1	1	100,00%
8 Scanner				buah	1	1	100,00%
9 Televisi				buah	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.870.183,00	54.829.683,00	99,93%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Alat tulis kantor				paket	1	1	100,00%
2 Layanan penyediaan makanan dan minuman rapat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	10.018.200,00	10.018.200,00	100,00%				
1 Layanan Cetak dan Pengandaan Dokumen				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	-	0,00%				
1 Layanan cetak dan pengandaan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	14.800.000,00	14.731.000,00	0,00%				
1 Makanan dan minuman tamu				bulan	12	12	100,00%
Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5.690.000,00	5.690.000,00	100,00%				
1 Layanan perjalanan dinas dalam daerah				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.999.800,00	1.974.600,00	98,74%				
1 Pengelolaan arsip dan perpustakaan perangkat daerah				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.399.800,00	4.380.800,00	99,57%				
1 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.336.785,00	49.300.000,00	99,93%				
1 Pemenuhan layanan administrasi perkantoran				persen	100,00	100,00	100,00%
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	13.336.785,00	13.300.000,00	99,72%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Kursi lipat				unit	12	12	100,00%
2 Kursi tunggu				buah	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00%				
1 Pengadaan APE				paket	1	1	100,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	234.101.741,00	226.007.605,00	96,54%				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.155.000,00	1.980.000,00	91,88%				
1 Layanan surat menyurat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.620.000,00	43.165.129,00	92,59%				
1 Pembayaran Jasa Langganan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan penyediaan jasa peralaktan dan perlengkapan kantor	7.319.900,00	7.250.000,00	99,05%				
1 Penyediaan jasa setting peralatan				unit	3	3	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	178.006.841,00	173.612.476,00	97,53%				
1 Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.525.800,00	167.672.500,00	98,33%				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	123.123.000,00	120.335.000,00	97,74%				
1 Layanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas				bulan	12	12	100,00%
2 Layanan Penyediaan BBM Kendaraan				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Pemeliharaan mebel	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00%				
1 Layanan Pemeliharaan meubelair				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	30.536.000,00	30.480.000,00	99,82%				
1 Layanan Pemeliharaan peralatan kerja				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.766.800,00	14.757.500,00	99,94%				
1 Pemeliharaan Gedung Kantor				tahun	1	1,00	100,00%
2 Pemeliharaan taman				tahun	1	1,00	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	78.284.925,00	74.599.425,00	95,29%				
1 Presentase usulan Kegiatan atau output Kegiatan yang tercantum dalam beritaacara Musrenbang Kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita Acara hasil Musrenbang Kapanewon				%	30,00	57,02	190,08%
2 Persentase pelayanan perijinan selesai tepat waktu				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	26.509.975,00	22.900.975,00	86,39%				
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	26.509.975,00	22.900.975,00	86,39%				
1 Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan				dokumen	7	7	100,00%
2 Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan kapanewon				dokumen	1	1	100,00%
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	51.774.950,00	51.698.450,00	99,85%				
1 Terlaksananya pelayanan perizinan dan administrasi umum				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	51.774.950,00	51.698.450,00	99,85%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Layanan perizinan IMB				bulan	0	0	0,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	-	-	0,00%				
1 Pelayanan administrasi kependudukan				bulan	12	12	100,00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN	242.582.125,00	242.400.000,00	99,92%				
1 Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi				%	30	30	100,00%
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	242.582.125,00	242.400.000,00	99,92%				
1 Terlaksananya pelayanan bidang kesehatan, keagamaan, perempuan dan anak; budaya dan pendidikan							
Sub Kegiatan Sinkronasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	161.681.650,00	161.656.600,00	99,98%				
1 Forum Koordinasi Bidang budaya				kali	25	25	100,00%
2 Forum Koordinasi Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak				kali	2	2	100,00%
3 Forum Koordinasi Bidang Pendidikan				kali	2	2	100,00%
4 Forum Koordinasi Bidang Sosial				kali	4	4	100,00%
5 Forum Koordinasi Kesehatan				kali	4	4	100,00%
6 Forum Korodinasi Bidang Keagamaan				kali	10	10	100,00%
7 Forum Korodinasi Bidang Pemuda dan Olahraga				kali	22	22	100,00%
8 Lomba MTQ tingkat Kecamatan				kali	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	80.900.475,00	80.743.400,00	99,81%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Pelayanan bidang ekonomi				kali	8	8	100,00%
2 Pelayanan bidang fisik				kali	12	12	100,00%
3 Gebyar UMKM				kali	1	1	100,00%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	196.638.375,00	177.009.475,00	90,02%				
1 Cakupan Gangguan Ketentraman dan ketertiban yang di tangani di wilayah Kapanewon				%	100	100	100,00%
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	191.438.575,00	171.809.675,00	89,75%				
1 Terlaksananya koordinasi bulanan forkompim, lap. Pelaksanaan Kegiatan tokoh masyarakat FKUB; Lap. Pelaksanaan patroli terpadu keamanan dan ketertiban masyarakat; pembinaan linmas kapanewon, penyelenggaraan upacara tahun 2022				dokumen		0	#DIV/0!
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	191.438.575,00	171.809.675,00	89,75%				
1 Forkompim kapanewon				bulan	12	12	100,00%
2 Laporan pembinaan linmas				bulan	12	12	100,00%
3 Pemantauan ketentraman dan ketertiban masyarakat				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5.199.800,00	5.199.800,00	100,00%				
Laporan operasi penegakan Perda				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia	5.199.800,00	5.199.800,00	100,00%				
1 Operasi penegakan peraturan daerah				bulan	12	12	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	125.484.875,00	124.566.675,00	99,27%				
1 Persentase penanganan permasalahan yang terkait ISU SARA				%	100	100	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	125.484.875,00	124.566.675,00	99,27%				
1 Laporan Kegiatan pertemuan tokoh masyarakat dan penyelenggaraan upacara				dokumen	0	0	0,00%
Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	125.484.875,00	124.566.675,00	99,27%				
1 Laporan Forum Kerukunan Umat Beragama				dokumen	1	1	100,00%
2 Laporan Kegiatan Pertemuan Tokoh Kemasyarakatan				dokumen	1	1	100,00%
3 Penyelenggaraan upacara				kali	11	11	100,00%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	71.065.000,00	70.736.050,00	99,54%				
1 Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu				%	100	100	100,00%
2 Persentase Kalurahan Yang Melaksanakan Siklus Tahunan Tepat Waktu				%	50	100	200,00%
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	71.065.000,00	70.736.050,00	99,54%				
1 Laporan pelaksanaan Kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa							
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.799.900,00	5.728.600,00	98,77%				
1 Laporan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Kepala Desa Tentang APBDes dan Perubahan APBDes				dokumen	2	2	100,00%
2 Pembinaan penyusunan APBDes dan Perubahan APBDes				kali	2	2	100,00%
3 Pendampingan penyusunan APBDes				desa	7	7	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Data Monografi Kecamatan				dokumen	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.499.800,00	7.489.000,00	99,86%				
1 Laporan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa				dokumen	1	1	100,00%
2 Pembinaan dan pendampingan pengelolaan keuangan desa				kali	1	1	100,00%
3 Pembinaan pengelolaan DD dan ADD				kali	1	1	100,00%
4 Pembinaan pengelolan aset desa				desa	7	7	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.820.000,00	8.727.000,00	98,95%				
1 Laporan pelaksanaan Kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa				dokumen	1	1	100,00%
2 Pembinaan dan pengawasan kepala dan perangkat desa				kali	1	1	100,00%
Sub kegiatan Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	9.450.000,00	9.403.500,00	99,51%				
1 Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa				dokumen	6	6	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	24.980.500,00	24.883.500,00	99,61%				
1 Laporan hasil evaluasi kinerja perangkat desa				dokumen	1	1	100,00%
2 Monitoring siklus tahunan desa				desa	7	7	100,00%
3 Pembinaan administrasi pemerintahan desa				kali	7	7	100,00%
4 Pembinaan BPKal				kali	2	2	100,00%
5 Pembinaan LKKal				kali	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.175.000,00	7.175.000,00	100,00%				
1 Forum koordinasi komunitas peduli bencana				kali	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3.439.800,00	3.429.450,00	99,70%				
1 Laporan hasil monitoring dan evaluasi tata guna tanah				dokumen	1	1	100,00%
2 Pendampingan pengelolaan tanah				desa	7	7	100,00%





**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON SLEMAN
2022**

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
KAPANEWON SLEMAN	4.625.760.616,00	4.345.577.381,00	93,94%				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	24.250.000,00	24.250.000,00	100,00%				
PROGRAM PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	24.250.000,00	24.250.000,00	100,00%				
1 Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi				even	1	1	100,00%
Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	24.250.000,00	24.250.000,00	100,00%				
Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja	24.250.000,00	24.250.000,00	100,00%				
1 Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur				even	1	1	100,00%
URUSAN SEKRETARIAT DAERAH	28.500.000,00	28.100.000,00	98,60%				
PROGRAM PELYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	28.500.000,00	28.100.000,00	98,60%				
1 Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proposional				%	90,00	90,00	100,00%
Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	28.500.000,00	28.100.000,00	98,60%				
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	28.500.000,00	28.100.000,00	98,60%				
1 Dokumen Usulan Perencanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2024				dokumen	1	1	100,00%
UNSUR KEWILAYAHAN - KECAMATAN	4.573.010.616,00	4.293.227.381,00	93,88%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.824.748.866,00	3.562.782.131,00	93,15%				
1 Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				%	100,00	100,00	100,00%
2 Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	27.755.025,00	27.737.025,00	99,94%				
Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	8.895.150,00	8.895.150,00	100,00%				
1 Dokumen Renja				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen Perubahan Renja				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
4 Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	2.328.600,00	2.322.600,00	99,74%			0	
1 Dokumen RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	2.328.600,00	2.328.600,00	100,00%				
1 Dokumen Perubahan RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen DKA-SKPD	2.283.375,00	2.283.375,00	100,00%				
1 Dokumen DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1.771.800,00	1.771.800,00	100,00%				
1 Dokumen Perubahan DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub jkegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	10.147.500,00	10.135.500,00	99,88%				
1 Dokumen laporan tahunan				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen LKjIP				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen RFK				dokumen	12	12	100,00%
4 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja				dokumen	4	4	100,00%
5 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja				dokumen	4	4	100,00%
6 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja				dokumen	1	1	100,00%
Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	3.257.483.562,00	3.020.915.696,00	92,74%				
Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	3.171.848.562,00	2.937.512.696,00	92,61%				
1 Insentif Retribusi IMB				kali	0	0	0,00%
2 Pembayaran luran BPJS				bulan	12	12	100,00%
3 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai				bulan	12	12	100,00%
4 Pembayaran TPP				bulan	12	12	100,00%
Sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	78.210.000,00	75.990.000,00	97,16%				
1 Pembayaran honorarium pengelola keuangan/barang				bulan	12	12	100,00%
Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / truwulan / semesteran SKPD	7.425.000,00	7.413.000,00	99,84%				
1 Dokumen laporan keuangan				dokumen	2	2	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2 Dokumen laporan Aset/BMD semesteran				dokumen	2	2	100,00%
Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	6.999.825,00	6.981.775,00	99,74%				
Sub kegiatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	6.999.825,00	6.981.775,00	99,74%				
1 Laporan pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi				dokumen	1	1	100,00%
2 Layanan administrasi kepegawaian				dokumen	12	12	100,00%
Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	95.783.581,00	95.372.725,00	99,57%				
Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	2.507.760,00	2.505.000,00	99,89%				
1 Alat listrik				unit	4	4	100,00%
Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	19.791.486,00	19.650.000,00	99,29%				
1 Peralatan dan perlengkapan kantor				unit	3	3	100,00%
Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor	43.359.661,00	43.303.500,00	99,87%				
1 ATK				paket	1	1	100,00%
2 Makan dan Minum Rapat				bulan	12	12	100,00%
Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.097.950,00	5.951.300,00	97,60%				
1 Layanan cetak dan penggandaan				bulan	12	12	100,00%
Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu	11.200.000,00	11.149.800,00	99,55%				
1, Layanan makan minum tamu				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub kegiatan penataan arsip dinamis pada SKPD	11.626.874,00	11.620.775,00	99,95%				
1 Pengelolaan arsip dan perpustakaan				bulan	12	12	100,00%
Sub kegiatan dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD	1.199.850,00	1.192.350,00	99,37%				
1 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah				bulan	12	12	100,00%
2 Pengelolaan website				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	55.625.922,00	55.605.000,00	99,96%				
Sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	55.625.922,00	55.605.000,00	99,96%				
1 Pembangunan Tamana Layak Anak Khusus Kapanewon (Indoor)				paket	1	1	100,00%
2 Pembangunan Tamana Layak Anak Khusus Kapanewon (Outdoor)				paket	1	1	100,00%
Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	224.999.651,00	206.649.912,00	91,84%				
Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	3.180.000,00	3.180.000,00	100,00%				
1 Layanan surat menyurat				bulan	12	12	100,00%
Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan sumber daya listrik	43.380.000,00	31.960.768,00	73,68%				
1 Pembayaran jasa langganan				bulan	12	12	100,00%
Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	178.439.651,00	171.509.144,00	96,12%				
1 Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	156.101.300,00	149.519.998,00	95,78%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	110.671.000,00	107.213.198,00	96,88%				
1 Layanan pemeliharaan kendaraan dinas				bulan	12	12	100,00%
2 Pembelian BBM				bulan	12	12	100,00%
Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	32.956.300,00	29.832.800,00	90,52%				
1 Layanan pemeliharaan peralatan kerja				bulan	12	12	100,00%
Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	12.474.000,00	12.474.000,00	100,00%				
1 Pemeliharaan gedung kantor				unit	1	1	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	121.541.925,00	116.335.425,00	95,72%				
1 Persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam berita acara musrenbang kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita acara hasil musrenbang kapanewon				%	30,00	30,00	100,00%
2 Persentase pelayanan perizinan selesai tepat waktu.				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	27.579.925,00	24.279.925,00	88,03%				
Sub kegiatan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	27.579.925,00	24.279.925,00	88,03%				
1 Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa				dokumen	5	5	100,00%
2 Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan				dokumen	1	1	100,00%
Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	93.962.000,00	92.055.500,00	97,97%				
Sub kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	0,00	0,00	0,00%				
1 Layanan Perijinan IMB				bulan	0	0	0,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan	93.962.000,00	92.055.500,00	97,97%				
1 Layanan administrasi kependudukan				bulan	12	12	100,00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	260.261.975,00	259.975.575,00	99,89%				
1 Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi				%	30	30	100,00%
Kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	260.261.975,00	259.975.575,00	99,89%				
Sub kegiatan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	135.162.100,00	134.893.800,00	99,80%				
1 Forum koordinasi bidang keagamaan				kali	2	2	100,00%
2 Forum koordinasi bidang budaya				kali	6	6	100,00%
3 Forum koordinasi bidang kesehatan				kali	4	4	100,00%
4 Forum koordinasi bidang pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak				kali	12	12	100,00%
5 Forum koordinasi bidang pemuda dan olahraga				kali	2	2	100,00%
6 Forum koordinasi bidang pendidikan				kali	1	1	100,00%
7 Forum koordinasi bidang sosial				kali	32	32	100,00%
8 Lomba MTQ tingkat kecamatan				kali	1	1	100,00%
Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	125.099.875,00	125.081.775,00	99,99%				
1 Forum koordinasi bidang ekonomi				kali	12	12	100,00%
2 Forum koordinasi bidang fisik				kali	3	3	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	154.475.000,00	145.204.500,00	94,00%				
1 Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon				%	100	100	100,00%
Kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	149.300.000,00	140.029.500,00	93,79%				
<i>Sub kegiatan sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan</i>	<i>149.300.000,00</i>	<i>140.029.500,00</i>	<i>93,79%</i>				
1 Forkompimkap				bulan	12	12	100,00%
2 Pemantauan ketentraman dan ketertiban masyarakat				bulan	12	12	100,00%
3 Laporan pembinaan linmas				dokumen	1	1	100,00%
Kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	5.175.000,00	5.175.000,00	100,00%				
<i>Sub kegiatan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Republik Indonesia</i>	<i>5.175.000,00</i>	<i>5.175.000,00</i>	<i>100,00%</i>				
1 Operasi penegakan Perda				kali	6	6	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	124.299.575,00	121.309.475,00	97,59%				
1 Persentase penanganan permasalahan yang terkait isu SARA				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	124.299.575,00	121.309.475,00	97,59%				
<i>Sub kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia</i>	<i>124.299.575,00</i>	<i>121.309.475,00</i>	<i>97,59%</i>				
1 Penyelenggaraan upacara				bulan	12	9	75,00%
2 Laporan Forum Kerukunan Umat Beragama				dokumen	1	1	100,00%
3 Laporan kegiatan pertemuan tokoh masyarakat				dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	87.683.275,00	87.620.275,00	99,93%				
1 Persentase kalurahan menetapkan peraturan desa tepat waktu				%	50,00	100,00	200,00%
2 Persentase kalurahan yang melaksanakan siklus tahunan tepat waktu				%	50,00	100,00	200,00%
Kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	87.683.275,00	87.620.275,00	99,93%				
Sub kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	11.626.750,00	11.617.750,00	99,92%				
1 Evaluasi Raperdes Perubahan APBDes				desa	5	5	100,00%
2 Laporan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa				dokumen	1	1	100,00%
3 Bimtek penatausahaan APBDes, Perubahan APBDes				kali	1	1	100,00%
4 Pembinaan produk hukum desa				kali	1	1	100,00%
5 Pembinaan siklus tahunan desa				kali	2	2	100,00%
Sub kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	3.198.600,00	3.198.600,00	100,00%				
1 Dokumen data monografi kecamatan				dokumen	1	1	100,00%
Sub kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	12.396.850,00	12.396.850,00	100,00%				
1 Bimtek pengelolaan keuangan desa				kali	2	2	100,00%
2 Laporan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa				dokumen	1	1	100,00%
3 Pemantauan monitoring DD dan ADD				desa	5	5	100,00%
4 Pembinaan administrasi keuangan desa				kali	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
5 Pembinaan DD dan ADD				kali	1	1	100,00%
6 Pendampingan pengelolaan aset desa				desa	5	5	100,00%
Sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	14.057.300,00	14.052.800,00	99,97%				
1 Laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa				dokumen	1	1	100,00%
2 Pembinaan dukuh				kali	1	1	100,00%
3 Pembinaan perangkat desa				kali	1	1	100,00%
4 Pengisian perangkat desa				kali	1	1	100,00%
Sub kegiatan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	34.112.425,00	34.062.925,00	99,85%				
1 Pembinaan BPD				kali	2	2	100,00%
2 Pembinaan LKD				kali	1	1	100,00%
3 Laporan hasil evaluasi kinerja perangkat desa				dokumen	1	1	100,00%
4 Bimtek administrasi pemerintahan desa				kali	2	2	100,00%
Sub kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	9.660.000,00	9.660.000,00	100,00%				
1 Pemantauan wilayah bencana				kali	12	12	100,00%
Sub kegiatan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa	2.631.350,00	2.631.350,00	100,00%				
1 Laporan hasil moev tata guna tanah				dokumen	1	1	100,00%
2 Pendampingan pengelolaan tanah				desa	5	5	100,00%







**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON TEMPEL
2022**

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
KAPANEWON TEMPEL	4.190.298.359,00	3.999.655.746,00	95,45%				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	29.500.000,00	29.500.000,00	100,00%				
PROGRAM PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	29.500.000,00	29.500.000,00	100,00%				
1 Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi				even	1	1	100,00%
Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	29.500.000,00	29.500.000,00	100,00%				
Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja	29.500.000,00	29.500.000,00	100,00%				
1 Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur				even	1	1	100,00%
URUSAN SEKRETARIAT DAERAH	30.000.000,00	28.440.000,00	94,80%				
PROGRAM PELYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	30.000.000,00	28.440.000,00	94,80%				
1 Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proposional				%	90,00	90,00	100,00%
Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	30.000.000,00	28.440.000,00	94,80%				
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	30.000.000,00	28.440.000,00	94,80%				
1 Dokumen Usulan Perencanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2024				dokumen	1	1	100,00%
UNSUR KEWILAYAHAN - KECAMATAN	3.919.837.461,00	3.744.806.196,00	95,53%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.343.395.056,00	3.175.297.136,00	94,97%				
1 Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				%	100,00	100,00	100,00%
2 Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	31.299.492,00	31.286.200,00	99,96%				
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.710.848,00	17.703.300,00	99,96%				
1 Dokumen Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen Perubahan Renja				dokumen	1	1	100,00%
4 Dokumen Renja				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	739.778,00	739.575,00	99,97%				
1 Dokumen RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	739.778,00	739.575,00	99,97%				
1 Dokumen Perubahan RKA-SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	813.780,00	813.600,00	99,98%				
1 Dokumen DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	887.783,00	887.625,00	99,98%				
1 Dokumen Perubahan DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.407.525,00	10.402.525,00	99,95%				
1 Dokumen laporan evaluasi kinerja				dokumen	12	12	100,00%
2 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil				dokumen	5	5	100,00%
3 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan				dokumen	2	2	100,00%
4 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan				dokumen	4	4	100,00%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.720.455.962,00	2.558.554.266,00	94,05%				
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.620.826.795,00	2.458.932.916,00	93,82%				
1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai				bulan	12	12	100,00%
2 Pembayaran luran BPJS				bulan	12	12	100,00%
3 Pembayaran TPP				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	75.565.000,00	75.564.975,00	100,00%				
1 Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24.064.167,00	24.056.375,00	99,97%				
1 Laporan Aset/BMD Semesteran				dokumen	2	2	100,00%
2 Laporan Keuangan Semesteran				dokumen	2	2	100,00%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	152.992.400,00	149.727.596,00	97,87%				
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	152.992.400,00	149.727.596,00	97,87%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Laporan pelaksanaan roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2021				dokumen	1	1	100,00%
2 Layanan administrasi kepegawaian				bulan	12	12	100,00%
3 Pembayaran tenaga Non PNS/ PHL				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	158.937.105,00	157.262.250,00	98,95%				
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.753.550,00	17.741.850,00	99,93%				
1 Penyediaan alat listrik				unit	14	14	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Kantor	46.975.000,00	45.313.225,00	96,46%				
1 Penyediaan peralatan rumah tangga				bulan	12	12	100,00%
2 Alat dapur				buah	5	5	100,00%
3 Alat pendingin (AC)				buah	2	2	100,00%
4 Layar (screen) untuk LCD				buah	2	2	100,00%
5 Meubelair				buah	26	26	100,00%
6 Mixer sound system				buah	1	1	100,00%
7 Printer				buah	1	1	100,00%
8 Scanner				buah	1	1	100,00%
9 Televisi				buah	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.802.818,00	63.801.650,00	100,00%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Alat tulis kantor				paket	1	1	100,00%
2 Layanan penyediaan makanan dan minuman rapat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.782.737,00	7.782.625,00	100,00%				
1 Layanan Cetak dan Penggandaan Dokumen				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	14.623.000,00	14.623.000,00	100,00%				
1 Makanan dan minuman tamu				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.000.000,00	3.999.925,00	100,00%				
1 Pengelolaan arsip dan perpustakaan perangkat daerah				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.000.000,00	3.999.975,00	100,00%				
1 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.850.000,00	48.262.183,00	98,80%				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	990.000,00	990.000,00	100,00%				
1 Layanan surat menyurat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.500.000,00	39.922.183,00	98,57%				
1 Pembayaran Jasa Langganan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.360.000,00	7.350.000,00	99,86%				
1 Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	230.860.097,00	230.204.641,00	99,72%				
<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan</i>	106.893.000,00	106.854.666,00	99,96%				
1 Layanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas				bulan	12	12	100,00%
2 Layanan Penyediaan BBM Kendaraan				bulan	12	12	100,00%
<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan mebel</i>	2.495.097,00	2.494.975,00	100,00%				
1 Layanan Pemeliharaan meubelair				bulan	12	12	100,00%
<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya</i>	40.122.000,00	40.055.000,00	99,83%				
1 Layanan Pemeliharaan peralatan kerja				bulan	12	12	100,00%
<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	81.350.000,00	80.800.000,00	99,32%				
1 Pemeliharaan Gedung Kantor				tahun	1	1,00	100,00%
2 Pemeliharaan taman				tahun	1	1,00	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	115.289.795,00	109.940.385,00	95,36%				
1 Presentase usulan Kegiatan atau output Kegiatan yang tercantum dalam beritaacara Musrenbang Kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita Acara hasil Musrenbang Kapanewon				%	30,00	57,02	190,08%
2 Persentase pelayanan perijinan selesai tepat waktu				%	100,00	100,00	100,00%
<i>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	36.624.965,00	35.198.850,00	96,11%				
<i>Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait</i>	36.624.965,00	35.198.850,00	96,11%				
1 Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan				dokumen	7	7	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2 Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan kapanewon				dokumen	1	1	100,00%
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	78.664.830,00	74.741.535,00	95,01%				
1 Terlaksananya pelayanan perizinan dan administrasi umum				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	-	-					
1 Layanan perizinan IMB				bulan	0	0	0,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	78.664.830,00	74.741.535,00	95,01%				
1 Pelayanan administrasi kependudukan				bulan	12	12	100,00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN	132.859.900,00	132.858.100,00	100,00%				
1 Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi				%	30	30	100,00%
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	132.859.900,00	132.858.100,00	100,00%				
1 Terlaksananya pelayanan bidang kesehatan, keagamaan, perempuan dan anak; budaya dan pendidikan							
Sub Kegiatan Sinkronasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	132.859.900,00	132.858.100,00	100,00%				
1 Forum Koordinasi Bidang budaya				kali	7	7	100,00%
2 Forum Koordinasi Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak				kali	24	24	100,00%
3 Forum Koordinasi Bidang Pendidikan				kali	2	2	100,00%
4 Forum Koordinasi Bidang Sosial				kali	5	5	100,00%
5 Forum Koordinasi Kesehatan				kali	4	4	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
6 Forum Korodinasi Bidang Keagamaan				kali	10	10	100,00%
7 Forum Korodinasi Bidang Pemuda dan Olahraga				kali	2	2	100,00%
8 Lomba MTQ tingkat Kecamatan				kali	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	82.609.828,00	82.528.700,00	99,90%				
1 Pelayanan bidang ekonomi				kali	8	8	100,00%
2 Pelayanan bidang fisik				kali	12	12	100,00%
3 Gebyar UMKM				kali	1	1	100,00%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	196.569.665,00	195.057.525,00	99,23%				
1 Cakupan Gangguan Ketentraman dan ketertiban yang di tangani di wilayah Kapanewon				%	100	100	100,00%
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	119.514.755,00	118.005.300,00	98,74%				
1 Terlaksananya koordinasi bulanan forkompim, lap. Pelaksanaan Kegiatan tokoh masyarakat FKUB; Lap. Pelaksanaan patroli terpadu keamanan dan ketertiban masyarakat; pembinaan linmas kapanewon, penyelenggaraan upacara tahun 2022				dokumen		0	#DIV/0!
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	119.514.755,00	118.005.300,00	98,74%				
1 Forkompim kapanewon				bulan	12	12	100,00%
2 Laporan pembinaan linmas				bulan	12	12	100,00%
3 Pemantauan ketentraman dan ketertiban masyarakat				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	7.745.980,00	7.702.875,00	99,44%				
Laporan operasi penegakan Perda				dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
<i>Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia</i>	7.745.980,00	7.702.875,00	99,44%				
1 Operasi penegakan peraturan daerah				bulan	12	12	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	77.054.910,00	77.052.225,00	100,00%				
1 Persentase penanganan permasalahan yang terkait ISU SARA				%	100	100	100,00%
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	77.054.910,00	77.052.225,00	100,00%				
1 Laporan Kegiatan pertemuan tokoh masyarakat dan penyelenggaraan upacara				dokumen		0	#DIV/0!
<i>Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	77.054.910,00	77.052.225,00	100,00%				
1 Laporan Forum Kerukunan Umat Beragama				dokumen	1	1	100,00%
2 Laporan Kegiatan Pertemuan Tokoh Kemasyarakatan				dokumen	1	1	100,00%
3 Penyelenggaraan upacara				kali	11	11	100,00%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	54.668.135,00	54.600.825,00	99,88%				
1 Persentase Desa Menetapkan Peraturan DesaTepat Waktu				%	100	100	100,00%
2 Persentase Kalurahan Yang Melaksanakan Siklus Tahunan Tepat Waktu				%	50	100	200,00%
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	54.668.135,00	54.600.825,00	99,88%				
1 Laporan pelaksanaan Kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa							
<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	1.424.940,00	1.424.775,00	99,99%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Laporan Fasilitas Penyusunan Peraturan Kepala Desa Tentang APBDes dan Perubahan APBDes				dokumen	2	2	100,00%
2 Pembinaan penyusunan APBDes dan Perubahan APBDes				kali	2	2	100,00%
3 Pendampingan penyusunan APBDes				desa	7	7	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.438.959,00	3.438.925,00	100,00%				
1 Data Monografi Kecamatan				dokumen	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.719.930,00	6.718.825,00	99,98%				
1 Laporan fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa				dokumen	1	1	100,00%
2 Pembinaan dan pendampingan pengelolaan keuangan desa				kali	1	1	100,00%
3 Pembinaan pengelolaan DD dan ADD				kali	1	1	100,00%
4 Pembinaan pengelolaan aset desa				desa	7	7	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.420.480,00	17.390.475,00	99,83%				
1 Laporan pelaksanaan Kegiatan fasilitas pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa				dokumen	1	1	100,00%
2 Pembinaan dan pengawasan kepala dan perangkat desa				kali	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	15.613.923,00	15.613.200,00	100,00%				
1 Laporan hasil evaluasi kinerja perangkat desa				dokumen	1	1	100,00%
2 Monitoring siklus tahunan desa				desa	7	7	100,00%
3 Pembinaan administrasi pemerintahan desa				kali	7	7	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
4 Pembinaan BPKal				kali	2	2	100,00%
5 Pembinaan LKKal				kali	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.049.903,00	10.014.625,00	99,65%				
1 Forum koordinasi komunitas peduli bencana				kali	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	-	0,00%				
1 Laporan hasil monitoring dan evaluasi tata guna tanah				dokumen	1	1	100,00%
2 Pendampingan pengelolaan tanah				desa	7	7	100,00%





**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON TURI
2022**

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
KAPANEWON TURI	4.350.844.676,00	4.322.921.999,00	99,36%				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00%				
PROGRAM PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00%				
1 Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi				even	1	1	100,00%
Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00%				
Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00%				
1 Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur				even	1	1	100,00%
URUSAN SEKRETARIAT DAERAH	28.400.000,00	27.000.000,00	95,07%				
PROGRAM PELYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	28.400.000,00	27.000.000,00	95,07%				
1 Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proposional				%	90,00	90,00	100,00%
Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	28.400.000,00	27.000.000,00	95,07%				
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	28.400.000,00	27.000.000,00	95,07%				
1 Dokumen Usulan Perencanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2024				dokumen	1	1	100,00%
UNSUR KEWILAYAHAN - KECAMATAN	4.305.944.676,00	4.279.421.999,00	99,38%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.613.661.246,00	3.599.327.869,00	99,60%				
1 Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				%	100,00	100,00	100,00%
2 Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	34.929.750,00	34.864.500,00	99,81%				
Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	19.148.175,00	19.121.925,00	99,86%				
1 Dokumen Renja				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen Perubahan Renja				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
4 Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	450.000,00	450.000,00	100,00%			0	
1 Dokumen RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	450.000,00	450.000,00	100,00%				
1 Dokumen Perubahan RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen DKA-SKPD	2.252.700,00	2.248.200,00	99,80%				
1 Dokumen DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1.350.000,00	1.345.500,00	99,67%				
1 Dokumen Perubahan DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub jkegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	11.278.875,00	11.248.875,00	99,73%				
1 Dokumen laporan tahunan				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen LKjIP				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen RFK				dokumen	12	12	100,00%
4 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja				dokumen	4	4	100,00%
5 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja				dokumen	4	4	100,00%
6 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja				dokumen	1	1	100,00%
Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	2.985.283.933,00	2.997.060.382,00	100,39%				
Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.900.793.933,00	2.913.432.682,00	100,44%				
1 Insentif Retribusi IMB				kali	0	0	0,00%
2 Pembayaran luran BPJS				bulan	12	12	100,00%
3 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai				bulan	12	12	100,00%
4 Pembayaran TPP				bulan	12	12	100,00%
Sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	77.740.000,00	76.913.700,00	98,94%				
1 Pembayaran honorarium pengelola keuangan/barang				bulan	12	12	100,00%
Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / truwulan / semesteran SKPD	6.750.000,00	6.714.000,00	99,47%				
1 Dokumen laporan keuangan				dokumen	2	2	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2 Dokumen laporan Aset/BMD semesteran				dokumen	2	2	100,00%
Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	14.100.000,00	14.049.000,00	99,64%				
Sub kegiatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	11.100.000,00	11.056.500,00	99,61%				
1 Laporan pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi				dokumen	1	1	100,00%
2 Layanan administrasi kepegawaian				dokumen	12	12	100,00%
Sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	3.000.000,00	2.992.500,00	99,75%				
1 Sosialisasi perundang-undangan				kali	4	4	100,00%
Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	114.449.920,00	114.199.420,00	99,78%				
Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	4.306.896,00	4.306.896,00	100,00%				
1 Alat listrik				unit	14	14	100,00%
Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	27.400.000,00	27.400.000,00	100,00%				
1 Peralatan dan perlengkapan kantor				paket	3	3	100,00%
Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor	59.066.126,00	58.849.626,00	99,63%				
1 ATK				paket	1	1	100,00%
2 Makan dan Minum Rapat				bulan	12	12	100,00%
Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.176.955,00	3.176.955,00	100,00%				
1 Layanan cetak dan penggandaan				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu	13.390.000,00	13.363.500,00	99,80%				
1, Layanan makan minum tamu				bulan	12	12	100,00%
Sub kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1.960.000,00	1.960.000,00	100,00%				
1, Layanan perjalanan dinas dalam daerah				bulan	12	12	100,00%
Sub kegiatan penataan arsip dinamis pada SKPD	3.049.943,00	3.049.943,00	100,00%				
1 Pengelolaan arsip dan perpustakaan				bulan	12	12	100,00%
Sub kegiatan dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD	2.100.000,00	2.092.500,00	99,64%				
1 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah				bulan	12	12	100,00%
2 Pengelolaan website				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	7.021.890,00	7.021.890,00	100,00%				
Sub kegiatan pengadaan mebel	7.021.890,00	7.021.890,00	100,00%				
1 Interior kantor				paket	1	1	100,00%
Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	248.777.299,00	226.400.323,00	91,01%				
Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	6.450.000,00	5.820.000,00	90,23%				
1 Layanan surat menyurat				bulan	12	12	100,00%
Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan sumber daya listrik	38.700.000,00	28.385.499,00	73,35%				
1 Pembayaran jasa langganan				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
<i>Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor</i>	203.627.299,00	192.194.824,00	94,39%				
1 Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	209.098.454,00	205.732.354,00	98,39%				
<i>Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan</i>	151.883.000,00	148.516.900,00	97,78%				
1 Layanan pemeliharaan kendaraan dinas				bulan	12	12	100,00%
2 Pembelian BBM				bulan	12	12	100,00%
<i>Sub kegiatan pemeliharaan mebel</i>	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00%				
1 Layanan pemeliharaan mebel				bulan	12	12	100,00%
<i>Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</i>	23.915.454,00	23.915.454,00	100,00%				
1 Layanan pemeliharaan peralatan kerja				bulan	12	12	100,00%
<i>Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya</i>	29.100.000,00	29.100.000,00	100,00%				
1 Pemeliharaan gedung kantor				unit	1	1	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	68.638.400,00	66.158.000,00	96,39%				
1 Persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam berita acara musrenbang kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita acara hasil musrenbang kapanewon				%	30,00	30,00	100,00%
2 Persentase pelayanan perizinan selesai tepat waktu.				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	36.638.400,00	34.408.000,00	93,91%				
<i>Sub kegiatan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait</i>	36.638.400,00	34.408.000,00	93,91%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa				dokumen	5	5	100,00%
2 Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan				dokumen	1	1	100,00%
Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	32.000.000,00	31.750.000,00	99,22%				
Sub kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00%				
1 Layanan Perijinan IMB				bulan	12	12	0,00%
Sub kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan	28.800.000,00	28.550.000,00	99,13%				
1 Layanan administrasi kependudukan				bulan	12	12	100,00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	279.932.280,00	279.359.980,00	99,80%				
1 Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi				%	30	30	100,00%
Kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	279.932.280,00	279.359.980,00	99,80%				
Sub kegiatan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	170.132.000,00	169.822.100,00	99,82%				
1 Forum koordinasi bidang keagamaan				kali	4	4	100,00%
2 Forum koordinasi bidang budaya				kali	3	3	100,00%
3 Forum koordinasi bidang kesehatan				kali	1	1	100,00%
4 Forum koordinasi bidang pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak				kali	9	9	100,00%
5 Forum koordinasi bidang pemuda dan olahraga				kali	2	2	100,00%
6 Forum koordinasi bidang pendidikan				kali	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
7 Forum koordinasi bidang sosial				kali	11	11	100,00%
8 Lomba MTQ tingkat kecamatan				kali	1	1	100,00%
Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	109.800.280,00	109.537.880,00	99,76%				
1 Forum koordinasi bidang ekonomi				kali	26	26	100,00%
2 Forum koordinasi bidang fisik				kali	20	20	100,00%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	179.634.000,00	171.924.500,00	95,71%				
1 Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon				%	100	100	100,00%
Kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	174.679.000,00	166.980.750,00	95,59%				
Sub kegiatan sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	174.679.000,00	166.980.750,00	95,59%				
1 Forkompimkap				bulan	12	12	100,00%
2 Pemantauan ketentraman dan ketertiban masyarakat				bulan	12	12	100,00%
3 Laporan pembinaan linmas				dokumen	1	1	100,00%
Kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	4.955.000,00	4.943.750,00	99,77%				
Sub kegiatan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Republik Indonesia	4.955.000,00	4.943.750,00	99,77%				
1 Operasi penegakan Perda				bulan	12	12	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	70.100.000,00	68.935.250,00	98,34%				
1 Persentase penanganan permasalahan yang terkait isu SARA				%	100,00	100,00	100,00%



URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	70.100.000,00	68.935.250,00	98,34%				
<i>Sub kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia</i>	70.100.000,00	68.935.250,00	98,34%				
1 Penyelenggaraan upacara				bulan	12	9	75,00%
2 Laporan Forum Kerukunan Umat Beragama				dokumen	1	1	100,00%
3 Laporan kegiatan pertemuan tokoh masyarakat				dokumen	1	1	100,00%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	93.978.750,00	93.716.400,00	99,72%				
1 Persentase kalurahan menetapkan peraturan desa tepat waktu				%	50,00	100,00	200,00%
2 Persentase kalurahan yang melaksanakan siklus tahunan tepat waktu				%	50,00	100,00	200,00%
Kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	93.978.750,00	93.716.400,00	99,72%				
<i>Sub kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa</i>	<i>5.595.000,00</i>	<i>5.551.200,00</i>	<i>99,22%</i>				
1 Evaluasi Raperdes Perubahan APBDes				desa	5	5	100,00%
2 Laporan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa				dokumen	1	1	100,00%
3 Bimtek penatausahaan APBDes, Perubahan APBDes				kali	1	1	100,00%
4 Pembinaan produk hukum desa				kali	1	1	100,00%
5 Pembinaan siklus tahunan desa				kali	1	1	100,00%
<i>Sub kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa</i>	<i>12.090.000,00</i>	<i>12.078.400,00</i>	<i>99,90%</i>				



URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Dokumen data monografi kecamatan				dokumen	1	2	200,00%
Sub kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	8.370.000,00	8.321.700,00	99,42%				
1 Laporan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa				dokumen	1	1	100,00%
2 Pembinaan aset desa				dokumen	1	1	100,00%
3 Pembinaan dan pendampingan pengelolaan keuangan desa				kali	2	2	100,00%
4 Pembinaan dan pengelolaan DD dan ADD				kali	1	1	100,00%
Sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	42.340.000,00	42.231.150,00	99,74%				
1 Laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa				dokumen	1	1	100,00%
2 Pembinaan dan pengawasan kepala dan perangkat desa				kali	2	2	100,00%
Sub kegiatan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	6.652.500,00	6.623.100,00	99,56%				
1 Pembinaan BPD				kali	1	1	100,00%
2 Pembinaan LKD				kali	1	1	100,00%
3 Laporan hasil evaluasi kinerja perangkat desa				dokumen	1	1	100,00%
4 Bimtek administrasi pemerintahan desa				kali	1	1	100,00%
Sub kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	12.150.000,00	12.150.000,00	100,00%				
1 Pemantauan wilayah bencana				kali	12	12	100,00%
Sub kegiatan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa	6.781.250,00	6.760.850,00	99,70%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Laporan hasil moev tata guna tanah				dokumen	4	4	100,00%
2 Pendampingan pengelolaan tanah				kalurahan	4	4	100,00%





**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON PAKEM
2022**

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
KAPANEWON PAKEM	4.452.002.905,00	4.123.310.649,00	92,62%				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	18.750.000,00	18.729.900,00	99,89%				
PROGRAM PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	18.750.000,00	18.729.900,00	99,89%				
1 Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi				even	1	1	100,00%
Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	18.750.000,00	18.729.900,00	99,89%				
Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja	18.750.000,00	18.729.900,00	99,89%				
1 Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur				even	1	1	100,00%
URUSAN SEKRETARIAT DAERAH	28.500.000,00	27.100.000,00	95,09%				
PROGRAM PELYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	28.500.000,00	27.100.000,00	95,09%				
1 Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proposional				%	90,00	90,00	100,00%
Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	28.500.000,00	27.100.000,00	95,09%				
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	28.500.000,00	27.100.000,00	95,09%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Dokumen Usulan Perencanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2024				dokumen	1	1	100,00%
UNSUR KEWILAYAHAN - KECAMATAN	4.404.752.905,00	4.073.480.748,00	92,48%				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.730.564.305,00	3.422.337.391,00	91,74%				
1 Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				%	100,00	100,00	100,00%
2 Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	37.149.100,00	37.062.800,00	99,77%				
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.999.425,00	17.953.625,00	99,75%				
1 Dokumen Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen Perubahan Renja				dokumen	1	1	100,00%
4 Dokumen Renja				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.194.950,00	2.194.950,00	100,00%				
1 Dokumen RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.388.150,00	2.388.150,00	100,00%				
1 Dokumen Perubahan RKA-SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.341.950,00	2.328.750,00	99,44%				
1 Dokumen DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.817.250,00	1.817.250,00	100,00%				
1 Dokumen Perubahan DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.407.375,00	10.380.075,00	99,74%				
1 Dokumen laporan evaluasi kinerja				dokumen	12	12	100,00%
2 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil				dokumen	5	5	100,00%
3 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan				dokumen	2	2	100,00%
4 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan				dokumen	4	4	100,00%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.164.598.681,00	2.865.595.581,00	90,55%				
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.080.153.706,00	2.781.647.606,00	90,31%				
1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai				bulan	12	12	100,00%
2 Pembayaran iuran BPJS				bulan	12	12	100,00%
3 Pembayaran TPP				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	76.040.000,00	75.570.000,00	99,38%				
1 Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8.404.975,00	8.377.975,00	99,68%				
1 Laporan Aset/BMD Semesteran				dokumen	2	2	100,00%
2 Laporan Keuangan Semesteran				dokumen	2	2	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.019.925,00	7.952.325,00	99,16%				
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	8.019.925,00	7.952.325,00	99,16%				
1 Laporan pelaksanaan roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2021				dokumen	1	1	100,00%
2 Layanan administrasi kepegawaian				bulan	12	12	100,00%
3 Pembayaran tenaga Non PNS/ PHL				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	174.383.188,00	168.866.667,00	96,84%				
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.283.892,00	7.283.892,00	100,00%				
1 Penyediaan alat listrik				unit	14	14	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Kantor	81.191.421,00	75.870.000,00	93,45%				
1 Penyediaan peralatan rumah tangga				bulan	12	12	100,00%
2 Alat dapur				buah	5	5	100,00%
3 Alat pendingin (AC)				buah	2	2	100,00%
4 Layar (screen) untuk LCD				buah	2	2	100,00%
5 Meubelair				buah	26	26	100,00%
6 Mixer sound system				buah	1	1	100,00%
7 Printer				buah	1	1	100,00%
8 Scanner				buah	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
9 Televisi				buah	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.351.345,00	41.305.345,00	99,89%				
1 Alat tulis kantor				paket	1	1	100,00%
2 Layanan penyediaan makanan dan minuman rapat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.432.930,00	6.317.430,00	98,20%				
1 Layanan Cetak dan Penggandaan Dokumen				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	11.200.000,00	11.175.000,00	99,78%				
1 Makanan dan minuman tamu				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	16.750.000,00	16.750.000,00	100,00%				
1 Layanan perjalanan dinas dalam daerah				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.973.750,00	8.965.150,00	99,90%				
1 Pengelolaan arsip dan perpustakaan perangkat daerah				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.199.850,00	1.199.850,00	100,00%				
1 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.337.911,00	169.861.390,00	97,99%				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.650.000,00	3.646.275,00	99,90%				
1 Layanan surat menyurat				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.360.000,00	18.139.967,00	89,10%				
1 Pembayaran Jasa Langganan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	149.327.911,00	148.075.148,00	99,16%				
1 Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.075.500,00	172.998.628,00	99,96%				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	89.275.500,00	89.264.628,00	99,99%				
1 Layanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas				bulan	12	12	100,00%
2 Layanan Penyediaan BBM Kendaraan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan mebel	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%				
1 Layanan Pemeliharaan meubelair				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	40.800.000,00	40.740.000,00	99,85%				
1 Layanan Pemeliharaan peralatan kerja				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000,00	39.994.000,00	99,99%				
1 Pemeliharaan Gedung Kantor				tahun	1	1,00	100,00%
2 Pemeliharaan taman				tahun	1	1,00	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	124.646.400,00	116.866.414,00	93,76%				
1 Presentase usulan Kegiatan atau output Kegiatan yang tercantum dalam beritaacara Musrenbang Kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita Acara hasil Musrenbang Kapanewon				%	30,00	57,02	190,08%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2 Persentase pelayanan perijinan selesai tepat waktu				%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	27.560.000,00	19.929.900,00	72,31%				
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	27.560.000,00	19.929.900,00	72,31%				
1 Dokumen hasil musyawarah perencanaaan pembangunan kalurahan				dokumen	7	7	100,00%
2 Dokumen hasil musyawarah perencanaaan pembangunan kapanewon				dokumen	1	1	100,00%
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	97.086.400,00	96.936.514,00	99,85%				
1 Terlaksananya pelayanan perizinan dan administrasi umum				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	-	-	0,00%				
1 Layanan perizinan IMB				bulan	0	0	0,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	97.086.400,00	96.936.514,00	99,85%				
1 Pelayanan administrasi kependudukan				bulan	12	12	100,00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN	209.957.550,00	209.829.719,00	99,94%				
1 Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi				%	30	30	100,00%
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	209.957.550,00	209.829.719,00	99,94%				
1 Terlaksananya pelayanan bidang kesehatan, keagamaan, perempuan dan anak; budaya dan pendidikan							
Sub Kegiatan Sinkronasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	124.375.000,00	124.324.500,00	99,96%				
1 Forum Koordinasi Bidang budaya				kali	7	7	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2 Forum Koordinasi Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak				kali	24	24	100,00%
3 Forum Koordinasi Bidang Pendidikan				kali	2	2	100,00%
4 Forum Koordinasi Bidang Sosial				kali	5	5	100,00%
5 Forum Koordinasi Kesehatan				kali	4	4	100,00%
6 Forum Korodinasi Bidang Keagamaan				kali	10	10	100,00%
7 Forum Korodinasi Bidang Pemuda dan Olahraga				kali	2	2	100,00%
8 Lomba MTQ tingkat Kecamatan				kali	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	85.582.550,00	85.505.219,00	99,91%				
1 Pelayanan bidang ekonomi				kali	8	8	100,00%
2 Pelayanan bidang fisik				kali	12	12	100,00%
3 Gebyar UMKM				kali	1	1	100,00%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	147.947.800,00	134.209.800,00	90,71%				
1 Cakupan Gangguan Ketentraman dan ketertiban yang di tangani di wilayah Kapanewon				%	100	100	100,00%
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	143.742.875,00	130.014.875,00	90,45%				
1 Terlaksananya koordinasi bulanan forkompim, lap. Pelaksanaan Kegiatan tokoh masyarakat FKUB; Lap. Pelaksanaan patroli terpadu keamanan dan ketertiban masyarakat; pembinaan linmas kapanewon, penyelenggaraan upacara tahun 2022				%	100,00	100,00	100,00%
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	143.742.875,00	130.014.875,00	90,45%				
1 Forkompim kapanewon				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2 Laporan pembinaan linmas				bulan	12	12	100,00%
3 Pemantauan ketentraman dan ketertiban masyarakat				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4.204.925,00	4.194.925,00	99,76%				
Laporan operasi penegakan Perda				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia	4.204.925,00	4.194.925,00	99,76%				
1 Operasi penegakan peraturan daerah				bulan	12	12	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	110.424.875,00	109.986.375,00	99,60%				
1 Persentase penanganan permasalahan yang terkait ISU SARA				%	100	100	100,00%
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	110.424.875,00	109.986.375,00	99,60%				
1 Laporan Kegiatan pertemuan tokoh masyarakat dan penyelenggaraan upacara				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	110.424.875,00	109.986.375,00	99,60%				
1 Laporan Forum Kerukunan Umat Beragama				dokumen	1	1	100,00%
2 Laporan Kegiatan Pertemuan Tokoh Kemasyarakatan				dokumen	1	1	100,00%
3 Penyelenggaraan upacara				kali	11	11	100,00%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	81.211.975,00	80.251.049,00	98,82%				
1 Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu				%	100	100	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2 Persentase Kalurahan Yang Melaksanakan Siklus Tahunan Tepat Waktu				%	50	100	200,00%
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	81.211.975,00	80.251.049,00	98,82%				
1 Laporan pelaksanaan Kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa							
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.304.975,00	3.264.975,00	98,79%				
1 Laporan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Kepala Desa Tentang APBDes dan Perubahan APBDes				dokumen	2	2	100,00%
2 Pembinaan penyusunan APBDes dan Perubahan APBDes				kali	2	2	100,00%
3 Pendampingan penyusunan APBDes				desa	7	7	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.329.925,00	3.245.925,00	97,48%				
1 Data Monografi Kecamatan				dokumen	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.679.850,00	5.629.050,00	99,11%				
1 Laporan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa				dokumen	1	1	100,00%
2 Pembinaan dan pendampingan pengelolaan keuangan desa				kali	1	1	100,00%
3 Pembinaan pengelolaan DD dan ADD				kali	1	1	100,00%
4 Pembinaan pengelolaan aset desa				desa	7	7	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.095.000,00	5.065.875,00	99,43%				
1 Laporan pelaksanaan Kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa				dokumen	1	1	100,00%
2 Pembinaan dan pengawasan kepala dan perangkat desa				kali	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	39.564.950,00	39.523.950,00	99,90%				
1 Laporan hasil evaluasi kinerja perangkat desa				dokumen	1	1	100,00%
2 Monitoring siklus tahunan desa				desa	7	7	100,00%
3 Pembinaan administrasi pemerintahan desa				kali	7	7	100,00%
4 Pembinaan BPKal				kali	2	2	100,00%
5 Pembinaan LKKal				kali	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.147.475,00	19.477.474,00	96,67%				
1 Forum koordinasi komunitas peduli bencana				kali	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4.089.800,00	4.043.800,00	98,88%				
1 Laporan hasil monitoring dan evaluasi tata guna tanah				dokumen	1	1	100,00%
2 Pendampingan pengelolaan tanah				desa	7	7	100,00%





**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON CANGKRINGAN
2022**

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
KAPANEWON CANGKRINGAN	4.328.463.467,00	3.954.907.273,00	91,37%				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	21.750.000,00	21.750.000,00	100,00%				
PROGRAM PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	21.750.000,00	21.750.000,00	100,00%				
1 Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi				even	1	1	100,00%
Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	21.750.000,00	21.750.000,00	100,00%				
Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja	21.750.000,00	21.750.000,00	100,00%				
1 Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur				even	1	1	100,00%
URUSAN SEKRETARIAT DAERAH	28.500.000,00	27.006.500,00	94,76%				
PROGRAM PELYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	28.500.000,00	27.006.500,00	94,76%				
1 Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proposional				%	90	90	100,00%
Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	28.500.000,00	27.006.500,00	94,76%				
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	28.500.000,00	27.006.500,00	94,76%				
1 Dokumen Usulan Perencanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2024				dokumen	1	1	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
UNSUR KEWILAYAHAN - KECAMATAN	4.278.213.467,00	3.906.150.773,00	91,30%				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.588.545.067,00	3.230.103.373,00	90,01%				
1 Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				%	100	100	100,00%
2 Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja				%	100	100	100,00%
Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	34.365.575,00	30.339.500,00	88,28%				
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.206.450,00	11.986.000,00	98,19%				
1 Dokumen Renja				dokumen	1	1	100,00%
2 Dokumen Perubahan Renja				dokumen	1	1	100,00%
3 Dokumen Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
4 Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja				dokumen	1	1	100,00%
5 Dokumen rencana kerja tahunan perangkat daerah (RKT PD) tahun 2022				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.426.625,00	2.426.000,00	99,97%				
1 Dokumen RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.716.075,00	1.715.500,00	99,97%				
1 Dokumen Perubahan RKA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.805.850,00	1.803.000,00	99,84%				
1 Dokumen DPA SKPD				dokumen	1	0	0,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.794.600,00	1.793.500,00	99,94%				
1 Dokumen Perubahan DPA SKPD				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.415.975,00	10.615.500,00	73,64%				
1 Dokumen laporan evaluasi kinerja				dokumen	26	26	100,00%
2 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja				dokumen	4	4	100,00%
3 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja				dokumen	4	4	100,00%
4 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja				dokumen	2	2	100,00%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.010.186.775,00	2.701.962.513,00	89,76%				
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.924.098.500,00	2.619.684.563,00	89,59%				
1 Insentif Retribusi IMB				kali	1	0	0,00%
2 Pembayaran luran BPJS				bulan	12	12	100,00%
3 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai				bulan	12	12	100,00%
4 Pembayaran TPP				bulan	12	12	100,00%
5 Pembayaran Jaminan kecelakaan kerja				bulan	12	12	100,00%
6 Pembayaran jaminan kematian				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	78.355.000,00	74.737.700,00	95,38%				
1 Pembayaran honorarium pengelola keuangan/barang				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2 Pembayaran jasa transaksi keuangan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.733.275,00	7.540.250,00	97,50%				
1 Dokumen laporan keuangan				dokumen	2	2	100,00%
2 Dokumen laporan Aset/BMD semesteran				dokumen	2	2	100,00%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61.828.233,00	59.037.024,00	95,49%				
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	61.828.233,00	59.037.024,00	95,49%				
1 Laporan pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi				dokumen	1	1	100,00%
2 Layanan administrasi kepegawaian				dokumen	12	12	100,00%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	126.515.084,00	121.193.979,00	95,79%				
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.194.000,00	3.063.000,00	95,90%				
1 Komponen peralatan listrik/penerangan bangunan kantor				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Kantor	31.894.999,00	29.284.999,00	91,82%				
1 Peralatan dan perlengkapan kantor				unit	5	5	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.411.585,00	46.199.230,00	99,54%				
1 ATK				paket	1	1	100,00%
2 Makan dan Minum Rapat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.615.500,00	8.593.500,00	99,74%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Layanan cetak dan penggandaan				paket	1	0	0,00%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	14.980.000,00	14.350.000,00	95,79%				
1 Layanan perjalanan dinas				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	16.600.000,00	14.890.000,00	89,70%				
1 Layanan makan minum tamu				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.620.000,00	3.614.500,00	99,85%				
1 Layanan arsip				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.199.000,00	1.198.750,00	99,98%				
1 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah				bulan	12	12	100,00%
2 Pengelolaan website				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178.044.400,00	160.908.482,00	90,38%				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%				
1 Layanan surat				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.756.000,00	22.900.194,00	67,84%				
1 Pembayaran jasa langganan				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	143.288.400,00	137.008.288,00	95,62%				
1 Pelayanan keamanan kantor				bulan	12	12	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2 Pelayanan kebersihan kantor				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	177.605.000,00	156.661.875,00	88,21%				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	110.075.000,00	106.173.925,00	96,46%				
1 Layanan pemeliharaan kendaraan dinas				bulan	12	12	100,00%
2 Layanan penyediaan BBM				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	29.480.000,00	12.617.600,00	42,80%				
1 Layanan pemeliharaan peralatan kerja				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		35.340.350,00	99,49%				
1 Pemeliharaan gedung kantor				unit	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan mebel	2.530.000,00	2.530.000,00	100,00%				
1 Layanan pemeliharaan mebel kantor				bulan	12	12	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	163.364.000,00	158.882.950,00	97,26%				
1 Presentase usulan Kegiatan atau output Kegiatan yang tercantum dalam beritaacara Musrenbang Kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita Acara hasil Musrenbang Kapanewon				%	30	30	100,00%
2 Persentase pelayanan perijinan selesai tepat waktu				%	100	100	100,00%
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	32.740.000,00	29.639.750,00	90,53%				
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	32.740.000,00	29.639.750,00	90,53%				
1 Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa				dokumen	5	5	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2 Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan				dokumen	1	1	100,00%
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	130.624.000,00	129.243.200,00	98,94%				
1 Terlaksananya pelayanan perizinan dan administrasi umum				bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	64.624.000,00	64.262.250,00	99,44%				
1 Layanan Perijinan				bulan	0	0	0,00%
2 Peningkatan kapasitas aparaturnya inovasi pelayanan publik				orang	33	33	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	66.000.000,00	64.980.950,00	98,46%				
1 Layanan administrasi kependudukan				bulan	12	12	100,00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN	193.002.000,00	191.845.860,00	99,40%				
1 Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi				%	30	30	100,00%
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	193.002.000,00	191.845.860,00	99,40%				
1 Terlaksananya pelayanan bidang kesehatan, keagamaan, perempuan dan anak; budaya dan pendidikan							
Sub Kegiatan Sinkronasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	136.884.500,00	136.008.910,00	99,36%				
1 Forum koordinasi bidang keagamaan				kali	14	14	100,00%
2 Forum koordinasi bidang budaya				kali	15	15	100,00%
3 Forum koordinasi bidang kesehatan				kali	4	4	100,00%
4 Forum koordinasi bidang pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak				kali	7	7	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
5 Forum koordinasi bidang pemuda dan olahraga				kali	3	3	100,00%
6 Forum koordinasi bidang pendidikan				kali	7	7	100,00%
7 Forum koordinasi bidang sosial				kali	4	4	100,00%
8 Lomba MTQ tingkat kecamatan				kali	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	56.117.500,00	55.836.950,00	99,50%				
1 Forum koordinasi bidang ekonomi				kali	26	24	92,00%
2 Forum koordinasi bidang fisik				kali	14	14	100,00%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	153.275.000,00	145.709.390,00	95,06%				
1 Cakupan Gangguan Ketentraman dan ketertiban yang di tangani di wilayah Kapanewon				%	100	100	100,00%
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	152.075.000,00	144.509.640,00	95,03%				
1 Terlaksananya koordinasi bulanan forkompim, lap. Pelaksanaan Kegiatan tokoh masyarakat FKUB; Lap. Pelaksanaan patroli terpadu keamanan dan ketertiban masyarakat; pembinaan linmas kapanewon, penyelenggaraan upacara tahun 2022				%	100	100	100,00%
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	152.075.000,00	144.509.640,00	95,03%				
1 Forkompimkap				bulan	12	12	100,00%
2 Pemantauan ketentraman dan ketertiban masyarakat				bulan	12	12	100,00%
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.200.000,00	1.199.750,00	99,98%				
1 Laporan operasi penegakan Perda				dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia	1.200.000,00	1.199.750,00	99,98%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Operasi penegakan Perda				bulan	1	1	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	93.760.000,00	93.437.950,00	99,66%				
1 Persentase penanganan permasalahan yang terkait ISU SARA				%	100	100	100,00%
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	93.760.000,00	93.437.950,00	99,66%				
1 Laporan Kegiatan pertemuan tokoh masyarakat dan penyelenggaraan upacara				dokumen	1	1	100,00%
<i>Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	93.760.000,00	93.437.950,00	99,66%				
1 Penyelenggaraan upacara				bulan	10	10	100,00%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	86.267.400,00	86.171.250,00	99,89%				
1 Persentase Desa Menetapkan Peraturan DesaTepat Waktu				%	50	100	200,00%
2 Persentase Kalurahan Yang Melaksanakan Siklus Tahunan Tepat Waktu				%	50	100	200,00%
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	86.267.400,00	86.171.250,00	99,89%				
1 Laporan pelaksanaan Kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa							
<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	5.018.800,00	5.018.750,00	100,00%				
1 Pembinaan , pempdampingan, penyusunan peraturan kalurahan dan peraturan lurah				kalurahan	5	5	100,00%
2 Pembinaan, rekomendasi dan monitoring penyusunan siklus tahunan kalurahan				kalurahan	5	5	100,00%
<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	1.936.400,00	1.936.250,00	99,99%				





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Dokumen data monografi kecamatan				dokumen	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.426.300,00	9.331.000,00	98,99%				
1 Pembinaan dan pengawasan data kalurahan dan ADD				kalurahan	5	5	100,00%
2 Pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan kalurahan				kalurahan	5	5	100,00%
3 Pengelolaan keuangan dengan dukungan dokumen yang lengkap dan benar sesuai ketentuan				kalurahan	5	5	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.996.000,00	17.996.000,00	100,00%				
1 Pembinaan kepala kalurahan				kalurahan	5	5	100,00%
2 Pembinaan perangkat kalurahan dan dukuh				kalurahan	5	5	100,00%
3 Pembinaan staf kalurahan				kalurahan	5	5	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	13.627.000,00	13.627.000,00	100,00%				
1 Pembinaan BPD				kalurahan	5	5	100,00%
2 Pembinaan LKD/RT RW				kalurahan	5	5	100,00%
3 Pembinaan LPMD				kalurahan	5	5	100,00%
4 Pendampingan dan pemantauan penyusunan RKPDes				kalurahan	5	5	100,00%
5 Siklus tahunan kalurahan yang dimonitor dan di bina				kalurahan	5	5	100,00%
Sub kegiatan fasilitas pelaksanaan pemilihan kepala desa	4.073.300,00	4.073.000,00	99,99%				
1 Monitoring pengangkatan pamong kalurahan				kali	5	5	100,00%





URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	29.320.000,00	29.319.750,00	100,00%				
1 Peserta gladi lapang penanggulangan bencana alam				orang	100	100	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4.869.600,00	4.869.500,00	100,00%				
1 Laporan hasil moev tata guna tanah				kalurahan	5	5	100,00%
2 Pendampingan pengelolaan tanah				kalurahan	5	5	100,00%

LKPJ 2022



KABUPATEN SLEMAN



**Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati
Tahun Anggaran 2022**



**BUKU III
DATA INOVASI, DATA PRESTASI
DAN DATA PERKEMBANGAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**



DATA INOVASI, DATA PRESTASI DAN DATA PERKEMBANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022

A. Data Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sleman Tahun 2022

Nama Inovasi	Inisiator/Inventor	Instansi
1	2	3
A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB		
1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan		
1) Loyalitas Diman (Loket Layanan Lan Informasi Terintegrasi Disdik Sleman)	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
2) Sembada Cerdas	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
3) Patut <i>Online</i> (Pelaksanaan Tes Kendali Mutu <i>Online</i>)	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
4) PEPAK-SADAP (Peta Pendidikan dalam Aplikasi Satu Data Pendidikan) Kabupaten Sleman	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
5) PPDB <i>Online</i>	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
6) SADAP (Satu Data Pendidikan) Kabupaten Sleman	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
7) Sembada Belajar	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
8) Sagu Sabu (Satu Minggu Satu Buku)	SD N Banyurejo 2, Tempel	SD N Banyurejo 2, Tempel





Nama Inovasi	Inisiator/Inventor	Instansi
1	2	3
9) Meningkatkan Hasil Belajar Dengan Yuk Mabar Game di Aplikasi Nearpod	SD N Kapukanda Tempel	SD N Kapukanda Tempel
10) Sekar Melati (Sentul Berkarya Melejit dengan Literasi)	SD N Sentul Godean	SD N Sentul Godean
11) Festival Batik	SD N Tempursari, Prambanan	SD N Tempursari, Prambanan
12) LINCAK	SD N Depok 1, Depok	SD N Depok 1, Depok
13) LAHAR MANTUL (Sekolah Sehat Belajar Nyaman, Tenang, Maju dan Unggul)	SD N Kaliduren, Moyudan	SD N Kaliduren, Moyudan
14) Budaya Positif "Amplop Kebajikan"	SD N Kapukanda Tempel	SD N Kapukanda Tempel
15) Pelayanan Publik	SMP Muhammadiyah 1 Godean	SMP Muhammadiyah 1 Godean
16) Pengembangan Sekolah Hijau berbasis tanaman pariyothon	SMP N 3 Turi	SMP N 3 Turi
17) MELON (Media Layanan Konseling <i>Online</i>)	SMP N 4 Pakem	SMP N 4 Pakem
18) LAKSITA (Literasi Aksara Jawa Digital)	SMP N 4 Pakem	SMP N 4 Pakem
19) Puan Nyoto Di Hotel (Perpustakaan Nyaman, Otomasi, Digital dan <i>Home</i>)	SD Model Kabupaten Sleman	SD Model Kabupaten Sleman
20) Ruang Cerita Maya SD Model Kabupaten Sleman	SD Model Kabupaten Sleman	SD Model Kabupaten Sleman





Nama Inovasi	Inisiator/Inventor	Instansi
1	2	3
21) Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Metode 3T (Tonton, Terka, Terapkan) untuk Pemecahan Soal Tipe Hots	SD N Condongcatur 1, Depok	SD N Condongcatur 1, Depok
22) GLS-GSMB (Gerakan Literasi Sekolah - Gerakan Sekolah Menulis Buku)	SD N Delegan 3 Prambanan	SD N Delegan 3 Prambanan
23) Program Sabtu Ceria: Pasar Anak	SD N Kapukanda Tempel	SD N Kapukanda Tempel
24) Asyiknya Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) dengan Rangkiang Lingpotis	SD N Ngebelgede 2, Ngaglik	SD N Ngebelgede 2, Ngaglik
25) Papan permainan <i>7 Level Wins</i> dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam	SD NU Sleman, Gamping	SD NU Sleman, Gamping
26) Sekolah Siaga Kependudukan	SMP N 1 Gamping	SMP N 1 Gamping
27) Gerakan "Remen" (Revolusi Mental) untuk Mewujudkan Sekolah Berbasis Wisata	SMP N 2 Pakem	SMP N 2 Pakem
28) Manifes Semarak Berprestasi	SMP N 3 Depok	SMP N 3 Depok
29) PATROLI 614	SMP N 3 Ngaglik	SMP N 3 Ngaglik
30) Geliad Jawara (Gerakan Literasi Digital menuju Siswa Juara)	SMP N 3 Sleman	SMP N 3 Sleman
31) OSOP (<i>One Student One Product/ Perform</i>)	SMP N 4 Pakem	SMP N 4 Pakem





Nama Inovasi	Inisiator/Inventor	Instansi
1	2	3
32) Taman Sambelisa (Taman Sarana belajar Lima Sleman)	SMP N 5 Sleman	SMP N 5 Sleman
33) Catur Budaya	TK ABA Ngabean 2, Tempel	TK ABA Ngabean 2, Tempel
34) Ratu Aba-Ku (Gerakan Orangtua dan Anak Membaca Buku)	TK ABA Sleman Kota	TK ABA Sleman Kota
35) GATOTKACA (Gerakan Totalitas Suka Membaca)	SD N Kaliduren, Moyudan	SD N Kaliduren, Moyudan
36) Bambang Dan Laras (Membangkitkan Kembali Tembang Dolanan dan Permainan Tradisional)	SD N Sidorejo Kalasan	SD N Sidorejo Kalasan
37) Gerabah Si Babe (Gerakan Mengolah Limbah Sampah menjadi Barang Berharga)	SD N Sidorejo Kalasan	SD N Sidorejo Kalasan
38) Geliat Sang Batara (Gerakan Literasi melalui Sanggar Baca, Tulis, dan Bicara)	SMP N 1 Sleman	SMP N 1 Sleman
39) Gelas Kita Suci (Gerakan Literasi Kitab Suci)	SMP N 4 Pakem	SMP N 4 Pakem
40) Gelang Si Cantik (Gerakan Literasi Mengangkat Prestasi dengan Membaca, Menulis, dan TIK)	SMP N 4 Pakem	SMP N 4 Pakem
41) <i>Moving Class</i> Tanpa Jam Kosong	SMP N 4 Pakem	SMP N 4 Pakem
42) STUDEX (<i>Students Exchange</i>)	SMP N 4 Pakem	SMP N 4 Pakem





Nama Inovasi	Inisiator/Inventor	Instansi
1	2	3
43) <i>Student Led Conference</i>	TK Model Kabupaten Sleman	TK Model Kabupaten Sleman
44) Pasukan Raga 28 (Pola Asuh Pendidikan Karakter Keluarga Dua Puluh Delapan)	SD N Percobaan 3 Pakem	SD N Percobaan 3 Pakem
45) Si Receh Bersedekah Dengan "Tabin-Gaku" (Tabungan Infak Keluargaku)	KB Allifa	KB Allifa
b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		
1) Mata Hati (Masyarakat Tangguh Sehat Jiwa)	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
2) GeTAR Thala (Gerakan Tanggulasi Anemia Remaja dan Thalasemia)	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
3) SIM KIA (Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Ibu dan Anak)	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
4) PANdu TEMan (Pelayanan Ante Natal Care Terpadu menuju Triple Eleminasi Melibatkan Semua Layanan)	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
5) Semak Bersemi Di Taman (Semangat Kami Beradaptasi Saat Pandemi di Taman Bacaan)	RSUD Sleman	Dinas Kesehatan
6) PRIYAYI (RSUD Prambanan Peduli Penyehatan Ibu dan Bayi)	RSUD Prambanan	Dinas Kesehatan





Nama Inovasi 1	Inisiator/Inventor 2	Instansi 3
7) Pak Tani Basmi Suket Teki (Parikesit Tanggap Peduli Bersama Atasi Hipertensi Siap Untuk Kelola dan Pantau Tekanan Darah Terkini)	Puskesmas Kalasan	Dinas Kesehatan
8) ACIL (Anak Sehat Cinta Lingkungan)	Puskesmas Ngaglik I	Dinas Kesehatan
9) RAKOMSI (Ruang Komando Hipertensi)	Puskesmas Ngaglik I	Dinas Kesehatan
10) TUA KELADI (Santun Lansia, Kesehatan Layak Diperhatikan)	Puskesmas Gamping I	Dinas Kesehatan
c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Simtaru Sleman (Sistem Informasi Tata Ruang Kabupaten Sleman)	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
-		
e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
1) Lapor Bencana Sleman	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah





Nama Inovasi	Inisiator/Inventor	Instansi
1	2	3
2) Si Pandu Merapi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial		
1) Dinsos Mantap (Dinas Sosial Tertib Administrasi Pelayanan)	Dinas Sosial	Dinas Sosial
2) SINTA SP (Sistem Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3) Lastu Sembada (Layanan Sosial Satu Pintu Sleman Sembada)	Dinas Sosial	Dinas Sosial
4) Lasamba (Layanan Sambang Warga)	Dinas Sosial	Dinas Sosial
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja;		
SIMPel (Sistem Informasi Manajemen Pelatihan)	Balai Laithan Kerja	Dinas Tenaga Kerja
b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak;		
Ruang Curhat <i>Online</i>	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak





Nama Inovasi	Inisiator/Inventor	Instansi
1	2	3
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
c. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan;		
-		
d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan;		
-		
e. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;		
1) Kasih Sembada (Kredit Air Bersih dan Sanitasi Sleman Sembada)	Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman	Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman
2) SIMDASDA (Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Air Kabupaten Sleman)	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
f. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;		
1) Dukcapilonline	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2) Jafar Berkah (Pelayanan Jemput Bola Dokumen Kependudukan Menjelang Safari Salat Jumat Bupati)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil





Nama Inovasi	Inisiator/Inventor	Instansi
1	2	3
Bersama Anggota Forkompinda dan Jajaran Pemerintah Kabupaten Sleman)		
3) SOLAH SAE (Sekolah Sadar Administrasi Kependudukan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4) Layanan Duka Si Pakel (Siaga Pencetakan KK dan KTP-el)	Kapanewon Berbah	Kapanewon Berbah
5) KOPER PAMAN (Kado Perkawinan Pertama Masyarakat Ngaglik)	Kapanewon Ngaglik	Kapanewon Ngaglik
6) 3 jam Buat <i>Sweet Seventeen</i>	Kapanewon Cangkringan	Kapanewon Cangkringan
7) PRATUIDAMAN (Program Percepatan Kartu Identitas Anak Melalui WA-Nan)	Kapanewon Ngemplak	Kapanewon Ngemplak
8) Sisir Adminduk (Sosialisasi Informasi dan Rekam Data Administrasi Kependudukan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9) Kado Manten	Kapanewon Cangkringan	Kapanewon Cangkringan
10) Kado Untuk Dilan (Kendaraan Antar Dokumen untuk Difabel Lansia serta Ibu Hamil)	Kapanewon Depok	Kapanewon Depok
11) SIPATEN (Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)	Kapanewon Depok	Kapanewon Depok





Nama Inovasi 1	Inisiator/Inventor 2	Instansi 3
g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;		
1) SID Sidesimanis dan Sidasembada	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
2) <u>pasarkolombo.id</u> fasilitas belanja <i>online</i> di Pasar Kolombo Condongcatur	Kalurahan Condongcatur	Kalurahan Condongcatur
h. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;		
LANCAR KB (Pelayanan Cepat Akseptor KB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
i. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;		
1) SIKRESNO (Sistem Informasi Kendaraan Registrasi <i>Online</i>)	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
2) SIM Parkir Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
j. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika;		





Nama Inovasi	Inisiator/Inventor	Instansi
1	2	3
Lapor Sleman	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
k. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;		
1) <i>E-Statement</i>	Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman	Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman
2) SISDATKU (Sistem Satu Data KUKM)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3) <i>Sleman Mart</i>	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
I. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;		
1) SINOM SEDAP DIPANDANG (Sinom Sekali Pendaftaran Rekomendasi dan Perizinan Langsung Jadi)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
2) Batman Terbang Terus (Bantu Masyarakat Tertib Bangunan dan Tertib Usaha)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
m. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;		





Nama Inovasi 1	Inisiator/Inventor 2	Instansi 3
1) Pacuanku D'xpang	Dinas Pemuda dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
2) PUNGLOR MUDA (Pungawa Layanan Olahraga dan Pemuda)	Dinas Pemuda dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
n. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik;		
-		
o. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;		
-		
p. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan;		
E-SIKS (Elektronik- Sistem Informasi Kebudayaan Sleman)	Dinas Kebudayaan	Dinas Kebudayaan
q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan;		
1) SI WANDANSARI (Sleman Inovasi Wisata Pustaka dan Budaya Daerah Bagi Anak Negeri)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
r. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan;		
-		
B. Urusan Pilihan, meliputi:		
a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;		





Nama Inovasi	Inisiator/Inventor	Instansi
1	2	3
SI BUDI DIKUCIR (Sistem Budidaya Ikan Nila dengan Sentuhan Kincir Air)	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan
b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata;		
-		
c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian;		
1) BPP COE (Balai Penyuluhan Pertanian sebagai <i>Centre Of Education</i>)	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
2) Silebai Dipuntung (Sistem Lelang Cabai Menjadikan Petani Untung)	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;		
1) SIHARPA (Sistem Informasi Harga Pangan)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2) Sleman Virtual Expo	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3) KENDI SEMBADA (Peken Digital Sembada)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
4) SunMor Sembada Minggu Pahingan; Sekali Kayuh, Dua Tiga Permasalahan Sleman Teratasi	Kapanewon Sleman	Kapanewon Sleman
e. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian;		





Nama Inovasi	Inisiator/Inventor	Instansi
1	2	3
-		
f. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi;		
-		
C. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan		
a. Urusan Sekretariat Daerah;		
1) Aplikasi Pelayanan Bahu Teman (Bantuan Hukum Kabupaten Sleman)	Bagian Hukum	Sekretariat Daerah
2) SIM SKM (Sistem Aplikasi Elektronik Survei Kepuasan Masyarakat)	Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah
3) SIM e-ANJAB (Sistem Elektronik Analisis Jabatan)	Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah
4) SiBijak (Sistem Informasi Kebijakan)	Bagian Pemerintahan	Sekretariat Daerah
5) JDIH Berbasis Android dan Website JDIH	Bagian Hukum	Sekretariat Daerah
6) eProda (<i>E-Procurement</i> Daerah)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah
b. Urusan Sekretariat DPRD;		
-		
D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, meliputi		
a. Urusan Perencanaan;		





Nama Inovasi	Inisiator/Inventor	Instansi
1	2	3
-		
b. Urusan Keuangan;		
-		
c. Urusan Kepegawaian;		
1) <i>E-Counseling (Counseling Corner)</i>	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
2) Uji Kompetensi Mutasi <i>Computer Based Test</i> Kabupaten Sleman	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
d. Urusan Pendidikan Pelatihan;		
-		
e. Urusan Penelitian Pengembangan;		
-		
f. Urusan Penghubung;		
-		
E. Unsur Pengawasan		
a Urusan Inspektorat Daerah;		
-		
SPTL (Sistem Pengawasan dan Tindak Lanjut)	Inspektorat	Inspektorat
F. Unsur Kewilayahan		





Nama Inovasi 1	Inisiator/Inventor 2	Instansi 3
a Urusan Kecamatan; .		
-		
G Unsur Pemerintahan Umum		
a Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik; .		
-		





B. Data Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sleman Tahun 2022

Jenis Prestasi	Pemberi Penghargaan	Prestator
1	2	3
A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB		
1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan		
1) Penghargaan Bunda PAUD Tingkat Nasional Kategori Wiyata Dharma Utama	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI	Bupati Sleman
2) Anugrah Pendidikan Berkemajuan Bidang Kultur Sekolah Muhammadiyah Jenjang SD/MI Tahun 2022	Majelis Dikdasmen PWM DIY	SD Muhammadiyah Pakem
3) 100 Nominator Lomba Menulis Puisi Guru Tingkat Nasional	Direktur Utama Nyalanesia	Asih Rusmilaeni, SMP N 2 Gamping
4) 100 Nominator Lomba Menulis Puisi Guru Tingkat Nasional	Direktur Utama Nyalanesia	Miftakhul Riska Fatimah, SMP Islam Al Azhar 26 Yogyakarta
5) Presenter Terbaik Konferensi Ilmiah Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Tingkat Nasional),	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Heni Triastuti, S.Kom





Jenis Prestasi	Pemberi Penghargaan	Prestator
1	2	3
6) Juara I Bola Volly Putri PORSENI PGRI Kabupaten Sleman (Tingkat Kabupaten)	PGRI Kabupaten Sleman	SMP Negeri 2 Moyudan
7) Peserta Terbaik Kategori Guru Inspiratif dalam rangka Hari Guru Nasional Tahun 2022	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Guru Pendidikan Dasar	Akhmad Ritaudin, S.Pd., M.Pd, SD N Percobaan 3 Pakem
8) Naskah Terbaik 3 NUBAR Rintangan Meraih Impian	Pusaka Publishing	Umi Hidayah, TKIM Bhakti Mulia
9) Naskah Terbaik 3 NUBAR Romantis	Pusaka Publishing Cabang Jatim	Umi Hidayah, TKIM Bhakti Mulia
10) Guru Penggerak Kemendikbud Ristek RI	Kemendikbud Ristek RI	Erna Widiyaningrum, TK ABA Pringwulung
11) Lomba Inovasi Karya Guru	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan & ASTRA	Cornelia Ambar Puspita Rini, TK Saka Persada Fastrack Funschool





Jenis Prestasi	Pemberi Penghargaan	Prestator
1	2	3
12) Anugerah Guru Inovatif	Program Magister PIPS FKIP Universitas PGRI Yogyakarta DIY Dan Prop. JATENG	Tutik Ambarwati SMP N 1 Kalasan
13) PORDA KE XVI DIY Tahun 2022	Pengda DIY	Yulius Ivan Hernawan, S.Pd., SMP N 2 Gamping
14) Juara II Lomba Video Eksperimen Sains Pekan Tematik Tahun 2022	Universitas Negeri Yogyakarta	Cintiya Ayu Saputri SD N Kanoman
15) Juara III Pra Porprov Softball Jawa Tengah Tahun 2022	Pengprov Perbasasi Jawa Tengah	Dita Palupi, SD N Sidoarum Godean
16) <i>Best Slugger</i> Putri Pra Porprov Jawa Tengah 2022	Pengprov Perbasasi Jawa Tengah	Dita Palupi, SD N Sidoarum Godean
17) Juara II Softball Putri PORDA XVI DIY 2022	Penyelenggara PORDA XVI DIY tahun 2022	Dita Palupi, SD Negeri Sidoarum Godean
18) Bhayangkari Berprestasi Bidang Pendidikan	POLDA DIY	Eny Susilowati, S.Pd, TKIT Sinar Melati





Jenis Prestasi	Pemberi Penghargaan	Prestator
1	2	3
19) <i>International Exhibition For Young Inventors (IEYI)</i>	IEYI (<i>International Exhibition For Young Inventors</i>) Taiwan	Muhammad Faris Husaen dan Damar Tuhu Wicaksono, SMP N 1 Turi
20) <i>International Junior Science Olympiade (IJSO) Tahap II Tahun 2022</i>	Kepala Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI	Gusti Komang Abhika Atmaja, SMP N 4 Depok
21) Juara I Lomba KSN Bidang IPA	Kepala Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI	Gusti Komang Abhika Atmaja, SMP N 4 Depok
22) Juara II Lomba KSN Bidang IPS	Kepala Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI	Risa Rahadatul Nastiti, SMP N 1 Sleman
23) Juara III Lomba KSN Bidang IPS	Kepala Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI	Claire Aurellya, SMP Pangudi Luhur Moyudan





Jenis Prestasi	Pemberi Penghargaan	Prestator
1	2	3
24) Juara III Lomba KSN Bidang IPS	Kepala Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI	Raizza Talitha Araminta, SMP N 4 Pakem
25) Juara III Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) Cabang Gitar Duet	Kepala Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI	Mikhaela Theona Christabel Varenti dan Diamanta Abia, SMP Cahaya Bangsa Utama
26) Juara III Lomba KSN Bidang IPA	Kepala Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI	Keysha Rizky Fadilla, SMP N 4 Pakem
27) Juara VII Lomba KSN Bidang IPA	Kepala Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI	Mayla Tyan Nabila, SMP N 1 Minggir
28) Juara III Lomba KSN Bidang IPS	Kepala Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI	Ellyora Mozza Ardine, SMP N 2 Ngaglik





Jenis Prestasi	Pemberi Penghargaan	Prestator
1	2	3
	Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI	
29) Juara VII Lomba KSN Bidang IPS	Kepala Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI	Kayla Chinta Rafeyfa, SMP N 1 Depok
30) Juara X Lomba KSN Bidang IPS	Kepala Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI	Erina Puspita Maharani, SMP N 1 Gamping
31) Juara II Lomba KSN Bidang Matematika	Kepala Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI	Jason Xia, SMP Olifant
32) Juara II Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) Cabang Lomba Gitar Duet	Kepala Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI	Joseph Lava Adi P. dan Fadila Putri Anan, SMP N 2 Mlati





Jenis Prestasi	Pemberi Penghargaan	Prestator
1	2	3
33) Juara VII KOPSI Bidang Lomba IPA dan Lingkungan	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI	SMP N 3 Godean
34) Medali Perunggu-Sains (IMSO)	Dr .R. Ridwan Hasan Saputra, M.Si (<i>Chairman, IMSO For Primary school Students</i>)	Aliya Ainy Tsurayya
35) Juara III Olimpiade Matematika	Yayasan Yatim Mandiri (OMATIQ)	Lintang Meydira Prameswari
36) Juara I Tanding Putra tingkat SD/MI Kejuaraan Nasional Pencak Silat Magelang Championship 2022	Kementerian Pemuda Dan Olahraga RI	Bagus Aditia Sakti
37) Medali emas OSAN Bahasa Indonesia (peringkat: 28)	Panitia OSAN 2022	Renata zahra aprilia
38) Juara I Nasional Karate Terbuka Kumite Perorangan SD-40 kg putra	PB FORKI DIY	Kintaka Wira Mandalika, Kenzie Yafi Aiman Akbar, Karan Mekka Altareka, Rae Matari Altareka
39) Juara II Individual Women National Development Kejuaraan Nasional Aerobic Gymnastics Age Grup V 2022	PB PERSANI	Khansa Talita Salsabila





Jenis Prestasi	Pemberi Penghargaan	Prestator
1	2	3
40) Medali Perak OSAN Bahasa Indonesia	YAPRESINDO	Alysa Fajar Wardhani
41) Juara I DBON Taekwondo <i>Championship</i>	Pengda DIY	Anisa Praditasari
42) Medali Emas pada Indonesia <i>Youth Science and Language Olympiad (IYSLO) 2022</i>	PPSM (Perkumpulan Pegiat Sains Madrasah)	Kayla Myiesha Nivca
43) Sertifikat Peringkat II Provinsi DIY Bidang IPA Penyisihan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang SD	Balai Pengembangan Talenta Indonesia	Erland Huga Maheswara
44) Juara I Kata Putri <i>Beginner</i> , Kejuaraan Tingkat Nasional Kyokushin Grand Prix 2022 Jawa Barat	Ikatan Kyokushinkai Indonesia	Andhika Putri Chinta Rachmadani
45) Juara I Kumite Putri 7-10 Tahun, Kejuaraan Tingkat Nasional Kyokushin Grand Prix 2022 Jawa Barat	Ikatan Kyokushinkai Indonesia	Andhika Putri Chinta Rachmadani
46) Juara I Kata Putri 9-12 Yo, Kejuaraan Tingkat Nasional Kyokushin Grand Prix	Ikatan Kyokushinkai Indonesia	Andhika Putri Chinta Rachmadani
47) Juara II <i>One Match</i> Putri 10-11 Yo 25-30 Kg, Kejuaraan Tingkat Nasional Kyokushin Grand Prix	Ikatan Kyokushinkai Indonesia	Andhika Putri Chinta Rachmadani
48) Medali Perak pada OSAN Tahun 2022 (Bahasa Indonesia)	OSAN Yapresindo	Hanisa Key Akila





Jenis Prestasi	Pemberi Penghargaan	Prestator
1	2	3
49) Juara II Kumite Putra 11 Yo 30-35 kg Kejuaraan Tingkat Nasional <i>Kyokushin Grand prix</i>	<i>Branch Chief of Indonesia Internasional Karate Alliance Kyokushin-Ryu</i>	Langit Syahrazi
50) Medali Perak OSAN IPA 2022	YAPRESINDO	Aisyah Anindya Prameswari
51) Juara I Grand Final FABI 11 (Festival Anak Berprestasi Indonesia ke-11)	Direktur Utama <i>Emerald Education Centre</i>	Arthrezya Salwa
52) <i>Gold Medalist Science 3 Mathlete's Olympiad-Season 9</i>	<i>Mathelest Olympiad</i> PT Nusa Indonesia Cerdas Edukasi	Rieski Alfaro Argawira
53) Juara II Tunggal Anak-anak Putra Kejuaraan BNI Sirkuit Nasional "B"	Drs. Suripno Ngadimin, Ketua Umum Pengurus Provinsi Sumatera Utara	Adyka Bayu Setyawan
54) Juara I Kyorugi Pemula Pra Cadet C U-31 Kg Putri	MENPORA	Anggita Kusuma Widiastuti
55) Juara II Poomsae Pemula Pra Cadet C Individual Putri	MENPORA	Anggita Kusuma Widiastuti
56) Kejuaraan BNI Sirkuit Nasional "B"	Drs. Suripno Ngadimin, Ketua Umum Pengurus Provinsi Sumatera Utara	Adyka Bayu Setyawan





Jenis Prestasi	Pemberi Penghargaan	Prestator
1	2	3
57) Finalis 5 Besar Idola Cilik RCTI 2022	Direktur Manajemen RCTI	Muhammad Reihan Prabuwijaya
58) Juara I Turnamen Sepak Bola Usia Dini Se Jateng & DIY MadangkaraCup #2022	MadangkaraCup #2022	Revandra Athalla Yusuf (Team Sepak Bola Gelora Muda Sleman)
59) Juara II lomba CAS pada Glow in the Dark Clock	Faber Castell	Kamilla Lembayung Az Zahra
60) Juara III lomba CAS pada Glow in the Dark Clock	Faber Castell	Aleeqa Salsabila Kusumadewi
61) Juara 3 Maca Geguritan SD/MI, Kompetisi Bahasa Dan Sastra 2022	Kepala Dinas Kebudayaan DIY	Nabila Firamanda Latifa
62) Juara Harapan II Olimpiade Matematika dan Al Qur'an (OMATIQ) Tingkat Propinsi D.I.Y	Yayasan Yatim Mandiri	Alisha Aurelia Salsabila
63) Juara III Tenis Meja Ganda Putra	Kepala Dinas Pendidikan Pemudan Dan Olah Raga Propinsi DIY	Ma'ruf Surya Dharma Fathin
64) Juara I Taekwondo Pemula Putra Sabuk Kuning Walikota Cup katagori Pemula	KONI DIY	Muhammad Fakhri Alfar





Jenis Prestasi	Pemberi Penghargaan	Prestator
1	2	3
65) Juara I Taekwondo Pemula Putra Sabuk Kuning Walikota Cup katagori Pemula	KONI DIY	Alviano Nabil Pratama
66) Juara II kyourugi Cadet Pemula Under 29 kg Putri Kejuaraan DBON Taekwondo CHAMPIONSHIP	MENPORA	Rika Amalia Siti Zulaichak
67) Juara II Kumite 30 Kg Usia Dini Putra Sabuk Coklat Piala Raja Karate International Open Championship	KONI DIY & PENGPROV FORKI DIY	Alif Pratama
68) Medali emas Bahasa Inggris pada Kompetisi Nasional Matematika Sains (OMNAS)	<i>Emerald Education Centre</i>	Seraphina Prishaleora Nivca
69) Juara II Porda XVI 2022 Cabor Group Hip Hop	Dinas Pemuda dan Olahraga DIY	Gracia Baby Christanto dan Faylin Joshua
70) Juara II Kyorugi Festival Under 20 Kg,	Pengda TI DIY	Anggita Kusuma Widiastuti
71) Juara III Kyorugi Cadet Pemula U29 Kg Putri,	Pengda TI DIY	Anggita Kusuma Widiastuti
72) Juara III Kelompok SD Putri Cabang Olahraga Tarung Drajat	BAPOPSI DIY	Khanza Safa Carissa Putri
73) Olimpiade Matematika dan Al Quran (OMITAQ)	Yayasan Yatim Mandiri	Dimas Restu Kunarseto





Jenis Prestasi	Pemberi Penghargaan	Prestator
1	2	3
74) Juara I Kategori Matematika OMATIQ 2022	Yayasan Yatim Mandiri	Dimas Restu Kunarseto
75) Juara I Kejuaraan Daerah Junior Senam	Persani DIY	Gisela Widya Maharani
76) Juara I Kata Perorangan FORKI DIY 2022	Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia DIY	Evander Ben Hartono
77) Medali Emas Kejurnas Kelompok Umur Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) XVI 2022	Federasi Panjat Tebing Indonesia	Abdillah Nabihan Tajuasa
78) Medali Perunggu Kejurnas Kelompok Umur Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) XVI 2022	Federasi Panjat Tebing Indonesia	Abdillah Nabihan Tajuasa
79) Medali Perunggu Kejurnas Kelompok Umur Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) XVI 2022	Federasi Panjat Tebing Indonesia	Satria Bumi Mahardika
80) Medali Perunggu Kejurnas Kelompok Umur Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) XVI 2022	Federasi Panjat Tebing Indonesia	Hanifah Nur
81) Medali Emas Gala Siswa Indonesia (GSI)	Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI	Adelio Dzakwan Niswara, SMP Piri Ngaglik





Jenis Prestasi	Pemberi Penghargaan	Prestator
1	2	3
82) Medali Emas Gala Siswa Indonesia (GSI)	Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI	Mauli Afrizal, SMP N 1 Gamping
83) Pemain Teladan Gala Siswa Indonesia (GSI)	Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI	Adelio Dzakwan Niswara, SMP Piri Ngaglik
84) Medali Perunggu Asian Youth Chess Championships 2022	Federasi Catur Asia	Herfesa Shafira Devi
b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		
1) Terbaik IV Aksi Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi DIY Tahun 2021	Gubernur DIY	Kabupaten Sleman
2) Penghargaan <i>Universal Health Coverage</i> (UHC)	Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Tengah dan DIY	Kabupaten Sleman
3) Penghargaan Penurunan Stunting	BKKBN DIY	Kabupaten Sleman





Jenis Prestasi	Pemberi Penghargaan	Prestator
1	2	3
4) Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Berkelanjutan Tahun 2022 sebagai Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Berkelanjutan	Menteri Kesehatan RI	Kabupaten Sleman
5) Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Berkelanjutan Tahun 2022 sebagai Kabupaten/Kota Terabik Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Berkelanjutan Kategori Demand Creation	Menteri Kesehatan RI	Kabupaten Sleman
6) Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Kefarmasian Terbaik Tahun 2022	Menteri Kesehatan RI	Puskesmas Tempel II
7) Penghargaan sebagai Posyandu/ Posbindu yang telah melaksanakan deteksi dini faktor risiko PTM dengan baik dan Inovatif	Menteri Kesehatan RI	Posyandu /Posbindu Waskitho, Puskesmas Prambanan
8) Juara Harapan I kategori Perorangan dalam mendukung Program Kesehatan Jiwa pada Peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia Tahun 2022	Kementrian Kesehatan RI	Siam Hanifah, S.Psi, Psikolog (Puskesmas Godean I)
9) FKTP dengan Hasik KBK (Kapitasi Berbasis Kinerja) Terbaik di Wilayah Kabupaten Sleman kategori Puskesmas	BPJS Kesehatan	Puskesmas Mlati II





Jenis Prestasi	Pemberi Penghargaan	Prestator
1	2	3
10) Juara I kategori Inovasi FKTP	BPJS Kesehatan	Puskesmas Mlati II
11) Penghargaan atas peran aktifnya dalam melaksanakan penanganan Covid-19 di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia DIY	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia DIY	Puskesmas Mlati II
12) Tenaga Kesehatan Teladan I kategori Nutrisionis di Puskesmas Tingkat Provinsi Tahun 2022	Gubernur DIY	Widiastuti, Amd.Gz (Puskesmas Gamping II)
13) Tenaga Kesehatan Teladan I kategori Perawat di Puskesmas Tingkat Provinsi Tahun 2022	Gubernur DIY	Sriyati Sipora A.D.R.Kabalmay Dinuth, S.Kep., Ners (Puskesmas Kalasan)
14) Tenaga Kesehatan Teladan I kategori Ahli Tenaga Laboratorium Media di Puskesmas Tingkat Provinsi Tahun 2022	Gubernur DIY	Mukti Purwaningrum, S.ST (Puskesmas Depok III)
15) Tenaga Kesehatan Teladan I kategori Tenaga Kefarmasian di Puskesmas Tingkat Provinsi Tahun 2022	Gubernur DIY	Iin Yulia Irawati Susanti, A.Md.Farm (Puskesmas Ngaglik II)





Jenis Prestasi	Pemberi Penghargaan	Prestator
1	2	3
16) Tenaga Kesehatan Teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Nasional Tahun 2022 kategori Tenaga Kesehatan Puskesmas	Menteri Kesehatan RI	Widiastuti, AMG, Tenaga Gizi Puskesmas Gamping II
17) Tenaga Kesehatan Teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Nasional Tahun 2022 kategori Tenaga Kesehatan Puskesmas	Menteri Kesehatan RI	Sriyati Sipora A.D.R.Kabal may Dinuth, S.Kep., Ners, Perawat Puskesmas Kalasan
18) Tenaga Kesehatan Teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Nasional Tahun 2022 kategori Tenaga Kesehatan Puskesmas	Menteri Kesehatan RI	Mukti Purwaningrum, S.ST, ATLM/Teknik Biomedika Puskesmas Depok III
19) Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022 dengan inovasi "MATA HATI" (Masyarakat Tangguh Sehat Jiwa)	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kabupaten Sleman (Dinas Kesehatan)
20) Juara I Tingkat DIY lomba Ketangkasan bagi Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) non PNS Kabupaten Sleman Tahun 2022	BKKBN DIY	Aan Dwi Mandasari
21) Puskesmas dengan Inovasi Layanan Kesehatan Jiwa Masyarakat yang Komprehensif dan Terintegrasi	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Puskesmas Godean I





Jenis Prestasi	Pemberi Penghargaan	Prestator
1	2	3
22) Terbaik Pertama Kalurahan Peduli Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA) Tingkat DIY	TP PKK Daerah Istimewa Yogyakarta	PKK Kalurahan. Banyuraden, Gamping
c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1) Bhumandala Kanaka (Medali Emas) atas Simpul Jaringan Terbaik kategori Kabupaten pada Penghargaan Bhumandala Simpul Jaringan Informasi Geospasial Tahun 2022	Badan Informasi Geospasial (BIG)	Kabupaten Sleman
2) Bhumandala Kencana atas Pemanfaatan Simpul Jaringan Terbaik kategori Kabupaten pada Penghargaan Bhumandala Simpul Jaringan Informasi Geospasial Tahun 2022	Badan Informasi Geospasial (BIG)	Kabupaten Sleman
3) Peringkat 2 Nasional Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang dan Pelaksanaan Penataan Ruang (Turbinlak) 2022	Direktur Jenderal Tata Ruang	Kabupaten Sleman
d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		





Jenis Prestasi	Pemberi Penghargaan	Prestator
1	2	3
Pokja PKP Terbaik dalam Kolaborasi Lintas OPD pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) DIY TA 2022	Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (PPW) DIY	Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
-		
f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial		
1) Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022 dengan inovasi "LASAMBA" (Layanan Sambang Warga)	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kabupaten Sleman (Dinas Sosial)
2) Juara I Lomba Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) Tingkat DIY	Dinas Sosial DIY	Padukuhan Ngabean, Kalurahan Banyurejo, Tempel
3) Juara II Lomba Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Berprestasi Tingkat DIY	Dinas Sosial DIY	Siti Maimunah, Kalasan
1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja;		





Jenis Prestasi	Pemberi Penghargaan	Prestator
1	2	3
Juara I Kompetensi Keterampilan Instruktur Nasional VIII Tahun 2022 Tingkat Nasional Bidang Kompetisi Desain Grafis	Kementrian Tenaga Kerja RI	Edi Nur Cahyaningtyas, S.T., M.Eng. Instruktur UPTD BLK
b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak;		
1) Desa Ramah Perempuan Layak Anak (satu-satunya Kabupaten yang memperoleh penghargaan)	Kementerian PPPA RI	Kabupaten Sleman
2) Kabupaten Layak Anak Kategori Utama	Kementerian PPPA RI	Kabupaten Sleman
3) Forum Anak Terbaik DAFA Award Kategori Kecamatan	Kementerian PPPA RI	Forum Anak Kapanewon Moyudan
4) Penghargaan Anugerah Anak Jogja kategori Perusahaan Sahabat Anak Terbaik	Gubernur	BPD DIY Cabang Sleman
5) Juara I Lomba Administrasi PKK Tingkat DIY	TP PKK Daerah Istimewa Yogyakarta	TP PKK Kalurahan Triharjo, Sleman
6) Juara I Monitoring dan Evaluasi Kegiatan UP2K-PKK Tahun 2022	TP PKK Daerah Istimewa Yogyakarta	Kelompok UP2K-PKK Kalurahan Sidokarto, Godean
7) Juara I Monev Program Pokja I TP PKK	TP PKK Daerah Istimewa Yogyakarta	TP PKK Kalurahan Kalitirto, Berbah





Jenis Prestasi	Pemberi Penghargaan	Prestator
1	2	3
c. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan;		
-		
d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan;		
-		
e. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;		
1) Juara III Sekolah Adiwiyata Tahun 2022 Tingkat Provinsi kategori SD/MI sederajat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI	SDN Kaliduren
2) Sekolah Adiwiyata Nasional (SAN) Tahun 2022 kategori SD/MI sederajat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI	SDN Jetak
3) Sekolah Adiwiyata Nasional (SAN) Tahun 2022 kategori SMP/MTs sederajat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Kementrian	MTs N 2 Sleman





Jenis Prestasi	Pemberi Penghargaan	Prestator
1	2	3
	Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI	
4) Sekolah Adiwiyata Nasional (SAN) Tahun 2022 kategori SMP/MTs sederajat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI	SMP N 1 Ngemplak
5) Sekolah Adiwiyata Nasional (SAN) Tahun 2022 kategori SMP/MTs sederajat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI	SMP N 2 Pakem
6) Sekolah Adiwiyata Nasional (SAN) Tahun 2022 kategori SMA/SMK/MA sederajat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI	SMA N 1 Prambanan
7) Sekolah Adiwiyata Nasional (SAN) Tahun 2022 kategori SMA/SMK/MA sederajat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	SMK N 1 Tempel





Jenis Prestasi	Pemberi Penghargaan	Prestator
1	2	3
	dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI	
8) Sekolah Adiwiyata Mandiri (SAM) Tahun 2022 kategori SMA/SMK/MA sederajat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI	SMA N 1 Cangkringan
9) Juara II Sekolah Adiwiyata Tingkat DIY	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	SD N Kaliduren Moyudan
10) Juara IX Sekolah Adiwiyata Tingkat DIY	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	SD N Nganggrung Turi
11) Juara I Program Kampung Iklim (ProKlim) Tingkat DIY Tahun 2022	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	Padukuhan Cibuk Kidul, Margoluwih, Seyegan
12) Juara III Program Kampung Iklim (ProKlim) Tingkat DIY Tahun 2022	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	Huntap Jetis Sumur, Padukuhan Glagahmalang, Glagaharjo, Cangkringan
13) Nominasi Penerima Kalpataru Tahun 2022 kategori Perintis Lingkungan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	Sri Wahyuningsih (Ketua Komunitas Banyu Bening





Jenis Prestasi	Pemberi Penghargaan	Prestator
1	2	3
		Yogyakarta) Desa Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
14) <i>Woman Of The Year</i> DIY 2021	TIMES INDONESIA	Sri Wahyuningsih (Ketua Komunitas Banyu Bening Yogyakarta) Desa Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
f. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;		
1) Penghargaan atas partisipasi dalam Mendukung Pemenuhan Identitas Anak Didik LPKA Kelas II Yogyakarta melalui Penerbitan E-KTP dan KIA	Kementrian Hukum Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman
2) Penyelenggara Pelayanan Publik kategori Sangat Baik Tahun 2021	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman





Jenis Prestasi 1	Pemberi Penghargaan 2	Prestator 3
3) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori A (Prima) Lingkup Disdukcapil Kabupaten/Kota Tahun 2022	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman
g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;		
Penghargaan atas Komitmen dan Kerja Keras Dalam Mendorong Percepatan Pembangunan Desa	Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi	Bupati Sleman
h. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;		
1) Juara I Kabupaten/Kota Terbaik Tingkat Nasional Kelompok Target Pelayanan KB > 1.500 Akseptor	BKKBN	Kabupaten Sleman
2) Penghargaan Bangga Kencana BKKBN	BKKBN	Bupati Sleman
3) Juara I Akseptor MOW dalam rangka Hari Keluarga dan Tri Manunggal Membangun Desa	BKKBN Perwakilan DIY	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,





Jenis Prestasi	Pemberi Penghargaan	Prestator
1	2	3
		Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
4) Penghargaan atas Partisipasi dalam Menggerakkan Masyarakat untuk ber-KB Terbanyak Ketiga melalui Gebyar Pelayanan KB MOW dalam rangka Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-29 tahun 2022 dan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-113	BKKBN Provinsi DIY	Kapanewon Kalasan
i. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;		
1) Penghargaan/apresiasi atas Implementasi Program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (stranas PK)	Kementerian Perhubungan RI	Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman
2) Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan Klasifikasi Akreditasi A	Kementerian Perhubungan RI	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman
j. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika;		
1) Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 kategori	Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta	Pemerintah Kabupaten Sleman





Jenis Prestasi	Pemberi Penghargaan	Prestator
1	2	3
Pemerintah Kabupaten/Kota Se-DIY sebagai Badan Publik Informatif		
2) Penganugrahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 kategori OPD Pemerintah Kabupaten/Kota Se-DIY sebagai Badan Publik Informatif	Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman
3) Penganugrahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 kategori OPD Pemerintah Kabupaten/Kota Se-DIY sebagai Badan Publik Informatif	Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman
4) Penganugrahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 kategori OPD Pemerintah Kabupaten/Kota Se-DIY sebagai Badan Publik Informatif	Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman
5) Penganugrahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 kategori OPD Pemerintah Kabupaten/Kota Se-DIY sebagai Badan Publik Informatif	Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman





Jenis Prestasi	Pemberi Penghargaan	Prestator
1	2	3
6) Penganugrahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 kategori OPD Pemerintah Kabupaten/Kota Se-DIY sebagai Badan Publik Informatif	Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman
7) Penganugrahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 kategori OPD Pemerintah Kabupaten/Kota Se-DIY sebagai Badan Publik Informatif	Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta	Inspektorat Kabupaten Sleman
8) Penganugrahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 kategori OPD Pemerintah Kabupaten/Kota Se-DIY sebagai Badan Publik Informatif	Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman
9) Penganugrahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 kategori OPD Pemerintah Kabupaten/Kota Se-DIY sebagai Badan Publik Informatif	Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman
10) Penganugrahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 kategori OPD	Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman





Jenis Prestasi	Pemberi Penghargaan	Prestator
1	2	3
Pemerintah Kabupaten/ Kota Se-DIY sebagai Badan Publik Informatif		
11) Penganugrahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 kategori OPD Pemerintah Kabupaten/ Kota Se-DIY sebagai Badan Publik Informatif	Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman
12) Penganugrahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 kategori Kapanewon/Kemantren Se-DIY sebagai Badan Publik Informatif	Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta	Kapanewon Turi
13) Penganugrahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 kategori Kapanewon/Kemantren Se-DIY sebagai Badan Publik Informatif	Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta	Kapanewon Tempel
14) Penganugrahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 kategori Kapanewon/Kemantren Se-DIY sebagai Badan Publik Informatif	Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta	Kapanewon Mlati





Jenis Prestasi	Pemberi Penghargaan	Prestator
1	2	3
15) Penganugrahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 kategori Kapanewon/Kemantren Se-DIY sebagai Badan Publik Informatif	Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta	Kapanewon Depok
16) Penganugrahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 kategori Kapanewon/Kemantren Se-DIY sebagai Badan Publik Informatif	Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta	Kapanewon Godean
17) Penganugrahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 kategori Kapanewon/Kemantren Se-DIY sebagai Badan Publik Informatif	Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta	Kapanewon Moyudan
18) Penganugrahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 kategori Kapanewon/Kemantren Se-DIY sebagai Badan Publik Informatif	Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta	Kapanewon Seyegan
19) Penganugrahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 kategori	Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta	PT. BPR Bank Sleman (Perseroda)





Jenis Prestasi	Pemberi Penghargaan	Prestator
1	2	3
Badan Usaha Milik Daerah Se-DIY sebagai Badan Publik Informatif		
20) <i>Outstanding Achievement</i> dalam Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (P4) ke-4, sebagai 6 Peserta Terbaik kategori Instansi Pemerintah	Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kabupaten Sleman
21) Penghargaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) tingkat Nasional 2022	Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia	Pemerintah Kabupaten Sleman
22) Peringkat I Indonesia <i>Digital Economy Literacy Index</i> 2022	Litbang Kompas	Pemerintah Kabupaten Sleman
23) Penghargaan dengan predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik tahun 2021	Kepala Perwakilan Ombudsman RI	Pemerintah Kabupaten Sleman
k. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;		
1) Juara I Stand terbaik tingkat Nasional Pameran dalam rangka Pameran Gelar Inovasi UMKM Koperasi dan PKBL Tahun 2022	Panitia penyelenggara pameran gelar inovasi UMKM, koperasi dan PKBL	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman





Jenis Prestasi	Pemberi Penghargaan	Prestator
1	2	3
2) Juara III stand terbaik tingkat nasional dalam rangka Gebyar UMKM, Koperasi dan TJSL Expo 2022	Panitia penyelenggara gebyar UMKM, koperasi, dan TJSL Expo 2022	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman
I. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;		
1) Top Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2022	Majalah <i>TOP Bussiness</i> dalam <i>TOP BUMD Awards</i>	Bupati Sleman
2) Top CEO BUMD Tahun 2022	Majalah <i>TOP Bussiness</i> dalam <i>TOP BUMD Awards</i>	Direktur Utama PT BPR Bank Sleman
3) Top BUMD <i>Golden Trophy</i>	Majalah <i>TOP Bussiness</i> dalam <i>TOP BUMD Awards</i>	PT BPR Bank Sleman
4) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori A (Prima) Tahun 2022	Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman
m Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;		





Jenis Prestasi	Pemberi Penghargaan	Prestator
1	2	3
1) Juara II Lomba Karang Taruna Berprestasi Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022	Dinas Sosial DIY	Karang Taruna Suryawiratama Kalurahan Sidokarto, Godean
2) Juara III Tingkat Nasional sebagai Pemuda Pelopor Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Dan Pariwisata Tahun 2022	Kementrian Pemuda dan Olahraga RI	Jamaludin Nur Ridho
n. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik;		
-		
o. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;		
-		
p. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan;		
1) Penyaji Terbaik IV Festival Theater Tahun 2022	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Sleman
2) Penyaji Terbaik III Festival Langencarita Tahun 2022	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Sleman





Jenis Prestasi	Pemberi Penghargaan	Prestator
1	2	3
3) Juara III Lomba Permainan Tradisional Se-DIY	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY	Kabupaten Sleman
4) Penyaji Terbaik III Festival Sendratari Tahun 2022	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Sleman
5) Penyaji Terbaik II Festival Kethoprak Tahun 2022	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Sleman
6) Juara II Dalang Wayang Kulit anak	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY	Ahza Faishal
7) Juara I Beregu Lomba Cerdas Cermat Museum Daerah Istimewa Yogyakarta	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY	Aretha Daryn Anindya
8) Juara I Alih Aksara Jawa SD/MI pada Kompetisi Bahasa dan Sastra 2022	Dinas Kebudayaan (Kundha	Amirah Rasyida Salma Insani





Jenis Prestasi	Pemberi Penghargaan	Prestator
1	2	3
	Kabudayan) DIY	
9) Juara Harapan I Alih Aksara Jawa SD/MI pada Kompetisi Bahasa dan Sastra 2022	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY	Mutiara Sekar Arsanti
10) Juara Umum dan Penyaji terbaik I Festival Upacara Adat Tahun 2022	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY	Nur Rosyid Hidayat, Kapanewon Pakem
11) Sutradara Terbaik Festival Upacara Adat Tahun 2022	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY	Ludtina Pangestu Eka Nur Utami, Kapanewon Pakem
12) Penata Rias Busana Terbaik Festival Upacara Adat Tahun 2022	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY	Dina Dwi Utami, Kapanewon Pakem
13) Koreografer Terbaik Festival Upacara Adat Tahun 2022	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY	Nurul Wahidah, Kapanewon Pakem
14) Juara III Lomba Langen Carita Antar Kab/Kota Se-DIY	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY	Sanggar Kembang Sakura





Jenis Prestasi	Pemberi Penghargaan	Prestator
1	2	3
q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan;		
-		
r. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan;		
Peringkat I Tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi DIY dengan kategori Sangat Memuaskan (AA)	Arsip Nasional Republik Indonesia	Pemerintah Kabupaten Sleman
B. Urusan Pilihan, meliputi:		
g. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;		
-		
h. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata;		
1) Juara I Lomba Desa/Kampung Wisata Tingkat DIY Tahun 2022	Dinas Pariwisata DIY	Desa Wisata Pancoh
2) Pemenang I Stand Terbaik Wisata Nusantara Fair	PT Dabindo Mitra Tama	Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman
i. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian;		
1) Penghargaan Bejo (Bea Cukai Jogja) Award 2022 Kategori Pemanfaatan DBH – CHT (Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau) dengan Kreativitas Kegiatan Terbaik	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta	Pemerintah Kabupaten Sleman





Jenis Prestasi 1	Pemberi Penghargaan 2	Prestator 3
2) Penghargaan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Berhasil dalam Pembinaan Komitmen Keamanan Pangan	Kepala Badan Pangan Nasional RI	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman
3) Peringkat II Balai Penyuluh Pertanian Berprestasi Tingkat DIY Tahun 2022	Gubernur DIY	UPTD BP4 Wilayah V
4) Juara I Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi Tingkat DIY	Gubernur DIY	KWT Sidodadi, Kronggahan, Trihanggo, Gamping
5) Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi Tingkat Nasional	Kementrian Pertanian RI	KWT Sidodadi, Kronggahan, Trihanggo, Gamping
6) Peringkat III Petani Berprestasi Tingkat DIY Tahun 2022	Gubernur DIY	Suryanto Murten, Tridadi, Sleman
j. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;		
1) Juara 1 <i>UKM Award 2022</i>	BPR MSA	Sri Endah Kurniawati (IR Snack)
2) Juara 2 <i>Hijrahpreneur</i>	Bank Indonesia dan ISEF (<i>Indonesia Syaria Economic Festival</i>)	Sofyani Mirah (CV. Carisa Khanza Pratama)





Jenis Prestasi	Pemberi Penghargaan	Prestator
1	2	3
3) Juara 2 Pangan Award	Kementrian Perdagangan RI	Sofyani Mirah (CV. Carisa Khanza Pratama)
4) Pasar Tertib Ukur 2021 (baru diterimakan 2022)	Kementrian Perdagangan RI	Pasar Ngijon
5) Pasar Tertib Ukur 2021 (baru diterimakan 2022)	Kementrian Perdagangan RI	Pasar Gentan
k. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian;		
-		
l. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi;		
-		
C. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan		
c. Urusan Sekretariat Daerah;		
-		
d. Urusan Sekretariat DPRD;		
-		
D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, meliputi		
g. Urusan Perencanaan;		
-		
h. Urusan Keuangan;		





Jenis Prestasi	Pemberi Penghargaan	Prestator
1	2	3
<p>Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman selama 11 tahun berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Opini WTP yang ke-11 diperoleh atas pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2021 sebagaimana yang tertuang pada Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 01A/LHP/XVIII.YOG/03/2022 tanggal 7 Maret 2022.</p>		
i. Urusan Kepegawaian;		
1) Penghargaan Atas Pencapaian <i>Approval</i> PDM terbaik sebesar 93.3% di wilayah kerja Daerah Istimewa Yogyakarta	Badan Kepegawaian Negara	Pemerintah Kabupaten Sleman
2) Anugrah Meritokrasi 2022; Penghargaan atas keberhasilan Penerapan Sistem Merit Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Tahun 2021 dengan kualitas SANGAT BAIK	Komisi Aparatur Sipil Negara	Pemerintah Kabupaten Sleman
3) Penghargaan Atas Pencapaian Verifikasi PDM terbaik sebesar 98.86% di wilayah kerja Daerah Istimewa Yogyakarta	Badan Kepegawaian Negara	Pemerintah Kabupaten Sleman
4) Penghargaan BKN Award 2022; Implementasi Manajemen ASN Terbaik	Badan Kepegawaian Negara	Pemerintah Kabupaten Sleman
j. Urusan Pendidikan Pelatihan;		
-		
k. Urusan Penelitian Pengembangan;		
-		





Jenis Prestasi 1	Pemberi Penghargaan 2	Prestator 3
I. Urusan Penghubung;		
-		
E. Unsur Pengawasan		
a. Urusan Inspektorat Daerah;		
-		
F. Unsur Kewilayahan		
a. Urusan Kecamatan;		
-		
G. Unsur Pemerintahan Umum		
a. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik;		
1) Penghargaan atas terbentuknya Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kabupaten Sleman	Kementrian Dalam Negeri RI	Bupati Sleman
2) Penghargaan mensukseskan Gerakan Nasional Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih dalam rangka Menyemarakkan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia	Kementrian Dalam Negeri RI	Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman





C. Data Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sleman Tahun 2022

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Urusan Pendidikan						
A	Pendidikan Sekolah					
1	Taman Kanak-Kanak					
	a. Jumlah Sekolah	564	571	574	577	583
	- Negeri	5	5	5	5	5
	- Swasta	559	566	569	572	578
	b. Jumlah Guru	2203	2721	2215	2.106	1.221
	- Negeri	44	48	41	40	35
	- Swasta	2159	2673	2174	2.066	1.186
	c. Jumlah Tenaga Non Guru	445	450	472	1.124	1.164
	- Negeri	17	20	19	22	22
	- Swasta	428	430	453	1.102	1.142
	d. Jumlah Siswa	30.879	31.078	28.849	25.459	28.980
	- Negeri	613	612	572	544	597
	- Swasta	30.266	30.466	28.277	24.915	28.383
2	SD / MI					
	a. Jumlah Sekolah	545	548	547	550	552
	- Negeri	376	376	376	376	376
	- Swasta	169	172	171	174	176
	b. Jumlah Guru	6.259	6.240	5.624	6.043	5.753
	- Negeri	3.748	3.969	3.553	3.715	3.518
	- Swasta	2.511	2.451	2.071	2.328	2.235





No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	c. Jumlah Tenaga Non Guru	1.453	1.360	1.300	1.938	1.840
	- Negeri	909	865	864	1.265	1.199
	- Swasta	544	495	436	673	641
	d. Jumlah Siswa	98.128	97.558	97.852	96.025	94.981
	- Negeri	62.731	61.156	59.892	58.300	57.205
	- Swasta	35.397	36.402	37.960	37.725	37.776
3	SMP / MTs					
	a. Jumlah Sekolah	145	150	153	160	165
	- Negeri	64	64	64	64	64
	- Swasta	81	86	89	96	101
	b. Jumlah Guru	3.492	3.725	3.316	3.493	3.350
	- Negeri	1.777	1.945	1.728	1.812	1.855
	- Swasta	1.715	1.780	1.558	1.681	1.495
	c. Jumlah Tenaga Non Guru	999	1.013	835	1.121	985
	- Negeri	596	574	466	609	485
	- Swasta	403	439	369	512	500
	d. Jumlah Siswa	46.767	49.228	47.698	50.947	51.538
	- Negeri	28.433	28.765	28.838	28.935	28.730
	- Swasta	18.334	20.463	18.860	22.012	22.808
4	Kondisi Bangunan Sekolah (SD dan SMP)					
	a. Jumlah Ruang SD	3.998	4.112	4.192	4.234	3.895
	- Baik	3.525	3.577	2.216	1.883	3.736
	- Rusak Ringan	394	441	1.949	2.240	-
	- Rusak Sedang				108	152
	- Rusak Berat	79	94	27	12	7
	b. Jumlah Ruang SMP	1.580	2.092	1.569	1.705	1.335
	- Baik	1.453	1.970	930	1131	1.283





No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	- Rusak Ringan	99	108	629	546	-
	- Rusak Sedang	-	-	-	17	45
	- Rusak Berat	28	14	10	11	7
B	Pendidikan Luar Sekolah					
1	Lembaga Pendidikan Kursus (unit)					
	a. Jumlah Lembaga	60	62	56	63	40
	b. Jumlah Tutor	234	183	112	122	602
	c. Jumlah Warga Belajar	2.802	2.281	1.171	1.177	707
2	Kelompok Belajar Pendidikan Kesetaraan					
	a. Jumlah tutor	238	109	225	217	54
	b. Jumlah kelompok	70	81	70	71	42
	c. Jumlah warga belajar	1.817	2.003	2.469	3.011	4.296
3	Play Group (Kelompok Bermain)					
	- Jumlah Tutor	2.163	353	711	742	727
	- Jumlah Kelompok	243	82	220	223	227
	- Jumlah Warga Belajar	9.763	2.718	4.925	4.890	6.468
4	TPA (unit)					
	- Jumlah Tutor	313	353	320	321	326
	- Jumlah Kelompok	78	82	83	82	84
	- Jumlah Warga Belajar	2.842	2.718	2.160	2.012	2311
5	Satuan PAUD Sejenis (unit)					
	- Jumlah Tutor	1.165	794	640	708	715
	- Jumlah Kelompok	278	211	209	236	235
	- Jumlah Warga Belajar	20.523	6.295	4.032	4.615	5331
C	Hasil Pelayanan Publik					
1	Angka Partisipasi Kasar (%)					
	a. APK PAUD / Sederajat	78,29	99,83	96,88	98,35	99,02





No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	b. APK SD / Sederajat	116,98	100,04	100,41	98,12	98,86
	c. APK SMP / Sederajat	112,71	107,92	101,69	106,67	104,94
2	Angka Partisipasi Murni (%)					
	a. APM PAUD / Sederajat	-	88,45	83,08	76,56	67,65
	b. APM SD/ Sederajat	105,67	94,17	95,85	92,96	95,59
	c. APM SMP / Sederajat	85,91	86,90	84,51	86,42	77,07
3	Rasio Siswa Sekolah					
	a. PAUD / Sederajat	53,41	54,43	49,65	44,12	49,71
	b. SD / Sederajat	180,05	178,03	178,89	174,59	172,07
	c. SMP / Sederajat	332,53	328,19	311,75	318,42	312,35
4	Anak Tidak Sekolah					
	a. Usia 7-12 tahun	n/a	n/a	64	54	22
	b. Usia 13-15 tahun	n/a	n/a	199	192	129
	c. Usia 16-18 tahun	n/a	n/a	627	513	337
5	Rasio Siswa Guru					
	a. PAUD / Sederajat	14,00	11,00	13,00	12,09	17,00
	b. SD / Sederajat	16,00	15,00	18,00	15,89	17,00
	c. SMP / Sederajat	14,00	13,00	15,00	14,59	16,00
6	Rasio Siswa Kelas					
	a. PAUD / Sederajat	53,41	54,43	49,65	44,12	49,71
	b. SD / Sederajat	22,73	23,73	23,34	22,66	22,39
	c. SMP / Sederajat	29,73	23,53	30,40	30,49	30,23
7	Rata-rata kemampuan literasi					
	a. SD / Sederajat	-	-	-	59,92	63,78
	b. SMP / Sederajat	-	-	-	75,39	78,25
8	Rata-rata kemampuan Numerasi					
	a. SD / Sederajat	-	-	-	39,50	46,14





No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	b. SMP / Sederajat	-	-	-	59,17	62,63
9	Rata-Rata Nilai Hasil Belajar					
	a. UAN SD / Sederajat	70,35 (210,50)	70,14 (210,41)	n/a	n/a	n/a
	b. UAN SMP / Sederajat	64,13 (256,50)	66,44 (256,76)	n/a	n/a	n/a
10	Rata-Rata Nilai Hasil Belajar Program Kesetaraan					
	a. UAN Paket A setara SD	35,14	50,37	n/a	n/a	n/a
	b. UAN Paket B setara SMP	51,89	47,86	n/a	n/a	n/a
	c. UAN Paket C setara SMA	50,54	-	-	-	n/a
11	Rata-Rata Kelulusan (%)					
	a. SD	97,23	100,00	100,00	100,00	100,00
	b. SMP	99,08	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Persentase Guru yang Layak Mengajar					
	a. PAUD / Sederajat	74,53	84,38	83,57	95,01	92,31
	b. SD / Sederajat	89,94	93,16	92,78	99,11	97,91
	c. SMP / Sederajat	91,30	94,39	92,60	99,15	97,10
13	Angka Partisipasi Sekolah					
	a. SD / MI	117,11	100,90	99,94	99,95	99,98
	b. SMP / MTs	114,65	106,21	99,58	99,61	99,75
14	HLS dan RLS					
	a. Rata-Rata Lama Sekolah	10,66	10,67	10,91	10,92	10,94
	b. Harapan Lama Sekolah	16,71	16,72	16,73	16,74	16,76
Urusan Kesehatan						
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	74,69	74,77	74,81	74,92	75,00
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	4,06	4,09	4,43	3,71	4,91
3	Angka kelangsungan hidup bayi	995,89	995,91	995,57	996,29	995,09





No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
4	Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup	4,32	4,61	4,89	4,28	5,75
5	Angka kematian neo natal per 1.000 kelahiran hidup	2,59	3,27	3,42	3,15	4,25
6	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	50,44	59,43	62,17	363,40	91,61
7	Rasio posyandu per satuan balita	22,07	22,78	27,61	30,83	25,78
8	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,16	0,18	0,20	0,21	0,24
9	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
10	Rasio dokter per satuan penduduk	1,47	1,28	1,49	2,20	1,94
11	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1,82	1,55	1,79	3,18	3,08
12	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	99,99	99,99	99,99	99,99	91,96
14	Cakupan desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	95,38	89,83	79,35	97,99	97,69
17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	1,28	3,94	0,00	2,17	3,90
18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	39,18	47,81	33,73	11,72	31,80
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	30,88	26,21	37,91	35,94	61,01
20	Tingkat prevalensi Tuberculosis (per 100.000 penduduk)	96,00	104,21	71,86	84,15	161,29
21	Tingkat kematian karena Tuberculosis (per 100.000 penduduk)	3,024	1,961	3,611	1,288	0,734
22	Proporsi jumlah kasus Tuberculosis yang terdeteksi dalam program DOTS	30,88	26,21	37,91	35,94	61,01
23	Proporsi kasus Tuberculosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	86,59	87,88	87,21	56,40	58,70
24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
25	Penderita diare yang ditangani	59,19	82,34	69,13	11,92	24,15
26	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01





No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
27	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100	100	100
28	Cakupan kunjungan bayi	91,33	90,77	74,76	71,77	86,18
29	Cakupan puskesmas	147,06	147,06	147,06	147,06	147,06
30	Cakupan pembantu puskesmas	81,40	81,40	81,40	80,23	80,23
31	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	100,00	92,64	97,91	99,06	83,65
32	Cakupan pelayanan nifas	96,22	96,53	95,55	96,47	97,49
33	Cakupan neon atus dengan komplikasi yang ditangani	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34	Cakupan pelayanan anak balita	90,69	99,99	72,20	71,54	83,41
35	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	97,09	98,46	98,85	99,44	99,40
36	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	100,00	99,93	42,20	55,69	90,02
37	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
39	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40	Persentase balita gizi buruk	0,52	0,51	0,54	0,65	0,95
41	Persentase balita gizi kurang	7,32	7,66	5,98	6,37	7,78
42	Cakupan desa siaga aktif	100	100	100	100	100
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	Panjang Jalan (Km)					
	a. Jalan Nasional	61,66	61,66	61,66	61,66	61,66
	b. Jalan Provinsi	138,43	138,43	138,43	138,43	138,43
	c. Jalan Kabupaten	699,50	699,50	699,50	699,50	699,50
	d. Jalan Lingkungan/Poros Desa	2.046,50	2.046,50	2.046,50	2.046,50	2.046,50
2	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,5356	0,6678	0,6580	0,6453	0,3917





No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	a. Kondisi Jalan (Km)					
	- Baik	374,65	467,10	460,30	436,05	274
	- Sedang	241,05	148,95	155,85	195,80	327,80
	- Rusak Ringan	59,70	38,35	38,20	49,70	92,45
	- Rusak Berat	24,1	45,1	45,15	17,95	5,25
	b. Proporsi Panjang jalan Kabupaten kondisi baik	0,5356	0,6678	0,6580	0,6453	0,3917
	c. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,000660	0,000650	0,000647	0,000643	0,000643
	d. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)	88,02	88,07	88,08	90,33	86,03
3	Persentase jalan kabupaten dengan trotoar atau saluran drainase (%)	27,54	28,42	29,98	30,44	30,68
	a. Panjang drainase (Km)	198,813	209,697	212,916	214,616	222.235
	- Baik	127,800	135,295	137,402	145,884	161.675
	- Sedang	53,938	21,575	58,712	51,046	51.046
	- Rusak	17,075	52,827	16,802	17,682	17.682
	b. Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	65,05	64,28	64,52	64,53	72,74
4	Rasio Jaringan Irigasi (Km)	0,0006145	0,0001256	0,0001251	0,0001242	n/a
	a. Panjang Saluran Irigasi	650,411	655,590	655,590	655,590	655.590
	b. Kondisi Saluran Irigasi					
	- Baik	387,890	466,147	432,480	467,816	504.708
	- Sedang	125,265	156,278	169,945	130,656	106.359
	- Rusak	137,256	53,164	53,164	57,117	44.522
	c. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	59,64	68,05	65,97	71,36	76,99
	d. Rasio Jaringan Irigasi (hektar)	0,0206	0,0202	0,0202	0,0200	0,0202
5	Persentase penduduk berakses air minum (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (%)	28,22	21,18	21,53	20,60	21,41





No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
7	Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk	24,857	24,548	23,157	21,860	21,844
8	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan (%)	10,55	10,55	6,48	6,47	6,47
9	Jumlah bangunan ber-IMB/PBG	128.175	133.617	140.557	141.621	141.621
10	Rasio bangunan ber-IMB /PBG per satuan bangunan (%)	41,85	43,73	45,78	46,02	46,02
11	Sertifikat Laik Fungsi (buah)	36	280	404	199	755
12	Luasan RTH Publik yang dikelola (ha)	883,60	885,01	885,70	885,70	1.138,53
13	Persentase Luasan RTH Publik yang dikelola	30,05	30,10	30,12	35,17	10,58
14	Penggunaan Lahan (ha)					
	a. Hutan (ha)	1.742,23	1.742,23	1.742,23	1.742,23	n/a
	b. Pekarangan (ha)	23.628,43	24.335,42	24.472,13	24.527,27	n/a
	c. Sawah (ha)	18.764,78	18.645,98	18.595,75	18.569,97	n/a
	d. Tanah Tandus (ha)	9.192,65	8.652,01	7.387,03	8.742,97	n/a
	e. Lainnya (ha)	4.153,91	4.106,36	5.284,86	3.899,56	n/a
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	98,20	99,68	99,86	8,61	21,82
2	Persentase kawasan kumuh yang tertangani (%)	70,03	82,52	82,52	8,85	8,85
3	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	0,39	0,23	0,23	0,70	0,80
4	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (%)	99,70	99,92	99,93	99,61	99,2
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						
1	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	0,93	1,12	1,12	1,12	0,96
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten %	36,08	36,08	36,08	36,08	36,08
4	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	78,79	100,00	95,00	89,66	91,80





No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
5	Persentase penegakan perda	100,00	100,00	100,00	70,00	37,00
6	Jumlah gladi lapang penanggulangan bencana	137	161	174	182	198
7	Desa tangguh bencana (desa)	45	55	62	69	71
8	Satuan Pendidikan aman bencana (unit)	55	68	72	73	87
9	Barak Pengungsian	12	12	12	12	12
10	Jumlah Komunitas Relawan	53	58	58	62	70
11	Jumlah Relawan Teregistrasi	2.198	2.215	2.362	2.512	2.889
12	EWS Tanah Longsor	3	3	3	3	3
13	EWS Lahar Hujan	15	15	15	15	15
14	EWS Erupsi Merapi	19	19	19	19	19
15	Jumlah desa rawan bencana	86	86	86	86	86
16	Jumlah penanggulangan bencana (kejadian)	125	120	149	133	208
	a. Erupsi	-	-	-	-	-
	b. Gempa bumi	-	-	1	-	-
	c. Banjir	11	6	18	11	22
	d. Banjir lahan hujan	-	-	2	4	8
	e. Tanah longsor	38	22	56	38	94
	f. Angin kencang	64	78	70	78	73
	g. Petir	11	13	2	2	10
	h. Kekeringan	1	1	-	-	1
17	Jumlah korban jiwa akibat bencana	4	3	12	-	-
	a. Erupsi	-	-	-	-	-
	b. Gempa bumi	-	-	-	-	-
	c. Banjir	-	-	10	-	-
	d. Banjir lahan hujan	-	-	-	-	-
	e. Tanah longsor	3	-	-	-	5
	f. Angin kencang	1	2	2	-	6





No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	g. Petir	-	1	-	1	1
	h. Kekeringan	-	-	-	-	-
18	Jumlah kerugian material akibat bencana (ribu rupiah)	1.584.825	4.325.279	1.512.350	16.911.402	6.176.030
	a. Erupsi				-	-
	b. Gempa bumi	-	-	500	-	-
	c. Banjir	57.000	553.500	97.500	15.035	138.200
	d. Banjir lahan hujan	-	-	-	884.612	164.500
	e. Tanah longsor	970.125	2.611.179	919.800	443.900	4.015.180
	f. Angin kencang	540.700	1.150.200	478.200	437.890	1.791.150
	g. Petir	17.000	10.400	16.350	110.000	87.000
	h. Kekeringan	-	-	-	-	-
19	Dana penanggulangan bencana	181.300	317.280	369.810	351.520	459.910
Urusan Sosial						
1	Anak dengan bantuan hukum	41	26	-	64	n/a
2	Anak balita terlantar	142	144	141	116	279
3	Anak terlantar	2.784	2.756	2.377	2.294	1.984
4	Anak jalanan	20	20	12	11	112
5	Anak dengan kedisabilitas	427	526	592	583	695
6	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan /diperlakukan salah	9	207	4	0	48
7	Anak memerlukan perlindungan khusus	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
8	Lanjut usia terlantar	6.600	6.813	7.466	6.969	6.691
9	Penyandang disabilitas	6.079	6.446	6.891	6.579	6.855
10	Tuna Susila	85	76	66	130	50
11	Gelandangan	60	64	26	19	22
12	Pengemis	33	33	23	18	17
13	Pemulung	104	105	90	86	97





No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
14	Kelompok minoritas	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	20	16	12	8	36
16	Korban penyalahgunaan napza/KPN	191	n/a	171	131	103
17	Korban tindak kekerasan	223	207	169	153	108
18	Pekerja migran bermasalah sosial	94	125	103	95	76
19	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	1.046	1.175	n/a	1.446	n/a
20	Korban bencana alam	21	n/a	210	n/a	n/a
21	Korban bencana sosial	n/a	n/a	3.301	n/a	n/a
22	Keluarga bermasalah sosial psikologis	1.379	1.475	1.387	1.282	1.095
23	Fakir miskin	146.906	142.779	134.815	176.026	n/a
24	Korban Trafficking	1	n/a	n/a	n/a	
25	PRSE	2.435	2.435	2.652	2.647	2.920
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Urusan Tenaga Kerja						
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (kasus)	30	25	39	28	18
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama/PB (%)	100,00	84,00	53,85	12,00	44,44
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	80,27	57,03	67,94	63,31	71,61
4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	54,45	54,45	54,94	80,13	86,60
5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	52,31	75,03	66,13	29,63	66,13
6	Jumlah penduduk (jiwa)	1.058.368	1.070.913	1.079.916	1.088.109	1.089.365
7	Penduduk usia kerja ≥15 tahun (jiwa)	830.851	842.358	871.640	903.345	860.512
	a. Angkatan Kerja (jiwa)	601.570	629.056	630.583	630.847	626.348
	- Bekerja (jiwa)	566.891	605.822	589.028	587.935	592.259
	- Penganggur (jiwa)	34.780	23.234	41.555	42.912	34.089





No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	b. Bukan Angkatan Kerja (jiwa)	229.283	213.302	241.057	272.498	234.164
	- Sekolah (jiwa)	129.316	116.194	138.431	150.531	131.908
	- Mengurus Rumah Tangga (jiwa)	53.322	50.382	50.589	73.143	57.623
	- Menerima Pendapatan lainnya (jiwa)	46.645	46.726	52.037	48.824	44.633
	- Anak (jiwa)	227.515	228.555	208.276	183.994	228.853
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72,40	74,67	72,34	69,83	72,79
9	Rasio Penduduk yang Bekerja	94,23	96,31	93,41	93,20	94,56
10	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia ≥ 15 tahun	0,26	0,58	0,10	0,10	1,01
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1	Jumlah kursi diduduki perempuan di DPR (orang)	13	13	13	14	14
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	26	26	26	28	28
3	Rasio KDRT (%)	0,08	0,04	0,07	0,05	0,06
4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00





No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
9	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Urusan Pangan						
1	Skor pola pangan harapan / PPH	88,83	91,22	86,54	90,93	96,60
2	Ketersediaan pangan utama (ton)	149.214,20	142.031,84	144.879,15	152.963,54	162.239,46
3	Ketersediaan cadangan pangan (kg)	62.832,00	72.832,00	82.832,00	97.832,00	112.832
4	Ketersediaan energi per kapita (kg)	3.080	3.080	2.800	2.828	2.608
5	Ketersediaan protein per kapita (%)	88,83	98,28	63,00	65,10	76,36
Urusan Pertanahan						
1	Luas lahan bersertifikat	419.293.558	438.537.021	444.615.088	452.197.303	452.612.381
2	Jumlah sertifikat tanah (buah)	615.184	653.770	670.331	683.476	687.263
3	Jumlah kasus terdaftar	85	140	86	58	24
4	Jumlah kasus yang terfasilitasi	85	140	86	58	24
5	Persentase kasus yang terfasilitasi (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Penyelesaian izin prinsip/izin lokasi (buah)	21	16	11	142	n/a
7	Jumlah bangunan ber-IMB	3.380	5.442	6.940	5782	n/a
Urusan Lingkungan Hidup						
1	Indeks Kualitas Air	41,33	46,33	41,33	43,33	43,54
2	Indeks Kualitas Udara	78,73	77,46	86,66	83,77	83,99
3	Indeks Kualitas Lahan	34,42	34,43	34,71	30,52	31,73
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	49,79	51,02	58,21	56,90	57,33
5	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan yang diawasi ketaatannya	85,94	84,06	100,00	100,00	104,35





No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	terhadap PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah (%)					
6	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten (%)	100,00	92,31	100,00	100,00	100,00
Urusan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil						
1	Cakupan penerbitan KK (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Cakupan penerbitan KTP-el (%)	98,63	99,68	99,98	99,50	99,12
3	Cakupan penerbitan KIA (%)	17,04	43,33	56,93	70,69	71,69
4	Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	96,01	98,77	97,62	100,00	100,00
5	Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	90,56	99,16	100,00	100,00	100,00
6	Cakupan penerbitan kutipan akta perkawinan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Kartu Keluarga	54.294	85.740	99.516	116.477	109.847
8	KTP el	88.471	106.969	115.808	100.626	88.547
9	KIA	4.882	40.823	55.756	45.067	45.281
10	Akta Kelahiran	11.725	12.973	11.795	11.511	20.689
11	Akta Kematian	6.744	8.467	12.280	12.656	13.613
12	Layanan Pindah Datang	19.754	19.920	16.888	19.008	14.291
13	Layanan Pindah Keluar	11.967	11.416	9.995	11.485	11.027
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa						
	-					
Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana						
1	Laju pertumbuhan penduduk	1,61	1,01	0,67	0,98	1,10
2	Total fertility rate (TFR)	1,90	2,00	1,90	1,90	1,90
3	Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB (%)	60,42	60,42	83,33	84,00	84,00





No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
4	Persentase perangkat daerah (dinas/badan yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (%))	56,25	56,25	56,25	56,25	56,25
5	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	56,25	56,25	56,25	56,25	56,25
6	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,76	2,97	2,97	2,94	2,88
7	Rasio Akseptor KB	76,51	76,59	77,94	77,67	76,81
8	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun (%)	0,35	0,01	0,1	0,21	n/a
9	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) (%)	9,50	9,04	7,95	7,57	7,92
10	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) (%)	38,41	38,50	39,08	39,28	23,1
11	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	76,51	76,59	77,34	77,67	76,81
12	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	89,70	87,98	88,55	87,33	87,33
13	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)	88,30	86,00	86,79	86,15	86,15
14	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	86,70	8,73	84,40	87,06	87,06
15	Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa (%)	159,30	162,79	163,95	165,12	0,00065
16	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri (%)	88,26	87,18	85,35	85,28	n/a





No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
18	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan (%)	32,82	32,82	93,20	93,20	79,81
20	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Urusan Perhubungan						
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum tanpa angkutan perkotaan	495.000	406.394	62.563	80.793	28.174
2	Jumlah arus penumpang angkutan umum dengan angkutan perkotaan	n/a	n/a	814.643	1.386.717	1.967.985
3	Rasio izin trayek	0,00011	0,000093	0,00028	0,00027	0,00026
4	Jumlah uji KIR angkutan umum	2.914	3.222	2.021	1.904	2.248
5	Jumlah bandara	1	1	1	1	1
6	Jumlah terminal bus	4	4	4	4	4
7	Persentase layanan angkutan darat tanpa angkutan perkotaan (%)	14,8	6,00	27,58	12,86	24,61
8	Persentase layanan angkutan darat dengan angkutan perkotaan (%)	n/a	n/a	4,80	3,39	1,56
9	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	90	91	n/a	n/a	n/a
10	Pemasangan rambu-rambu	200	n/a.	43	1	64
11	Jumlah orang melalui bandara/terminal per tahun tanpa angkutan perkotaan	495.000	406.394	62.563	80.793	28.174





No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
12	Jumlah orang melalui bandara/terminal per tahun dengan angkutan perkotaan	n/a	n/a	814.643	1.386.717	1.967.985
Urusan Komunikasi dan Informatika						
1	Cakupan pengembangan & pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kapanewon (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Cakupan layanan telekomunikasi (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Menara telekomunikasi	518	518	518	547	557
4	Website domain	1	1	1	1	1
5	Sub-domain	117	150	160	231	235
6	Sistem informasi manajemen (SIM)	72	74	85	91	101
7	SIM terintegrasi	24	38	39	51	55
8	Infrastruktur jaringan WAN	274	277	297	359	460
9	Infrastruktur jaringan LAN	2000	2129	4563	4661	5500
10	Jumlah server	72	72	72	72	73
11	Radio komunikasi (<i>repeater</i> / link)	7	7	7	7	7
12	Radio komunikasi (<i>base stasiun</i> / RIG)	22	22	22	22	22
13	Booklet dan leaflet	2500	7000	5500	13750	1085
14	Pembuatan baliho/advertorial (buah)	29	62	105	11	17
15	Sosialisasi melalui TV (kali)	46	41	35	1	4
16	Sosialisasi melalui Radio (kali)	474	182	410	15	10
17	Pengkajian Opini Masyarakat (kali)	1	1	1	1	1
18	Sarana Telekomunikasi (buah)	856	856	856	856	856
Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah						
1	Jumlah koperasi aktif	413	383	341	355	326
2	Jumlah koperasi	444	410	407	421	419
3	Persentase koperasi aktif (%)	93,01	93,41	83,78	84,38	77,8
4	Usaha mikro (unit)	35.682	40.887	67.414	89.197	90.535





No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
5	Jumlah UMKM (unit)	36.653	41.852	68.382	89.871	90.557
6	Persentase usaha mikro dan kecil	97,35	97,69	99,95	99,25	99,99
7	Koperasi Serba Usaha	83	92	90	87	81
8	Koperasi Simpan Pinjam	86	67	67	66	67
9	Koperasi Pegawai Negeri Ri	72	71	69	70	68
10	Koperasi Karyawan	33	28	28	25	25
11	Koperasi Unit Desa (Kud)	17	17	17	17	16
12	Koperasi Pepabri	14	13	12	13	13
13	Koperasi Pertanian	11	13	13	13	15
14	Koperasi Wanita	9	9	9	10	10
15	Koperasi Mahasiswa	8	8	8	7	6
16	Koperasi Angkatan Darat	5	7	7	5	6
17	Koperasi Wredatama	4	5	5	5	5
18	Koperasi Pondok Pesantren	4	4	4	4	4
19	Koperasi Angkatan Udara	5	4	4	4	3
20	Koperasi Peternakan	4	4	4	4	4
21	Koperasi Pasar	4	4	4	4	3
22	Koperasi Angkutan Darat	2	2	2	4	3
23	Koperasi Lainnya	83	62	64	81	90
Urusan Penanaman Modal						
1	Jumlah investor berskala nasional					
	PMDN (unit)	88	119	268	404	541
	PMA (unit)	80	100	109	111	121
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional					
	PMDN (Rp dalam Juta)	5.584.260	6.475.060	7.034.606	8.802.775	9.895.541
	PMA (US\$)	193.830.919	209.380.604	214.463.803	224.937.204	242.632.203
3	Rasio daya serap tenaga kerja	68,23	71,92	67,58	72,01	64,94
4	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (%)	43,43	15,95	8,64	25,14	12,41





No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
5	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMA (%)	(-17,64)	8,02	3,28	6,63	7,87
Urusan Kepemudaan dan Olah Raga						
1	Persentase organisasi pemuda dan sosial kemasyarakatan yang aktif (%)	87,50	92,86	93,48	95,65	99,71
2	Persentase wirausaha muda (%)	15,63	16,5	16,96	17,27	0,34
3	Cakupan pembinaan olahraga (%)	64,00	69,23	71,79	71,79	19,33
4	Cakupan pelatih yang bersertifikasi (%)	89,05	80,87	90,87	90,87	97,78
5	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	91,00	69,98	29,32	56,80	97,10
6	Jumlah atlet berprestasi*	7	8	1	20	65,30
7	Jumlah prestasi olahraga	53	75	30	3	7
Urusan Statistik						
1	Tersedianya buku profil daerah (Kabupaten Sleman Dalam Angka)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Buku PDRB	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Urusan Persandian						
1.	Persentase pengguna layanan informasi melalui peralatan dan jaringan telekomunikasi terlayani dan terlindungi keamanannya	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Penanganan insiden dan permohonan layanan dengan waktu kerja layanan selama 24 jam dan akan direspon maksimal 30 menit setelah pelaporan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Pelaksanaan <i>vulnerability assessment</i> (penilaian kerentanan) dan <i>penetration test</i> terhadap subdomain yang di-hosting di server milik Pemerintah Kabupaten Sleman	65,00	65,00	70,00	75,00	75,00
Urusan Kebudayaan						
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kegiatan)	28	288	393	399	436
2	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya	800	800	800	800	800





No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
3	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	245	270	290	153	178
4	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%)	30,62	33,75	36,25	19,13	22,3
5	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (unit)	2	1	1	1	2
Urusan Perpustakaan						
1	Rasio jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	0,5767	0,57787	0,13380	0.1579	0,1300
2	Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (%)	0,7115	0,7172	0,6408	0,6745	0,6638
3	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	0,6556	0,7017	0,6936	0,6297	0,6885
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan / tahun	1.797	1.808	640	597	500
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan (judul)	33,791	35.773	32.568	38.989	40.206
6	Persentase jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (%)	75,00	77,78	50,00	58,33	23.08
Urusan Kearsipan						
1	a. Pelestarian Arsip (kali)	4	4	2	2	1
	b. Arsip Dinamis (berkas)	433.411	479.583	475.747	504.988	290.908
	Arsip Vital (berkas)	17.861	17.861	17.662	18.328	18.328
	Arsip Aktif (berkas)	229.586	255.095	228.499	228.499	253.970
	Arsip Inaktif (berkas)	185.964	206.627	229.586	258.161	18.610
	c. Arsip Statis (berkas)	22.530	22.984	25.733	25.939	26.317
	d. Arsip Tekstual (boks)	2.066	2.076	2.088	2.088*)	1.858
	e. Arsip Audio (buah)	17	20	20	20	68
	f. Arsip Audio visual (buah)	62	74	109	109	323
	g. Arsip Foto (lembar)	709	1.245	1.685	1685	3514
	h. Arsip Peta/Kartografi dan Kearsitekturan (lembar)	665	988	1.017	1017	1726





No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
2	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	79,17	81,25	100,00	93,75	97,92
3	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (jiwa)	70	71	62	88	98
4	Jumlah SDM pengelola kearsipan (Jiwa)	221	188	327	333	333
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Urusan Kelautan dan Perikanan						
1	Jumlah Produksi Ikan Konsumsi (ton)	59.781,40	67.850,00	54.552,11	54.625,82	54.968,62
2	Kebutuhan Produksi Ikan (kg)	39.278.540,00	36.699.282,00	40.765.363,00	40.340.276,90	40.448.122,00
3	Tingkat Konsumsi ikan (kg / kapita / tahun)	32,55	32,55	36,21	37,10	37,13
4	Tingkat ketersediaan ikan (kg / kapita / tahun)	33,99	36,71	37,39	37,39	37,31
Urusan Pariwisata						
1	Wisata Alam (jenis)	4	4	8	18	18
2	Wisata Candi	12	12	9	10	10
3	Wisata Museum	14	14	8	20	20
4	Kegiatan Luar (event)	5	5	1	2	2
5	Kategori Desa Wisata	39	39	53	53	80
6	Jumlah Wisatawan (jiwa)	8.531.738	10.378.118	4.250.119	1.728.418	7.171.071
	a. Nusantara	8.224.033	10.145.104	4.226.075	1.723.256	7.105.769
	b. Mancanegara	307.705	233.014	24.044	5.162	65.302
7	Persentase Wisatawan (%)					
	a. Nusantara	96,39	97,75	99,43	99,70	99,09
	b. Mancanegara	3,61	2,25	0,57	0,30	0,91
8	Kontribusi terhadap Total PAD (%)	24,42	27,42	8,84	18,34	28,65
9	Kontribusi terhadap PDRB HB (%)	10,16	10,36	8,84	8,56	n/a
Urusan Pertanian						
1	Cakupan bina kelompok tani (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Produktivitas padi/bahan pangan utama lokal (kuintal/ha)	53,37	58,52	59,35	60,12	60,01





No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
3	Produksi sektor pertanian dan peternakan (ton)					
	a. Padi sawah	246.539,00	242.707,00	245.291,80	253.708,00	255.144
	b. Padi ladang	3.339,00	1.569,00	1.568,61	1.626,87	1.564,00
	c. Jagung	31.558,00	35.502,00	37.473,80	33.722,76	34.066,17
	d. Kedelai	211,00	51,00	21,00	228,46	71,81
	e. Kacang tanah	4.516,00	4.084,00	4.453,88	3.733,00	
	f. Ubi kayu	8.631,00	9.468,00	8.060,11	5.026,00	8.394,00
	g. Ubi jalar	1.728,00	141,00	1.619,71	1.737,00	1.513,00
	h. Talas	1.156,00	871,00	947,14	947,14	
	i. Ganyong	129,00	85,00	128,85	128,85	
	j. Irut	569,00	522,00	422,15	422,15	
	k. Sayuran	394.667,63	256.600,23	434.913,73	252.759,56	
	l. Buah-buahan	262.302,93	235.305,43	855.960,67	886.172,3	
	m. Daging (ton)	13.330,79	24.721,93	13.251,04	14.944,15	22.106,40
	n. Telur (ton)	16.309,91	16.390,28	12.707,30	13.705,23	14.475,50
	o. Susu sapi (liter)	3.819.360,00	3.829,94	4.982.849,75	5.222.128,00	4.817.312,25
4	Jumlah produksi komoditas perkebunan					
	a. Kelapa	67.492,97	6.270,18	62.641,67	62.641,70	77.837,65
	b. Kakao	705,69	12,00	115,04	115,04	
	c. Mete	133,52	5,01	48,25	48	45,94
	d. Kopi Robusta	2.396,17	58,88	581,67	581,90	663,33
	e. Kopi Arabica	554,70	9,51	172,63	172,80	160,75
	f. Mendong	785,70	377,00	377,00	376,70	377,00
	g. Lada	172,93	1,04	12,57	13,00	13,97
	h. Tembakau rakyat	1.373,00	2.131.83,00	3.012,90	3.012,00	1.844,12
	i. Panili	2,56	0,34	5,16	5,30	
	j. Tebu	2.053.624,00	30.440,00	336.537,20	409.075,39	29.595,28





No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Urusan Perdagangan						
1	Pasar desa	41	41	41	44	41
2	Pasar lokal/kabupaten	35	37	37	35	34
3	Pasar hewan	2	2	2	2	2
4	Usaha perdagangan milik pemerintah kabupaten	6	6	6	5	5
5	Toko modern					
	a. Minimarket cabang/waralaba nasional	203	209	219	226	279
	b. Toko modern lokal	184	187	212	213	214
	c. Pusat perbelanjaan	4	4	4	5	5
	d. Perbakulan/grosir	2	2	2	2	2
	e. Hypermarket	5	5	5	8	8
	f. Supermarket	12	14	14	21	21
	g. <i>Department store</i>	7	8	8	3	3
Urusan Perindustrian						
1	Kontribusi Sektor Industri PDRB ADHB (%)	13,19	13,12	13,44	13,06	13,40
2	Jumlah Usaha Industri	16.945	17.016	11.362	11.445	11.571
3	Pertumbuhan Industri (%)	0,28	0,42	-3,4	2,1	2,2
4	Jumlah industri kecil & rumah tangga (unit)	16.770	16.898	11.153	11.233	11.353
Urusan Transmigrasi						
-						
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Urusan Sekretariat Daerah						
-						
Urusan Sekretariat DPRD						
-						
URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Urusan Perencanaan						





No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
-						
Urusan Keuangan						
1	Hasil Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA terhadap realisasi APBD	15,4	14,35	14,43	16,41	9,39
3	Persentase SILPA terhadap APBD	13,73	12,81	13,09	14,54	8,67
4	Jumlah program tidak dilaksanakan	0	0	0	0	0
5	Jumlah kegiatan tidak dilaksanakan	0	0	0	0	0
6	Persentase belanja pendidikan (%)	28,75	25,78	23,64	28,89	29,20
7	Persentase belanja kesehatan (%)	13,38	12,78	14,78	19,36	16,40
8	Persentase belanja langsung (%)	45,89	46,21	49,25	45,72	44,72
9	Persentase belanja tidak langsung (%)	54,11	53,79	50,75	54,21	55,28
10	Persentase belanja bagi hasil kabupaten/desa	2,13	2,22	1,74	8,06	2,68
Urusan Kepegawaian						
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	10,04	16,73	13,51	56,1	36,80
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	2,47	4,60	3,60	12,9	7,05
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)	82,60	79,02	81,85	78,6	53,07
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	34	33	30	28	35
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi Pemerintah	755	741	688	793	2.470
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	5.950	6.174	5.739	6115	6.138
Urusan Pendidikan dan Pelatihan						
1	Diklatpim Tingkat II	7	2	-	1	2
2	Diklatpim Tingkat III	18	10	10	10	18
3	Diklatpim Tingkat IV	30	10	12	20	10





No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
4	Diklat Teknis	174	72	51	131	195
5.	Pemberian Izin Belajar	68	100	102	104	232
	- Paket B	-	-	1	-	13
	- Paket C	-	2	-	-	60
	- Spesialis	-	-	1	-	-
	- Sub spesialis	-	-	-	2	-
	- UPER	-	-	-	-	-
	- D2	-	-	-	-	-
	- D3	19	1	1	-	-
	- D4/S1	22	40	35	44	58
	- S2	26	54	53	58	68
	- S3	-	-	-	-	-
	- Profesi	1	3	11	-	33
6.	Pengiriman tugas belajar	8	8	2	2	14
	- D3	-	-	-	-	-
	- D4	-	-	-	-	-
	- S1	3	1	-	-	5
	- S2	5	7	2	2	9
Urusan Penelitian dan Pengembangan						
-						
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						
Urusan Inspektorat Daerah						
1	Jumlah obyek pemeriksaan	94	121	71	83	73
2	Jumlah temuan inspektorat	103	119	22	14	38
3	Jumlah temuan inspektorat yang ditindaklanjuti	85	94	18	12	30
4	Persentase tindak lanjut temuan (%)	82,52	78,99	81,82	85,71	78,95
5	Jumlah temuan BPK	415	436	461	466	491





No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
6	Jumlah rekomendasi BPK	818	848	902	936	965
7	Jumlah tindak lanjut sesuai rekomendasi BPK	807	778	787	815	917
8	Persentase tindak lanjut sesuai rekomendasi BPK (%)	98,66	91,74	87,25	87,07	95,03
UNSUR KEWILAYAHAN						
Kecamatan						
-						
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
Kesatuan Bangsa dan Politik						
-						

